Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor : 25
Tanggal : 4 Juli 2022

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

RKPD 2023

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai hasil kegiatan.
17. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

(2) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2023.

(3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :
   a. Renja PD Kota Pekalongan Tahun 2023;
   b. Rancangan KUA serta PPAS, dan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

(4) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

   Memuat latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

   Memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

   Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

   Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 2023, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

   Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

   Memuat indikator kinerja tahun 2023.

g. BAB VII PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran sub kegiatan, hasil kegiatan dan *outcome* masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
   c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
   d. pergeseran pagu, penghapusan dan/atau penambahan kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan dan/atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Juli 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 4
1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 5
1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 7
1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2023 8
1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 9
1.3.5. RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2023 9
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 9
1.4.1. Maksud 9
1.4.2. Tujuan 9
1.5. SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2023 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 13
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi 13
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 34
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 68
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 173
2.2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2021 194
2.2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2021 194
2.2.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2021 202
2.2.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 246
2.2.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2021 253
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 278
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 278
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 280
2.7. Isu Strategis 287

2.7.1. Tata Kelola Pemerintahan 288
2.7.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup 288
2.7.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman 290
2.7.4. Peningkatan Derajat Kesehatan 292
2.7.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran 294
2.7.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 295
2.7.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal 296
2.7.8. Pelestarian Budaya Lokal 299
2.7.9. Kondusivitas Wilayah 299
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 301
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 301
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 302
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 306
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 311
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 311
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 312
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 321
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 321
4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026 321
4.1.2. Misi 325
4.1.3. Tujuan Dan Sasaran 329
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023 339
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional 340
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 350
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan 353
4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 369
4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD 372
4.2.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan 373
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 379
5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023 379
5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 379
5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 383
5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 390
5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 393

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 393
5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 395
5.1.7. Unsur Kewilayahan 395
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum 396
5.1.9. Non Urusan 397
5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 933
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 935
6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2023 935
6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 936
BAB VII PENUTUP 945
DAFTAR PUSTAKA 947

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026	5
Tabel 1.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	7
Tabel 1.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8
Tabel 2.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan	15
Tabel 2.2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2021	20
Tabel 2.3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021	21
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021	31
Tabel 2.5	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2017-2021	33
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2021 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)	33
Tabel 2.7	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 (persen)	36
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021	42
Tabel 2.9	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021	44
Tabel 2.10	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2017 – 2021	44
Tabel 2.11	Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2020	45
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	47
Tabel 2.13	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021	54
Tabel 2.14	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2017-2021	55
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	59
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2020	59
Tabel 2.17	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-20219	60
Tabel 2.18	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2021	60

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 60
Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2020 61
Tabel 2.21 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 62
Tabel 2.22 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 63
Tabel 2.23 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 64
Tabel 2.24 Prevalensi Balita Stunting Kota PekalonganTahun 2017-2021 64
Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 66
Tabel 2.26 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 67
Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 67
Tabel 2.28 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 67
Tabel 2.29 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 68
Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 69
Tabel 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 69
Tabel 2.32 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 70
Tabel 2.33 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 70
Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 70
Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 71
Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 71
Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 72
Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 – 2021 72
Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2017 – 2021 73
Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI danSMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 73
Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 73

Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2017 – 2021 74
Tabel 2.43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 74
Tabel 2.44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 75
Tabel 2.45 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2021 75
Tabel 2.46 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 76
Tabel 2.47 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 76
Tabel 2.48 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2017 - 2021 77
Tabel 2.49 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 77
Tabel 2.50 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 78
Tabel 2.51 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 - 2021 78
Tabel 2.52 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2017 - 2021 79
Tabel 2.53 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 80
Tabel 2.54 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 80
Tabel 2.55 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 81
Tabel 2.56 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2017 - 2021 82
Tabel 2.57 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2017 - 2021 83
Tabel 2.58 Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 84
Tabel 2.59 Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan 85
Tabel 2.60 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 85
Tabel 2.61 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2017–2021 86
Tabel 2.62 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 86
Tabel 2.63 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 87

Tabel 2.64 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 87
Tabel 2.65 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 87
Tabel 2.66 Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota PekalonganTahun 2021 88
Tabel 2.67 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 88
Tabel 2.68 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2021 89
Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 91
Tabel 2.70 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029 91
Tabel 2.71 Perkembangan Jumlah Bangunan ber-IMB di Kota Pekalongan Tahun 2027-2021 92
Tabel 2.72 Perkembangan Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih dan Tersertifikasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2021 93
Tabel 2.73 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 93
Tabel 2.74 Data Kebutuhan Rumah (Backlog) di Kota Pekalongan Tahun 2021 94
Tabel 2.75 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 94
Tabel 2.76 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 95
Tabel 2.77 Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2021 95
Tabel 2.78 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2021 96
Tabel 2.79 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2017 – 2021 97
Tabel 2.80 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 97
Tabel 2.81 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 98
Tabel 2.82 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 99
Tabel 2.83 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 99
Tabel 2.84 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 100
Tabel 2.85 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021 101

Tabel 2.86 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2017–2021 101
Tabel 2.87 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 102
Tabel 2.88 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2017 – 2021 103
Tabel 2.89 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 105
Tabel 2.90 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 105
Tabel 2.91 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 108
Tabel 2.92 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 109
Tabel 2.93 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 109
Tabel 2.94 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 110
Tabel 2.95 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 112
Tabel 2.96 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 114
Tabel 2.97 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 114
Tabel 2.98 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 115
Tabel 2.99 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 117
Tabel 2.100 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 118
Tabel 2.101 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 120
Tabel 2.102 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 120
Tabel 2.103 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 121
Tabel 2.104 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 121
Tabel 2.105 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 122
Tabel 2.106 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 122
Tabel 2.107 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 123
Tabel 2.108 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan 124
Tabel 2.109 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan 125
Tabel 2.110 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 127

Tabel 2.111 Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 127
Tabel 2.112 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 128
Tabel 2.113 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 129
Tabel 2.114 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 129
Tabel 2.115 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2017 – 2021 129
Tabel 2.116 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2017 – 2021 130
Tabel 2.117 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 130
Tabel 2.118 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2017 – 2021 132
Tabel 2.119 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 132
Tabel 2.120 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 133
Tabel 2.121 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 133
Tabel 2.122 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2021 133
Tabel 2.123 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2017 - 2021 134
Tabel 2.124 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 135
Tabel 2.125 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2017-2021 135
Tabel 2.126 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 136
Tabel 2.127 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2017-2021 136
Tabel 2.128 Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019 dan 2021 137
Tabel 2.129 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 137
Tabel 2.130 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 138
Tabel 2.131 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 138
Tabel 2.132 Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 139
Tabel 2.133 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 140
Tabel 2.134 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 140

Tabel 2.135 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 141
Tabel 2.136 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2021 142
Tabel 2.137 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2019-2021 142
Tabel 2.138 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 143
Tabel 2.139 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 143
Tabel 2.140 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 144
Tabel 2.141 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2021 145
Tabel 2.142 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017 - 2021 145
Tabel 2.143 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 (kg) 146
Tabel 2.144 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 (kg/kapita/tahun) 147
Tabel 2.145 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 147
Tabel 2.146 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 148
Tabel 2.147 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 148
Tabel 2.148 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020 149
Tabel 2.149 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 149
Tabel 2.150 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 150
Tabel 2.151 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 150
Tabel 2.152 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 151
Tabel 2.153 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 152
Tabel 2.154 Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2021 152
Tabel 2.155 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 153
Tabel 2.156 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 155
Tabel 2.157 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 155
Tabel 2.158 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 155
Tabel 2.159 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 156
Tabel 2.160 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 156

Tabel 2.161 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 157
Tabel 2.162 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 157
Tabel 2.163 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 158
Tabel 2.164 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2021 159
Tabel 2.165 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 161
Tabel 2.166 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021 162
Tabel 2.167 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2021 164
Tabel 2.168 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2021 164
Tabel 2.169 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 166
Tabel 2.170 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 167
Tabel 2.171 Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 167
Tabel 2.172 Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2021 169
Tabel 2.173 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 171
Tabel 2.174 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 171
Tabel 2.175 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 172
Tabel 2.176 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 172
Tabel 2.177 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 172
Tabel 2.178 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2017 – 2021 173
Tabel 2.179 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 174
Tabel 2.180 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021 177
Tabel 2.181 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 178
Tabel 2.182 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 178
Tabel 2.183 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha 179
Tabel 2.184 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2018 -2021 182
Tabel 2.185 Inovasi Daerah Bidang Kesehatan 190

Tabel 2.186 Inovasi Daerah Lainnya 191
Tabel 2.187 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan 193
Tabel 2.188 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan 194
Tabel 2.189 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2021 195
Tabel 2.190 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021 202
Tabel 2.191 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021 203
Tabel 2.192 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2021 205
Tabel 2.193 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021 207
Tabel 2.194 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2021 209
Tabel 2.195 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kota Pekalongan Tahun 2021 210
Tabel 2.196 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020 211
Tabel 2.197 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021 212
Tabel 2.198 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kota Pekalongan Tahun 2021 213
Tabel 2.199 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2021 214
Tabel 2.200 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021 215
Tabel 2.201 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021 216
Tabel 2.202 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2021 217
Tabel 2.203 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021 218
Tabel 2.204 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021 220
Tabel 2.205 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021 221
Tabel 2.206 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2021 222

Tabel 2.207 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2021 223
Tabel 2.208 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2021 225
Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2021 226
Tabel 2.210 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2021 227
Tabel 2.211 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021 228
Tabel 2.212 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2021 229
Tabel 2.213 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2021 229
Tabel 2.214 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan Tahun 2021 230
Tabel 2.215 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2021 231
Tabel 2.216 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2021 232
Tabel 2.217 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2021 233
Tabel 2.218 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2021 234
Tabel 2.219 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 235
Tabel 2.220 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021 236
Tabel 2.221 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2021 237
Tabel 2.222 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2021 238
Tabel 2.223 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2021 239
Tabel 2.224 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2021 240
Tabel 2.225 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2021 241
Tabel 2.226 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2021 242
Tabel 2.227 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2021 243
Tabel 2.228 Capaian Indikator Non Urusan Kota Pekalongan Tahun 2021 244

Tabel 2.229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2021 247
Tabel 2.230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2021 247
Tabel 2.231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2021 250
Tabel 2.232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2021 250
Tabel 2.233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2021 251
Tabel 2.234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2021 252
Tabel 2.235 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2021 253
Tabel 2.236 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2021 263
Tabel 2.237 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2021 269
Tabel 2.238 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2021 275
Tabel 2.239 Permasalahan Pembangunan Daerah 279
Tabel 2.240 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 280
Tabel 2.241 Isu Strategis 287
Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 (persen) 304
Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2017 – 2021 305
Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 306
Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 309
Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan 309
Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan 310
Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan 310
Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan 310
Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan 311
Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024 315
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024 317
Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024 319

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 Visi : “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius” 331
Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 335
Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026..... 338
Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023..... 355
Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 358
Tabel 4.6 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional 369
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 398
Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2023 933
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023..... 935
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023..... 936

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	5
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kota Pekalongan	14
Gambar 2.2	Peta Administratif Kota Pekalongan	14
Gambar 2.3	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan	16
Gambar 2.4	Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan	17
Gambar 2.5	Wilayah Sungai Pemali-Comal	18
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan	22
Gambar 2.7	Peta Rencana Struktur Ruang	24
Gambar 2.8	Peta Rencana Pola Ruang	24
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021	32
Gambar 2.10	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017-2021	32
Gambar 2.11	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2021 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	34
Gambar 2.12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	35
Gambar 2.13	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2017 – 2021	36
Gambar 2.14	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 – 2021	43
Gambar 2.15	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2017 – 2021	43
Gambar 2.16	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	47
Gambar 2.17	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 (000 jiwa)	48
Gambar 2.18	Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	49
Gambar 2.19	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021	50
Gambar 2.20	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	50
Gambar 2.21	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021	51
Gambar 2.22	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	52
Gambar 2.23	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021	53

Gambar 2.24 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 53
Gambar 2.25 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2017-2021 55
Gambar 2.26 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 56
Gambar 2.27 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021..... 56
Gambar 2.28 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 57
Gambar 2.29 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2017-2021..... 58
Gambar 2.30 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2017-2021..... 62
Gambar 2.31 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021..... 65
Gambar 2.32 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 65
Gambar 2.33 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2017 - 2021..... 79
Gambar 2.34 Perkembangan Persebaran COVID-19 di Kota Pekalongan Bulan Maret-Desember 2020 81
Gambar 2.35 Perkembangan Persebaran COVID-19 di Kota Pekalongan Bulan Januari-Desember 2021..... 82
Gambar 2.36 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021..... 102
Gambar 2.37 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017- 2022..... 104
Gambar 2.38 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021..... 106
Gambar 2.39 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 106
Gambar 2.40 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 107
Gambar 2.41 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 112
Gambar 2.42 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2017 – 2021..... 113
Gambar 2.43 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 115
Gambar 2.44 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021..... 116
Gambar 2.45 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 118

Gambar 2.46 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 119
Gambar 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021..... 122
Gambar 2.48 Peta Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Pekalongan..... 124
Gambar 2.49 Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 144
Gambar 2.50 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021..... 154
Gambar 2.51 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2017-2021..... 173
Gambar 2.52 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2017-2021..... 174
Gambar 2.53 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2017-2021..... 175
Gambar 2.54 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021..... 176
Gambar 2.55 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 177
Gambar 2.56 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 180
Gambar 2.57 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021..... 180
Gambar 2.58 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021..... 181
Gambar 2.59 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2018 -2021..... 182
Gambar 2.60 Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi..... 183
Gambar 3.2 Aplikasi OMAHE NDEWE 185
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021..... 302
Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2017 – 2021 303
Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 – 2021..... 305
Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi 328

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan atas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada RKPD, Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahun kedua dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023.

Selain itu, penyusunan Rancangan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 juga memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021, permasalahan terkini yang ada di Kota Pekalongan, isu strategis dan potensi Daerah yang dapat mendongkrak capaian pembangunan. Sebagai contoh, permasalahan yang masih ada dan sedang ditangani sampai saat ini adalah banjir dan rob, persampahan, kawasan kumuh, kemiskinan dan pengangguran. Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat dan *stakeholder* terus menggali potensi daerah guna mendorong percepatan pembangunan. Salah satu potensi daerah yang sedang hangat yaitu Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana yang diresmikan pada tanggal 26 Februari 2022. Masyarakat, *stakeholder* dan dunia usaha termasuk UKM diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, TWL Pasir Kencana bisa menjadi magnet bagi wisatawan dari luar daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. Isu lain yang tak kalah penting yaitu pembangunan Pekalongan Baru yang mulai dirintis di tahun 2022 ini. Pekalongan Baru akan menjadi pusat perekonomian baru yang berada di pintu masuk Kota Pekalongan melalui jalur *exit* tol Setono. Isu strategis lainnya yang menjadi isu global yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*. Pemerintah Pusat dan Provinsi terus mendorong Daerah untuk berinovasi dan bersinergi dalam memulihkan ekonomi.

Permasalahan dan isu strategis diatas menjadi bagian dari dokumen RKPD Tahun 2023 yang mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023;

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 meliputi :

1) Persiapan penyusunan;
2) Penyusunan Rancangan Awal;
3) Penyusunan Rancangan;
4) Pelaksanaan Musrenbang;
5) Perumusan Rancangan Akhir;
6) Reviu APIP atas Rancangan Akhir RKPD;
7) Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Provinsi; dan
8) Penetapan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

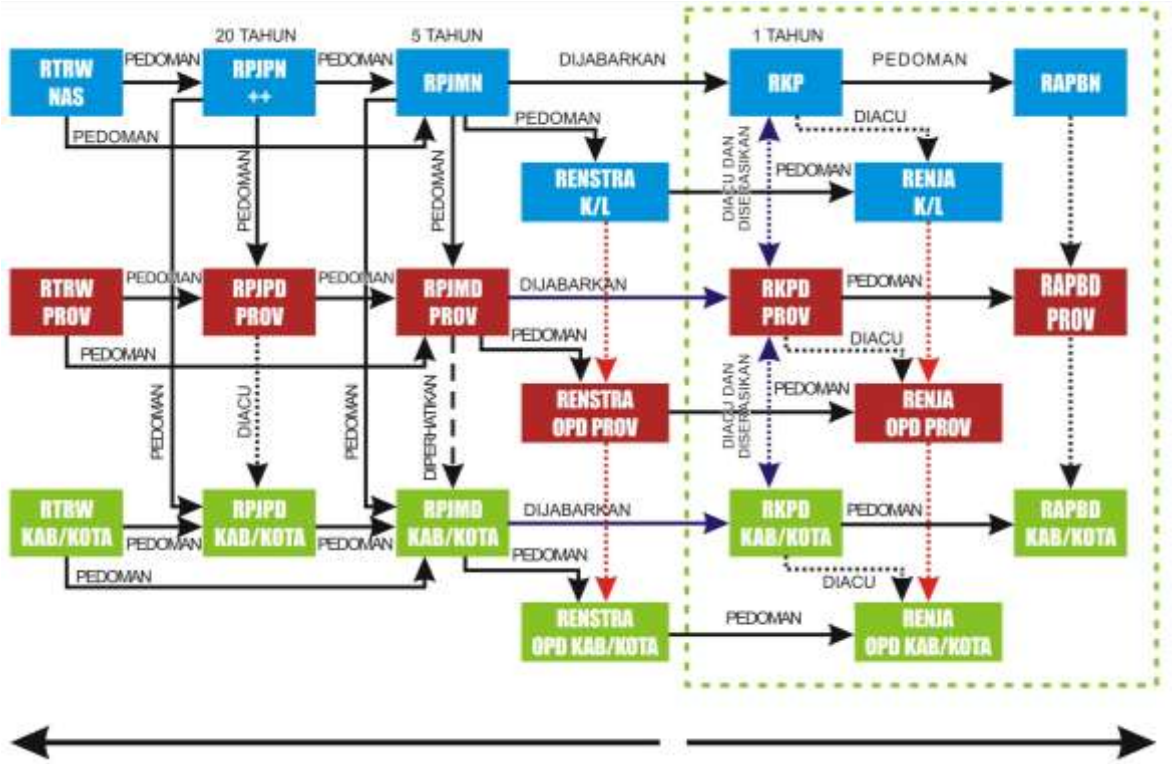
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Iembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dituangkan di dalam RKPD Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan Rancangan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023
Tema	*Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan*	*Tema*	*Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan*
1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan Rancangan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023
2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas	3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha	4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
6	Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2022

1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Sinergitas RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Kota Pekalongan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
		10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
		3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
	wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2023

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah, sinergitas pembangunan dengan Pusat juga dilakukan. RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RKP tahun 2023, dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Nasional disajikan dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
		3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
		7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2023. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5. RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2023

RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah :

a. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; dan
b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2023.

1.5. SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2023

Sistematika RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2021, hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021, hasil evaluasi SDG's tahun 2021, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

1. Kondisi Umum Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun 2021 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, SPM, SDG's dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
3. Permasalahan pembangunan daerah yang berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan IKU tahun 2023 dan memperhatikan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program, SPM dan SDG's tahun 2021.
4. Isu strategis yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai tahun 2021 dan perkiraan tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2023, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, pokok-pokok pikiran DPRD serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program pembangunan daerah tahun 2023 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan dokumen rencana pembangunan lainnya yang relevan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan yang ditargetkan di tahun 2023.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan arah kebijakan, prioritas dan fokus RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 yang telah sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesbilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan *interchange* jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan disebabkan kombinasi dari penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan dinamika air laut (*pasang surut, kenaikan muka air laut dan gelombang el nino serta la nina*). Para ilmuwan telah mengamati perubahan-perubahan pada indikator-indikator iklim di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan secara bersamaan membuat proyeksi menggunakan model AR-4 IPCC untuk menilai perubahan-perubahan masa depan dengan hasil-hasil sebagai berikut :

- Kenaikan suhu permukaan rata-rata akan mencapai 0,8 ° C-1 ° C hingga tahun 2020-2050 dibandingkan dengan periode iklim akhir pada abad ke-20.
- Peningkatan suhu permukaan laut akan mencapai 1-1,2 ° C pada 2050 dibandingkan pada 2000.
- Pada periode 2001-2100, akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti (terutama pada periode 2080-an) dengan kecenderungan meningkatnya curah hujan pada musim hujan dan penurunan pada bulan pancaroba.
- Kenaikan permukaan laut (SLR) diproyeksikan mencapai 35-40 cm pada 2050 dibandingkan dengan pada 2000. SLR maksimum dapat mencapai 175 cm pada 2100.

Dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API dengan nilai 5. Kota Pekalongan masuk dalam wilayah rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API meliputi banjir, rob, air bersih, sanitasi, dan kekeringan.

Genangan akibat banjir rob terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat

dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta *stakeholder* lain untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2019, antara lain :

- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Loji / Pekalongan / Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN),
- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN),
- Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong sistem Kali Boyo untuk melayani Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan kapasitas rencana sebesar 450 liter / detik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir melaksankan Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Sungai di Kota Pekalongan. Selain itu Desain atas sungai yang melintasi Kota Pekalongan juga telah selesai disusun oleh Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Revisi *Masterplan* Drainase Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan sistem drainase kota yang lebih terarah. Pihak lain non pemerintah seperti akademisi di antaranya Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor banyak terlibat dalam berbagai kajian/studi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir melibatkan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dari Amerika Serikat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan di antaranya adalah LSM Bintari melalui Kajian *Loss and Damage* Banjir Rob Pekalongan Raya (2016) serta pembuatan *pilot project* MCK adaptif (2020). *Mercy Corps* Indonesia turut membantu dalam berbagai kajian melalui program *flood resilience city* untuk Kota Pekalongan di antaranya dengan membuat kajian kerentanan (2020) dan saat ini masih berjalan dengan kajian-kajian terkait, dengan melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari akademisi hingga kementerian maupun pihak lain. LSM Kemitraan juga turut membantu Kota Pekalongan melalui Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan pendekatan 3S yaitu *Safekeeping – Surviving – Sustaining* (Melindungi – Mempertahankan – Melestarikan). Selain itu *Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard* (HHSK) Belanda melalui *Witteven Bos* juga telah membuat kajian tentang *Pekalongan Coastal Zone, Coastal Erotion and Flooding in the city of Pekalongan* yang dibiayai oleh HHSK Belanda tahun 2016.

Perkembangan terakhir, Pandemi *COVID-19* saat ini menunjukkan kondisi yang semakin melandai. Meskipun Pemerintah belum mengendurkan kebijakan penerapan Protokol Kesehatan secara penuh, namun pembatasan aktivitas yang mulai dibuka telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat, khususnya perekonomian. Hal ini tentu saja dapat ditangkap sebagai sesuatu yang positif bagi perencanaan pembangunan di tahun - tahun yang akan datang.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50’ 42" s.d. 6 55’ 44” Lintang Selatan dan 109 37’ 55” s.d. 109 42’ 19” Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 km^2. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km^2. Perubahan ini dikarenakan adanya :

a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi;
c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 km^2 atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis, wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan pada sebagian wilayah terletak antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara siginifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulanginya.



Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Dengan kondisi wilayah yang sangat datar dan terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap

sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 meter yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

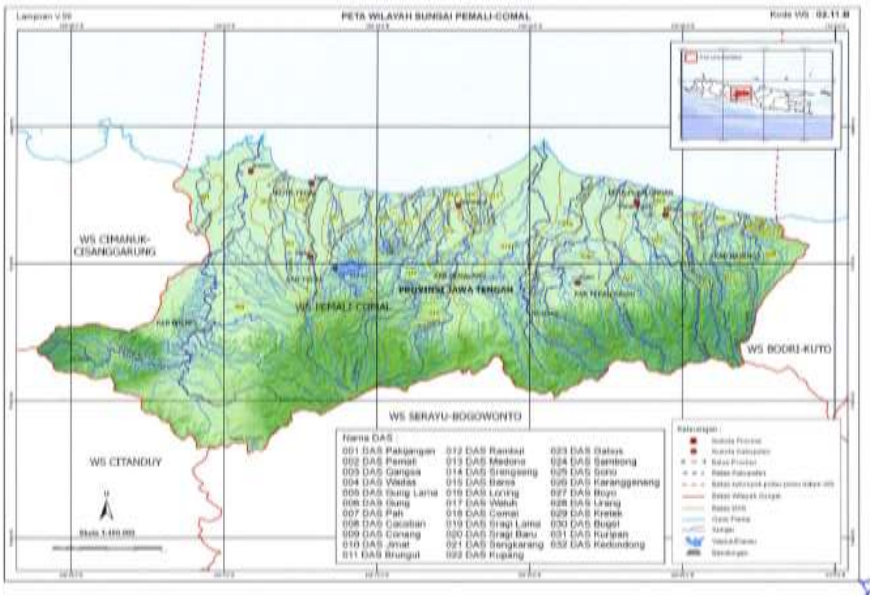


Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

2.1.1.4. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” - 1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air

baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi : a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh *al gluvium* dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020 melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 telah dipasang patok tetap penurunan tahan di Stadion Hoegeng dan Kecamatan Pekalongan Selatan dilanjutkan pada tahun 2021 telah dipasang patok tetap penurunan tanah di Tirto,

Kandang Panjang, Degayu dan Setono. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 3.303 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 124 hari. Sedangkan Curah hujan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 1.647 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 104 hari. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	15	371
2	Februari	25	1.309
3	Maret	15	269
4	April	6	141
5	Mei	6	143
6	Juni	11	147
7	Juli	3	61
8	Agustus	5	170
9	September	9	166
10	Oktober	5	43
11	Nopember	15	263
12	Desember	11	220
TOTAL		124	3.303
Tahun 2020		116	2.896
Tahun 2019		80	1.831
Tahun 2018		93	1.710
Tahun 2017		104	1.647

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson bahwa tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya berkurang setiap tahun, namun sebaliknya, tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2020 dan 2021 tanah sawah seluas 886 Ha, bertambah sekitar 1,14 persen dari luas 876 Ha pada tahun 2019. Begitu juga dengan tanah kering, meningkat menjadi 3.756 Ha, ada penambahan sekitar 4,33 persen dari luas 3.649 Ha pada tahun 2019.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	81,00	918,70	999,70
2	Pekalongan Timur	271,00	692,37	963,37
3	Pekalongan Selatan	419,00	728,38	1.147,38
4	Pekalongan Utara	115,00	1.416,50	1.531,50
TOTAL		886,00	3.756,00 (pembulatan)	4.642,00 (pembulatan)
Tahun 2020		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2019		925,00	3.600,00	4.525,00
Tahun 2018		969,00	3.556,00	4.525,00
Tahun 2017		980,00	3.545,00	4.525,00

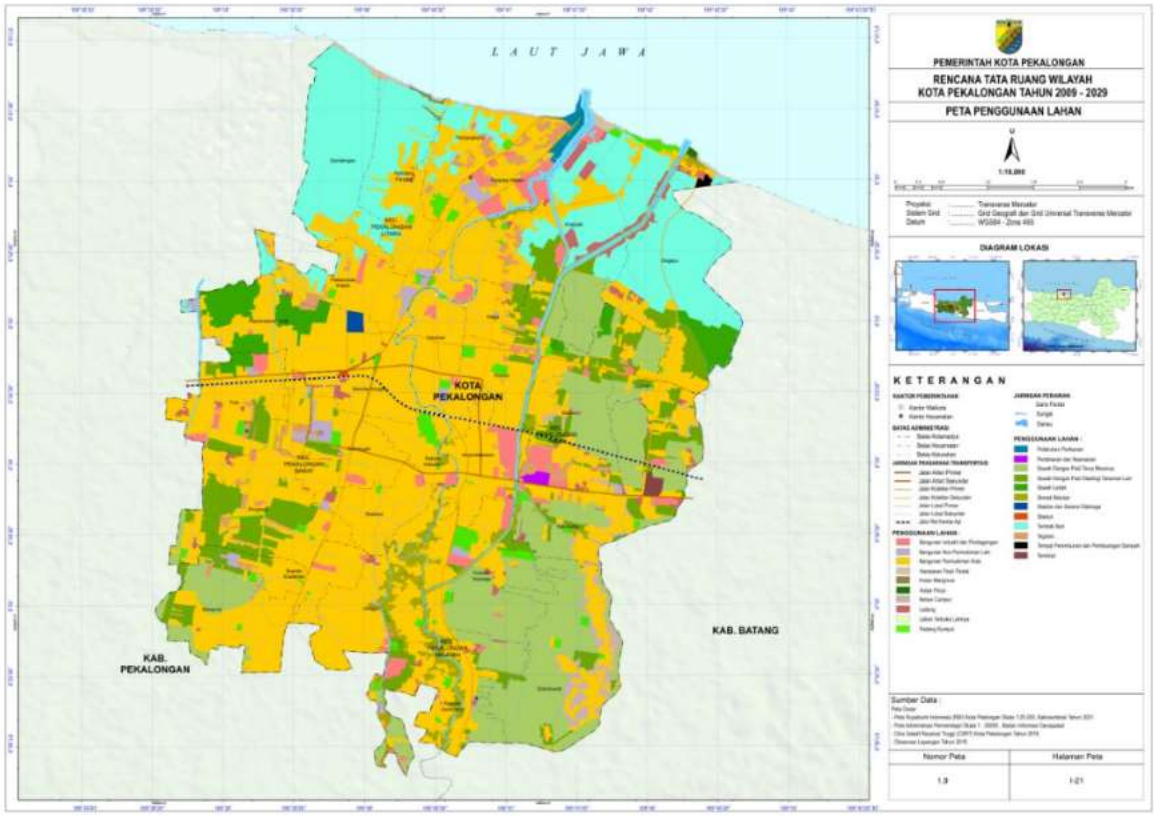
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2022, 2022

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan menggunakan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2021 adalah seluas 886 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 81 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 271 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 419 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 115 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2017 seluas 980 Ha, tahun 2018 seluas 941 Ha dan tahun 2019 seluas 876 Ha. Sementara itu pada tahun 2020 luasan tanah sawah meningkat menjadi 886 Ha dan tahun 2021 tidak ada perubahan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009–2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.



Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2022

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Palayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.



Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2021

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 23 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 persen dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi :

a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan seluas kurang lebih, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebh 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar.
b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hektar.
c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.
d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar.
e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 98 (Sembilan puluh delapan) hektar.
f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
i. Kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar.
j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar berada di :

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
    1. Kelurahan Banyurip;
    2. Kelurahan Buaran Kradenan;
    3. Kelurahan Jenggot;
    4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
    5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.
b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
    1. Kelurahan Bandengan;
    2. Kelurahan Krapyak;
    3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
    4. Kelurahan Panjang Wetan;
    5. Kelurahan Kandang Panjang; dan

6. Kelurahan Panjangbaru.

c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
   1. Kelurahan Gamer;
   2. Kelurahan Kali Baros;
   3. Kelurahan Klego;
   4. Kelurahan Noyontaansari;
   5. Kelurahan Poncol; dan
   6. Kelurahan Setono.

d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
   1. Kelurahan Bendan Kergon;
   2. Kelurahan Medono;
   3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
   4. Kelurahan Pringrejo;
   5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
   6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

1) Struktur Ruang
   a. Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) – Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) – Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) – jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan

strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.

b. Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang – Kota Pekalongan – Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

2) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (Laporan *Loss and Damage Assesment in Pekalongan City* dan *Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program*, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

3) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan out put kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan

memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Berdasarkan gambaran potensi kebencanaan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota (Pasal 5) dan strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana (Pasal

13A) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029, yaitu :

1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi :
   a. Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
   b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
   c. Pengaturan kegiatan industri;
   d. Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
   e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
   f. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
   g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
   h. Peningakatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
   i. Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
   j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
2) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, meliputi :
   a. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
   b. Mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
   c. Meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;
   d. Mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
   e. Mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 disebutkan adanya Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana terdiri dari :

a. Jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
b. Jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
c. Jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di :
   - Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
   - Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat;

- Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.

d. Jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.

Sedangkan Ruang evakuasi bencana, antara lain :

- Lapangan;
- Stadion;
- Taman publik;
- Bangunan rumah;
- Bangunan kantor pemerintah;
- Bangunan fasilitas sosial;
- Bangunan fasilitas umum, dan
- Ruang/bangunan Lainnya.

2.1.1.9. Aspek Demografi

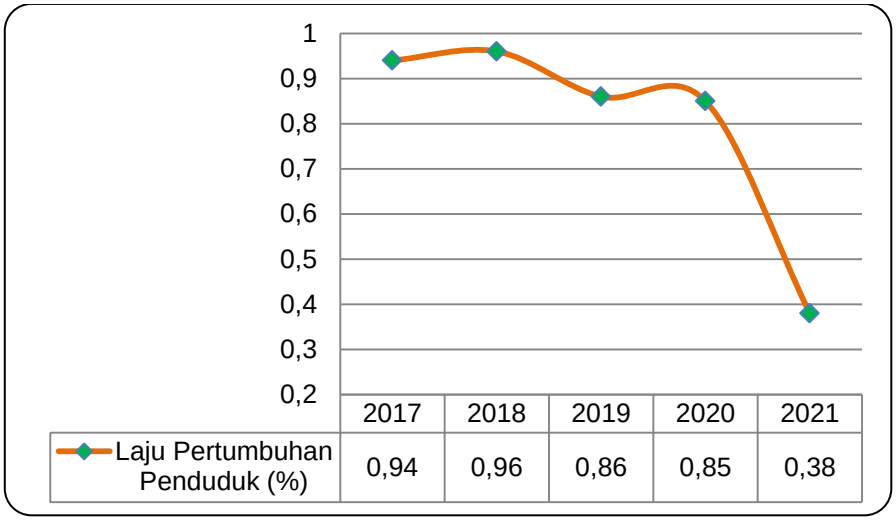
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2021 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 308.310 jiwa, terdiri dari 155.701 jiwa laki-laki dan 152.069 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 102,38 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.778	153.319	307.097
2020	155.145	152.005	307.150
2021	155.701	152.609	308.310

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sekitar 5.280 jiwa. Pada tahun 2021 bertambah 1.160 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,38 persen.

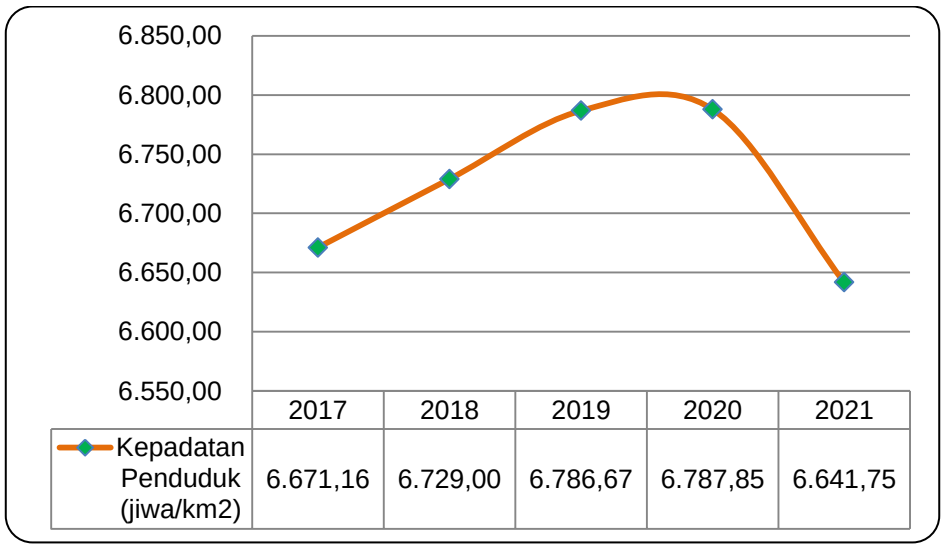


Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Gambar 2.9 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2017-2021. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,38 persen. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan cenderung menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Namun demikian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 146,1 jiwa dibandingkan dengan tahun 2020. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2017-2021 disajikan dalam Gambar 2.10 berikut.



Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2020, pendidikan SD ke bawah sebanyak 52.326 jiwa (35,79 persen), diikuti SMP sebanyak 29.357 jiwa (20,08 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 64.536 jiwa (44,13 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2020 berjumlah 146.219 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2017, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) keatas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namum tidak signifikan. Pada tahun 2021, komposisi pekerja pada tingkat pendidikan SD ke bawah meningkat yaitu menjadi 58.085 jiwa (34,43 persen) dan tingkat SLTP menjadi 34.121 jiwa (20,22 persen). Sedangkan pada tingkat pendidikan SM (Sekolah Menengah) ke atas mengalami penurunan yaitu 56.191 jiwa (33,30 persen). Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						
	≤SD		SLTP		≥SM		Jumlah
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2017	61.346	41,03	30.055	20,11	58.086	38,86	149.487
2018	61.358	40,47	31.072	20,50	59.167	39,03	151.597
2019	56.934	35,89	35.203	22,19	66.498	41,92	158.635
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219
2021	58.085	34,43	34.121	20,22	56.191	33,30	168.725

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 (diolah), 2022

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2021 paling banyak berada pada rentang usia 30-34 tahun yaitu sebanyak 25.552 jiwa, diikuti rentang usia 25-29 tahun sebanyak 25.516 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 75 tahun sebanyak 3.879 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2021 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

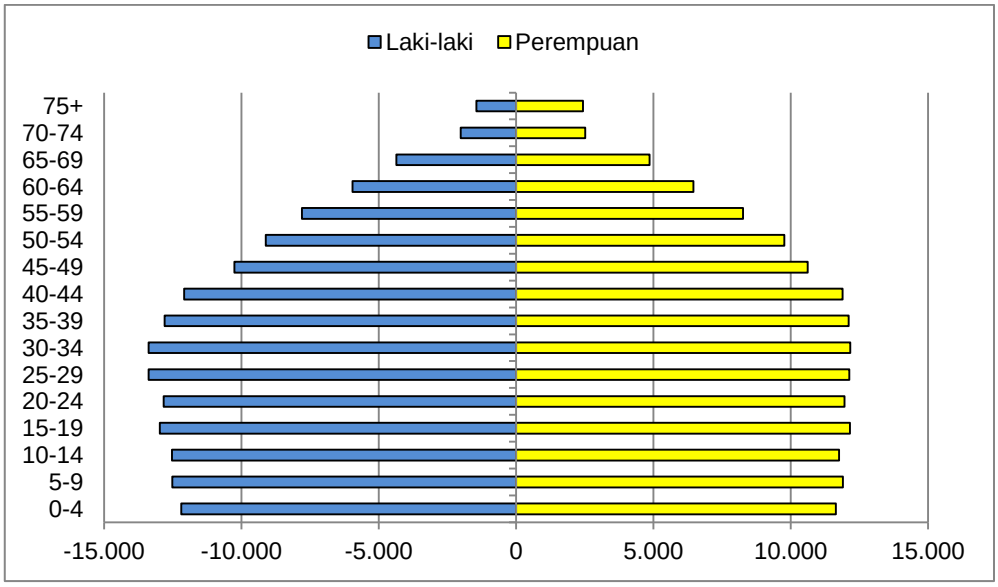
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2021 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.198	11.644	23.842
5-9	12.519	11.900	24.419
10-14	12.532	11.762	24.294
15-19	12.981	12.154	25.135
20-24	12.836	11.958	24.794
25-29	13.385	12.131	25.516
30-34	13.386	12.166	25.552
35-39	12.801	12.110	24.911
40-44	12.091	11.888	23.979

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
45-49	10.258	10.615	20.873
50-54	9.119	9.766	18.885
55-59	7.807	8.264	16.071
60-64	5.958	6.453	12.411
65-69	4.360	4.859	9.219
70-74	2.019	2.511	4.530
75+	1.451	2.428	3.879
Jumlah	155.701	152.609	308.310

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Dan disajikan dalam bentuk diagram piramida seperti berikut.



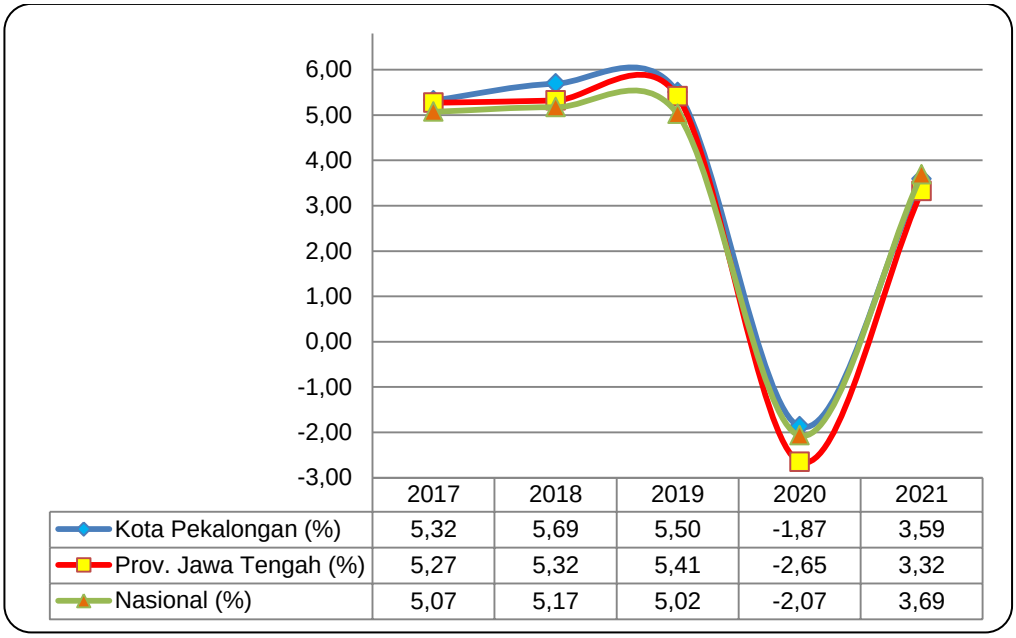
Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2021 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 (diolah), 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 3,59 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	5,32	5,69	5,50	-1,87	3,59
Prov. Jawa Tengah (%)	5,27	5,32	5,41	-2,65	3,32
Nasional (%)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

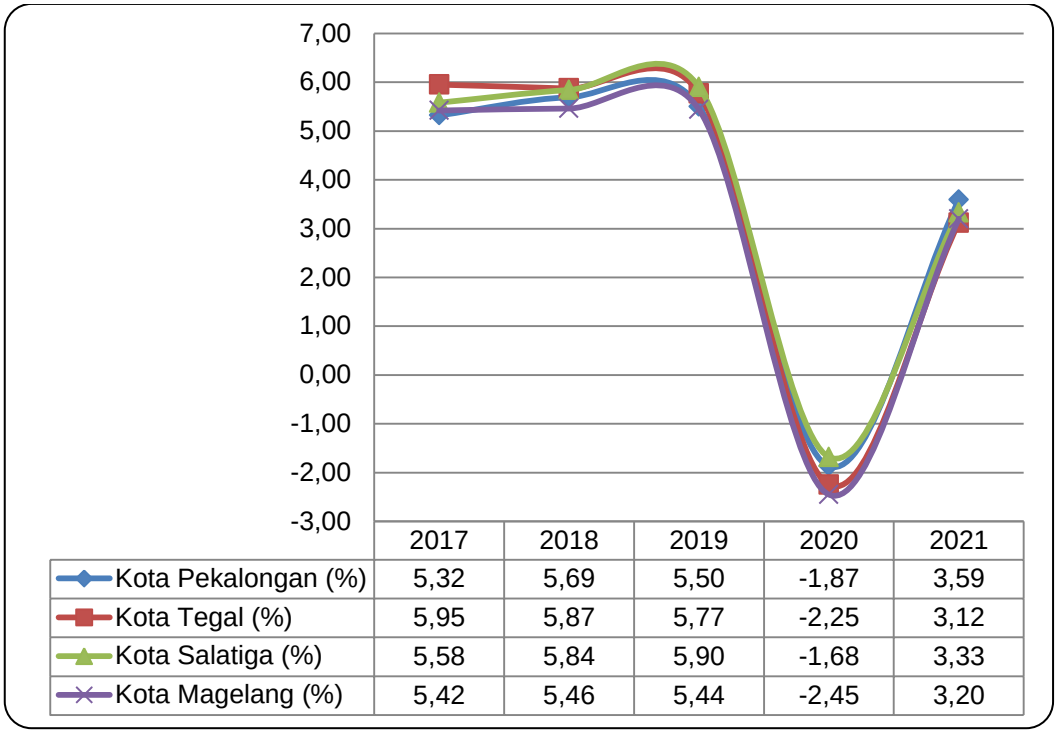
Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 (diolah), 2022

Jika dicermati, ternyata pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional, namun di tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Perekonomian global, nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan yang mulai tumbuh pada tahun 2021 menandakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat mulai tumbuh dari dampak pandemi *COVID-19*. Upaya percepatan pemulihan, khususnya pemulihan ekonomi, harus dilakukan secepatnya sehingga dapat berdampak bagi pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya percepatan pemulihan ini terutama dilakukan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan di Kota Pekalongan. Dengan memanfaatkan sektor unggulan maka diharapkan keterkaitan ekonomi ke depan dan ke belakang (backward and forward linkage) membesar sehingga nilai tambah (value added) atau nilai produksi barang dan jasa semakin membesar, akhirnya berimplikasi meningkatkan perekonomian Kota Pekalongan, yang direpresentasikan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di paling bawah. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selanjutnya pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tertinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.13 berikut.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	5,32	5,69	5,50	-1,87	3,59
Kota Tegal (%)	5,95	5,87	5,77	-2,25	3,12
Kota Salatiga (%)	5,58	5,84	5,90	-1,68	3,33
Kota Magelang (%)	5,42	5,46	5,44	-2,45	3,20

Gambar 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2017 – 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2017-2021. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2021, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,37 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 21,21 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,51 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 (persen)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,74	4,67	4,66	5,10	4,80
B	Pertambangan dan Penggalian	–	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,13	20,94	20,85	21,40	21,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,12	0,12
F	Konstruksi	14,39	14,60	14,64	14,60	15,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,78	21,76	21,80	21,16	21,37
H	Transportasi dan Pergudangan	6,32	6,28	6,40	5,04	5,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,39	5,42	5,44	5,32	5,37
J	Informasi dan Komunikasi	4,15	4,21	4,36	5,15	5,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,26	6,27	6,13	6,22	6,24
L	Real Estat	2,68	2,71	2,71	2,74	2,67
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,42	0,44	0,43	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,72	4,58	4,47	4,50	4,18
P	Jasa Pendidikan	4,67	4,75	4,65	4,73	4,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,26	1,29	1,44	1,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,84	1,87	1,90	1,91	1,84
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2021, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4,80 persen. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi. Tahun 2017, peranan kategori ini sebesar 4,74 persen, kemudian melemah tahun 2018 sebesar 4,67 persen, dan semakin menurun tahun 2019 sebesar 4,66 persen, meningkat 5,10 persen di tahun 2020, dan kembali turun sebesar 4,80 persen di tahun 2021.

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan relatif stagnan dikarenakan Kota Pekalongan berkembang dalam pelayanan ke wilayah sekitarnya dan kecenderungan perkembangan perkotaan bahwa sektor primer tidak dapat berkembang optimal, terutama sub sektor pertanian, diakibatkan keterbatasan lahan pertanian karena untuk penggunaan kegiatan yang dianggap lebih produktif dan sebagian wilayah Kota Pekalongan terdampak rob. Nilai produksi sub sektor perikanan jika dibandingan dengan masa kejayaan perikanan Kota Pekalongan yang lalu, cukup kecil dan belum berkembang

sesuai harapan, terutama produksi perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan kendala teknis sedimentasi termasuk pengelolaannya sehingga semakin sedikit kapal perikanan yang membongkar hasil tangkapannya di Kota Pekalongan. Dengan kondisi tersebut maka lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai produksi barang dan jasa yang relatif stagnan.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Industri Pengolahan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 21,40 persen pada tahun 2020.

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 21,13 persen, kemudian melemah menjadi 20,94 persen pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 semakin melemah menjadi 20,85 persen dan menguat tajam menjadi 21,40 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 peranannya kembali melemah menjadi 21,21 persen.

Tahun 2017-2019, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kecenderungan yang menurun, namun menguat kembali pada tahun 2020, saat terjadi dampak pandemi *COVID-19*. Bahkan pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha ini cukup tangguh terhadap adanya dampak pandemi *COVID-19* di Kota Pekalongan. Ketika perekonomian nasional dan daerah tumbuh kembali pada tahun 2021, maka peranan lapangan usaha Industri Pengolahan kembali melemah, hal ini terjadi karena lapangan usaha yang lain telah menguat kembali.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,15 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2021, menurun dibanding tahun 2020 yaitu 0,16 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cukup stabil. Tahun 2017 hingga tahun 2020 peran kategori ini sebesar 0,16 persen.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan stabil selama 2017-2018 yaitu sebesar 0,11 persen dan menurun 0,10 persen pada tahun 2019, kemudian meningkat 0,12 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian Kota Pekalongan masih berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 memiliki peranan sebesar 0,11 persen. Pada tahun 2019 melemah menjadi 0,10 persen serta menguat kembali menjadi 0,12 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Konstruksi

Secara umum, peranan lapangan usaha Konstruksi terhadap perekonomian Kota Pekalongan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peranan lapangan usaha ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2017 sebesar 14,39 persen, tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 14,60 persen dan tahun 2019 terus meningkat menjadi sebesar 14,64 persen. Namun pada tahun 2020, peranannya sedikit menurun menjadi 14,60 persen dan meningkat sangat tajam menjadi 15,51 persen pada tahun 2021.

Peranan lapangan usaha Konstrusi sangat tergantung dengan implementasi pekerjaan konstruksi. Pada tahun 2021, peranan lapangan usaha ini meningkat cukup tajam, karena pada tahun 2021 pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota Pekalongan jumlahnya sangat meningkat. Dengan demikian, semakin banyak pekerjaan konstruksi maka peranan lapangan usaha ini dapat semakin meningkat.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya, terhadap PDRB Kota Pekalongan. Peranan lapangan usaha ini selalu lebih dari 20 persen.

Secara umum peranan lapangan usaha ini selalu berfluktuasi. Pada tahun 2017 peranannya sebesar 21,13 persen, menurun menjadi 20,94 persen pada tahun2018, dan semakin menurun menjadi 20,85 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, peranan lapangan usaha ini menguat menjadi 21,40 persen dan pada tahun 2021 sedikit melemah menjadi 21,21 persen. Tahun 2017-2019, lapangan usaha ini memiliki kecenderungan yang menurun, namun menguat kembali pada tahun 2020, saat terjadi dampak pandemi *COVID-19*. Hal ini menyiratkan tanda bahwa lapangan usaha ini lebih tangguh terhadap adanya dampak pandemi *COVID-19*. Ketika perekonomian nasional dan daerah tumbuh kembali pada tahun 2021, maka peranan lapangan usaha ini kembali melemah, hal ini terjadi karena lapangan usaha yang lain telah menguat kembali.

Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kota Pekalongan memiliki posisi strategis dalam kerangka lalu lintas Pulau Jawa sehingga lapangan usaha ini merupakan salah satu sektor yang strategis.

Lapangan usaha ini memiliki peranan yang cukup stabil pada tahun 2017-2019 yaitu berturut-turut sebesar 6,32 persen, 6,28 persen dan menguat menjadi 6,40 persen. Namun pada tahun 2020 dan 2021 peranan lapangan usaha ini turun menjadi 5,01 persen dan 5,08 persen. Pada tahun 2020, peranan lapangan usaha ini turun drastis sebagai dampak pandemi *COVID-19* karena sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup terkena dampak pandemi.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan lapangan usaha ini selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Peranan tahun 2017 sebesar 5,39 persen, tahun 2018 sebesar 5,42 persen dan tahun 2019 sebesar 5,44 persen. Peranan tahun 2017-2019 memiliki kecenderungan yang sedikit demi sedikit menguat. Namun pada tahun 2020 peranannya turun menjadi 5,32 persen dan sedikit menguat kembali menjadi 5,37 persen pada tahun 2021. Dari perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa lapangan usaha ini menunjukkan peranannya yang menguat, namun sangat terdampak pandemi *COVID-19* pada tahun 2020, akibat sektor

ini global sangat terpengaruh. Lapangan usaha ini kembali menguat pada tahun 2021 akibat sudah mulai berkembangannay perekonomian global, nasional dan lokal.

Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang perekonomian. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 peranan lapangan usaha ini sebesar 4,15 persen, tahun 2018 sebesar 4,21 persen, tahun 2019 sebesar 4,36 persen dan tahun 2020 sebesar 5,15 persen. Selama empat tahun tersebut menunjukkan perkembangan dan terjadi peningkatan yang tajam pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi, dimana lapangan usaha ini tetap berkembang, sementara lapangan usaha lainnya mengalami penurunan. Setelah menguatnya lapangan usaha lainnya maka perananan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada tahun 2021 menurun menjadi 5,09 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Secara umum, selama lima tahun terakhir peranan lapangan usaha ini pada perekonomian Kota Pekalongan berfluktuatif. Peranan lapangan usaha ini, tahun 2017 sebesar 6,26 persen, tahun 2018 sebesar 6,27 persen, dan tahun 2019 menurun menjadi sebesar 6,13 persen. Peranan lapangan usaha ini tahun 2020 meningkat kembali menjadi 6,22 persen dan tahun 2021 sebesar 6,24 persen.

Real Estate

Lapangan usaha Real Estate memiliki peranan yang masih berfluktuatif terhadap PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir. Peranan lapangan usaha ini pada tahun 2017 sebesar 2,68 persen, meningkat menjadi 2,71 persen pada tahun 2018 dan tahun 2019, serta semakin meningkat menjadi 2,74 persen pada tahun 2020. Namun demikian, pada tahun 2021, menurun kembali menjadi 2,67 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peranan dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan, lapangan usaha Jasa Perusahaan berfluktuatf. Peranan lapangan usaha ini tahun 2017 sebesar 0,41 persen, tahun 2018 sebesar 0,42 persen, tahun 2019 sebesar 0,44 persen dan tahun 2020 turun menjadi 0,43 persen. Pada tahun 2021, peranannya turun menjadi 0,42 persen. Dibandingkan lapangan usaha lainnya, lapangan usaha ini memiliki peranan yang paling kecil dari tahun ke tahun.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2017-2021 peranan lapangan usaha menunjukkan kecenderungan yang menurun. Perananan pada tahun 2017 sebesar 4,72 persen, tahun 2018 menurun menjadi sebesar 4,58 persen, dan menurun kembali tahun 2019 menjadi sebesar 4,47 persen. Kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar sebesar 4,50 persen dan semakin menurun menjadi 4,18 persen pada tahun 2021. Menguatnya peranan lapangan usaha ini pada tahun 2020 dimungkinkan karena menurunnya peranan lapangan usaha lain sebagai dampak pendemi *COVID-19*. Setelah perekonomian meningkat kembali pada tahun 2021 maka peranan lapangan usaha ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan.

Jasa Pendidikan

Secara umum peranan lapangan usaha Jasa Pendidikan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, belum menunjukkan pola kecenderungan tertentu. Pada tahun 2017, peranan lapangan usaha ini sebesar 4,67 persen dan di tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 4,75 persen. Tahun 2019 peranannya menurun kembali menjadi sebesar 4,65 persen dan meningkat kembai menjadi sebesar 4,73 persen pada tahun 2020. Tahun 2021, peranannya kembali turun menjadi sebesar 4,55 persen.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Dalam periode tahun 2017-2020 peranan lapangan usaha ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Namun demikian, pada tahun 2021 peranannya menurun menjadi 1,40 persen. Kecenderungan yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa nilai penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial semakin meningkat. Apalagi di tahun 2020, sebagai dampak pandemi *COVID-19*, nilai tersebut semakin meningkat, terutama terkait dengan jasa kesehatan penanganan *COVID-19*.

Jasa lainnya

Peranan lapangan usaha Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Peranan lapangan usaha ini tahun 2017 sebesar 1,84 persen, tahun 2018 sebesar 1,87 persen, dan tahun 2019 sebesar 1,90 persen. Pada tahun 2020 peranannya menjadi sebesar 1,91 persen dan tahun 2021 menurun menjadi sebesar 1,84 persen.

2.1.2.3. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu tahun 2017-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5,32 persen sampai dengan 5,69 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87 persen, dan tumbuh sebesar 3,59 persen di tahun 2021. Pada tahun 2017, pertumbuhan tiga besar yakni Informasi dan Komunikasi sebesar 11,94 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,09 persen, dan Jasa Perusahaan sebesar 7,85 persen. Pada tahun 2021, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar diantaranya adalah Konstruksi sebesar 8,64 persen, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,34 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,46 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang pernah mengalami pertumbuhan negatif di luar dampak pandemi *COVID-19* tahun 2020, yaitu mengalami kontraksi pada tahun 2017, dengan nilai -4,80 persen. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar, bahkan pada tahun 2020 pun memiliki pertumbuhan terbesar. Terdapat empat lapangan usaha yang konsisten memiliki pertumbuhan positif yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,80	3,03	4,63	6,36	-3,21
B	Pertambangan dan Penggalian	–	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,35	4,46	4,84	-0,48	2,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	5,29	3,72	-0,26	2,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,86	5,16	4,21	6,91	6,34
F	Konstruksi	5,51	5,59	4,71	-1,09	8,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,71	5,53	5,47	-4,68	5,46
H	Transportasi dan Pergudangan	5,84	7,07	7,53	-24,56	3,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,92	5,88	6,76	-3,78	4,78
J	Informasi dan Komunikasi	11,94	10,43	10,57	17,20	4,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,35	5,12	3,76	0,93	1,35
L	Real Estat	5,84	5,97	5,62	-0,08	1,89
M,N	Jasa Perusahaan	7,85	7,95	8,31	-4,32	2,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,75	3,99	3,82	-1,00	-0,85
P	Jasa Pendidikan	6,82	7,59	2,63	-0,56	0,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,74	7,93	7,84	8,35	1,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,09	9,02	8,47	-1,19	0,87
Produk Domestik Regional Bruto		5,32	5,69	5,69	-1,87	3,59

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

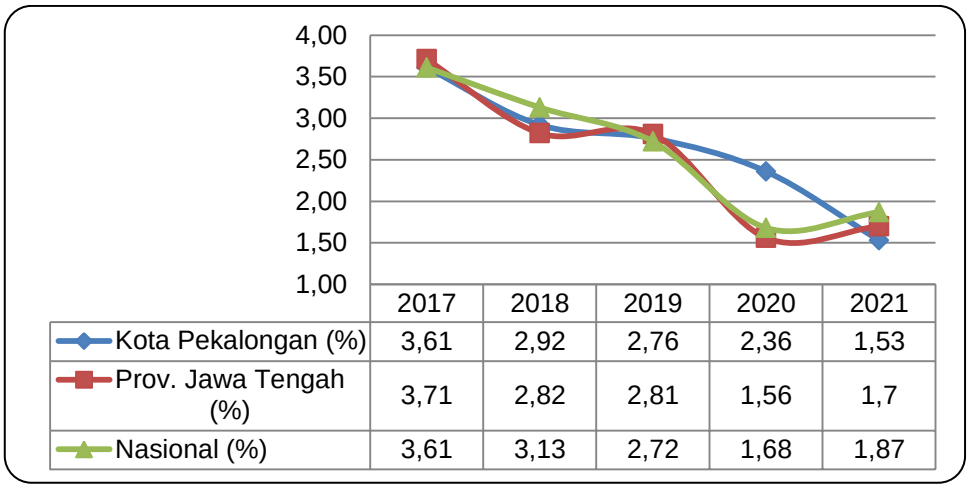
Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2017-2021 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2021 mayoritas adalah sektor Konstruksi.

2.1.2.4. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2017 – 2021, inflasi di Kota Pekalongan cenderung menurun dari kisaran 3,61 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Kondisi ini tentunya lebih menguntungkan untuk peningkatan daya beli masyarakat, karena dampak pandemi *COVID-19* telah berdampak luar biasa bagi perekonomian.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 2.14 berikut.

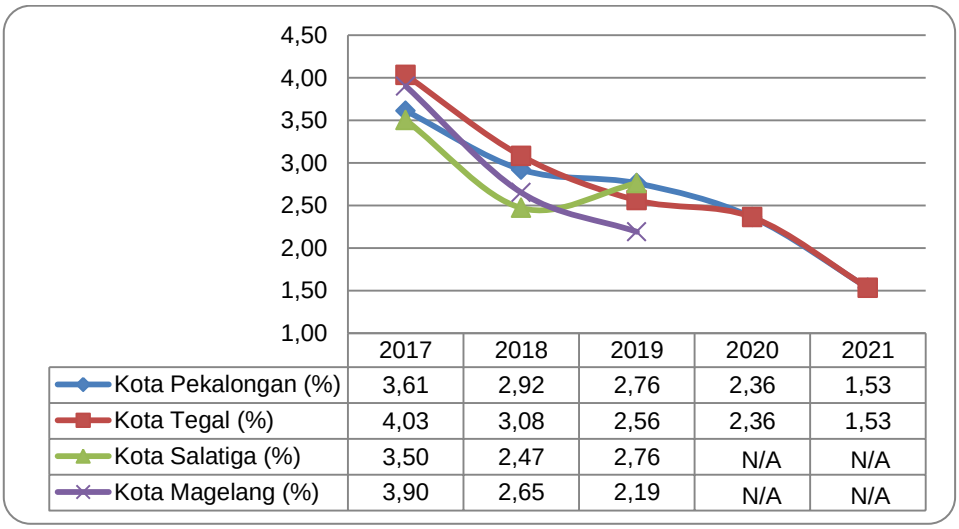


	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	3,61	2,92	2,76	2,36	1,53
Prov. Jawa Tengah (%)	3,71	2,82	2,81	1,56	1,7
Nasional (%)	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Gambar 2.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Sumber : www.bps.go.id, 2022

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), inflasi Kota Pekalongan tahun tahun 2017 di urutan ketiga tertinggi yaitu Kota Tegal (4,03%), Kota Magelang (3,90%), Kota Pekalongan (3,61%) dan Kota Salatiga (3,50). Tahun 2018 berada pada urutan tertinggi kedua yaitu Kota Tegal (3,08%), Kota Pekalongan (2,92%), Kota Magelang (2,65%) dan Kota Salatiga (2,47%). Tahun 2019 berada pada urutan tertinggi bersama Kota Salatiga yaitu 2,76%, dan untuk Kota Tegal sebesar 2,56% dan Kota Magelang sebesar 2,19%. Untuk tahun 2020 dan 2021, inflasi Kota Pekalongan sama dengan Kota Tegal yaitu 2,36% dan 1,53%. Pada tahun 2020 inflasi Kota Pekalongan dan Kota Tegal relatif tinggi, namun pada tahun 2021 inflasi Kota Pekalongan dan Kota Tegal relatif lebih rendah.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	3,61	2,92	2,76	2,36	1,53
Kota Tegal (%)	4,03	3,08	2,56	2,36	1,53
Kota Salatiga (%)	3,50	2,47	2,76	N/A	N/A
Kota Magelang (%)	3,90	2,65	2,19	N/A	N/A

Gambar 2.15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2017 – 2021

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2022

Pada tahun 2021, kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah rekreasi, perawatan pribadi, makanan jadi, dan sandang. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Umum	3,61	2,92	2,76	-	-
Bahan Makanan	4,63	3,66	8,00	-	-
Makanan Jadi	2,46	3,05	1,60	-	2,14
Perumahan	4,02	3,47	0,40	0,33	1,42
Sandang	5,40	2,51	3,31	4,01	2,01
Kesehatan	1,15	0,54	4,75	2,89	0,56
Pendidikan	3,26	1,33	3,74	-2,71	0,06
Transport	3,96	2,43	0,31	1,33	1,01
Perlengkapan	-	-	-	2,70	1,13
Infokom	-	-	-	1,20	-0,64
Rekreasi	-	-	-	6,27	2,62
Restoran	-	-	-	1,76	1,61
Perawatan Pribadi	-	-	-	4,20	2,35

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

2.1.2.5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 30,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,07 juta rupiah pada tahun 2021. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.10 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53	11.428,32
- ADHK (Miliar Rp)	6.706,27	7.087,92	7.477,43	7.337,83	7.601,49

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	30,72	33,14	35,41	35,22	37,07
- ADHK (Juta Rp)	22,22	23,28	24,35	23,89	24,66
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	8,06	7,86	6,86	-0,53	5,24
- ADHK (persen)	4,40	4,79	4,60	-1,88	3,20

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2022

2.1.2.6. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2018 sebesar 0,336 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,69 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,69 persen sehingga menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,305. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 1,87%. Meskipun demikian, indeks gini masih meningkat menjadi 0,314. Pada tahun 2021 BPS tidak melakukan penghitungan indeks gini Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Indeks Gini Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2020

Tahun	Indeks Gini
2018	0,336
2019	0,305
2020	0,314

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Dari data tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa indeks gini Kota Pekalongan masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2018 lebih tinggi, menunjukkan indeks gini yang meningkat. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi yang didorong terus kenaikannya dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat luas. Masyarakat luas yang dapat meningkat kesejahteraannya, diharapkan dapat menurunkan indeks gini ke depannya.

Pembangunan inklusif yang dapat dilaksanakan antara lain terus mendorong pengembangan sektor unggulan, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian serta sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor tersebut. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga perekonomian dapat terus tumbuh serta revitalisasi kawasan terdampak rob dan banjir. Upaya-upaya tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

2.1.2.7. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, terdiri dari:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, yang meliputi:
   a. Bantuan pangan;
   b. Bantuan kesehatan;
   c. Bantuan pendidikan; dan
   d. Bantuan perumahan.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   a. Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
   b. Bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
   c. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
   d. Fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan,
   e. Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
   f. Fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, meliputi:
   a. Peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
   b. Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
   c. Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
   d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha.
4. Programprogram lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
   a. Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
   b. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
   c. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.1.2.7.1. Garis Kemiskinan

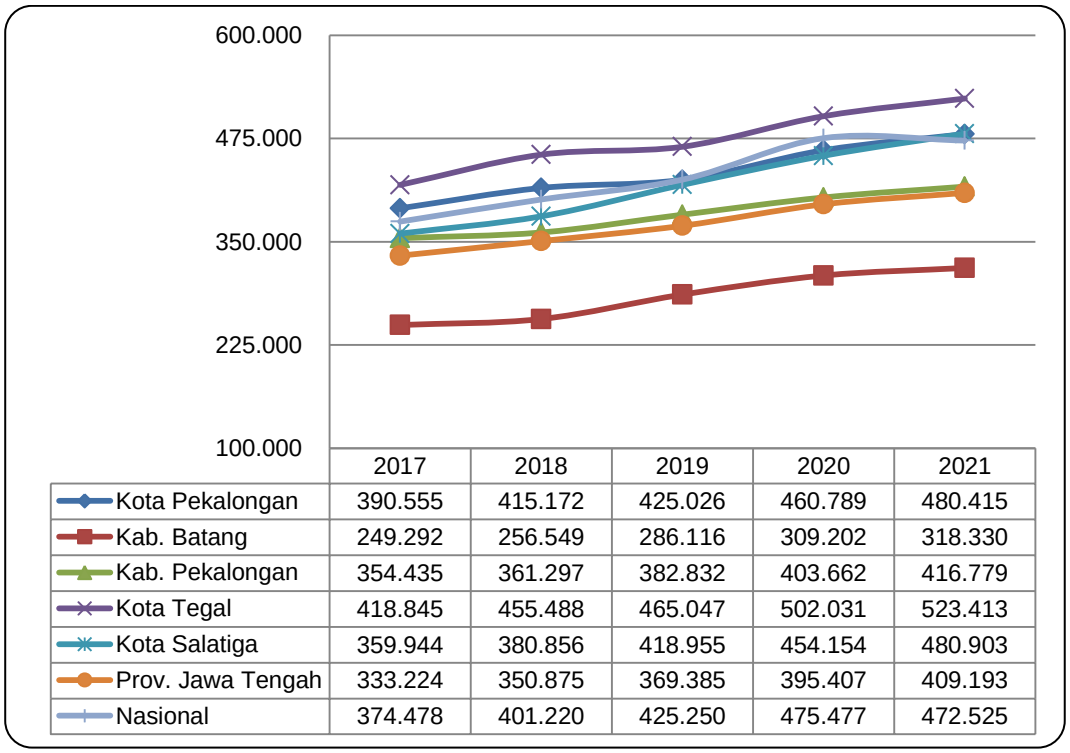
Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada November 2021, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp.480.415/kapita/bulan. Angka ini di atas Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.472.525 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.409.193,00.

Tabel 2.12 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GKProvinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2017	390.555	249.292	354.435	418.845	359.944	333.224	374.478
2018	415.172	256.549	361.297	455.488	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	475.477
2021	480.415	318.330	416.779	523.413	480.903	409.193	472.525 (semester I 2021)

Sumber : https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2022



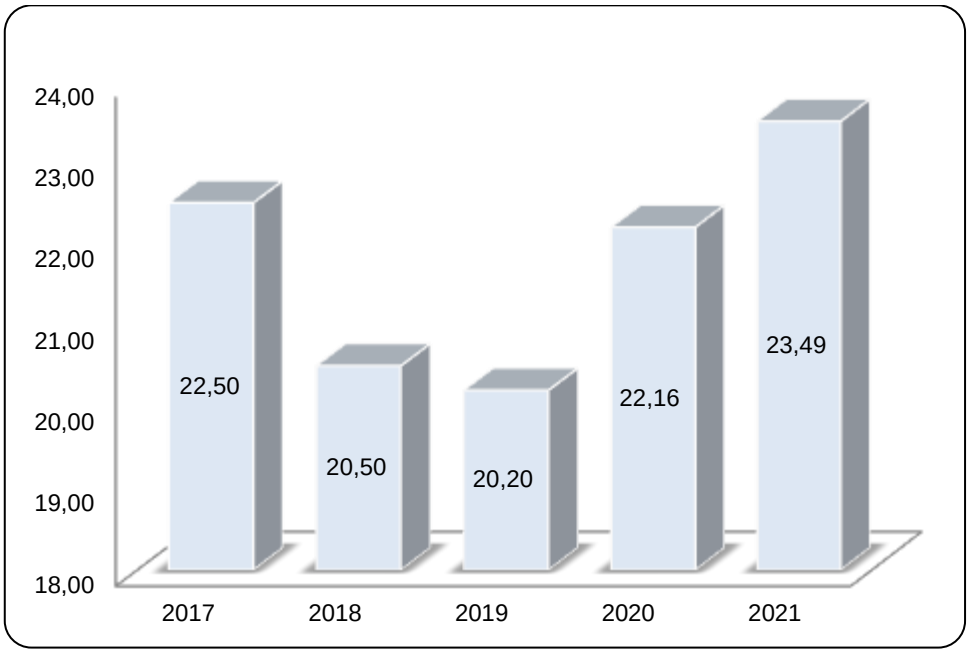
Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2022

2.1.2.7.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat. Di sektor kesehatan, juga disediakannya jaminan kesehatan bagi sebagian masyarakat akan sangat membantu menekan pengeluaran masyarakat.



Gambar 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 (000 jiwa)

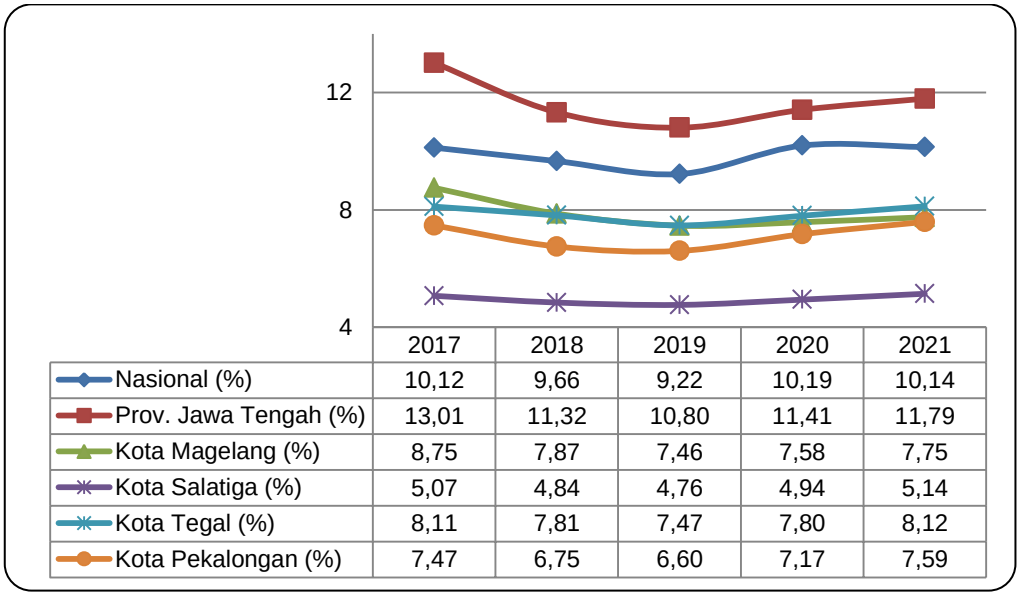
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sepanjang kurun waktu tahun 2017-2021, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan selalu mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 22,16 ribu jiwa dan 23,49 ribu jiwa pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak pandemi *COVID-19*.

Pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif, namun pada tahun 2021 perekonomian Kota Pekalongan telah tumbuh kembali. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2021, ternyata belum berdampak bagi penurunan angka kemiskinan, justeru angka kemiskinan masih meningkat kembali. Tantangan ke depan adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menumbuhkembangkan kembali perekonomian yang inklusif sehingga dapat berdampak signifikan bagi penurunan jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan Kota Pekalongan.

Di samping itu, konsistensi strategi pengentasan kemiskinan harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan dapat menurun signifikan. Beberapa strategi tersebut adalah mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Selama kurun waktu 2017 hingga tahun 2021, tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan Kota Pekalongan juga cenderung menurun sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami kenaikan menjadi 7,17 persen dan 7,59 persen pada tahun 2021.



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional (%)	10,12	9,66	9,22	10,19	10,14
Prov. Jawa Tengah (%)	13,01	11,32	10,80	11,41	11,79
Kota Magelang (%)	8,75	7,87	7,46	7,58	7,75
Kota Salatiga (%)	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14
Kota Tegal (%)	8,11	7,81	7,47	7,80	8,12
Kota Pekalongan (%)	7,47	6,75	6,60	7,17	7,59

Gambar 2.18 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

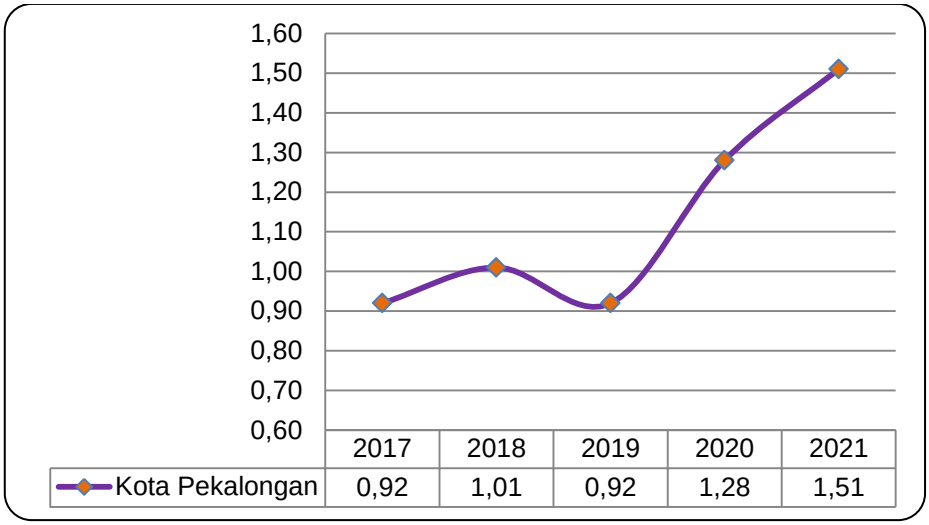
Sumber : https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2022

Sementara itu, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 11,79 persen, dan tingkat kemiskinan Nasional berada di angka 10,14 persen. Keduanya berada di atas tingkat kemiskinan Kota Pekalongan yaitu 7,59 persen. Dari Gambar 2.18 disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

2.1.2.7.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2017-2021 relatif stagnan bahkan ada kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2017 sebesar 0,92. Selanjutnya naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 1,01. Namun pada tahun 2019 indeks ini mengalami penurunan sebesar 0,09 yaitu menjadi 0,92. Dan pada tahun 2020 mencapai 1,28 serta mengalami kenaikan kembali menjadi 1,51 di tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 disajikan dalam Gambar 2.19 berikut.

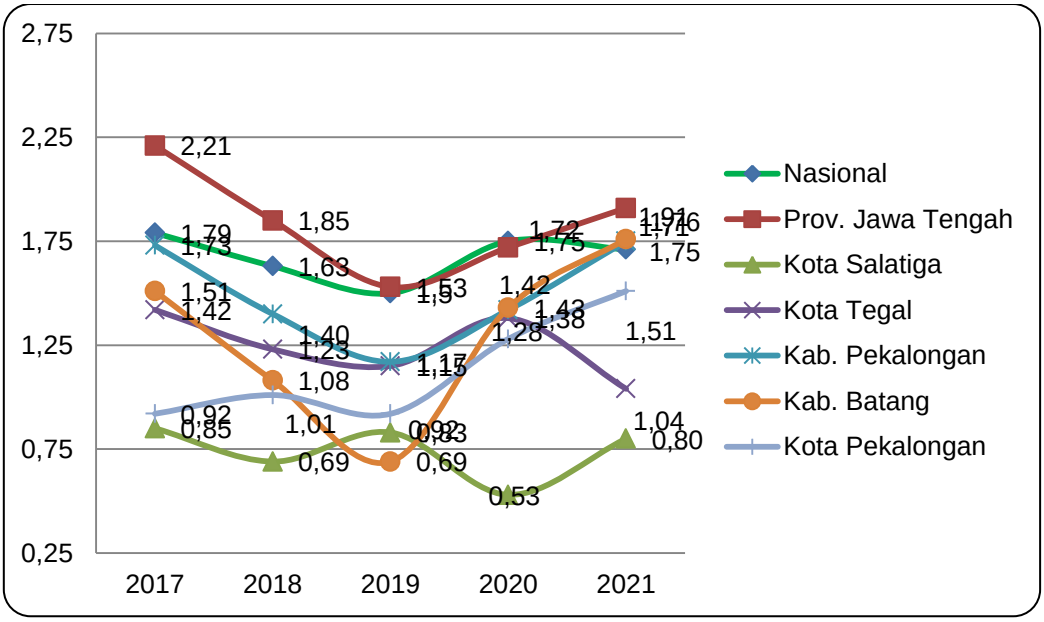


Gambar 2.19 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : https://pekalongankota.bps.go.id/ dan https://jateng.bps.go.id/ (diolah), 2022

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Tegal Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Salatiga, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.20 berikut.



Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

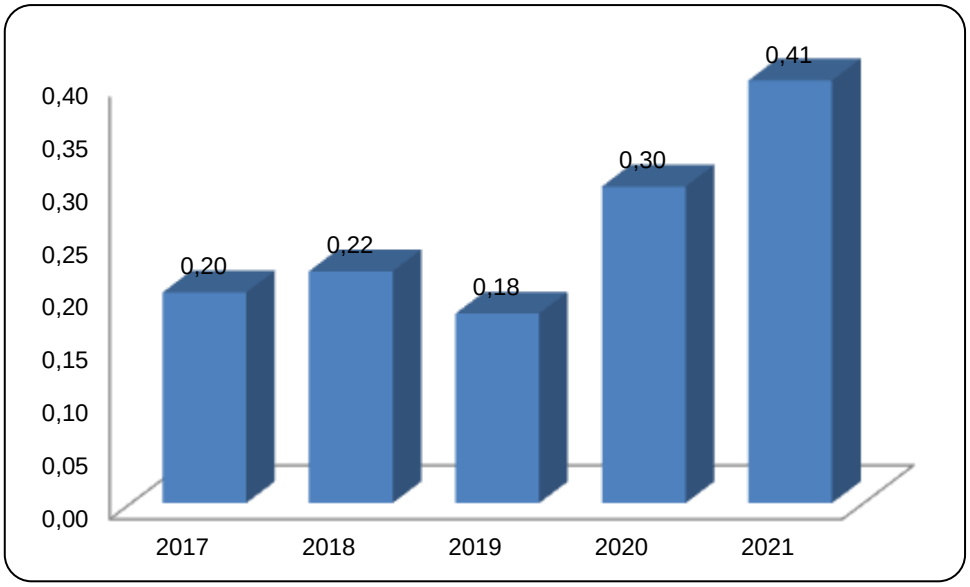
Sumber : https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2022

2.1.2.7.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 0,20. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2018 indeks ini mengalami kenaikan menjadi 0,22, yang berarti kondisi memburuk. Kemudian indeks ini menurun pada 2019 menjadi 0,18 dan di tahun 2020 meningkat 0,30 yang artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2020 semakin bertambah dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan kembali meningkat menjadi 0,41.

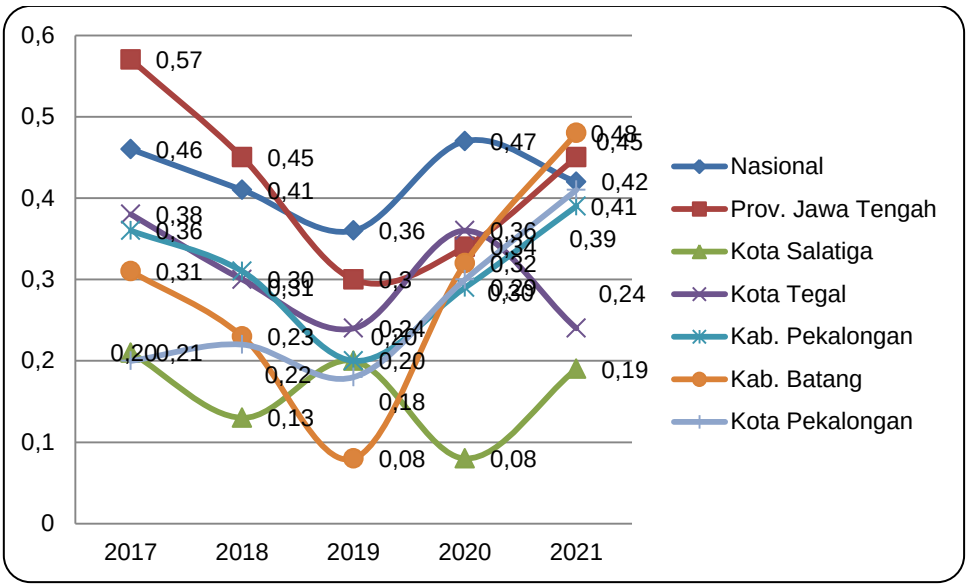
Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan justru cenderung naik. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Salatiga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Namun pada tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan lebih rendah dibandingkan Kota Tegal dan lebih tinggi dibandingan dengan Kota Salatiga.



Gambar 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : https://pekalongankota.bps.go.id/ dan https://jateng.bps.go.id/ (diolah), 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2.22 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

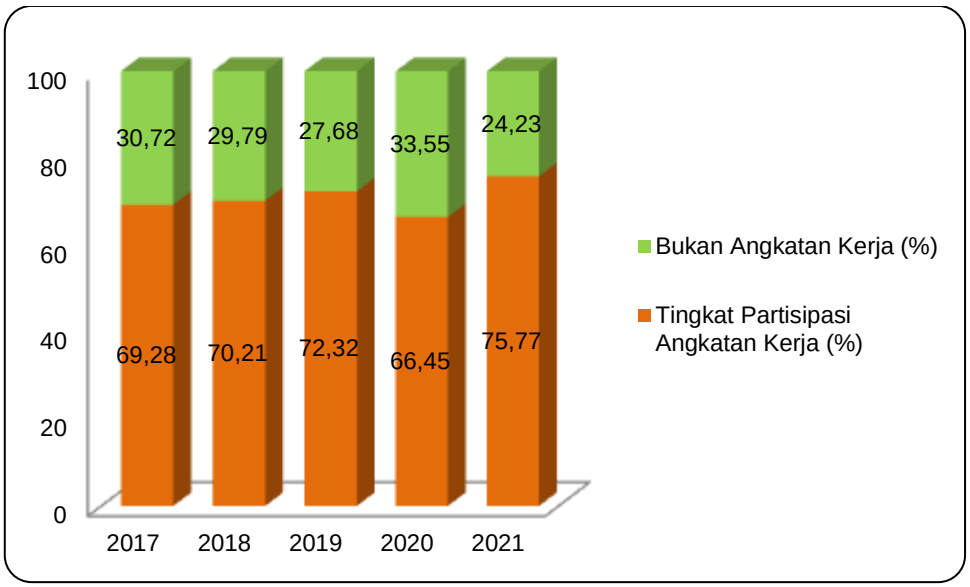
Sumber : https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2022

Pasca pandemi *COVID-19*, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi *COVID-19*. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan.

2.1.2.8. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

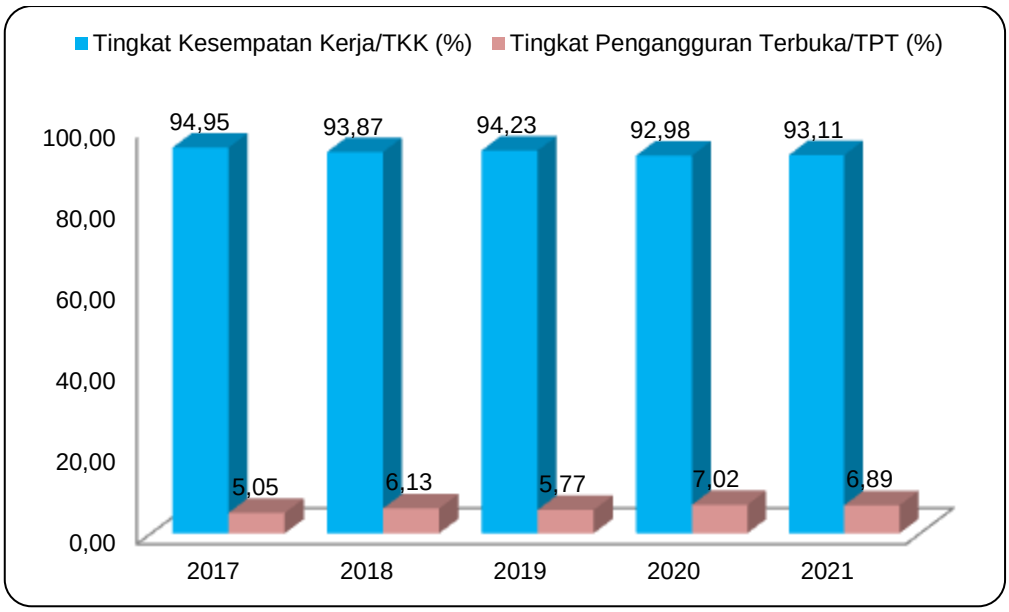
Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua, yang disebut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut International Labour Organization (ILO), penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Pekalongan Tahun 2021 tercatat sebanyak 239.171 orang. Dari jumlah tersebut, yang termasuk Angkatan Kerja (penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran) sebesar 75,77 persen pada tahun 2021 naik 9,32 poin dari tahun 2020. Sisanya, yaitu 24,23 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bersekolah/kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Kenaikan TPAK pada tahun 2017-2021 seiring dengan kenaikan jumlah penduduk usia kerja.



Gambar 2.23 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2022

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 93,11 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,89 persen atau menurun 0,13 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.



Gambar 2.24 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2022

Nilai TPT secara persentase mengalami penurunan dari 7,02 persen menjadi 6,89 persen, namun secara jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan dari sebelas ribuan orang di tahun 2020 menjadi 12.485 orang yang disebabkan beberapa faktor yang mendorong TPT tersebut diantaranya kenaikan angkatan kerja yang cukup

tinggi dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebanyak 24 ribu. Dimana pada tahun 2020 angkatan kerja jumlahnya sekitar 157 ribu orang, sementara di tahun 2021 melonjak hampir 24 ribu kenaikannya yaitu 181 ribu orang. jika dilihat data lebih detail, banyak siswa SMA/SMK yang tidak melanjutkan sekolah dan langsung bekerja menjadi angkatan kerja.

Upaya yang telah dilakukan yakni pertama, dari sisi supply and demand baik warga maupun semua sektor diharapkan terus berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka mampu menyerap tenaga kerja dan membuka peluang kerja lebih tinggi. Disamping itu, Dinperinaker juga telah menyiapkan paket-paket pelatihan keterampilan kerja yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2020 yang dipusatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

2.1.2.9. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Angka kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2017 sampai 2021 bersifat fluktuatif dan berakhir menurun. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2017 berada di angka 1,03 dan meningkat di angka 3,78 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat lagi di angka 4,59 dan menurun di tahun 2020 menjadi 3,91 sampai pada tahun 2021 menjadi 3,60.

Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Angka Kriminalitas
2017	1,03
2018	3,78
2019	4,59
2020	3,91
2021	3,60

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2022

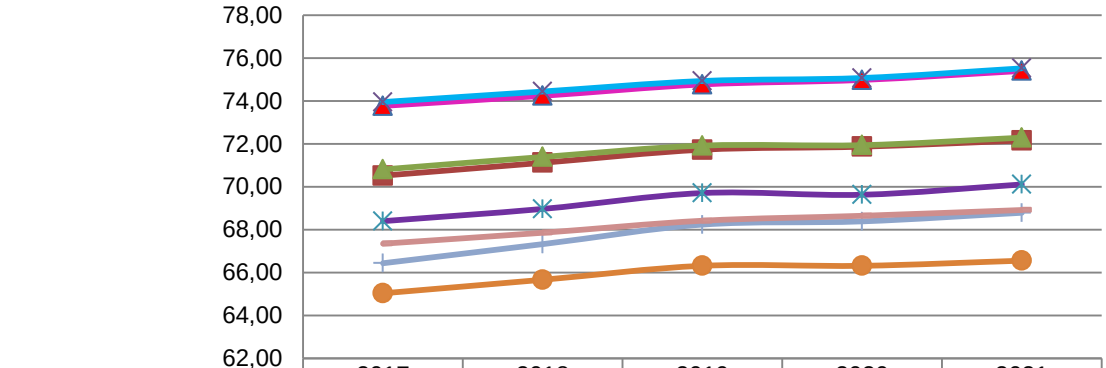
Berdasarkan data tersebut, angka kriminalitas cenderung fluktuatif. Angka ini belum secara langsung berdampak terhadap kondusivitas wilayah karena belum adanya laporan maupun penelitian terkait korelasi antara angka kriminalitas dan kondusivitas wilayah. Data angka kriminalitas dari Kesbangpol Kota Pekalongan bersumber dari Polresta Pekalongan Kota dan Kejaksaan Negeri Pekalongan. Data dari dua sumber tersebut belum tentu memiliki metode pengambilan data yang sama.

Berdasarkan kecenderungan angka kriminalitas tersebut, salah satu tantangan untuk mewujudkan kondusivitas wilayah, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Faktor-faktor eksternal yang harus diperhatikan dalam rangka penciptaan kondusvitas wilayah dan menekan angka kriminalitas adalah perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.10. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar 73,77 menjadi 75,40 di tahun 2021. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2017 sampai 2021, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	73,77	74,24	74,77	74,98	75,40
Prov. Jateng (%)	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16
Nasional (%)	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29
Kota Tegal (%)	73,95	74,44	74,93	75,07	75,52
Kab. Pekalongan (%)	68,40	68,97	69,71	69,63	70,11
Kab. Pemalang (%)	65,04	65,67	66,32	66,32	66,56
Kab. Tegal (%)	66,44	67,33	68,24	68,39	68,79
Kab. Batang (%)	67,35	67,86	68,42	68,65	68,92

Gambar 2.25 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 disajikan dalam Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

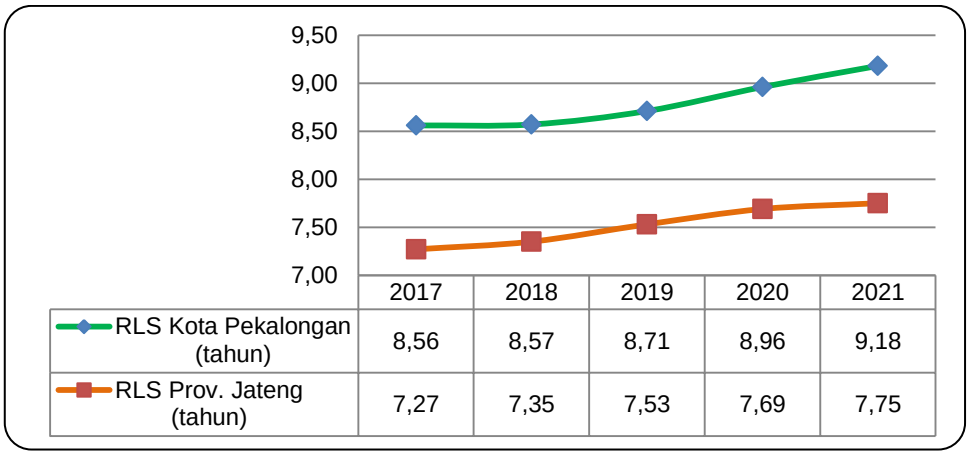
Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2017	8,56	12,78	74,19	11.800,00	73,77
2018	8,57	12,79	74,25	12.312,00	74,24
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98
2021	9,18	12,85	74,44	12.598,00	75,40

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

2.1.2.11. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tigkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan secara moderat. Pada tahun 2017 RLS hanya 8,56 tahun, pada tahun

berikutnya yaitu tahun 2018 menjadi 8,57 tahun. Pada tahun 2019, RLS menjadi 8,71 tahun, di tahun 2020 sebesar 8,96 tahun dan tahun 2021 menjadi 9,18 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2021 berada pada angka 7,75.



	2017	2018	2019	2020	2021
RLS Kota Pekalongan (tahun)	8,56	8,57	8,71	8,96	9,18
RLS Prov. Jateng (tahun)	7,27	7,35	7,53	7,69	7,75

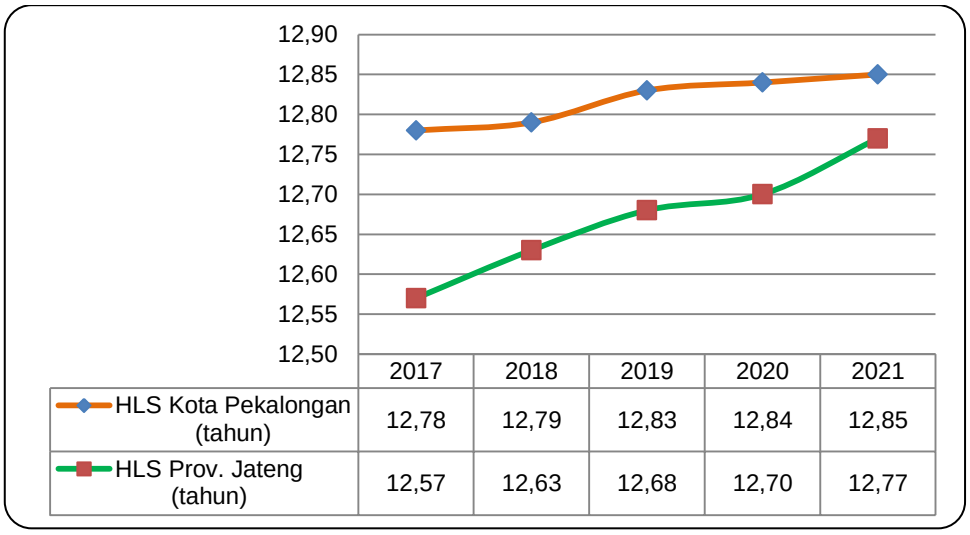
Gambar 2.26 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

2.1.2.12. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



	2017	2018	2019	2020	2021
HLS Kota Pekalongan (tahun)	12,78	12,79	12,83	12,84	12,85
HLS Prov. Jateng (tahun)	12,57	12,63	12,68	12,70	12,77

Gambar 2.27 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan cenderung meningkat di tiap tahunnya.

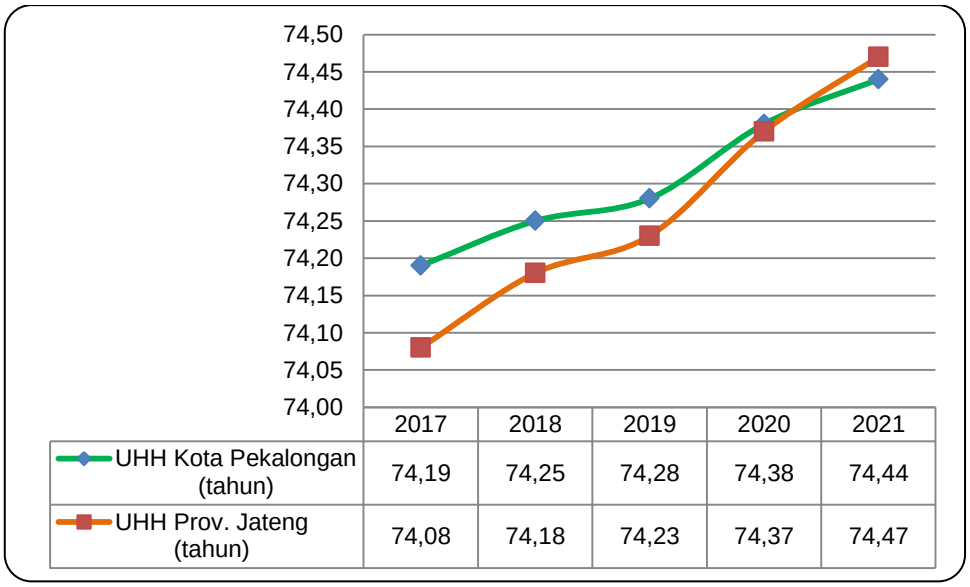
Pada tahun 2021 angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 12,85 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.1.2.13. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2017 - 2021, Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,19 pada tahun 2017 menjadi 74,44 di tahun 2021, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).



	2017	2018	2019	2020	2021
UHH Kota Pekalongan (tahun)	74,19	74,25	74,28	74,38	74,44
UHH Prov. Jateng (tahun)	74,08	74,18	74,23	74,37	74,47

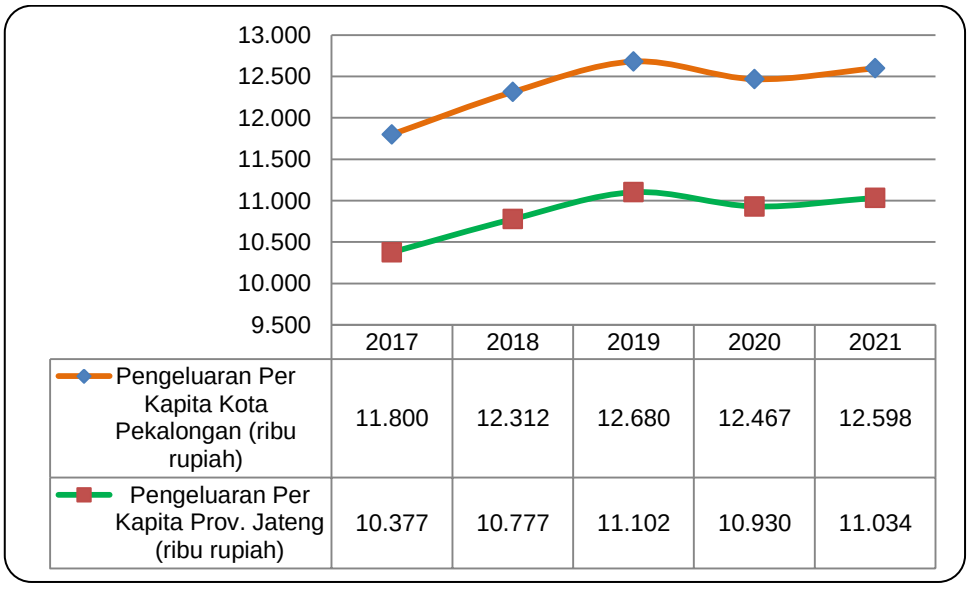
Gambar 2.28 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan pada tahun 2021 sedikit lebih rendah dibandingkan angka Jawa Tengah.

2.1.2.14. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2017-2021. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.800.000, kemudian meningkat menjadi Rp.12.312.000 pada tahun 2018. Di tahun 2019 berada di angka Rp.12.680.000, dan di tahun 2020 turun menjadi Rp.12.467.000. Namun pada tahun 2021 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat kembali sebesar Rp.12.598.000.



	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	11.800	12.312	12.680	12.467	12.598
Pengeluaran Per Kapita Prov. Jateng (ribu rupiah)	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034

Gambar 2.29 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

2.1.2.15. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2017	114,47	108,44	82,97	91,09	92,04	84,35
2018	110,86	108,18	74,54	91,96	74,41	84,15
2019	112,45	107,74	75,91	91,70	74,92	86,76
2020	110,98	106,32	79,36	93,21	78,66	86,83
2021	111,96	106,40	80,69	94,00	76,12	86,65

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Pada tahun 2017, APK jenjang SD/MI/sederajat sebesar 114,47 persen, pada tahun 2018 menurun sebesar 110,86 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 112,45 persen, menurun kembali di tahun 2020 sebesar 110,98 persen dan pada akhir periode (tahun 2021) APK jenjang SD/MI/sederajat kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020, yaitu 111,96 persen. APK di jenjang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi seperti APK jenjang SD/MI. APK jenjang SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 82,97 persen menjadi 74,54 persen di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 naik menjadi 75,91 persen, meningkat kembali di tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu sebesar 79,36 persen dan 80,69 persen. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK cenderung menurun dari awal periode (tahun 2017) hingga di akhir periode (tahun 2021) menurun menjadi 76,12 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100 persen selama periode tahun 2017-2021, namun cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2021, yaitu sebesar 106,40 persen. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 91 persen, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 84-86 persen. Secara umum, APK jenjang SD/MI Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa tengah, namun APK jenjang SMP/MTs dan APK jenjang SMA/MA/SMK Kota Pekalongan lebih rendah dibanding APK Provinsi Jawa Tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih di dominasi laki-laki dengan nilai 102,02. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum perempuan dengan nilai 110,31. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara (persen)	102,02	100,56
	SMP/Setara (persen)	100,98	110,31
	SMA/Setara (persen)	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2.1.2.16. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017-2019, persentase pada jenjang pendidikan SD/sederajat berada di posisi tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

Pada tahun 2017 dan 2018, persentase pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/sederajat lebih tinggi daripada SMP/sederajat. Namun di tahun 2019 posisi tersebut berubah, dimana pada jenjang SMP/sederajat lebih tinggi daripada jenjang SMA/sederajat. Sementara untuk jenjang Diploma IV/S1/S2 persentasenya lebih tinggi dari jenjang Diploma I/II/III/Sarjana Muda dalam kurun waktu 2017-2019. Untuk kategori Tidak/Belum Tamat SD/sederajat berada di kisaran angka 15-19 persen, dan untuk kategori Tidak/Belum Pernah Sekolah berada di kisaran angka ± 1 persen.

Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-20219

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II/III/Sarjana Muda	Diploma IV/S1/ S2
2017	1,87	15,86	28,04	21,42	26,73	1,35	4,74
2018	1,53	18,41	27,96	20,61	25,32	1,79	4,37
2019	0,87	15,78	27,51	25,82	22,66	1,81	5,55

Sumber : pekalongankota.bps.go.id, 2022

Selanjutnya, mulai tahun 2020 BPS menghitung pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan usia 15 tahun keatas. Angka tertinggi berada pada jenjang SMA/sederajat, yaitu diatas 30 persen. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2021

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
2020	0,98	9,04	27,19	24,36	30,28	8,15
2021	0,69	7,6	22,55	25,62	31,68	11,86

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2022

2.1.2.17. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2017-2021 jenjang SD/MI berada di kisaran 98 persen sampai dengan 100 persen. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 meningkat jika dibandingkan tahun 2020. Sedangkan APM pada jenjang SM/MA/SMK pada akhir periode (2021) mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka APM SD/MI/Sederajat Kota Pekalongan lebih tinggi. Tetapi APM SMP/MTs/Sederajat Kota Pekalongan lebih rendah. Sedangkan APM SMA/MA/SMK/Sederajat Kota Pekalongan jika dilihat dari tahun 2017-2021 hanya pada tahun 2018 saja Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2021 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA disajikan dalam Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2017	98,23	97,13	74,08	79,13	55,32	59,20

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2018	100,00	97,75	74,54	79,31	74,41	59,31
2019	99,52	97,77	71,85	79,84	54,81	59,35
2020	99,48	98,00	74,55	81,00	55,58	59,74
2021	99,11	98,22	75,97	80,99	55,04	60,46

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2020, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/setara, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	83,73	82,07
	SMP/Setara	59,28	62,97
	SMA/Setara	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2.1.2.18. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal yang merupakan masalah dan kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan status kesehatan ibu selama hamil dan melahirkan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 11,99 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2020 sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka tren Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2017 sampai 2021 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka 988,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka 991,19 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), *asfiksia*, kelainan *kongenital*, kelainan saluran pencernaan, *pnemonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

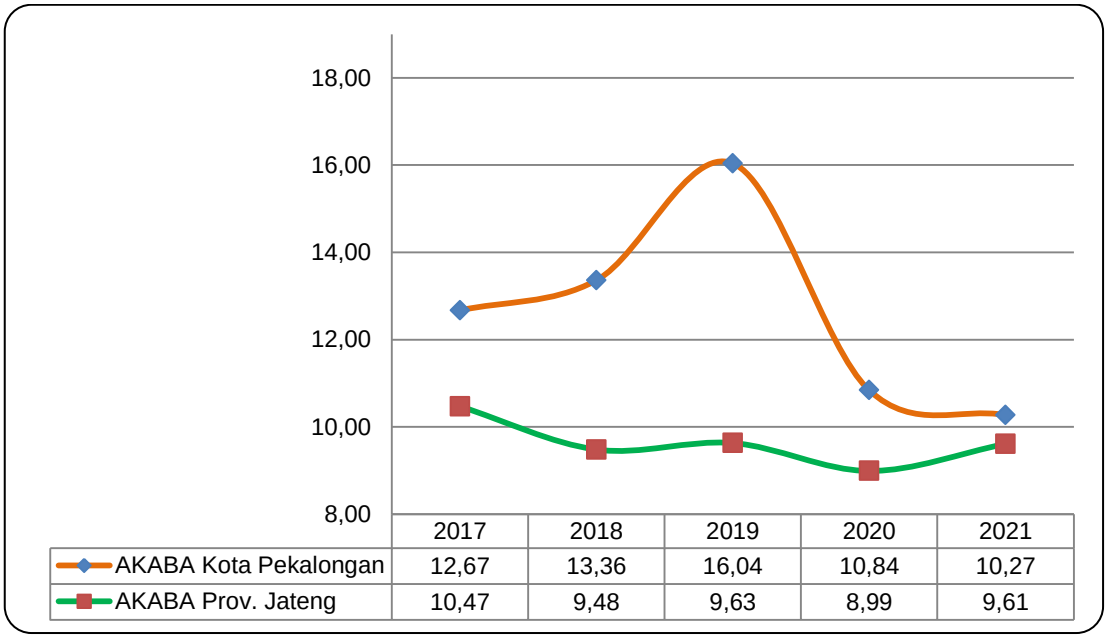
Tabel 2.21 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2017	9,08	990,92
2018	10,99	989,01
2019	11,99	988,01
2020	8,81	991,19
2021	8,90	991,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

2.1.2.19. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.



	2017	2018	2019	2020	2021
AKABA Kota Pekalongan	12,67	13,36	16,04	10,84	10,27
AKABA Prov. Jateng	10,47	9,48	9,63	8,99	9,61

Gambar 2.30 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Sumber : Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2021 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2021 Dinkes Jawa Tengah, 2022

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 16,04 per 1.000 KH kemudian menurun menjadi 10,84 per 1.000 KH pada Tahun 2020 dan 10,27 per 1.000 KH di tahun 2021. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit. Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 – 2021 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017, AKABA sebesar 10,47 per 1.000 KH, kemudian turun ditahun 2018

menjadi 9,48 per 1.000 KH, naik menjadi 9,63 per 1.000 KH pada tahun 2019, menurun menjadi 8,99 per 1.000 KH di tahun 2020, dan kembali meningkat 9,61 per 1.000 KH di tahun 2021.

2.1.2.20. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel 2.22 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2017	10	5839	171,26
2018	7	5911	118,42
2019	6	5923	101,30
2020	9	5905	152,41
2021	11	5844	188,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2021 jika dibandingkan AKI tahun 2020 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 35,82 persen. Kenaikan kasus kematian ibu di Kota Pekalongan disebabkan beberapa faktor diantaranya keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus *COVID-19*, serta adanya komplikasi selama masa kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, emboli air ketuban, jantung, diabetes).

2.1.2.21. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, angka kesakitan berada di angka 13,33 persen. Angka tersebut terus maningkat sampai dengan tahun 2019 dan mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 16,68 persen. Di tahun 2020 dan tahun 2021 menurun menjadi 12,89 persen dan 8,38 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23 Angka Kesakitan
di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Angka Kesakitan (persen)
2017	13,33
2018	13,07
2019	16,68
2020	12,89
2021	8,38

Sumber : jateng.bps.go.id dan
pekalongankota.bps.go.id, 2022

2.1.2.22. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibadingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Gambaran prevalensi angka stunting Kota Pekalongan dari tahun 2017 – 2021 disajikan dalam Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24 Prevalensi Balita Stunting
Kota PekalonganTahun 2017-2021

Tahun	Prevalensi Stunting (%)
2017	8,06
2018	6,99
2019	6,87
2020	9,42
2021	7,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

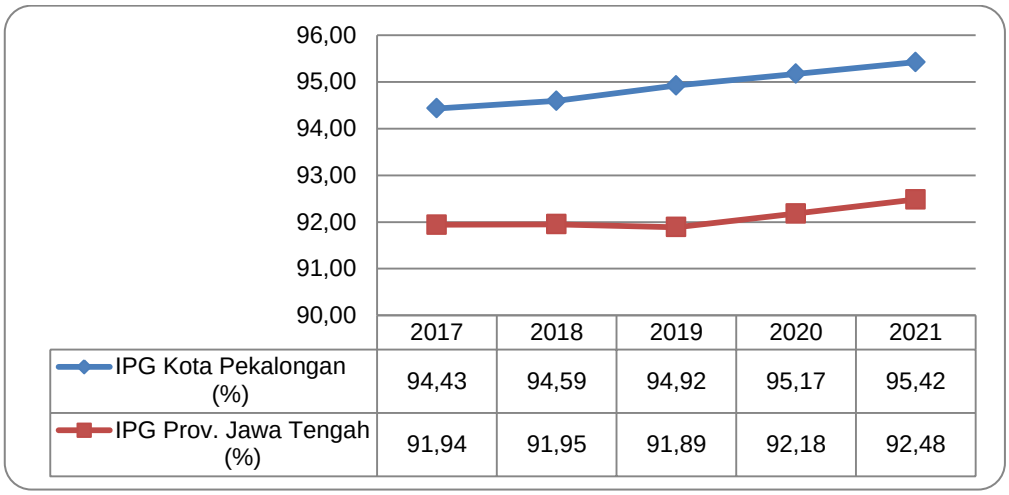
Dari Tabel 2.24 dapat dilihat bahwa prevalensi Balita Stunting di Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dari 8,06 persen di tahun 2017 menjadi 6,87 persen di tahun 2019 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 9,42 persen namun kembali menurun di tahun 2021 sebesar 7,82 persen.

2.1.2.23. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021, IPG Kota

Pekalongan sebesar 95,42 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.



	2017	2018	2019	2020	2021
IPG Kota Pekalongan (%)	94,43	94,59	94,92	95,17	95,42
IPG Prov. Jawa Tengah (%)	91,94	91,95	91,89	92,18	92,48

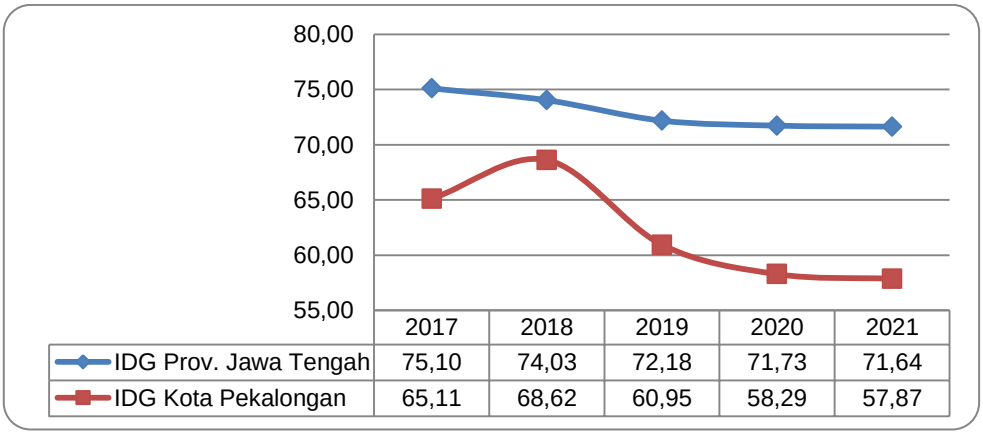
Gambar 2.31 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

2.1.2.24. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2017, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 65,11, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 68,82. Selanjutnya menurun hingga di angka 57,87 pada tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2017-2021, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.32. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.



	2017	2018	2019	2020	2021
IDG Prov. Jawa Tengah	75,10	74,03	72,18	71,73	71,64
IDG Kota Pekalongan	65,11	68,62	60,95	58,29	57,87

Gambar 2.32 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

2.1.2.25. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain : Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.25 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dibandingkan pada tahun 2017 maka jumlah kelompok kesenian pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai hampir dua kali lipatnya. Bahkan di tahun 2021 meningkat tajam dari 162 menjadi 232 kelompok. Sementara itu gedung kesenian jumlanya tetap yaitu 4, antara lain Warung Apresiasi, GOR Jetayu, Sanggar Laras Wisata, Sanggar Cahyo Kedaton.

Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kelompok Kesenian	109	164	162	162	232
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	3,67	2,44	2,47	2,47	1,72

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Jumlah kelompok kesenian yang dapat difasilitasi dan disediakan sarana masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah kelompok seni budaya yang jumlahnya cenderung bertambah sedangkan ketersediaan sarana yang akan diberikan terbatas. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat berkumpul ataupun *offline*/tatap muka pada tahun 2021 masih belum optimal pelaksanaannya. Antara lain dalam pelaksanaan event kesenian dan kebudayaan.

2.1.2.26. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2017 jumlah organisasi pemuda yaitu 9 organisasi. Jumlahnya relatif tetap pada tahun 2018. Tahun 2019 meningkat cukup signifikan menjadi 26 organisasi pemuda. Namun pada tahun 2020 dan 2021 jumlah organisasi pemuda menurun menjadi 24 organisasi. Sementara itu jumlah kegiatannya tidak berubah banyak, antara 8 sampai 10 kegiatan kepemudaan sepanjang lima tahun terakhir.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2017-2021 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda

Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda	9	9	26	24	24
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	8	8	10

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Dari tahun 2017 jumlah klub olahraga bertambah menjadi 20 klub pada tahun 2018 dan jumlah ini tidak berubah sampai tahun 2020. Di tahun 2021 bertambah 15 klub sehingga menjadi 35 klub. Sementara itu gedung olahraga yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 2 gedung.

Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Klub Olahraga	16	20	20	20	35
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2017 berjumlah 30 organisasi dan jumlahnya masih tetap hingga tahun 2018. Terdapat penambahan 1 (satu) organisasi olahraga di tahun 2019 sehingga menjadi 31 organisasi olahraga, jumlah ini tidak bertambah sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 bertambah 3 organisasi sehingga menjadi 34 organisasi olahraga. Begitu pula dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 10 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel 2.28 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	31	31	34
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lapangan olahraga	55	55	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	7	7	8	8	10

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) PAUD

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif dengan hasil akhir di tahun 2021 menurun. Jumlahnya meningkat pada tahun 2017 dan 2019, namun di tahun 2021 sedikit menurun, semula 7.485 siswa menjadi 7.077 siswa. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2017	8.107	15.873	51,07
2018	8.000	16.180	49,44
2019	9.019	16.625	54,25
2020	7.485	15.710	47,64
2021	7.077	15.440	45,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

2) Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2017-2021 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 110,57 di tahun 2017 menjadi 101,86 di tahun 2021. Sementara itu capaian APS jenjang SMP/MTs cenderung menurun dari 104,21 di tahun 2017 menjadi 102,56 di tahun 2021. Dalam perjalanannya, di tahun 2019 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTS tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Penurunan APS juga terjadi di tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini karena adanya kebijakan zonasi yang mulai

diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
APS SD/MI	110,57	106,97	98,67	103,79	101,86
APS SMP/MTs	104,21	104,67	97,69	103,67	102,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

3) Usia 5-15 tahun

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs.

Secara series, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun		Jml. Anak Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5 – 15 Tahun	APS (persen)	
2017	L	27.187	29.166	93,21	94,84
	P	26.245	27.172	96,59	
2018	L	28.202	29.456	95,74	98,65
	P	28.051	27.569	101,75	
2019	L	29.622	29.585	100,13	100,77
	P	28.028	27.625	101,46	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	
2021	L	29.319	29.610	99,02	101,38
	P	28.911	27.830	103,88	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, ketersedian jumlah SD/MI cenderung naik namun tidak signifikan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 146 sekolah dan di tahun 2021 sebanyak 147 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah

SMP/MTs cenderung stagnan yaitu 38 sekolah. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah SD/MI	146	149	149	146	147
Jumlah SMP/MTs	38	38	38	38	38
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	29.873	30.524	32.855	31.581	31.724
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.229	15.330	15.385	15.067	15.109

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

Berdasarkan data diatas maka rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2017	40,57
2018	40,78
2019	38,76
2020	39,44
2021	39,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, rasio ketersedian guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 rasio sebesar 564,52, kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2021 menjadi 587,87 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.763	1.887	1.840	1.841	1.787
	Jumlah Murid	32.121	32.210	32.092	31.752	31.007
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	963	993	933	932	936
	Jumlah Murid	16.168	15.905	15.759	15.539	15.313
Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)		2.726	2.880	2.773	2.773	2.723
Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)		48.289	48.115	47.851	47.291	46.320

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk		564,52	598,57	579,51	586,37	587,87

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2022, 2022

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.35, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2017-2021, dan berakhir naik di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2017	2.726	1.708	1,6	48.289	0,331
2018	2.880	1.689	1,71	48.115	0,354
2019	2.773	1.778	1,56	47.843	0,326
2020	2.801	1.770	1,58	47.882	0,330
2021	2.723	1.773	1,54	46.320	0,332

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,46 di tahun 2017, mengalami naik turun sampai tahun 2021 dengan kondisi terakhir di angka 0,45 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Karakteristik	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Guru SD/MI*)	1.763	1.887	1.840	1.856	1.787
Rombongan Kelas*)	1.195	1.215	1.173	1.265	1.274
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,47	1,55	1,57	1,47	1,40
Murid SD/MI*)	32.121	32.210	32.855	31.995	31.007
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,46	0,48	0,48	0,46	0,45

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000

penduduk dari tahun 2017-2021. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 berada di angka 1,16, kemudian turun di tahun 2018. Namun kembali naik di tahun 2019 di angka 1,26 dan menurun di tahun 2020 menjadi 1,18. Terakhir naik di tahun 2021 menjadi 1,22. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Karakteristik	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Guru SMP/MTs*)	963	933	933	945	936
Rombongan Kelas*)	513	516	481	505	499
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	1,88	1,81	1,94	1,87	1,88
Murid SMP/MTs*)	16.168	15.905	15.385	15.887	15.313
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,16	1,14	1,26	1,18	1,22

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

*) data pertengahan tahun ajaran

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2017-2021, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2018 kondisi bangunan SD/setara meningkat, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2021 terus mengalami penurunan sampai di angka 72,50 persen. Hal serupa juga terjadi pada kondisi bangunan SMP/setara, dimana pada tahun 2017 sebesar 94,82 persen dan menurun pada tahun 2018 menjadi 88,86 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 94,13 persen dan menurun drastis di tahun 2020 mejadi 68,95 persen, kemudian terakhir naik menjadi 79,36 di tahun 2021. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 – 2021

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI (persen)	91,65	95,01	92,72	73,30	72,50
SMP/MTs (persen)	94,82	88,86	94,13	68,95	79,36

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 0,07 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 0,10 persen, kemudian meningkat lagi di tahun 2020 sebesar 0,29 persen dan terakhir turun menjadi 0,10 di tahun 2021. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs juga fluktuatif. Tetapi angka putus sekolah jenjang SMP/MTs lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenjang SD/MI. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2017 – 2021

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI (persen)	0,07	0,07	0,10	0,29	0,10
SMP/MTs (persen)	0,14	0,15	0,46	0,97	0,26

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2021, 2022

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2017-2021 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/sederajat selama kurun waktu 2017-2021 juga dapat mencapai 100 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI danSMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2021, 2022

Dari nilai ujian akhir nasional, jenjang SD/MI cenderung fluktuatif. Begitu pula dengan jenjang SMP/MTs. Pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya pandemi *COVID-19* tidak diselenggarakan Ujian Akhir Nasional. Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs disajikan dalam Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD MI	7,53	7,26	69,69	0,00	0,00
2	SMP MTs	6,13	5,74	59,02	0,00	0,00

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2021, 2022

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara dalam kurun waktu tahun 2017-2021 telah di atas 100 persen, meskipun dalam perjalanannya cenderung fluktuatif dan pada tahun 2021 turun menjadi 97,82. Sementara itu untuk angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SMP/setara ke SMA/setara sepanjang tahun 2017-2021 cenderung menurun dan sempat berada di bawah 100 persen di tahun 2017 dan 2018. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2017 – 2021

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	111,82	102,44	104,78	102,79	97,82
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,41	98,00	101,25	102,44	96,45

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang disajikan dalam Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	94,23	92,42	92,80	93,53	93,73
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	93,39	93,96	94,96	95,66	94,87

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Pada jenjang TK/RA persentase sekolah terakreditasi A cenderung meningkat. Tahun 2017 hanya 2,78 menjadi 34,23 pada tahun 2021 walaupun pada tahun 2019-2020 persentasenya tetap, yaitu 16,36. Sedangkan jenjang SD/MI dan SMP/MTs persentase sekolah terkreditasi A cenderung fluktuatif. Secara menyeluruh persentase sekolah terakreditasi A pada jenjang TK-SMP dari tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Tabel 2.44 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel 2.44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jenjang TK/RA					
- Sekolah Terakreditasi A	3	8	18	18	38
- Jumlah Sekolah	108	109	110	110	111
- Persen	2,78	7,34	16,36	16,36	34,23
Jenjang SD/MI					
- Sekolah Terakreditasi A	99	95	102	99	99
- Jumlah Sekolah	146	149	149	146	147
- Persen	76,81	63,76	68,46	67,81	67,35
Jenjang SMP/MTs					
- Sekolah Terakreditasi A	23	23	26	26	24
- Jumlah Sekolah	38	38	38	38	38
- Persen	60,53	60,53	68,42	68,42	63,16
Jenjang TK-SMP					
- Sekolah Terakreditasi A	122	122	146	143	161
- Jumlah Sekolah	292	292	297	294	296
- Persen	41,78	42,57	49,16	48,64	54,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

k. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel 2.45 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2021

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2018	297	100	142	47,81	73,90
2019	297	100	200	67,34	83,67
2020	294	100	294	100	100
2021	296	100	296	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2022

Realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan RPJMD.

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel 2.46 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2017	407	22.933	17,75
2018	409	23.269	17,58
2019	411	23.173	17,74
2020	414	23.008	17,99
2021	413	21.584	19,13
Rata-rata			18,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

Jumlah Posyandu dari tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 – 2021 adalah 18,03 yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 18 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 56 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 berdasarkan data pada Tabel 2.47, secara aggregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan bertambahnya 1 (satu) Rumah Sakit maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.47 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun		Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
	Jumlah Penduduk	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2017	301.870	14	0,046	27	0,089	14	0,046	8	0,027
2018	304.477	14	0,046	27	0,089	13	0,043	9	0,030
2019	307.097	14	0,046	27	0,088	12	0,039	9	0,029
2020	307.150	14	0,046	26	0.085	11	0.036	9	0.029
2021	316.216	14	0,044	27	0,085	12	0,038	9	0,028

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

b. Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Data rumah sakit di Kota

Pekalongan yang telah terakreditasi secara rinci disajikan dalam Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2017 - 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	8	8	9	9	9
Jumlah seluruh rumah sakit	8	9	9	9	9
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100,00	88,89	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2017 – 2021, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 11 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 45 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah untuk tahun 2018 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk dokter gigi per 1.000 penduduk. Secara umum rasio dokter per satuan penduduk meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019 dan sedikit meningkat di tahun 2020 dan 2021. Data perkembangan rasio dokter disajikan dalam Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dokter Spesialis	0,48	0,53	0,39	0,42	0,41
Dokter Umum	0,79	0,91	0,60	0,66	0,76
Dokter Gigi	0,17	0,16	0,11	0,12	0,13
Rasio Dokter per satuan penduduk	1,45	1,60	1,1	1,2	1,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2017 – 2021 semakin membaik. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Perawat	2,32	2,58	2,63	2,71	2,71
Rasio Bidan	1,00	1,20	1,08	1,09	1,15
Rasio Farmasi	0,93	1,18	0,84	0,90	1,01
Perawat	709	804	827	832	857
Bidan	304	375	339	335	365
Tenaga Farmasi	285	348	265	276	320

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

d. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus mempunyai ijin, kecuali tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari perijinan ini selain melindungi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mulai Tahun 2019 DPMPTSP Kota Pekalongan telah mengeluarkan izin bagi tenaga kesehatan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.51 berikut.

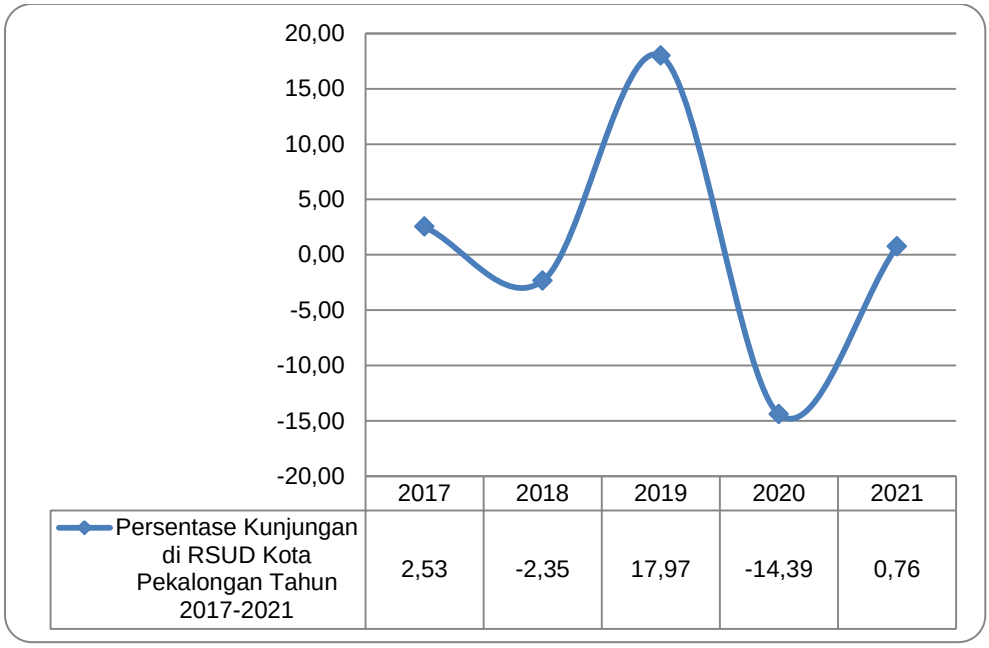
Tabel 2.51 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 - 2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (yang dikeluarkan DPMPTSP)	544	698	863
Jumlah tenaga kesehatan yang berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek	2.348	2.498	2.472
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	23,17	27,94	34,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

e. Jumlah Kunjungan di RSUD Bendan

Pandemi *COVID-19* telah memengaruhi operasional rumah sakit. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19*. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Rasio Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -14,39 persen. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,76 persen. Secara rinci disajikan dalam Gambar 2.33 berikut.



Gambar 2.33 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2017 - 2021

Sumber : RSUD Bendan, 2022

Jumlah Kunjungan pasien pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan adanya pengembangan pelayanan di RSUD Bendan. Namun sejak terjadinya Pandemi *COVID-19* secara global termasuk Kota Pekalongan mulai bulan Maret 2020 mengakibatkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19* secara signifikan.

f. Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Secara rinci sarana farmasi di Kota Pekalongan yang telah memenuhi standar disajikan dalam Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2017 - 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Sarana Farmasi yang memenuhi standar	50	161	102	61	64
Sarana Farmasi yang dilakukan pengawasan	60	208	115	68	71
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	83,33	77,40	88,70	89,71	90,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

g. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai

dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2021 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 54,86 persen. Untuk terus meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0 – 6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif	Cakupan (persen)
2017	5.066	2.168	42,80
2018	5.176	2.668	51,55
2019	5.136	2.938	57,20
2020	4.524	2.416	53,40
2021	4.448	2.440	54,86

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2021, 2022

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan 2021 sebesar 0,18 persen. Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi. Meski ada penurunan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus, tetapi jumlah balita gizi buruk sampai dengan tahun 2021 terus mengalami kenaikan menjadi 38 kasus. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.54 berikut.

Tabel 2.54 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2017	31	22.933	0,14
2018	19	22.666	0,08
2019	12	23.050	0,05
2020	35	22.506	0,16
2021	38	21.584	0,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

i. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Berikut kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2017 - 2021) disajikan dalam Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

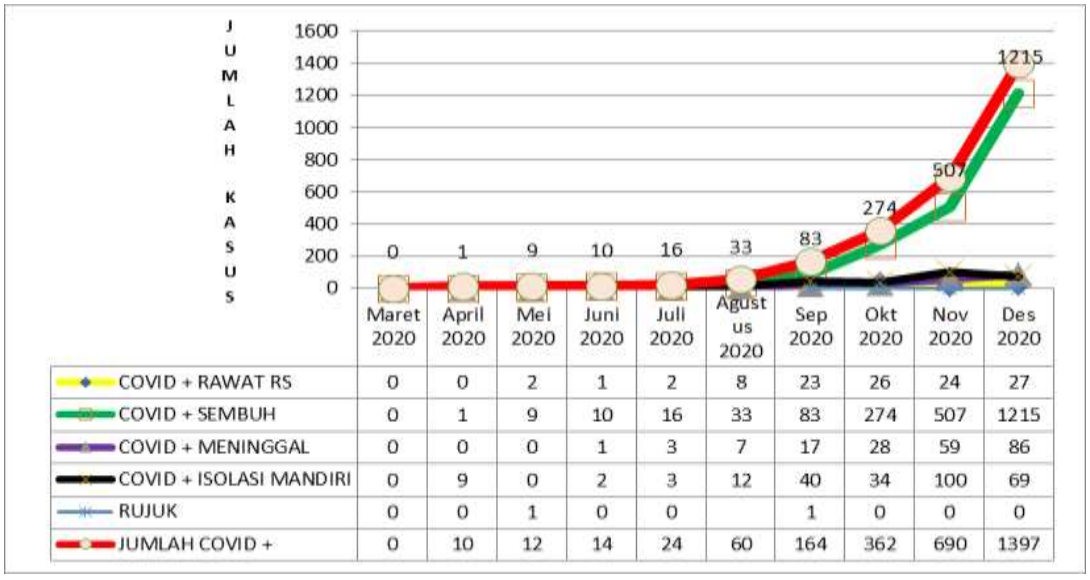
Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (persen)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2017	14,42	4,55	5,9	214,72	32	16
2018	11,24	8,57	4,17	260,67	68	29
2019	18,19	1,75	4,78	249,71	57	40
2020	26,89	7,06	1,27	171,14	118	1
2021	12,33	2,56	3,14	170,45	112	27

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

Pandemi *COVID-19* yang melanda secara global termasuk Kota Pekalongan sejak bulan Maret 2020 hingga akhir 2021 sangat berpengaruh pada seluruh sektor kehidupan baik sektor kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Jumlah kasus *COVID-19* di Kota Pekalongan secara akumulasi dari tahun 2020 terus meningkat. Peningkatan yang cukup tajam pertama terjadi pada bulan Desember 2020 kemudian meningkat sangat tajam pada bulan Juni 2021 sampai Agustus 2021.

Gambaran kasus *COVID-19* di Kota Pekalongan Tahun 2020 disajikan dalam Gambar 2.34 berikut.



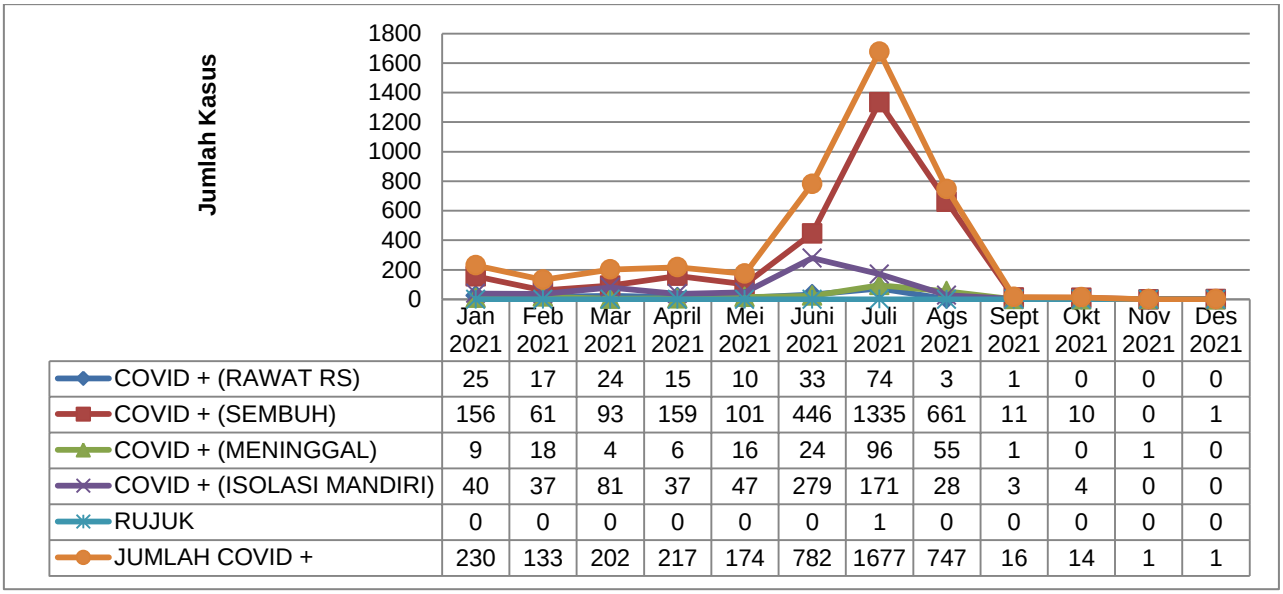
Gambar 2.34 Perkembangan Persebaran *COVID-19* di Kota Pekalongan Bulan Maret-Desember 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (diolah), 2021

Persebaran kasus *COVID-19* di Kota Pekalongan mulai terkonfirmasi pada bulan April 2020 sejumlah 10 kasus. Terhitung sampai bulan Desember 2020 ada 1.397 kasus jumlah orang yang sudah terjangkit *COVID-19*. Tercatat sampai akhir tahun 2020 terdapat 27 dirawat RS, 1.215 kasus sudah sembuh, 86 kasus meninggal, dan isolasi mandiri 69 kasus.

Perkembangan kasus *COVID-19* tahun 2021 mulai mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada bulan Juni 2021- Agustus 2021, puncak kasus terjadi

pada bulan Juli 2021 sebanyak 1677 kasus. Kasus *COVID-19* kembali menurun secara signifikan mulai bulan September 2021 menjadi 16 kasus, bulan Oktober sebanyak 14 kasus hingga bulan Desember 2021 sebanyak 1 kasus.



	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Ags 2021	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021
COVID + (RAWAT RS)	25	17	24	15	10	33	74	3	1	0	0	0
COVID + (SEMBUH)	156	61	93	159	101	446	1335	661	11	10	0	1
COVID + (MENINGGAL)	9	18	4	6	16	24	96	55	1	0	1	0
COVID + (ISOLASI MANDIRI)	40	37	81	37	47	279	171	28	3	4	0	0
RUJUK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
JUMLAH COVID +	230	133	202	217	174	782	1677	747	16	14	1	1

Gambar 2.35 Perkembangan Persebaran *COVID-19* di Kota Pekalongan Bulan Januari-Desember 2021

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (diolah), 2022

j. Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap produk olahan pangan industry rumah tangga. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2017 - 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sample produk pangan olahan industry rumah tangga yang bebas dari cemaran (mikro biologi, fisika, kimia)	105	161	2.008	648	396

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sample produk pangan olahan produk rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	135	208	2.104	654	447
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	77,78	77,40	95,44	99,08	88,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

k. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan / restoran, jasa boga / catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat disajikan dalam Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2017 - 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	772	770	606	609	639
Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	826	849	658	664	662
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	93,46	90,69	92,10	91,72	96,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

l. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Namun kembali melonjak pada tahun 2020 sebanyak 22.160 orang dan 2021 sebanyak 23.490 orang.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2021 adalah PBI APBN sebanyak 84.966 jiwa, menurun 2 persen jika dibandingkan dengan jumlah PBI APBN tahun 2020. Begitu juga dengan jumlah penerima Jamkesda tahun 2021 sebanyak 62.375 jiwa, menurun 3,16 persen dibandingkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2020. Secara lengkap data penduduk miskin

yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2017 - 2021) disajikan dalam Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58 Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	Persentase Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	Persentase Penerima Jamkesda
2017	301.870	22.510	77.464	25,66	50.621	16,77
2018	304.477	20.520	77.415	25,43	65.946	21,66
2019	307.097	20.268	79.933	26,03	70.931	23,10
2020	307.150	22.160	88.685	28,87	70.307	22,89
2021	308.310	23.490	84.966	27,56%	62.375	20,23%

Sumber : BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

m. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Ada 12 Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI, yaitu :

1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tahun 2018 sampai tahun 2021menunjukkan bahwa angka IKS Kota Pekalongan masih sangat rendah. Angka IKS 2018 baru mencapai 0,14 persen mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2021 dengan angka IKS sebesar 0,18 persen. Rata-rata peningkatan angka IKS per tahun hanya sebesar 0,013 persen. Sedangkan angka ideal IKS sebesar 0,8 persen dari jumlah data. Secara rinci capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan tahun 2018 sampai dengan 2021 disajikan dalam Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59 Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2018-2021

Tahun	Indeks Keluarga Sehat
2018	0,14
2019	0,16
2020	0,17
2021	0,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

n. Rumah Tangga Sehat

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI Eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Penerapan 10 indikator PHBS di tingkat rumah tangga sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan.

Cakupan rumah tangga sehat di Kota Pekalongan tahun 2017 dan 2018 meningkat cukup signifikan. Dari target 75,20 persen di tahun 2017, terealisasi 83,51 persen, dan target 75,40 persen di tahun 2018, terealisasi 96,34 persen, namun pada tahun 2019 menurun 94,60 persen dan meningkat kembali ditahun 2020 dengan realisasi 96,78 persen, namun kembali turun di tahun 2021 menjadi 95,75. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2017	83,51
2018	96,34
2019	94,60
2020	96,78
2021	95,75

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2022

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2017-2021, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Perubahan panjang jalan Negara terjadi mulai tahun 2017, dimana sebelumnya 10,37 Km berkurang menjadi 9,090 Km. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 kembali bertambah menjadi 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen. Di tahun 2021, penjang jalan

Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 96,42 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 3,58 persen.

Tabel 2.61 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2017–2021

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2017	9,090	8,585	0,505	0	94,44	5,56	0
2018	9,420	7,250	2,170	0	76,96	23,03	0
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42
2021	10,240	9,874	0	0,366	96,42	0	3,58

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DIY, 2022

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2017 sampai 2021 tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota yaitu 153,41 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2021 sepanjang 96,37 km. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.62 berikut.

Tabel 2.62 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2017	153,41	92,64	22,11	38,66	60,39	14,41	25,20
2018	153,41	96,04	21,97	35,41	62,60	14,32	23,08
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83
2021	153,41	96,37	27,25	29,79	62,82	17,77	19,42

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2017-2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 26,58 persen. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63 Rasio Jaringan Irigasi
di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Jaringan Irigasi (persen)	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik juga tidak mengalami perubahan dalam dua tahun (tahun 2017 sampai dengan tahun 2018). Pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik tercatat 76,43 persen, tahun 2019 menurun menjadi 70,43 persen dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 66,14 persen. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 79,62 persen sebagimana disajikan dalam Tabel 2.64 berikut.

Tabel 2.64 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik
di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (persen)	76,43	76,43	70,43	66,14	79.,62

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2022

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2017-2021, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 25 persen. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan dalam Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai
Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	25	25	25	25	25

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

c. Drainase

Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama

Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 57.688,42 meter, kondisi sedang sepanjang 17.898,56 meter dan kondisi rusak sepanjang 24.890,70 meter.

Tabel 2.66 Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota PekalonganTahun 2021

Kondisi	Panjang (meter)	Persentase
Baik	57.688,42	57,41
Sedang	17.898,56	17,81
Rusak	24.890,70	24,77
Total	100.477,68	100,00

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-8 persen. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan saluran drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan (Ha)	Luas Genangan (Ha)	Persentase
2017	4.525	1.396	30,85
2018	4.525	1.391	30,75
2019	4.525	1.057	23,35
2020	4.525	1.892,88	41,83
2021	4.642	1.730	37.27

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut :

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5 persen
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul *revetment* yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang telah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.68 berikut.

Tabel 2.68 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2021

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Revetment (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Panjang Bibir pantai (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2022

Khusus terkait bencana rob yang melanda sebagian besar wilayah utara dan barat Kota Pekalongan, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan tanggul rob oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Meskipun berdampak sangat positif bagi pengurangan genangan akibat rob, namun keberadaan tanggul ini akan menyisakan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain :

1. Operasional dan pemeliharaan tanggul, baik untuk operasional pompa ataupun pemeliharaan tanggul itu sendiri.
2. Pembangunan kembali saluran – saluran drainase yang akan terkoneksi dengan *long storage* sebelah selatan tanggul.
3. Perencanaan penggunaan lahan di sebelah selatan tanggul yang kemungkinan akan menjadi kering dan dapat diperuntukkan bagi pembangunan permukiman ataupun pertanian.
4. Penataan kawasan di sebelah utara tanggul, baik untuk drainase dan irigasi tambak ataupun untuk konservasi guna mencegah berkurangnya luas wilayah sebagai akibat hilangnya daratan karena tingginya air laut.
5. Penanganan kawasan di sisi timur Jl. Kunti Utara ataupun sebelah selatan Jl. Samudra. Kawasan ini dapat terancam oleh limpasan air rob karena masih rendahnya Jl. Kunti Utara ataupun parapet pantai di sisi utara sepanjang Jl. Samudra.

e. Penataan Ruang dan Bangunan

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Sehingga dalam pentaan ruang terkandung proses perencanaa, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara , termasuk ruang dibawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan pemelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan

penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah melakukan revisi melalui Perda Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi :

a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
b) Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
d) Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
f) Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
g) Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
h) Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, rencana pola ruang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, yang terdiri dari Kawasan lindung setempat; Kawasan cagar budaya; ruang terbuka hijau RTH kota dan kawasan ekosistem mangrove, serta kawasan budidaya, yang terdiri dari Kawasan pertanian; Kawasan permukiman; Kawasan perutukan industry; Kawasan pariwisata dan Kawasan pertahan keamanan. Pengawasan perlu dilakukan sejak ijin pemanfaatan ruang sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang telah direncanakan dalam RTRW serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung operasional RTRW Kota dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, Kota Pekalongan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada tahun 2014 Kota Pekalongan telah Menyusun RDTR untuk 4 (empat) kecamatan dan sudah mendapat persetujuan dari DPRD namun saat mengajukan persetujuan substansi ke Provinsi bersamaan dengan mulai direvisinya RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029. Sehingga proses penyusunan RDTR dihentikan, menunggu hasil revisi RTRW. Pada tahun 2020 telah tersusun revisi RTRW Kota Pekalongan yang disahkan dalam Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Setelah adanya revisi RTRW, maka

Dokumen RDTR disusun mulai tahun 2021 sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR untuk 4 kecamatan di Kota Pekalongan. Pada tahun 2022 dilanjutkan penyusunan dokumen dan diharapkan selesai dah disahkan menjadi Peraturan Walikota pada akhir tahun.

Capaian indikator kinerja Urusan Penataan Ruang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2017-2021) disajikan dalam Tabel 2.69.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,40	18,60	18,60	18,60	2.89
2.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen)	0,3	0,16	0,17	0,17	1.97
3.	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	96	98	98	98	99

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

Capaian indikator kinerja urusan Penataan Ruang terdiri dari 3(tida) indikator, sebagai berikut : Persentase tersedianya luasan RTH publik mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dari total luas wilayah (capaian tahun 2020 adalah 18,6 persen). Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2017-2021 dari 0,3 pada tahun 2017 menjadi 1,97 pada tahun 2021. Capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan yang menandakan makin besarnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan banguan Gedung dan pengurusan perijinan, terutama dalah izin mendirikan bangunan/IMB serta peningkatan dalam pengawasan bangunan Gedung oleh perangkat daerah terkait. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2017-2021, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan meningkatnya pengawasan dari Perangkat Daerah terkait dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selanjutnya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan dalam Tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
A	**Kawasan Lindung**			
1.	Kawasan Perlindungan Setempat			
	a. Sempadan Sungai	±24 Ha		v
	b. Sempadan Pantai	±26 Ha		v

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
	c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	±15 Ha		v
2.	Kawasan Cagar Budaya	9 Ha		v
3.	RTH Kota (Publik)	335 Ha		v
4.	Kawasan Ekosistem Mangrove	88 Ha		v
B	**Kawasan Budidaya**			
1.	Kawasan Pertanian	521 Ha		v
2.	Kawasan Perikanan			
	a. Kawasan Perikanan Tangkap	38 Ha		v
	b. Kawasan Perikanan Budidaya	173 Ha		v
3.	Kawasan Perumahan	2.430 Ha		v
4.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	386 Ha		v
5.	Kawasan Perkantoran	51 Ha		v
6.	Kawasan Peribadatan	10 Ha		v
7.	Kawasan Pendidikan	94 Ha		v
8.	Kawasan Kesehatan	16 Ha		v
9.	Kawasan Olah raga	6 Ha		v
10.	Kawasan Transportasi	9 Ha		v
11.	Kawasan Peruntukan Industri	189 Ha		v
12.	Kawasan Pariwisata Alam	11 Ha		v
13.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	7 Ha		v
	Luas Total (Ha)	**4.438**		

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

Dalam hal penataan bangunan, Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap PBG, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung atau perizinan yang diwajibkan kepada para pemilik bangunan gedung dalam membangun atau mengembangkan propertinya. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, jumlah bangunan ber-IMB terus meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah bangunan baru. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71 Perkembangan Jumlah Bangunan ber-IMB di Kota Pekalongan Tahun 2027-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	**Seluruh Bangunan**					
	Jumlah bangunan ber-IMB	13.659	14.218	14.809	15.131	15.423
	Jumlah bangunan belum ber-IMB	74.171	74.155	74.199	74.211	74.214
	Jumlah bangunan	87.830	88.373	89.008	89.342	89.637

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
B	**Bangunan Rumah Tinggal**					
	Jumlah bangunan rumah tinggal ber-IMB	10.793	11.161	11.572	11.778	11.923
	Jumlah bangunan rumah tinggal	72.129	72.467	72.876	73.210	73.357

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

Upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja konstruksi terus dilakukan. Tenaga kerja konstruksi yang terlatih yaitu tenaga operator/teknisi/analis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Tenaga kerja konstruksi yang terlatih tersebut dibuktikan dengan sertifikat pelatihan termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau standar khusus.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2020-2021), jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli sebanyak 77 orang. Selengkapnya disajikan dalam tabel Tabel 2.72 berikut.

Tabel 2.72 Perkembangan Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih dan Tersertifikasi di Kota Pekalongan Tahun 2020-2021

No.	Jenis Tenaga Ahli	2020	2021
1	Tenaga kerja konstruksi yang terlatih (orang)	77	77
2	Tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli (orang)	77	77

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2022

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Layak Huni (RLH), salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2017 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 6,88 persen, setara dengan 5.159 unit rumah. Tahun 2017-2021 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun yaitu dari 6,88 persen menjadi 2,17 persen. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan RLH di Kota Pekalongan semakin membaik atau bertambah seiring dengan berkurangnya RTLH. Pada tahun. Perkembangan RTLH dan RLH di Kota Pekalongan pada tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2017	74.970	5.159	6,88	69.811	93,12
2018	75.618	3.428	4,53	72.190	95,47

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2019	76.269	2.369	3,11	73.900	96,89
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43
2021	73.357	1.585	2,17	71.772	97,83

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2022

Selain data tentang Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni, pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu mempertimbangkan kebutuhan rumah di Kota Pekalongan. secara lengkap, kebutuhan rumah (*backlog*) disajikan dalam Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74 Data Kebutuhan Rumah (*Backlog*) di Kota Pekalongan Tahun 2021

Kecamatan	*Backlog* Kepemilikan	*Backlog* Penghunian
Pekalongan Barat	7.271	6.513
Pekalongan Timur	5.281	4.813
Pekalongan Utara	6.267	5.849
Pekalongan Selatan	4.020	3.825

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2022

b. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 84,71 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah dalam tiga tahun terakhir dimana pada akhir tahun 2020 mencapai 88,79 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 86,89 persen. Hal tersebut disebabkan karena sebagian kecil penduduk berhenti berlangganan PDAM maupun PAMSIMAS.

Tabel 2.75 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	255.724	265.430	272.090	264.330	267.880
Jumlah Penduduk (jiwa)	301.870	304.477	307.097	307.150	308.310
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	84,71	87,18	88,60	86,06	86,89

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2022

Sementara itu berdasarkan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Nilai Daya Dukung Air Kota Pekalongan Tahun 2020 sebesar 0,81 yang berarti daya dukung airnya berada dalam kategori Daya Dukung Air Terlampaui atau Buruk. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pekerja industri. Sedangkan di sisi lain tidak ada peningkatan jumlah ketersediaan air. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal

akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.

c. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 sebesar 115,70 persen, dan angka tersebut terus meningkat menjadi 121,44 persen pada tahun 2019. Namun persentase pengguna listrik menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 113,07 persen dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 113,29 persen. Persentase pengguna listrik yang mencapai di atas 100 persen disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

Tabel 2.76 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	86.121	113,29

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2022

d. Jamban Layak (Sanitasi Dasar)

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Dinas Kesehatan bersama OPD terkait melakukan pendataan sanitasi dasar yaitu fasilitas sanitasi yang digunakan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah penggunaan jenis kloset leher angsa.

Tabel 2.77 Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah Jamban Layak	58.832	59.143	59.129	68.276
Jumlah Rumah yang didata	59.551	59.551	59.551	68.489
Rasio Rumah Bersanitasi Dasar	98,79	99,31	99,29	99,69

Sumber : Dinkes Kota Pekalongan, 2022

Jika dilihat pada tabel tersebut, perkembangan sanitasi dasar di Kota Pekalongan sudah sangat baik, yaitu diatas 99 persen. Meskipun sampai saat ini masih ada perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

e. Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan antara sisa kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan kumuh dalam SK Wali Kota Pekalongan Tahun 2014 (yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017) dibandingkan dengan luas kota Pekalongan.

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota Tahun 2014 dan verifikasi di Tahun 2017, Luas kawasan kumuh adalah sebesar 195,59 hektar. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui berbagai program dan kegiatan telah menangani kekumuhan pada kawasan tersebut. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2021 telah mencapai 188,7 hektar.

Merujuk data tersebut, maka sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 6,89 hektar. Berikut rincian penanganan kawasan kumuh sejak tahun 2017-2021.

Tabel 2.78 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2021

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (persen)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)					Total Penanganan Sd 2021 (persen)	Sisa Kumuh Sd 2021 (persen)
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Padukuhan Kraton	30,84	9,95	10,83	5,31	3,93	0,00	30,02	0,82
2	Bandengan	23,92	3,32	15,28	2,95	0	1,43	22,98	0,94
3	Panjang Baru	40,85	6,27	20,78	11,08	0,52	0,00	38,65	2,20
4	Panjang Wetan	13,85	5,52	6,06	1,84	0,28	0,00	13,70	0,15
5	Krapyak	11,90	7,55	3,32	0,63	0	0,20	11,70	0,20
6	Kandang Panjang	28,22	5,53	18,99	0,56	3,14	0,00	28,22	0,00
7	Tirto	3,70	0,47	0,24	2,06	0	0,93	3,70	0,00
8	Poncol	9,21	3,05	4,29	1,67	0	0,00	9,10	0,20
9	Pasirkratonkramat	22,46	2,83	17,25	0,00	0	0,00	20,08	2,30
10	Banyurip	6,78	0,80	5,73	0,00	0	0,25	6,78	0,00
11	Klego	2,89	0,29	2,60	0,00	0	0,00	2,89	0,00
12	Degayu	0,17	0,00	0,17	0,00	0	0,00	0,17	0,00
13	Jenggot	0,80	0,00	0,80	0,00	0	0,00	0,80	0,00
	Total	**195,59**	**45,58**	**106,34**	**26,10**	**7,87**	**2,81**	**188,7**	**6,89**

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2022

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2017-2021 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2017 dengan rasio sebesar 0,76 atau 23 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami kenaikan rasio menjadi 1,31 atau 40 personel untuk setiap 10.000 penduduk di tahun 2018. Sampai dengan tahun 2021, rasio Polisi Pamong Praja

(PNS) terus menurun menjadi 0,84 atau 26 personil untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2017, rasio sebesar 4,17 atau 126 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,58 atau 109 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan kembali menjadi 3,45 atau 106 personil dan pada tahun 2020 rasio mengalami kenaikan menjadi 3,91 atau 120 personil setiap 10.000 penduduk. Sementara itu pada tahun 2021 bertambah namun tidak signifikan yaitu 3,99 atau 123 personil setiap 10.000 penduduk.

Jika Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS dijumlahkan, maka rasio pada tahun 2017 sebesar 4,94 atau 149 personil per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 jumlahnya masih sama dengan tahun 2017 yaitu 149 personil dengan komposisi berbeda. Pada tahun 2019 rasio turun menjadi 4,36, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2021 menjadi 4,83.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP dan Banpol dalam kurun waktu 2017-2021.

Tabel 2.79 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2017	23	0,76	126	4,17	149	4,94	301.870
2018	40	1,31	109	3,58	149	4,89	304.477
2019	28	0,91	106	3,45	134	4,36	307.097
2020	27	0,88	120	3,91	147	4,79	307.150
2021	26	0,84	123	3,99	149	4,83	308.310

Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2022

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung naik. Pada tahun 2017, pelanggaran Perda sebanyak 2.003 kasus, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 1.552 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah pelanggaran Perda semakin meningkat menjadi 3.586 kasus. Meskipun demikian, Satpol P3KP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 dan pada tahun 2021 dapat diselesaikan 100 persen.

Tabel 2.80 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2017	2.003	1.883	94,01
2018	1.552	1.475	95,04
2019	1.382	1.363	98,63
2020	1.782	1.759	98,71
2021	3.586	3.586	100,00

Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2022

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan rasio yang fluktuatif, dimana rasio pada tahun 2017 adalah 50,78 atau 1.533 personil dan pada tahun 2021 turun menjadi 41,45 atau 1.278 personil.

Untuk jumlah Linmas Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dengan rasio sebesar 1,16 atau 35 personil. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan rasio sebesar 1,14 atau 35 personil per 10.000 penduduk.

Tabel 2.81 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Linmas (Ton Inti)	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (Kec. dan Kel.)	Rasio
2017	1.533	50,78	301.870	35	1,16
2018	1.417	46,54	304.477	35	1,15
2019	1.708	55,62	307.097	35	1,14
2020	1.452	47,27	307.150	35	1,14
2021	1.278	41,45	308.310	35	1,14

Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2022

Sementara itu jumlah pos siskamling bisa dikatakan cenderung menurun. Pada tahun 2017 berjumlah 514 pos siskamling, menurun menjadi 275 pada tahun 2021.

Tabel 2.75 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2017	514	27	19
2018	514	27	19
2019	441	27	16
2020	441	27	16
2021	275	27	10,19

Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2022

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2021 sebanyak 15 panti menurun disbanding jumlah panti asuhan di tahun 2020. Begitu juga dengan jumlah anak yang diasuh menurun dibandingkan tahun 2020. Secara

lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2017-2021) disajikan dalam Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2017	7	237
2018	7	545
2019	8	354
2020	20	1.052
2021	15	1.037

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2022

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2021 jumlah PMKS adalah 200.488 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 184.235 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) disajikan dalam Tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.83 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	-	-	-	-	
Anak Terlantar/Gelandangan	105	12	3	-	158
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	337	21	164	145	140
Wanita Rawan Sosial	361	827	-	8	9
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	-	-	-	-	-
Anak Nakal	69	50	0	98	158
Korban Penyalahgunaan Narkoba	67	6	2	0	0
Penyandang Cacat :	1.142	343	535	1.354	481
- Tubuh	316	110	357	234	267
- Netra	174	58	103	107	112
- Mental	449	132	0	429	365
- Ganda	56	12	0	484	457
- Wicara	147	31	75	100	102

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	542	-	-	-	-
Gelandangan	16	-	-	3	3
Tuna Susila	-	-	-	-	-
Waria	-	-	-	-	-
Bekas Narapidana	87	30	3	1	1
Bencana Alam	-	2.623	-	3107	14.000
Fakir Miskin	75.839	63.829	24.116	22.683	184.235
Jumlah	79.707	67.741	24.823	27.499	200.488

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2022

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2021, untuk karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS (Wanita Kader Kepemimpinan Sosial) sebanyak 5 orang dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 63 orang. Selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	0	9	6	0	0
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	87	5	5	5	5
Pekerja Sosial Masyarakat	288	88	53	63	63
Karang Taruna	32	91	32	32	32
Organisasi Sosial	7	7	9	20	0

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2022

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up to date*. Untuk mendapatkan data yang *up to date* tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementrian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2019-2021.

Tabel 2.85 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2019	29.618	112.613
2020	29.282	108.436
2021	61.421	184.247

Sumber : Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2022

Dari Tabel 2.83 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 32.139 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2020. Begitu juga dengan jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran Tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 75.811 jiwa dibandingkan jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran tahun 2020. Peningkatan ini terjadi dikarenakan semakin banyaknya penerima bantuan sosial akibat dampak pandemic *COVID-19*.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

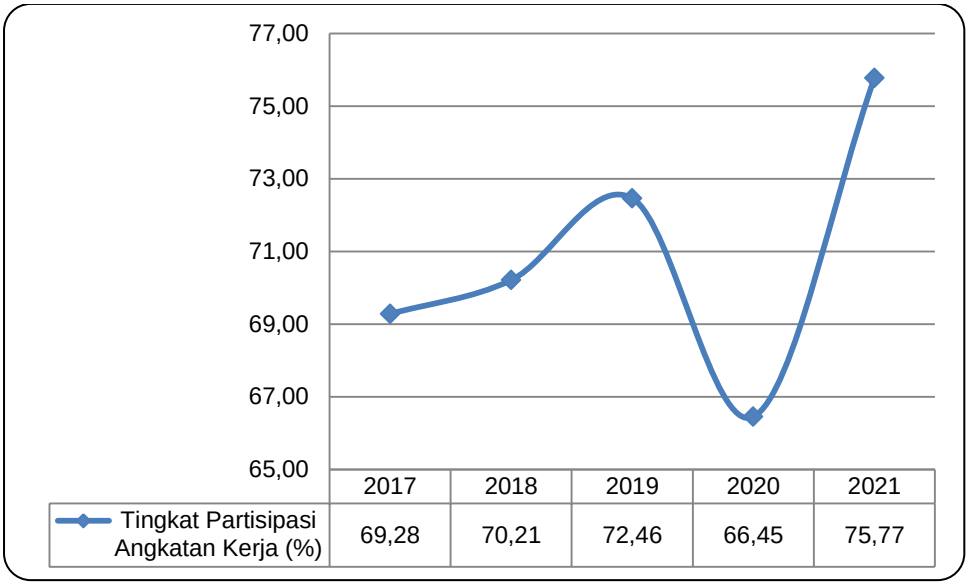
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jumlah Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2017 s.d. 2021 disajikan dalam Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2017–2021

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2017	157.445	69,28
2	2018	161.502	70,21
3	2019	168.339	72,46
4	2020	157.260	66,45
5	2021	181.210	75,77

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2022 dan www.jateng.bps.go.id, 2022

Pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan cenderung meningkat dari 69,28 persen di tahun 2017 menjadi 72,46 persen di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,45 persen dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 75,77 persen. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 tercatat sekitar 236.675 orang. Persentase angkatan kerja 2021 meningkat 9,32 poin dari tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) mengalami peningkatan.



Gambar 2.36 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 30 (tiga puluh) kasus dari sekitar 300-500 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi untuk itu persengketaan ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2017	13	382	3,40
2018	13	385	3,38
2019	11	369	2,98
2020	28	484	5,79
2021	11	484	2,27

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2022

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 2021 sebesar 75,77

persen. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk AKAD dan AKAN cenderung menurun daru tahun 2017 sampai 2021. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2017	104	33	200
2018	180	21	103
2019	184	4	111
2020	3	0	24
2021	164	0	13

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2022

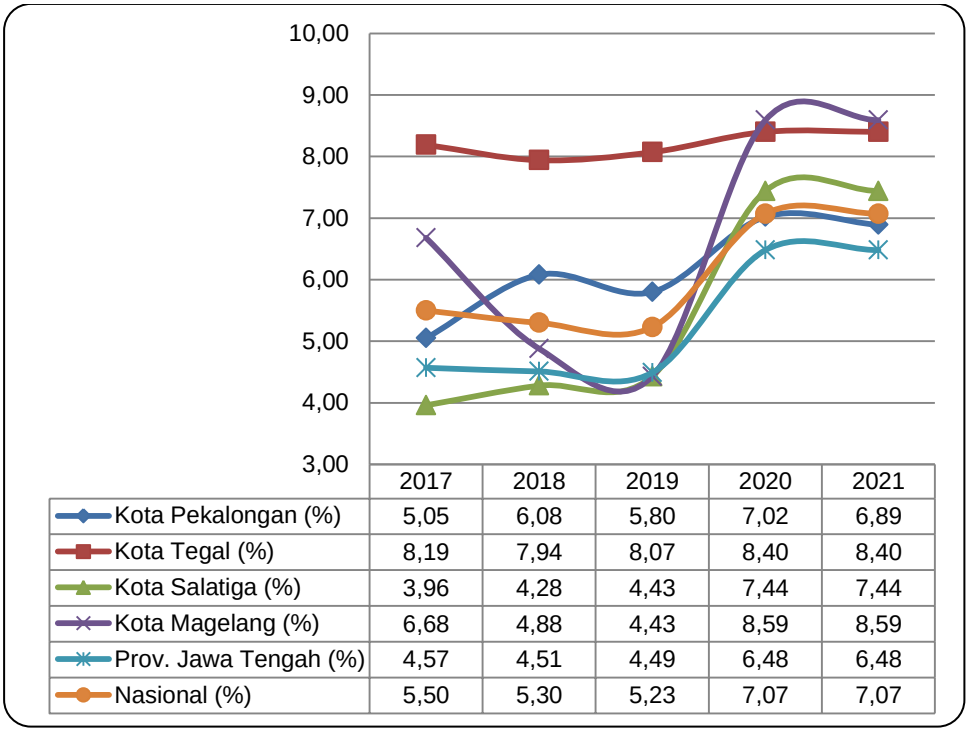
d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 6,89 persen atau menurun 0,13 poin dari tahun 2020, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.

Nilai TPT mengalami kenaikan yang disebabkan terjadinya pandemi *COVID-19* menyebabkan banyak tempat usaha gulung tikar. Sedangkan faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Pada tahun 2021 TPT Kota Pekalongan berada di atas TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan masih lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah, TPT Kota Pekalongan masih lebih rendah dari Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Tantangan ke depan adalah bagaimana upaya terintegrasi untuk menurunkan TPT secara optimal. Meskipun dibandingkan daerah lain setara, TPT Kota Pekalongan lebih bagus, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan harus berupaya lebih keras lagi untuk mengoptimalkan capaian TPT-nya.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	5,05	6,08	5,80	7,02	6,89
Kota Tegal (%)	8,19	7,94	8,07	8,40	8,40
Kota Salatiga (%)	3,96	4,28	4,43	7,44	7,44
Kota Magelang (%)	6,68	4,88	4,43	8,59	8,59
Prov. Jawa Tengah (%)	4,57	4,51	4,49	6,48	6,48
Nasional (%)	5,50	5,30	5,23	7,07	7,07

Gambar 2.37 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017- 2022

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2022

Salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah pelatihan tenaga kerja. Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan antara data jumlah pelatihan yang dilaksanakan dengan TPT tahun 2011-2020 maka korelasi antara kedua varibel tersebut sangat lemah atau tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan belum berdampak signifikan bagi penurunan TPT. Strategi pelaksanaan pelatihan harus dilakukan penyesuaian, termasuk pemilihan peserta pelatihan, sehingga diharapkan pelatihan dapat tepat sasaran, meningkatkan kesempatan dan peluang kerja, dan pada akhirnya dapat berdampak bagi penurunan TPT. Upaya bersama yang harus dilakukan adalah integrasi kebijakan berbagai sektor sehingga dapat saling mendukung atau melengkapi sehingga berdampak bagi penurunan TPT secara optimal.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 cenderung fluktuatif. Namun dari sisi persentase cenderung menurun, dimana pada tahun 2017 sebesar 96,86 persen, terus menurun sampai tahun 2020 sebesar 74,38 persen. Namun di tahun 2021 semua perusahaan telah menerapkan K3 di lingkungan kerjanya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2017	370	382	96,86
2018	410	425	96,47
2019	319	369	86,45
2020	360	484	74,38
2021	484	484	100,00

Sumber : Diperinaker Kota Pekalongan, 2022

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Tahun 2020 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 1.616 orang, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 66.690 orang.

Tabel 2.90 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

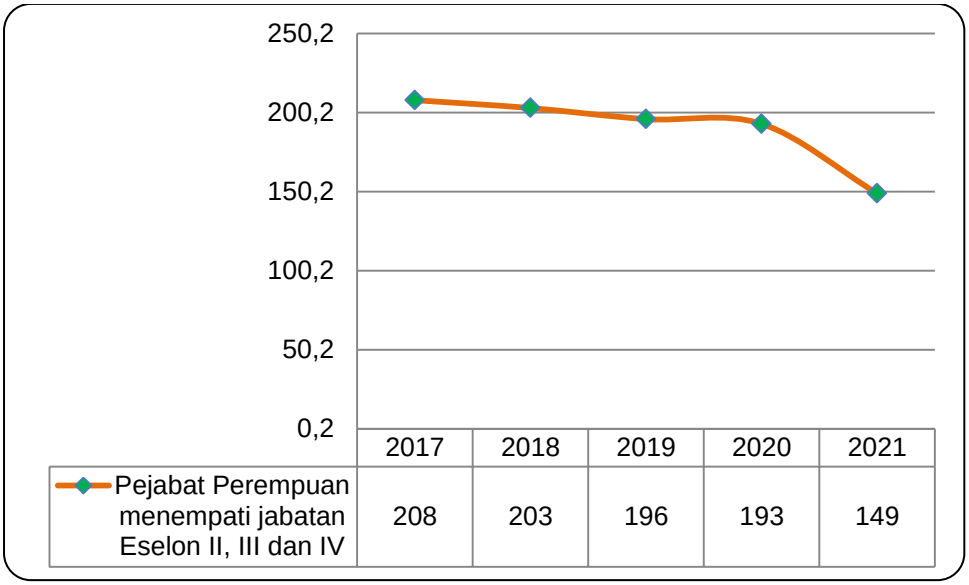
URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	1.621	1.540	2.322	1.616	1.564
Jumlah pekerja perempuan (orang)	9.799	9.870	45.571	66.690	77.848
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	16,54	15,60	5,10	2,42	2,01

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2022, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah berkurang, semula 1.616 orang pada tahun 2020 menjadi 1.564 orang pada tahun 2021.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2017-2021 terus menurun. Pada tahun 2017 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 208 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 149 orang di tahun 2021. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.38 berikut.

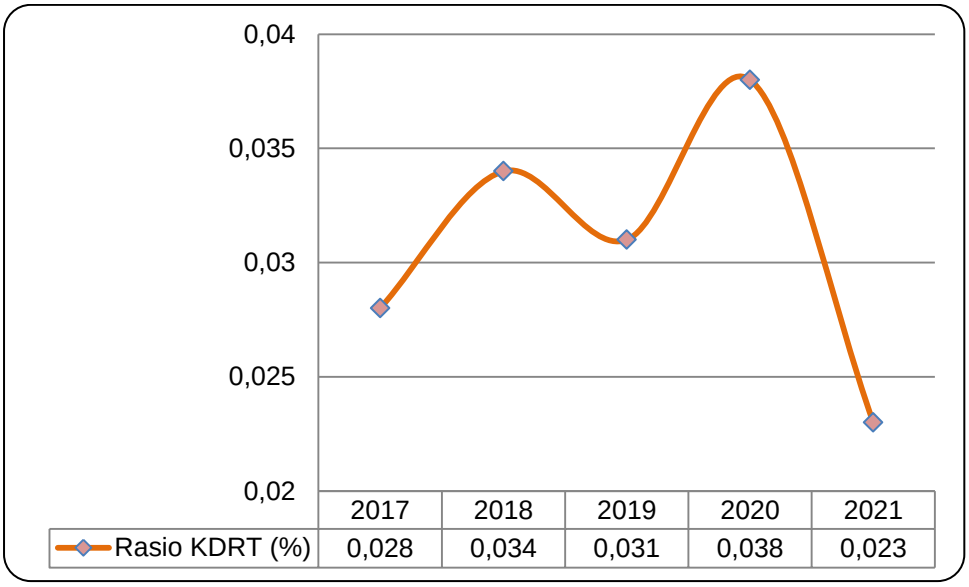


Gambar 2.38 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 (diolah), 2022

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2017-2021 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KRDT menunjukan indikasi yang semakin baik. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2021 dengan angka rasio 0,023 persen.

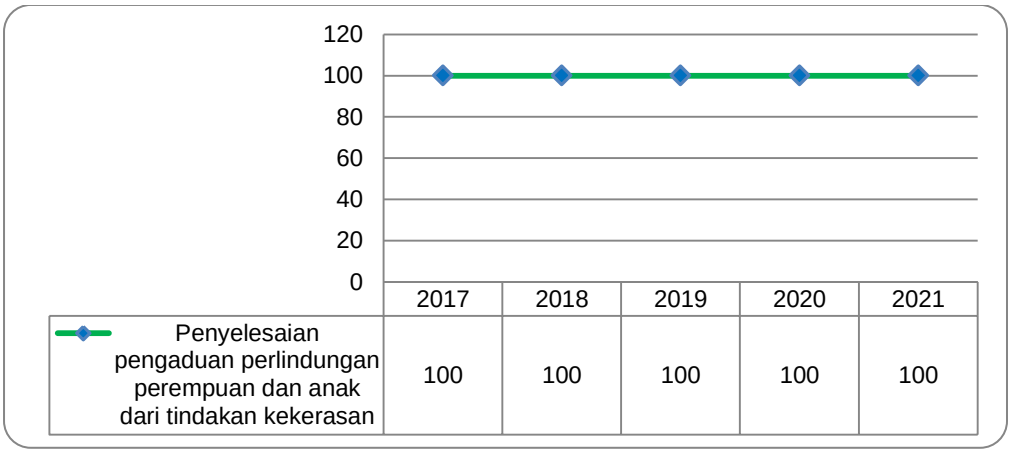


Gambar 2.39 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2022

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).



Gambar 2.40 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2022

e. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) didefnisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu : (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2020, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya. Upaya terus ditingkatkan, salah satunya adalah fokus pada sarana dan prasarana mengenai informasi layak anak seperti baliho, dan sebagainya. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2021 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya dengan nilai 835,9.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berupaya serius untuk mengejar peringkat Nindya sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat nasional. Komitmen ini dibuktikan dengan dibukanya layanan Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP PKSAI) yang akan bertugas melakukan penjangkauan kepada anak-anak rentan di Kota Pekalongan. Dengan berdirinya UP PKSAI ini diharapkan dapat semakin memudahkan pemerintah membangun mekanisme layanan terpadu bagi anak di tingkat masyarakat.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam ketahanan pangan yang merupakan suatu sistem, mencakup empat sub sistem yaitu : (a) ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Di Kota Pekalongan ketersediaan pangan dalam kurun 5 (lima) tahun (2017-2021) disajikan dalam Tabel 2.91. Dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2017-2018 yaitu dari 7.382.286 menjadi 5.860.781 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2018-2020 penurunan terjadi namun tidak sebanyak tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan dari tahun 2020, menjadi 5.738.290 dari sebelumnya 4.769.190. Persentase ketersediaan pangan secara otomatis juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2017-2020 dan meningkat pada tahun pada tahun 2020-2021.

Tabel 2.91 Rasio Ketersediaan Pangan Utama
Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Rasio
2017	7.382.286	301.870	24,46
2018	5.860.781	304.477	19,25
2019	5.400.416	307.097	17,59
2020	4.769.190	307.150	15,53
2021	5.738.290	308.310	18,61

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2022

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi.

Skor PPH selama lima tahun terakhir (tahun 2017-2021) disajikan dalam tabel 2.92. Terdapat peningkatan skor PPH dari tahun 2017 sampai dengan 2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 92,01 pada tahun 2020 menjadi 87,10 di tahun 2021.

Tabel 2.92 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2017	89,71
2018	90,42
2019	91,31
2020	92,01
2021	87,10

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2022

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan antara lain dengan : penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya; penyediaan cadangan pangan daerah; penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; meningkatkan ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, secara umum dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) jenis kelompok pangan. Pada tabel 2.91. disajikan capaian kelompok konsumsi pangan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2018, yaitu 98,8 kg per kapita/tahun dari tahun 2017 sebesar 107,0 kg per kapita/tahun. Kelompok pangan yang juga dapat dikatakan cukup tinggi dalam konsumsi disbanding yang lain adalah sayur dan buah yaitu 64,6 kg per kapita/tahun. Walaupun tiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun. Konsumsi kelompok pangan selanjutnya adalah kelompok lain-lain yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 (2,3 kg per kapita/tahun) menjadi 44,1 kg per kapita/tahun pada tahun 2020 dan menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 37,9 kg per kapita/tahun. Konsumsi pangan hewani berada di urutan selanjutnya (35 kg/kapita/tahun tahun 2021) diikuti dengan umbi-umbian, gula, kacang-kacangan, minyak dan lemak, serta buah/biji berminyak. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Padi-padian	Kg/Kap/th	107,0	98,8	102,0	108,7	114,0
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	16,5	16,5	18,8	7,9	12,4
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	40,2	47,0	45,0	36,8	35,0
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	12,2	11,8	5,7	6,6	6,7
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	2,6	2,8	2,3	0,8	0,8
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	19,0	18,0	23,5	8,4	7,7
Gula	Kg/Kap/th	10,0	9,5	5,9	7,7	8,1
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	74,1	73,8	82,2	70,0	64,6
lain-lain	Kg/Kap/th	1,3	1,4	2,3	44,1	37,9

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2022

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun. Konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dan secara umum selalu meningkat tiap tahunnya, dengan jumlah 1.251,5 kkal/kapita/tahun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1.275,9 kkal/kapita/tahun pada tahun 2021. Urutan berikutnya

adalah kelopok pangan hewani, yang pada tahun 2021 menurun menjadi 258,9 kkal/kapita/tahun dari tahun 2020 sebesar 272, 5 kkal/kapita/tahun . Selanjutnya urutan kelompok pangan selalu berubah jenisnya. Pada tahun 2021, setelah padi-padian dan pangan hewani, kelompok pangan selanjutnya adalah minyak dan lemak (164,5 kkal/kapita/tahun), sayur dan buah (87,5 kkal/kapita/tahun) dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.94 berikut.

Tabel 2.94 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	1.055,0	974,9	1.006,1	1251,5	1275,9
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	49,5	49,6	56,3	24,7	39,8
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	228,1	266,7	255,4	272,5	258,9
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	289,8	280,1	136,8	160,7	164,5
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	45,3	49,1	40,6	12,7	12,7
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	172,1	163,4	213,2	53,8	49,5
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	99,8	94,7	58,7	77,5	81,6
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	105,3	104,9	116,8	97,3	87,5
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	10,3	11,1	18,5	56,1	50,0

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2022

Secara umum, selama lima tahun terakhir, PPH Kota Pekalongan cenderung menurun. Capaian konsumsi kelompok pangan karbohidrat cenderung meningkat, sementara kelompok pangan yang lain cenderung menurun. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sebagai hal yang harus diwaspadai bersama.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi tiap kelompok pangan dari suatu pola ketersediaan dan konsumsi pangan. Pola pangan harapan ini dapat dipahami sebagai komposisi keseimbangan pangan dan kecukupan gizi yang dijadikan sebuah angka penilaian sebuah daya serap komponen-komponen makanan di suatu wilayah sudah mencukupi atau belum. Pola pangan harapan ini harus memenuhi dalam segi kuantitas, kualitas, keragamannya serta memperhatikan aspek sosial budaya, daya terima masyarakat, ekonomi, agama, citarasa, daya cerna, kecukupan gizi dan keseimbangan gizi.

Setiap individu membutuhkan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Energi tersebut bisa kita dapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Setiap produk pangan memiliki berbagai komponen gizi yang terkandung di dalamnya. Komponen gizi tersebut dibutuhkan oleh tubuh setiap individu dalam jumlah tertentu. Karena kebutuhan tubuh setiap individu akan komponen gizi berbeda, maka sekarang kita mengenal istilah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pangan beragam dan bergizi artinya terdapat lebih dari satu macam jenis pangan dalam piring sekali makan sehingga dapat memenuhi komponen gizi secara lengkap. Seimbang artinya pangan mengandung komponen-komponen yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral) yang diperlukan tubuh. Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu

produk pangan. Konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman juga memiliki kelebihan yakni implementasinya dapat memanfaatkan potensi produk pangan yang dihasilkan oleh daerah. Misalnya jika suatu daerah merupakan sentra penghasil jagung, maka jagung tersebut dapat menggantikan beras sebagai bahan pangan sumber karbohidrat.

Kota Pekalongan sangat segera membutuhkan pangan B2SA bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini didasarkan fakta bahwa stunting, AKI, AKB dan AKABA merupakan wujud dari permasalahan kesehatan, di samping permasalahan kesehatan lainnya. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa asupan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan dan konsumsi terhadap pangan B2SA sangat mendesak dibutuhkan Kota Pekalongan, terutama untuk mewujudkan generasi Kota Pekalongan yang lebih unggul di masa mendatang. Upaya untuk membumikan penyediaan dan konsumsi pangan B2SA, adalah dengan mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi seluruh pemangku kepentingan. Kampanye pentingnya pangan B2SA harus terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami bahwa pangan B2SA sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat, termasuk janin di dalam kandungan, agar terwujud generasi masa depan yang lebih sehat dan unggul.

Strategi agar skor pola pangan harapan (PPH) dapat mengalami kenaikan di tengah pandemi seperti ini ialah kemudahan masyarakat mengakses pangan yang tersedia beragam. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar kondisi tersebut dapat diwujudkan.

4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam pelaksanaan reforma agraria yang merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia,dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu Perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pada tahun 2021 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan

menyelesaikan 95 % target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor Pertanahan Kota Pekalongan mendapat target dari BPN Pusat untuk mensertipikat 3.145 bidang tanah. Saat ini BPN Kota Pekalongan sudah terealisasi 95 persen dari target dan sertipikatnya akan diserahkan secara bertahap. Jumlah realisasi adalah 2.104 sertifikat yang terdiri dari 650 aset pemkot, wakaf 6 bidang, dan milik warga masyarakat (perorangan) sebanyak 1.448.

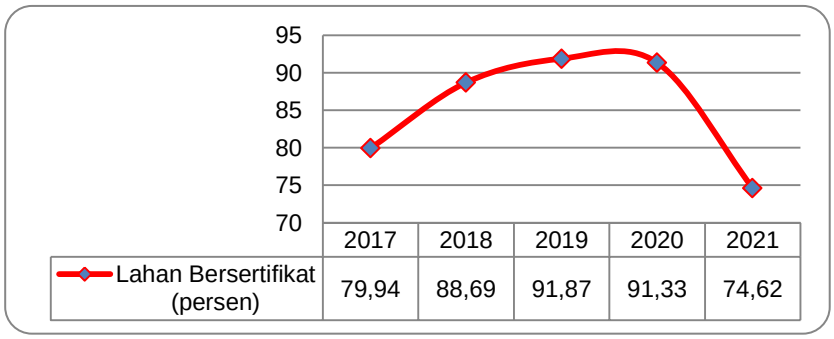
Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 – 2019. Pada tahun 2020 terjadi perubahan/koreksi luasan wilayah kota Pekalongan, yang semula 4.525 ha terkoreksi menjadi 4.642 ha. Adanya perubahan luasan wilayah mengakibatkan persentase lahan bersertifikat mengalami perubahan. Pada tahun 2020 menjadi 91,33 persen dengan luasan seluas 4.239,02, menjadi menurun persentasenya bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih menggunakan luas total wilayah lama (4.525 ha). Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir 2017-2021, disajikan dalam Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas wilayah	4.525	4.525	4.525	4.642	4.642
Luas tanah bersertifikat	3.778,43	4.013,28	4.157,29	4.239,50	3.463,64
Hak Milik	3.013,55	3.192,36	3.320,74	3.360,02	2.590,47
HGB	293,52	305,94	13,21	322,95	212,77
Hak Guna Usaha	6,76	6,76	6,76	6,76	12,11
Hak Pakai	403,04	444,70	451,53	481,01	596,26
Hak Pengelolaan	4,00	4,00	4,00	5,00	31,82
Hak Wakaf	58,57	60,5396	62,06	63,76	20,22
Lahan Bersertifikat (persen)	79,94	88,69	91,87	91,33	74,62

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2022

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 luas lahan bersertifikat adalah 79,94 persen, sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, semakin meningkatnya persentase tersebut menjadi salah satu indikasi kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan. namun pada tahun 2020 jumlah lahan di Kota Pekalongan yang sudah bersertifikat menurun menjadi 91,33, dan tahun 2021 semakin menurun menjadi 74,62 persen. Hal ini dikarenakan adanya koreksi total luas lahan Kota Pekalongan.

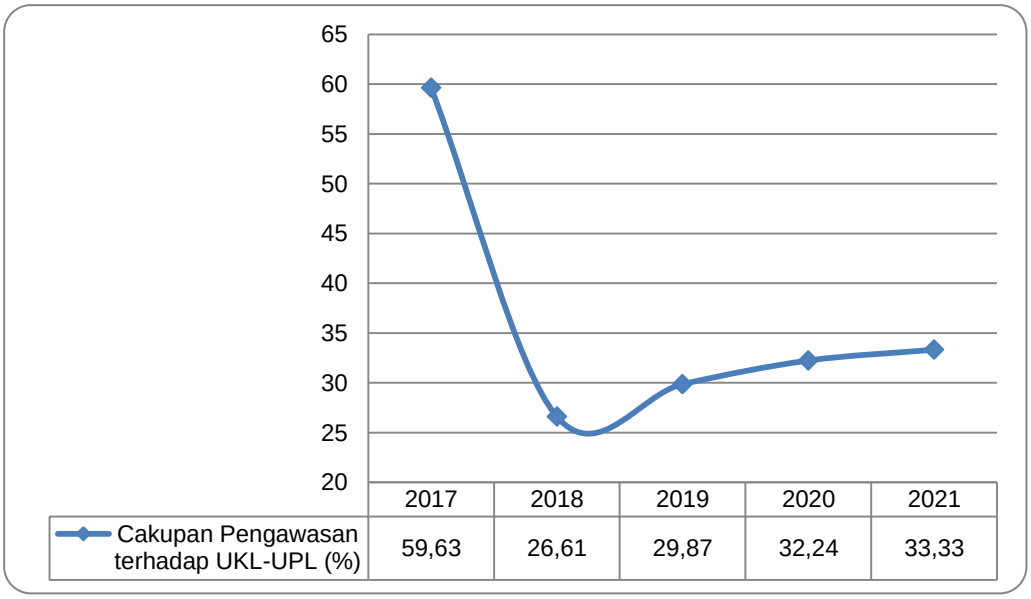


Gambar 2.41 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2022

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.



	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pengawasan terhadap UKL-UPL (%)	59,63	26,61	29,87	32,24	33,33

Gambar 2.42 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2017 – 2021

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2022

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL mengalami peningkatan, walaupun ada penurunan pada tahun 2018 sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.42.

Pada tahun 2017 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 59,63 persen, namun mengalami penurunan pada akhir tahun 2018, menjadi 26,61 persen. Pada tahun 2019 samapi dengan 2021, cakupan pengawasan pelaksanaan UKP – UPL mengalami peningkatan bertahap yaitu 29,87 persen pada tahun 2019, 32,24 persen pada tahun 2020 dan 33,33 persen pada tahun 2021.

Terdapat peningkatan jumlah pemilik dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) seiring dengan peningkatan jumlah usaha di Kota Pekalongan. Peningkatan ini juga didorong oleh perijinan usaha yang mempersyaratkan disusunnya dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa UKL/UPL maupun amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tingkat pelaporan monitoring UKL/UPL dan amdal juga cenderung meningkat, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran pelaporan diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pemberian insentif /disinsentif bagi usaha dan/atau kegiatan yang menaati tertib hukum lingkungan.

Peningkatan persentase tertib hukum lingkungan hidup pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan. Terutama pada tahun 2021, terdapat peningkatan yang signifikan hampir mencapai 40%, baik pada jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL maupun jumlah UKP-UPL/AMDAL. Pada tahun 2020 jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL sebanyak 12 sedangkan tahun 2021 23, sedangkan jumlah UKL-UPL/AMDAL tahun 2020 sebanyak 158 dan tahun 2021 sebanyak 2021. Persentase tertib hukum lingkungan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tertib Hukum Lingkungan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL	5	6	8	12	23
Jumlah UKL-UPL/AMDAL	109	124	154	158	201
Persentase Tertib Hukum Lingkungan	4,59	4,84	5,19	7,59	11,44

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2022

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2017-2021 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami penambahan, baik dalam jumlah industry maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Namun untuk IPAL Jenggot dan IPAL Industri Besar mengalami penurunan. Pada IPAL Jenggot dengan jumlah industry yang sama pada tahun 2019 dan 2020 (80 industri) jumlah limbah yang dihasilkan menurun dari 700m3 menjadi 600m3. Sedangkan di tahun 2021 tetap sama dengan 2020. Pada IPAL industry besar, dengan berkurangnya jumlah industrypada tahun 2020 (3 industri) maka jumlah limbah berkurang menjadi 500m3. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2021. Untuk IPAL Biogas ternak, sejak tahun 2020 sudah tidak ada limbah karena sudah tidak ada industry yang menghasilkan limbah tersebut. Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal disajikan dalam Tabel 2.97 berikut.

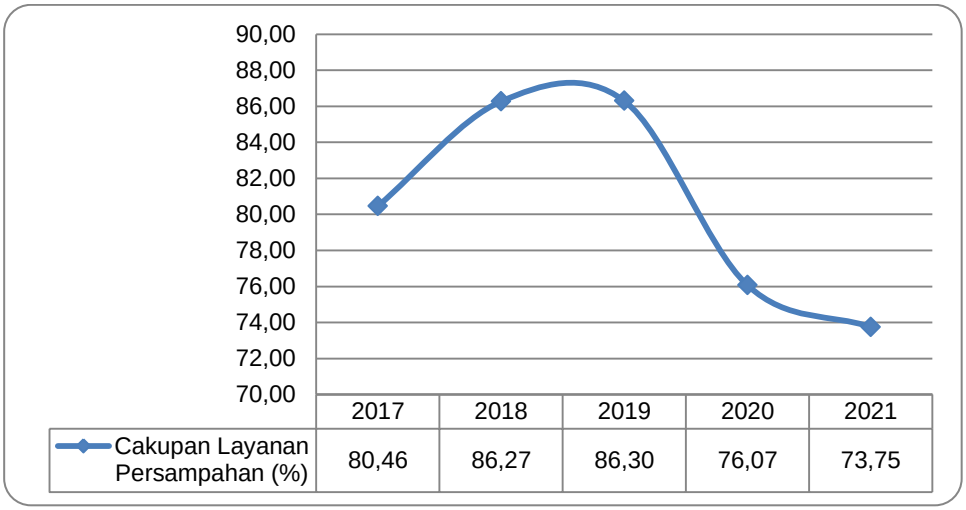
Tabel 2.97 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

IPAL	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)
Kauman	26	100	29	120	20	150	20	125	20	150
Jenggot	75	400	102	700	80	700	80	600	80	600
Industri Kecil	83	426	83	426	83	426	73	426	75	430
IPAL Bersama	3	500	3	500	3	500	2	700	2	700
Industri Besar	5	700	5	700	5	900	3	500	3	500
IPAL	28	90	125	120	125	120	30	70	30	70

IPAL	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)
Biogas Duwet										
IPAL Biogas Ternak	7	210	7	210	7	75	-	-	-	-
IPAL Pringrejo	-	-	70	180	20	50	25	60	25	75
IPAL Banyurip	-	-	-	-	69	150	55	125	60	150
JUMLAH	227	2.426	424	2.956	412	3.071	288	2.606	295	2.675

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2022

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2017-2021 cenderung turun seperti disajikan dalam Gambar 2.43.



Gambar 2.43 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2022

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2017 - 2021 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2017-2021 pengelolaannya setiap hari semakin menurun. Sedangkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebanyak 271,87 m^3 dan bertambah di tahun 2021 sebanyak 353,93 m^3. Penangan sampah di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 disajikan dalam tabel 2.98 berikut.

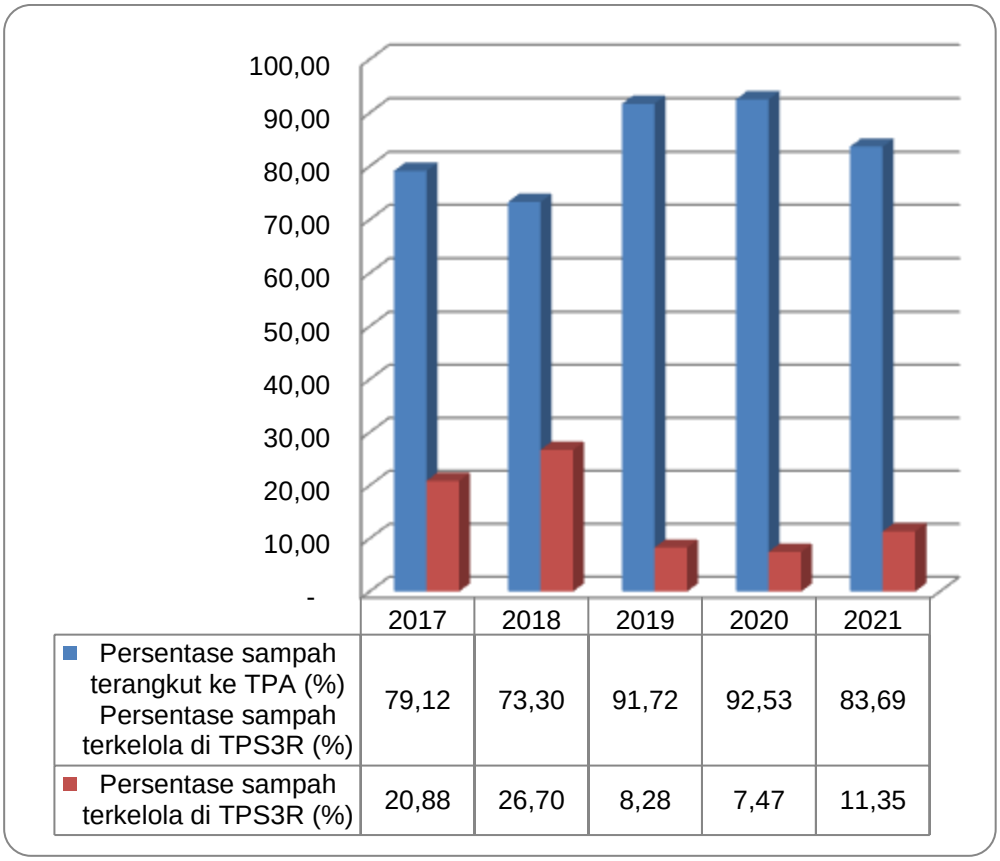
Tabel 2.98 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Data Sampah per Hari	2017		2018		2019		2020		2021	
	%	(m^3)	%	(m^3)	%	%	(m^3)	%	(m^3)	%
Timbulan sampah										

Data Sampah per Hari	2017		2018		2019		2020		2021	
	%	(m^3)	%	(m^3)	%	%	(m^3)	%	(m^3)	%
Sampah terangkut ke TPA	79,12	271,87	73,30	353,93	91,72	79,12	271,87	73,30	353,93	91,72
Sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah	20,88	99	26,70	31,97	8,28	20,88	99	26,70	31,97	8,28
Jml Sampah tertangani (m3)	100	370,87	54,48	385,91	86,30	100	370,87	54,48	385,91	86,30

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2017–2021 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah. Baik yang terolah di TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah maupun yang terangkut ke TPA. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah semakin menurun disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.



Gambar 2.44 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2022

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan control *landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2017-2021 yang disajikan dalam Tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.99 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2017	44,67	99,29	23,50	52,59
2018	46,00	98,82	23,50	52,85
2019	46,00	99,05	23,50	52,92
2020	35,33	79,96	23,60	50,84
2021	45,00	80,21	22,40	54,31

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami tren naik 0,165 setiap tahunnya. Jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH, sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah. Sedangkan IKLH di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,84. Pada tahun 2021 IKLH mengalami peningkatan menjadi 54,31, kondisi ini dikarenakan terjadinya peningkatan pada komposisi IKA dan IKU.

Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrien bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami Sementara itu Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2021 masih sama, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman / Kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam

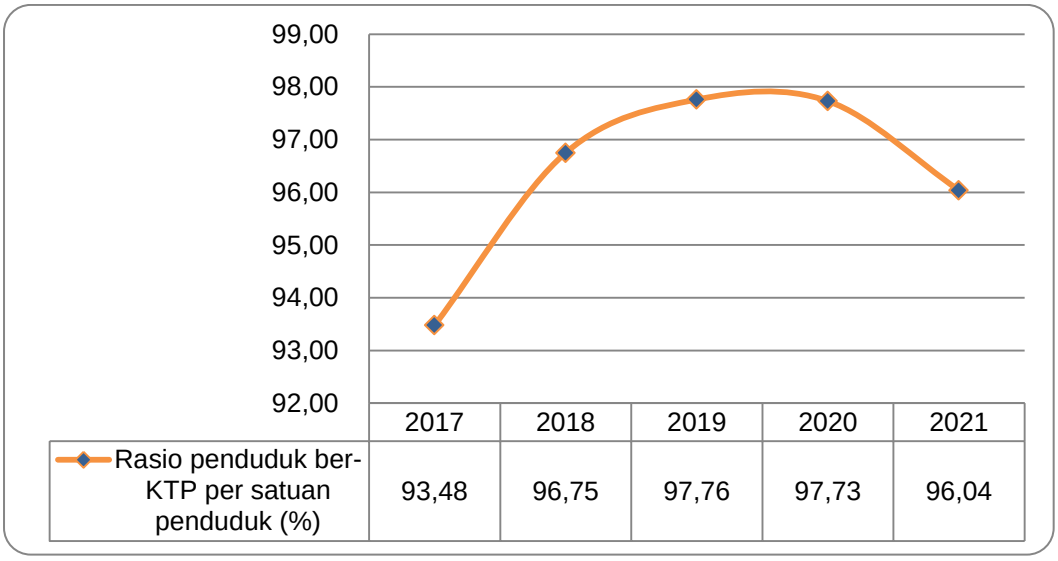
memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2021 mencatat kepemilikan KTP-el sebanyak 96,04 persen. Angka tersebut lebih sedikit 1,69 persen dibandingkan tahun 2020 yaitu 97,73 persen.



	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	93,48	96,75	97,76	97,73	96,04

Gambar 2.45 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2022

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2017-2021), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.100 berikut.

Tabel 2.100 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2017	100
2018	100
2019	100

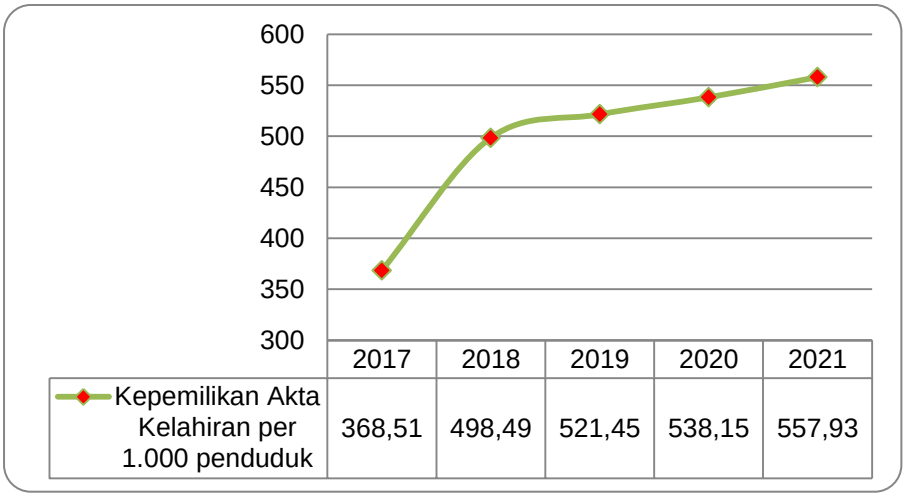
Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2020	100
2021	100

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2022

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semula sebanyak 368,51 per 1.000 penduduk di tahun 2017, menjadi 557,93 per 1.000 penduduk di tahun 2021. Secara lengkap, data kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam Gambar 2.46 berikut.



Gambar 2.46 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2022

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terkahir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun 2017 telah diterbitkan sebanyak 1.473 akta, pada tahun 2018 diterbitkan sebanyak 2.691 akta. Setiap tahun terus bertambah hingga pada tahun 2021 diterbitkan sebanyak 3.970 akta sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.101 berikut.

Tabel 2.101 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2017	1.473
2018	2.691
2019	2.797
2020	3.220
2021	3.970

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2022 (diolah), 2022

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 50-60 lembar per tahunnya.

Tabel 2.102 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2017	43
2018	60
2019	46
2020	45
2021	50

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2022 (diolah), 2022

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. Jenis LKK paling sedikit meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 hingga sekarang, seiring dengan penggabungan kelurahan dari 47 menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.103 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah LPM
2017	27
2018	27
2019	27
2020	27
2021	27

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2022

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah dalam memberdayakan peran ibu-ibu di Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 32 PKK, terdiri dari 27 PKK kelurahan, 4 PKK kecamatan dan 1 PKK tingkat kota.

Tabel 2.104 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2017	32
2018	32
2019	32
2020	32
2021	32

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2022

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu tahun 2017-2021 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2019-2021 jumlah Posyandu aktif sebesar 413 (termasuk data dari Dinkes tahun 2019), per Januari tahun 2022 data posyandu aktif bertambah 1. Angka tersebut lebih banyak dari jumlah posyandu aktif pada tahun 2017-2018. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.105 berikut.

Tabel 2.105 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2017	407
2018	409
2019	413
2020	413
2021	413

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan & BPS Kota Pekalongan, 2022

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2017 - 2020 terus mengalami peningkatan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin bertambah. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 68,47. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.106 berikut.

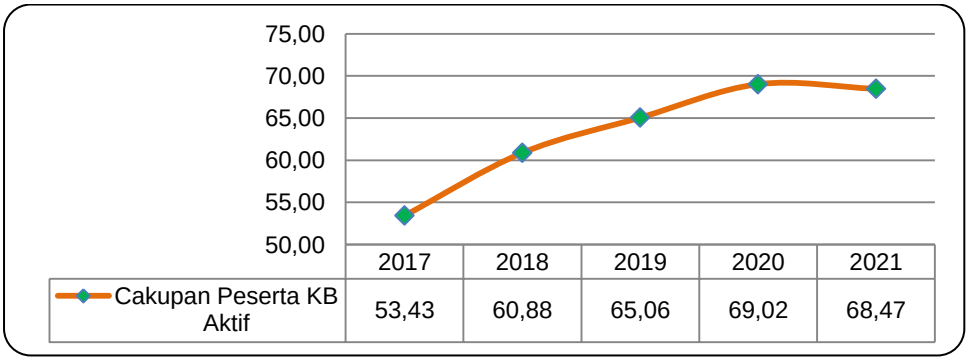
Tabel 2.106 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2017	44.965	24.027	53,43
2018	44.851	27.306	60,88
2019	46.652	30.352	65,06
2020	45.836	31.636	69,02
2021	47.444	32.483	68,47

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2021 cenderung meningkat sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.47 berikut.



Gambar 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 47,70 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 4,29 persen. Pada tahun 2021, secara persentase menurun, namun secara jumlah bertambah menjadi 41.170 keluarga. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.107 berikut.

Tabel 2.107 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2017	77.575	46.478	59,91
2	2018	77.817	44.487	57,71
3	2019	80.653	41.938	51,99
4	2020	80.840	38.563	47,70
5	2021	100.947	41.170	40,78

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2022

9. Perhubungan

a. Kepadatan Lalu Lintas

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasinya yang strategis juga digunakan sebagai tempat istirahat maupun sekedar transit untuk melanjutkan perjalanan ke daerah atau tempat selanjutnya. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat. Hal ini berdampak pada tingginya VC ratio di tahun 2017 yaitu sebesar 0,88. Pada tahun 2018, VC ratio mengalami penurunan menjadi 0,39, dimana salah satu faktor penyebabnya adalah operasional jalan tol trans Jawa. Dengan adanya jalan tol yang pada saat itu masih dalam tahap uji coba dan tidak dikenakan biaya, banyak kendaraan yang lebih memilih menggunakan jalan tol dibandingkan menggunakan jalan kota sehingga VC ratio menurun. Setelah tol trans Jawa secara resmi beroperasi pada tahun 2019 dan dikenakan biaya, sebagian kendaraan yang semula menggunakan jalan tol beralih melewati jalan kota, sehingga VC ratio meningkat menjadi sebesar 0,45.

Pada tahun 2020, pandemi *COVID-19* yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan. Pada tahun 2021, sudah masuk era *new normal* dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2021 VC ratio meningkat menjadi 0,49.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.108 berikut.

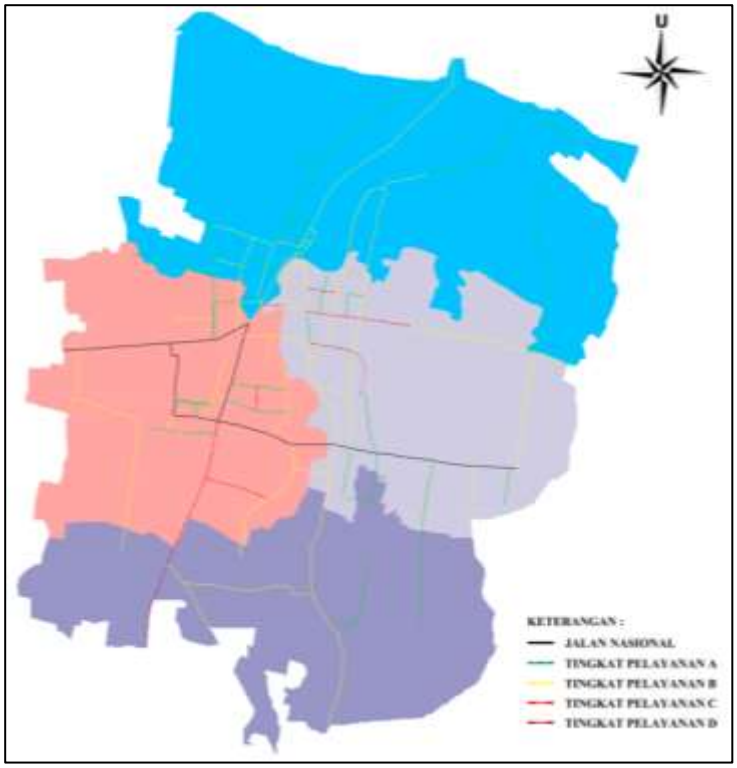
Tabel 2.108 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1, 00
F	>1, 00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan – jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta tingkat pelayanan jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam Gambar 2.48 berikut.



Gambar 2.48 Peta Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Pekalongan

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan gambar diatas, kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan yang diukur dari tingkat pelayanan disajikan dalam Tabel 2.109 berikut.

Tabel 2.109 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Ahmad Yani	Jl. Angkatan 45	Jl. Bandung	Jl. Dr. Cipto
Jl. Indragiri	Jl. Kurinci	Jl. Teratai	Jl. Sultan Agung
Jl. Merak	Jl. Untung Suropati	Jl. Dharma Bhakti	Jl. Hayam Wuruk
Jl. Jawa	Jl. Merpati / Parkit	Jl. HOS Cokroaminoto	Jl. Seruni
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. Patriot	Jl. Ki Mangun Sarkoro	Jl. Bandung
Jl. Pattimura	Jl. H. Agus Salim	Jl. Tentara Pelajar	Jl. Urip Sumoharjo
Jl. Raden Saleh	Jl. Semarang	Jl. Nusantara	-
Jl. Tritura	Jl. Truntum	Jl. Gatot Subroto	-
Jl. Majapahit	Jl. Jlamprang	Jl. Karya Bhakti	-
Jl. Trikora	Jl. Parang Garuda Raya	Jl. Manggis	-
Jl. Bahagia	Jl. Progo	Jl. Sulawesi	-
Jl. KH. Hasyim Ashari	Jl. Tembus HOS Cokro - Dharma Bakti	Jl. Pintas Sapuro	-
Jl. Kutilang	Jl. Wachid Hasyim	Jl. Dr. Kusuma Atmaja	-
Jl. Samudera Pasai	Jl. Cenderawasih	Jl. Dr. Wahidin	-
Jl. Surabaya	Jl. Ki Hajar Dewantara	Jl. Tondano	-
Jl. Asem Binatur	Jl. Sumatera	Jl. Manunggal	-
Jl. Cempaka	Jl. Argopuro	Jl. Salak	-
Jl. Labuan	Jl. Belimbing	-	-
Jl. Melati	Jl. Hasanudin	-	-
Jl. Kenanga	Jl. KH. Ahmad Dahlan	-	-
Jl. Barito	Jl. Maninjau	-	-
-	Jl. Pelita III	-	-
-	Jl. Diponegoro	-	-
-	Jl. P. Kemerdekaan	-	-
-	Jl. Sunan Ampel	-	-
-	Jl. Kemakmuran	-	-
-	Jl. R.A Kartini	-	-
-	Jl. Supriyadi	-	-
-	Jl. Angkatan 45	-	-
-	Jl. Jetayu	-	-
-	Jl. Letjen Suprapto	-	-
-	Jl. Pramuka	-	-
-	Jl. WR. Supratman	-	-
-	Jl. Imam Bonjol	-	-
-	Jl. Irian	-	-
-	Jl. Interchange Duwet	-	-
-	Jl. Veteran	-	-

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
-	Jl. Mataram	-	-
-	Jl. Kalimantan	-	-
-	Jl. Angkatan 66	-	-
-	Jl. Jeruk	-	-
-	Jl. Kurinci	-	-
-	Jl. Untung Suropati	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

b. Angkutan Umum

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 0,00032. Hal ini memiliki makna 3,2 izin angkutan umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 dan 2019 masih tetap sebesar 0,00032.

Pada tahun 2020 sedikit menurun di angka 0,00031, dan angka tersebut bertahan sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.110 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2017	97	301.870	0,00032
2018	97	304.477	0,00032
2019	97	307.097	0,00032
2020	95	307.150	0,00031
2021	95	308.310	0,00031

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No : SK.687/AJ/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur Faktor muat (*Load Factor*) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993, untuk nilai *Load Factor* antara 70 persen - 110 persen. Jika nilai *Load Factor* lebih dari 110 persen maka penumpang akan merasakan kurang nyaman dalam menggunakan angkutan umum tersebut, jika nilai *Load Factor* kurang dari 70 persen menggambarkan bahwa angkutan umum tersebut kurang optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Sedangkan standar nilai *Load Factor* yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 adalah sebesar 70 persen. Di Kota Pekalongan *Load Factor* angkutan kota yang berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berada dikisaran 33 persen sampai dengan 41 persen. Kurang optimalnya angkutan kota dalam melayani pergerakan penumpang dikarenakan masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi terlebih lagi adanya angkutan *online*, sehingga load faktor angkutan kota kurang dari 70 persen.

Tabel 2.111 Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Faktor Muat (*Load Factor*) (persen)	33	35	37	41	41

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pembangunan terminal penumpang Tipe C direncanakan akan dibangun secara

bertahap mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Adapun lokasi yang akan dibangun terminal penumpang Tipe C berada di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan.

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021, jumlah penumpang yang melalui terminal pada tahun 2017 berjumlah 1.912.577 orang dan meningkat di tahun 2018 menjadi 1.938.614 orang. Pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan yaitu, dari 1.876.174 orang di tahun 2019 menjadi 771.497 orang di tahun 2020 dan sebesar 482.290 orang di tahun 2021. Penurunan ini selain karena banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi *COVID-19*. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2021. Hal tersebut berarti bahwa dapat dikatakan persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.112 berikut ini.

Tabel 2.112 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Otobis AKAP AKDP	377.428	339.637	294.470	125.162	73.150
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	1.912.577	1.938.614	1.876.174	771.497	482.290
Persentase Angkutan Darat	19,8	17,6	15,7	16,2	15,1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

c. Kendaraan Laik Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 800 kendaraan yang kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 788 kendaraan. Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 829 kendaraan dan kemudian menurun menjadi 817 kendaraan di tahun 2020, serta menjadi 747 kendaraan di tahun 2021.

Tabel 2.113 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	800	788	829	817	747
Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Kir	3.902	4.002	4.166	4.267	4.201
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	20,50	19,69	19,90	19,15	17,78

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (*Smoke Tester*) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan *Pit Lift* dan *Play Detector*; uji lampu utama; uji *side slip*; uji *axle load*; untuk kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum disajikan dalam Tabel 2.114 berikut.

Tabel 2.114 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lama Pengujian (Menit)	20	30	30	30	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR kendaraan bermotor. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2017-2021 tidak ada kenaikan yaitu Rp.40.000.

Tabel 2.115 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

d. Perparkiran

Dishub Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di Kota Pekalongan yang didominasi di Jalan Urip Sumoharjo dimana setiap titik parkir disesuaikan berdasarkan surat tugas oleh juru parkir yang ditunjuk yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti rompi petugas, peluit, bendera dan sebagainya. Adapun titik parkir yang berpotensi penarikan retribusi terbesar di Kota Pekalongan yang mampu mendongkrak capaian retribusi parkir diantaranya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung,

Kawasan Sorogenen, serta Alun-Alun yang mampu menyumbang hingga 60 persen. selain mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*), Dishub Kota Pekalongan juga melakukan penarikan retribusi parkir *off street* (di luar badan jalan) seperti di Jalan Veteran depan RSUD Kraton dan trayek terminal serta parkir insidentil (biasanya saat digelar sebuah *event* kegiatan). Dalam mencapai target yang ditetapkan, Dishub Kota Pekalongan telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan parkir yang terdiri dari unsur Subdenpom, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Data penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah parkir yang berizin	344	361	418	419	381
Jumlah potensi parkir yang belum berizin	15	14	16	15	13
Jumlah seluruh parkir	359	375	434	434	394
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin	95,82	96,27	96,31	96,54	96,70

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Pemenuhan kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan terakit dengan banyaknya kerusakan fasilitas lalu lintas di lapangan serta banyaknya permintaan dari warga terkait permintaan fasilitas lalu lintas sehingga diperlukan penggantian fasilitas lalu lintas dilaksanakan secara bertahap degan memperhatikan kebutuhan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kasus *COVID-19* yang berdampak pada *refocusing* anggaran.

Tabel 2.117 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemasangan Rambu lalu lintas Pada Tahun n	95	141	2	33	16
Jumlah Rambu lalu lintas yang Seharusnya Tersedia	300	290	150	100	30
Persentase Pemasangan Rambu lalu lintas	31,67	48,62	1,33	33,00	53,33

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) Pada Tahun n	0	5	0	0	0
Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) yang Seharusnya Tersedia	15	15	10	10	10
Persentase Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pada Tahun n	1	1	2	0	0
Jumlah Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang Seharusnya Tersedia	6	5	4	2	1
Persentase Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	16,67	20,00	50,00	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan guardrail Pada Tahun n	0	4	0	0	0
Jumlah guardrail yang Seharusnya Tersedia	14	14	10	10	0
Persentase Pemasangan guardrail	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan marka jalan Pada Tahun n	20 lokasi	25 lokasi	13 lokasi	12 lokasi	10 lokasi
Jumlah marka jalan yang Seharusnya Tersedia	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan
Persentase Pemasangan marka jalan	13,33	16,67	8,67	8,00	6,67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

f. Perkeretaapian

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.118 mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2019 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan yaitu sejumlah 863.851 penumpang. Perkembangan dari tahun 2017-2019 menunjukkan semakin banyaknya

masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Namun terjadi penurunan drastis jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan kereta api pada tahun 2020 menjadi 271.920 orang, dan meningkat di tahun 2021 menjadi 335.956 orang. Hal tersebut karena karena pandemi *COVID-19* membuat adanya larangan bepergian ke luar daerah di tahun 2020 dan era new normal yang membolehkannya kembali bepergian ke luar daerah dengan batasan-batasan tertentu.

Tabel 2.118 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2017	585.215
2018	821.085
2019	863.851
2020	271.920
2021	335.956

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

Kota Pekalongan berada dibawah daerah operasi PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang. Panjang jalur operasional kereta api DAOP 4 Semarang adalah sepanjang 656 km, dimana jalur kereta sepanjang 6,85 km berada di wilayah Kota Pekalongan, dengan jumlah perlintasan sebindang sebanyak 10 perlintasan.

Tabel 2.119 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Rel Kereta Api	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km
Jumlah Perlintasan Rel dengan jalan	10	10	10	10	10
Perlintasan Sebidang	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Sebidang	-	-	-	-	-
Perlintasan Resmi	9	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Resmi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

g. Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan secara umum menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Di dalam angka kecelakaan terdapat angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang korbannya sampai meninggal dunia. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan kota, meningkatnya aktivitas masyarakat baik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah kendaraan pada sistem lalu lintas jalan tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan yang terjadi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan	155,44	155,44	155,44	153,41	153,41
Jumlah Kejadian Kecelakaan	60	91	122	121	103
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun	0,39	0,59	0,78	0,79	0,67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

Berdasarkan tabel diatas frekuensi atau rata-rata kejadian kecelakaan per kilometer di Kota Pekalongan adalah 1 kejadian per tahunnya.

Tabel 2.121 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Korban Kecelakaan	77	116	145	142	125
Luka-luka	54	86	117	134	104
Meninggal Dunia	23	30	28	8	21
Jumlah Penduduk	301.870	304.477	307.097	307.150	315.997
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk	7,62	9,85	9,12	2,60	6,64

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2022

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2021

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	RSUD Bendan	100	Informatif
2	DPUPR	100	Informatif
3	DINARPUS	99,8	Informatif
4	BAKESBANGPOL	98,9	Informatif
5	DINPERINAKER	96,8	Informatif
6	DINSOS P2KB	96,8	Informatif
7	DPMPTSP	96,8	Informatif
8	SEKRETARIAT DPRD	96,5	Informatif

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
9	DINDAGKOP UKM	95	Informatif
10	SATPOL P3KP	95	Informatif
11	BPKAD	94,5	Informatif
12	DLH	94,4	Informatif
13	DKP	93,9	Informatif
14	BKPSDM	93,8	Informatif
15	DINDUKCAPIL	92,3	Informatif
16	BAPPEDA	91,2	Informatif
17	DPMPPA	91,9	Informatif
18	BAG. HUKUM SETDA	91,5	Informatif
19	DINKES	90,2	Informatif
20	BPBD	90,2	Informatif
21	KEC. PEKALONGAN SELATAN	89,5	Menuju Informatif
22	DINPARBUDPORA	88,8	Menuju Informatif
23	DINPERPA	88,2	Menuju Informatif
24	BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA	85,3	Menuju Informatif
25	KEC. PEKALONGAN BARAT	81,6	Menuju Informatif
26	DINHUB	78,8	Cukup Informatif
27	DINPERKIM	76,9	Cukup Informatif
28	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,1	Cukup Informatif
29	KEC. PEKALONGAN TIMUR	71,3	Cukup Informatif
30	BAG KESRA SETDA	70,5	Cukup Informatif
31	BAG. PBJ DAN MINBANG SETDA	69,8	Kurang Informatif

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2022

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2017 - 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah SIM	55	76	92	107	179

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2022

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat http://pusaka.pekalongankota.go.id. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, Wirausaha/Pelaku Usaha, KNPI, BKM, LPM, Guru

TIK/BTIK/SMP/MTs, Blogger, Pecinta Internet Hebat, Animator, Vlog Kota PKL, Robotik, Puskomas, Pengelola Web Sekolah, Karang Taruna, Anti Hoax, Film, Himpaudi, Telecenter, MGMP Multipedia, Explore Pekalongan, Relawan TIK, KIM, dan Dewan TIK.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2021 di Kota Pekalongan sebanyak 84 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan disajikan dalam Tabel 2.124 berikut.

Tabel 2.124 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jaringan telepon genggam	12	12	7	7	7
Stasioner	84	80	80	80	84
Rasio jaringan komunikasi	0,14	0,15	0,09	0,09	0,08

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2022

Keterangan : jaringan telepon genggam terdiri dari Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G.

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Wawasan, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.125 berikut.

Tabel 2.125 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Surat Kabar	10	15	15	15	15

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten

Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi disajikan dalam Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penyiaran Radio	13	14	17	8	7
Jumlah Penyiaran TV	15	16	20	20	3

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2022

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2017-2021 semakin menurun. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 14.671 pelanggan. Jumlah tersebut cenderung meningkat sampai tahun 2021 dengan jumlah pelanggan sebanyak 11.532 pelanggan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.127 berikut.

Tabel 2.127 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2017-2021

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2017	14.671	74.970	19,57
2018	15.096	75.618	19,96
2019	10.531	76.269	13,81
2020	11.254	84.296	13,35
2021	11.532	100.947	11.42

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2022

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, Kota Pekalongan dapat mencapai indeks SPBE sebesar 3,14 (predikat Baik) dengan 3 domain yang dinilai yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan. Pada tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi lokus survei dari Kemenpan RB sehingga tidak dilakukan penilaian. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian dan mencapai indeks SPBE sebesar 2,28 (predikat Baik). Indeks tersebut turun dikarenakan adanya tambahan Domain Manajemen sebagai komponen penilaian.

Hasil penilaian SPBE Tahun 2021, Kota Pekalongan mendapatkan nilai 2,82 dengan predikat “Baik”. Adapun nilai setiap domain SPBE disajikan dalam Tabel 2.128 berikut.

Tabel 2.128 Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019 dan 2021

No.	Domain SPBE	2019	2021
1	Kebijakan	2,76	2,8
2	Tata Kelola	2,86	2,1
3	Layanan	3,39	3,75
4	Manajemen	-	1,36
Indeks SPBE		3,14	2,82

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2022

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan MKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Jumlah Koperasi aktif di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020. Namun sejak tahun 2021, telah dilakukan verifikasi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, dimana koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dua tahun berturut-turut akan diberikan peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran, sehingga koperasi masuk kategori tidak aktif. Dengan verifikasi ini, persentase koperasi aktif yang pada tahun 2020 sebanyak 89,77% pada tahun 2021 turun menjadi 50,90%.

Tabel 2.129 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2017	235	280	83,93
2018	236	281	83,93
2019	237	281	84,34
2020	272	303	89,77
2021	141	277	50,90

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2022

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 UMKM Kota Pekalongan berjumlah 19.820 UMKM, yang terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2021 berjumlah 23.655 UMKM. Fenomena ini menjadi sinyal positif karena peran sektor riil cukup besar dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan.

Tabel 2.130 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	
2017	7.840	4.570	6.400	1.010	19.820
2018	9.115	5.476	6.400	914	21.905
2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980
2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233
2021	9.916	6.215	6.610	914	23.655

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2022

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Jumlah investasi mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Apalagi pada tahun 2017-2019, nlai investasi mengalami kecenderungan yang meningkat. Namun demikian, akibat pandemi *COVID-19* maka nilai investasi tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilai investasi tahun 2021 kembali meningkat, sehingga pada dasarnya nilai investasi memiliki kecenderungan yang meningkat pada tahun 2017-2021.

Sepanjang tahun 2017-2021, investasi terbesar terjadi pada tahun 2019, dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.228,66 Milyar, dengan jumlah investor sebanyak 745 investor, jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 8.377 orang dan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 11,24. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi maka nilai investasi sepanjang lima tahun terakhir berkecenderungan meningkat, terutama tahun 2017-2019. Pandemi *COVID-19* berdampak signifikan sehingga nilai investasi tahun 2020 menurun tajam di angka Rp. 193,116 Milyar dan meningkat kembali pada tahun 2021, menjadi sebesar Rp. 390,348 Milyar. Jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama 5 (lima) tahun disajikan dalam Tabel 2.129.

Tabel 2.131 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan
Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Investor	304	202	745	181	181
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)	232,835	175,150	3.228,660	193,116	390,348
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan	1.274	1.274	8.377	2.349	2.044
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	4,19	6,31	11,24	12,98	11,29

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2022

Tahun 2017-2021 realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Pekalongan adalah nol. Artinya tidak terjadi PMA di Kota Pekalongan sepanjang kurun waktu tersebut. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Pekalongan tahun 2017-2021 dapat dikatakan fluktuatif tiap tahunnya. Realisasi PMDN tertinggi

tercapai di tahun 2019 sebesar Rp.3.228,66 milyar dan mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 menjadi Rp.193,12 Milyar. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi PMDN menjadi sebesar Rp.390,35 Milyar. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Pekalongan tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.130.

Tabel 2.132 Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	232,835	175,150	3.228,660	193,116	390,348

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2022

Tantangan penanaman modal di Kota Pekalongan ke depan, terutama terkait dengan kondisi geografis wilayah yaitu keterbatasan lahan. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km2. Dari data genangan banjir dan rob tahun 2021, luas wilayah yang terkena dampak banjir dan rob adalah sebesar 1.730 Ha atau 37,27%. Selain itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) adalah 521 hektar. Lahan yang dialokasikan untuk kawasan perdagangan dan jasa seluas 386 Ha serta kawasan peruntukan industri adalah seluas 189 Ha. Berdasarkan data tersebut maka luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman modal semakin terbatas, karena kecenderungan penanaman modal di wilayah Kota Pekalongan terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa, sektor industri pengolahan, sektor perumahan dan kawasan permukiman, sektor perikanan, serta sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Salah satu upaya yang dilakukan dan akan terus diperkuat untuk menarik penanaman modal adalah optimalisasi kemudahan perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Pekalongan. Apalagi, seluruh daerah telah berlomba untuk menarik investor untuk menanamkan modal di daerahnya.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan PLTU Batang harus dimanfaatkan wilayah Kota Pekalongan sebagai peluang untuk melakukan sinergi agar Kota Pekalongan dapat menerima manfaat dari pengembangan kawasan di wilayah Kabupaten Batang. Termasuk juga kerjasama dengan wilayah sekitar yaitu Kabupaten Pekalongan harus diperkuat karena interaksi ekonomi yang kuat selama ini dalam berbagai bidang.Tahun 2017-2021 realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Pekalongan adalah nol.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada tahun 2017-2020 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 8 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan. Pada tahun 2021 kegiatan kepemudaan bertambah menjadi 10 kegiatan. Pada tahun 2019 terjadi penambahan organisasi kepemudaan sebanyak 26 organisasi sesuai yang tercatat di Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2020-2021, jumlah organisasi kepemudaan berkurang menjadi 24 organisasi. Jumlah gelanggang /balai remaja selama lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 jumlahnya relatif tetap, yaitu 3 gelanggang/balai remaja. Perkembangan kepemudaan di Kota Pekalongan secara detail disajikan dalam Tabel 2.133 berikut ini.

Tabel 2.133 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Kepemudaan	9	9	26	24	24
Jumlah kegiatan Kepemudaan	8	8	8	8	10
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 30 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Pada tahun 2019-2020, jumlah organisasi olahraga menjadi 31 organisasi termasuk organisasi utama olahraga yakni KONI. Ada penambahan jumlah organisasi olahraga pada tahun 2021 menjadi 34 organisasi. Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 7 sampai 10 kegiatan. Sedangkan jumlah lapangan olahraga masih tetap 55 lapangan selama tahun 2017-2021 dan perlu ditingkatkan.

Tabel 2.134 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	31	31	34
Jumlah kegiatan Olahraga	7	7	8	8	10
Jumlah Lapangan Olahraga	55	55	55	55	55

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data.

kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi.

Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan *e-Goverment*, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta layanan keamanan informasi dengan menerapkan sertifikasi elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2017-2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 *event* pada tahun 2018, menjadi 57 *event* di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan *event* tersebut. Namun dikarenakan adanya pandemi *COVID-19,* penyelenggaraan festival seni dan budaya menurun menjadi hanya ada 6 *event* di tahun 2020 dan 4 *event* di tahun 2021. *Event* yang diselenggarakan di tahun 2021 antara lain Pentas Seni Virtual Pekan Batik Nusantara, Launching Saroeng Batik Kauman, Launching Saroeng Batik Pesindon dan Pentas Seni Virtual.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	29	42	57	6	4
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4

Uraian	Tahun				
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	282	282	282	282	282

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *COVID-19* Pemerintah Kota Pekalongan hanya menyelenggarakan beberapa even seni dan budaya dengan total 6 *event.* Bahkan pada tahun 2021 tidak ada penyelenggaraan festival/pentas seni/*event* sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.136 berikut.

Tabel 2.136 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ *Event* di Kota Pekalongan Tahun 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penyelenggaraan	35	42	57	6	0

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Dari berbagai festival seni budaya yang diselenggarakan, jika dikelompokkan ada 17 jenis seni budaya sebagaimana tabel berikut. Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinanan, fasilitasi dan penyelenggaraan *event*. Sehingga pelestarian seni budaya dapat tercapai 100 persen. Namun dikarenakan adanya pandemi *COVID-19*, jumlah *event* seni budaya yang diselenggarakan pada tahun 2021 menurun menjadi 12 kelompok.

Tabel 2.137 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2019-2021

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Simtuduror	Simtuduror	Seni Musik
2	Seni Musik	Seni Musik	Sanggar Teater
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Seni Tari
4	Seni Tari	Seni Tari	Seni Rakyat
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Seni Karawitan
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Perfilman
7	Perfilman	Perfilman	Komunitas Musik Rakyat
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Orkes Melayu (Dangdut)
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Musik Keroncong
10	Samroh	Samroh	Dekorasi
11	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan	Sastra
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Seni Lukis
13	Reklame	Reklame	
14	Dekorasi	Dekorasi	
15	Seni Lukis	Seni Lukis	
16	Kerajinan	Kerajinan	
17	Sastra	Sastra	

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 89.682 orang, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 83.068 pengunjung. Pada tahun 2019 jumlahnya meningkat lagi menjadi 90.150, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Hal itu terjadi karena kondisi pandemi *COVID-19* maka jumlah kunjungan menurun drastis menjadi 39.885. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2017 sampai tahun 2021.

Tabel 2.138 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2017	89.682	268.070	0,33
2018	83.068	261.944	0,32
2019	90.150	261.944	0,34
2020	39.885	258.543	0,16
2021	64.527	268.780	0,24

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2022

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan relatif tetap. Hanya jumlah perpustakaan RW yang berkurang, dari 105 perpustakaan di tahun 2017-2018, berkurang menjadi 94 di tahun 2019, di tahun 2020 dan 2021 kembali berkurang menjadi 90. Hal ini disebabkan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Uraian Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	3	3	3	4	4
Perpustakaan RW	105	105	94	90	90
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	77
Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	34
Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	23
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2022

18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2017 - 2021 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2017 hanya ada 22 PD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku. Namun pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat

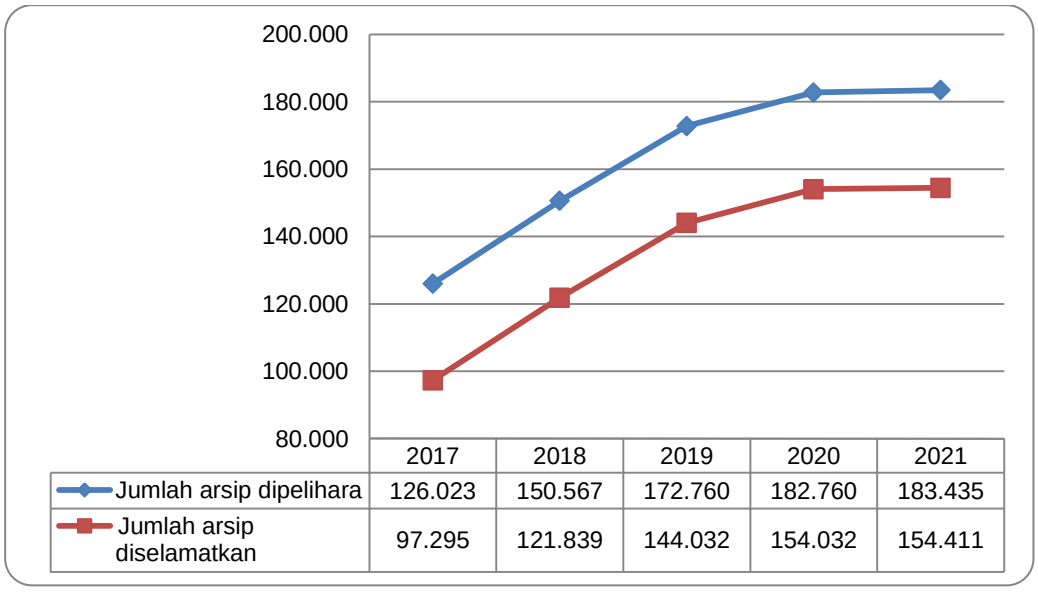
meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 22 PD menjadi 49 PD. Sampai tahun 2021 masih stagnan pada angka 49 PD yang mengelola arsip secara baku seperti disajikan dalam Tabel 2.140 berikut.

Tabel 2.140 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2017	66	22	33,33
2018	66	49	74,24
2019	66	49	74,24
2020	66	49	74,24
2021	66	49	74,24

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2022

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan disajikan dalam Gambar 2.49 berikut.



Gambar 2.49 Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2022

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2017-2021 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu

organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan arsip statis. Pada tahun 2017, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 23 orang, pada tahun 2018 meningkat sebanyak 28 orang. Pada tahun 2019 meningkat meningkat menjadi 48 orang. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 50 orang yang memanfaatkan arsip statis dan tahun 2021 sebanyak 66 orang.

Tabel 2.141 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total (Orang)
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2017	6	16	1	23
2018	7	20	1	28
2019	10	36	2	48
2020	7	42	1	50
2021	19	46	1	66

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2022

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan jumlah arsiparis untuk mengelola kearsipan. Tercatat di tahun 2017 ada sebanyak 4 orang arsiparis, lalu berkurang menjadi 3 orang di tahun 2018 karena mengundurkan diri, dan bertambah 4 orang sehingga total sampai tahun 2021 adalah 7 orang. Dari ketujuh orang arsiparis tersebut, 1 orang tidak perlu uji kompetensi karena masih menggunakan aturan lama, 1 orang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena berpendidikan SMA (untuk dapat mengikuti uji kompetensi, minimal berpendidikan D3), dan 5 orang belum memiliki sertifikat.

Tabel 2.142 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2017	4	0	0
2018	3	0	0
2019	3	0	0
2020	7	0	0
2021	7	0	0

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2022

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 jauh dari target yang diharapkan yaitu sebesar 60,35 persen dari target sebesar 15.300 ton, dengan realisasi 9.234 ton. Pencapain target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton juga tidak terpenuhi, dengan realisasi sebesar 541,02 ton (45,09 persen). Pencapaian produksi ikan air tawar pada tahun 2021 sebesar 71,64 ton dari target sebesar 83

ton, atau hanya tercapai 86,31 persen. Perkembangan produksi ikan tangkap, budidaya air payau dan budidaya air tawar mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2017-2021) disajikan dalam Tabel 2.143 berikut.

Tabel 2.143 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 (kg)

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	10.475	10.980	14.992	13.887	9.234
b. Target Daerah	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	68,46	71,76	97,99	90,76	60,35
Ikan Budidaya Air Payau					
a. Jumlah Produksi Ikan	1.578,50	1.698,30	1.746,20	717,31	541,02
b. Target Daerah	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	131,54	141,53	145,52	59,78	45,09
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	46,7	46,9	11,3	91,70	71,64
b. Target Daerah	83	83	83	83	83
Persentase Produksi	56,27	56,51	13,61	110,48	86,31
Jumlah Produksi (ton)	12.100	12.725	16.750	14.696	9.847
Target Produksi	16.583	16.583	16.583	16.583	16.583

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2022

Berbagai permasalahan perikanan tangkap di Kota Pekalongan antara lain sedimentasi yang tinggi di muara yang menyebabkan kapal ikan besar > 30 GT tidak bisa masuk, TPI yang terendam banjir saat terjadi air laut pasang, keterbatasan fasilitas docking (antrian *docking* sampai dengan 3 bulan), padahal umumnya kapal sekaligus akan melakukan *docking* setelah bongkar/lelang setahun sekali. Pemerintah Kota pekalongan juga belum memiliki TPI hingga saat ini masih menyewa pada Perum Perindo. Selain itu banyak instansi yang memiliki kewenangan di lokasi Pelabuhan Perikanan di Kota Pekalongan yaitu fungsi pokok Pelabuhan dibawah kewenangan PPNP, alur pelabuhan (muara Kali Loji) dibawah kewenangan Provinsi Jawa tengah dan fasilitas komersial (TPI, lahan, perkantoran) dibawah kewenangan Perum Perindo.

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2021 secara kuantitas per kapita cenderung meningkat. Pada tahun 2017 belum bisa mencapai target yang ditentukan yaitu 30 kg/kapita/tahun. Sampai dengan tahun 2020, persentase konsumsi ikan terus meningkat di angka 108,80 persen. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 105,87 persen meskipun telah melampauai target yang ditetapkan yaitu 31 kg/perkapita/tahun. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 (kg/kapita/tahun)

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2017	26,7	30	89,00
2018	31,6	30	105,33
2019	32,12	30	107,07
2020	32,64	30	108,80
2021	32,82	31	105,87

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2022

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019. Namun di tahun 2019 terdapat 4 kelompok nelayan yang diberikan bantuan, dan tahun 2021 sebanyak 2 kelompok.

Tabel 2.145 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2017	0	34	0,00
2018	0	35	0,00
2019	0	35	0,00
2020	4	36	11,11
2021	2	38	5,3

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2022

Di sisi produksi perikanan, mulai tahun 2017 hingga tahun 2020 terus meningkat, yaitu dari 10.475 ton menjadi 13.887 ton. Pada tahun 2021 menurun cukup signifikan menjadi 9.924 ton. Sementara itu jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan mengalami penurunan, dari 259,48 ton di tahun 2017 menjadi 108,83 ton di tahun 2019. Penurunan di tahun 2019 dikarenakan beberapa kapal milik kelompok nelayan, seperti kapal Inka Mina, tidak melakukan operasional penangkapan ikan karena kapal sudah tidak layak jalan/operasional. Selain itu ada rencana untuk mengalihfungsikan kapal menjadi kapal pengangkut. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 155,62 ton dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 128,96 ton. Secara lengkap data Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.146 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan (ton)	Jumlah Produksi Ikan di Daerah (ton)	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
2017	259,48	10.475	2,48
2018	145,96	10.980	1,33
2019	108,83	14.991	0,73
2020	155,62	13.887	1,12
2021	128,96	9.924	1,30

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2022

Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan mengalami kenaikan jumlahnya dari 28 hotel pada tahun 2017 menjadi 30 hotel di Tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 2 hotel yang direnovasi sehingga jumlahnya menjadi 28 hotel. Pada tahun 2020, kedua hotel tersebut dibuka kembali sehingga jumlahnya menjadi 30 hotel dan berjumlah masih tetap di tahun 2022 yaitu sebanyak 30 hotel. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 3.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner. Kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan makanan nasional juga menyediakan makanan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 137 di tahun 2017, sekarang telah berkembang menjadi 178 restoran di tahun 2021. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2021 kunjungan wisata sudah mulai meningkat seiring dengan meredanya pandemi Covid 19 di Kota Pekalongan sehingga masyarakat sudah mulai berkunjung ke tempat-tempat wisata.

Tabel 2.147 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2017	28	137	387.417
2018	30	138	784.254
2019	28	152	720.816
2020	30	150	283.882
2021	30	178	316.440

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat okupansi hotel, dimana tahun 2019 dan 2020 tingkat okupansinya tidak siginifikan. Untuk hotel kelas melati mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 22 persen menjadi 23 persen di tahun 2020. Rata-rata okupansi hotel binang 1 hingga hotel bintang 3 tidak mengalami perubahan yaitu masih tetap sebesar 13 persen untuk hotel bintang 1, sebesar 18 persen untuk hotel bintang 2, serta sebesar 36 persen untuk hotel bintang 3. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020

Kelas Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Rata-rata Okupansi (%)	
			2019	2020
Melati	20	445	22	23
Bintang 1	1	65	13	13
Bintang 2	1	47	18	18
Bintang 3	8	739	36	36

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan dalam Tabel 2.149 berikut.

Tabel 2.149 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penyelenggaraan	35	42	57	6	0

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan. Obyek wisata yang ada di Kota Pekalongan antara lain pantai Slamaran Indah, Museum Batik, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon, Kampung Canting Landungsari, wisata belanja Pasar Batik Grosir Setono, Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Obyek wisata terbaru yang telah dibangun pada tahun 2021 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2022 yaitu Taman Wisata Laut Pasir Kencana.

Jumlah kunjungan di Museum Batik walaupun menurun, namun wisatawan dari mancanegara masih ada yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

Tabel 2.150 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Objek Wisata	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	6	2	0	0
	2). Wisnus	105.360	69.184	69.057	7.429	0
	B. Pendapatan (Rp.)	529.565.500	360.360.250	355.370.750	39.449.750	0
2	Slamaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	9.134	7.641	11.283	10.426	13.628
	B. Pendapatan (Rp.)	31.851.500	32.826.750	44.572.750	33.759.750	38.038.500
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	358	454	286	138	0
	2). Wisnus	23.044	25.154	28.312	9.982	6.194
	B. Pendapatan (Rp.)	84.254.000	96.861.000	100.530.000	31.447.000	25.734.000
4	Kolam Renang Tirta Sari					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	0	0	0	0	0
	B. Pendapatan (Rp.)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2022

Selain daya tarik wisata dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata, keberadaan SDM berperanan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2017 sebesar 7,29 ton per hektar. Kemudian menurun cukup drastis di tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 6,36 ton per hektar di tahun 2018. Tahun 2019 sebesar 3,16 ton per hektar dan tahun 2020 menurun lagi pada posisi 2,92 ton per hektar. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 5,01 ton per hektarProduktivitas padi di Kota Pekalongan disajikan secara lengkap dalam Tabel 2.151 berikut.

Tabel 2.151 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi tanaman padi (ton)	12.425,00	10.077,00	5.131,09	4.769,19	7.151,00
Luas areal tanaman padi (Ha)	1.704,00	1.584	1.618,74	1.631,53	1.428,00

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	7,29	6,36	3,16	2,92	5,01

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot meningkat di tahun 2018, dari 67 kelompok tani pada tahun 2017 menjadi 80 kelompok tani di tahun 2018, 87 kelompok tani di tahun 2019 dan 88 kelompok tani di tahun 2020. Di tahun 2021 jumlahnya tetap 88 kelompok. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), kelompok tani dan kelompok ternak.

Tabel 2.152 Cakupan Bina Kelompok Petani
Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	3	28	40	40	18
Jumlah kelompok tani	67	80	87	88	88
Cakupan bina kelompok petani (persen)	4,48	35,00	45,98	45,45	20,45

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2022

Dengan mencermati data tersebut di atas, ternyata jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tidak berdampak langsung atau tidak memiliki korelasi yang nyata dengan produktivitas padi per hektar. Jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani yang meningkat tidak diikuti peningkatan produktivitas padi per hektar secara langsung, justeru produktivitas padi per hektar cenderung menurun. Produktivitas padi per hektar yang meningkat kembali tahun 2021, diharapkan merupakan dampak dari meningkatnya jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tahun-tahun sebelumnya.

Aspek lain yang sangat berdampak terhadap produktivitas padi per hektar adalah semakin meluasnya banjir dan rob di wilayah Kota Pekalongan. Dari data genangan banjir dan rob tahun 2021, luas wilayah yang terkena dampak banjir dan rob adalah sebesar 1.730 Ha atau 37,27%. Berdasarkan luas wilayah terdampak banjir dan rob, serta frukuensi dan lama terjadi banjir dan rob, tentunya berimplikasi terhadap produktivitas padi per hektar pada kawasan terdampak. Banjir dan rob berimplikasi terhadap kondisi tanah atau unsur hara sehingga akan berdampak terhadap produktivitas padi per hektar.

Selain itu, permasalahan irigasi juga menjadi penyebab menurunnya produktivitas padi per hektar. Kondisi geografis wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar, berimplikasi terhadap sedimentasi yang cukup tinggi. Sedimentasi yang tinggi tersebut, menyebabkan aliran air irigasi seringkali mengalami kendala. Di samping itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) dalam RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 adalah 521 hektar. Perkembangan kawasan terbangun (*built-up area*) yang cukup tinggi, seperti untuk perumahan dan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan serta alokasi luas lahan yang menurun menyebabkan beberapa saluran irigasi tidak berfungsi. Kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap menurunnya produktivitas padi per hektar.

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti disajikan dalam Tabel 2.153 berikut.

Tabel 2.153 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

JenisPasar / Toko	2017	2018	2019	2020	2021
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
PasarTradisional	11	11	11	11	10
- Toko	247	74	74	74	74
- Kios	1.685	555	555	555	555
Toko diluar Pasar Tradisonal	2.726	2.726	2.726	2.726	2757
Toko Modern :					
- Minimarket	41	42	43	53	77
- Supermarket	2	3	3	5	4
- Department store	4	3	3	4	2
- Hypermarket	2	1	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2022

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2021, pedagang/usaha informal sebanyak 975 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.154 berikut.

Tabel 2.154 Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Lokasi	Jumlah
1	Jl. Sultan Agung	30
2	Jl. Hasanudin	6
3	Jl. Urip Sumoharjo	57
4	Jl. Gatot Subroto	43
5	Jl. Kurinci	21
6	Jl. Kusuma Bangsa	52
7	Jl. Merak *	-
8	Jl. WR. Supratman	14

No.	Lokasi	Jumlah
9	Jl. Progo	11
10	Jl. Merpati	16
11	Jl. Mawar	18
12	Jl. Melati	38
13	Jl. Kepodang	16
14	Jl. Mataram	50
15	Alun-alun timur	22
16	Alun-alun utara	30
17	Alun-alun konveksi	209
18	SKLP	82
19	Tentara Pelajar	18
20	Jl. Veteran	50
21	Jl. Angkatan 45	6
22	Resimen	7
23	Gajah Mada	10
24	Jl. Ahmad Dahlan	15
25	JL. HOS cokroaminoto	52
26	Jl. RA Kartini	24
27	Jl. Wahid Hasyim	15
28	Jl. Agus Salim	11
29	Jl. Dr. Wahidin	16
30	Jl. Cendrawasih	36
31	JL. Rajawali *	-
	Total	975

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan (diolah), 2022

Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga berlaku terus meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar Rp.2,019 triliun dan terus naik sampai di angka Rp.2,370 triliun di tahun 2019. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang terus naik, mulai dari Rp.1,487 triliun di tahun 2017 menjadi Rp.1,655 triliun di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan atas harga berlaku dan atas harga konstan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, masing-masing menjadi sebesar Rp. 2.289 triliun dan Rp. 1.578 triliun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 maupun tahun 2020, masing-masing menjadi 2,423 triliun dan 1,664 triliun. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.155 berikut.

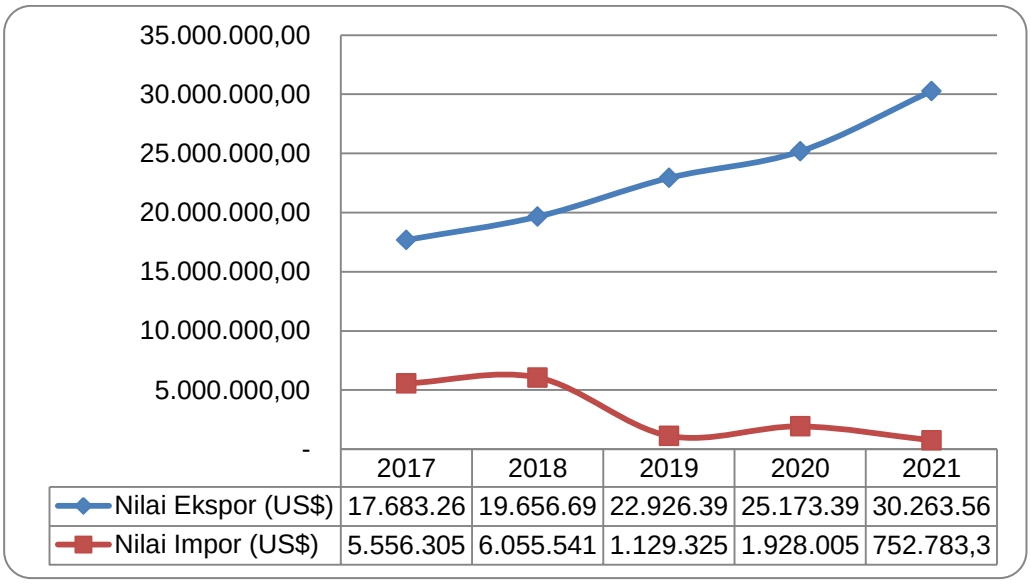
Tabel 2.155 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Keterangan		2017	2018	2019	2020	2021
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873.976,04	10.818.530,64	11.428.319,23
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	2.019.945,16	2.195.304,05	2.370.293,83	2.289.121,10	2.423.908,81
		Kontribusi	21,78	21,76	21,80	21,16	21,21
2	ADHK	PDRB Total	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89	7.601.486,23

No	Keterangan		2017	2018	2019	2020	2021
	2010	PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.487.771,72	1.570.073,03	1.655.883,36	1.578.463,62	1.664.625,66
		Kontribusi	22,18	22,15	22,15	21,51	21,90

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Nilai ekspor tahun 2017-2021 cenderung naik, berbanding terbalik dengan nilai impor. Nilai ekspor tahun 2017 yaitu 17.683.268,64 US$, terus meningkat hingga mencapai angka 30.263.567,00 US$ di tahun 2021. Sedangkan nilai impor mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 berada di angka 5.556.305,00 US$, naik dan turun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, hingga mencapai angka 752.783,38 US$ di tahun 2021. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.50 berikut.



Gambar 2.50 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2022

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2017 terdapat 20 unit industri, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 14 unit. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89 unit, di tahun 2020 menurun kembali menjadi 8 unit, dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 58 unit. Klasifikasi industri di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH UNIT INDUSTRI				
	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	0	8	14	4	8
Industri Aneka (IA)	20	6	47	3	45
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	0	6	1	5
JUMLAH	**20**	**14**	**89**	**8**	**58**

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2022

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti disajikan dalam Tabel 2.157 berikut.

Tabel 2.157 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	0	933,00	9.412,03	955,00	3.108,90
Industri Aneka (IA)	9.683,00	11.682,00	69.483,30	7.184,00	11.271,27
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	0	2.721,41	1.450,00	740,00
JUMLAH	9.683,00	12.615	81.616,74	9.589,00	15.120,17

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2022

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan pengolahan ikan sepanjang tahun 2017-2021 jumlah industrinya cenderung stagnan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.158 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Jenis industri	2017	2018	2019	2020	2021
Batik	760	770	781	1.457	1.882
Pakaian jadi dari tekstil	913	913	953	941	1.067
Pembekuan ikan	NA	NA	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	1	1	1	1	1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	22	22	23	26	45
Penggaraman/Pengeringan Ikan	5	5	9	38	102
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	7	7	8	88	87
Pengolahan Teh dan Kopi	8	8	11	31	36
Pertenunan	31	31	34	33	46

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2022

Tabel 2.159 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Jenis industri	2017	2018	2019	2020	2021
Batik	12.104	5.197	5.278	7.964	11.263
Pakaian jadi dari tekstil	5.630	5.849	6.047	6.600	7.958
Pembekuan ikan	30	NA	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	396	477	477	583	317
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	102	56	59	52	62
Penggaraman/Pengeringan Ikan	390	71	75	190	228
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	380	58	58	227	664
Pengolahan Teh dan Kopi	450	1.066	1.174	1.834	2.531
Pertenunan	760	595	595	466	407

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2022

Tabel 2.160 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Jenis industri	2017	2018	2019	2020	2021
Batik	45.760	n/a	n/a	10.041	17.610
Pakaian jadi dari tekstil	25.750	n/a	12.573	2.098	524
Pembekuan ikan	215	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	11.500	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	210	n/a	n/a	14,2	7,5
Penggaraman/Pengeringan Ikan	560	n/a	n/a	135	16,8
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	3.950	n/a	n/a	72.15	80,4
Pengolahan Teh dan Kopi	19.115	n/a	n/a	3.550	n/a
Pertenunan	7.250	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2022

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2017-2021 terus meningkat baik berdasarkan ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2017 PDRB ADHB sebesar Rp. 1,959 triliun atau 21,13 persen dari total PDRB. Kondisi tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi Rp. 2,423 triliun atau 21,21 persen dari total PDRB. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB disajikan dalam Tabel 2.161.

Tabel 2.161 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Keterangan		2017	2018	2019	2020	2021
ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873,976,04	10.818.530,64	11.428.319,23
	PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	1.959.739,49	2.112.720,60	2.267.013,33	2.315.321,70	2.423.908,81
	Kontribusi	21,13	20,94	20,85	21,40	21,21
ADHK (2010)	PDRB Total	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477,425,04	7.337.833,89	7.601.486,23
	PDRB Perindustrian	1.415.641,58	1.478.741,06	1.550.360,71	1.542.947,72	1.579.669,99
	Kontribusi	21,11	20,86	20,73	21,03	20,78

Sumber : Kota Pekalongan Dalam AngkaTahun 2022, 2022

2.1.3.4. Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.162 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	118	150	136	93	68

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2022

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu :

1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.

2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat https://jdih.pekalongankota.go.id.
8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu : 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari CC menjadi BB.

Pada Tahun 2021 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,16 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel 2.163 berikut.

Tabel 2.163 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	**30**	19,95	24,42	24,53	24,70	24,32
2	Pengukuran Kinerja	**25**	10,39	17,07	17,54	17,92	18,18
3	Pelaporan Kinerja	**15**	8,56	10,46	11,09	11,17	11,45

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
4	Evaluasi Internal	**10**	5,12	7,24	7,29	7,39	7,44
5	Capaian Kinerja	**20**	11,71	11,69	12,14	11,89	11,77
	Nilai SAKIP	**100**	**55,73**	**70,88**	**72,59**	**73,07**	**73,16**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**C**	**C**	**CC**	**BB**	**BB**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2022

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah penggukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada Tahun 2021 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 80,83 dengan kategori Baik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.164 berikut.

Tabel 2.164 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2021

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	77,08	Baik
2	Dinas Kesehatan	82,18	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	85,63	Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	77,68	Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	72,3	Kurang Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja	78,13	Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80,56	Baik
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	80,56	Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	78,18	Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	80,56	Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak	82,97	Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	78,13	Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	74,02	Kurang Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	80,42	Baik
15	Dinas Perhubungan	78,19	Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	80,65	Baik
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	76,59	Kurang Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	93,6	Sangat Baik
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	76,77	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	80,06	Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	79,7	Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	84,13	Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
	Daerah		
23	Badan Keuangan Daerah	78,71	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	80,56	Baik
25	Sekretariat DPRD	78,13	Baik
26	Inspektorat	79,63	Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	80,51	Baik
28	Bagian Protokol dan Kompim Setda	86,9	Baik
29	Bagian Organisasi Setda	86,11	Baik
30	Bagian Umum Setda	86,46	Baik
31	Bagian Hukum Setda	83,02	Baik
32	Bagian PBJ dan Minbang Setda	77,1	Baik
33	Bagian Perekonomian Setda	100	Sangat Baik
34	Bagian Pemerintahan Setda	85,53	Baik
35	Kecamatan Pekalongan Utara	80,49	Baik
36	Kelurahan Kandang Panjang	80,45	Baik
37	Kelurahan Panjang Wetan	80,44	Baik
38	Kelurahan Panjang Baru	80,42	Baik
39	Kelurahan Krapyak	80,42	Baik
40	Kelurahan Padukuhan Kraton	80,51	Baik
41	Kelurahan Degayu	79,8	Baik
42	Kelurahan Bandengan	80	Baik
43	Kecamatan Pekalongan Selatan	80,44	Baik
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	80,38	Baik
45	Kelurahan Kuripan Yosorejo	80,5	Baik
46	Kelurahan Jenggot	80,53	Baik
47	Kelurahan Buaran Kradenan	80,54	Baik
48	Kelurahan Banyurip	80,49	Baik
49	Kelurahan Soko Duwet	80,19	Baik
50	Kecamatan Pekalongan Barat	80,57	Baik
51	Kelurahan Medono	80,48	Baik
52	Kelurahan Podosugih	80,48	Baik
53	Kelurahan Pasirkratonkramat	80,47	Baik
54	Kelurahan Tirto	80,52	Baik
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	80,01	Baik
56	Kelurahan Bendan Kergon	80,48	Baik
57	Kelurahan Pringrejo	80,26	Baik
58	Kecamatan Pekalongan Timur	80,52	Baik
59	Kelurahan Kauman	80,28	Baik
60	Kelurahan Poncol	80,47	Baik
61	Kelurahan Klego	80,43	Baik
62	Kelurahan Gamer	80,41	Baik
63	Kelurahan Noyontaansari	80,54	Baik
64	Kelurahan Setono	80,52	Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
65	Kelurahan Kalibaros	80,52	Baik
	Rata-rata IKM Kota Pekalongan	80,83	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2022

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Kota Pekalongan yang dicapai adalah 68,97 dengan predikat “B”. Dengan nilai tersebut, Kota Pekalongan berada pada peringkat kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Adapun rincian komponen penilaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.165 berikut.

Tabel 2.165 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,33	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,62
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,84	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	10,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,08	5,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,15	5,62
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,63	3,65
	Total Komponen pengungkit (A)	**60,00**	**36,11**	**35,32**
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,80	9,92
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,72	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,16	6,74
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,65	9,00
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**30,33**	**33,65**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100,00**	**66,44**	**68,97**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi di Pemkot Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 69,66 dengan kategori “B” dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam Tabel 2.166 berikut.

Tabel 2.166 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021
A	**Komponen Pengungkit**		
	I. Pemenuhan	20,00	11,39
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,03
	III. Reform	30,00	18,86
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**36,28**
B	**Komponen Hasil**		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,11
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,36
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,71
Total Komponen Hasil		**40,00**	**33,38**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**69,66**

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, 2022

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2021, usulan Raperda yang masuk ke Propemperda sebanyak 17 Raperda yang terdiri dari 6 Raperda inisiatif dan 11 Raperda usulan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, tidak semua usulan Raperda menjadi Perda. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah Raperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda yaitu sebanyak 13 Perda, terdiri dari 3 Perda inisiatif dan 10 Perda usulan Wali Kota.

2.1.3.5. Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Periode RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017. Sementara itu, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD IV

atas RPJPD Kota Pekalongan. Selanjutnya, dokumen RKPD sebagai perencanaan pembangunan tahunan disusun berdasarkan RPJMD.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Pekalongan selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 dimana secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki

peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Jumlah ASN pada Pemerintah Kota Pekalongan mengalami penambahan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.997 orang, dari tahun 2020 sebanyak 2.956. Penambahan ini antara lain adalah karena adanya penerimaan ASN baru pada tahun 2021, walaupun juga ada pengurangan dari ASN yang purna tugas dan meninggal dunia, namun secara keseluruhan terdapat penambahan sebanyak 41 orang.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.167 berikut.

Tabel 2.167 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2021

Jabatan	2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	23	4	27	21	3	24
Eselon III	70	35	105	73	39	112
Eselon IV	207	154	361	129	109	238
Fungsional Umum	627	378	1.005	564	399	963
Fungsional Tertentu	511	947	1.458	616	1.044	1.660
Jumlah Total	**1.438**	**1.518**	**2.956**	**1.403**	**1.594**	**2.997**

Sumber : BKPSDM Kota Pekalongan, 2022

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.168 berikut.

Tabel 2.168 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2021

Jabatan	2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana/ doktor/ Ph.d	765	1.080	1.845	767	1.164	1.931
Diploma III/ Sarjana Muda	137	222	359	161	260	421
Diploma I, II	22	11	33	17	8	25
SMA/ Sederajat	342	174	516	317	154	471
SLTP/ sederajat	93	7	100	88	8	96
SD	61	0	61	53	0	53
Jumlah Total	**1.438**	**1.518**	**2.956**	**1.403**	**1.594**	**2.997**

Sumber : BKPSDM Kota Pekalongan, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ASN Pemerintah Kota Pekalongan atau sekitar 64 persen berpendidikan sarjana (Strata 1 sampai dengan Strata 3/doktor). Hal ini menunjukkan SDM yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hal ini dapat mendukung bila nantinya dilakukan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit.

Dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain :

a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN tiap tahunnya dengan 9 (Sembilan) indikator seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Adapun nilai dan kategori dalam Indeks Sistem Merit adalah : nilai 100-174 kategori Buruk, 175-249 Kategori Kurang, 250-324 kategori Baik dan 325-400 kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2020, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 204 dengan metode penilaian mandiri (self assessment), namun belum dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN. Sedangkan untuk tahun 2021 Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan telah dinilai oleh KASN dengan hasil nilai 178,5 atau kategori Kurang. Untuk Provinsi Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota nilai Indeks Sistem Merit kategori Baik untuk 5 Kab/kota (Kab. MAgelang, Kab. Purworejo, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri dan kota Surakarta), kategori Sedang untuk 5 Kab/kota (kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Rembang, Kota Pekalongan dan Kota Semarang) sedangkan sisanya 24 Kab/Kota masuk kategori Buruk.

Kota Pekalongan melalui BKPSDM telah melaksanakan semua indikator yang ada dalam penilaian Indeks Sistem Merit sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, namun beberapa dokumen belum diupload dalam sistem dan beberapa pelaksanaan belum terdokumentasikan. Selain itu peraturan terkait kepegawaian juga belum dimiliki dalam bentuk Peraturan Walikota, yang merupakan turunan dari Peraturan Perundangan Kepegawaian diatasnya.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian

kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail disajikan dalam Tabel 2.169 berikut.

Tabel 2.169 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Diklat	2017	2018	2019	2020	2021
Teknis	455	350	366	151	172
Fungsional	231	285	166	75	13
Kepemimpinan	5	52	8	1	3
Prajabatan	2	3	251	0	200

Sumber : BKPSDM Kota Pekalongan, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat Tenik, Fungsional dan Kepemimpinan pada tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan porsi / kuota yang disediakan penyelenggara Diklat. Sehingga jumlah peserta diklat tiap tahunnya tidak dapat dipresiksi jumlahnya, walaupun BKPSDM secara teratur selalu mengajukan calon peserta diklat baik ke Pemprov Jateng maupun Lembaga/instansi/ kemeterian terkait. Selain itu BKPSDM juga selalu mengisi pengajuan peserta diklat melalui Aplikasi SI JARI ON AKD milik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangan untuk diklat prajabatan pada tahun 2021 dilaksanakan untuk 200 orang CPNS.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (*general check-up*) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas. Hal ini didasarkan pada Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Pekalongan tidak mengirimkan peserta diklat pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Hal ini dikarenakan kondisi yang masih belum kondusif karena Covid 19, sehingga membatasi dalam pengiriman peserta diklat yang pelaksanaannya di luar daerah.

Jumlah ASN yang melakukan *general check-up* jumlahnya fluktuatif, berdasarkan jumlah ASN yang memerlukan cek Kesehatan (mengalami sakit) ataupun adanya CPNS baru yang memerlukan general check up. Pada tahun 2021 terdapat 200 orang yang mengikuti General Check Up.

Jumlah Aparatur yang melakukan general check up dan mengikuti Diklat purna tugas pada tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel 2.170 berikut.

Tabel 2.170 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Jenis Pembinaan Memasuki Masa Pensiun	2017	2018	2019	2020	2021
General *Check-Up*	75	53	343	11	206
Diklat Purna Tugas	45	90	60	60	0

Sumber : BKSDM Kota Pekalongan, 2022

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

Tabel 2.171 Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2018	Coklat Mangrove Sebagai Usaha Peningkatan Ekonomi Kreatif Masyarakat Pesisir Kota Pekalongan	-
2	2018	Kemasan Makanan Kuliner Tradisional "Megono" sebagai Upaya Memperpanjang Waktu Simpan dan Daya Saing Produk	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan
3	2018	Pengembangan Bahan Ajar Matematika SMP dengan Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) berbasis Budaya Lokal untuk Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Pekalongan	Universitas Pekalongan
4	2018	Pencegahan dan Edukasi Masyarakat dalam Penanganan Endemik Penyakit Menular berbasis Web untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
5	2019	Model Akselerasi Pencapaian Open Defecation Free (ODF) Kota Pekalongan melalui Penguatan Kelurahan (Sebuah Strategi Percepatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Universitas Pekalongan
6	2019	Kampung Batik Digital Berbasis Virtual Tour sebagai Wadah Promosi Batik Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan
7	2019	Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di	STMIK Widya Pratama Pekalongan

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
		Pasar Grosir Setono	
8	2019	Penggunaan Kembali Limbah Cair Batik Menjadi Air Bersih Menggunakan Metode Teknologi Membran	Universitas NU Purwokerto
9	2019	Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Menguatkan Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan
10	2020	Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis	Universitas Diponegoro
11	2020	Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan *COVID-19* : Optimalisasi Peran Pentahelix di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah	Universitas Pekalongan
12	2020	Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring	STMIK Widya Pratama Pekalongan
13	2020	Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga guna Membangun Kemampuan Problem Solving Anak	Universitas Selamat Sri
14	2020	Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
15	2021	Efektivitas Aplikasi Deteksi Risiko Kehamilan (ADRK) Mandiri Berbasis Android di Kota Pekalongan Tahun 2021	UMPP
16	2021	Video Teaser Batik Edu-Tourism sebagai Primadona Inovasi Daya Saing Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
17	2021	Implementasi Penguatan Destinasi Pariwisata Daerah Kota Pekalongan Melalui Analisis Strata Produk Unggulan dan Analisis Pesaing	Balitbang Kota Magelang

Sumber : jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2022

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.172 Riset Bersama Kota Pekalongan
Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2018	Model Pengelolaan Wisata Pasir Kencana Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
2	2018	Pra Revitalisasi Pasar Berorientasi pada Kesejahteraan, Kenyamanan, dan Keindahan (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan)	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
3	2018	Kajian Rencana Induk Kelitbangan Kota Pekalongan 2018-2021	Universitas Diponegoro
4	2018	Kajian Muara Sungai Pekalongan	PT. Indotama Mahesa Karya
5	2018	Kajian Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di Kecamatan Pekalongan Utara	PT. Citra Pamungkas Mandiri
6	2019	Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan	Tim Peneliti Poltekkes
7	2019	Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru	CV. Monalisa Art
8	2019	Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan	CV. Tunas
9	2019	Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa	CV. Pijar Mulya Wasesa
10	2019	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Exit Jalan Tol	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
11	2019	Strategi Penurunan Angka Pengangguran	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
12	2020	Analisis Strategi Recovery Kepariwisataan Kota Pekalongan pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru	DRD Kota Pekalongan
13	2020	Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan	DRD Kota Pekalongan
14	2021	Efektivitas Penanganan *COVID-19* di Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
15	2021	Pengembangan Dashboard Eksekutif untuk Sistem Monitoring Filariasis Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan

Sumber : jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2022

Dalam pelaksanaan riset unggulan tidak terdapat kendala yang berarti, namun demikian perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bappeda dengan Perguruan Tinggi di sekitar Kota Pekalongan, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (*bridging knowledge to policy*) di wilayah Kota Pekalongan. Tema RUD dan Riset Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPD Kota Pekalongan. Seleksi

pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan Kota Pekalongan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

2.1.3.6. Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

(1) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
(2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
(3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tugas dan fungsi organisasi.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Dalam Maturitas SPIP terkandung unsur Manajemen Resiko Indeks/MRI, yaitu Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sasaran Program terkait Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko yaitu Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 Kota Pekalongan telah melakukan penilaian terhadap MRI.

Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2017 sampai 2020 terus meningkat, diawali dari level 3 dengan catatan sampai level 3 penuh, namun turun di tahun 2021 menjadi level 2,812 dengan target kinerja akhir maturitas 5. Penurunan tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan antara lain adanya perubahan dalam Uraian Indikator Karakteristik Pengendalian dan belum optimalnya penerapan SPIP. Penguatan APIP diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP Inspektorat Kota Pekalongan adalah: Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; Aspek Sumber Daya (Sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan Sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan Aspek Tata Kelola (Pelaporan pengawasan berindikasi KKN, Standar Pengawasan, dan Penjaminan Mutu).

Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.173 berikut.

Tabel 2.173 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tingkat Maturitas SPIP	2017	2018	2019	2020	2021
Level	Level 3 dengan catatan	Level 3 dengan catatan	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 2,812

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan, 2022

2.1.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2017 – 2021 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib. Pada tahun 2021 masih terjadi gangguan keamanan antara lain pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Jumlah kasus yang naik yaitu pemerkosaan dan pencurian, sedangkan jumlah kasus yang menurun yaitu penganiayaan, penipuan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tindak Kejahatan	2017	2018	2019	2020	2021
Pembunuhan	0	1	0	2	0
Pemerkosaan	0	2	0	0	2
Penganiayaan	1	6	7	3	2
Pencurian	25	45	71	33	59
Penipuan	0	11	19	18	2
Penadahan	2	0	0	0	0
Narkotika dan Psikotropika	3	50	44	64	46

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2022

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel 2.175 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2017-2021.

Tabel 2.175 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Konflik Sosial	1	2	1	1	2

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2022

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu pada tahun 2017 tidak dilakukan kegiatan pembinaan politik karena pada tahun tersebut tidak ada pemilihan umum di Kota Pekalongan.

Tabel 2.176 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Kegiatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	0	32	32	38	36

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2022

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2020 telah diadakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 79,35 persen.

Tabel 2.177 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

JENIS PEMILIHAN UMUM	2017	2018	2019	2020	2021
Pemilu Kepala Daerah (Wali Kota) (persen)	-	-	-	79,35	-
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) (persen)	-	64,00	-	-	-
Pemilu Presiden (persen)	-	-	85,88	-	-
Pemilu Legislatif (persen)	-	-	85,51	-	-

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2022

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2017-2021 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan

potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut diupayakan terus meningkat, dimana pada tahun 2017 sebanyak 2 kali, tahun 2018 dan 2019 sebanyak 1 kali, tahun 2020 sebanyak 3 kali dan tahun 2021 sebanyak 7 kali.

Tabel 2.178 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2017 – 2021

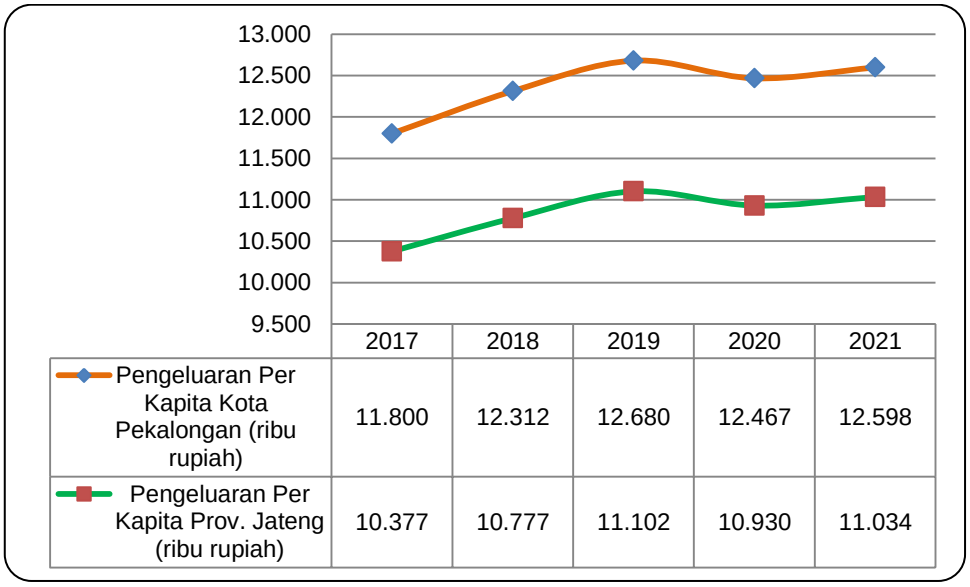
Kegiatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	1	1	3	7

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.



	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	11.800	12.312	12.680	12.467	12.598
Pengeluaran Per Kapita Prov. Jateng (ribu rupiah)	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034

Gambar 2.51 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2022

Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2017-2021. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada 2017 berada di angka Rp.11.800.000, dan di tahun 2018 naik hingga Rp.12.312.000. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp.12.680.000 dan menurun sebesar Rp. 12.467.000 di tahun 2020, kemudian meningkat kembali di angka Rp. 12.598.000 pada tahun 2021. Gambar 2.51 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Kondisi transportasi di Kota Pekalongan menunjukkan jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2017 sampai 2021 jumlahnya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Pada tahun 2020 mengalami perubahan menjadi 0,0013. Kondisi selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.179.

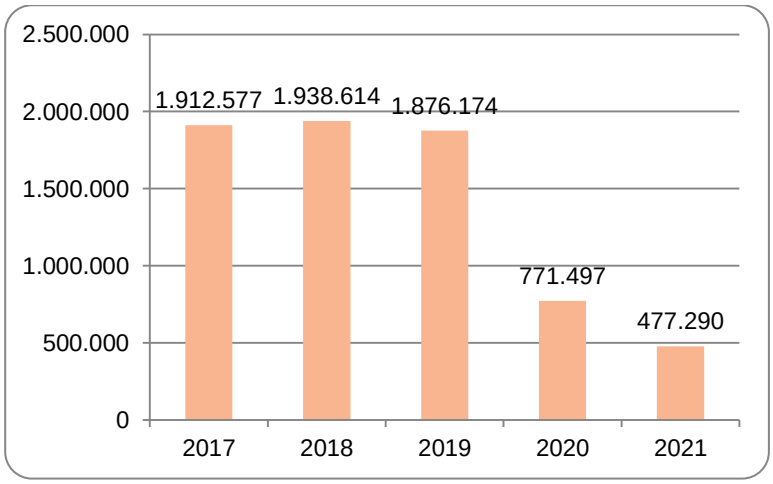
Tabel 2.179 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2017	155,44	147.135	0,0008
2018	155,44	157.332	0,0009
2019	155,44	163.989	0,0009
2020	153,41	173.114	0,0009
2021	153,41	122.590	0,0013

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2022, 2022

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Terminal tipe A terdapat di Kota Pekalongan yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, yaitu dari 1.912.577 penumpang menjadi 1.938.614 penumpang. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.876.174 penumpang. Penurunan jumlah penumpang yang cukup drastis terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 771.497 penumpang dan 477.290 penumpang. Adapun perkembangannya disajikan dalam Gambar 2.52 berikut.

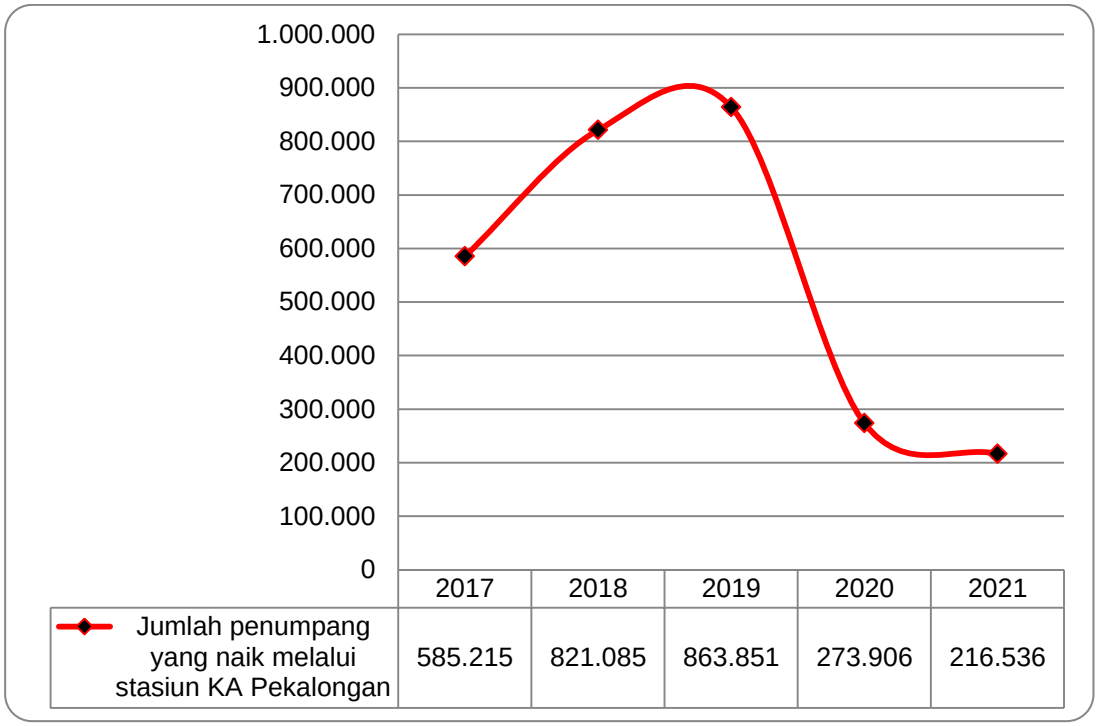


Gambar 2.52 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.



	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penumpang yang naik melalui stasiun KA Pekalongan	585.215	821.085	863.851	273.906	216.536

Gambar 2.53 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

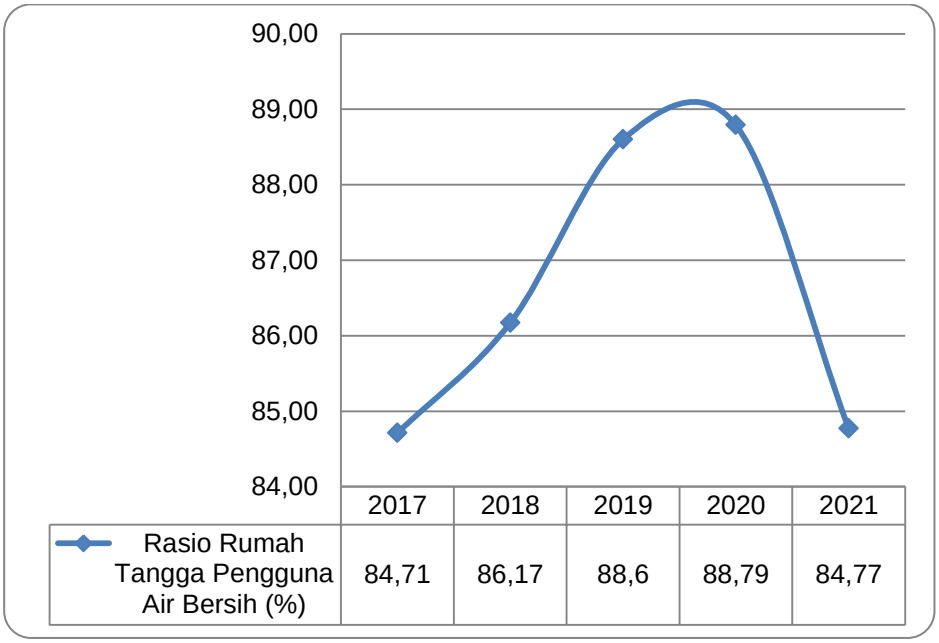
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan sangat fluktuatif setiap tahunnya seperti yang disajikan dalam Gambar 2.53. Tahun 2017 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 585.215 penumpang. Dalam kurun waktu 2017-2018 terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang naik melalui stasiun pada tahun 2018 sebanyak 821.085 penumpang. Namun jumlah penumpang menurun drastis mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 sebanyak 273.906 dan 216.536 penumpang. Hal ini disebabkan adanya larangan bepergian keluar daerah karena adanya pandemi *COVID-19*.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang akan menuju maupun dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun rasio rumah tangga yang terlayani kebutuhan air bersih semakin bertambah, meskipun belum 100 persen terlayani. Pada tahun 2017, rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 84,17 persen. Kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 86,17 persen, tahun 2019 menjadi 88,60 persen, serta di tahun 2020 rasionya menjadi 88,79 persen. Namun kondisi pada akhir tahun 2021, persentase rumah tangga pengguna air bersih menurun menjadi 84,77%. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.54 berikut.



Gambar 2.54 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2022

Di Kota Pekalongan, layanan air bersih disediakan oleh PDAM dan Pamsimas. Pada tahun 2021, jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan PDAM dengan air bawah tanah sebanyak 17.440 SR. Hal tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 22.160 SR dan 2020 sebesar 19.120 SR. Jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan Pamsimas dan sumur di tahun yang sama (Dana Alokasi Khusus) naik menjadi 22.103 SR, mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dengan demikian total SR yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2021 sebanyak 39.543 SR menurun dibanding tahun 2020 yaitu sebanyak 40.783 SR. Dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2021 sebanyak 308.310 jiwa, jika diasumsikan bahwa 1 SR digunakan untuk 5 orang maka total kebutuhan SR untuk seluruh penduduk yaitu sebanyak 61.662 SR. Sehingga persentase sambungan rumah (SR) yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2021 sebesar 64,13 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.180 berikut.

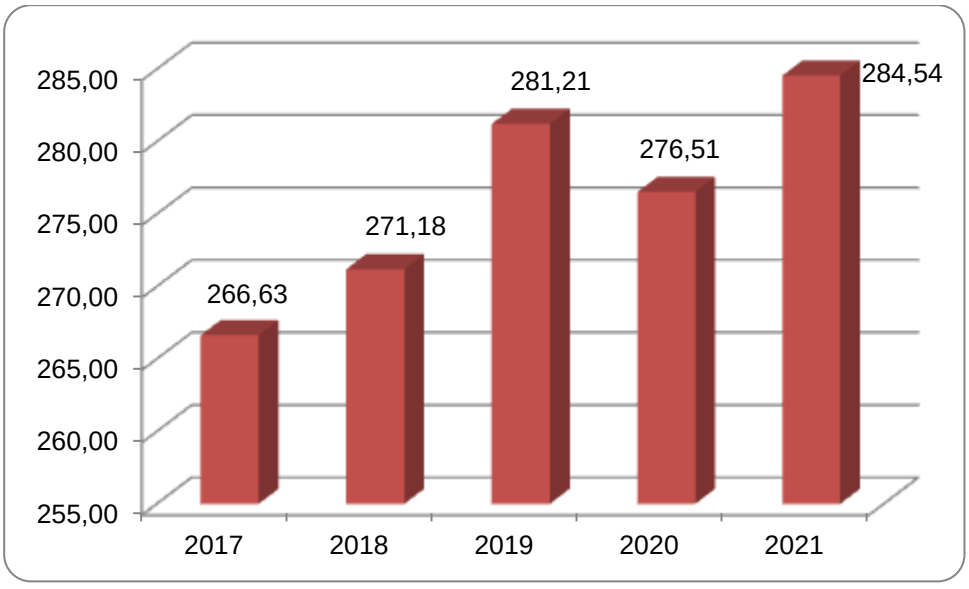
Tabel 2.180 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021

Tahun	SR dari PDAM	SR dari PAMSIMAS dan Sumur	Jumlah SR pengguna air bawah tanah	Jumlah kebutuhan SR	Persentase penggunaan air tanah untuk kebutuhan sambungan rumah
2019	22.160	21.933	44.093	61.419	71,79
2020	19.120	21.663	40.783	61.430	66,39
2021	17.440	22.103	39.543	61.662	64,13

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2022

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama tiga tahun terus meningkat. Pemakaian listrik tahun 2017 sebesar 266,63 MWh, maka pada akhir tahun 2021 sebesar 284,54 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2016-2021.



Gambar 2.55 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

6. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2017-2021 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan PLN pada tahun 2017 sebesar 115,70 persen. Jumlah tersebut terus naik hingga mencapai 121,44 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 101,50 persen. Secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.181 berikut.

Tabel 2.181 Persentase RT yang menggunakan Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	96.121	101,50

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2022

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi tahun 2019 sebesar 75 persen, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2021 jumlah hotel berbintang, baik bintang 1, 2,dan 3 sebanyak 10 (sepuluh) hotel. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel pada tahun 2018 sampai 2019 dan 25 (dua puluh lima) hotel pada tahun 2020 dan 2021. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Hal yang menjadi tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang memadahi salah satunya yakni hotel.

Tabel 2.182 Jumlah dan Tipe Akomodasi
Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Akomodasi	2017	2018	2019	2020	2021
Hotel Berbintang	10	10	10	10	10
Hotel Non Berbintang	18	20	20	25	25

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2022, 2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk : memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2018, telah dibuka layanan perijinan untuk 83 jenis ijin, dimana lama proses perijinan bervariasi antara rentang waktu 2-12 menit. Dengan adanya SOP lamanya proses perijinan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perijinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 18 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.183 berikut.

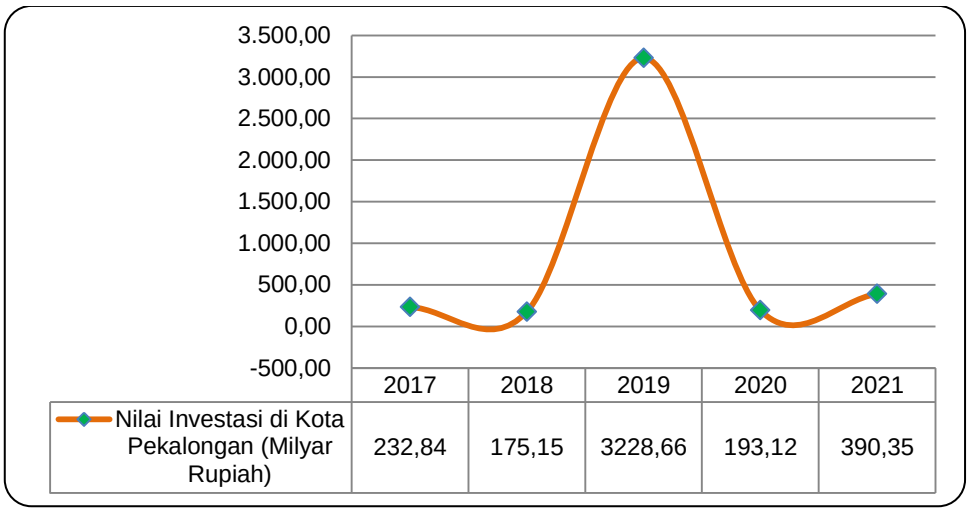
Tabel 2.183 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	12	2011	Pajak Reklame
3	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
4	28	2011	Rumah Pemotongan Hewan Dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
5	10	2011	Pajak Sarang Burung Walet
6	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	20	2012	Perizinan Dan Sertifikat Bidang Kesehatan
8	8	2012	Penanaman Modal
9	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos
10	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
11	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
12	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	1	2018	Izin Usaha Industri
15	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
16	19	2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
17	1	2020	Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040
18	9	2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2022

3. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Dan berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.



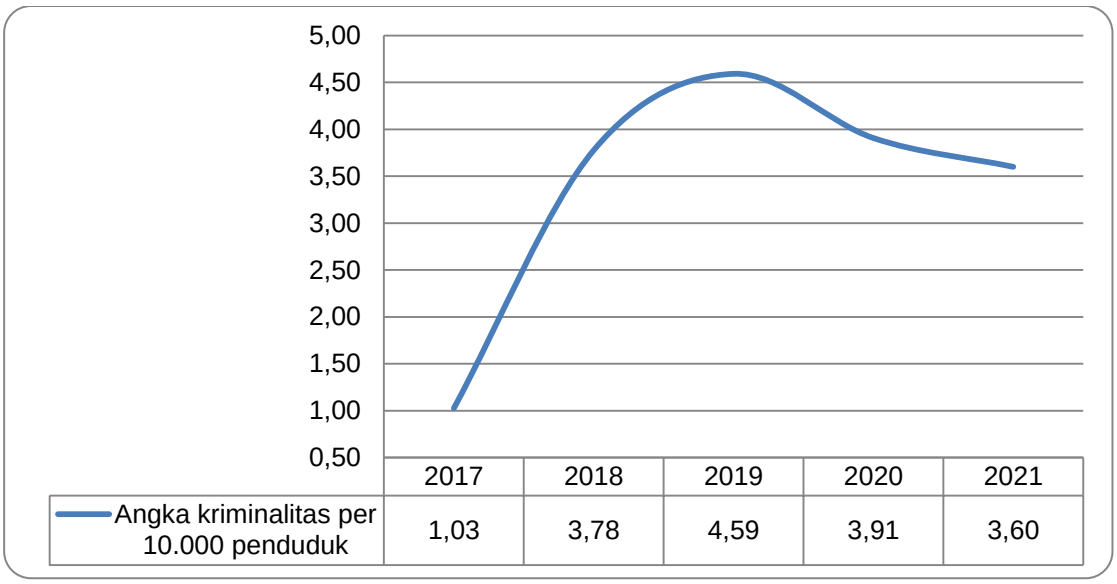
Gambar 2.56 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2022

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, nilai investasi di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi yang cenderung naik. Mulai tahun 2017 di angka Rp.232,84 milyar, turun menjadi Rp.175,15 milyar di tahun 2018. Kemudian melonjak tajam di tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.228,66 milyar. Dari lonjakan tajam di tahun 2019, kemudian menurun drastis menjadi Rp. 193,12 milyar di tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *COVID-19* yang berdampak negatif terhadap semua sektor. Tahun 2021 mulai merangkak naik di angka Rp. 390,35 milyar. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi meskipun masih dalam masa pandemi *COVID-19.*

4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam Gambar 2.57 berikut.



Gambar 2.57 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2022

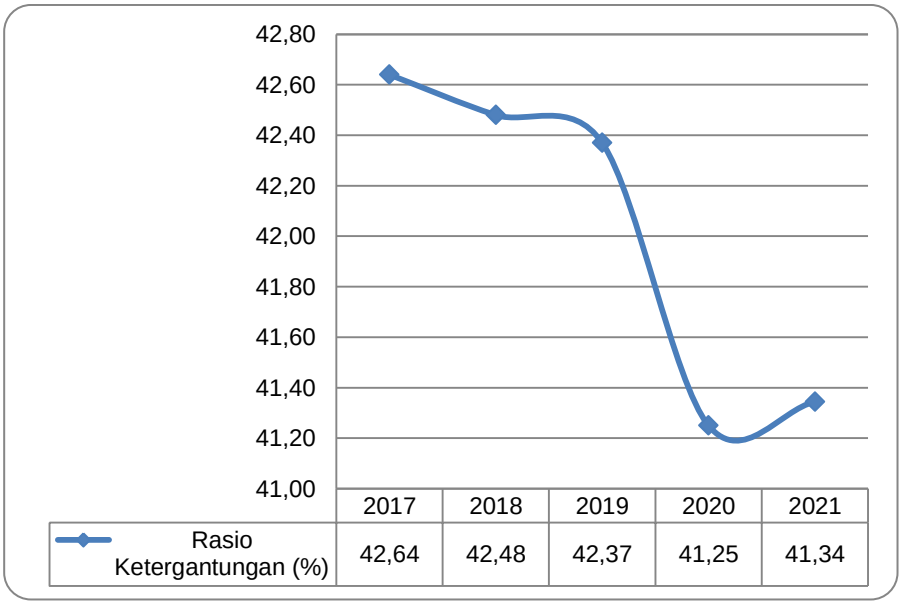
Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2017 – 2020, rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 42,64 dan pada tahun 2020 menjadi 41,25. Namun meningkat di tahun 2021 menjadi 41,34.

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci disajikan dalam Gambar 2.58 berikut.



	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Ketergantungan (%)	42,64	42,48	42,37	41,25	41,34

Gambar 2.58 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2022 (diolah), 2022

2.1.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Yang kemudian menjadi dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

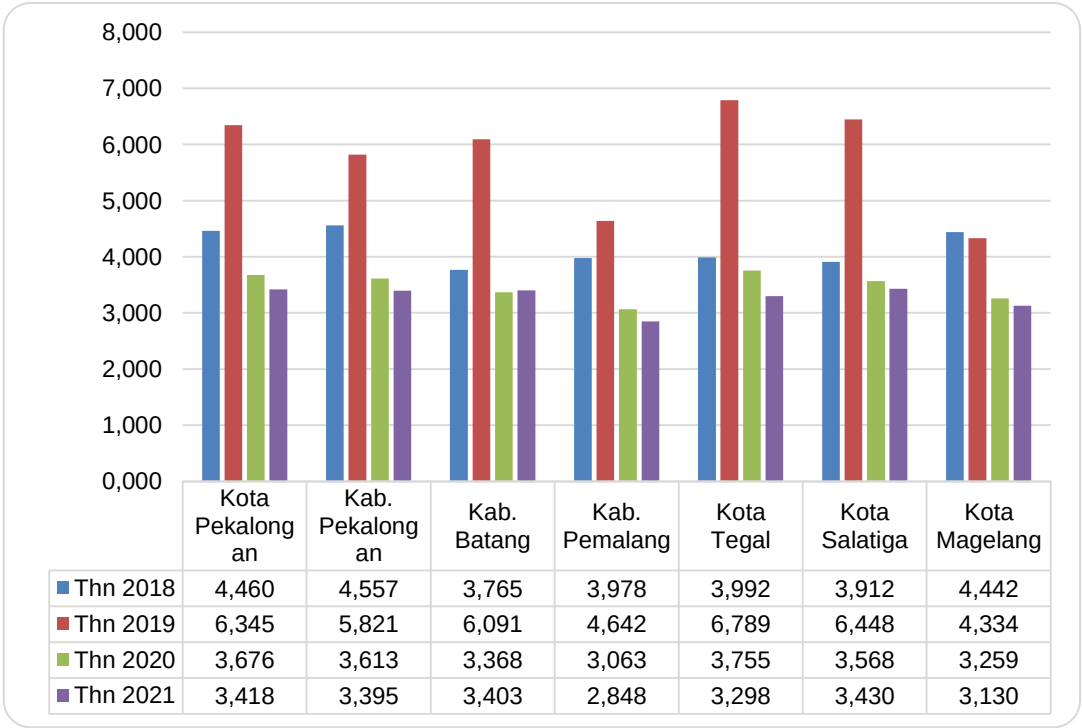
2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan pemetaan ekosistem inovasi melalui pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kota Pekalongan termasuk dalam 10 (sepuluh) kota terbaik se Indonesia, dengan nilai indeks 3.418. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, capaian IDSD Kota Pekalongan di Tahun 2021 termasuk lebih tinggi dibandingkan dengan Kab Pekalongan, Kab Batang, Kab Pemalang.

Tabel 2.184 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2018 -2021

No	Kab/Kota	Nilai Indeks			
		2018	2019	2020	2021
1	Kota Pekalongan	4.46	6.3446	3.6763	3.418
Persandingan dengan Kabupaten sekitar					
2	Kab. Pekalongan	4.557	5.8211	3.6125	3.395
3	Kab. Batang	3.765	6.0909	3.3683	3.403
4	Kab. Pemalang	3.978	4.642	3.063	2.848
Persandingan dengan Kota di Jawa Tengah					
5	Kota Tegal	3.992	6.7893	3.755	3.298
6	Kota Salatiga	3.912	6.4479	3.5682	3.43
7	Kota Magelang	4.442	4.8334	3.2593	3.13

Sumber : idsd.jateng.id (diolah), 2022

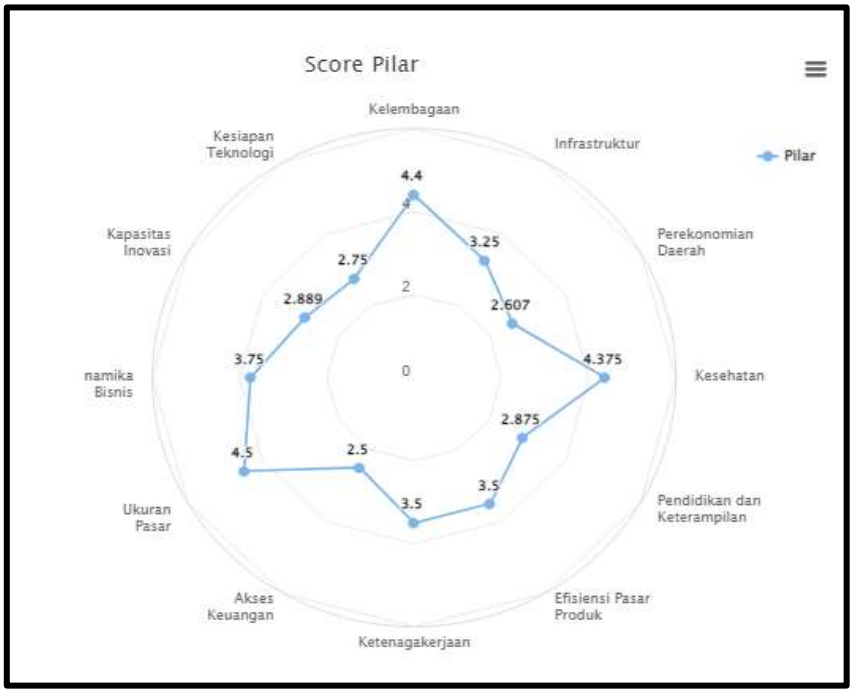


	Kota Pekalongan	Kab. Pekalongan	Kab. Batang	Kab. Pemalang	Kota Tegal	Kota Salatiga	Kota Magelang
Thn 2018	4,460	4,557	3,765	3,978	3,992	3,912	4,442
Thn 2019	6,345	5,821	6,091	4,642	6,789	6,448	4,334
Thn 2020	3,676	3,613	3,368	3,063	3,755	3,568	3,259
Thn 2021	3,418	3,395	3,403	2,848	3,298	3,430	3,130

Gambar 2.59 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2018 -2021

Sumber : idsd.jateng.id (diolah), 2022

Secara lebih rinci, capaian Indeks Daya Saing Daerah berdasarkan skor pilar dalam ekosistem inovasi dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Gambar 2.60 Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi

Sumber : https://indeks-inovasi.brin.go.id, 2022

Berdasarkan capaian diatas, masih terdapat beberapa skor pilar yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan capaian Indeks Daya Saing Daerah, antara lain akses keuangan, perekonomian daerah, kesiapan teknologi, pendidikan dan keterampilan dan kapasitas inovasi.

Disamping itu, berdasarkan tolak ukur kondisi Inovasi Daerah melalui penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri, Kota Pekalongan termasuk kategori Inovatif untuk kategori Kota (Peringkat 53 dari 93 Kota se Indonesia) dengan nilai 44,72 di Tahun 2021.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Inovasi Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah menurut Peraturan Pemerintah dimaksud yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun

radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2020-2022, telah disusun inovasi yang terkait tata kelola pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut :

a. Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis E-Presensi dan E-Kinerja atau SIMANTAP BISA bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. SIMANTAP BISA adalah bentuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi melalui implementasi transformasi SDM Aparatur dan transformasi digital, merupakan inovasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan yang diinisiasi sejak Bulan Januari 2020 dan dilaunching pada tanggal 26 Juni 2021. Aplikasi dibangun dengan melibatkan stakeholder terkait yakni Dinas Kominfo Kota Pekalongan dan BPKAD Kota Pekalongan. Tujuan aplikasi untuk mewujudkan pelayanan publik (internal/PNS) yang mudah, objektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan di dalam pemberian TPP. Pengguna (ASN) dapat mengakses menggunakan komputer maupun *mobile* berbasis android yang dapat diinstal melalui *Googleplay Store*.
b. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa (SIM PBJ) (2020) merupakan inovasi aplikasi pengadaan yang mempunyai peran cukup penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan regulasi/peraturan/ketentuan yang berlaku dimana dokumen pengadaan barang/jasa (kontrak) yang masuk akan diverifikasi dan divalidasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan data/dokumen.
c. Aplikasi e-APBS (Anggaran Penyusunan Belanja Sekolah) (2020) telah menjadi sebuah kebutuhan yang penting bagi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, karena aplikasi e-APBS digunakan untuk mengelola rencana anggaran dan belanja sekolah dengan sumber dana bantuan dari pemerintah untuk operasional sekolah. Aplikasi e-APBS merupakan inovasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan dan efektif.
d. Sistem Database Pendidikan Terintegrasi (2020) adalah salah satu pendorong pengambilan kebijakan terkait Pendidikan berdasarkan data. Database Pendidikan Kota Pekalongan Terintegrasi mengintegrasikan Tiga Database dengan metode Briging System menggunakan Teknologi Web Service, yaitu : Data Pokok Pendidikan, Data Kependudukan dan Data Fakir-Miskin. Database Pendidikan Kota Pekalongan Terintegrasi dirancang sebagai bagian dari Inisiatif “satu data” oleh karenanya dalam pengembangannya memperhatikan tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pendidikan diharapkan tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal, antar OPD/instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Melalui Database Pendidikan Kota Pekalongan Terintegrasi, Dinas Pendidikan bersama Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan dan STMIK Widya Pratama serta didukung penuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan berupaya penuh untuk melakukan pembenahan atas data terkait Pendidikan di Kota Pekalongan.
e. Aplikasi e-UMK (e-Uang Muka Kegiatan) (2021) adalah sebuah inisiatif Bappeda Kota Pekalongan dalam upaya untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing – masing rekening belanja. Aplikasi ini memudahkan bendahara dan bendahara pembantu dalam hal pengadministrasian

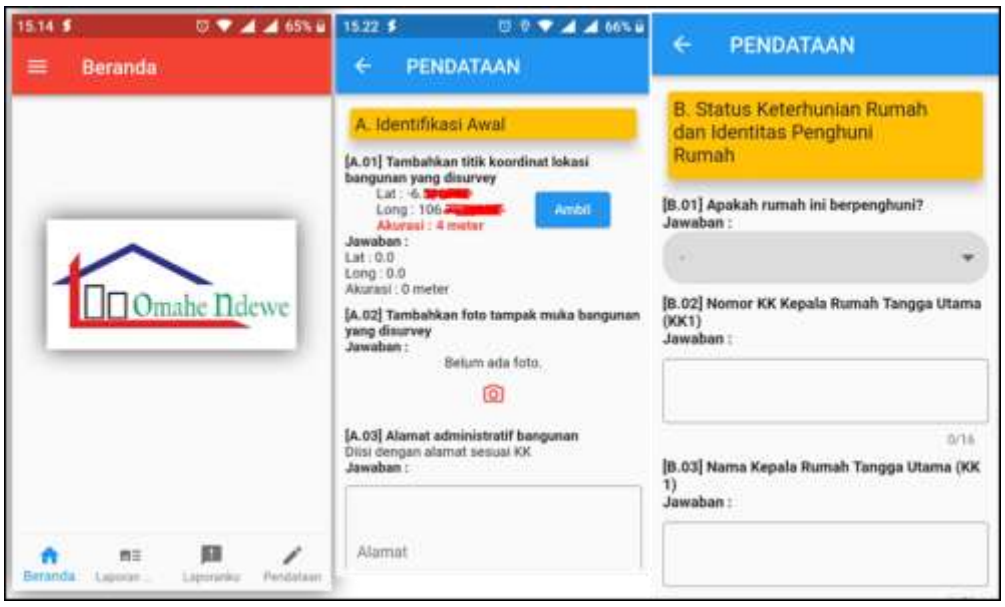
kegiatan, dan memudahkan PPTK dan PA dalam monitoring capaian anggaran kegiatan.

f. Tools Cascading Kinerja (2021) , merupakan aplikasi yang disusun Bappeda untuk membantu merumuskan hierarki kinerja, dari visi, misi, program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja dilakukan dengan menginput data ke dalam aplikasi. Tools ini digunakan oleh Bappeda dan OPD dalam penyusunan Renstra OPD dengan mengkaitkan dengan struktur kinerja dalam RPMD Kota Pekalongan 2021-2026.

g. Aplikasi Peminjaman Ruang Setda (2021), merupakan aplikasi yang disusun Bagian Umum Setda untuk pengelolaan peminjaman ruang di lingkungan Setda sehingga dapat menunjang pelaksanaan koordinasi antar OPD menjadi lebih baik.

h. Aplikasi SISTRAMAS (2021), yakni aplikasi Pelayanan Tramtibumlinmas yang disusun Satpol PP untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi dan sinergi antar stakeholder tramtibumlinmas (Satpol PP, Kasi TRamtib Kecamatan, Kasi Tramtib Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Kader Siaga Tramtib, Linmas Kelurahan, Polsek, Koramil, dll), dimana pelaporan gangguan trantibumlinmas melalui aplikasi sehingga penanganan gangguan dapat lebih cepat dan dapat terdokumentasikan dengan baik.

i. Omahe Ndewe (Sistem Informasi Pengelolaan Identifikasi Data Rumah Kota Pekalongan) (2022), dikembangkan berdasarkan hasil forum Data di tahun 2021. Aplikasi ini dikembangkan untuk penyediaan database infrastruktur pemukiman, namun kemudian berkembang menjadi aplikasi yang mencakup berbagai macam variabel data yaitu data layanan air minum, layanan sanitasi, layanan bencana, rumah tidak layak huni, dan sebagainya Aplikasi ini dibangun dengan mengintegrasikan data PBB yang sudah berbasis spasial dan data SIMPERUM Provinsi Jawa Tengah. “OMAHE NDEWE” akan menyajikan data titik koordinat rumah, memberikan nomor induk rumah, status keterhunian rumah, identitas penghuni rumah, kepemilikan rumah, profil rumah tidak layak huni, data rawan bencana banjir, rob, longsor, puting beliung, layanan air bersih, akses sanitasi, dan pengelolaan sampah rumah tangga.



Gambar 3.61 Aplikasi OMAHE NDEWE

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

j. Klinik SPIP (2022) adalah layanan konsultasi dari Inspektorat kepada OPD di Kota Pekalongan yang membutuhkan informasi terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan didampingi secara intens oleh pejabat/staf dari Inspektorat.

k. Sistem Informasi Nomor Register (sinoreg) (2022) adalah sistem pemberian nomor regulasi produk hukum di kota pekalongan, digunakan oleh internal bagian hukum, sistem ini juga akan bisa melacak proses penyusunan SK, perwal dan perda oleh OPD, sehingga dapat ditelusur status pemrosesan dokumen.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

a. BINAMARGA ACCES (2020), Dalam rangka menjawab isu masalah terkait media informasi tentang pekerjaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan serta mewujudkan kemudahan akses informasi guna meningkatkan pelayanan publik, maka inovasi mengenai publikasi media informasi yang memuat informasi mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan Bina Marga diluncurkan pada Website DPUPR Kota Pekalongan. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pemeliharaan jalan, saluran dan trotoar di area Kota Pekalongan melalui website DPUPR dengan alamat https://binamarga.dpupr.pekalongankota.go.id.

b. Brayan Market Kota Pekalongan (2020) merupakan salah satu inovasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, website tersebut dapat di akses diKomputer dan Mobile. Dalam web tersebut seorang Konsumen bisa mendapatkan beragam macam produk antara Batik, Craft, Kuliner dan lain-lainya serta bisa langsung berhubungan dengan Produsen melalui Whatapps, dengan harapan dapat berdampak pada peningkatan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah, peningkatan daya saing, dan mampu menumbuhkan UMKM menjadi usaha yang berkelanjutan untuk mendukung kemandirian perekonomian daerah.

c. e-Monitoring Pajak Daerah (EMot PakDe) (2020) merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti : tapping box dan sejenisnya. Tujuan eMot PakDe adalah meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan, meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak, mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak, meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak dan meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

d. Layanan Konseling Pendidikan (LAKONDIK) (2020) adalah salah satu inovasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, yang diselenggarakan untuk memberikan layanan untuk membantu pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tujuan pelayanan ini adalah memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan, membangun kesadaran masyarakat tentang pendidikan untuk semua, serta memecahkan berbagai permasalahan dalam proses pendidikan yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Pelayanan ini dilengkapi dengan sumber daya manusia berupa tenaga pegawai sebagai Guru Pendamping Khusus, mitra psikolog, lembaga kesehatan, dan dinas terkait, juga sumber daya fasilitas berupa ruang konseling, ruang baca masyarakat dan ruang laktasi.

e. Sistem ApliKasi Perizinan Online Ringkas & Ekonomis (SAKPORE) yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan sejak tahun 2019 adalah salah satu wujud komitmen pemerintah kota untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada warganya dan juga untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Melalui aplikasi ini, DPMPTSP Kota Pekalongan berusaha memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, ringkas, ekonomis, mudah dan transparan. Aplikasi yang juga terintegrasi dengan website DPMPTSP ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan serta dapat mengetahui status dari perizinan tersebut secara realtime. Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak lagi direpotkan untuk datang ke kantor DPMPTSP hanya untuk mengetahui persyaratan perizinan, status permohonan perizinan yang mereka ajukan dan pengambilan izin yang telah diterbitkan. Semuanya akan bisa dilakukan secara online. Masyarakat cukup membuat akun, mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan dan memantau status permohonannya. Ketika status permohonan telah selesai maka dokumen izin (Surat Keputusan) yang telah diterbitkan akan dikirimkan ke alamat pemohon melalui jasa POS. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pekalongan, DPMPTSP Kota Pekalongan mengembangkan inovasi SAKPORE menjadi new SAKPORE dengan fitur-fitur baru yang bermanfaat seperti: Peta Tata Ruang, Peta Reklame, Survey Online, Notifikasi Whatsapp gateway, terintegrasi dengan SisDMK Kementerian Kesehatan RI, Pengaduan Online danTanda Tangan Elektronik.

f. Lokapasar batik adalah aplikasi hasil kerjasama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) dengan Bank Mandiri (2020). Aplikasi yang berbasis Whatsapp ini merupakan marketplace khusus bagi usaha kecil dan mikro. aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dan mendorong UMKM di Kota Pekalongan agar bisa bangkit dan eksis dalam memasarkan produk usahanya secara online. Pada aplikasi Brayan market memudahkan seluruh UMKM tidak hanya batik untuk promosi produk, namun belum sampai ke transaksi penjualan dalam aplikasi. Sedangkan, untuk aplikasi Lokapasar batik, transaksi penjualan dan pembelian dapat dilakukan dalam satu aplikasi

g. Sistem SIEMON-KIR (Sistem Informasi Elektronik Manajemen Online KIR) (2021) secara online ringkas dan ekonomis merupakan salah satu inovasi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dan Bank Jateng Pekalongan. Tujuan adanya SIEMONKIR tersebut ialah terwujudnya pelayanan publik yang mudah, ringkas, dan ekonomis. Sistem tersebut dapat melalui computer maupun mobile berbasis android yang dapat diinstall melalui google playstore yang sudah dilauncing sejak tanggal 1 Februari 2015. Sistem pembayaran ini dilengkapi banyak situs meliputi ATM Bank Jateng/ Bank Lain, Internet Banking Bank Jateng/Bank Lain, Mobile Banking Bank Jateng/Bank Lain, Mesin EDC, Agen Laku Pandai, Qris Bank Jateng. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan melengkapi infomasi pelayanan ke masyarakat berupa **SMS Gateway** yang merupakan informasi awal kepada wajib uji sebelum masa berlakunya kir habis diinformasikan melalui web berupa SMS Gateway sebanyak 3kali informasi yaitu H-7, H-1 dan Hari H masa berlaku kir habis. Sistem pembayaran aplikasi SIEMON-KIR non tunai ini berkaitan dengan pelayanan web Pengujian Kendaraan Bermotor didalam pelaksanaan uji. Dimana setelah melakukan pendaftaran dan kewajiban pembayaran non tunai baru bisa melakukan uji mekanis. Setelah melakukan **uji mekanis**, hasil yang dinyatakan laik jalan dapat

dirangkum dalam aplikasi penerbitan kartu uji, sertifikat uji dan stiker uji berkala kendaraan bermotor.

h. Wadul Aladin (Wadul Aaf Salahudin) (2021), merupakan layanan pengaduan langsung ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Layanan ini mempermudah masyarakat untuk mengadu ke kepala daerah dalam waktu yang singkat dan pelayanannya telah terintegrasi dan terkoordinasikan dengan OPD.

i. Si BEMBI naik BEMO (2021), RSUD Bendan membuat sebuah inovasi yaitu aplikasi berbasis android BEMO (Bendan Mobile). Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pendaftaran pasien rawat jalan. Aplikasi ini berbasis android yang bisa diinstal melalui Googleplay yang dilauncing tanggal 2 April 2019. Aplikasi ini memiliki fitur antara lain pendaftaran poli spesialis, riwayat berobat, pendaftaran poli eksekutif, jadwal dokter, informasi bed, pendaftaran MCU, rapid/PCR, pengembangan terbaru adanya penambahan menu panggilan darurat yang langsung terhubung ke call center BEMBI (Bendan Emergency Mobile) yaitu merupakan layanan penjemputan pasien gawat darurat oleh tenaga yang berkompeten dimana pasien dijemput dengan ambulance BEMBI, langsung ditangani kegawatan ditempat untuk selanjutnya dibawa ke IGD RSUD Bendan.

j. Tombol Panik Ambulance Rakyat (Panic Button) (2021) merupakan aplikasi berbasis android untuk peningkatan layanan kegawatdaruratan medis dengan menggunakan tombol panik yang keberadaannya merupakan Sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta di Kota Pekalongan

k. Aplikasi Siulan Mas (Sistem Informasi Usulan dan Pengaduan Masyarakat) (2021) merupakan aplikasi pengaduan dan usulan bantuan social, yang mempermudah masyarakat untuk mengadu terkait penerimaan atau tidak diterimanya bantuan social dari tingkat kelurahan. Dengan system ini, akan meringkas birokrasi penanganan pengaduan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Sosial.

l. Layanan APEL JOS (2021) Kegiatan pelayanan KTP Elektronik ‘Apel Jos” (Layanan jemput bola KTP Eleketronik untuk Anak Sekolah/ Pelajar, Jompo dan Orang Sakit/Difabel) ini untuk membantu penduduk yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan KTP Elektronik. Program ini sejalan dengan pelayanan publik yang baik karena adanya sinergi antara instansi pemerintah, dunia pendidikan, kelompok masyarakat dan masyarakat untuk membantu penduduk yang kesulitan mendapatkan KTP Elektronik karena sakit keras, Difabel, jompo dan kesibukan sekolah.

m. Si AaP (2021) merupakan inovasi Siap Antar Pelayanan (Si_aAP) dari Kecamatan Pekalongan Barat. Inovasi ini memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu datang lagi ke kantor Kecamatan untuk mengambil dokumen KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Proposal, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Umum lainnya.

n. Ra Kesel M'laku (ApaRAt KEcamatan SELatan Memberikan LAyanan Antar DoKUmen) (2021), merupakan layanan dari kecamatan Pekalongan Selatan dalam mengantar jemput dokumen administrasi bagi masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan, yang dilengkapi dengan call center atau kontak petugas.

o. Silancar (SI AAP Lacak & Antar) (2022) adalah inovasi pelayanan oleh kecamatan Pekalongan Utara untuk mempermudah layanan adminduk dan non adminduk bagi warga di kecamatan Pekalongan Utara dan memantau progress layanan secara online.

p. SeBaR_in (2021), merupakan inovasi non digital dalam penyampaian informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Pekalongan Barat dan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat selama sepekan.

Penyebarluasan informasi ini sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam tugas-tugas kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan publik.

q. SIMPOKAL (Sistem Manajemen Parkir Online Kota Pekalongan) (2022), merupakan aplikasi inovasi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dan Bank Jateng Pekalongan. Tujuan adanya SIMPOKAL tersebut ialah terwujudnya pelayanan publik yang mudah, ringkas, dan ekonomis. Sistem tersebut dapat melalui komputer maupun mobile banking baik berbasis android maupun apple.

r. E-ticketing Museum Batik (2022) adalah sistem penjualan tiket secara online, menggunakan aplikasi sehingga penjualan tiket museum batik lebih terpantau dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung karena kemudahan membeli tiket.

s. E-TPI (2022) merupakan aplikasi yang dibuat oleh dinas kelautan dan perikanan kota pekalongan bekerjasama dengan Bank Jateng. Dengan aplikasi e-tpi pembayaran retribusi kapal dan peserta lelang di TPI kota Pekalongan menjadi lebih teratur dan lebih tercatat, sehingga tidak hanya mempermudah pembayaran tapi juga meminimalkan penyalahgunaan

t. Oops Mami (Omah Olah Pilah Sampah MAndiri dan berekonoMi) (2021), inovasi pengolahan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, dimana proses *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* dilakukan dengan mesin pemilah sampah untuk memilah sampah yang berasal dari masyarakat, dimana sampah plastik bisa terpisah sendiri untuk dihancurkan menjadi bubur sampah.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi daerah lainnya merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi dalam konteks ini adalah inovasi selain tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kurun waktu 2020-2022 (sedang berjalan), inovasi daerah lainnya antara lain meliputi :

a. Inovasi pada urusan pendidikan

1) BRAYAN PINTER (Pembelajaran Jarak Jauh) (2020) merupakan inovasi pembelajaran jarak jauh selama pandemi, kerjasama antara guru sebagai pengajar dengan media TV dan Radio untuk memberikan pelajaran jarak jauh yang terstruktur dan terjadwal dengan baik setiap hari, pada semua tingkat pendidikan.

2) Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui Pembuatan Media Komik Digital Bagi Siswa Kelas 2 SD di Kota Pekalongan (2021) , merupakan inovasi yang dilakukan guru sekolah dasar, dibawah pembinaan Dinas Pendidikan.

3) Belajar Numerasi Perkalian dengan Pohon Perkalian dan Game Quizziz Pada Siswa Kelas III SD di Kota Pekalongan, (2021) merupakan inovasi non digital yang dilakukan guru sekolah dasar, dibawah pembinaan Dinas Pendidikan.

4) PIT CILIK (Pembelajaran Integratif Terpadu Cinta Literasi untuk Kanak-kanak) (2021) merupakan merupakan inovasi non digital yang dilakukan guru taman kanak-kanak, dibawah pembinaan Dinas Pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Dasar Anak Usia Dini

b. Inovasi pada urusan kesehatan

1) Saber AKI-AKB (Sapu Bersih Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) (2020), merupakan inovasi dari Dinas Kesehatan dengan melakukan integrasi kegiatan pengurangan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, yang melibatkan stakeholder yang cukup luas, antara lain dokter anak, dokter kandungan, kader puskesmas, pkk, dll, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat.

2) Inovasi kebijakan kesehatan di puskesmas sebagai faskes tingkat pertama di tahun 2022.

Tabel 2.185 Inovasi Daerah Bidang Kesehatan

No.	Nama Inovasi	Puskesmas
1	GERBEG CHINTA (Gerakan Bersama Cegah Hipertensi Kita)	Puskesmas Kramatsari
2	JAGA SIKON	Puskesmas Kusuma Bangsa
3	Jaga Aurat	Puskesmas Kusuma Bangsa
4	JAGA IMUN BRO	Puskesmas Kusuma Bangsa
5	Ber-KB Yok	Puskesmas Noyontaan
6	Jaring si TB (Jaring Pasien TBC)	Puskesmas Noyontaan
7	Suling Mas Darseh	Puskesmas Pekalongan Selatan
8	Lopis (SIM Kesehatan Terintegrasi)	Puskesmas Pekalongan Selatan
9	MINUM JUS (Monitoring INformasi pertUMbuhan Janin melalui USg	Puskesmas Sokorejo
10	ADU TIKUS (pelayanan terpADU TIbi dan KUSta)	Puskesmas Sokorejo
11	AJIB RESTI (Th 2022)	Puskesmas Tirto
12	GEMESI (th 2022)	Puskesmas Tirto
13	PUSDALU (Penambahan pelayanan KIA/KB, Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut) th 2022	Puskesmas Tirto
14	Deteksi Pasien TB	Puskesmas Tondano
15	Ber-KB Yok	Puskesmas Noyontaan
16	Jaring si TB	Puskesmas Noyontaan
17	Pasung Jiwa	Puskesmas Dukuh
18	Grup WA ibu hamil Permata Hati	Puskesmas Buaran
19	Si Bawal Hati (Siaga Banjir Kawal Ibu Hamil Resti)	Puskesmas Kramatsari
20	Remaja STAR (Remaja Sehat Tanpa Asap Rokok)	Puskesmas Kramatsari
21	Permata Hati	Puskesmas Buaran
22	PJ RW Satu Hati (PJ RW Bersama Pantau Bumil Resti)	Puskesmas Bendan
23	Si Jempolan Bendan (Siap MEndaftarkan Kartu BPJS Bati Ibu yang Melahirkan di Peskesmas Bendan)	Puskesmas Bendan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

c. Inovasi pada urusan perumahan dan permukiman

1) REPARASI (RElokasi tanPA ReAkSI penolakan) (2021) merupakan inovasi kebijakan atau non digital dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman, yakni merelokasi tanpa reaksi penolakan karena ada keterlibatan dan dukungan kuat dari stakeholder terkait, masyarakat yang tidak kehilangan mata pencahariannya walaupun terelokasi.

d. Inovasi pada urusan kelautan dan perikanan

1) Rekom BBM (2022) merupakan inovasi yang mempermudah dan mempercepat nelayan untuk mendapat pelayanan mendapatkan surat Rekom Pembelian Jenis BBM Tertentu dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa dipungut biaya (gratis)

e. Inovasi pada urusan pertanian

1) Esa Pertama Kuljar (2020) merupakan inovasi kebijakan untuk penerapan kultur jaringan di Kota Pekalongan untuk mendapatkan bibit unggul dan berkualitas. Inovasi ini dikembangkan di Dinas Pertanian dan Pangan. .

Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga harus bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2021, terdapat 5 (lima) pemenang Krenova sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.186 berikut.

Tabel 2.186 Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Abdul Rozak, dkk.	Inovasi ini merupakan IPAL dengan konstruksi sederhana yang menggunakan proses elektrolisa untuk mengikat partikel berat yang ada pada air limbah, dan juga dengan penambahan catalis garam dapur (NaCl) sebagai elektrolitnya. Dalam proses elektrolisa ini alat menggunakan electrode carbon dan menambahkan katalis Calsium Hipoklorit (Ca(ClO)2) dan juga Aluminium Sulfat (AL2(SO4)3). Selain itu, alat menggunakan penggerak motor listrik 0.5 PK sebagai pengaduk dan arus 40 A dan tegangan 12V untuk proses elektrolisanya. Konstruksi IPAL yang dikembangkan ini memerlukan biaya awal yang relatif terjangkau dan biaya operasional yang sangat murah. Sehingga diharapkan para pengusaha batik khususnya di Pekalongan mau menggunakan alat ini.

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
2.	Sistem Monitoring dan Pengendalian Peringatan Dini Banjir Menggunakan Microcontroller Arduino berbasis IoT dan Aplikasi Jogo Pompo	Nurul Huda, dkk.	Produk ini adalah aplikasi dengan nama Jogo Pompo yang memiliki ekosistem hardware dan software yang terintegrasi dengan website dan mobile. Dengan sistem ini kita dapat mengetahui level ketinggian air di sungai, mendapatkan peringatan hujan turun, melihat keadaan air melalui CCTV, mendapatkan peringatan lebih awal sebelum terjadinya bencana banjir, dapat menghidupkan dan mematikan pompa air pada stasiun pompa baik manual maupun otomatis dengan sensor, serta dapat menghidupkan peringatan alarm secara otomatis ketika ketinggian air telah mencapai batas tertentu dan semua fitur tersebut dapat diakses secara real time.
3.	Balsem Aromaterapi Berbahan Baku Lokal (Ekstrak Lilin Lebah Liar dan Minyak Dilem) sebagai Sediaan Herbal untuk Keluhan Penyakit Kulit Masyarakat Tropis	M. Bachtiar Rifai	Sarang lebah liar yang merupakan bahan utama produk inovasi ini adalah sumber daya alam Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal ekstrak sarang lebah memiliki banyak manfaat di antaranya sebagai anti bakteri, antri mikroba, anti jamur, dan cocok untuk mengobat penyakit kulit masyarakat tropis. Dengan diformulasikan dengan minyak dilem dan bahan alami lain seperti minyak zaitun, minyak kepala, dan parfum menjadikan inovasi ini sebagai balsem herbal yang bermanfaat bagi keluhan kulit masyarakat Indonesia sebagai masyarakat tropis pada umumnya dan masyarakat Kota Pekalongan sebagai masyarakat pesisir pada khususnya.
4.	Wood & Craft	M. Dhiya Ulhaq	Inovasi ini memanfaatkan produk limbah kayu jati yang memiliki nilai ekonomi rendah. Dengan sentuhan kreativitas memanfaatkan resin dan cat, menjadikan produk limbah kayu ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hasil kreativitas berupa talenan/tray, bingkai, meja, hiasan dinding, dan sebagainya. Produk sebagian besar diekspor ke mancanegara di antaranya Korea Selatan, Jepang, Rusia, hingga Amerika.

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
5.	"Desa Desain: Wadah Simbiosis Mutualisme Calon Desainer Grafis dengan UMKM Lokal Kota Pekalongan, Menuju Internasional	M. Alan Qoshdana, dkk.	Inovasi ini berusaha menjadi hub atau penguhung antara pelaku usaha kreatif di bidang desain dengan pengguna dalam hal ini UMKM. Tak dapat dipungkiri di era digital seperti sekarang ini kebutuhan akan packaging yang menarik semakin dikedepankan. Banyak UMKM yang semakin menyadari pentingnya sebuah brand dan logo untuk menunjang pemasaran produknya. Inovasi ini hadir sebagai creative hub yang menjembatani UMKM dengan para desainer baik pemula maupun desainer profesional.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Program Studi Diluar Kampus Utama Politeknik Negeri Jakarta (PSDKU PNJ) dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel 2.187 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	Universitas Pekalongan	September 2020			-	
2.	STMIK Widya Pratama	Oktober 2020			-	
3.	Akbid Harapan Ibu	November 2021	9	-	-	9
4.	PSDKU PNJ	Oktober 2021	-	-	-	-
5.	IAIN Pekalongan	Desember 2020				

Sumber : Berbagai sumber (diolah), 2021

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.188 berikut.

Tabel 2.188 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STIMIK Widya Pratama	Tidak Ada
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber : Berbagai sumber (diolah), 2022

2.2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2021

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2023 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan IV tahun 2021.

2.2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2021

Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD tahun 2021 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari 3 kategori, yaitu tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 di tahun 2021 dari 111 indikator, sebanyak :

- 45 indikator tercapai (40,54 persen),
- 62 indikator tidak tercapai (55,86 persen), dan
- 4 indikator belum tersedia data (6,60 persen).

Tabel 2.189 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen Capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	IPM	Indeks	76,90	71,53	74,98	76,90	75,40	75,40	98,05	Tidak Tercapai
2	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,34	0,31	0,34	n/a	n/a	n/a	BPS tidak melakukan penghitungan di tahun 2021
3	Inflasi	Persen	3 ± 1	3,46	2,36	3 ± 1	1,53	1,53	< target	Tercapai
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00	5,36	-1,87	1,86–1,97	3,59	3,59	59,83	Tidak Tercapai
5	Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	Persen	5,10	3,99	-0,48	1,86–1,97	2,38	2,38	46,67	Tidak Tercapai
6	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	5,80	3,62	-4,37	1,86–1,97	5,05	5,05	87,01	Tidak Tercapai
7	Harapan Lama Sekolah (expected Years Of Schooling)	Tahun	13,21	11,93	12,84	13,21	12,85	12,85	97,27	Tidak Tercapai
8	Angka Kemiskinan	Persen	5,14	8,02	7,17	5,14	7,59	7,59	67,72	Tidak Tercapai
9	Konflik Sosial	kasus	-	34,00	1,00	0,00	3,00	3,00	< target	Tidak Tercapai
10	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	99,00	-	96,99	99,00	94,06	94,06	95,01	Tidak Tercapai
11	Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	Persen	60,00	-	48,64	60,00	54,39	54,39	90,65	Tidak Tercapai
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,41	74,09	74,38	74,43	74,44	74,44	100,05	Tercapai
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,50	5,42	7,02	6,84	6,89	6,89	50,80	Tidak Tercapai
14	Persentase Penurunan PMKS	Persen	41,68	-	52,56	10,64	22,24	22,24	53,35	Tidak Tercapai
15	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	Persen	9,04	42,43	38,23	33,11	37,27	37,27	24,25	Tidak Tercapai
16	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	0,00	-	0,21	0,00	0,15	0,15	< target	Tidak Tercapai
17	Persentase penurunan kasus konflik social	Persen	20,00	-	0,00	20,00	-200,00	-200,00	-10,00	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen Capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter	Persen	65,00	-	100,00	65,00	100,00	100,00	153,85	Tercapai
19	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20	persentase peningkatan penyelenggaraan event	Persen	100,00	16,00	80,65	100,00	90,32	90,32	90,32	Tidak Tercapai
Aspek Pelayanan Umum										
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD/TK	Persen	70,00	-	60,28	70,00	58,54	58,54	83,63	Tidak Tercapai
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang DIKDAS	Persen	100,00	-	102,65	100,00	100,25	100,25	100,25	Tercapai
3	Persentase Penyelenggaraan PAUD Berakreditasi A	Persen	5,50	-	9,09	5,50	34,23	34,23	622,44	Tercapai
4	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berakreditasi A	Persen	85,00	-	69,57	85,00	66,49	66,49	78,22	Tidak Tercapai
5	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Persen	30,00	-	100,00	30,00	100,00	100,00	333,33	Tercapai
6	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Angka Kenakalan Pelajar	per 100 Siswa	2,00	-	n/a	2,00	n/a	n/a	n/a	Tidak Tersedia Data
8	AKI	Persen	102,00	-	152,41	102,00	188,23	188,23	54,19	Tidak Tercapai
9	AKB	Persen	9,60	-	8,81	9,60	8,90	8,90	107,89	Tercapai
10	AKABA	Persen	12,25	12,50	10,84	12,25	10,27	10,27	119,32	Tercapai
11	Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit	Persen	71,70	-	107,62	71,70	102,53	102,53	143,00	Tercapai
12	BOR (Bed Occupation Rate)	‰	80,00	-	57,66	80,00	69,26	69,26	86,58	Tidak Tercapai
13	NDR (Net Death Rate)	‰	≤ 20/1000 pasien	-	32,67	≤ 20/1000 pasien	25,37	25,37	78,83	Tidak Tercapai
14	GDR (Gross Death Rate)	Persen	≤ 40/1000 pasien	-	54,57	≤ 40/1000 pasien	54,62	54,62	73,23	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen Capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ALOS	hari	6-9	-	4,14	6-9	3,70	3,70	162,16	Tercapai
16	Ketersediaan Sarpras Pengendali Banjir dan Rob	Persen	43 unit	-	38,00	100,00	100,00	43,00	100,00	Tercapai
17	Persentase kawasan strategis yang tertata (Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung Arab, Batas Kota, Pati Unus)	Persen	100,00	14,29	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
18	Persentase ketersediaan drainase lingkungan	Persen	47,46	-	30,14	47,46	30,79	30,79	64,89	Tidak Tercapai
19	Rasio akses air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	95,99	-	88,79	95,99	84,77	84,77	88,31	Tidak Tercapai
20	Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Persen	97,33	-	99,32	97,33	99,32	99,32	102,04	Tercapai
21	Cakupan jalan lingkungan dalam kondisi mantap	Persen	87,75	-	86,86	87,75	90,89	90,89	103,57	Tercapai
22	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	98,74	-	97,30	98,74	97,83	97,83	99,07	Tidak Tercapai
23	Berkurangnya pelanggaran perda	kasus	500,00	-	1782,00	500,00	3586,00	3586,00	13,94	Tidak Tercapai
24	Waktu respon penanganan kebakaran	menit	15,00	-	15,00	15,00	11,10	11,10	135,10	Tercapai
25	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	80,00	-	31,95	80,00	11,77	11,77	14,71	Tidak Tercapai
26	Persentase potensi kerawanan sosial yang dibina	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27	Presentase tingkat partisipasi politik masyarakat	Persen	tingkat partisipasi mengikuti target KPU Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan Pilgub, pilpres, dan pilwalkot	tingkat partisipasi pemilu pada pilwalkot, pilgub, rata2 pilpres dan pilleg pada periode sblmnya	79,35	77,50	79,35	79,35	102,39	Tercapai
28	Persentase PMKS Tertangani	Persen	41,68	-	47,44	6,95	11,69	11,69	28,04	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen Capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,64	-	66,45	69,64	75,77	75,77	108,80	Tercapai
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	64,58	-	58.29	64,58	57,87	57,87	89,61	Tidak Tercapai
31	Predikat Kota Layak Anak	pratama	pratama	-	madya	pratama	Madya	Madya	> target	Tercapai
32	Konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan	skor	92,50	-	83,00	92,50	81,7	81,7	88,32	Tidak tercapai
33	Peningkatan produksi tanaman pangan kg (% per tahun)	Persen	3,00	-	11,54	3,00	-7,92	-263,97	-263,97	Tidak tercapai
34	Indeks Kualitas Air	indeks	43,48	-	35,33	43,48	13,29	13,29	30,55	Tidak Tercapai
35	Indeks kualitas Udara	indeks	99,29	-	79,96	99,29	32,38	32,38	32,61	Tidak Tercapai
36	Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	23,90	-	23,60	23,90	5,17	5,17	21,62	Tidak Tercapai
37	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	93,43	-	76,07	93,43	73,75	73,75	78,93	Tidak Tercapai
38	Tertib hukum lingkungan	Persen	30,00	-	25,17	30,00	20,00	20,00	66,67	Tidak Tercapai
39	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	87,00	-	81,39	87,00	82,37	82,37	94,68	Tidak Tercapai
40	Persentase Swadaya Masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10,00	-	25,27	10,00	21,05	21,05	210,46	Tercapai
41	Persentase akseptor KB	Persen	66,00	-	69,02	66,00	68,37	68,37	103,59	Tercapai
42	Kapasitas Jalan Perkotaan (satuan mobil penumpang per jam)		37.150	-	39.992,36	31.750	39992,00	39992,00	107,65	Tercapai
43	Skor Nilai dalam penghargaan WTN	skor	> 85	-	> 85	> 85	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
44	Persentase teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	34,78	34,78	34,78	Tidak Tercapai
45	cakupan komunitas yang berdaya dan memanfaatkan teknologi informasi	kelompok	30,00	-	23,00	30,00	31,00	31,00	103,33	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen Capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Cakupan OPD dengan nilai KIP Kategori "Cukup Informatif/ Baik".	Persen	52,63	-	93,55	52,63	83,78	83,78	159,19	Tercapai
47	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	83,33	83,33	83,33	Tidak Tercapai
48	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	Rp Trilyun	9,43	-	7,22	9,43	7,22	7,22	76,54	Tidak Tercapai
49	Persentase UMKM menerima KUP/ KUR	Persen	60,27	-	69,82	60,27	42,87	42,87	71,13	Tidak Tercapai
50	Persentase capaian target investasi	Persen	1,95 triliun	-	5,15	100,00	0,29	0,29	14,63	Tidak Tercapai
51	Persentase ketersediaan sarana budaya	Persen	2,69	-	2,47	2,69	1,71	1,71	63,55	Tidak Tercapai
52	Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	125 kel di thn 2021	83 kel di 2015	59,00	100,00	47,20	47,20	37,76	Tidak Tercapai
53	Kenaikan kunjungan Perpustakaan	Persen	2,00	-	-46,79	2,00	23,21	23,21	1160,58	Tercapai
54	Persentase OPD+Kelurahan yang tertib administrasi kearsipan	Persen	36,36	-	35,38	36,36	36,92	36,92	101,54	Tercapai
55	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,42	-	1,04	1,42	1,37	1,37	96,81	Tidak Tercapai
56	Prestasi olahraga tingkat provinsi (peringkat secara umum semua cabor)	Jumlah	31,00	-	0,00	31,00	4,00	4,00	12,90	Tidak Tercapai
57	Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5,5 Milyar	Persen	5.5 M	4,2 M di tahun 2015	5,30	100,00	4,35	4,35	78,18	Tidak Tercapai
58	Kunjungan wisata per tahun	orang	550.000,00	-	281.858,00	550.000	316.440,00	316.440,00	57,53	Tidak Tercapai
59	PeningkatanProduksiPangan Hewani kg (% per tahun)	Persen	5,00	-	-35,98	5,00	-35,40	-35,40	-708,09	Tidak Tercapai
60	Pertumbuhan IKM Batik	IKM	800,00	-	790,00	800,00	800,00	800,00	100,00	Tercapai
61	Persentase capaian target 1 pasar sesuaikriteria SNI	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
62	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	97,33	97,33	97,33	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen Capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
64	Persentase peningkatan PAD	Persen	10,00	-	50,66	10,00	34,67	34,67	346,65	Tercapai
65	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Indeks Profesionalitas Pegawai minimal 80	Persen	100,00	-	n/a	100,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
66	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Persen	50,00	-	80,00	50,00	80,00	80,00	160,00	Tercapai
67	Kategori evaluasi AKIP	Grade	BB	C	BB	BB	BB	BB	-	Tercapai
68	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Skor	3,50	-	3,02	3,10	2,81	2,81	80,34	Tidak Tercapai
69	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	Tercapai
70	Persentase PD dengan IKM Baik	Persen	100,00	N/A	95,38	83,34	95,38	95,38	95,38	Tidak Tercapai
71	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori Baik (Informatif)	Persen	100,00	-	38,71	100,00	64,52	64,52	64,52	Tidak Tercapai
72	Efektivitas Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan	Persen	98,75	-	99,37	98,75	100,00	100,00	101,27	Tercapai
73	Level Kapabiltas APIP	Kategori	4 DC	-	3,00	4 DC	3,00	3,00	75,00	Tidak Tercapai
74	Tingkat implementasi SPIP Hasil Self Assesment	Skor	4,00	-	3,50	4,00	2,81	2,81	70,30	Tidak Tercapai
75	Persentase OPD yang memenuhi kriteria WBK	Persen	64,52	-	41,94	64,52	35,48	64,52	100,00	Tercapai
76	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Aspek Daya Saing										
1	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp Milyar	183,33	-	176,84	183,33	145,06	145,06	79,12	Tidak Tercapai
2	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp Milyar	24,36	-	30,78	24,36	29,23	29,23	120,00	Tercapai
3	nilai ekspor perdagangan (Juta US $)	Juta US$	19,58	-	25,42	19,58	30,26	30,26	154,55	Tercapai
4	Persentase penurunan Luas Genangan	Persen	78,70	-	-63,67	2,85	8,60	8,60	10,93	Tidak Tercapai
5	Persentase lingkungan permukiman yang berkualitas	Persen	100,00	-	99,79	100,00	99,85	99,85	99,85	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen Capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan	Persen	100,00	94,94	97,00	100,00	97,00	97,00	97,00	Tidak Tercapai
7	Persentase pemenuhan ruang publik yang ramah lingkungan	Persen	100,00	-	81,82	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap	Persen	78,48	-	80,03	78,48	80,58	80,58	102,68	Tercapai
9	Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)	Indeks	0,73	0,87	0,36	0,73	0,49	0,49	148,98	Tercapai
10	Persentase pemenuhan sarana prasrana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	Persen	100,00	-	82,86	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
11	Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan	Persen	93,63	-	90,74	93,63	85,80	85,80	91,64	Tidak Tercapai
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	52,76	-	50,84	50,85	54,31	54,31	106,80	Tercapai
13	Persentase sekolah menuju Level 4 Standar Nasional Pendidikan	Persen	54,00	-	n/a	54,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	86,00	-	50,80	61,00	48,88	48,88	56,84	Tidak Tercapai
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,00	70,88	68,91	85,00	69,66	69,66	81,95	Tidak Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2021

2.2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 2.190 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
1	Angka Partisipasi Kesetaraan	Persen	45,00	-	81,78	45,00	6,98	6,98	15,52	Tidak Tercapai
2	Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik	Persen	62,00	-	50,47	62,00	46,87	46,87	75,60	Tidak Tercapai
3	Rasio Kondisi sarana dan prasarana layak pakai	Persen	90,00	-	99,71	90,00	95,89	95,89	106,55	Tercapai
4	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	Persen	30,00	-	100,00	30,00	100,00	100,00	333,33	Tercapai

Penjelasan pada 1 (satu) indikator yang tidak tercapai statusnya terhadap capaian akhir RPJMD di tahun 2021 :

1. Realisasi angka partisipasi kesetaraan belum mencapai target disebabkan pada tahun 2021 masih dalam masa pandemi covid 19 sehingga proses pembelajaran tatap muka tidak bisa diselenggarakan secara maksimal. Hal tersebut berakibat menurunkan minat calon peserta didik untuk mendaftar apalagi sebagian besar diantaranya sudah bekerja atau berkeluarga.
2. Dari 3292 pendidik jenjang TK, SD dan SMP terdapat 1543 pendidik yang bersertifikat profesi. Hal ini dikarenakan :

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
• Guru / pendidik bersertifikat profesi pensiun atau meninggal dunia pada tahun 2021; • Pada tahun 2021 terdapat penambahan CPNS guru / pendidik namun belum memiliki sertifikat profesi. • Tidak semua guru / pendidik lulus pre test yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai syarat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan • Pada tahun 2020 dan 2021 tidak diadakan pre test oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 2.191 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
1	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yg memenuhi standar	Persen	95,00	-	89,71	95,00	96,88	96,88	101,97	Tercapai
2	Persentase perawat yang bersertifikasi BTCLS (basic trauma cardlac life saving) dan bidan yang bersertifikasi PPGDON (penanganan penderita gawat darurat obstetric dan neonatus)	Persen	100,00	-	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Cakupan Kelurahan siaga aktif strata mandiri	Persen	25,93	-	-	25,93	44,44	44,44	171,38	Tercapai
4	Cakupan Rumah Tangga Sehat	Persen	98,00	-	-	98,00	95,75	95,75	97,70	Tidak Tercapai
5	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persen	98,00	-	-	98,00	106,28	106,28	108,44	Tercapai
Pada urusan kesehatan ini, 1 dari 5 Indikator capaian tidak tercapai yaitu cakupan rumah tangga sehat, dikarenakan : 1. ada beberapa indikator yang digunakan dalam penentuan rumah tangga sehat nilainya di bawah 75% seperti indikator ASI Eksklusif, kebiasaan merokok dan aktifitas fisik.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel 2.192 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol	Persen	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase sarpas pengendali banjir dalam kondisi baik	Persen	94,74	n/a	90,00	94,74	91,67	91,67	96,76	Tidak Tercapai
3	Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	Persen	16.286 unit	n/a	15.125	90,00	2,18	2,18	92,87	Tidak Tercapai
4	Fasilitasi pembangunan bangunan gedung	Persen	100	-	n/a	100,00	114,29	114,29	114,29	Tercapai
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	70,14	-	n/a	65,02	69,41	69,41	98,95	Tidak Tercapai
6	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persen	100,00	-	n/a	100,00	98,98	98,98	98,98	Tidak Tercapai
7	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persen	100,00	-	n/a	100,00	50,00	50,00	50,00	Tidak Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat 5 indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD : 1. Persentase sarpras pengendali banjir telah tercapai sebesar 91,67% pada tahun 2021 Capaian ini diperoleh dari jumlah sarpras dalam kondisi baik yang berjumlah 22 unit dibandingkan jumlah total sarpras pada tahun 2021 yang berjumlah 24 unit. Sarpras ini merupakan jumlah stasiun pompa skala wilayah yang terbangun, sedangkan kondisi rusak ada dilokasi Widoro dan Kandang Panjang. Indikator persentase sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik tidak tercapai karena Keberadaan stasiun pompa widoro dan kandang panjang yang sudah tidak berfungsi dengan adanya pompa tanggul BBWS akan mempengaruhi indikator output. 2. Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB tidak tercapai disebabkan karena perekonomian yang menurun mengikuti trend perekonomian dunia yang juga turun karena adanya pandemik, Selain itu juga dengan diterapkan ketentuan teknis IMB (GSB dll) secara ketat, ada beberapa permohonan baik yang sudah maju yang kita tolak atau yang baru sebatas konsultasi karena bangunan sudah berdiri dan melanggar ketentuan teknis, terpaksa tidak bisa diproses. 3. Persentase drainase dalam kondisi baik tidak tercapai karena Target masih mengacu sesuai sk drainase lama sedangkan capaian sdh di hitung menggunakan masterplan drainase 4. Adanya aturan baru pengganti IMB yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga pelayanan imb hanya sampai akhir oktober, namun Perda PBG belum terbit, sehingga pelayanan PBG belum dapat dilaksanakan. 5. Pada Tahun 2021 baru tersusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota baru tersusun petanya saja.									

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.193 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	Persen	1,26	-	2,70	1,26	2,17	2,17	57,93	Tidak Tercapai
2	Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos	Persen	100,00	-	79,50	100,00	79,50	79,50	79,50	Tidak Tercapai
3	Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase	Persen	87,75	-	72,05	87,75	72,40	72,40	82,51	Tidak Tercapai
4	Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	Persen	47,46	-	81,44	47,46	84,23	84,23	177,49	Tercapai
5	Persentase penduduk yang mengakses air bersih yang terlindungi dengan perpipaan	Persen	95,99	-	88,79	95,99	84,77	84,77	88,31	Tidak Tercapai
6	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	0,00	-	7,87	0,00	0,15	0,15	< Target	Tidak Tercapai

Pada urusan Perumahan dan Permukiman, terdapat 5 indikator yang tidak tercapai, yaitu :

1. Indikator Rasio Rumah Tidak Layak Huni tidak tercapai karena kurangnya sarana prasarana yang memadai dan jumlah SDM kurang mencukupi untuk mengintervensi RTLH.
2. Indikator Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos tidak tercapai karena beberapa kendala berikut :
   - Sebagian besar Perumahan MBR tidak dapat memenuhi kriteria/komponen/jenis fasum fasos yang berjumlah 7 jenis yaitu jalan, drainase, penerangan, saluran air

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
bersih, RTH, tempat bermain, tempat ibadah. Hanya sebagian kecil saja Perumahan MBR yang dapat menyediakan fasum fasos dengan lengkap. - Sebagian Perumahan MBR sudah ditinggalkan oleh pengembang sehingga fasum dan fasos belum sepenuhnya terbangun terutama RTH, tempat bermain, serta tempat ibadah. - Belum adanya intervensi dari pemerintah maupun partisipasi warga penghuni Perumahan MBR untk menyediakan fasum fasos terutama RTH, tempat bermain, serta tempat ibadah. 3. Indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase untuk Rasio Panjang Jalan Lingkungan yang terlayani Drainase tahun 2021 hanya tercapai 72,40 % kurang dari target yang dicanangkan sebesar 87,75 % dikarenakan dengan adanya refocussing dan dengan keterbatasnya waktu pelaksanaan yang tdk mencukupi untuk jalan lingkungan yang terlayani drainase tidak maksimal dalam pekerjaan. 4. Indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk persentase penduduk yang mengakses Air Bersih yang terlindungi dengan perpipaan target yang dicanangkan adalah sebesar 95,99 akan tetepai capaian tahun 2021 hanya 84,77 % dikarenakan kegiatan yang sudah dianggarkan terbentur dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi sehingga data yang tersedia hanya dari data PDAM serta dengan adanya refocusing anggaran. 5. Indikator Persentase kawasan permukiman kumuh tidak tercapai dikarenakan program/kegiatan dari pemerintah (baik OPD Teknis maupun OPD pengampu wilayah) menyasar deliniasi/lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh.									

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Tabel 2.194 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas										
1	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	Persen	100,00	-	98,71	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	persentase korban bencana alam yang ditangani	Persen	75,00	-	31,95	75,00	11,77	11,77	14,71	Tidak Tercapai
4	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum , terdapat 1 indikator yang belum tercapai.

1. Ketercapaian target dan realisasi belum didapatkan capaian yang maksimal disebabkan oleh Rumus capaian masih dimungkinkan untuk di perbaiki / direvisi, hal ini disebabkan rumus persentase korban yang di tangani didapatkan dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan (pengungsi) dibagi Jumlah korban bencana yang terdampak di kali 100%. Hal ini menjadikan masih kecilnya nilai presentase yang capaian yang di dapatkan, dikarenakan hanya korban yang pengungsi saja yang di anggap mendapatkan pelayanan dan korban lain tidak di anggap mendapatkan layanan meskipun mendapatkan bantuan dari Dapur Umum dan bantuan lainnya, dan sulit tercapai secara maksimal karena keterbaratasan sumber daya (armada) untuk menangani korban bencana alam. Jumlah korban bencana sampai dengan akhir tahun yang tertangani sejumlah 4.873 jiwa dengan total korban bencana sejumlah 41.416 jiwa sehingga didapatkan korban bencana alam yang ditangani pada tahun 2021 sejumlah 11,77%

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel 2.195 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
1	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	Persen	1,66	-	1,57	1,66	1,84	1,84	110,56	Tercapai
2	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial	Persen	37,02	-	46,72	37,02	58,41	58,41	157,77	Tercapai
3	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	75,00	-	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00	Tercapai
5	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.196 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
1	Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masih melanjutkan usaha	Persen	50,00	-	87,23	50,00	81,13	81,13	162,26	Tercapai
2	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persen	70,00	-	68,00	70,00	68,00	68,00	97,14	Tidak Tercapai
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	75,00	-	0,00	75,00	21,80	21,80	29,06	Tidak Tercapai
4	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan penjanjian bersama	Persen	55,00	-	60,00	55,00	58,33	58,33	106,06	Tercapai
5	Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan	Persen	47,00	-	43,56	47,00	1,78	1,78	3,78	Tidak Tercapai

Pada urusan Tenaga Kerja masih terdapat 3 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni :

1. Indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan tidak tercapai dikarenakan dimasa pandemic *COVID-19* saat ini sebagian besar perusahaan belum membuka rekrutmen tenaga kerja baru, sementara penempatan kerja ke luar negeri juga belum diizinkan atau masih sangat dibatasi
2. Indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan tidak tercapai dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi covid 19, seperti

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Job Fair, Job Canvasing (jemput bola ke perusahaan terkait lowongan pekerjaan), dan BKK (Bursa Kerja Khusus). Selain itu, beberapa perusahaan juga tidak membuka lowongan pekerjaan akibat pandemi *COVID-19*									
3.	Indikator Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan tidak tercapai karena karena masih kurangnya/terbatasnya jumlah sarana hubungan industrial Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama yang terbentuk di perusahaan. Indikator ini diperoleh dari Jumlah Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama yang terbentuk di perusahaan-perusahaan.									

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.197 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	100,00	-	90,32	100,00	96,77	96,77	96,77	Tidak Tercapai
2	Persentase kampung layak anak	Persen	100,00	-	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender dikarenakan 1 OPD belum menyusun dokumen GAP/GBS.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 2.198 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
1	Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan	skor	90,20	-	92,01	90,20	78,00	78,00	86,47	Tidak Tercapai
2	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Pangan masih terdapat 1 indikator yang tidak tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan. Hal ini dikarenakan masih minimnya produksi pangan di Kota Pekalongan, yaitu sekitar 24% dari kebutuhan pangan. Selain itu, data primer dan sekunder yang diperoleh belum optimal.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 2.199 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan										
1	Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot untuk infrastruktur kota	Persen	75,00	55,22	71,40	75,00	71,40	71,40	95,20	Tidak Tercapai
Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot untuk infrastruktur kota tidak tercapai dibanding target akhir RPJMD dikarenakan karena proses penyetifikatan butuh waktu yg lama dari pihak BPN selaku pihak yang menerbitkannya. Namun sudah ada yang berproses/sudah didaftarkan oleh kami untuk menjadi sertifikat tanah pemkot tsb										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.200 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen	72,00	69,05	92,53	72,00	57,08	57,08	126,14	Tercapai
2	Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	Persen	100,00	-	43,58	100,00	12,73	12,73	12,73	Tidak Tercapai
3	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yang dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	Persen	0,10	-	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
5	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persen	18,90	18,30	18,70	18,90	2,89	2,89	15,29	Tidak Tercapai
6	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	Persen	100,00	-	86,21	100,00	67,16	67,16	67,16	Tidak Tercapai
7	Persentase target capaian kampung iklim di Tahun 2021	Persen	100 % (4 kampung)	-	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan lingkungan hidup, terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai targetnya terhadap target akhir RPJMD, yakni :

a. Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya, disebabkan saat pentargetan RPJMD direncanakan akan dibangun 6 lokasi IPAL komunal dari APBD dan DAK. Namun sampai dengan tahun 2021 masih ada 2 IPAL yang belum terealisasi pembangunannya yaitu IPAL Jenggot 2 dan IPAL di Kelurahan Pasirkraton kramat (Eks Kantor Kelurahan Pasirsari).

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b. Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) dan Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau tidak tercapai dikarenakan keterbatasan lahan.										
c. Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan, tidak tercapai dikarenakan terdapat usaha/kegiatan yang belum mentaati persyaratan administratif misalnya belum memiliki izin pengelolaan limbah, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin lingkungan, izin pemanfaatan air tanah dan belum mentaati teknis aspek lingkungan misalnya hasil uji air limbah yang dihasilkan usaha/kegiatan melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, belum terdapat tempat penyimpanan sementara limbah B3, belum melakukan uji kualitas udara untuk usaha/kegiatan yang menggunakan cerobong asap										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.201 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	perangkat daerah	26,00	-	1,00	4,00	7,00	8,00	30,77	Tidak Tercapai
2	Cakupan penerbitan KTP	Persen	95,00	-	97,73	95,00	95,86	95,86	100,90	Tercapai
3	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Persen	75,00	-	53,81	75,00	54,51	54,51	72,68	Tidak Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil terdapat 2 (dua) indikator yang statusnya masuk dalam kategori tidak tercapai terhadap Target Akhir RPJMD, antara lain : a. Indikator OPD yang memanfaatkan data kependudukan tidak tercapai, disebabkan belum semua OPD membutuhkan akses data pribadi penduduk, sehingga belum dimungkinkan untuk mengadakan kerjasama dengan dindukcapil. b. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran, tidak tercapai dikarenakanpada masa pandemic Covid masyarakat cenderung lebih memilih konsentrasi pada pemenuhan kebutuhan pokok harian, sehingga kecenderungan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran menurun. Disamping itu juga penduduk kurang pro aktif dalam mendaftarkan peristiwa Kelahirannya untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, terutama bagi penduduk usia dewasa .									

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel 2.202 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.203 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persen	66,00	N/A	19,30	66,00	19,92	19,92	30,19	Tidak Tercapai
2	Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus	Persen	100,00	N/A	101,11	55,55	13,11	13,11	13,11	Tidak Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih terdapat 2 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni :

1. Indikator persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia target 64 persen, namun capain sebesar 19.62 persen atau lebih rendah dari target, hal ini dikarenakan adanya Pandemi *COVID-19* yang menyebabkan sebagian besar anggaran pada Pemerintah Kota Pekalongan harus di refocusing guna dialokasikan untuk penanganan Pandemi, Program Keluarga Berencana menjadi salah satu program yang ikut di refocusing. Adanya larangan mengadakan pertemuan pada tahun 2021, membuat sosialisasi MKJP sempat terhenti, kemudian pada semester 2 tahun 2021 Pemerintah membolehkan adanya pertemuan, namun pertemuan tersebut bersifat terbatas, sehingga sosialisasi dalam rangka merekrut kepesertaan MKJP juga dibatasi, hal ini menyebabkan sosialisasi dalam penjaringan kepesertaan KB MKJP tidak bisa maksimal.
2. Indikator Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus target 55.55% dan tercapai 13.11% atau dengan presntase kecapaian sebesar 23.60%. Pada indikator ini persentase capainnya lebih rendah daripada target yang ditentukan dikarenakan pada tahun 2021 adanya pandemik *COVID-19*. Jumlah kasus yang tercatat 59 kasus

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.204 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
1	Persentase peningkatan fasilitas LLAJ	Persen	100,00	-	97,08	100,00	98,33	98,33	98,33	Tidak Tercapai
2	Ketersediaan angkutan umum	Persen	20,95	-	22,69	20,95	22,44	22,44	107,10	Tercapai

Pada urusan Perhubungan terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni :

1. Persentase peningkatan fasilitas LLAJ tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 terdapat Refocussing Anggaran yang menyebabkan pengurangan anggaran pengadaan prasarana lalu lintas sehingga tidak tercapai.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.205 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustudll)	Persen	37,78	-	88,24	37,78	88,24	88,24	233,55	Tercapai
2	Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2.206 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UrusanPemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya	UMKM	15.000	570,00	31603,00	15.000,00	10.141,00	10141,00	67,61	Tidak Tercapai
2	UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	UMKM	895,00	115,00	20,00	130,00	175,00	175,00	19,55	Tidak Tercapai
3	Kenaikan jumlah UMKM	UMKM	24.888	22.934,00	23.233	24.888	23.655,00	23655,00	95,05	Tidak Tercapai
4	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	Persen	100,00	81,11	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	24,59	-	n/a	24,59	16,25	16,25	66,07	Tidak Tercapai

Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat 4 (empat) indikator yang tidak memenuhi target akhir RPJMD, yaitu :

a. Indikator UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya tidak tercapai dikarenakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada tahun 2021 banyak yang telah terfasilitasi dan mendapatkan berbagai bantuan modal dari program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa Bantuan Produktif UMKM (BPUM)

b. Target akhir RPJMD sebesar 895 UMKM belum dapat tercapai hal tersebut disebabkan masih terkendalanya beberapa mitra dan jaringan UMKM karena belum stabilnya kondisi ekonomi secara makro. Koperasi sebagai salah satu komponen kemitraan UMKM sendiri masih belum menjadi pilihan bagi UMKM dalam pengembangan usaha

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dan akses permodalan. Sedangkan sektor perbankkan belum sepenuhnya memiliki kepercayaan atas eksistensi UMKM ditengah lesunya intensitas ekonomi karena pandemi *COVID-19*. c. Pandemi *COVID-19* pada tahun 2021 berdampak pada menurunya geliat ekonomi terutama pelaku UMKM di Kota Peaklongan. Meski telah mendapatkan bantuan dari program BPUM namun pemberlakuan pengetatan PPKM level 3 sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Pekalongan. Program BPUM yang diberikan kepada UMKM tersebut rata-rata digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif oleh karena masih diberlakukanya pengetatan PPKM level 3 di Kota Pekalongan d. Indikator persentase koperasi yang berkualitas tidak tercapai karena dari 277 koperasi yang ada yang aktif dan sesuai Permenkop hanya 141 koperasi.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.207 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										
1	Nilai investasi per tahun (milyar)	milyar rupiah	223,70	-	193,10	223,70	410,60	410,60	183,55	Tercapai
2	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	Persen	95,00	-	97,27	95,00	92,02	92,02	96,86	Tidak Tercapai
3	Persentase Penetapan Pemberian	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
4	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan Penanaman Modal, terdapat 1 (satu) indikator yang kemungkinan belum memenuhi target pada akhir tahun RPJMD, yakni :

a. Indikator Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan dikarenakan waktu tidak sesuai standar pelayanan karena rekomendasi dari OPD teknis yang diterima DPMPTSP melebihi waktu yang ditentukan.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 2.208 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan										
1	Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional	event	12,00	-	5,00	2,00	1,00	6,00	50,00	Tidak Tercapai
2	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	komunitas	30,00	-	165,00	5,00	30,00	30,00	100,00	Tercapai
3	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4,86	-	6,68	4,86	13,10	13,10	269,64	Tercapai
4	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan kebudayaan masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni :

1. Pada indikator *Event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional. Hal ini disebabkan karena pengaruh adanya pandemi yang mensyaratkan pemenuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus melalui pengurangan kerumunan.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

14. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)	indeks	27,00	-	15,40	27,00	18,27	18,27	67,67	Tidak Tercapai
2	Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif	Persen	25,93	-	7,41	25,93	7,41	7,41	28,57	Tidak Tercapai
Kedua indikator pada urusan perpustakaan masih cukup jauh capaiannya terhadap target akhir RPJMD. Hal ini sangat disebabkan pengaruh adanya pandemi yang membatasi kerumunan untuk mengurangi resiko penyebaran *COVID-19* sehingga pengunjung perpustakaan secara fisik jauh berkurang. Namun demikian, telah dilakukan usaha pengadaan perpustakaan secara digital untuk menggantikan sementara perpustakan secara fisik.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 2.210 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										
1	Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti	Persen	69,70	-	60,00	100,00	100,00	100,00	143,47	Tercapai
2	Arsip yang dilestarikan (statis)	arsip	11.000	-	18.496	11.000,00	9500,00	9500,00	86,36	Tidak Tercapai
3	Persentase Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

1 (satu) dari 3 (tiga) indikator pada urusan Kearsipan tidak tercapai, yaitu :

1. Indikator Arsip yang dilestarikan (statis) dikarenakan adanya perubahan orientasi pengelolaan. Semangat kerja yang penuh optimisme pada awal renstra tahun 2016-2021 karena konsep kinerja berorientasi pada pengumpulan (collect) tanpa pengetahuan pengelolaan sesuai dengan standar yang benar. Dengan adanya inhouse training di tahun 2019 yang berorientasi pada pengelolaan arsip statis maka konsep kinerja berubah dan berkonsekuensi pada jumlah berkas yang menurun

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.211 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	85,71	-	106,67	85,71	107,33	107,33	125,22	Tercapai
2	Prestasi olahraga tingkat provinsi (Medali)	orang	113,00	-	51,00	31,00	4,00	55,00	48,67	Tidak Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarpras Olahraga sesuai jenis cabor	Persen	45,00	-	46,15	45,00	60,98	60,98	135,50	Tercapai
Pada urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat 1 (satu) indikator yang Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMDnya tidak tercapai terhadap Target Akhir RPJMD. Penyebab tidak tercapainya indikator tersebut adalah : tidak semua Cabor dipertandingkan dan Penggantian jenjang perlombaan yang semula berdasarkan jenjang pendidikan menjadi berdasarkan tahun kelahiran, (sehingga pengiriman atlit menjadi spekulasi apabila ketemu lawan yang beda usianya terpaut cukup jauh.)										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

17. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 2.212 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
1	Persentase data statistik sektoral yang tersusun	Persen	100,00	100	100,00	100,00	97,12	97,12	97,12	Tidak Tercapai
Indikator Persentase data statistik sektoral tidak tercapai dikarenakan adanya kendala ketidaktersediaan data dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah dengan permintaan data (daftar data) baik dari pusat maupun provinsi. Selain itu, daftar data dari pusat maupun provinsi tidak disertai definisi operasional masing-masing variabel data, sehingga Organisasi Perangkat Daerah mendapat kesulitan dalam mendefinisikan maksud dari data itu sendiri										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

18. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 2.213 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
1	Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan Dan Kelautan

Tabel 2.214 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan										
1	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	Persen	209 M	187M di Thn 2015	176,83	2,00	16,00	205,14	98,15	Tidak Tercapai
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Rp. Milyar	5.5 M	4.2 M	5,30	2,00	4,35	4,35	79,12	Tidak Tercapai
3	Nelayan yang dibina	Persen	888 orang	600 orang	963,00	8,00	15,16	1109,00	124,89	Tercapai
4	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	1870,00	1382 ton	809,03	5,00	-24,36	612,66	32,76	Tidak Tercapai
5	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persen	45,00	-	n/a	45,00	51,69	51,69	114,87	Tercapai

Pada urusan Perikanan dan Kelautan terdapat 3 (tiga) indikakator yang Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD terhadap target akhir belum tercapai, yaitu :

1. Tidak tercapainya kinerja peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI hal ini dikarenakan :
   - Banjir dan rob di awal tahun sehingga menyebabkan akses jalan ke TPI tidak bisa dilewati, sehingga pada bulan pebruari hanya 2 kali lelang.
   - Pendangkalan tidak segera tertangani (Januari – Maret) sehingga kapal besar di atas 30 GT tidak bisa masuk TPI.
   - Halaman Parkir kendaraan TPI sering digenangi air sehingga truk pembawa ikan enggan masuk TPI.
   - Penertiban aturan yang menyebabkan kapal – kapal non pangkalan tidak boleh masuk ke TPI (Oktober – Desember 2021).

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Tidak tercapainya produksi perikanan budidaya diakibatkan oleh durasi rob cukup panjang mengakibatkan dan Ekosistem di Bandengan berubah, karena air sudah menjadi tawar mengakibatkan produksi turun karena rumput laut yang sudah habis.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 2.215 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
1	Persentase destinasi wisata yang berkembang	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase pelaku pariwisata yang terbina	Persen	1,85	100,00	0,60	1,85	2,25	2,25	121,80	Tercapai
3	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	Persen	100,00	n/a	25,00	25,00	75,00	75,00	75,00	Tidak Tercapai
1 (satu) dari 3 (tiga) indikator pada urusan Pariwisata belum mencapai target akhir RPJMD. Penyebab terjadi belum tercapainya indikator tersebut adalah pandemi *COVID-19* yang sangat mempengaruhi usaha di sektor pariwisata.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 2.216 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
1	Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	Kasus	2.400,00	-	2432	2.400,00	4,00	0,44	< Target	Tercapai
2	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persen	25,00	-	0,00	25,00	-14,29	-14,29	-57,14	Tidak Tercapai
3	Persentase peningkatan produksi padi	Persen	10,00	-	11,54	10,00	15,88	15,88	158,77	Tercapai
4	Persentase kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dilaksanakan	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan pertanian terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai, yang antara lain disebabkan :

a. Terdapat 18 kelompok tani yang mengalami kenaikan nilai dalam evaluasi ini, namun masih dalam rentang nilai kelas sebelumnya. Baru 2 kelompok tani yang mendapatkan kenaikan nilai yang membuatnya naik kelas.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 2.217 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
1	Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	IKM	255,00	-	205,00	55,00	90,00	250,00	98,04	Tidak Tercapai
2	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	Persen	100,00	-	n/a	100,00	99,58	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase kegiatan penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	99,58	99,58	Tidak Tercapai

Pada urusan perindustrian, 2 (dua) indikator belum tercapai yakni :

1. Indikator peningkatan jumlah IKM terlatih peningkatan SDM teknologi industri tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran sehingga pelatihan IKM tidak bisa dilaksanakan sesuai target
2. Indikator Persentase kegiatan penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan pendataan IKM Batik ke lapangan secara *door to door* tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 2.218 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
1	Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang	Persen	100,00	-	68,96	100,00	74,01	74,01	74,01	Tidak Tercapai
2	persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar	Persen	100,00	-	101,06	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Eksportir di Kota Pekalongan	pelaku usaha	18,00	12,00	21,00	18,00	21,00	21,00	116,67	Tercapai
4	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui E-Marketplace	UMKM	70,00	-	70,00	70,00	143,00	143,00	204,29	Tercapai
5	Persentase kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dilaksanakan	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan perdagangan, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai, yakni:

a. Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang dikarenakan Geliat ekonomi yang belum sepenuhnya tumbuh akibat pengetatan kegiatan sosial dengan PPKM level 3 berimbas pada berhentinya aktivitas penjualan oleh sebagian pedagang di pasar-pasar tradisional

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel 2.219 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah										
1	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	100,00	-	100,93	100,00	122,22	122,22	122,22	Tercapai
2	Nilai LPPD	indeks	3,23	-	n/a	3,06	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase capaian fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan) dengan target indikator kinerja Indeks Nilai LPPD sebesar 3,05 realisasi N/A, hal ini dikarenakan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019, 2020 dan 2021 belum keluar. Sampai dengan saat ini Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terakhir keluar adalah Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 dengan skor sebesar 3,2333 dan Status Kinerja Sangat Tinggi.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2. Sekretariat DPRD

Tabel 2.220 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD										
1	Persentase perda inisiatif yang diterbitkan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	Tidak Tercapai
2	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	76,47	76,47	76,47	Tidak Tercapai
Dua indikator program belum tercapai dikarenakan Perda inisiatif belum diterbitkan masih menunggu evaluasi Mendagri dan Gubernur										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel 2.221 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perencanaan										
1	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	33,33	33,33	33,33	Tidak Tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Indikator penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu tidak tercapai dikarenakan : Secara dokumen, tercapai 3(tiga) dokumen perencanaan, yaitu RKPD 2022, RKPD perubahan 2021 dan Rancangan Awal RKPD 2023. Namun demikian, untuk RKPD 2022 dan RKPD perubahan 2021 tercapai tidak sesuai dengan waktu yang diamanatkan oleh permendagri 85 tahun 2017. Hal ini disebabkan pada tahun 2021, bersamaan dengan penyusunan RPJMD 2021-2025. Sehingga proses penyusunan RKPD diselaraskan dengan RPJMD, sedangkan RPJMD disahkan bulan tgl 25 Agustus 2021										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2. Keuangan

Tabel 2.222 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keuangan										
1	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	Persen	4,50	-	22,73	4,50	26,09	26,09	579,84	Tercapai
2	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

3. Kepegawaian

Tabel 2.223 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kepegawaian										
1	Tingkat kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian	Persen	25,00	-	40,05	25,00	28,36	28,36	113,45	Tercapai
2	Persentase Ketersediaan data PNS	Persen	100,00	-	100,60	100,00	101,77	101,77	101,77	Tercapai
3	Persentase Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan	Persen	78,00	-	72,63	78,00	52,19	52,19	66,90	Tidak Tercapai
4	Persentase PNS berkembang karier	Persen	40,00	-	36,00	40,00	15,82	15,82	39,54	Tidak Tercapai

Pada urusan kepegawaian dan diklat, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tercapai, yang antara lain disebabkan :

a. Indikator Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan belum tercapai karena masih banyaknya ASN dilingkungan Pemkot Pekalongan yang latar belakang pendidikannya SD, SMP, SMA; sedangkan syarat untuk mengampu jabatan minimal lulusan D3.
b. Indikator Persentase PNS berkembang karier tidak tercapai dikarenakan rekomendasi dari KASN tentang Jabatan Tinggi Pratama belum turun.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

4. Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2.224 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	Persen	60,00	-	80,00	50,00	100,00	100,00	200,00	Tercapai
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	Persen	95,00	-	100,00	95,00	66,67	66,67	70,18	Tidak Tercapai
Indikator Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah tidak tercapai karena pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak diselenggarakan pameran inovasi disebabkan adanya pandemic *COVID-19*										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Tabel 2.225 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inspektorat										
1	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil I	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,92	100,92	100,92	Tercapai
2	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang	Persen	100,00	-	80,65	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Tabel 2.226 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kecamatan										
1	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Barat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Timur	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	Persen	100,00	-	85,26	100,00	91,40	91,40	91,40	Tidak Tercapai
7	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Utara	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara	Persen	100,00	-	52,08	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Indikator Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan tidak tercapai dikarenakan adanya pandemi *COVID-19* sehingga ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena bersifat mengumpulkan masa yang saat itu dibatasi										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.227 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kesatuan Bangsa dan Politik										
1	Persentase pemilih pemula yang terdidik politik	Persen	21,11	-	17,21	17,12	17,21	17,21	81,52	Tidak Tercapai
2	Persentase Penanganan kerawanan/konflik sosial	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase penurunan kasus narkoba	Persen	23,08	N/A	11,76	23,08	-23,33	-23,33	-101,10	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase penanganan kerawanan sosial	Persen	100,00	-	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Masih terdapat 2 (dua) indikator program yang tidak tercapai, yakni : 1. Indikator Persentase pemilih pemula yang terdidik politik masih menggunakan data capaian tahun 2020, dimana pelaksanaan pilkada ada di tahun 2020, tidak tercapai dikarenakan karena memenuhi prokes *COVID-19* membatasi kerumunan 2. Indikator Persentase penurunan kasus narkoba tidak tercapai dikarenakan perubahan situasi sosial dan ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.2.9. Non Urusan

1. Non Urusan

Tabel 2.228 Capaian Indikator Non Urusan Kota Pekalongan Tahun 2021

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Non Urusan										
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum, rapat koordinasi dan konsultasi, pemiliharaan	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian RPJMD sd 2021	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga									
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100	100	100	Tercapai
3	Persentase medical general check up	persen	100,00	-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
4	Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan	Persen	25,80	-	100,00	6,50	16,13	16,13	62,52	Tidak Tercapai
5	Persentase pelayanan keprotokoleran dan kehumasan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	98,00	-	-	98,00	100,00	100,00	102,04	Tercapai

1. Indikator Persentase medical general check up tidak tercapai dikarenakan beberapa penyakit yang memerlukan perawatan medis tertentu telah ditanggung oleh BPJS sehingga anggaran tidak terealisasi
2. Indikator Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan tidak tercapai dikarenakan evaluasi tingkat kematangan organisasi daerah hanya di lakukan pada 5 OPD dengan nilai sedang hingga rendah.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.2.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021

2.2.3.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pada tahun 2021, ketiga indikator SPM Bidang Pendidikan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan :

1. Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Pekalongan usia 5 – 6 tahun mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sebanyak 8.934 orang dari target yang seharusnya 10.607 orang atau sebesar 84,23 persen. Kondisi ekonomi pada masa pandemi yang sulit, memaksa orang tua anak usia PAUD untuk tidak mendaftarkan anaknya di PAUD dan langsung mendaftarkan ke jenjang sekolah dasar saat usia anak sudah mencukupi. Hal itu disebabkan oleh biaya pendidikan di sekolah PAUD yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan jenjang sekolah dasar.
2. Pada Pendidikan Dasar, jumlah penduduk kota Pekalongan usia 7–15 tahun mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (Dikdas) yaitu sebanyak 40.363 orang dari target yang seharusnya 46.833 orang atau sebesar 86,18 persen. Karena banyak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah luar kota dan juga tidak sedikit penduduk Kota Pekalongan yang berdomisili di luar kota dan menyekolahkan anaknya di luar kota juga. Kesulitan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan data penduduk Kota Pekalongan usia 7-15 tahun yang sekolah di luar kota turut menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan dalam memenuhi target capaian indikator layanan SPM Pendidikan karena penduduk usia 7-15 tahun tersebut tidak akan bisa dihitung. Sehingga tetap dianggap sebagai penduduk yang belum mendapat layanan pendidikan;
3. Pada Pendidikan Kesetaraan, Jumlah penduduk kota Pekalongan usia 7 – 18 tahun yang belum mendapatkan pendidikan formal dan mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan yaitu sebanyak 647 orang dari target yang seharusnya 12.786 orang atau sebesar 5,06 persen. Disebabkan belum adanya pendampingan khusus bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) sehingga mempunyai motivasi untuk bersekolah, dan juga tidak adanya proses pembelajaran tatap muka karena masa pandemi. Sehingga proses belajar tatap muka tidak dapat berjalan secara optimal yang berakibat menurunnya minat calon peserta didik untuk mendaftar pada lembaga pendidikan kesetaraan;

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.229 berikut.

Tabel 2.229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/ MTs)	97,50 persen	86,18 persen	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	50 persen	5,06 persen	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	98,40 persen	84,23 persen	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, 2022

2.2.3.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

Hasil capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.230 berikut.

Tabel 2.230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	95,94 persen	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir	100 persen	98,77 persen	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100 persen	83,40 persen	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standard	100 persen	61,88 persen	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 persen	79,92 persen	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	76,11 persen	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Ganguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan pada Orang terduga Tubercolusis (Tb)	Persentase Orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standard	100 persen	94,73 persen	Tidak Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan pada Orang terinveksi virus HIV/AIDS	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100 persen	95,67 persen	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, 2022

Dari ke 12 indikator tersebut, sebanyak 4 indikator mencapai target, dan sebanyak 8 indikator tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan :

1. Pada pelayanan kesehatan ibu hamil, Jumlah ibu hamil yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 6.298 orang sedangkan jumlah ibu hamil terlayani kesehatannya sebanyak 6.042 orang. Hal ini dikarenakan ada beberapa ibu hamil yang pindah domisili (keluar Kota Pekalongan) dan adanya beberapa kasus ibu hamil sehingga capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 95,94%;
2. Pada pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah ibu bersalin yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.862 orang sedangkan jumlah ibu bersalin yang terlayani sebanyak 5.862 orang sehingga capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 100%;
3. Pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah bayi baru lahir yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.844 orang sedangkan jumlah bayi baru lahir yang terlayani kesehatannya sebanyak 5.772 orang sehingga capaian SPM untuk indikator Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 98,77%. Ketidak tercapaian ini

disebabkan adanya kematian neonatus pada usia 0-28 hari sehingga tidak mendapatkan pelayanan bayi baru lahir secara lengkap;

4. Pada pelayanan kesehatan Balita, jumlah balita yang akan terlayani kesehatannya sebanyak 21.865 orang sedangkan jumlah balita yang terlayani kesehatannya sebanyak 18.236 orang atau sebesar 83,40 persen. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi *COVID-19* Posyandu banyak yang tutup sehingga banyak balita yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah warga negara pada usia pendidikan dasar yang akan terlayani kesehatannya sebanyak 46.466 orang sedangkan jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang terlayani kesehatannya sebanyak 46.466 orang sehingga capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 100 persen;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah warga negara pada usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 207.789 orang sedangkan jumlah warga negara usia produktif yang terlayani kesehatannya sebanyak 128.587 orang atau sebesar 61,88 persen. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya : terbatasnya pelayanan kesehatan usia produktif di masa pandemi, hanya Posbindu yang mampu menerapkan protokol kesehatan yang diijinkan melaksanakan kegiatan;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah warga negara pada usia lanjut yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 30.944 orang sedangkan jumlah warga negara usia lanjut yang terlayani kesehatannya sebanyak 24.730 orang sebesar 79,92 persen. Hal ini dikarenakan masa Pandemi poksila tidak dibuka;
8. Pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah warga negara penderita hipertensi yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 59.857 orang sedangkan jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang terlayani kesehatannya sebanyak 45.557 orang atau sebesar 76,11 persen. Hal ini dikarenakan selama pandemic hanya Posbindu PTM yang mampu menerapkan protokol kesehatan yang diijinkan mulai kegiatan;
9. Pada pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 13.849 orang sedangkan jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang terlayani kesehatannya sebanyak 13.849 orang sehingga capaian SPM untuk indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes sebesar 100%;
10. Pada pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, jumlah warga negara dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 730 orang sedangkan jumlah warga negara dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang terlayani kesehatannya sebanyak 730 orang sehingga capaian SPM untuk indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes sebesar 100%;
11. Pada pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis, jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.391 orang sedangkan jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang terlayani kesehatannya sebanyak 5.107 orang sehingga capaian SPM untuk indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis sebesar 94,73 persen. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang menyebabkan terbatasnya kondisi pelayanan interaksi antara petugas dan orang yang diduga tuberkolosis;
12. Pada pelayanan kesehatan warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*), jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang akan mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 12.663 orang orang sedangkan jumlah warga negara warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*),

yang terlayani kesehatannya sebanyak 12.114 orang sehingga capaian SPM untuk Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sebesar 95,67%. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang menyebabkan adanya rasa ketakutan masyarakat untuk datang ke pelayanan kesehatan dan juga ada keharusan jaga jarak antara petugas dan klien.

2.2.5.3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.231 berikut.

Tabel 2.231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,7 persen	99,69 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, 2022

Kedua indikator tersebut dapat mencapai target yang ditentukan yaitu sejumlah 342.445 orang untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan sejumlah 314.405 orang untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Air Minum.

2.2.5.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.232 berikut.

Tabel 2.232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, 2022

Kedua indikator tersebut mencapai target yaitu, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota dapat dipenuhi yaitu sejumlah 63 KK, dan juga Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Dearah Kab/Kota sejumlah 0 (nol) karena Pemerintah Kota Pekalongan tidak memiliki program atau kegiatan yang mengakibatkan harus dilakukan relokasi warga karena dampak program Pemerintah.

2.2.5.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	100 persen	Tercapai
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, 2022

2.2.5.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.234 berikut.

Tabel 2.234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korbanbencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, 2022

Dari kelima indikator tersebut, semua dapat tercapai sesuai target 100 persen.

2.2.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2021

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.5.4.1. Pilar Pembangunan Sosial

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 47 target dan 77 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 65 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.235 berikut.

Tabel 2.235 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2021

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN								
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	BPS	persen	6,94	7,59	Tidak Tercapai
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	DINKES	persen	95	79,77	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPERINAKER	persen	100	72,89	Tidak Tercapai
1.3.2 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	0,18	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	9239	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	95	86,1	Tidak Tercapai
1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB	persen	PM	68,47	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	persen	95,99	100	Tercapai
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan Sanitasi	DINPERKIM	persen	97,33	99,7	Tercapai
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase kawasan permukinan kumuh yang tertangani	DINPERKIM	persen	0,9	0,15	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	DINDIK	persen	96	82,07	Tidak Tercapai
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	DINDIK	persen	77,5	60,97	Tidak Tercapai
1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	55,04	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	DINDUK CAPIL	persen	75	55,79	Tidak Tercapai
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD	persen	PM	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	26.586.228.500	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kota	BPBD	Dokumen		NA	
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen)*	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	80,03	81,7	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	DINPERPA	persen		NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	DINKES	persen	2,1	3,5	Tidak Tercapai
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	DINKES	persen	< 12	7,81	Tercapai
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	DINKES	persen	PM	5,49	Tidak ada target tapi data tersedia
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Gizi Buruk	DINKES	persen	<0,5	0,18	Tercapai
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah kasus anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	<0,5	0,0783	Tercapai
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	DINKES	persen	0,5	0,548	Tercapai
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	80,03	81,7	Tercapai
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA								
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Per 100.000 KH	102	188,2	Tidak Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	12,25	10,27	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	6,0	5,13	Tercapai
3.2.2 (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	9,6	8,9	Tercapai
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Cakupan UCI desa	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV-AIDS	Prevalensi HIV-AIDS	DINKES	orang	PM	0,88	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah Insiden TB	Jumlah kasus TB Paru BTA (+)	DINKES	kasus	PM	152,27	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	Angka Kesakitan Malaria	DINKES	per 1.000 penduduk beresiko	0	0	Tercapai
3.3.4. (a)	Persentase Kab/ Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/ Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Jumlah kasus hepatitis B	DINKES	kasus	PM	60,43	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Angka penemuan kasus baru kusta	Angka penemuan kasus baru kusta	DINKES	per 100.000 penduduk	<10	80,95	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.3.5 (b)	Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filarissis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	per 100.000 penduduk	<1	1	Tidak Tercapai
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	DINKES	persen	100	21,92	Tidak Tercapai
3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Deteksi dini obesitas pada penduduk usia 15+ tahun di fasyankes	DINKES	persen	1	0,6	Tercapai
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna an narkoba	KESBANGPOL	orang	PM	0	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBANGPOL	orang		NA	Data tidak tersedia (indikator provinsi)
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahguna an NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	KESBANGPOL	orang		NA	Tidak ada target
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna an NAPZA yang telah dikembangkan / dibantu	KESBANGPOL	Rumah sakit	PM	2	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahguna an narkoba	BNN/ Kesbangpol	Persen		NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.7.1 (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB		PM	68,47	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	PM	2,164	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.7.2 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	DINSOS P2KB		64	19,92	Tidak Tercapai
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	DINSOS P2KB		9,72	17,66	Tidak Tercapai
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1 (a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need KB	DINSOS P2KB	persen	PM	31,53	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	DINKES	persen	95	77,58	Tidak Tercapai
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	NA	
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT								
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1 (a)	Persentase SD/ MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/ MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/ MI berakreditasi A	DINDIK	persen	PM	97,96	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (b)	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi B	DINDIK	persen	PM	100	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (c)	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B		DINDIK			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	DINDIK	persen	100	98,63	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	DINDIK	persen	100	103,65	Tercapai
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	76,12	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	62,5	58,54	Tidak Tercapai
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1 (a)	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	76,12	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1 *	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	1) APM SD/ MI/ sederajat 2) APM SMP/ MTs/ Sederajat	DINDIK		PM	1) 99,11 2) 75,97	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Angka melek huruf	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	persen Ruang kelas SMA/ MA/ SMK sesuai standar nasional pendidikan	Persentase Ruang kelas SD/ MI dan SMP/ MTs sesuai standar nasional pendidikan	Dindik	persen	PM	95,89	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/ SMALB/ MA/ SMK bersertifikat pendidik	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	62	46,87	Tidak Tercapai
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN								
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPPA		PM	SK (Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 463/ 806 Tahun 2020 tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pekalongan, Keputusan Wali Kota Nomor 463/ 807 thn 2020 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga, Perwal Nomor 65 B Thn 2020 tentang LPPAR = 3	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	8	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	DPMPPA	persen	PM	Perempuan: 12, Anak: 10	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	Kasus	250	59	Tercapai
5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	BPS	persen	PM	76,12	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	8,57	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	persen	PM	51,75	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.								
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB	DINSOS P2KB	persen	PM	31,53	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINSOS P2KB		PM	68,47	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

2.5.4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 *goals* 54 target dan 72 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 18 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.236 berikut.

Tabel 2.236 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2021

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA								
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	PLN-ESDM-BPS	persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	PLN-ESDM-BPS	Kwh/ Kapita		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		PM	95,7	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	BPS			NA	Data tidak tersedia (belum ada bauran energi terbarukan di Kota Pekalongan)
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan PDRB	BPS / Bappeda	persen	1,86–1,97	3,59	Tercapai
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	PM	37,07	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasukmelalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS			NA	data estimasi dari Sakernas kurang cakupan untuk angka Kabupaten/ Kota
8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persentase Tenaga kerja formal	BPS	persen		NA	data estimasi Sakernas belum dihitung
8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	persen		NA	data estimasi dari Sakernas kurang cakupan untuk angka Kabupaten/ Kota
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah Minimum Kota	Dinperinaker	Rupiah	PM	2.139.754,00	Tidak ada target tetapi data tersedia
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	6,84	6,89	Tidak Tercapai
8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengguran	Tingkat setengah pengguran	Tingkat setengah pengguran	BPS			NA	data estimasi Sakernas belum dihitung
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Jumlah pelatihan untuk pemuda	DINPERINAKER	orang	560	528	Tidak Tercapai
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	600	224	Tidak tercapai
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	534.400	283.658	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1 *	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMPTSP			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	DPMPTSP			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI								
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU PR	persen	77,58	80,03	Tercapai
9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinhub	dermaga		NA	Data tidak tersedia
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Dinhub	pelabuhan		NA	Data tidak tersedia
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industry dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
9.4.1. (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DINKOMINFO	Persen		NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
9.C.1. (a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS	Persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1 *	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS / Bappeda	-	0,34	0,314	Tercapai
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS / Bappeda	persen	6,94	7,59	Tidak tercapai
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS			NA	Data tidak tersedia
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.4.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	DINPERINAKER			NA	Untuk indikator tersebut belum bisa disajikan karena harus dikonfirmasikan ke BPJS Ketenagakerjaan dulu, sedangkan BPJS mulai tahun 2018 pendataan peseta Jamsostek digabung dengan pendataan peserta yang non tenaga kerja sehingga kesulitan untuk memilah-milah
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik								
10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupansi	DINPERINAKER	kegiatan		NA	Tidak ada kegiatan karena pandemi *COVID-19*
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.								
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BKD/ BPS		981.361.482.000	485.317.842.324,61	Tidak tercapai
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BKD		218.020.320.000	NA	Data di BKD hanya target dan realisasi Pendapatan dan penerimaan pajak sedangkan data PDP ada di BPS
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	DINKOMINFO			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1 *	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS			NA	Data Susenas BPS
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi Negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020								
17.11.1 (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS			NA	data tersedia sampai level provinsi, untuk kabupaten/ kota susah diperoleh(pelabuhan sebagai titik ekspor impor)
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama								
17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	BAPPEDA			NA	Data tidak tersedia (tidak ada KPBU)
17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA			NA	Data tidak tersedia (tidak ada KPBU)
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional								
17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
17.18.1 (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Jumlah indikator SDGs Kota	Bappeda	indikator	222	195	Tidak tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

2.5.4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 6 *goals* 56 target dan 69 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 19 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.237 berikut.

Tabel 2.237 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2021

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	Persen	93,99	97,09	Tercapai
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DINPERKIM	m3	PM	12.196.014	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DINPERKIM	Persen	95,99	91,72	Tidak tercapai
6.2.1. (c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINPERKIM	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (d)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	15	21	Tercapai
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Unit	NA	4	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.3.1 (a)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH	Kab/ Kota	NA	NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1. (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH		50	50	Tercapai
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1. (C)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.5.1. (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.5.1. (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1. (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.6.1. (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memilki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	97,35	97,30	Tidak tercapai
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2 .1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DINHUB			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	DPUPR			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan.								
11.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	PM	1000,9	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	DINSOS P2KB			NA	Data tidak tersedia
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD			NA	Data tidak tersedia (Kota Pekalongan belum memiliki sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan)
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	PM	86,30	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	18,90	2,89	Tidak tercapai
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.b.1 *	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	dokumen	1	0	Tidak tercapai
11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	dokumen	1	0	Tidak tercapai
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN								
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1. (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton/ tahun	PM	4.416	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	persen	26	26	Tercapai
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001)
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	1	0	Tidak tercapai
13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	PM	1000,9	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.2.1. (a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN								
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1 *	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)								
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha		-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP	Nelayan	100	190	Tercapai
TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN								
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
15.2.1. (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

2.5.4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 *goals* 12 target dan 23 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 13 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.238 berikut.

Tabel 2.238 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2021

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 16: PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun								
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES	kasus		NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES			NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	POLRES			NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.4 *	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS			NA	Data tidak tersedia (tidak melakukan survei)
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS			NA	Data tidak tersedia (tidak melakukan survei)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	DPMPPA		PM	anak L = 5/13,095*100= 0,0382 , anak P = 6/12,177*100=0,0493	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES	persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	5	5	Tercapai
16.3.1. (c)	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum				NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS			NA	Data tersedia pada level nasional
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1 *	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Realisasi APBD Pemerintah Kota	BKD	Rp.	1.041.206.081.000	962.091.792.004	Serapan Anggaran sebesar : 92,40 persen
16.6.1 (a)	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	BKD	ketagori	WTP	WTP	Tercapai
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BAGIAN ORGANISASI	ketagori	B	BB	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	persen	100	92	Tidak Tercapai
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	IKM	BAGIAN ORGANISASI	indeks	83	80,42	Tidak Tercapai
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	PM	8,82	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	Persen	PM	36.07	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKCAPIL	persen	PM	99,43	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	DINDUKCAPIL			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Persen	PM	93,46	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2021		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
16.10.1.(a)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	27 pengaduan	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMINFO	Persen	PM	92,86	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMINFO	Persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.10.2. (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.239 berikut.

Tabel 2.239 Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
AKABA (Angka Kematian Balita)	Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat
AKB (Angka Kematian Bayi)	
AKI (Angka Kematian Ibu)	
Indeks Keluarga Sehat	
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya angka kemiskinan
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Kategori Kota Layak Anak	
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Luas Genangan Banjir dan Rob	Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Lahan	
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan
Persentase pelayanan sampah	
Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	
Persentase keterhubungan jalan	
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota	
Nilai KIP Tingkat Kota	
Nilai SAKIP Kota	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	
Indeks Merit System	
Maturitas SPIP	
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.240 berikut.

Tabel 2.240 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Belum optimalnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Belum optimalnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat
	Belum optimalnya Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Belum optimalnya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek
	Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar
	Belum optimalnya Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran
	Belum optimalnya Rumah Tangga Sehat
	Belum optimalnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar
	Belum optimalnya Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum optimalnya tingkat Kemantapan Jalan kota
	Belum optimalnya Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kota
	Belum optimalnya drainase dalam kondisi baik
	Belum optimalnya Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik
	Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK *Outcome*)
	Belum optimalnya Rasio Persetujuan Bangunan Gedung

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya Penetapan Rencana Tata Ruang kota
	Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Belum optimalnya Ketersediaan Sarana Persampahan Regional
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum optimalnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga
	Belum optimalnya Luas kawasan permukiman kumuh
	Belum optimalnya Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	Belum optimalnya penanganan kumuh
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM
	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Masih tingginya angka kemiskinan
	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
	Belum optimalnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
	Belum optimalnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
	Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Belum optimalnya Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota
	Belum optimalnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum optimalnya kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB
	Belum optimalnya Dekela (desa/kelurahan layak anak)

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya anak korban kekerasan yang ditangani (IKK *Outcome*)
	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Belum optimalnya Skor pola pangan harapan ketersediaan
	Belum optimalnya implementasi kelurahan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya penerapan pangan segar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya pembebasan bidang tanah untuk pembangunan insfrastruktur kota
	Belum optimalnya pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
	Koordinasi dalam proses pensertifikatan tanah masih perlu ditingkatkan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya jumlah limbah yang diolah
	Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
	Belum optimalnya usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
	Belum optimalnya perolehan penghargaan bidang LH
	Belum optimalnya persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan
	Belum optimalnya pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti
	Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Belum optimalnya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belum optimalnya ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan
	Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang)
	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)
	Belum optimalnya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun
	Belum optimalnya penurunan angka Unmeet need KB

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya ketersediaan fasilitas LLAJ
	Belum optimalnya Kinerja Lalu lintas kota
	Belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
	Belum optimalnya Rasio konektivitas kota
	Belum optimalnya penyelenggaraan parkir yang berizin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya Pelayanan Informasi Publik
	Belum optimalnya pencapaian Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Belum optimalnya Koperasi yang berkualitas
	Belum optimalnya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat
	Belum optimalnya koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota
	Belum optimalnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota
	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan
	Belum optimalnya peningkatan usaha Mikro yang menjadi wira usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Belum optimalnya peningkatan Invetasi baru
	Belum optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan
	Belum optimalnya Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor
	Belum optimalnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya *Event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Belum optimalnya Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pelestarian Cagar Budaya
	Belum optimalnya pengunjung museum batik
	Belum optimalnya pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)
	Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum optimalnya Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Belum optimalnya Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Belum optimalnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan Tangkap bersumber dari TPI
	Belum optimalnya Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan
	Belum optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
	Belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI
	Belum optimalnya Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Belum optimalnya Produktivitas pertanian per hektar per tahun
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Belum optimalnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Belum optimalnya kenaikan nilai produk peternakan
	Belum optimalnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
	Belum optimalnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya penyedaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya pelayanan hukum dalam penetapan Perda
	Belum optimalnyakoordinasi kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan
	Belum optimalnya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
	Belum optimalnya Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa
	Belum optimalnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya pembahasan dokumen penganggaran yang tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum optimalnya penyediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
KEUANGAN	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
	Belum optimalnya Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya pengembangan karier PNS

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya Tingkat Pelaporan Kinerja ASN
	Belum optimalnya Keterisian Jabatan
	Belum optimalnya Keterpenuhan Formasi ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Belum optimalnya PNS berkembang kompetensinya (Latsar)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)
	Belum optimalnya Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya Level Kapabilitas APIP
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
	Belum optimalnya ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Masih adanya konflik sosial
	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Belum optimalnya penanganan konflik ormas
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
	Belum optimalnya pendidikan politik bagi parpol dan lembaga pendidikan
Non Urusan	
Non Urusan	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD
	Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.7. Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.241 berikut.

Tabel 2.241 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Selanjutnya isu strategis dijelaskan sebagai berikut :

2.7.1. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu : transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif. Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 69,66. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 2,82. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat; b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, karena persentase OPD dengan IKM Baik masih sebesar 95,38 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 48,88; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun tetapi harus terus ditingkatkan agar optimal; e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan terus, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 2,81; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya *merit system* secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.7.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas

lingkungan yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Namun demikian, hingga saat ini, luas genangan masih sebesar 37,27 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 69,41 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 1-20 cm per tahun; dan c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 6,89 persen.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justeru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun *water storage* guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman.

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi ekploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 50,84

dan pada tahun 2021 naik menjadi 54,31. IKLH yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Terbatasnya RTH di Kota Pekalongan karena upaya untuk pengembangan RTH belum dilaksanakan secara kontinyu dan belum terbangunnya kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya RTH publik dan privat harus mencapai minimal 30 persen dari luas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, antara lain : Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

2.7.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebesar 88,79 persen dan pada tahun 2021 menurun menjadi 84,77 persen. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, dimana pada tahun 2020 sebesar 76,07 persen dan tahun 2021 menurun menjadi 73,75 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2021, jalan kota kondisi mantap sebesar 80,58 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,49), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan

semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Isu Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2021, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru , luas kawasan kumuh mencapai 6,89 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Luasan ini mengalami pengurangan dari tahun 2020 sebesar 10,74 persen. Persentase tersebut merupakan luasan yang masih cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.7.4. Peningkatan Derajat Kesehatan

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Di sisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan : a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2021 AKI masih bernilai 188,23 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2021 AKB masih bernilai 8,90 per 1.000 kelahiran hidup; c). Masih tingginya angka kematian balita (AKABA), tahun 2021 AKABA masih bernilai 10,27 per 1.000 KH; d). Masih tingginya angka kesakitan dengan nilai 8,38 persen di tahun 2021; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,18 persen dan Balita Stunting sebanyak 7,82 persen pada tahun 2021; f) masih rendahnya sistem ketahanan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,1 persen di tahun 2021; serta g) masih tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, pada tahun 2021 mencapai sebesar 31,53 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2020 sebesar 74,38 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,44, masih berada pada posisi terbawah jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah. Sehingga UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Selain hal tersebut, perlu dilakukan penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perurnusan rencana intervensi, sinkronisasi program penurunan AKI, AKB dan AKABA antara RSUD dan Puskesmas, pemberdayaan kader dan optimalisasi kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

Selain permasalahan AKI, AKB dan AKABA, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah stunting, dimana masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi beresiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Penyebabnya multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidaktauan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal yang turut berpengaruh yaitu akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah Pusat terus mendorong penurunan stunting melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum

dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervesi Percepatan Penurunan Stunting Terintegerasi Tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang perlu mendapat penanganan dengan skema percepatan khusus. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi stunting tahun 2021 berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) sebesar 20,6 persen dan berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 7,82 persen. Target prevalensi stunting Kota Pekalongan ditargetkan turun setiap tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan diantaranya: penguatan cakupan intervensi spesifik kunci, pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi pemerintah daerah, pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi, penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans, koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah, dan pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

Masih rendahnya skor PPH menunjukkan bahwa konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan skor PPH melalui pelatihan olahan pangan dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.7.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dan pada tahun 2019 sebesar 6,60 persen. Namun akibat dampak pandemi *COVID-19*, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2020 meningkat menjadi 7,17 persen, dan meningkat lagi menjadi 7,59 persen di tahun 2021. Dengan indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan yang belum optimal. Penanganan angka kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah ketika angka kemiskinan semakin rendahsehingga dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pandemi *COVID-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan DTKS tahun 2021 sebanyak 184.247 jiwa dari semula 108.436 jiwa pada tahun 2020, atau kenaikan sebanyak 75.811 jiwa.Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan penurunan yang optimal dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 sebesar 7,02 persen dan pada tahun 2021 menurun menjadi 6,89 persen. Menyikapi hal ini, perlu adanya upaya dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran dan terarah. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, link and match dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehinga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

2.7.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumberdaya manusia yang tidak optimal . Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2020 adalah 74,98 dan tahun 2021 meningkat menjadi 75,40. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah sebesar 12,85 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,85 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 8 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 adalah 9,18 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 9,18 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP kelas 10 SMA namun tidak sampai lulus. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk

Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 sebesar 57,87. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2022 disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan IPM. RAD ini akan menjadi dasar rencana aksi pada tahun berikutnya.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu : menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2021 ada tiga belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.

2.7.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dimana pada tahun 2020

mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen, dan pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,59 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2021 sebesar Rp.37,07 juta per tahun; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisatawan masih belum optimal, dimana pada tahun 2021 sebanyak 316.440; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp.390,348 Milyar; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2021 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2021 sebesar 2,38 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2021 sebesar 5,05; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2021 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru sebagai bagian dari TOD (*Transit Oriented Development*). Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahanya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat

masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, dari ke-14 sub sektor dalam ekonomi kreatif, hanya 8 (delapan) sub sektor yang masuk dalam roadmap Kota Pekalongan, yaitu : 1) Kerajinan; 2) Desain; 3) Fashion; 4) Film, video dan fotografi; 5) Musik; 6) Seni pertunjukan; 7) Radio dan televisi; dan 8) Kuliner. Dari kedelapan sub sektor yang ada maka dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kluster yaitu : Kuliner, Seni Kriya dan Seni Pertunjukan. Kondisi Ekraf saat ini secara umum masih sangat minim, dapat dilihat dengan tidak dimilikinya daftar kebutuhan, pasar yang tidak terpetakan, permodalan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain dapat dikatakan kondisi ekraf di Kota Pekalongan masih belum didukung data yang baik. Dalam ekosistem lama ekraf dilaksanakan dengan model '*single fighter*' atau perorangan, masih terlalu terikat dengan tradisi/tradisional, masih berupa pelayanan dasar dan merupakan sambilan. Sehingga perlu adanya perubahan cara pandang atau 'Re-Branding' dengan mulai menjalankan Ekraf melalui/berbasis komunitas, memberikan nilai tambah pada karyanya, ada pelayanan tambahan dan bersifat profesional.

Selain perubahan dengan me-re-branding ekosistem Ekraf juga perlu adanya pembuatan Database Dinamis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan, pemetaaan dan akses pasar serta penyaluran modal. Dalam kebutuhan pengembangan perlu didasari oleh regulasi/peraturan, adanya kelembagaan dan didukung infrastruktur. Sedangkan pemetaan dan akses pasar dibedakan menjadi even dan segmentasi. Untuk permodalan dapat dibagi menjadi profit, non profit dan stimulan.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Dalam Pariwisata terdapat 5 (lima) hal penting yang saling terkait, yang biasa dikenal dengan 3A dan 2P, yaitu : Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Promosi dan Pelaku Usaha. Kelima hal tersebut harus ada dan mendukung satu dengan lainnya untuk menciptakan pariwisata yang unggul. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Tahun 2017-2027, Kota Pekalongan termasuk dalam salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi / DPP yaitu DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya. DPP ini merupakan destinasi pariwisata berskala Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 DPP. DPP dibagi lagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / KSPP dan Kawasan

Pengembangan Pariwisata Provinsi/ KPPP. Untuk DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP yaitu : a) KSPP Tegal dan sekitarnya; b) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya; c) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya; d) KPPP Batang dan sekitarnya; e) KPPP Pemalang dan sekitarnya; dan f) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Pekalongan Tahun 2013-2028, telah ditentukan 4 DPD dan 9 KSPP serta 14 KPPP, dengan kriteria : a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata seperti KSPD dan KPPD; b) Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas serta membentuk jejaring produk dan pola kunjungan wisata; c) Memiliki tema yang mendukung penguatan daya saing; d) Memiliki dukungan aksesibilitas dan infrastruktur mendukung pariwisata; dan e) Keterpaduan rencana sektor terkait.

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas amenitas, perkuatan promosi wisata, dan penyusunan standar prosedur manajemen pariwisata, termasuk dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

2.7.8. Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekolongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.7.9. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondisivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus dan pada tahun 2021 bertambah menjadi tiga kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2020 sebesar 4,69 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 3,60 (per 10.000 penduduk) di tahun 2021, namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang tertangani pada tahun 2021 sebesar 40 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupatan/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kondisi perekonomian terkini sudah semakin membaik, seiring terkendalinya pandemi *COVID-19* di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi kasus harian *COVID-19* yang terus menurun. Dibandingkan dengan kondisi perekonomian di tahun 2019, Indonesia adalah salah satu negara yang sudah keluar dan berada di atas kondisi pra-pendemi. Sebagai contoh, di kuartal pertama 2022 ini, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di atas rata-rata produk domestik bruto (PDB) di tahun 2019. Beberapa negara juga sudah menunjukkan arah pemulihan. Kondisi tersebut merupakan hal yang baik karena akan berdampak positif bagi Indonesia. Namun, masih terdapat risiko yang mungkin harus dihadapi, misalnya kebijakan *Zero Covid Policy* dari Tiongkok dan geopolitik di Rusia.

Selain itu, inflasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi dengan baik. Menurut Kepala BKF, beberapa negara sudah melakukan kebijakan moneter yang cukup kuat. Misalnya Brazil, Rusia, Meksiko, dan Afrika Selatan dalam merespon inflasi dengan kenaikan suku bunga acuannya. Sebaliknya, Amerika, walaupun inflasinya sudah di 8 persen ke atas, tingkat suku bunga kebijakannya belum disesuaikan dengan cepat.

Sementara, saat ini kondisi inflasi di Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan banyak negara, yaitu sebesar 3,5 persen di bulan April atau masih sejalan dengan outlook pemerintah. Meski begitu, Pemerintah akan terus memitigasi dampak inflasi terhadap harga-harga komoditas, baik energi maupun bahan pangan, sehingga inflasi yang tertransmisi ke rumah tangga masih relatif bisa dikelola dengan baik.

Kondisi perekonomian global dan Nasional tentu berpengaruh terhadap perekonomian lokal. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2021 mencapai 3,59 persen. Angka ini naik dibanding tahun 2020 yang terpuruk di angka -1,87 persen. Sementara kondisi inflasi di tahun 2021 mencapai 1,53 persen, masih lebih rendah dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah (1,7 persen) dan Nasional (1,87 persen).

Geliat ekonomi di Kota Pekalongan terus membaik. Sektor-sektor ekonomi unggulan seperti industri pengolahan, batik, pariwisata, aktivitas religi, perdagangan dan jasa dan infrastruktur terus tumbuh. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian menjadi fokus yang digarap Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini sinergis dengan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia sejak awal 2021 dan berlanjut hingga sekarang.

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting

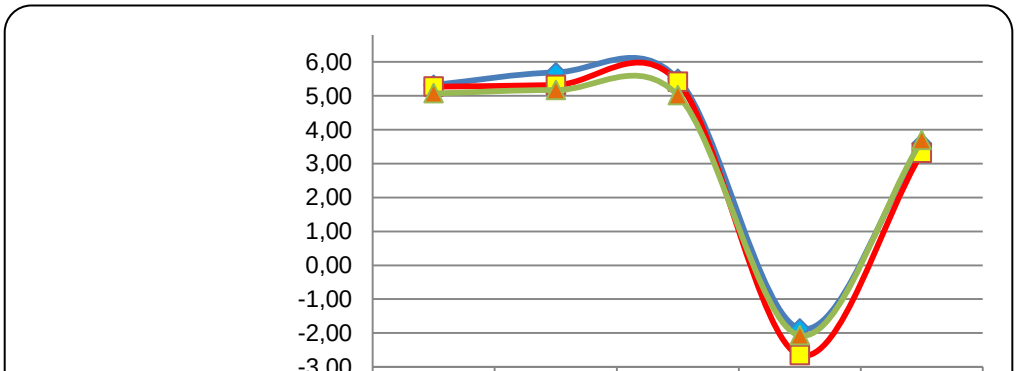
untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 3,59 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	5,32	5,69	5,50	-1,87	3,59
Prov. Jawa Tengah (%)	5,27	5,32	5,41	-2,65	3,32
Nasional (%)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

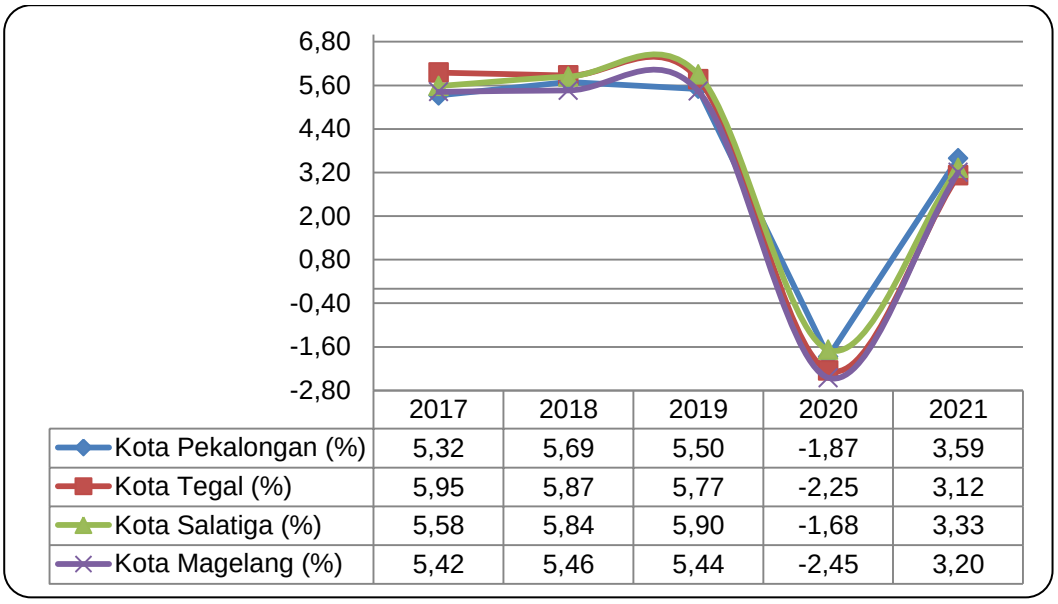
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022 (diolah), 2022

Jika dicermati, ternyata pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional, namun di tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Perekonomian global, nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan yang mulai tumbuh pada tahun 2021 menandakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat mulai tumbuh dari dampak pandemi *COVID-19*. Upaya percepatan pemulihan, khususnya pemulihan ekonomi, harus dilakukan secepatnya sehingga dapat berdampak bagi pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya percepatan pemulihan ini terutama dilakukan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan di Kota Pekalongan. Dengan memanfaatkan sektor unggulan maka diharapkan keterkaitan ekonomi ke depan dan ke belakang (*backward and forward linkage*) membesar sehingga nilai tambah (*value added*) atau nilai produksi barang dan jasa semakin membesar, akhirnya berimplikasi meningkatkan perekonomian Kota Pekalongan, yang direpresentasikan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di paling bawah. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selanjutnya pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tertinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pekalongan (%)	5,32	5,69	5,50	-1,87	3,59
Kota Tegal (%)	5,95	5,87	5,77	-2,25	3,12
Kota Salatiga (%)	5,58	5,84	5,90	-1,68	3,33
Kota Magelang (%)	5,42	5,46	5,44	-2,45	3,20

Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2017 – 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2017-2021. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2021, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,37 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 21,21 persen; dan

lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,51 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap, dalam lima tahun terakhir, yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku, disajikan secara lengkap dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 (persen)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,74	4,67	4,66	5,10	4,80
B	Pertambangan dan Penggalian	–	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,13	20,94	20,85	21,40	21,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,12	0,12
F	Konstruksi	14,39	14,60	14,64	14,60	15,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,78	21,76	21,80	21,16	21,37
H	Transportasi dan Pergudangan	6,32	6,28	6,40	5,04	5,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,39	5,42	5,44	5,32	5,37
J	Informasi dan Komunikasi	4,15	4,21	4,36	5,15	5,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,26	6,27	6,13	6,22	6,24
L	Real Estat	2,68	2,71	2,71	2,74	2,67
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,42	0,44	0,43	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,72	4,58	4,47	4,50	4,18
P	Jasa Pendidikan	4,67	4,75	4,65	4,73	4,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,26	1,29	1,44	1,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,84	1,87	1,90	1,91	1,84
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022, 2022

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 30,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,07 juta rupiah pada tahun

2021. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2017 – 2021

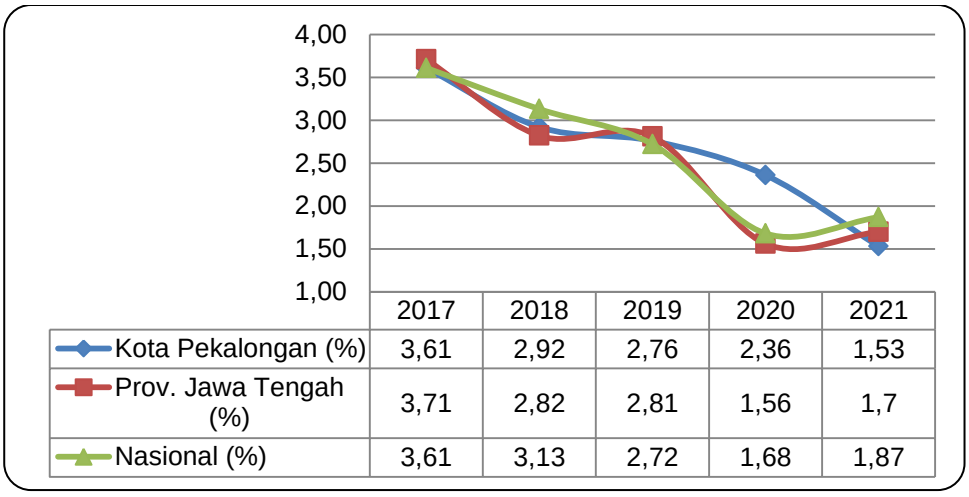
Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53	11.428,32
- ADHK (Miliar Rp)	6.706,27	7.087,92	7.477,43	7.337,83	7.601,49
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	30,72	33,14	35,41	35,22	37,07
- ADHK (Juta Rp)	22,22	23,28	24,35	23,89	24,66
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	8,06	7,86	6,86	-0,53	5,24
- ADHK (persen)	4,40	4,79	4,60	-1,88	3,20

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2022

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2017 – 2021, inflasi di Kota Pekalongan cenderung menurun dari kisaran 3,61 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir. Kondisi ini tentunya lebih menguntungkan untuk peningkatan daya beli masyarakat, karena dampak pandemi *COVID-19* telah berdampak luar biasa bagi perekonomian.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Sumber : www.bps.go.id, 2022

Pada tahun 2021, kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah rekreasi, perawatan pribadi, makanan jadi, dan sandang. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Umum	3,61	2,92	2,76	-	-
Bahan Makanan	4,63	3,66	8,00	-	-
Makanan Jadi	2,46	3,05	1,60	-	2,14
Perumahan	4,02	3,47	0,40	0,33	1,42
Sandang	5,40	2,51	3,31	4,01	2,01
Kesehatan	1,15	0,54	4,75	2,89	0,56
Pendidikan	3,26	1,33	3,74	-2,71	0,06
Transport	3,96	2,43	0,31	1,33	1,01
Perlengkapan	-	-	-	2,70	1,13
Infokom	-	-	-	1,20	-0,64
Rekreasi	-	-	-	6,27	2,62
Restoran	-	-	-	1,76	1,61
Perawatan Pribadi	-	-	-	4,20	2,35

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Munculnya varian Omicron *COVID-19* yang ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.

Namun demikian, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia pasca libur Lebaran tahun 2022 kembali mendapat kabar positif di tengah berbagai dinamika dan tantangan global yang masih mendera tersebut. Tren perkembangan ekonomi nasional saat ini terus berada pada jalur yang tepat karena ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin bergeliat, serta didukung oleh sektor eksternal yang semakin *resilient*.

Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global, pemulihan ekonomi nasional semakin menguat pada triwulan II-2022. PDB nasional tumbuh kuat sebesar 5,44% pada triwulan II-2022 (yoy), melampaui ekspektasi pasar. Pencapaian ini juga semakin memperkuat level perekonomian untuk terus melaju melampaui level prapandemi. Relaksasi aturan perjalanan yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, terutama di masa Ramadhan dan Lebaran, serta kinerja ekspor komoditas unggulan yang masih sangat kuat menjadi faktor kunci pendorong pertumbuhan triwulan ini.

Kondisi ekonomi Nasional tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Pekalongan. Adapun kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain :

1) Menurunnya jumlah kasus *COVID-19* menjadi jalan bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan, jasa dan pariwisata.
2) Akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022 utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong *confidence* masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi.

3) Kebijakan ekonomi yang tepat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, terukur dan efektif, efektivitas implementasi agenda reformasi struktural, baik implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan, upaya menjaga stabilitas harga-harga, utamanya pangan dan energi, dan penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi digital serta berinovasi untuk masa depan.
4) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang saat ini dialokasikan Rp.455,62 Triliun, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi.
5) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rintisan pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana, dan penanganan rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
6) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu :

1) Tingginya harga energi dan harga pangan, ketidakpastian pandemi *COVID-19* dan variannya, isu perubahan iklim, normalisasi kebijakan keuangan dengan naiknya suku bunga negara maju, disrupsi rantai pasok, hingga kenaikan inflasi global yang berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi global dan Nasional.
2) Adanya konflik Rusia-Ukraina juga sangat memengaruhi geopolitik dunia dan menimbulkan ancaman krisis energi dan krisis pangan secara global, sehingga dapat berpengaruh terhadap upaya untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
3) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
4) Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
5) Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
6) Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *COVID-19*, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
7) Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi *COVID-19*. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
8) Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum *COVID-19* terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage*

dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi *COVID-19*.

9) Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
10) Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki *brand* produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
11) Persaingan daya tarik wisata antar daerah yang tersebar melalui media sosial, menuntut Pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan daya tarik wisata.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

1) Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
2) Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kondusivitas wilayah sehingga kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
3) Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
4) Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
5) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
6) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal.
7) Meningkatkan kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
8) Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.
9) Meningkatkan daya tarik wisata pada TWL Pasir Kencana melalui peningkatan akses, layanan dan fasilitas lainnya.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut :

a. Pertumbuhuan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 32,00 persen.

Untuk Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 (y-on-y) sebesar 5,66 persen. Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan II tahun 2022 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 385.116,23 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 261.401,31 miliar.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 89,34 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 10,14 persen.

Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II-2022 dengan kontribusi sebesar 34,13 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,21 persen.

Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 di kisaran angka 2,28-2,84 persen, dan untuk tahun 2023 diproyeksikan di kisaran angka 3,70-4,20 persen. Sementara target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih sesuai dengan proyeksi RPJMD pada tahun 2024 yaitu 2,53-3,32 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,87	3,59	2,28-2,84	3,70 – 4,20	2,53 - 3,32

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2021 bergerak naik dari 74,98 di tahun 2020, menjadi 75,40 di tahun 2021. Capaian di tahun 2021 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 75,10. Dengan upaya percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi serta adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) dari dampak pandemi *COVID-19,* IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 75,52. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,40	75,32	75,60	75,71

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 57,87 di tahun 2021. Angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 58,43. Pada RPJMD Tahun

2021-2026, target IDG dilakukan penyesuaian sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,87	58,78	59,14	59,59

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi *COVID-19* yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan melonjak dari angka 7,17 persen di tahun 2020 menjadi 7,59 di tahun 2021, melebihi dari angka yang ditargetkan di tahun 2021 yaitu 6,94. Melihat kondisi demikian maka pada RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyesuaian target sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Tingkat kemiskinan (persen)	7,17	7,59	6,71	6,50 – 6,45	6,29

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Senada dengan tingkat kemiskinan, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terpaut cukup jauh dengan target yang ditetapkan, yaitu capaian sebesar 7,02 persen dari target 3,60 persen pada penetapan 2020 dan 5,00 persen pada perubahan 2020. Realisasi tahun 2021 sebesar 6,89 persen juga masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 6,84 persen. Hal tersebut membuat Pemerintah Kota Pekalongan harus menyesuaikan target penurunan TPT pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,02	6,89	6,66	6,48 – 6,10	6,31

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi tahun 2021 masih berada pada range

tersebut yaitu 1,53 persen. Sementara untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 ditargetkan 3±1 persen sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Inflasi (persen)	2,36	1,53	3±1	3±1	3±1

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2022

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Resposibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, Perangkat Daerah penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan

tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dihitung berdasarkan :
   a. Perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
   c. Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan :
   a. Perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
   c. Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan estimasi perolehan laba dari BUMD.
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
   a. Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 2 tahun terakhir;
   b. Perkiraan suku bunga BI;
   c. Potensi aset yang disewakan;
   d. Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
   e. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan APBD Tahun Anggaran 2022.
6. Dana Insentif Daerah diasumsikan sama dengan APBD Tahun Anggaran 2022.
7. Dana transfer antar daerah yang meliputi dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan bantuan keuangan Provinsi diasumsikan sama dengan penetapan dalam peraturan Gubernur terakhir.
8. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah selain DID disusun berdasarkan asumsi perhitungan secara proporsional yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan

daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1) *E-monitoring* pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya.Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain :
   - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
   - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
   - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
   - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
   - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
   - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
2) Pemberian *Reward* dan *Punishment*, antara lain :
   a) *Reward* :
      - Penganugerahan Wali Kota Pekalongan Regional *Tax Award* setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
      - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
      - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
      - Pemberian *doorprize*/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada *event-event* yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
   b) *Punishment* :
      - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
      - Penerapan sanksi pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
3) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
4) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui media massa, media cetak, dan tatap muka.
5) Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
6) Implementasi secara bertahap transasksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
7) Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (*tapping box* atau sejenisnya).
8) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun *online*.
9) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
10) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
11) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.

12) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
13) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / Simpatda untuk semua objek pajak daerah.
14) Penyusunan Perda dan Perwal yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
15) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
16) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
17) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*.
18) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito.
19) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
20) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2019-2024 disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024

URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	APBD 2022	RKPD2023	Proyeksi 2024
PENDAPATAN	**971.624.464.121**	**953.155.394.615**	**966.372.557.051**	**956.875.257.000**	**990.014.024.000**	**969.900.012.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**212.777.435.294**	**229.867.935.361**	**252.037.004.472**	**223.246.981.000**	**242.248.392.000**	**241.417.058.000**
Pendapatan Pajak Daerah	87.578.474.262	76.255.221.742	87.382.426.252	87.550.000.000	97.750.000.000	98.450.000.000
Hasil Retribusi Daerah	16.667.656.492	14.870.124.919	14.748.214.704	19.165.390.000	24.867.002.000	19.008.320.000
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.101.173.105	5.821.083.050	5.805.514.149	5.951.841.000	6.473.378.000	6.862.472.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	102.430.131.435	132.921.505.650	144.100.849.367	110.579.750.000	113.158.012.000	117.096.266.000
PENDAPATAN TRANSFER	**734.897.351.238**	**700.838.013.854**	**686.765.223.608**	**733.628.276.000**	**747.765.632.000**	**706.104.314.000**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**643.593.762.948**	**625.666.101.409**	**607.835.271.117**	**635.728.454.000**	**637.762.334.000**	**616.144.097.000**
Bagi Hasil Pajak	17.751.480.700	27.182.869.066	34.377.457.237	24.270.118.000	26.133.436.000	23.583.183.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.275.750.200	1.780.895.008	0	2.543.489.000	2.543.489.000	1.504.841.000
Dana Alokasi Umum	475.842.089.000	433.354.907.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000
Dana Alokasi Khusus	115.463.501.048	104.991.517.335	125.528.550.880	177.818.849.000	177.989.411.000	134.656.335.000
Dana Insentif Daerah	33.260.942.000	58.355.913.000	21.529.525.000	4.696.260.000	4.696.260.000	30.000.000.000
Transfer Pemerintah Provinsi	**91.303.588.290**	**75.171.912.445**	**78.929.952.491**	**97.899.822.000**	**110.003.298.000**	**89.960.217.000**
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	72.167.436.245	63.377.912.445	76.876.982.891	86.446.822.000	74.045.298.000	78.202.217.000
Bantuan Keuangan Provinsi	19.136.152.045	11.794.000.000	2.052.969.600	11.453.000.000	35.958.000.000	11.758.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.949.677.589**	**22.449.445.400**	**27.570.328.971**	**0**	**0**	**22.378.640.000**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.949.677.589	22.449.445.400	24.852.062.887	0	0	22.378.640.000
Pendapatan Hibah	0	0	2.718.266.084	0	0	0

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2022

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2023 dihitung dengan berdasar asumsi sebagai berikut :

1) Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 3,02 persen dibandingkan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
2) Perhitungan gaji pegawai diasumsikan tetap namun memperhatikan kebutuhan tambahan CPNS dan PPPK, serta pensiun pegawai.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit;
2) Upaya meningkatkan layanan pendidikan, secara bertahap dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
3) Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
4) Upaya penanganan banjir/rob secara berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan pengendali banjir/rob oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta upaya untuk menekan pencemaran guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
5) Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*;
6) Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
7) Mendukung program strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2019-2024 disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2019 – 2024

URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	APBD 2022	RKPD 2023	Proyeksi 2024
BELANJA	**954.397.012.827**	**863.280.127.422**	**962.091.792.004**	**998.875.257.000**	**1.029.014.024.000**	**1.070.177.106.000**
BELANJA OPERASI	**771.512.589.320**	**678.982.771.474**	**792.174.652.718**	**825.236.232.000**	**844.598.845.529**	
Belanja Pegawai	390.898.339.975	312.861.230.596	391.695.115.554	410.055.530.000	405.194.236.500	
Belanja Bunga	6.803.500	0	0	0	0	
Belanja Barang dan Jasa	336.953.793.745	327.664.407.878	367.573.741.625	384.028.070.000	413.908.124.887	
Belanja Hibah	30.031.913.000	36.250.151.000	32.149.226.539	28.381.802.000	21.574.310.142	
Belanja Bantuan Sosial	13.621.739.100	2.206.982.000	756.569.000	2.770.830.000	3.922.174.000	
BELANJA MODAL	**182.153.984.579**	**126.926.093.953**	**160.513.725.170**	**167.702.025.000**	**179.440.178.471**	
Belanja Modal Tanah	3.912.172.520	13.144.232.065	11.302.754.180	951.500.000	3.132.548.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.699.453.221	29.045.998.699	37.536.785.604	45.801.097.000	30.196.533.471	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.367.203.715	33.911.226.174	48.754.919.045	35.564.935.000	58.614.107.150	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.876.027.946	50.106.236.575	59.561.969.736	78.207.441.000	82.794.159.206	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.299.127.177	644.610.440	3.357.296.605	7.177.052.000	4.702.830.644	
Belanja Aset Lainnya	0	73.790.000,00	0	0	0	
BELANJA TAK TERDUGA	**730.438.928**	**57.371.261.995**	**9.403.414.116**	**5.937.000.000**	**4.975.000.000**	
Belanja Tak Terduga	730.438.928	57.371.261.995	9.403.414.116	5.937.000.000	4.975.000.000	

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2022

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan.

Rincian pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024

URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	APBD 2022	RKPD 2023	Proyeksi 2024
PEMBIAYAAN	**77.874.259.018**	**104.227.367.651**	**111.045.906.136**	**42.000.000.000**	**39.000.000.000**	**100.277.094.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**92.028.388.994**	**108.747.997.651**	**112.545.906.136**	**48.000.000.000**	**48.000.000.000**	**106.277.094.000**
Penggunaan SiLPA	87.928.207.176	95.101.710.312	112.542.301.590	48.000.000.000	48.000.000.000	92.277.094.000
Pencairan Dana Cadangan	300.000.000	12.704.351.488	0	0	0	14.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.800.000.000	0	0	0	0	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	2.000.181.818	941.935.851	3.604.546	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**14.154.129.976**	**4.520.630.000**	**1.500.000.000**	**6.000.000.000**	**9.000.000.000**	**6.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	4.607.388.226	0	1.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	0
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.742.000.000	4.518.000.000	500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.804.741.750	2.630.000	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2022

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan ***Tahta Untuk Rakyat*** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengekploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang

ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan terkurangi secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Dengan selesainya konstruksi Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan mempunyai wahana wisata baru yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hal ini menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota

Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi

Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJPD yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaqul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu "***Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius***", uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian ibu, bayi dan balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan active dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya pengarusutamaan hak anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayan Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadahi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju

penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi : menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, dengan sasaran meliputi : optimalnya layanan air minum, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi sedekah laut (nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujud melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

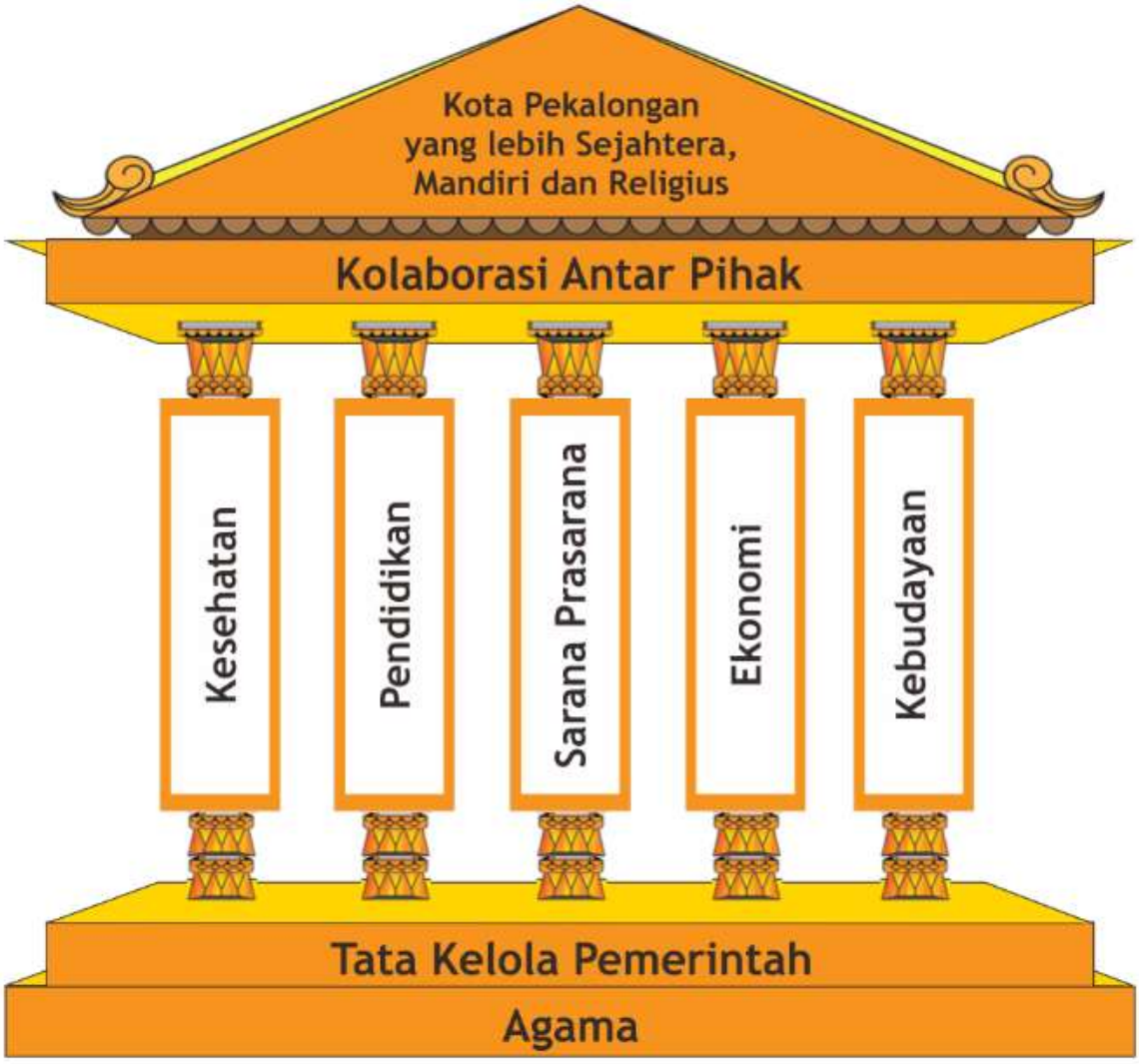
Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan

kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.3. Tujuan Dan Sasaran

4.1.3.1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

a. Meningkatnya akses pendidikan
b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
c. Optimalnya pengarusutamaan gender
d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3. Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4. Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
b. Menurunnya tingkat pencemaran air
c. Optimalnya kualitas lahan
d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang
e. Optimalnya layanan air minum
f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5. Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6. Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

a. Melestarikan Seni Budaya
b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan
b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7. Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026
Visi : "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3 : Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04
		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6 : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69
		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja '*impac*t' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
Misi 3 : Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
	kumuh kurang dari 10 persen	tidak kumuh	tidak kumuh	Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Cakupan jalan dan jembatan lingkungan kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian penataan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK *Outcome*)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6 : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2021

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi : "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualtas jalan lingkungan
Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelasanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan *event* budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan toko masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. endorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
   b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
   c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
   d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
   - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
   - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
   b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
   c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
   d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
   f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
   g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi kesehatan nasional; dan

- MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).

3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
   c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
   d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
   b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
   c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;
   d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
   e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
   - MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
   b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
   c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
   d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
   e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,556,6,08%; dan
   f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
   b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
   c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar
   d. Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
   e. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
   - MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m 3 /detik;
   b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
   c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
   d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
   e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
   - MP transformasi digital;
   - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
   - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
   b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

   a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
      2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
      3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
      4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
      5) Pengembangan industri pendukung EBT.
   b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
      2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
      3) Penyediaan air untuk pertanian;
      4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
      5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air

6) dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan
7) infrastruktur hijau; dan
8) Pengembangan waduk multiguna.

c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) Pengelolaan Impor;
4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri
5) Pengolahan dan Pariwisata; dan
6) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi
7) Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman,
8) Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu :
   1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
   2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
   3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
   4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Sistem jaminan sosial nasional;
   2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
   3) Kesejahteraan Sosial.
c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
   2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
   3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
   4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
   5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
   2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
   3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
   5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
   2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
   3) Kualitas Pemuda.
f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
   2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
   3) Reforma Agraria; dan
   4) Perhutanan Sosial.
g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
   2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
   3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
   4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
    1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
    2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
    3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
    4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
    5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
    6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
    1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
    2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
    3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
    4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
    5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
    2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
    3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
    4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
    5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Peningkatan Budaya Literasi;
   2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

   a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

   a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
      2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
      3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
      4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
      5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
      6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
   b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Konektivitas Jalan;
      2) Konektivitas Kereta Api;
      3) Konektivitas Laut;
      4) Konektivitas Udara; dan
      5) Konektivitas Darat.
   c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Transportasi Perkotaan; dan
      2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
   d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
      2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
      3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
   e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
      2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
      3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

   a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
   c) Pembangunan Rendah Karbon.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

   a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
      2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
      3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
      4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
   b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Penanggulangan Bencana; dan
      2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
   c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
      2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
      3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

   a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
   c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

   a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
      2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
      3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
   b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
      1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan

2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
   2) Transformasi pelayanan publik;
   3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
   4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
   1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
   2) Penguatan Keamanan Laut; dan
   3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada **"Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari"** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, difokuskan pada :
   a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi pertanian (termasuk subsektor peternakan), peningkatan kualitas kelembagaan petani dan peternak berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan melalui subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan database (termasuk data peternakan dan kesehatan hewan), peningkatan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan kawasan peternakan, program Banter Melaju (Paguyuban Peternak Menuju Keluarga Maju), pengendalian penyakit hewan menular strategis, Sekolah Usaha Peternakan Rakyat/SUPRA, serta penyuluhan peternakan;
   b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, peningkatan kelayakan usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, peningkatan angka konsumsi ikan, pengembangan budidaya perikanan berbasis kawasan, pengembangan pelabuhan perikanan dan loka budidaya ikan, pembinaan dan penyediaan sarana usaha garam rakyat, serta pengelolaan kawasan konservasi;
   c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
   d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan berkelanjutan sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pansela;
i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air, pengendalian pemanfaatan air, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, konservasi energi, pemulihan lingkungan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup;
j. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, kajian dan inovasi, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana.

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
   a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah), serta pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, dan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif;
   b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*) serta berbasis pada potensi lokal secara berkelanjutan, utamanya melalui penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pelatihan, fasilitasi kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan perlindungan;
   c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesos dalam keperantaraan penyediaan

layanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor;

d. Pengurangan pengangguran dengan membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas calon tenaga kerja, dan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja.

3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, difokuskan pada :
   a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
   b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
   d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, difokuskan pada :
   a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif; sarana pelayanan publik yang inklusif; *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik; dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
   c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja;
   d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;

e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD..

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai di tahun 2023 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51-9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63-4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-5,60 persen;
7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 ditujukan untuk "***Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan***", dengan arah kebijakan meliputi :

1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan fokus pada peningkatan layanan dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi terhadap kematian ibu, bayi dan balita, penurunan angka stunting serta pembudayaan GERMAS guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha, dengan fokus pada perluasan jangkauan jaminan sosial bagi penduduk miskin.
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada :
   a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendampingan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah;
   b. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha, dengan fokus pada optimalisasi kurikulum pelatihan dan penentuan sasaran pelatihan kerja di BLK serta peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perluasan kesempatan kerja.

5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dengan fokus pada :
   a. Peningkatan peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan keluarga;
   b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelurahan layak anak.
6. Pemantapan kerjasama dengan *stakeholder* potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada revitalisasi kawasan kumuh prioritas di wilayah Pekalongan Utara.
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan fokus pada :
   a. Penataan infrastruktur drainase di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, operasional dan pemeliharaan sistem pengendali banjir dan rob, serta penataan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
   b. *Pilot project* penerapan produksi bersih pada sentra industri batik;
   c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada :
   a. Pembangunan jaringan distribusi dan perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
   b. Pengoptimalan sarpras dan kelembagaan pengelolaan persampahan di TPS3R dan perluasan TPA secara bertahap yang disertai dengan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
   c. Lanjutan pembangunan skeleton kawasan Pekalongan Baru dan rintisan akses jalan ke pelabuhan *onshore*.
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing, dengan fokus pada optimalisasi kelembagaan destinasi wisata laut dan destinasi wisata berbasis masyarakat.
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan *event* seni dan budaya, dengan fokus pada penguatan dan pengembangan kelompok seni dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan pelibatan stake holder yang diwujudkan dalam penyelenggaraan event budaya sebagai bagian dari peningkatan industri pariwisata.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada edukasi keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada :
   a. Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada aspek-aspek integrasi penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, manajemen kepegawaian, serta penguatan kualitas pelayanan di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan;

b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;
c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM;
e. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, implementasi roadmap *merit system*.

Memperhatikan kondisi global, nasional, regional, tantangan dan upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19* serta pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,70 – 4,20 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,50 – 6,45 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,60;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,48 – 6,10 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2023. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan		8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit				
Peningkatan layanan dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi terhadap kematian ibu, bayi dan balita, penurunan angka stunting serta pembudayaan GERMAS guna pencegahan dan pengendalian penyakit	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,92 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,91 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 116,21 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha				
Perluasan jangkauan jaminan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,00%	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas				
a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendampingan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah; b. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,43 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha				
Optimalisasi kurikulum pelatihan dan penentuan sasaran pelatihan kerja di BLK serta peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,54%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)				
a. Peningkatan peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan keluarga; b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelurahan layak anak.	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,14	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh				
Revitalisasi kawasan kumuh prioritas di wilayah Pekalongan Utara	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	93,72%	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup				
a. Penataan infrastruktur drainase di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, operasional dan pemeliharaan sistem pengendali banjir dan rob, serta penataan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat; b. Pilot project penerapan produksi bersih pada sentra	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	1.072,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	2. Indeks Kualitas Air	35,36	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
industri batik; c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	3. Indeks Kualitas Lahan	23,603	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
a. Pembangunan jaringan distribusi dan perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
b. Pengoptimalan sarpras dan kelembagaan pengelolaan persampahan di TPS3R dan perluasan TPA secara bertahap yang disertai dengan penguatan literasi	2. Persentase pelayanan sampah	70,12%	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
pengelolaan persampahan kepada masyarakat; c. Lanjutan pembangunan skeleton kawasan Pekalongan Baru dan rintisan akses jalan ke pelabuhan onshore.	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	97,20%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing				
Optimalisasi kelembagaan destinasi wisata laut dan destinasi wisata berbasis masyarakat.	Pertumbuhan ekonomi	3,70-4,20%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya				
Penguatan dan pengembangan kelompok seni dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan pelibatan stake holder yang diwujudkan dalam penyelenggaraan event budaya sebagai bagian dari peningkatan industri pariwisata.	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	91,11%	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah				
Edukasi keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik				
a. Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada aspek-aspek integrasi penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, manajemen kepegawaian, serta penguatan kualitas pelayanan di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan; b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik; c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM; e. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, implementasi roadmap *merit system*.	1. Indeks SPBE	2,95	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	2. IKM Kota	83,64	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	96,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	74,57	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	240,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
	7. Maturitas SPIP	3,40	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan arah kebijakan Nasional tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
				4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
				3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
				5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
				9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
				7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
				12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

Keterkaitan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pekalongan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Peraturan Presiden ini ditetapkan didasarkan kondisi bahwa percepatan pembangunan ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program, dan antar wilayah.

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 19 usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp 6.430 M. Adapun dari 19 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 15 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 4.100 M; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 630 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 200 M; dan (4) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp1.500 M. Program/kegiatan di Kawasan Petanglong yang terkait atau berdampak langsung dengan wilayah Kota Pekalongan, meliputi:

a. Pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan
b. Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan
c. Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab.Pekalongan dan Kota Pekalongan
d. Pengendalian banjir dan rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang
e. Penyempurnaan sistem banjir dan rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan
f. Pengembangan SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan
g. Pembangunan TPST Regional, Kab. Pekalongan
h. Pengembangan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan
i. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak, Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir dan rob di wilayah Kota Pekalongan telah, sedang dan akan terus dilaksanakan. Pada beberapa tahun lalu, Pemerintah Pusat telah membangun tanggul laut di wilayah Kota Pekalongan. Upaya penanganan banjir dan rob oleh Pemerintah Pusat saat ini terus dilanjutkan, terutama pembangunan bendung gerak, pembangunan *seawall* dan pembangunan parapet, yang diintegrasikan rencana pembangunan pelabuhan onshore. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pusdataru, Pemerintah Kota Pekalongan dan Program KOTAKU juga terus diarahkan dalam penanganan banjir dan rob yang disinkronkan dengan Pemerintah Pusat.

Pembangunan SPAM Regional Petanglong terus dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air minum Kota Pekalongan karena keterbatasan sumber air baku di wilayah Kota Pekalongan.

Pengembangan TOD Stasiun Pekalongan saat ini telah disusun Desain Pengembangan TOD Center dan menunggu untuk tahapan selanjutnya yang rencananya akan dilaksanakan oleh BUMN. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PT. KAI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian PUPR. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak, Kota Pekalongan saat ini telah disusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), selanjutnya menunggu untuk tahapan berikutnya.

Seluruh rencana implementasi progam dan kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tersebut, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, sekaligus mendorong penanganan banjir dan rob serta penyediaan prasarana sarana perkotaan yang semakin berkualitas di Kota Pekalongan. Penanganan banjir dan rob serta peningkatan infrastruktur dasar perkotaan merupakan isu strategis pembangunan Kota Pekalaongan. Peran Kota Pekalongan, dalam lingkup internal maupun eksternal, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi program dan kegiatan tersebut.

4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan untuk RKPD Tahun 2023 meliputi :

1. Bidang Pendidikan
    a. Peningkatan kualitas
    b. Penyesuaian sietem pendidikan pasca *COVID-19*
    c. Pengembangan pendidikan
    d. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah (rob)
2. Bidang Kesehatan
    a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
    b. Peningkatan pelayanan RSUD Bendan
    c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat
    d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita
    e. Kewaspadaan penyakit menular
3. Bidang Ekonomi Sosial
    a. Pelatihan dan *workshop* berbasis IT
    b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
    c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif
    d. Menyediakan kesempatan kerja
    e. Penanggulangan bahaya narkoba
    f. Penegakan peraturan perundang-undangan
    g. Tanggap & paska bencana
4. Bidang Infrastruktur
    a. Peningkatan keamanan akses jalan
    b. Pembangunan pasar Banjarsari
    c. Pembangunan drainase, normalisasi sungai
    d. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman
    e. Pelayanan pengolahan air limbah domestik
5. Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum
    a. Penertiban pengamen dkk
    b. Pelayanan pencegahan banjir
    c. Penataan perparkiran
    d. Penataan pedagang K5
    e. Penertiban praktik judi
6. Bidang Permukiman
    a. Program pembersihan permukiman
    b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
    c. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi relokasi
    d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
    a. Penyusunan APBD dilakukan dengan tepat waktu

b. Peningkatan kapasitas ASN

4.2.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan Daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi local. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Walikota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Walikota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan Road Map SIDa yan melingkupi Kondisi SIDa saat ini, Tantangan dan peluang SIDa, Kondisi SIDa yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDa dan Rencana aksi penguatan SIDa.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDa yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDa, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDa dengan RPJMD,, melakukan sinkroniasi, harmonisasi dan sinergi SIDa, mempersiapkan rumusaan kebijakan penyelenggaraan SIDa, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDa,melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDa.

Dalam hal penyelenggaraan SIDa, Peraturan Walikota memperkuat munculnya Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDa secara rutin. Evaluasi Penyelenggaran SIDa dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDa dan sebagai tolak ukur kemajuan SIDa. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga focus menyelenggarakan fungsi kelitbangan pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompetisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada Tahun Perencanaan N+1. Pada Tahun 2022, telah dikompetisikan tema riset tentang penanganan banjir dan rob, peningkatan kualitas air hidup, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Diharapkan dengan tema tersebut, kebijakan yang diambil telah berdasarkan riset yang cukup aktual.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Seiring dengan penyusunan perencanaan Tahun 2023 tentang berbagai program infrastuktur, Pemerintah Kota Pekalongan sedang menjajagi riset tentang mitigasi lahan pertanian pasca banjir dan rob, adaptasi dan mitigasi masyarakat kawasan terdampak banjir dan rob, pengolahan limbah batik melalui teknologi inovatif, dan lain-lain. Hal ini diperlukan sehingga ketika program infrastruktur telah dilaksanakan secara maksimal, proses selanjutnya bersama masyarakat telah siap diimplementasikan karena telah didukung dengan riset yang matang. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

Kota Pekalongan juga berusaha mendukung inovasi yang sudah disusun dengan menerapkannya secara berkelanjutan, dimana inovasi yang masih relevan akan terus digunakan dan dikembangkan lebih lanjut di tahun 2023, antara lain :

1. SIMANTAP BISA (Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis E-Presensi dan E-Kinerja) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang dikembangkan BKPSDM di Tahun 2021 masih relevan digunakan pada Tahun 2023 dengan pengembangan fitur-fitur lainnya serta penyesuaian pada aturan kepegawaian yang berlaku.
2. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa (SIM PBJ), yang disusun oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2020, masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan serta disesuaikan dengan update peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini.
3. Omahe Ndewe, Inovasi yang disusun di Tahun 2022 dan telah digunakan dalam pendataan rumah khususnya pada data infrastruktur, rencananya akan dikembangkan lebih lanjut di tahun 2023 untuk pendataan sosio-ekonomi dengan menggunakan basis data rumah yang telah didata di tahun 2022. Selanjutnya, secara bertahap pendataan mikro pada jenis data lainnya dapat dikembangkan melalui penambahan variable.
4. Aplikasi e-UMK (e-Uang Muka Kegiatan) yang pengembangannya dilakukan di tahun 2021, masih akan digunakan dan dikembangkan fitur-fiturnya lebih lanjut sesuai kebutuhan dan peraturan keuangan yang berlaku. Diharapkan juga aplikasi ini dapat digunakan oleh OPD lain untuk memudahkan bendahara dan bendahara pembantu dalam hal pengadministrasian kegiatan, dan memudahkan PPTK dan PA dalam monitoring capaian anggaran kegiatan.

5. Tools Cascading Kinerja, yang pada Tahun 2021 dalam rangka penyusunan struktur kinerja dari Visi-Misi Walikota sampai dengan sub kegiatan pada OPD, masih akan dikembangkan lebih lanjut pada fitur evaluasinya, tidak hanya pada aspek perencanaan. Hal ini akan mempermudah proses evaluasi atas kinerja dalam laporan kinerja kepala daerah ataupun kepala OPD.
6. Aplikasi Peminjaman Ruang Setda, yang disusun Bagian Umum Setda, masih relevan untuk pengelolaan peminjaman ruang di lingkungan Setda dan akan dikembangkan lebih lanjut pada peminjaman kendaraan, dan aset-aset setda lainnya sehingga dapat menunjang pelaksanaan koordinasi antar OPD menjadi lebih baik.
7. Aplikasi SISTRAMAS yakni aplikasi Pelayanan Tramtibumlinmas yang disusun Satpol PP pada tahun 2021 untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi dan sinergi antar stakeholder tramtibumlinmas (Satpol PP, Kasi TRamtib Kecamatan, Kasi Tramtib Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Kader Siaga Tramtib, Linmas Kelurahan, Polsek, Koramil, dll), akan dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas, misalnya terkait pelaporan ganggunan anak-anak punk, anak jalanan, ODGJ serta diintegrasikan dengan sistem pengaduan tingkat kota (call center 112). .
8. SIMPOKAL (Sistem Manajemen Parkir Online Kota Pekalongan), yang disusun di tahun 2021 oleh Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan bank Jateng masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan di tahun 2023. Hal ini dilakukan karena system ini sudah mempermudah pelayanan dan terintegrasi dengan baik secara teknologi informasi maupun fasilitas perbankannya.
9. SIPEPOKMAS,merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021. Inovasi ini mempermudah penyebarluasan dan pemantauan harga pokok ke masyarakat. Inovasi ini masih relevan untuk dipertahankan dan diperluas jangkauan layanannya di tahun 2023, sesuai dengan kebutuhan dan target pelayanannya.
10. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Pekalongan, merupakan inovasi perluasan fitur JDIH di Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan di Tahun 2021. Inovasi ini cukup membantu pelayanan penyebarluasan informasi hukum pada masyarakat sehingga inovasi ini relevan untuk dipertahankan/dikembangkan serta diintegrasikan dengan system informasi lain di Bagian Hukum Setda.
11. SIEMON-KIR / SIM-PKB, merupakan inovasi dari Dinas Perhubungan pada tahun 2021. Layanan ini mempermudah proses KIR atau Pengujian Kendaraan Bermotor bagi masyarakat Kota Pekalongan. Layanan ini penggunanya cukup luas dan berpengaruh terhadap PAD sehingga inovasi ini relevan untuk dipertahankan di tahun 2023 serta dapat dikembangkan atau diperluas lagi sasaran sesuai dengan kebutuhan pada tahun-tahun mendatang.
12. Klinik SPIP adalah klinik konsultasi di Inspektorat yang disusun di tahun 2022, masih akan dikembangkan dengan memperluas cakupan dan materi layanan inspektorat selain SPIP.
13. Pelayanan Jasa Kependidikan Bagi Guru TPQ dan Madin di Kota Pekalongan merupakan inovasi pelayanan oleh bagian kesejahteraan umum sekretariat daerah Kota Pekalongan. Pelayanan jasa kependidikan bagi guru TPQ dan Madin di Kota Pekalongan dapat dilakukan secara online sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan. Guru TPQ dan Madin dapat mengajukan proposal permohonan intensif jasa secara online, yang kemudian akan diproses oleh petugas.
14. SAPA ORGANISASI adalah inovasi dari bagian organisasi untuk pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait tata laksana organisasi perangkat daerah

dan kegiatan teknis lainnya dari bagian organisasi dengan tidak bertatap muka langsung namun melalui aplikasi website.

15. Sistem Informasi Nomor Register (sinoreg) adalah sistem pemberian nomor regulasi produk hukum di kota pekalongan, digunakan oleh internal bagian hukum, sistem ini juga akan bisa melacak proses penyusunan SK, perwal dan perda oleh OPD, sehingga dapat ditelusur status pemrosesan dokumen.
16. E-TPI merupakan aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan bekerjasama dengan Bank Jateng. Dengan aplikasi e-tpi pembayaran retribusi kapal dan peserta lelang di TPI kota Pekalongan menjadi lebih teratur dan lebih tercatat, sehingga tidak hanya mempermudah pembayaran tapi juga meminimalkan penyalahgunaan.
17. e-Monitoring Pajak Daerah (EMot PakDe) yang merupakan inovasi dari BPKAD di tahun 2020 untuk monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti : tapping box dan sejenisnya. Inovasi ini masih relevan dan masih akan dikembangkan untuk penambahan fitur dan peraturan yang lebih tinggi sehingga keterjangkauan layanan dapat menjadi lebih luas.
18. Layanan Konseling Pendidikan (LAKONDIK) yang merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2020 untuk memberikan layanan untuk membantu pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus, masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut melalui perluasan stakeholder dan tambahan sasaran penggunanya. Dengan pelibatan sumber daya manusia berupa tenaga pegawai sebagai Guru Pendamping Khusus, mitra psikolog, lembaga kesehatan, dan dinas terkait yang lebih luas. juga sumber daya fasilitas berupa ruang konseling, ruang baca masyarakat dan ruang laktasi.
19. Dolan PAUD (Wadol Anak PAUD) merupakan Inovasi dari Dinas Pendidikan, yang artinya berkunjung atau bermain ke PAUD, yakni Kunjungan Bunda PAUD, Tim PAUD tingkat kota dan OPD ke sekolah PAUD di Kota Pekalongan untuk menerima keluh kesah dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran di tingkat PAUD.
20. Wadul Aladin (Wadul Aaf Salahudin) yang merupakan layanan pengaduan langsung ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dikembangkan Diskominfo pada Tahun 2021 masih dinilai sangat relevan untuk digunakan di Tahun 2023. Hal ini disebabkan popularitas penggunanya yang cukup tinggi.
21. Si BEMBI naik BEMO merupakan aplikasi yang disusun RSUD pada tahun 2021, melalui pengembangan terbaru adanya penambahan menu panggilan darurat yang langsung terhubung ke call center BEMBI (*Bendan Emergency Mobile*) yaitu merupakan layanan penjemputan pasien gawat darurat oleh tenaga yang berkompeten dimana pasien dijemput dengan ambulance BEMBI, langsung ditangani kegawatan ditempat untuk selanjutnya dibawa ke IGD RSUD Bendan. Aplikasi ini masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut mengingat respon penerima manfaat cukup baik dan jumlahnya cukup banyak.
22. Tombol Panik Ambulance Rakyat (*Panic Button*) yang dibangun tahun 2021 merupakan aplikasi berbasis android untuk peningkatan layanan kegawatdaruratan medis dengan menggunakan tombol panik yang keberadaannya merupakan Sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta di Kota Pekalongan. Aplikasi ini masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan melalui penambahan fitur sesuai dengan kebutuhan
23. E-Rekam Medis, yang merupakan aplikasi yang dikembangkan RSUD Bendan pada tahun 2021 sebagai upaya pelayanan kepada pasien dan dokter di lingkungan RSUD

Bendan. Inovasi ini digunakan pada seluruh pasien sehingga kemanfaaatan penggunanya cukup luas. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

24. Saber AKI-AKB (Sapu Bersih Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi), yang merupakan inovasi kebijakan yang dibangun di Tahun 2020, merupakan inovasi yang cukup membantu pengurangan kasus kematian ibu dan bayi melalui screening atau pemeriksaaan yang terintegrasi antar stakeholder. Inovasi ini masih relevan untuk dipertahankan dan dikembangkan serta diperluas jejaringnya, sehingga kemanfaatan yang diterima masyarakat lebih luas jangkauannya.
25. Aplikasi Siulan Mas (Sistem Informasi Usulan dan Pengaduan Masyarakat), yang dikembangkan di Tahun 2021 untuk meringkas alur birokrasi penanganan pengaduan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Sosial. Aplikasi ini masih relevan dipertahankan penggunaan dan pengembangan fitur-fitur baru sesuai kebutuhan.
26. Layanan APEL JOS yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil pada tahun 2021 untuk Layanan jemput bola KTP Eleketronik untuk Anak Sekolah/ Pelajar, Jompo dan Orang Sakit/Difabel) ini untuk membantu penduduk yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan KTP Elektronik. Layanan ini masih relevan untuk dipelihara keberlanjutannya untuk mempermudah pelayanan public bagi semua kalangan.
27. Sistem ApliKasi Perizinan Online Ringkas & Ekonomis (SAKPORE) yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan akan dikembangkan menjadi new SAKPORE (mulai tahun 2022) dengan fitur-fitur baru yang bermanfaat seperti: Peta Tata Ruang, Peta Reklame, Survey Online, Notifikasi Whatsapp gateway, terintegrasi dengan SisDMK Kementerian Kesehatan RI, Pengaduan Online danTanda Tangan Elektronik.
28. Si AaP yang merupakan inovasi Siap Antar Pelayanan (Si_aAP) dari Kecamatan Pekalongan Barat di tahun 2021 masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
29. Ra Kesel M'laku (ApaRAt KEcamatan SELatan Memberikan LAyanan Antar DoKUmen) yang dikembangkan di Tahun 2021, merupakan layanan dari kecamatan Pekalongan Selatan dalam mengantar jemput dokumen administrasi bagi masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
30. SeBaR_in merupakan inovasi non digital dari Kecamatan Pekalongan Barat di tahun 2021 untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Pekalongan Barat dan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat selama sepekan. Penyebarluasan informasi ini sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam tugas-tugas kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan publik. Inovasi ini masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
31. Silancar = SI AAP Lacak & Antar adalah inovasi pelayanan oleh Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2022 untuk mempermudah layanan adminduk dan non adminduk bagi warga di Kecamatan Pekalongan Utara dan memantau progress layanan secara online. Inovasi masih relevan dan akan dikembangan lebih lanjut fitur-fiturnya di Tahun 2023.
32. Rekom BBM, yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Tahun 2022 merupakan inovasi non digital yang mempermudah dan mempercepat nelayan untuk mendapat pelayanan mendapatkan surat Rekom Pembelian Jenis BBM Tertentu

dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa dipungut biaya (gratis). Inovasi ini relevan untuk dikembangkan lebih lanjut.

33. Oops Mami (Omah Olah Pilah Sampah MAndiri dan berekonoMi), yang dikembangkan di Tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah sekaligus mengembangkan nilai ekonomi atas sampah. Inovasi ini sangat penting untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut mengingat problematika sampah di Kota Pekalongan sudah krusial.
34. Esa Pertama Kuljar merupakan inovasi kebijakan untuk penerapan kultur jaringan di Kota Pekalongan di tahun 2020 yang dikembangkan di Dinas Pertanian dan Pangan. Inovasi ini masih relevan untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
35. Bank Pekalongan sebagai salah satu BUMD Kota Pekalongan terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan sistem android untuk mempercepat pelayanan dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Salah satunya yaitu dengan Virtual Account (VA) Bank Pekalongan untuk mempermudah transaksi nasabah dari Bank Umum dan penggunaan QRIS Bank Pekalongan untuk pembayaran non tunai diberbagai macam tempat.
36. E-ticketing Museum Batik adalah sistem penjualan tiket secara online, menggunakan aplikasi sehingga penjualan tiket museum batik lebih terpantau dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung karena kemudahan membeli tiket.
37. QRIS ticket Museum Batik adalah metode pembayaran non tunai untuk pembelian tiket di museum batik, dapat meminimalkan penyalahgunaan penjualan tiket dan mempermudah pengunjung untuk pembelian tiket.
38. E-catalog Museum Batik merupakan upaya dari museum batik untuk membuat data base koleksi benda – benda yang terdapat didalam museum batik Kota Pekalongan. E-katalog ini dapat mempermudah akses bagi pengunjung untuk melihat koleksi museum batik secara online.
39. SIPOLOMAS (Sistem Informasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membuat database Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (sebagai sarana interkoneksi beberapa SKPD) dan meningkatkan pelayanan proses pembuatan ijin pendirian partai politik dan organisasi masyarakat.

Sebagai sebuah inovasi kebijakan, dukungan atas pelaksanaan ini dilakukan secara terencana dimana setiap tahun OPD terkait mendapatkan dukungan pendanaan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, ataupun koordinasi lainnya. Diharapkan inovasi ini terus ditingkatkan ruang lingkup data yang diintegrasikan, sehingga dapat terwujud data yang berkualitas, single, dapat dipertanggung jawabkan dan bernilai manfaat yang luas.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program Tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2023, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian SPM pendidikan sebesar 83,97 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

5.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan ketersediaan sarpras dan alat kesehatan di RSUD, penyediaan layanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, dan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 90 persen, persentase RS rujukan tingkat

kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar sebesar 80 persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 65 persen, persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 94 persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 45 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 persen, persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran sebesar 96 persen, dan persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 96 persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga sehat sebesar 92 persen.

5.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 93,10 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kota, untuk memperluas pelayanan Sambungan Rumah (SR). Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 88,39 persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dalam rangka menaikkan penanganan dan pengurangan sampah, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan sarana persampahan regional sebesar 40 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah dalam rangka menaikkan cakupan layanan layak dan cakupan layanan aman, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan

pengelola air limbah di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*) sebesar 11,07 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi system drainase perkotaan dan drainase lingkungan, dalam rangka mengurangi luasan genangan, serta pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan pengelola drainase di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 68,47 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah penyelenggaraan perijinan bangunang gedung, guna terpenuhinya keandalan konstruksi bangunan gedung dan kelaikan fungsi bangunan gedung, dengan didukung oleh SDM penyelenggara bangunan gedung yang profesional. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio kepatuhan PBG kab/kota sebesar 17,84 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan kota untuk menaikkan tingkat kemantapannya. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kemantapan jalan kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 83,30 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan tenaga konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 13,20 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) dan legalisasi melalui Peraturan Walikota. Indikator yang akan dicapai yaitu yaitu persentase penetapan rencana tata ruang kab/kota sebesar 100 persen.

5.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), masyarakat terdampak bencana dan terdampak pembangunan infrastruktur kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 91,35 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah pengurangan luasan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu luas kawasan permukiman kumuh sebesar 291,47 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru diluar kawasan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 1.856,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah penyediaan PSU perumahan untuk mendukung aktifitas sehari-hari penghuni perumahan. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 14,48 persen.

5.1.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perda dan perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 64 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 58 Persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial sebesar 56,69 persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pemeliharaan taman makam pahlawan sebesar 100 persen.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 0,42 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 23,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 46,80 persen.

5.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan kabupaten/kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 5,55 persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 23,99 persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 33,33 persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 persen.

5.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,40 persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 83,20 persen.

5.1.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 persen.

2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindaklanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tindak lanjut penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebesar 50 persen.

5.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) atas dokumen perencanaan jangka panjang/menengah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 20 persen.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 40,95 persen.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,919 persen.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan hidup sebesar 50 persen.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75 persen.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengelolaan sampah sebesar 0,28 persen.

5.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 83,53 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,55 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 9 OPD.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 50 persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 59,26 persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,35 persen.

5.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 7,80 persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 15 persen.

5.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 92 persen, kinerja lalu lintas kab/kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, persentase peningkatan jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,75 persen.

5.1.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerinatah, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi dengan indeks sebesar 3,00.

5.1.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 30,94 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 58,31 persen.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan UMKM menjadi lebih mandiri dan peningkatan omzet UMKM. Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya usaha mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,06 persen.

5.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu penambahan peraturan fasilitas/insentif di Bidang

penanaman modal yang Menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 1 dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2.500 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai invetasi baru pertahun sebesar Rp.6.680.000.000.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 100 persen.

5.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase organisasi kepemudaan yang dibina sebesar 93,69 persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggafraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor sebesar 34,29 persen.

5.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 persen.

5.1.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan sebesar 2,80 persen.

5.1.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya sebesar 100 persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 92,20 persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfataan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengunjung museum batik sebesar 4,66 persen.

5.1.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio pengunjung perpustakaan per tahun (penduduk usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 16,09.

5.1.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 46,67 Persen dan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti

yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 45,00.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah peningkatan produksi perikanan tangkap, dengan menaikkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, pemberdayaan nelayan kecil, serta kesiapan berperan serta dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan *on shore*. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI sebesar 1 persen dan peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar 1 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, dengan penyediaan sarana-prasarana pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudi daya kecil, serta penyiapan diversifikasi produk perikanan. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 1 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan jumlah pengusaha perikanan sebesar 12,20 persen dan pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

5.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah peningkatan pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 11 persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 31,98 persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 30,30 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 40 persen.

5.1.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.671.720.000 dan nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 191.907.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 50 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

5.1.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai

dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 75,42 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 81,25 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya sebesar 88 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,60 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 77,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) sebesar 4,26 persen.

5.1.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 20,43 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 24 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui sistem informasi industri nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengeloaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, persentase raperda menjadi peraturan daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, pertanian, perikanan, kelautan, ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 persen, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6 persen, dan persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa sebesar 100 persen.

5.1.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitasi anggota legislatif dan fasilitasi penjaringan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 persen, persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemsosbud sebesar 100 persen, persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian sebesar 100 persen, dan

persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur wilayah sebesar 100 persen.

5.1.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 8,08 persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengeloaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu indeks pengelolaan aset baik (persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5 persen.

5.1.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *assesment center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase PNS berkembang karier sebesar 50 persen, tingkat pelaporan kinerja ASN sebesar 100 persen, persentase keterisian jabatan sebesar 90 persen, dan persentase keterpenuhan formasi ASN sebesar 80 persen.

5.1.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan

Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

5.1.5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase litbang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, skor capaian nilai RiDA (SiDA) sebesar 73 persen, dan persentase pemberdayaan *stakeholder* kelitbangan sebesar 100 persen.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu level kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3,00.

5.1.7. Unsur Kewilayahan

5.1.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah timur sebesar 100 persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat

kecamatan / kelurahan di wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah timur sebesar 100 persen, serta persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja trantibum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja trantibum wilayah timur sebesar 100 persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan di kecamatan). indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah timur sebesar 100 persen.

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.1.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 100 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

5.1.9. Non Urusan

5.1.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen, persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan sekretariat daerah sebesar 100 persen dan persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100 persen.

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.492.279.000**							**279.562.877.000**	
1.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**159.435.929.000**						100 persen	**167.327.264.000**	
1.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**90.550.000**						100 persen	**149.683.000**	
1.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 dokumen	3.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 dokumen	2.683.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	84.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	144.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen perhitungan capaian SPM Pendidikan yang tersusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok RTP, 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
1.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**157.665.631.000**						100 persen	**165.773.986.000**	
1.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	157.132.881.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	14 kali	165.241.236.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	529.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	529.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	3.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	1 dokumen	3.750.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan	100 persen		100 persen	100 persen	**88.767.000**						100 persen	**86.312.000**	
1.1.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan				93 laporan	88.767.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	93 laporan	86.312.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**8.632.000**	
1.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Karnaval batik dan hari jadi				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 kali	8.632.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**647.272.000**						100 persen	**559.124.000**	
1.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	10.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	151.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	110.124.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				8 unit							8 unit		
1.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	11.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	72.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	11 bulan	72.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	13.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	3.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				175 org/kl	145.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	175 org/kl	150.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah fasilitasi dukungan SPBE yang dilaksanakan				12 bulan	240.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	190.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**664.941.000**						100 persen	**558.078.000**	
1.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	7.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	320.841.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	272.778.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	337.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	278.300.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**269.268.000**						100 persen	**191.449.000**	
1.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				37 unit	69.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	37 unit	50.449.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				40 unit							40 unit		
1.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				4 unit	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	4 unit	91.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	50.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen		76,37 persen	83,97 persen	**73.763.780.000**						83,97 persen	**96.484.096.000**	
1.1.2.02.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	100 persen		93.49 persen	97.5 persen	**35.767.496.000**						97.5 persen	**38.861.916.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.02.01.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	550.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	4 Ruang	-	Dinas Pendidikan
1.1.2.02.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah fasilitas parkir SD/MI yang dibangun				2 ruang	573.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	2 ruang	1.373.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah halaman SD/MI yang ditinggikan				3 ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				3 ruang		
		Jumlah kantin SD/MI yang dibangun				2 ruang							2 ruang		
		Jumlah KM/WC SD/MI yang dibangun				20 ruang							20 ruang		
		Jumlah lapangan olahraga SD/MI yang dibangun				2 ruang							2 ruang		
		Jumlah pagar SD/MI yang dibangun				2 ruang							2 ruang		
		Jumlah ruang ibadah SD/MI yang dibangun				2 ruang							2 ruang		
1.1.2.02.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD/MI yang direhab				60 ruang	6.600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	SD	60 ruang	5.749.467.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.2.02.01.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	371.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Ruang	1.660.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang guru SD/MI yang direhab				6 ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				6 ruang		
		Jumlah ruang kepala SD/MI yang direhab				2 ruang							2 ruang		
1.1.2.02.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2.150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Ruang	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang perpustakaan SD/MI yang direhab				8 ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				8 ruang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.02.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah fasilitas parkir SD/MI yang direhab				1 pekerjaan	266.592.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	1 pekerjaan	555.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah KM/WC SD/MI yang direhab				20 ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				20 ruang		
		Jumlah lapangan olahraga SD/MI yang direhab				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
		Jumlah mushola SD/MI yang direhab				3 gedung							3 gedung		
		Jumlah pagar SD/MI yang direhab				3 pekerjaan							3 pekerjaan		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
1.1.2.02.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				0 Paket	88.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Paket	177.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga sekolah				71 SD							71 SD		
1.1.2.02.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	143.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	SD	0 Paket	355.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SD yang difasilitasi Pengadaan Perlengkapan Sekolah				71 SD					disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		71 SD		
1.1.2.02.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Unit	205.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Unit	300.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				3000 siswa							3000 siswa		
1.1.2.02.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	710.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Unit	710.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi pemeliharaan rutin bangunan gedung sekolah				71 SD							71 SD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.02.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	50.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Unit	106.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				71 SD							71 SD		
1.1.2.02.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan				71 paket	2.156.305.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 paket	2.156.305.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				0 Paket		
1.1.2.02.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				0 Satuan Pendidikan	306.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan,	SD	0 Satuan Pendidikan	306.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD Inklusi yang difasilitasi				4 SD							4 SD		
		Jumlah SD/MI yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				146 SD							146 SD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SD penyelenggara US yang difasilitasi				102 SD					pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		102 SD		
		Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan survey karakter				103 SD							103 SD		
1.1.2.02.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				0 Satuan Pendidikan	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Satuan Pendidikan	142.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan EDS				71 SD							71 SD		
		Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan RAPBS				103 SD							103 SD		
1.1.2.02.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				6 kegiatan	430.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	6 kegiatan	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Jenis Kompetisi Jenjang SD Tk Kota yang difasilitasi				5 kegiatan							5 kegiatan		
		Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam pesta siaga tingkat kecamatan				7 lomba							7 lomba		
		Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam pesta siaga tingkat kota				7 lomba							7 lomba		
		Jumlah PTK yang difasilitasi pelatihan khusus pembinaan minat , bakat dan kreatifitas siswa				15 orang							15 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah siswa berprestasi yang diberi apresiasi				50 siswa							50 siswa		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik							0 Peserta Didik		
		Jumlah siswa yeng difasilitasi pelatihan khusus minat, bakat dan kreatifitas				30 siswa							30 siswa		
1.1.2.02.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru pendamping khusus yang difasilitasi jasa pendidik				6 orang	2.356.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	6 orang	2.684.800.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah pendidik BTQ SD/MI yang difasilitasi bantuan transport				1055 orang							1055 orang		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				0 Orang							0 Orang		
		Jumlah pengawas BTQ SD/MI yang difasiltasi bantuan transport				32 orang							32 orang		
1.1.2.02.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen sekolah yang diselenggarakan				3 kegiatan	256.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2	SD	3 kegiatan	303.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah Rakor/Raker Pengawas SD yang difasiitasi pelaksanaannya				2 sekolah							2 sekolah		
		Jumlah SD Penggerak yang difasilitasi				8 sekolah							8 sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				71 sekolah					religiusitas.		71 sekolah		
		Jumlah SD yang terfasilitasi kegiatan PPDB				103 sekolah							103 sekolah		
		Jumlah SD yang terfasilitasi Survai Lingkungan Belajar				71 sekolah							71 sekolah		
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
		Jumlah Sekolah yang terfasilitasi kegiatan AKreditasi				15 sekolah							15 sekolah		
		Jumlah Siswa yang terfasilitasi Pelatihan Batik				5000 siswa							5000 siswa		
1.1.2.02.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri yang mendapatkan BOS				71 Sekolah	18.370.314.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 Sekolah	12.922.744.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
1.1.2.02.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah bimtek/sosialisasi BOS SD yang diselenggarakan				1 kali	58.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	SD	1 kali	58.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan laporan BOS				102 sekolah					disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		102 sekolah		
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0 Orang							0 Orang		
1.1.2.02.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen		82.04 persen	90 persen	**25.285.768.000**						90 persen	**32.814.991.000**	
1.1.2.02.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pembangunan ruang kelas				3 ruang	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 ruang	1.565.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit							0 Unit		
1.1.2.02.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	4.477.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	SMP	0 Ruang	5.200.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Ruang Kelas yang direhab				18 ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		18 ruang		
1.1.2.02.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	0 Ruang	500.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Ruang Guru yang direhab				2 ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				2 ruang		
1.1.2.02.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	552.758.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	0 Ruang	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Ruang Perpustakaan SMP/MTs yang direhab				2 ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				2 ruang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.02.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP/MTs yang direhab				1 ruang	300.923.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 ruang	900.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				0 Ruang		
1.1.2.02.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah KM/WC SMP/MTs yang direhab				2 ruang	609.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	2 ruang	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peninggian halaman				1 ruang			DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				1 ruang		
		Jumlah ruang ibadah SMP/MTs yang direhab				0 ruang							0 ruang		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit							0 Unit		
1.1.2.02.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeleir sekolah yang diadakan				20 set	820.960.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	SMP	20 set	700.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket					disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		0 Paket		
1.1.2.02.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				0 Paket	34.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	0 Paket	170.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga sekolah				17 sekolah							17 sekolah		
1.1.2.02.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan				85 unit	170.449.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	85 unit	425.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.02.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	135.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	0 Unit	850.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi pemeliharaan bangunan gedung dan ruangan				17 sekolah							17 sekolah		
1.1.2.02.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	85.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	0 Unit	170.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				17 sekolah							17 sekolah		
1.1.2.02.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	210.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	SMP	0 Paket	625.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah				1325 siswa					disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		1325 siswa		
1.1.2.02.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah mapel SMP yang difasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya				13 mapel	134.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	13 mapel	172.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0 Peserta Didik							0 Peserta Didik		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				28 sekolah							28 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan survei karakter				28 sekolah							28 sekolah		
1.1.2.02.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				0 Satuan Pendidikan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	0 Satuan Pendidikan	51.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan EDS				17 sekolah							17 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan RAPBS				28 sekolah							28 sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.02.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				6 kegiatan	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	6 kegiatan	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PTK yang difasilitasi pelatihan khusus pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa				15 orang							15 orang		
		Jumlah siswa berprestasi yang diberi apresisiasi				50 siswa							50 siswa		
		Jumlah siswa yang difasilitasi pelatihan khusus minat,bakat dan kreatifitas				30 siswa							30 siswa		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik							0 Peserta Didik		
1.1.2.02.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru pendamping inklusi yang difasilitasi honor jasa pendidik				3 orang	232.625.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 orang	332.200.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah pendidik BTQ SMP/MTS yang difasilitasi bantuan transport				93 orang							93 orang		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0 Orang							0 Orang		
1.1.2.02.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jenjang sekolah peserta PPDB Online SMP				28 sekolah	151.442.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga	SMP	28 sekolah	496.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah aplikasi penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan (Aplikasi PPDB Online)				1 aplikasi		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		1 aplikasi		
		Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen sekolah yang diselenggarakan				4 kegiatan							4 kegiatan		
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan							3 kegiatan		
		Jumlah Rakor / Raker Pengawas SMP yang difasiitasi pelaksanaannya				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
		Jumlah SMP yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				28 sekolah							28 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				28 sekolah							28 sekolah		
1.1.2.02.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	14.396.686.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	SMP	0 Satuan Pendidikan	10.127.372.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SMP Negeri penerima dana BOS				17 sekolah					disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		17 sekolah		
1.1.2.02.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bimtek/sosialisasi BOS yang diselenggarakan				1 kali	23.175.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 kali	23.175.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan SPJ BOS				28 sekolah							28 sekolah		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang							0 Orang		
1.1.2.02.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	100 persen		96.23 persen	98.4 persen	**9.619.516.000**						98.4 persen	**17.760.032.000**	
1.1.2.02.03.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang bermain anak yang dibangun				2 ruang	794.072.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan,	PAUD PNF	2 ruang	555.123.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang UKS yang dibangun				3 ruang			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				3 ruang		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit							0 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah WC yang dibangun				4 ruang					pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		4 ruang		
1.1.2.02.03.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab				15 ruang	1.095.035.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	15 ruang	900.000.000	Dinas Pendidikan
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1.1.2.02.03.5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	0 Unit	40.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah TK Negeri yang menerima bantuan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD				4 TK							4 TK		
1.1.2.02.03.6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	PAUD PNF	0 Unit	20.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah TK Negeri yang difasilitasi bantuan pemeliharaan rutin sarpras dan utilitas PAUD				4 TK					disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		4 TK		
1.1.2.02.03.7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				0 Paket	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	0 Paket	80.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Mebeluer yang diadakan				4 unit							4 unit		
1.1.2.02.03.8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				0 Paket	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	0 Paket	10.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga PAUD				4 TK							4 TK		
1.1.2.02.03	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				0 Paket	80.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	3. Pemerataan & pnngktn komptensi	PAUD PNF	0 Paket	80.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.9		Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan perlengkapan PAUD				4 TK		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		4 TK		
1.1.2.02.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	jumlah lembaga di fasilitasi kunjungandolan paud				12 lembaga	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	12 lembaga	127.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				600 siswa							600 siswa		
1.1.2.02.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				0 Paket	429.435.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	0 Paket	80.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah APE PAUD/TK yang diadakan				4 paket			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				4 paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.02.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi workshop guru pendamping khusus				50 Lembaga	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	50 Lembaga	5.912.909.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan				2 Lomba							2 Lomba		
		Jumlah PAUD inklusi yang difasilitasi				4 TK							4 TK		
		Jumlah PAUD yang di fasilitasi penyelenggaraan survey karakter dan survey tumbuh-kembang anak				250 TK							250 TK		
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik							0 Peserta Didik		
		Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi penerapan pendidikan karakter				100 Lembaga							100 Lembaga		
1.1.2.02.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan EDS				100 Sekolah	68.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	100 Sekolah	125.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan RAPBS				250 Sekolah							250 Sekolah		
		Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
1.1.2.02.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah guru pendamping inklusi yang difasilitasi honor jasa pendidik dan memenuhi kualifikasi				2 Orang	50.424.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn	PAUD PNF	2 Orang	48.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				0 Orang		Kelurahan			kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		0 Orang		
1.1.2.02.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PAUD yang diselenggarakan				4 Kegiatan	487.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 Kegiatan	780.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 Kegiatan							3 Kegiatan		
		Jumlah lembaga / organisasi mitra PAUD yang difasilitasi kegiatannya				4 Lembaga							4 Lembaga		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				2 Lembaga							2 Lembaga		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				250 Lembaga							250 Lembaga		
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
		Jumlah Rakor/Raker Pengawas/Penilik PAUD yang difasiitasi pelaksanaannya				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
1.1.2.02.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang menerima dana hibah BOP PAUD				260 lembaga	6.139.800.000	Kota Pekalongan, Semua	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga	PAUD PNF	260 lembaga	7.600.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan		Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing	kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		0 Satuan Pendidikan		
1.1.2.02.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah bimtek/sosialisai BOP PAUD yang diselenggarakan				1 kegiatan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 kegiatan	129.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				265 lembaga							265 lembaga		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				0 Orang							0 Orang		
1.1.2.02.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	100 persen		25.49 persen	50 persen	**3.091.000.000**						50 persen	**7.047.157.000**	
1.1.2.02.04	Pengadaan Mebel Pendidikan	Jumlah mebeleir yang diadakan				3 unit	100.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	3. Pemerataan & pnngktn komptensi	PNF Kesetaraan	3 unit	105.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.7	Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		0 Paket		
1.1.2.02.04.8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	0 Paket	20.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SKB yang difasilitasi peralatan rumah tangga pendidikan nonformal/kesetaraan				1 SKB							1 SKB		
1.1.2.02.04.9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	0 Paket	300.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				1500 siswa							1500 siswa		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.02.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga pendidikan kesetaraan/nonformal yang diadakan				50 unit	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	50 unit	40.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket							0 Paket		
1.1.2.02.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mapel Kesetaraan yang terfasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya				14 mapel	350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	14 mapel	1.957.757.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik							0 Peserta Didik		
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan Survai Karakter				14 lembaga							14 lembaga		
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaran AKM dan UPK				14 lembaga							14 lembaga		
1.1.2.02.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraa	Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan EDS				14 lembaga	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	PNF Kesetaraan	14 lembaga	19.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan RAPBS				14 lembaga							14 lembaga		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	n	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				0 Satuan Pendidikan					disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		0 Satuan Pendidikan		
1.1.2.02.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru pendamping inklusi PNF yang difasilitasi honor jasa pendidik				2 orang	175.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	2 orang	248.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Orang							0 Orang		
		Jumlah SKB yang difasilitasi penyediaan PTK nya				1 SKB							1 SKB		
1.1.2.02.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PNF yang diselenggarakan				4 kegiatan	180.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	4 kegiatan	420.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan							3 kegiatan		
		Jumlah PNF yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				14 lembaga							14 lembaga		
		Jumlah PNF yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				14 lembaga							14 lembaga		
		Jumlah Rakor/Raker Penilik PNF yang difasiitasi pelaksanaannya				2 kegiatan							2 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
1.1.2.02.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan PNF yang menerima dana hibah BOP				14 lembaga	2.089.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	14 lembaga	2.600.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan							0 Satuan Pendidikan		
1.1.2.02.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bimtek/ sosialisasi BOP kesetaraan yang diselenggarakan				1 kegiatan	17.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	1 kegiatan	20.400.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah satuan PNF yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				14 lembaga							14 lembaga		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0 Orang							0 Orang		
1.1.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen		100 persen	100,00 persen	**238.044.000**						100,00 persen	**299.315.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.3.02.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen		100 persen	100 persen	**148.044.000**						100 persen	**144.861.000**	
1.1.3.02.01.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun (perwa/sk kadin)				2 dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	0	2 dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.1.3.02.01.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen silabus muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun				2 dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	0	2 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.1.3.02.01.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun				2 buku	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan	0	2 buku	60.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				0 Buku							0 Buku		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal yang diadakan				1000 buku					kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		1000 buku		
1.1.3.02.01.4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang disusun				2 dokumen	48.044.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	0	2 dokumen	44.861.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				0 Orang							0 Orang		
1.1.3.02.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen		100 persen	100 persen	**90.000.000**						100 persen	**154.454.000**	
1.1.3.02.02.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				0 Dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	0 Dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang Tersusun				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.3.02.02.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang disusun (sk kadin)				1 dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.1.3.02.02.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				0 Buku	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	0 Buku	124.454.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang diadakan				1000 Buku							1000 Buku		
1.1.4	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**14.054.526.000**						100,00 persen	**15.452.202.000**	
1.1.4.02.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	100 persen		54.75 persen	76.75 persen	**14.054.526.000**						76.75 persen	**15.452.202.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.4.02.01.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Dokumen	997.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Dokumen	941.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah guru PAUD yang difasilitasi kegiatan diklat guru berjenjang (dasar/lanjut/mahir)				100 orang							100 orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi kegiatan pemilihan/seleksi guru berprestasi				50 orang							50 orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi program guru penggerak				250 orang							250 orang		
		Jumlah penerbitan dokumen kepegawaian (SK gaji berkala, kenaikan pangkat, dll)				1200 orang							1200 orang		
		Jumlah penyelesaian kasus disiplin PTK				3 orang							3 orang		
		Jumlah PTK Penerima bantuan S1/S2				25 orang							25 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi dalam apresiasi PTK PAUD dan Dikmas				50 orang							50 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah PTK yang difasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi				200 orang							200 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi KMD dan atau KML				90 orang							90 orang		
		Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah				10 orang							10 orang		
		Peningkatan Kompetensi Pengawas/Penilik				25 orang							25 orang		
1.1.4.02.01.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru terfasilitasi PAK nya				750 orang	13.057.046.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	750 orang	14.511.202.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Laporan							0 Laporan		
		Jumlah pengawas/penilik yang difasilitasi PAK nya				30 orang							30 orang		
		Jumlah PTK difasilitasi harlindung				1501 orang							1501 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi penerbitan dokumen kepegawaian nya (SK kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, dokumen kontrak				1200 orang							1200 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan jasa kinerja				75 SD/MI							75 SD/MI		
		Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja				21 SMP/MTs							21 SMP/MTs		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**98.531.785.000**							**103.624.644.030**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**58.030.839.000**						100 persen	**58.537.365.005**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
1.2.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**26.000.000**						100 persen	**24.850.000**	
1.2.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	0 Dokumen	2.750.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen renja yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
1.2.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinkes	2 Dokumen	1.650.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Dokumen		
1.2.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 Bulan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	20.450.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen profil kesehatan yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP(1 dokumen rencana tindak pengawasan(RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun)				5 Dokumen							5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
1.2.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**55.748.383.000**						100 persen	**56.635.683.000**	
1.2.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	55.668.288.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	0 Orang/bulan	56.553.633.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 Kali							14 Kali		
1.2.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	78.595.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinkes	12 Bulan	80.400.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen		Semua Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		0 Dokumen		
1.2.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	0 Laporan	1.650.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.2.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**10.000.000**	
1.2.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam pameran, Hakteknas dan Karnaval Batik				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	2 Kali	10.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
1.2.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**382.876.000**						100 persen	**542.091.005**	
1.2.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	5.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.2.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	132.067.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinkes	12 Bulan	208.436.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan grdung kantor yang diadakan				25 Unit							25 Unit		
1.2.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	8.455.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.2.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	90.809.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	11 Bulan	95.700.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.2.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	22.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.2.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	2.500.005	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.2.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 Kali	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinkes	100 Kali	200.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan		Semua Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		0 Laporan		
1.2.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.176.956.000**						100 persen	**780.782.000**	
1.2.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	400	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	400	Dinas Kesehatan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
1.2.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	725.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	327.409.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
1.2.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	451.173.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	452.973.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
1.2.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**687.124.000**						100 persen	**543.959.000**	
1.2.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasinal yang terpelihara secara rutin/berkala				12 Unit	400.094.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinkes	12 Unit	241.749.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit		Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		30 Unit		
1.2.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	222.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	1 Unit	222.030.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Unit							3 Unit		
1.2.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	80.180.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90,00 persen		70,00 persen	80,00 persen	**39.623.581.000**						80,00 persen	**42.394.147.025**	
1.2.2.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	100 persen		100 persen	100 persen	**12.921.747.000**						100 persen	**10.007.751.275**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.02.01.6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	5.092.299.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	1.439.119.725	Dinas Kesehatan
		Jumlah unit puskesmas yang direhabilitasi				1 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Unit		
1.2.2.02.01.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas/pustu yang dilakukan rehabilitasi				6 Lokasi	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	6 Lokasi	1.478.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				0 Unit							0 Unit		
1.2.2.02.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi pengolahan limbah yang dilaksanakan pemeliharaan				1 Unit	530.064.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	100.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit							1 Unit		
1.2.2.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAK)				1 pekerjaan	2.401.893.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 pekerjaan	2.256.950.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAU)				6 jenis							6 jenis		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	1.602.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Paket	2.152.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah pengadaan BMHP (DAU)				1 pekerjaan			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				1 pekerjaan		
		Jumlah pengadaan jasa pemusnahan obat kadaluarsa				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
		Jumlah pengadaan mobil distribusi berpendingin				1 unit							1 unit		
		Jumlah pengadaan obat-obatan (DAK)				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
		Jumlah pengadaan obat-obatan (DAU)				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
1.2.2.02.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				0 Paket	2.595.491.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Paket	2.121.681.550	Dinas Kesehatan
		Jumlah Catride TCM yang diadakan (DAK)				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
		Jumlah pengadaan BMHP (DAK)				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
		Jumlah pengadaan BMHP gula darah (DAK)				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
		Jumlah pengadaan RO dan BHP Skrinning HIV dengan Reagen Sifilis (DAK)				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
1.2.2.02.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Unit	460.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda, Dinkes) yang dikalibrasi				60 Unit							60 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda) yang diservice				38 Jenis							38 Jenis		
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen		100 persen	100 persen	**26.598.934.000**						100 persen	**32.178.255.750**	
1.2.2.02.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Orang	190.000.000	Dinas Kesehatan
		Mendukung penurunan AKI				6 Kasus							6 Kasus		
		Menunjang Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (IKK Output)				5000 Buku KIA							5000 Buku KIA		
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar (SPM/IKK Outcome)				5862 Orang							5862 Orang		
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar (SPM / IKK Outcome)				6298 Orang							6298 Orang		
1.2.2.02.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	117.043.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	0 Orang	117.043.000	Dinas Kesehatan
		Mendukung Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				5862 Orang							5862 Orang		
1.2.2.02.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				5844 bayi	26.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral	Masyarakat	5844 bayi	26.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Mendukung Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi)				55 Bayi		Kelurahan		Pelayanan Publik	(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		55 Bayi		
1.2.2.02.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dukungan logistik kesehatan yang tersedia pelayanan kesehatan balita sesuai standar (IKK Output)				52 Pak Kartu MTBS	139.984.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	52 Pak Kartu MTBS	139.984.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang							0 Orang		
		Mendukung penurunan AKABA (Angka Kematian Balita)				72 Anak							72 Anak		
		Mendukung penurunan AKB (Angka Kematian Bayi)				75 Anak							75 Anak		
		Pelayan kesehatan anak sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				21584 Anak							21584 Anak		
1.2.2.02.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	132.189.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	0 Orang	129.666.000	Dinas Kesehatan
		Kesehatan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM / IKK Outcome)				56000 Anak							56000 Anak		
		Menunjang Pelayanan anak usia pendidikan dasar (IKK Output)				5000 Set							5000 Set		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.02.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				207789 orang	127.293.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	207789 orang	44.950.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang							0 Orang		
1.2.2.02.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dukungan ketersediaan logistik kesehatan sesuai standar bagi warga negara usia 60 tahun ke atas (IKK Output)				1095 buku	36.071.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1095 buku	33.609.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang							0 Orang		
		Usia Lanjut Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM / IKK Outcome)				30994 Orang							30994 Orang		
1.2.2.02.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				76872 orang	8.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	76872 orang	8.830.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6446 Orang	8.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	6446 Orang	8.550.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.02.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	15.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Orang	15.380.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita ODGJ mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				785 orang							785 orang		
1.2.2.02.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5391 Orang	41.305.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	5391 Orang	41.305.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12563 Orang	33.105.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12563 Orang	33.105.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI ekslusif				2440 Anak	230.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2440 Anak	544.218.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Mendukung penurunan angka stunting melalui survei PKG dengan memantau masyarakat yang asupan kalori dibawah 1400 Kal.				70 Orang							70 Orang		
		Penanganan bumil KEK melalui pemberian suplemen gizi				720 Orang							720 Orang		
		Penanganan pada balita gizi buruk				38 Anak							38 Anak		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Penanganan stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita				1450 Anak							1450 Anak		
1.2.2.02.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	65.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	78.750.000	Dinas Kesehatan
		Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Puskesmas				14 lokasi							14 lokasi		
		Pembinaan Kesehatan Kerja di Perkantoran				1 kali							1 kali		
		Pembinaan Kesehatan Kerja di Perusahaan (GP2SP)				10 Lokasi							10 Lokasi		
		Pembinaan Kesehatan Kerja Informal (Pos UKK)				15 Lokasi							15 Lokasi		
		Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN Dinas Kesehatan				60 Orang							60 Orang		
		Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jamaah Haji				280 orang							280 orang		
1.2.2.02.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)				27 Lokasi	720.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	27 Lokasi	228.212.000	Dinas Kesehatan
		Fasyankes Ramah Lingkungan				23 Lokasi							23 Lokasi		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Pembinaan Higiene Sanitasi TUPM				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Pengelolaan Sampah Medis				12 Kali							12 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pengendalian lalat di TPA				12 Kali							12 Kali		
		Penggerakan Implementasi STBM				1 Kali							1 Kali		
		Survei Kualitas Air Minum RT (SKAMRT)				1 Kali							1 Kali		
1.2.2.02.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	1.321.645.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	1.347.034.750	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Dokumen		
		Jumlah kasus Covid 19 yang dikunjungi				100 Kasus							100 Kasus		
		Jumlah kegiatan BOK kefarmasian yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang dilaksanakan				3 Kegiatan							3 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				29 Kegiatan							29 Kegiatan		
		Jumlah Kelurahan ODF/SBS				27 Kelurahan							27 Kelurahan		
		Jumlah Kualitas Makanan Minuman Masyarakat (Pilar 3 STBM)				280 Lokasi							280 Lokasi		
		Jumlah penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan				17 Kali							17 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Penyehatan Lingkungan Fasyankes				24 Lokasi							24 Lokasi		
		Surveilans Kualitas Air Minum RT (SKAMRT)				27 Kelurahan							27 Kelurahan		
1.2.2.02.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	670.735.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 Dokumen	1.056.020.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan				53 Kasus					12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		53 Kasus		
		Jumlah kasus filaria yang ditangani				0 Kasus							0 Kasus		
		Jumlah kasus Hepatitis B				45 Kasus							45 Kasus		
		Jumlah kasus HIV/AIDS				100 Kasus							100 Kasus		
		Jumlah kasus obesitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Fasyankes				59385 Jiwa							59385 Jiwa		
		Jumlah kasus TB Paru BTA (+)				890 Kasus							890 Kasus		
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular yang dilaksanakan				14 Lokasi							14 Lokasi		
		Jumlah kegiatan penyemprotan Fogging Focus di wilayah Kota Pekalongan				100 Kali							100 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah penduduk umur > atau = 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg				76872 Jiwa							76872 Jiwa		
		Jumlah pertemuan program penyakit tidak menular yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias MR				213 Kelas							213 Kelas		
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias Td				255 Kelas							255 Kelas		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)				179 Orang							179 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)				161 Orang							161 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)				161 Orang							161 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita ODGJ berat (IKK Output)				161 Orang							161 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)				161 Orang							161 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)				291 Orang							291 Orang		
1.2.2.02.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	20.500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	25.850.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah masyarakat penerima bantuan Premi				55716 Orang							55716 Orang		
		Jumlah Rapat Koordinasi Program JKN				4 Kali							4 Kali		
1.2.2.02.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0 Dokumen	51.483.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	82.840.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS				12 Bulan							12 Bulan		
1.2.2.02.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bulan penyediaan belanja operasional Puskesmas, IFK dan Labkesda				12 Bulan	1.380.039.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	1.323.713.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen							0 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				4 Orang							4 Orang		
		Jumlah jasa tenaga PSC 119 dan tenaga Pusdalu				28 Orang							28 Orang		
1.2.2.02.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	806.132.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Unit	802.626.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Peningkatan & Penilaian Mutu Eksternal (PPME)				14 Puskesmas							14 Puskesmas		
1.2.2.02.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				0 Dokumen	42.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	76.420.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Program Haji				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit				52 Kali							52 Kali		
1.2.2.02.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi	100 persen		100 persen	100 persen	**30.000.000**						100 persen	**74.200.000**	
1.2.2.02.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan SIMKES				12 Bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Bulan	74.200.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.2.2.02.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**72.900.000**						100 persen	**133.940.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.02.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	72.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	0 Unit	133.940.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah pelaksanaan visitasi perijinan fasyankes				10 Kali							10 Kali		
		Jumlah pelaksana kegiatan P3K dan bencana				800 Orang							800 Orang		
		Jumlah pembinaan fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta				69 Kali							69 Kali		
		Jumlah pertemuan fasilitasi peningkatan mutu fasyankes				11 Kali							11 Kali		
1.2.3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	60,00 persen		35,00 persen	45,00 persen	**91.932.000**						45,00 persen	**228.782.000**	
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95,50 persen		93,00 persen	94,00 persen							94,00 persen		
1.2.3.02.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**91.932.000**						100 persen	**228.782.000**	
1.2.3.02.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	91.932.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	0 Dokumen	228.782.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen SDMK yang disusun (Profil SDM Kesehatan dan Renbut)				3 Dokumen							3 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah penerbitan rekomendasi ijin tenaga kesehatan tepat waktu (sesuai SOP)				540 orang							540 orang		
1.2.4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100,00 persen		92,00 persen	96,00 persen	**662.653.000**						96,00 persen	**680.722.000**	
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen							100,00 persen		
		Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	97,00 persen		95,00 persen	96,00 persen							96,00 persen		
1.2.4.02.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	**106.630.000**						100 persen	**115.562.000**	
1.2.4.02.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0 Dokumen	106.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	0 Dokumen	115.562.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasyanfar yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				109 Lokasi							109 Lokasi		
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat daerah berdasarkan SK Walikota				2 Orang							2 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.4.02.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	**491.023.000**						100 persen	**491.023.000**	
1.2.4.02.03.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				0 Dokumen	491.023.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Industri Rumah Tangga	0 Dokumen	491.023.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT				140 Lokasi			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				140 Lokasi		
		Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan post market				100 Lokasi							100 Lokasi		
		Jumlah peserta Bimtek Kader Keamanan Pangan				100 orang							100 orang		
		Jumlah peserta KIE Keamanan Pangan				300 Orang							300 Orang		
		Jumlah sampling dan pengujian PIRT				40 Sampel							40 Sampel		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.4.02.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan	97 persen		95 persen	95 persen	**65.000.000**						95 persen	**74.137.000**	
1.2.4.02.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0 Dokumen	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	TPM & DAM	0 Dokumen	74.137.000	Dinas Kesehatan
		Pengawasan dan Pemeriksaan Makanan / Jajanan di Sekolah dan Masyarakat				200 Lokasi							200 Lokasi		
		Pengawasan Penerbitan SLHS TPM				40 Lokasi							40 Lokasi		
1.2.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Tangga Sehat	95,00 persen		90,00 persen	92,00 persen	**122.780.000**						92,00 persen	**1.783.628.000**	
1.2.5.02.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	35 persen		30 persen	32 persen	**60.000.000**						32 persen	**1.662.912.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.5.02.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	60.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	1.662.912.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Monev Promosi dan Pemberdayaan Kesehatanda (SBH) yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Pemberdayaan Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren)				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Pemberdayaan Saka Bakti Husada				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Pembinaan Kader Posyandu				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Upaya Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan				2 Kali							2 Kali		
		Laporan Pelaksanaan Promosi Kesehatan Berbasis Media				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.2.5.02.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**62.780.000**						100 persen	**120.716.000**	
1.2.5.02.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	62.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	120.716.000	Dinas Kesehatan
		Lomba PHBS Tingkat Kota Pekalongan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pembuatan film dalam rangka promosi kesehatan dan peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat				1 Kali							1 Kali		
		Penyebarluasan informasi kesehatan dalam rangka peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat melalui berbagai media				22 Kali							22 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**104.749.191.000**							**106.489.051.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**85.085.300.000**						100 persen	**88.717.938.000**	
1.2.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**11.000.000**	
1.2.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	0 Dokumen	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
1.2.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.2.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	7.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	RSUD Bendan	12 bulan	8.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen		Kergon	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
1.2.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**49.300.000**						100 persen	**50.055.000**	
1.2.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	47.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	12 bulan	48.555.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.2.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	0 Laporan	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
1.2.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	presentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**25.000.000**						100 persen	**810.883.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				20 orang/kali	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	20 orang/kali	810.883.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**85.000.000.000**						100 persen	**87.846.000.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	85.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	0 Unit Kerja	87.846.000.000	Dinas Kesehatan
		jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan							12 bulan		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	72,50 persen		60,00 persen	65,00 persen	**19.592.500.000**						65,00 persen	**17.708.677.000**	
1.2.2.02.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**19.438.750.000**						100 persen	**17.374.027.000**	
1.2.2.02.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	9.238.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarny	1 Unit	9.238.750.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.02.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	1.200.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarny	2 Unit	1.200.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan				166 unit	9.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarny	166 unit	6.935.277.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				0 Unit		
		Jumlah kegiatran DAK yang dikelola				1 kegiatan							1 kegiatan		
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen		100 persen	100 persen	**43.750.000**						100 persen	**224.650.000**	
1.2.2.02.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah audit maternal/neonatal yang dilaksanakan				2 kali	43.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 kali	43.750.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah audit near miss maternal/neonatal yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah drill emergency / refresh ilmu maternal/neonatal yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang							0 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan jejaring pembinaan rujukan				2 kali							2 kali		
		Jumlah sosialisasi SPO maternal/neonatal yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
1.2.2.02.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100 persen		100 persen	100 persen	**110.000.000**						100 persen	**110.000.000**	
1.2.2.02.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun				2 dokumen	110.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 dokumen	110.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit							0 Unit		
1.2.3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	60,00 persen		35,00 persen	45,00 persen	**71.391.000**						45,00 persen	**62.436.000**	
1.2.3.02.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase perawat yang terkredensial	100 persen		100 persen	100 persen	**49.891.000**						100 persen	**48.663.500**	
1.2.3.02.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan				12 bulan	34.891.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	34.891.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang		Kergon	Umum	Berdaya Saing	multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		0 Orang		
1.2.3.02.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Dokumen	13.772.500	Dinas Kesehatan
		Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/rekredensial				20 orang							20 orang		
1.2.3.02.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	20 persen		20 persen	20 persen	**21.500.000**						20 persen	**13.772.500**	
1.2.3.02.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi				40 orang	21.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	40 orang	13.772.500	Dinas Kesehatan
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang							0 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.541.345.000**							**3.541.345.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**2.765.245.000**						100 persen	**2.765.245.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**2.765.245.000**						100 persen	**2.765.245.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	2.765.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	2.765.245.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**776.100.000**						90,00 persen	**776.100.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**776.100.000**						100 persen	**776.100.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Akselerasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (DAK)				400 Kali	776.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	400 Kali	776.100.000	Dinas Kesehatan
		Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara (DAK)				0 Kali							0 Kali		
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK)				16 Kali							16 Kali		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (DAK)				2 orang							2 orang		
		STBM Desa / Kelurahan Prioritas (DAK)				0 Kali							0 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit (DAK)				281 Kali							281 Kali		
		Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (DAK)				68 Kali							68 Kali		
		Upaya Kesehatan Lansia Tingkat Puskesmas (DAK)				0 Kali							0 Kali		
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19				382 Kali							382 Kali		
		Upaya Penurunan AKI, AKB (DAK)				109 Kali							109 Kali		
		Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)				77 Kali							77 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.453.691.000**							**1.291.809.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**825.791.000**						100 persen	**846.436.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**825.791.000**						100 persen	**846.436.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	825.791.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	846.436.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**627.900.000**						90,00 persen	**445.373.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**627.900.000**						100 persen	**445.373.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				43 Kegiatan	627.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	43 Kegiatan	445.373.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				9 Kegiatan							9 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				66 Kegiatan							66 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				3 Orang							3 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.878.816.000**							**1.633.806.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.035.916.000**						100 persen	**1.035.916.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.035.916.000**						100 persen	**1.035.916.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.035.916.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	1.035.916.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo					12 Bulan		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**842.900.000**						90,00 persen	**597.890.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**842.900.000**						100 persen	**597.890.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	AKSELERASI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PISPK) - DAK				200 Kunjungan	842.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	200 Kunjungan	597.890.000	Dinas Kesehatan
		FUNGSI MANAGEMEN PUSKESMAS (P1,P2,P3) (DAK)				16 Kali		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo					16 Kali		
		Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				62 Kegiatan							62 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				10 Kegiatan							10 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				41 Kegiatan							41 Kegiatan		
		PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN (DAK)				3 Orang							3 Orang		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
		UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF, DAN RESPON PENYAKIT (DAK)				649 Kali							649 Kali		
		UPAYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) (DAK)				279 Kali							279 Kali		
		UPAYA PENGENDALIAN PENCEGAHAN COVID-19 - DAK				194 Kali							194 Kali		
		UPAYA PENURUNAN AKI, AKB (DAK)				788 Kali							788 Kali		
		UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT (DAK)				1235 Kali							1235 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.415.848.000**							**1.198.626.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**615.666.000**						100 persen	**631.058.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**615.666.000**						100 persen	**631.058.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	615.666.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	631.058.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen					12 Bulan		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**800.182.000**						90,00 persen	**567.568.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**800.182.000**						100 persen	**567.568.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	800.182.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Dokumen	567.568.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pelaksanaan Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga				1 Kali		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen					1 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas				16 Kali							16 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit				240 Kali							240 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				76 Kali							76 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Pencegahan Pengendalian Covid 19				232 Kali							232 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Penurunan AKI AKB				137 Kali							137 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat				134 Kali							134 Kali		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.556.554.000**							**1.556.554.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**930.854.000**						100 persen	**930.854.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**930.854.000**						100 persen	**930.854.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	930.854.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	930.854.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**625.700.000**						90,00 persen	**625.700.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**625.700.000**						100 persen	**625.700.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	625.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		0 Dokumen	625.700.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pelaksanaan Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (DAK)				300 Kali							300 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3) (DAK)				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja (DAK)				1 Orang							1 Orang		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (DAK)				392 Kali							392 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (DAK)				123 Kali							123 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19 (DAK)				132 Kali							132 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Penurunan AKI AKB (DAK)				98 Kali							98 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)				152 Kali							152 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.518.723.000**							**1.540.681.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**878.323.000**						100 persen	**900.281.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**878.323.000**						100 persen	**900.281.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	878.323.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	900.281.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer					12 Bulan		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**640.400.000**						90,00 persen	**640.400.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**640.400.000**							**640.400.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	640.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi		0 Dokumen	640.400.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pelaksanaan Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)				200 Kali		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Khusus Non Fisik	Berdaya Saing	multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		200 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja				2 Orang							2 Orang		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit				146 Kali							146 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Fungsi Management Puskesmas				24 Kali							24 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				55 Kali							55 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Kesehatan Lansia Tingkat Puskesmas				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Pencegahan Pengendalian Covid - 19				70 Kali							70 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Penurunan AKI / AKB Tingkat Puskesmas				186 Kali							186 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Tingkat Puskesmas				147 Kali							147 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.666.823.000**							**1.666.823.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**878.323.000**						100 persen	**878.323.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**878.323.000**						100 persen	**878.323.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	878.323.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	878.323.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego					12 Bulan		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**788.500.000**						90,00 persen	**788.500.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**788.500.000**						100 persen	**788.500.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelaksanaan Akselerasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)				1 Kali	788.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		1 Kali	788.500.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas (P1,P2,P3)				16 Kali		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego					16 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian				2 Orang							2 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit				963 Kali							963 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				165 Kali							165 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19				597 Kali							597 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Penurunan AKI, AKB				119 Kali							119 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat				338 Kali							338 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.915.641.000**							**1.946.792.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.246.041.000**						100 persen	**1.277.192.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.246.041.000**						100 persen	**1.277.192.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.246.041.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	1.277.192.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros					12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**669.600.000**						90,00 persen	**669.600.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**669.600.000**						100 persen	**669.600.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	AKSELERASI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PISPK) - DAK				200 kunjungan	669.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	0	200 kunjungan	669.600.000	Dinas Kesehatan
		Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros					0 Dokumen		
		FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (P1, P2, P3) - DAK				16 kali							16 kali		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen							0 Dokumen		
		PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN - DAK				3 orang							3 orang		
		UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF DAN RESPON PENYAKIT - DAK				329 kali							329 kali		
		UPAYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) - DAK				67 kali							67 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		UPAYA PENCEGAHAN PENGENDALIAN COVID - 19 - DAK				194 kali							194 kali		
		UPAYA PENURUNAN AKI, AKB - DAK				133 kali							133 kali		
		UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT - DAK				134 kali							134 kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.680.385.000**							**1.502.415.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**983.385.000**						100 persen	**1.007.970.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**983.385.000**						100 persen	**1.007.970.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	983.385.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	1.007.970.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**697.000.000**						90,00 persen	**494.445.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**697.000.000**						100 persen	**494.445.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Akselerasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga - PISPK (DAK)				363 Kali	697.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		363 Kali	494.445.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan					0 Dokumen		
		Jumlah Fungsi Manajemen Puskesmas - P1, P2, P3 (DAK)				16 Kali							16 Kali		
		Jumlah Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian (DAK)				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Upaya Deteksi Dini, Preventif Dan Respon Penyakit (DAK)				557 Kali							557 Kali		
		Jumlah Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat - Germas (DAK)				164 Kali							164 Kali		
		Jumlah Upaya Pencegahan Pengendalian Covid - 19 (DAK)				66 Kali							66 Kali		
		Jumlah Upaya Penurunan AKI, AKB (DAK)				374 Kali							374 Kali		
		Jumlah Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)				201 Kali							201 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.904.699.000**							**1.933.223.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.140.979.000**						100 persen	**1.169.503.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.140.979.000**						100 persen	**1.169.503.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.140.979.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	1.169.503.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu					12 Bulan		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**763.720.000**						90,00 persen	**763.720.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**763.720.000**						100 persen	**763.720.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	JUMLAH PELAKSANAAN AKSELERASI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS PK) (DAK)				560 KALI	763.720.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian		560 KALI	763.720.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		JUMLAH PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS P1, P2, P3 (DAK)				16 KALI		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu			penyakit.		16 KALI		
		JUMLAH PELAKSANAAN UPAYA DETEKSI DINI, PREVENTIF, DAN RESPONS PENYAKIT (DAK)				750 KALI							750 KALI		
		JUMLAH PELAKSANAAN UPAYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) (DAK)				141 KALI							141 KALI		
		JUMLAH PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN PENGENDALIAN COVID - 19 (DAK)				688 KALI							688 KALI		
		JUMLAH PELAKSANAAN UPAYA PENURUNAN AKI AKB (DAK)				805 KALI							805 KALI		
		JUMLAH PELAKSANAAN UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT (DAK)				789 KALI							789 KALI		
		JUMLAH PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN (DAK)				24 KALI							24 KALI		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.001.221.000**							**3.001.053.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**2.086.541.000**						100 persen	**2.086.541.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**2.086.541.000**						100 persen	**2.086.541.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	2.086.541.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	2.086.541.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan					12 Bulan		
								Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**914.680.000**						90,00 persen	**914.512.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**914.680.000**						100 persen	**914.512.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelaksanaan Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)				200 Kali	914.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		200 Kali	914.512.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas (P1,P2,P3)				16 Kali		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan					16 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian				2 Orang		Kota Pekalongan, Pekalongan					2 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit				1396 Kali		Utara, Panjang Baru					1396 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				1631 Kali							1631 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Pencegahan Pengendalian Covid - 19				676 Kali							676 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Penurunan AKI AKB				745 Kali							745 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat				910 Kali							910 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.981.866.000**							**1.865.467.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.456.166.000**						100 persen	**1.492.570.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.456.166.000**						100 persen	**1.492.570.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.456.166.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	1.492.570.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**525.700.000**						90,00 persen	**372.897.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**525.700.000**						100 persen	**372.897.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Akselerasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PISPK)				1 Kegiatan	525.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		1 Kegiatan	372.897.000	Dinas Kesehatan
		Fungsi manajemen Puskesmas (P1,P2,P3)				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Penyediaan tenaga dengan perjanjian				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit				25 kegiatan							25 kegiatan		
		Upaya gerakan masyarakat hidup sehat (germas)				20 Kegiatan							20 Kegiatan		
		Upaya pencegahan pengendalian covid-19				7 kegiatan							7 kegiatan		
		Upaya penurunan AKI, AKB				26 Kegiatan							26 Kegiatan		
		Upaya perbaikan gizi masyarakat				23 Kegiatan							23 Kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.763.416.000**							**2.552.457.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.876.416.000**						100 persen	**1.923.327.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.876.416.000**						100 persen	**1.923.327.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.876.416.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	1.923.327.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo					12 Bulan		
								Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**887.000.000**						90,00 persen	**629.130.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**887.000.000**						100 persen	**629.130.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	887.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan		0 Dokumen	629.130.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)				100 kunjungan		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo			GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		100 kunjungan		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Deteksi Dini , Preventif dan Respon Penyakit				51 kali		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet					51 kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Dukungan Oprasional UKM Tim Nusantara				0							0		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3)				15 kali							15 kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Kesehatan Lanjut Usia				0							0		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Penurunan AKI & AKB				9 Kali							9 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian				4 orang							4 orang		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat				5 Kali							5 Kali		
		Jumlah Pelaksanaan Upaya STBM Desa / Kelurahan Prioritas				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.332.766.000**							**1.139.648.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**615.666.000**						100 persen	**631.058.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**615.666.000**						100 persen	**631.058.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	615.666.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	631.058.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	**717.100.000**						90,00 persen	**508.590.000**	
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**717.100.000**						100 persen	**508.590.000**	
1.2.2.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				62 Kegiatan	717.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan		62 Kegiatan	508.590.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan			GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respons Penyakit yang dilaksanakan				34 Kegiatan							34 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**466.200.000**							**1.193.045.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**266.200.000**						100 persen	**292.820.000**	
1.2.1.02.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**266.200.000**						100 persen	**292.820.000**	
1.2.1.02.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	266.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	0 Unit Kerja	292.820.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan							12 Bulan		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90,00 persen		70,00 persen	80,00 persen	**200.000.000**						80,00 persen	**900.225.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	72,50 persen		60,00 persen	65,00 persen							65,00 persen		
		Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen							90,00 persen		
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100,00 persen							100,00 persen		
1.2.2.02.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**200.000.000**						100 persen	**900.225.000**	
1.2.2.02.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di PSPJ				12 bulan	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	0	12 bulan	900.225.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**109.531.595.000**							**146.740.710.000**	
1.3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**11.984.198.000**						100 persen	**11.749.789.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
1.3.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**17.312.000**	
1.3.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	0 Dokumen	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
1.3.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	0 Dokumen	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen RKA yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
1.3.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	14.312.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**6.359.383.000**						100 Persen	**7.538.224.000**	
1.3.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	6.262.883.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	0 Orang/bulan	7.437.724.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 Kali							14 Kali		
1.3.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	95.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	95.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.3.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	0 Laporan	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.3.1.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**35.578.000**						100 Persen	**34.862.000**	
1.3.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas aset yang dihasilkan				2 Laporan	35.578.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 Laporan	34.862.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1.3.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**22.254.000**						100 persen	**22.300.000**	
1.3.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik				2 Kegiatan	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 Kegiatan	9.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
1.3.1.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	12.754.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	0 Orang	12.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
1.3.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**590.000.000**						100 persen	**417.544.000**	
1.3.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	3.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.3.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan benda pos				12 Bulan	215.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7 Unit							7 Unit		
1.3.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	5.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.3.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	134.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	11 Bulan	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.3.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.3.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.3.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 orang/kali	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	50 orang/kali	106.044.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1.3.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.295.864.000**						100 persen	**-**	
1.3.1.02.07.3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan				2 Unit	1.295.864.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
1.3.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**2.769.691.000**						100 persen	**2.950.818.000**	
1.3.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
1.3.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	2.535.346.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	2.552.280.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
1.3.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan	231.345.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	395.538.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
1.3.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**895.428.000**						100 persen	**768.729.000**	
1.3.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	609.428.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	497.758.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
1.3.1.02.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat -alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala				10 Unit	86.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	10 Unit	70.971.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit							0 Unit		
1.3.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	1 Unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				12 Bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 Bulan	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
1.3.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen		82,76 persen	93,10 persen	**19.085.319.000**						93,10 persen	**23.072.227.000**	
1.3.2.02.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	27 unit		18 unit	27 unit	**17.564.010.000**						27 unit	**20.800.847.000**	
1.3.2.02.01.9	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah lokasi Tanggul Sungai yang dibangun				1 lokasi	3.021.763.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 lokasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM							0 KM		
1.3.2.02.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang Terbangun				2 Lokasi	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	2 Lokasi	3.600.847.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM							0 KM		
1.3.2.02.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun				3 Lokasi	8.400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	3 Lokasi	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				3 Unit							3 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.2.02.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah lokasi Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				3 lokasi	1.350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	3 lokasi	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0 KM							0 KM		
1.3.2.02.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi				0 Unit	1.000.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Unit	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Stasiun Pompa Pengendali Banjir yang terpelihara				5 Lokasi							5 Lokasi		
1.3.2.02.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				24 Unit	3.592.247.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	24 Unit	5.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Stasiun Pompa yang di pelihara				24 Lokasi							24 Lokasi		
1.3.2.02.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	85.03 persen		78.74 persen	82.57 persen	**1.521.309.000**						82.57 persen	**2.271.380.000**	
1.3.2.02.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	1.521.309.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 KM	2.271.380.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Saluran Irigasi yang Direhab				800 Meter							800 Meter		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	92,11 persen		85,77 persen	88,39 persen	**1.375.000.000**						88,39 persen	**1.379.855.000**	
1.3.3.02.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.375.000.000**						100 Persen	**1.379.855.000**	
1.3.3.02.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				0 SR	1.375.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	0 SR	1.379.855.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah sarpras air bersih yang direvitalisasi				3 Lokasi							3 Lokasi		
		Jumlah SR yang terlayani jaringan perpipaan				120 SR							120 SR		
1.3.4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	100,00 persen		0 persen	40,00 persen	**610.000.000**						40,00 persen	**2.811.969.000**	
1.3.4.02.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	100 Persen		0 Persen	40 Persen	**610.000.000**						40 Persen	**2.811.969.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.4.02.01.3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Lokasi Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Lokasi	610.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Lokasi	2.306.969.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0 Rumah Tangga							0 Rumah Tangga		
1.3.5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,87 persen		9,87 persen	11,07 persen	**4.130.000.000**						11,07 persen	**545.131.000**	
1.3.5.02.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	60051 unit		0 unit	59751 unit	**4.130.000.000**						59751 unit	**545.131.000**	
1.3.5.02.01.5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				0 Rumah Tangga	3.575.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kota Pekalongan	0 Rumah Tangga	545.131.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk pelayanan dasar menggunakan SPALD-T (IKK Output)				2 Unit							2 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.5.02.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1 Unit	555.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kota Pekalongan	1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik	71,49 persen		66,45 persen	68,47 persen	**31.612.433.000**						68,47 persen	**9.313.169.000**	
1.3.6.02.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	177142.18 meter		0 meter	169642.18 meter	**31.612.433.000**						169642.18 meter	**9.313.169.000**	
1.3.6.02.01.5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang dibangun/ditingkatkan				1000 Meter	1.304.933.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1000 Meter	1.955.169.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 M							0 M		
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun/ditingkatkan				1000 M							1000 M		
1.3.6.02.01.7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				3000 M	22.200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	3000 M	4.158.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Saluran drainase yang direhabilitasi				3000 Meter							3000 Meter		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.6.02.01.9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah subsistem drainase yang dipelihara				8 Sistem	1.688.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	8 Sistem	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 M							0 M		
1.3.6.02.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi saluran drainase lingkungan yang dibangun				14 lokasi	1.254.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	14 lokasi	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M							0 M		
1.3.6.02.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi saluran drainase lingkungan yang direhab/terpelihara				41 lokasi	5.165.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	41 lokasi	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi				0 M							0 M		
1.3.8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,74 persen		17,24 persen	17,84 persen	**1.308.310.000**						17,84 persen	**1.858.898.000**	
1.3.8.02.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	1950 dokumen		300 dokumen	320 dokumen	**1.308.310.000**						320 dokumen	**1.858.898.000**	
1.3.8.02.01.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah Aplikasi Bangunan Gedung yang Tersusun				1 Unit	236.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup,	7. Pembangunan sistem penanganan	Kota Pekalongan	1 Unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Data Bangunan Gedung ber-IMB yang tersusun				1 Dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.		1 Dokumen		Penataan Ruang
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.3.8.02.01.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota (IKK Output)				2 Bangunan	997.310.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	2 Bangunan	1.598.898.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.3.8.02.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				0 Unit	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Unit	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat (IKK Output)				1 Bangunan							1 Bangunan		
1.3.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	86,57 persen		81,12 persen	83,30 persen	**38.720.773.000**						83,30 persen	**95.791.620.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.10.02.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	132.809 KM		124.448 KM	127.792 KM	**38.720.773.000**						127.792 KM	**95.791.620.000**	
1.3.10.02.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Perencanaan (DED) Jalan dan Jembatan Usulan DAK Tahun 2024 yang disusun				1 Dokumen	64.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	64.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.3.10.02.01.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Laporan Survey Jalan dan Jembatan yang disusun				1 Dokumen	126.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	64.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.3.10.02.01.5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun				0.5 Km	1.300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	0.5 Km	59.967.920.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.10.02.01.8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				0 KM	11.465.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	0 KM	13.716.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur dan fungsi) (IKK Output)				1.5 km			DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				1.5 km		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1.3.10.02.01.9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi				0.5 Km	1.646.545.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	0.5 Km	2.885.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.10.02.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 KM	2.913.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	0 KM	6.546.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang dipelihara (IKK Output)				152.603 Km							152.603 Km		
		Panjang saluran dan trotoar yang dipelihara				305.206 Km							305.206 Km		
1.3.10.02.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti				11 M	1.200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	11 M	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				0 M							0 M		
1.3.10.02.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 M	544.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	0 M	546.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan yang dipelihara (IKK Output)				1384.6 Meter							1384.6 Meter		
1.3.10.02.01.24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Jumlah lokasi jalan lingkungan yang dibangun				2 lokasi	336.974.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan	Kota Pekalongan	2 lokasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun				0 KM				Pelayanan Dasar	transportasi perkotaan.		0 KM		
1.3.10.02.01.25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Jumlah lokasi jalan lingkungan yang ditingkatkan				157 lokasi	19.123.854.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	157 lokasi	12.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	21,20 persen		7,87 persen	13,20 persen	**330.562.000**						13,20 persen	**158.996.000**	
1.3.11.02.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analis di wilayah Kabupaten/Kota	6 kali		1 kali	1 kali	**255.562.000**						1 kali	**108.996.000**	
1.3.11.02.01.4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				0 Orang	133.741.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Orang	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota				40 Orang							40 Orang		
1.3.11.02.01.7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah pembinaan untuk tenaga kontruksi wilayah Kabupaten/Kota				50 Orang	121.821.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	50 Orang	48.996.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				0 Orang							0 Orang		
1.3.11.02.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**75.000.000**						100 Persen	**50.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.11.02.02.9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi				0 Dokumen	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		jumlah dokumen penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi Analisa Standar Belanja Bangunan, data dan informasi jasa konstruksi, data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.3.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen		0,00 persen	100,00 persen	**375.000.000**						100,00 persen	**59.056.000**	
1.3.12.02.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Penetapan RTR Kab/Kota	1 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	**25.000.000**						0 dokumen	**25.000.000**	
1.3.12.02.01.4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				0 Dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah sosialisasi Perwal RDTR Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 Kali							1 Kali		
1.3.12.02.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	72 kali		12 kali	12 kali	**350.000.000**						12 kali	**34.056.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.12.02.04.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	34.056.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen SPPR				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Kali							4 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**19.497.985.000**							**28.761.288.000**	
1.4.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.655.359.000**						100 persen	**4.839.842.000**	
1.4.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**17.350.000**	
1.4.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	0 Dokumen	2.750.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Dokumen Renja yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
1.4.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	2 Dokumen	1.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.4.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Dinperkim	12 Bulan	12.950.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang disusun				4 Dokumen		Kelurahan		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	publik.		4 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
1.4.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**3.102.461.000**						100 persen	**3.352.671.000**	
1.4.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	3.070.811.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	14 kali	3.321.021.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
1.4.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.4.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD disusun				1 Dokumen	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 Dokumen	1.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**9.500.000**	
1.4.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	2 kali	9.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**234.000.000**						100 persen	**209.686.000**	
1.4.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.4.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	48.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan				35 unit							35 unit		
1.4.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	2.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.4.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman				11 Bulan	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	11 Bulan	49.186.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.4.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinperkim	12 Bulan	5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket		Semua Kelurahan	Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	kualitas pelayanan publik.		0 Paket		Permukiman
1.4.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	2.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.4.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah				100 orang/Kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	100 orang/Kali	98.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1.4.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**954.000.000**						100 persen	**964.278.000**	
1.4.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	1.800.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
1.4.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	757.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	758.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	195.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	204.278.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
1.4.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**339.398.000**						100 persen	**286.357.000**	
1.4.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional				12 Bulan	113.398.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
1.4.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	126.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	0 Unit	76.357.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin berkala				1 unit							1 unit		
1.4.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 unit	120.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit				Pelayanan Dasar			0 Unit		
1.4.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	92,35 persen		0 persen	91,35 persen	**4.949.196.000**						91,35 persen	**1.714.461.000**	
1.4.2.02.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	**75.000.000**						1 dokumen	**120.000.000**	
1.4.2.02.01.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Dokumen	75.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	0 Dokumen	60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.2.02.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	15 kegiatan		0 kegiatan	3 kegiatan	**90.000.000**						3 kegiatan	**50.000.000**	
1.4.2.02.02.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				0 Orang	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	0 Orang	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
1.4.2.02.02.4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				2 kegiatan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	2 kegiatan	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				0 Orang							0 Orang		
1.4.2.02.02.5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0 Dokumen	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan	Rumah Korban Bencana	0 Dokumen	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan rembug warga yang dilaksanakan				3 Kegiatan				Pelayanan Dasar	pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.		3 Kegiatan		
1.4.2.02.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	**3.584.196.000**						100 persen	**264.461.000**	
1.4.2.02.03.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				0 Unit Rumah	262.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban bencana	0 Unit Rumah	164.461.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah rumah yang direhabilitasi				20 Unit							20 Unit		
1.4.2.02.03.3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				1 lokasi	700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban bencana	1 lokasi	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota				0 Ha							0 Ha		
1.4.2.02.03.4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit Rumah	2.621.696.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan	Rumah Korban bencana	0 Unit Rumah	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah unit rumah yang terbangun bagi korban bencana				5 Unit				Pelayanan Dasar	pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.		5 Unit		
1.4.2.02.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen		100 persen	100 persen	**1.200.000.000**						100 persen	**1.200.000.000**	
1.4.2.02.05.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusunawa yang dipelihara				3 Unit	1.200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Susun	3 Unit	1.200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah unit villa/pesanggrahan (Pondok Boro) yang dipelihara				1 unit							1 unit		
1.4.3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Luas kawasan permukiman kumuh	0 hektar		498,47 hektar	291,47 hektar	**2.645.400.000**						291,47 hektar	**17.004.276.000**	
1.4.3.02.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 persen		100 persen	100 persen	**236.400.000**						100 persen	**236.400.000**	
1.4.3.02.01.2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DE Konsultan Perencana disusun				2 Dokumen	168.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	168.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.3.02.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha yang dilaksanakan				12 Kali	68.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	12 Kali	68.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3.02.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 persen		100 persen	100 persen	**550.000.000**						100 persen	**320.000.000**	
1.4.3.02.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	: Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				4 Kecamatan	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	4 Kecamatan	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3.02.02.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun				1 Dokumen	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.3.02.02.8	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah program pemerintah pusat atau provinsi yang difasilitasi				2 Paket	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	2 Paket	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3.02.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	508,47 hektar		10 hektar	128 hektar	**1.859.000.000**						128 hektar	**16.447.876.000**	
1.4.3.02.03.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun				1 Dokumen	74.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	74.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3.02.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH (IKK Output)				93 Unit	1.785.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	93 Unit	1.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2147,88 hektar		1649,41 hektar	1856,41 hektar	**6.620.000.000**						1856,41 hektar	**4.588.188.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.4.02.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1.31 persen		0 persen	0.52 persen	**6.620.000.000**						0.52 persen	**4.588.188.000**	
1.4.4.02.01.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh				650 Unit	6.620.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	RTLH	650 Unit	4.588.188.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah							0 Unit Rumah		
1.4.5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	14,55 persen		14,44 persen	14,48 persen	**628.030.000**						14,48 persen	**614.521.000**	
1.4.5.02.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	79.35 persen		25 persen	46.74 persen	**628.030.000**						46.74 persen	**614.521.000**	
1.4.5.02.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah aplikasi infrastruktur perumahan dan permukiman yang dibangun dan dikelola				1 Aplikasi	240.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	PSU Perumahan	1 Aplikasi	230.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Perencanaan Penyediaan PSU				1 Dokumen							1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.5.02.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah fasilitas jalan lingkungan yang ditangani				330 meter	280.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	PSU Perumahan	330 meter	280.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah fasilitas RTNH yang ditangani				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				4 Lokasi							4 Lokasi		
1.4.5.02.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi tentang PSU Perumahan (Unit Rumah yang Terfasilitasi Air Minum, Jalan Lingkungan, Akses Sanitasi, RTNH, dan PJU)				1 Dokumen	108.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	PSU Perumahan	1 Dokumen	104.521.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah perumahan yang telah menyerahkan aset PSU				10 Unit							10 Unit		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**329.285.000**							**1.099.348.000**	
2.10.5	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	**320.000.000**						100 persen	**1.090.262.000**	
2.10.5.02.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase tercapainya kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang tertangani	73.35 persen		73.35 persen	100 pers	**320.000.000**						100 pers	**1.090.262.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.10.5.02.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota yang disusun				4 Dokumen	320.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.		4 Dokumen	1.090.262.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Dokumen Proses Legalisasi Pengadaan Tanah				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah Ganti Rugi atas Tanah /Bangunan atas proyek Pemerintah				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah				5 lokasi							5 lokasi		
2.10.6	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	**9.285.000**						100 persen	**9.086.000**	
2.10.6.02.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase tercapainya kegiatan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang tertangani	0 persen		0 persen	100 pers	**9.285.000**						100 pers	**9.086.000**	
2.10.6.02.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu)	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				0 Dokumen	9.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan		0 Dokumen	9.086.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	peresentase ketercapaian penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				25 persen				Pelayanan Dasar	pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.		25 persen		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11.894.848.000**							**12.737.740.000**	
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.117.274.000**						100 persen	**5.439.494.000**	
1.5.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**62.450.000**	
1.5.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	0 Dokumen	10.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.5.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	2 Dokumen	1.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.5.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Satpol P3KP	12 bulan	50.050.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen				Pelayanan Publik	publik.		4 Dokumen		dan Penyelamatan
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
1.5.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.257.134.000**						100 persen	**4.376.416.000**	
1.5.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	4.203.484.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	4.322.766.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
1.5.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	52.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.5.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	0 Laporan	1.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.5.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**93.265.000**	
1.5.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	2 kali	9.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
1.5.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**239.439.000**						100 persen	**220.498.000**	
1.5.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	34.939.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	30.998.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				3 unit							3 unit		
1.5.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	97.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Satpol P3KP	11 bulan	97.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket		Barat, Podosugih	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Paket		Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	2.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 kali	80.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	50 kali	65.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**130.458.000**						100 persen	**127.651.000**	
1.5.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	128.458.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	125.651.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**464.743.000**						100 persen	**559.214.000**	
1.5.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				28 unit	444.743.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	28 unit	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JUmlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	70,00 persen		60,00 persen	64,00 persen	**5.850.299.000**						64,00 persen	**6.123.324.000**	
1.5.2.02.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	100 persen		80 persen	90 persen	**1.647.410.000**						90 persen	**1.819.110.000**	
1.5.2.02.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan operasi pengumpulan data dan informasi serta pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan				48 kali	106.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	48 kali	106.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.2.02.01.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				200 Kasus	275.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	200 Kasus	446.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah kegiatan sarasehan yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
1.5.2.02.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan				365 hari	1.020.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	365 hari	1.020.410.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan				120 hari							120 hari		
		Jumlah kegiatan Operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, Jambore)				25 kali							25 kali		
		Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan				48 kali							48 kali		
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Bari yang dilaksanakan				4 kegiatan							4 kegiatan		
1.5.2.02.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pemberdayaan linmas yang dilaksanakan				3 kali	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	3 kali	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan				35 orang							35 orang		
1.5.2.02.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan	Jumlah kegiatan peningkatan SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan				5 kali	48.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan	Masyarakat	5 kali	48.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				150 Orang		Podosugih	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kondusivitas wilayah.		150 Orang		Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2.02.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan				4 kali	148.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	4 kali	148.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2.02.01.9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	2 Laporan	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2.02.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	120 perda		20 perda	20 perda	**4.182.926.000**						20 perda	**4.284.680.000**	
1.5.2.02.02.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kelurahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perwal				27 kelurahan	213.265.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	27 kelurahan	218.699.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2.02.02.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan				12 kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	12 kali	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.2.02.02.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan perda yang dilaksanakan				96 kali	3.949.661.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	96 kali	4.045.981.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2.02.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	21 persen		8 persen	13 persen	**19.963.000**						13 persen	**19.534.000**	
1.5.2.02.03.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				3 Laporan	19.963.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	PPNS	3 Laporan	19.534.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**927.275.000**						100,00 persen	**1.174.922.000**	
1.5.4.02.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	**723.000.000**						100 persen	**975.040.000**	
1.5.4.02.01.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialiasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran yang dilaksanakan				6 kali	53.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	6 kali	53.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.4.02.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang tertangani				185 kali	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	185 kali	837.040.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4.02.01.7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				0 Orang	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Orang	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran				3 kali							3 kali		
1.5.4.02.01.8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah repeater HT yang diadakan				1 unit	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 unit	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Persentase pengelolaan data SKIK yang dilaksanakan				100 persen							100 persen		
1.5.4.02.01.9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah rakor dan pelatihan bersama, serta MoU yang disepakati				3 Dokumen	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 Dokumen	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4.02.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen		100 persen	100 persen	**46.426.000**						100 persen	**45.428.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.4.02.02.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi /instansi/badan				48 Dokumen	46.426.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Instansi/badan	48 Dokumen	45.428.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4.02.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	**83.567.000**						100 persen	**81.770.000**	
1.5.4.02.04.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran				4 kali	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kali	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4.02.04.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pembinaan Relawan Damkar				2 kali	33.567.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 kali	31.770.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4.02.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen		100 persen	100 persen	**74.282.000**						100 persen	**72.684.000**	
1.5.4.02.05.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				48 Laporan	74.282.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	48 Laporan	72.684.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.383.046.000**							**3.275.314.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**1.877.189.000**						100 persen	**1.880.009.000**	
1.5.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**17.707.000**	
1.5.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	2 dokumen	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	2 dokumen	1.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	13.707.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**1.428.241.000**						100 Persen	**1.444.315.000**	
1.5.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	1.395.191.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	14 kali	1.411.265.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
1.5.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	31.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	31.550.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.5.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	1 dokumen	1.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**20.520.000**						100 Persen	**46.654.000**	
1.5.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	2 kali	34.054.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
1.5.1.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				40 orang	11.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	40 orang	12.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**153.303.000**						100 Persen	**135.420.000**	
1.5.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	58.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	58.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				8 unit							8 unit		
1.5.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	1.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	29.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	29.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	9.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				25 orang/kali	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	25 orang/kali	28.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**106.858.000**						100 Persen	**100.213.000**	
1.5.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	1.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	60.516.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	58.313.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	44.842.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	40.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**152.267.000**						100 Persen	**135.700.000**	
1.5.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				12 unit	93.443.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 unit	79.859.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	1 unit	9.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	49.324.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	46.341.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**1.505.857.000**						100,00 persen	**1.395.305.000**	
1.5.3.02.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**256.597.000**						100 Persen	**156.725.000**	
1.5.3.02.01.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun				1 dokumen	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.02.01.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)				3 jenis	156.597.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 jenis	56.725.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
1.5.3.02.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**381.365.000**						100 Persen	**162.400.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.3.02.02.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana				200 orang	62.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	200 orang	62.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.02.02.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan				5 unit	268.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	5 unit	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.02.02.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan pasca bencana yang difasilitasi				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.02.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**867.895.000**						100 Persen	**985.325.000**	
1.5.3.02.03.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi				12 bulan	717.895.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	835.325.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.02.03.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan				4 kejadian	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kejadian	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**9.321.565.000**							**8.771.139.667**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**3.514.577.000**						100 persen	**4.493.228.667**	
1.6.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**17.850.000**	
1.6.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	0 Dokumen	2.750.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
1.6.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	2 dokumen	1.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.6.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	13.450.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dokumen RTP, 4 Laporan RTP)				5 dokumen							5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
1.6.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**2.633.324.000**						100 persen	**3.663.169.667**	
1.6.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	2.583.374.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	14 bulan	3.613.219.667	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
1.6.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	48.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	48.300.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.6.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	0 Laporan	1.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
1.6.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**9.500.000**	
1.6.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinsos P2KB	2 kali	9.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Paket		Keluarga Berencana
1.6.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**250.250.000**						100 persen	**339.800.000**	
1.6.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	10.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.6.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	55.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	90.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 unit							6 unit		
1.6.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	7.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.6.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	11 bulan	75.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	10.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1.6.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan perpu				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	2.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
1.6.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 kali	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	200 kali	144.800.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1.6.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**259.789.000**						100 persen	**195.885.000**	
1.6.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	2.400.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
1.6.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	162.589.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinsos P2KB	12 bulan	128.285.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan		Semua Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		0 Laporan		Berencana
1.6.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan perlatan kebersihan kantor				12 bulan	94.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	65.200.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
		Presentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah				100 persen							100 persen		
1.6.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**345.714.000**						100 persen	**267.024.000**	
1.6.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala				69 unit	256.564.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	69 unit	223.124.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
1.6.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	70.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	0 Unit	25.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala				1 unit							1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	18.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	18.900.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
1.6.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	75 persen		58 persen	58 persen	**478.171.000**						58 persen	**392.613.000**	
1.6.2.02.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen		10 persen	10 persen	**148.056.000**						10 persen	**164.235.000**	
1.6.2.02.01.2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah bulan pendampingan program KUBE				12 bulan	148.056.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Warga Miskin	12 bulan	164.235.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga							0 Keluarga		
1.6.2.02.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen		75 persen	75 persen	**330.115.000**						75 persen	**228.378.000**	
1.6.2.02.03.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 bulan	99.115.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar	PMKS	12 bulan	91.788.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor pembinaan psks yang dilaksanakan				6 kali		Semua Kelurahan	Umum	Berdaya Saing	bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.		6 kali		Berencana
1.6.2.02.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 bulan	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	12 bulan	136.590.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah TKSK yang difasilitasi				6 orang							6 orang		
1.6.2.02.03.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga	81.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	0 Keluarga	-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga							0 Lembaga		
1.6.4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**1.565.354.000**						100,00 persen	**1.793.550.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.4.02.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.500.357.000**						100 Persen	**1.723.550.000**	
1.6.4.02.01.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 oktober yang mendapat bantuan sembako				122 orang	249.004.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	122 orang	377.200.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako				225 orang							225 orang		
		Jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako				600 orang							600 orang		
1.6.4.02.01.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah pelayanan anak rentan kesejahteraan sosial				1 kegiatan	95.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	1 kegiatan	95.350.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah pmks yang mendapat alat bantu				11 orang							11 orang		
		Jumlah wanita rawan sosial yang mendapat pelatihan				10 orang							10 orang		
1.6.4.02.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan yang dilayani				83 orang	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	83 orang	60.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.4.02.01.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan	Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM				12 bulan	1.096.003.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan	PPKS	12 bulan	1.191.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Sosial	Jumlah fasilitasi kegiatan dalam peringatan harlun				1 kegiatan		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.		1 kegiatan		Keluarga Berencana
		Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)				1 kali							1 kali		
		Jumlah tenaga pendukung di RPSBM				25 orang							25 orang		
		Jumlah tenaga profesional di RPSBM				5 orang							5 orang		
1.6.4.02.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 persen		3.55 persen	3.55 Persen	**64.997.000**						3.55 Persen	**70.000.000**	
1.6.4.02.02.9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah massal				10 pasang	64.997.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	10 pasang	70.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	52.49 persen		56.69 persen	56.69 persen	**1.332.587.000**						56.69 persen	**1.085.100.000**	
1.6.5.02.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase graduasi KPM PKH	10 Persen		10 Persen	10 Persen	**1.332.587.000**						10 Persen	**1.085.100.000**	
1.6.5.02.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bulan fasilitasi bpnt				12 bulan	686.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar	PKH	12 bulan	736.600.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		jumlah bulan pelayanan slrt				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun				1 dokumen		Semua Kelurahan	Umum	Berdaya Saing	bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.		1 dokumen		Berencana
1.6.5.02.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan pendampingan PKH				12 bulan	645.937.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PKH	12 bulan	348.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah KPM PKH yang mendapatkan sosialisasi				200 orang							200 orang		
1.6.6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**1.887.689.000**						100,00 persen	**536.000.000**	
1.6.6.02.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen		100 persen	100 persen	**1.887.689.000**						100 persen	**536.000.000**	
1.6.6.02.01.1	Penyediaan Makanan	jumlah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam				1 kegiatan	470.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Masyarakat	1 kegiatan	500.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.6.02.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan				12 bulan	1.417.689.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Masyarakat	12 bulan	36.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.7	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen		100 persen	100 persen	**543.187.000**						100 persen	**470.648.000**	
1.6.7.02.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen		100 persen	100 persen	**543.187.000**						100 persen	**470.648.000**	
1.6.7.02.01.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0 Dokumen	488.187.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Taman Makam Pahlawan Nasional	0 Dokumen	385.648.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Sarpras Taman Makam Pahlawan yang direhab				1 unit							1 unit		
1.6.7.02.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan taman makam pahlawan				12 bulan	55.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Taman Makam Pahlawan Nasional	12 bulan	85.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemliharaan				1 unit							1 unit		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**3.547.261.000**							**2.828.490.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**71.497.000**						100,00 persen	**78.000.000**	
2.14.2.02.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen		100 persen	100 persen	**71.497.000**						100 persen	**78.000.000**	
2.14.2.02.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun				14 dokumen	71.497.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	14 dokumen	78.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
2.14.3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,20 persen		8,20 persen	7,80 persen	**3.312.855.000**						7,80 persen	**2.575.040.000**	
2.14.3.02.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	7.74 perseribu		9.22 perseribu	9.22 perseribu	**2.841.938.000**						9.22 perseribu	**1.854.994.000**	
2.14.3.02.01.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan KB melalui penyuluhan langsung				51 kelompok	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	51 kelompok	110.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.3.02.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB				12 bulan	2.731.938.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	12 bulan	1.744.994.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.02.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.8 persen		20.2 persen	20.2 persen	**470.917.000**						20.2 persen	**720.046.000**	
2.14.3.02.03.6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan				20 unit	184.442.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	20 unit	433.571.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.02.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB				480 orang	286.475.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	480 orang	286.475.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Unmeet need KB	12,00 persen		17,00 persen	15,00 persen	**162.909.000**						15,00 persen	**175.450.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.4.02.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen		100 persen	100 persen	**162.909.000**						100 persen	**175.450.000**	
2.14.4.02.02.1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan / fasilitasi PPKBD, KKB, kelompok kegiatan, rumah data kependudukan dan PPKS				5 kegiatan	162.909.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan	5 kegiatan	175.450.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**32.878.084.000**							**34.897.042.000**	
2.11.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**13.870.676.000**						100 persen	**15.039.400.000**	
2.11.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**23.032.000**	
2.11.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DLH	0 Dokumen	2.750.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		2 dokumen		
2.11.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	2 dokumen	1.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.11.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	18.632.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		: Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
2.11.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**10.098.974.000**						100 Persen	**11.932.596.000**	
2.11.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	9.997.324.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DLH	14 kali	11.824.946.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Orang/bulan		
2.11.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	106.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.11.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	0 Laporan	1.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
2.11.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**52.532.000**						100 Persen	**21.875.000**	
2.11.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	52.532.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	2 kali	21.875.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				300 buah							300 buah		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
2.11.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**371.750.000**						100 Persen	**280.900.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	5.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.11.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	122.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	57.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 unit							6 unit		
2.11.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.11.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	115.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	11 bulan	82.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.11.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	24.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	24.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	2.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.11.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				75 kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	75 kali	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
2.11.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**575.894.000**						100 Persen	**590.266.000**	
2.11.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	2.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
2.11.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	267.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	263.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
2.11.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	305.794.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	DLH	12 bulan	324.866.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan		Kelurahan		Pelayanan Publik	publik.		0 Laporan		
2.11.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**2.755.526.000**						100 Persen	**2.190.731.000**	
2.11.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 bulan	225.846.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	162.982.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
2.11.1.02.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit	2.392.580.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	0 Unit	1.897.449.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah bulan pemeliharaan alat besar				12 bulan							12 bulan		
2.11.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	112.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	0 Unit	105.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit							1 unit		
2.11.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	: Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
2.11.2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	20 persen		20 persen	0 persen	**75.000.000**						0 persen	**-**	
2.11.2.02.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	**75.000.000**						0 dokumen	**-**	
2.11.2.02.02.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun				1 dokumen	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	1 dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase limbah yang diolah	49,01 persen		33,37 persen	40,95 persen	**1.385.099.000**						40,95 persen	**4.442.547.000**	
2.11.3.02.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53.57 persen		42.51 persen	52.38 persen	**969.099.000**						52.38 persen	**920.999.000**	
2.11.3.02.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				0 Dokumen	635.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pelaku Usaha	0 Dokumen	552.299.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah monitoring terhadap kegiatan / usaha pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan				50 titik							50 titik		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		jumlah pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang disosialisasi				100 usaha/kegiatan							100 usaha/kegiatan		
		Jumlah pemantauan kualitas udara emisi/ambien yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan				90 kali							90 kali		
		Jumlah sampah yang diambil dari sungai				5000 m3							5000 m3		
2.11.3.02.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pelaku Usaha	0 Dokumen	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kampung iklim yang dibentuk				4 lokasi							4 lokasi		
2.11.3.02.01.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter yang diakreditasi				10 parameter	309.099.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pelaku Usaha	10 parameter	343.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah sampel yang diuji				170 sampel							170 sampel		
		Jumlah Uji Profesiensi/uji banding				1 hasil uji							1 hasil uji		
2.11.3.02.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen		70.59 persen	76.47 persen	**416.000.000**						76.47 persen	**3.521.548.000**	
2.11.3.02.	Pemberian Informasi Peringatan	Jumlah DIKPLHD yang disusun				1 dokumen	66.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Membangun Lingkungan	7. Pembangunan sistem	Masyarakat	1 dokumen	66.000.000	Dinas Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
02.1	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun				1 dokumen		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.		1 dokumen		Hidup
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				0 Laporan							0 Laporan		
2.11.3.02.02.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah IPAL komunal yang dibangun				1 unit	350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyarakat	1 unit	3.455.548.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah limbah cair yang dikelola				240000 M3							240000 M3		
		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				0 Titik							0 Titik		
2.11.4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen		2,889 persen	2,919 persen	**6.631.276.000**						2,919 persen	**3.933.751.000**	
2.11.4.02.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas RTH Publik	110.355 Ha		108.484 Ha	109.233 Ha	**6.631.276.000**						109.233 Ha	**3.933.751.000**	
2.11.4.02.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah bulan pemeliharaan rutin mangrove di PIM				12 bulan	6.256.276.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	RTH	12 bulan	3.683.751.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan				4 wilayah							4 wilayah		
		Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala makam				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala Taman Kota				1 Kota Pekalongan							1 Kota Pekalongan		
		Jumlah pengadaan konstruksi Taman Kota				4 lokasi							4 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha							0 Ha		
2.11.4.02.01.5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah TAHURA yang dipelihara				6 lokasi	375.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	RTH	6 lokasi	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha							0 Ha		
2.11.5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	100 persen		31,11 persen	13,33 persen	**2.321.000**						13,33 persen	**2.271.000**	
2.11.5.02.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	44 persen		13 persen	6 persen	**2.321.000**						6 persen	**2.271.000**	
2.11.5.02.01.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				0 Laporan	2.321.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3	0 Laporan	2.271.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya				10 perusahaan							10 perusahaan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	100 persen		16,67 persen	16,67 persen	**160.774.000**						16,67 persen	**66.461.000**	
2.11.6.02.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	60 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan	**160.774.000**						10 kegiatan	**66.461.000**	
2.11.6.02.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah inventarisasi data perusahaan di Kota Pekalongan berbasis aplikasi				1 kegiatan	117.624.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	1 kegiatan	23.311.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Izin Lingkungan				30 perusahaan							30 perusahaan		
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				0 Dokumen							0 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.6.02.01.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	38.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	0 Laporan	38.150.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin				3 kali							3 kali		
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi				65 perusahaan							65 perusahaan		
2.11.6.02.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				0 Dokumen	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	0 Dokumen	5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH				5 kali							5 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen		0 persen	50,00 persen	**453.906.000**						50,00 persen	**404.307.000**	
2.11.8.02.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5 komunitas		0 komunitas	5 komunitas	**453.906.000**						5 komunitas	**404.307.000**	
2.11.8.02.01.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan				10 kegiatan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	10 kegiatan	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup				2 kelompok							2 kelompok		
		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				0 Lembaga							0 Lembaga		
2.11.8.02.01.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina				80 orang							80 orang		
2.11.8.02.01.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan				1 event	243.906.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 event	234.307.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan				2 event							2 event		
		Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 event							1 event		
		Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan				4 lomba							4 lomba		
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				0 Orang							0 Orang		
2.11.9	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen		75 persen	75 persen	**88.209.000**						75 persen	**113.570.000**	
2.11.9.02.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	18 peng hargaan		3 peng hargaan	3 penghargaan	**88.209.000**						3 penghargaan	**113.570.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.9.02.01.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				0 Entitas	88.209.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Entitas	113.570.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah penilaian Adiwiyata Tingkat Kota yang diselenggarakan				1 event							1 event		
		Jumlah Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Daerah yang diselenggarakan				1 event							1 event		
		Jumlah penilaian Sekolah Adiwiyata yang diusulkan ke Tingkat Provinsi dan Nasional				2 event							2 event		
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen		100 persen	100 persen	**18.570.000**						100 persen	**18.171.000**	
2.11.10.02.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	36 kasus		6 kasus	6 kasus	**18.570.000**						6 kasus	**18.171.000**	
2.11.10.02.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan				18 kali	18.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	18 kali	18.171.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				0 Dokumen							0 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin				3 kali							3 kali		
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	0,31 persen		2,19 persen	0,28 persen	**10.192.253.000**						0,28 persen	**10.876.564.000**	
2.11.11.02.01	**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengurangan sampah	18.19 persen		17.01 persen	17.46 persen	**10.192.253.000**						17.46 persen	**10.876.564.000**	
2.11.11.02.01.3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pengelolaan kebersihan dan pelayanan sampah				12 bulan	7.003.303.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 bulan	6.289.342.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah ruas jalan yang diawasi kebersihannya				55 ruas jalan							55 ruas jalan		
		Jumlah ruas jalan yang dibersihkan/disapu				55 ruas jalan							55 ruas jalan		
		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0 Ton							0 Ton		
		Jumlah TPS3R yang difasilitasi				21 TPS3R							21 TPS3R		
2.11.11.02.01.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bulan operasional pengangkutan sampah				12 Bulan	744.562.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Bulan	757.222.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah fasilitasi operasional Bank				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi				30 Kali							30 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				0 Kelompok							0 Kelompok		
2.11.11.02.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah bahan habis pakai yang dibeli				12 jenis	2.444.388.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 jenis	3.830.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah dumptruk yang dibeli				1 unit							1 unit		
		Jumlah gerobak sampah yang diadakan				59 unit							59 unit		
		Jumlah kendaraan unit roda 3 yang dibeli				10 unit							10 unit		
		Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli				4 jenis							4 jenis		
		Jumlah TPS3R yang direvitalisasi				1 unit							1 unit		
		Jumlah TPS yang dipelihara				2 unit							2 unit		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.522.221.000**							**5.851.121.000**	
2.12.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.708.998.000**						100 persen	**5.070.953.000**	
2.12.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**31.194.000**	
2.12.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	0 Dokumen	2.750.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
2.12.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	2 dokumen	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.12.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	26.794.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
2.12.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**3.276.455.000**						100 Persen	**3.289.824.000**	
2.12.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	3.218.455.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	14 kali	3.225.174.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
2.12.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	56.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	63.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.12.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	0 Laporan	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
2.12.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**65.252.000**						100 Persen	**109.088.000**	
2.12.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dindukcapil	2 kali	9.500.000	Dinas Kependudukan dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Paket		Pencatatan Sipil
2.12.1.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	11.752.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	0 Orang	12.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah pelaksanaan pelatihan pelayanan administrasi kependudukan				1 kali							1 kali		
2.12.1.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan publikasi				12 bulan	44.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	87.588.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang							0 Orang		
2.12.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**908.500.000**						100 Persen	**1.247.083.000**	
2.12.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	1.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.12.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	750.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	1.062.083.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				93 unit							93 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	4.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	4.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.12.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	11 bulan	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.12.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	40.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.12.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	4.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.12.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				45 kali	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	45 kali	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
2.12.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**297.588.000**						100 Persen	**293.278.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	3.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
2.12.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	110.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	110.100.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
2.12.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	184.488.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	180.178.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
2.12.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**145.203.000**						100 Persen	**100.486.000**	
2.12.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 bulan	63.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	56.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	23.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	0 Unit	23.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit							3 unit		
2.12.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	59.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	21.486.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
2.12.2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,75 persen		80,00 persen	83,53 persen	**339.760.000**						83,53 persen	**330.857.000**	
2.12.2.02.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	1453824 dokumen		235446 dokumen	394529 dokumen	**339.760.000**						394529 dokumen	**330.857.000**	
2.12.2.02.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	272.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Dokumen	263.357.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		jumlah penerbitan KK				28000 KK							28000 KK		
		Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)				95.4 persen							95.4 persen		
2.12.2.02.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Jumlah dokumen audit dan surveilance ISO				1 dokumen	31.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat Kota Pekalongan	1 dokumen	31.500.000	Dinas Kependudukan dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0 Laporan		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Laporan		Pencatatan Sipil
2.12.2.02.01.7	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0 Laporan	36.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Laporan	36.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)				65 persen							65 persen		
2.12.3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	94,00 persen		93,25 persen	93,55 persen	**274.221.000**						93,55 persen	**275.826.000**	
2.12.3.02.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	574182 dokumen		92438 dokumen	6981 dokumen	**274.221.000**						6981 dokumen	**275.826.000**	
2.12.3.02.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				0 Dokumen	262.221.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan	0 Dokumen	263.826.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome)				93.2 persen							93.2 persen		
		Penerbitan akta kematian (IKK Output)				3225 akta kematian							3225 akta kematian		
2.12.3.02.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				0 Layanan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan	0 Layanan	12.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		penerbitan Akta Perceraian (IKK Output)				10 akta perceraian							10 akta perceraian		
		penerbitan Akta Perkawinan (IKK Output)				50 akta perkawinan							50 akta perkawinan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	14,00 OPD		5,00 OPD	9,00 OPD	**199.242.000**						9,00 OPD	**173.485.000**	
2.12.4.02.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali		2 kali	2 kali	**199.242.000**						2 kali	**173.485.000**	
2.12.4.02.03.3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)				110 buku	77.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	110 buku	76.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan							0 Laporan		
		Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk				1 aplikasi							1 aplikasi		
2.12.4.02.03.5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	91.912.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	0 Laporan	75.485.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
2.12.4.02.03.8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)				273 buku	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	273 buku	22.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannya (berupa penjilidan)				10 buku							10 buku		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah Fumigasi Arsip				1 kali							1 kali		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.263.294.000**							**765.576.000**	
2.8.2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	11,09 persen		1,85 persen	5,55 persen	**172.034.000**						5,55 persen	**96.534.000**	
2.8.2.02.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16,67 persen		16,67 persen	16.67 persen	**17.034.000**						16.67 persen	**46.564.000**	
2.8.2.02.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	17.034.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	OPD	0 Dokumen	46.564.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah dokumen PPRG yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah kegiatan Desk GAP GBS yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah koordinasi pokja PUG yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah koordinasi tim teknis PPRG yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.8.2.02.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	40,00 persen		6,67 persen	20 persen	**140.000.000**						20 persen	**36.342.000**	
2.8.2.02.02.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi PUG yang dilaksanakan				1 Kali	140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan	1 Kali	36.342.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan FGD PUG yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan Forkom Puspa yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yg dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah Koordinasi Forkom Puspa yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Koordinasi Kelompok Ekonomi Perempuan yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
2.8.2.02.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100,00 persen		50,00 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**13.628.000**	
2.8.2.02.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Jumlah kegiatan HUT Dharmawanita yang dilaksanakan				1 Kali	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran &	Dharma Wanita Persatuan	1 Kali	13.628.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pengurus dharmawanita kota yang dilaksanakan				1 Kali		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Kota Pekalongan	1 Kali		Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan				20 Kali							20 Kali		
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang							0 Orang		
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1 Kali							1 Kali		
2.8.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen		23,99 persen	23,99 persen	**329.172.000**						23,99 persen	**120.897.000**	
2.8.3.02.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 persen		0 persen	100 persen	**97.748.000**						100 persen	**56.476.000**	
2.8.3.02.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Jumlah Kegiatan Kelas Pendidikan Keluarga yang dilaksanakan				1 Kali	97.748.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik	korban kekerasan perempuan	1 Kali	56.476.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kegiatan Kelas Persiapan Pranikah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang dilaksanakan				1 Kali					perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).		1 Kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan KTP, KTA dan TPPO yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah Kelurahan yang mendapatkan penghargaan Evaluasi PATBM yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
2.8.3.02.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	**231.424.000**						100 persen	**64.421.000**	
2.8.3.02.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Case Conference Kasus Perempuan yang dilaksanakan				48 Kali	231.424.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Perempuan. Masyarakat	48 Kali	64.421.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan							0 Layanan		
		Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga				30 Kali							30 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan				35 Kali							35 Kali		
2.8.6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	55,56 persen		25,93 persen	33,33 persen	**428.985.000**						33,33 persen	**242.700.000**	
2.8.6.02.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase SRA (Sekolah Ramah Anak)	10,96 persen		9,98 persen	10.37 persen	**132.201.000**						10.37 persen	**111.630.000**	
2.8.6.02.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan				27 Kelurahan	132.201.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Sekolah Ramah Anak (SRA), Kelurahan, APSAI	27 Kelurahan	111.630.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				0 Organisasi							0 Organisasi		
		Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA Kategori Utama				10 Sekolah							10 Sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.8.6.02.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase forum anak yang aktif	40,63 persen		3,13 persen	15.63 persen	**296.784.000**						15.63 persen	**131.070.000**	
2.8.6.02.02.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	41.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	0 Orang	38.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan pelatihan KHA yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu				4 Kelompok							4 Kelompok		
2.8.6.02.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan				1 Kali	204.934.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	1 Kali	52.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan Pelatihan Forum Anak yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah Koordinasi dengan Pendamping Forum Anak Kelurahan yang dilaksanakan				27 Kelurahan							27 Kelurahan		
		Jumlah koordinasi peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Koordinasi Peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Koordinasi Program Kerja Forum Anak Tingkat Kota yg dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan agen perubahan di Sekolah Ramah Anak				8 Sekolah							8 Sekolah		
2.8.6.02.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	50S.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	0 Dokumen	40.170.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan pelatihan Kader Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB				4 Kelompok							4 Kelompok		
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
2.8.7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen		0 persen	100,00 persen	**333.103.000**						100,00 persen	**305.445.000**	
2.8.7.02.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	100,00 Persen		100,00 Persen	100 Persen	**103.245.000**						100 Persen	**152.393.000**	
2.8.7.02.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan	Jumlah Kegiatan Advokasi PPKBM yang dilaksanakan				1 Kali	103.245.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Khusus-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran &	Anak, Masyarakat	1 Kali	103.245.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelatihan Program Roots yang dilaksanakan				2 Kali		Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing	pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).		2 Kali		Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan KTP, KTA dan TPPO yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
2.8.7.02.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan usia <18 tahun yang ditangani instansi terkait	100 persen		0 persen	100 persen	**153.052.000**						100 persen	**153.052.000**	
2.8.7.02.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan case conference kasus anak yang dilaksanakan				48 Kali	153.052.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Anak korban kekerasan usia <18 tahun	48 Kali	153.052.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan							0 Layanan		
		Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang dilaksanakan				35 Kali							35 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan				25 Kali							25 Kali		
2.8.7.02.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan usia <16 tahun yang ditangani instansi terkait	100 persen		0 persen	100 persen	**76.806.000**						100 persen	**-**	
2.8.7.02.03.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan				1 Kali	76.806.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	0	1 Kali	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5.601.231.000**							**5.501.353.000**	
2.13.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**3.242.033.000**						100 persen	**3.279.021.000**	
2.13.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**18.625.000**	
2.13.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DPMPPA	0 Dokumen	3.625.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		2 Dokumen		Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	2 Dokumen	1.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.13.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	13.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
2.13.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**2.579.108.000**						100 Persen	**2.700.740.000**	
2.13.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	2.542.658.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	14 Bulan	2.652.590.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	34.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	46.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	1 Dokumen	1.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**8.631.000**	
2.13.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	2 Kali	8.631.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**214.810.000**						100 Persen	**198.052.000**	
2.13.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	1.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	33.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	25.052.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				2 Unit							2 Unit		
2.13.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	24.060.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	11 Bulan	22.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	6.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	2.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				159 Orang/Kali	145.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	159 Orang/Kali	140.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
2.13.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**226.727.000**						100 Persen	**175.079.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	2.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	81.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	68.979.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	142.727.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	103.700.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**195.888.000**						100 Persen	**177.894.000**	
2.13.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	65.088.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	65.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	0 Unit	102.094.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit							1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	10.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	10.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	100,00 persen		16,67 persen	50,00 persen	**1.221.405.000**						50,00 persen	**1.240.453.000**	
2.13.3.02.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	66.67 persen		11,11 persen	11.11 persen	**1.221.405.000**						11.11 persen	**1.240.453.000**	
2.13.3.02.01.2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1.221.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	1.240.453.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD				3 Kelurahan			Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				3 Kelurahan		
2.13.4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	70,37 persen		51,85 persen	59,26 persen	**55.900.000**						59,26 persen	**50.878.000**	
2.13.4.02.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	**55.900.000**						100 persen	**50.878.000**	
2.13.4.02.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	55.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan	1 Dokumen	50.878.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan				3 Kelurahan							3 Kelurahan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,92 persen		95,97 persen	96,35 persen	**1.081.893.000**						96,35 persen	**931.001.000**	
2.13.5.02.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	**1.081.893.000**						100 persen	**931.001.000**	
2.13.5.02.01.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen evaluasi pemberdayaan LKK yang disusun				2 Dokumen	210.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	2 Dokumen	266.415.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah laporan pengolahan data aplikasi jogotonggo yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
2.13.5.02.01.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan				1 Kali	88.753.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	1 Kali	248.936.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKK yang dilaksanakan				5 Kali							5 Kali		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga							0 Lembaga		
2.13.5.02.01.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovator TTG				3 Inovator	102.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	3 Inovator	102.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah keikutsertaan dalam event TTG tingkat nasional				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand gelar karya TTG				3 Kelurahan							3 Kelurahan		
2.13.5.02.01.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat				3 Kelurahan	71.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	3 Kelurahan	71.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.5.02.01.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan TP PKK Kota Pekalongan				12 Bulan	609.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	12 Bulan	242.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan Bintek pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Capasity Building TP PKK yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah plastik yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Gagah (Tanggap dan Tangguh) Bencana tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 Kecamatan							4 Kecamatan		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Kelompok Bank Sampah yang mendapat penghargaan lomba Bank Sampah				3 Kelompok							3 Kelompok		
		Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelurahan		
		Jumlah Peserta Pelatihan TP3 PKK				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah TP PKK Kelurahan binaan yang dibina				8 Kelurahan							8 Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Beberan dan Simulasi Pola Asuh				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelurahan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**27.829.005.000**							**27.200.753.000**	
2.15.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**20.172.325.000**						100 persen	**19.442.136.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
2.15.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**21.500.000**	
2.15.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	0 Dokumen	3.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
2.15.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	2 dokumen	2.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun (LPPD, LKPJ, LKJIP)				3 dokumen	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	3 dokumen	16.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
2.15.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.563.834.000**						100 persen	**5.273.434.000**	
2.15.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	4.478.449.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	5.185.434.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	83.385.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	86.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	1 dokumen	2.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	**26.200.000**						100 persen	**40.000.000**	
2.15.1.02.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan monev aset Dinas Perhubungan				12 bulan	26.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	40.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**150.000.000**	
2.15.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	2 kali	150.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**655.581.000**						100 persen	**672.500.000**	
2.15.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	5.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	74.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	75.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7 unit							7 unit		
2.15.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12.881.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	7.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	307.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	325.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	168.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinas Perhubungan	12 bulan	170.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan				12 bulan		Semua Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		12 bulan		
2.15.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	2.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 kali	85.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	100 kali	87.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**14.125.056.000**						100 persen	**12.474.702.000**	
2.15.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	2.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	13.803.056.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	12.151.702.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	320.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	321.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				7 orang/bulan							7 orang/bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**776.154.000**						100 persen	**810.000.000**	
2.15.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala				32 unit	317.554.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	32 unit	270.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	3 unit	500.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	58.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	40.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio		0,35 ratio	0,44 ratio	**7.656.680.000**						0,44 ratio	**7.758.617.000**	
2.15.2.02.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen		100 persen	100 persen	**2.580.300.000**						100 persen	**2.525.956.000**	
2.15.2.02.01.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0 Dokumen	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	0 Dokumen	62.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah dokumen survey lalu lintas yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
2.15.2.02.01.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah fasilitasi perlintasan sebidang				4 Unit	2.520.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan	Pengguna Jalan	4 Unit	2.463.956.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah kegiatan operasi laik jalan				40 Kali							40 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas				250 Kali		Semua Kelurahan	Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.		250 Kali		
		Jumlah kegiatan Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru				3 Kegiatan							3 Kegiatan		
2.15.2.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	4 jenis		3 jenis	4 jenis	**3.024.500.000**						4 jenis	**3.276.005.000**	
2.15.2.02.02.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum bermeterisasi				183 unit	884.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	183 unit	611.305.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				13 Lokasi							13 Lokasi		
2.15.2.02.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jasa Konsultan Perencanaan Marka Jalan				1 Pekerjaan	632.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	1 Pekerjaan	1.150.700.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Cermin Tikungan				11 unit							11 unit		
		Jumlah Lampu flashing yang terpasang				5 unit							5 unit		
		Jumlah panjang pengecatan marka jalan				7500 meter							7500 meter		
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah Vehicle Detector ATCS yang terpasang				2 unit							2 unit		
2.15.2.02.02.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum				12 bulan	1.214.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan	Pengguna Jalan	12 bulan	1.214.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Lampu penerangan jalan umum di ganti LED				100 unit				Pelayanan Dasar	transportasi perkotaan.		100 unit		
2.15.2.02.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pemeliharaan rambu dan instalasi lalu lintas				12 bulan	294.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	12 bulan	300.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Lampu LED Aspek 30 cm				3 Unit							3 Unit		
2.15.2.02.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 kali		0 kali	1 kali	**104.100.000**						1 kali	**155.000.000**	
2.15.2.02.03.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				0 Dokumen	74.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	0 Dokumen	125.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyusunan Dokumen Kelengkapan Pembangunan Terminal Tipe C				1 dokumen							1 dokumen		
2.15.2.02.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah halte yang dipelihara				2 unit	29.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	2 unit	30.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit							0 Unit		
2.15.2.02.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Sosialisasi juru parkir yang dilaksanakan	1080 kali		180 kali	96 kali	**381.000.000**						96 kali	**410.000.000**	
2.15.2.02.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian potensi parkir yang tersusun				1 dokumen	381.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan dan Juru Parkir	1 dokumen	410.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan juru parkir				96 kegiatan							96 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan							0 Laporan		
		Jumlah pelaksanaan operasi gabungan parkir				4 kali							4 kali		
		Jumlah sosialisasi juru parkir yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
2.15.2.02.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	25.06 persen		70.33 persen	65.26 persen	**898.461.000**						65.26 persen	**734.656.000**	
2.15.2.02.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan				4 unit	630.941.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	4 unit	444.656.000	Dinas Perhubungan
2.15.2.02.05.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tanda bukti lulus uji yang diadakan				6771 buah	150.695.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	6771 buah	170.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2.02.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bulan Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor				12 Bulan	103.325.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	12 Bulan	105.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Pemeliharaan Aplikasi				4 Paket							4 Paket		
		Jumlah Pemeliharaan dan Kalibrasi				1 Paket							1 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit							9 Unit		
2.15.2.02.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan kunjungan pembinaan usaha perbengkelan				5 bulan	13.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	5 bulan	15.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2.02.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92 persen		90 persen	92 persen	**470.219.000**						92 persen	**550.000.000**	
2.15.2.02.06.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi operasional ATCS				12 bulan	408.219.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pelajar	12 bulan	480.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah CCTV ATCS yang Diadakan				6 Unit							6 Unit		
		Jumlah Monitor Komputer ATCS yang Diadakan				1 Unit							1 Unit		
		Tenaga Operator ATCS				120 orang/bulan							120 orang/bulan		
2.15.2.02.06.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelajar Pelopor				1 Kegiatan	32.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pelajar	1 Kegiatan	35.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi				3 Kegiatan							3 Kegiatan		
2.15.2.02.06.5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum LLAJ				3 kali	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pelajar	3 kali	35.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.2.02.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83 persen		75 persen	83 persen	**65.500.000**						83 persen	**20.000.000**	
2.15.2.02.07.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin Pelabuhan On Shore				1 Dokumen	65.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0 Laporan							0 Laporan		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tinjauan Lapangan				4 kegiatan							4 kegiatan		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tinjauan Lapangan Rekomendasi Andalalin				4 kegiatan							4 kegiatan		
2.15.2.02.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	12 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	**65.200.000**						2 kegiatan	**47.000.000**	
2.15.2.02.08.1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	16.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Perusahaan Angkutan Umum	0 Orang	17.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah SDM tenaga LLAJ yang dibina				75 orang							75 orang		
2.15.2.02.08.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah awak angkutan umum yang dibina dan diseleksi				30 orang	39.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Perusahaan Angkutan Umum	30 orang	20.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.2.02.08.5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				0 Laporan	9.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Perusahaan Angkutan Umum	0 Laporan	10.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Monitoring Pada Perusahaan Angkutan Umum				4 kunjungan							4 kunjungan		
		Jumlah pengusaha angkutan umum yang dibina				20 orang							20 orang		
2.15.2.02.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kab/Kota yang difasilitasi	3 jenis		1 jenis	3 jenis	**67.400.000**						3 jenis	**40.000.000**	
2.15.2.02.09.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Kota yang Difasilitasi				73 armada	67.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	73 armada	40.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah armada becak yang difasilitasi dan dibina				100 armada							100 armada		
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan							0 Laporan		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**12.935.567.000**							**13.369.107.000**	
2.16.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.704.292.000**						100 persen	**4.791.045.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**35.750.000**	
2.16.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	0 Dokumen	10.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
2.16.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	2 dokumen	1.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.16.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	23.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**3.278.757.000**						100 persen	**3.298.729.000**	
2.16.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3.235.957.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	3.237.229.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
2.16.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	41.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.16.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	0 Laporan	1.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
2.16.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**10.380.000**	
2.16.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	2 kali	10.380.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**387.660.000**						100 persen	**430.763.000**	
2.16.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	5.450.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.16.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	112.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	114.760.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				17 unit							17 unit		
2.16.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	115.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	126.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.16.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	43.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.16.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	15.360.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Dinkominfo	12 bulan	15.232.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen				Pelayanan Publik	publik.		0 Dokumen		
2.16.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				80 orang/kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	80 orang/kali	125.821.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
2.16.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**586.420.000**						100 persen	**563.600.000**	
2.16.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	2.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	481.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	455.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
2.16.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	102.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	106.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**425.955.000**						100 persen	**451.823.000**	
2.16.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				27 unit	171.255.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	27 unit	210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
2.16.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	89.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	0 Unit	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 gedung							3 gedung		
		Jumlah penambahan bangunan Gedung Kantor lantai 2				1 Unit							1 Unit		
2.16.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	165.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	131.823.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
2.16.2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen		100 persen	100 persen	**5.234.061.000**						100 persen	**5.898.917.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.2.02.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	92,50 persen		80 persen	85 persen	**5.234.061.000**						85 persen	**5.898.917.000**	
2.16.2.02.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perda IKP (Informasi Komunikasi Publik) yang disusun				1 dokumen	15.755.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.2.02.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah bulan pengo.idelolaan konten media informasi dan media sosial				12 bulan	120.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 bulan	121.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.2.02.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				0 Dokumen	2.815.804.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	0 Dokumen	4.023.447.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah jam siaran RKB				18 jam							18 jam		
		Jumlah jam tayangan Batik TV				11 jam							11 jam		
2.16.2.02.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah bulan Layanan PPID Utama				12 Bulan	480.072.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan	387.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Diseminasi KIP yang diselenggarakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah dokumen pengelolaan KIP yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah kegiatan verifikasi KIP dari Komisi Informasi Jateng yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Lomba Kreativitas Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan				4 jenis							4 jenis		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
2.16.2.02.01.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah advertorial yang dimuat di media massa dalam setahun				3 kali	1.341.775.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	3 kali	924.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Layanan Hubungan Media				0 Layanan							0 Layanan		
2.16.2.02.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				0 Dokumen	81.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	0 Dokumen	33.300.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah kegiatan pendampingan FK Metra yang dilakukan				4 kali							4 kali		
		Jumlah keikutsertaan lomba FK mitra dengan Pemangku Kepentingan				1 kali							1 kali		
		Jumlah KIM yang dibentuk				5 KIM							5 KIM		
2.16.2.02.01.9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Bulan Pengelolaan pelayanan kegawatdaruratan (Call Center 112)				12 Bulan	354.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan	360.170.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan (LaporGub)				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan publik (SP4N Lapor)				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan (Wadul Aladin)				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Desiminasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diselenggarakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah Laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik				2 dokumen							2 dokumen		
2.16.2.02.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				0 Dokumen	24.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	0 Dokumen	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Press Conference yang diadakan				4 kali							4 kali		
2.16.3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,30 indeks		2,80 indeks	3,00 indeks	**2.997.214.000**						3,00 indeks	**2.679.145.000**	
2.16.3.02.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	66.06 persen		56.97 persen	60.61 persen	**2.076.900.000**						60.61 persen	**1.699.920.000**	
2.16.3.02.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dalam layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Domain dan Subdomain Pemerintah Kota Pekalongan				12 bulan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD dan masyarakat	12 bulan	20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.3.02.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan jarinagn Batik.Net				12 Bulan	2.069.900.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	OPD dan masyarakat	12 Bulan	1.679.920.000	Dinas Komunikasi dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kapasitas Bandwidth Internet yang disewa				1500 Mbps		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		1500 Mbps		Informatika
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah titik layanan akses wifi gratis yang disediakan untuk masyarakat				37 titik							37 titik		
2.16.3.02.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	51,40 persen		4.67 persen	9.35 persen	**920.314.000**						9.35 persen	**979.225.000**	
2.16.3.02.02.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen panduan manajemen spbe yang disusun				2 dokumen	206.025.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	2 dokumen	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah forum koordinasi pejnerapan SPBE yang dialksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah Perwal Kebijakan SPBE yang dilaksanakan				2 Perwal							2 Perwal		
2.16.3.02.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan DC dan DRC				12 bulan	106.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	12 bulan	129.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah capacity building tehnik pelayanan jaringan diselenggarakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				0 Unit							0 Unit		
2.16.3.02.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Aplikasi	377.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	3 Aplikasi	437.725.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Aplikasi PBE yang dilaksanakan				10 Aplikasi							10 Aplikasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah website yang dikembangkan dan dipelihara				65 website							65 website		
2.16.3.02.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi smartcity yang dikembangkan				1 aplikasi	177.904.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	1 aplikasi	185.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Fasilitasi kegiatan yang mendukung Komunitas TIK				3 komunitas							3 komunitas		
		Jumlah fitur aplikasi smartcity yang dibeli				1 aplikasi							1 aplikasi		
2.16.3.02.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan TIK bagi ASN dan Masyarakat yang dilaksanakan				8 kali	32.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	8 kali	42.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.3.02.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				0 Dokumen	19.685.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	0 Dokumen	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah dokumen pelaporan monitoring evaluasi penyelenggaraan SPBE				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah monev SPBE yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**107.118.000**							**109.027.000**	
2.20.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**107.118.000**						100,00 persen	**109.027.000**	
2.20.2.02.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	**107.118.000**						2 dokumen	**109.027.000**	
2.20.2.02.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan				1 aplikasi	107.118.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 aplikasi	109.027.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen database indikatro TIK yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen data SDTD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen publikasi statistik yang dicetak				6 Dokumen							6 Dokumen		
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**108.127.000**							**102.819.000**	
2.21.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen		0,93 persen	2,80 persen	**108.127.000**						2,80 persen	**102.819.000**	
2.21.2.02.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	56.07 persen		9.35 persen	9.35 persen	**82.897.000**						9.35 persen	**74.819.000**	
2.21.2.02.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola dan manajemen kemanan informasi yang disusun				2 dokumen	16.075.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.21.2.02.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	42.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	0 Laporan	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah leaflet promosi keamanan informasi yang dicetak				4 rim							4 rim		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah lisensi Endpoint Security (Antivirus) yang dibeli				1 lisensi							1 lisensi		
		Jumlah lisensi Sertifikat Elektronik TLS *.pekalongankota.go.id yang dibeli				1 lisensi							1 lisensi		
		Jumlah penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi yang dibeli				1 kali							1 kali		
		Jumlah sosialisasi Keamanan Informasi yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
2.21.2.02.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Assessment keamanan informasi yang dialksanakan				2 kali	24.577.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	2 kali	29.819.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah pendampingan integrasi Tanda Tangan Elektronik yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				0 Perangkat Daerah							0 Perangkat Daerah		
2.21.2.02.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen		100 persen	100 persen	**25.230.000**						100 persen	**28.000.000**	
2.21.2.02.02.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen prosedur persandian yang disusun				2 dokumen	25.230.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	2 dokumen	28.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah naskah dinas yang dikirim / diterima				76 dokumen							76 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				0 Perangkat Daerah							0 Perangkat Daerah		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**6.797.893.000**							**6.291.689.000**	
2.18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.127.747.000**						100 persen	**4.621.905.000**	
2.18.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**22.450.000**	
2.18.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	0 Dokumen	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
2.18.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	2 Dokumen	1.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.18.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	18.450.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Renja yang Disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
2.18.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**3.195.103.000**						100 Persen	**3.675.971.000**	
2.18.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3.145.003.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	3.625.871.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
2.18.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	48.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	48.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.18.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	0 Laporan	1.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		jumlah laporan keuangan SKPD disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**36.742.000**						100 Persen	**36.742.000**	
2.18.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 Kali	36.742.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	2 Kali	36.742.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Pakaian Dinas				60 Stel							60 Stel		
2.18.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**341.231.000**						100 Persen	**293.006.000**	
2.18.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.18.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	128.731.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	0 Paket	88.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan				10 Buah							10 Buah		
2.18.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.18.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor				11 Bulan	45.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	DPMPTSP	11 Bulan	45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket		Kelurahan		Pelayanan Publik	publik.		0 Paket		Pintu
2.18.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	60.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	60.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.18.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.18.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	0 Laporan	91.806.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				60 Kali							60 Kali		
2.18.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**509.296.000**						100 Persen	**504.156.000**	
2.18.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12.267.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	7.127.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
2.18.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				11 Bulan	300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	DPMPTSP	11 Bulan	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan		Kelurahan		Pelayanan Publik	publik.		0 Laporan		Pintu
2.18.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	197.029.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	197.029.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
2.18.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**1.029.375.000**						100 Persen	**89.580.000**	
2.18.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	140.302.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
2.18.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/gedung terpelihara				12 Bulan	825.863.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	19.580.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah Rehab Gedung Kantor				1 Unit							1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	63.210.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 Bulan	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
2.18.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	**92.852.000**						1 dokumen	**118.112.000**	
2.18.2.02.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Peraturan penanaman modal yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	**36.852.000**						1 dokumen	**48.112.000**	
2.18.2.02.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Audit ISO				1 dokumen	36.852.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	1 dokumen	48.112.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah peraturan penanaman modal disusun				1 peraturan							1 peraturan		
2.18.2.02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Peta potensi Penanaman Modal yang disusun	5 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	**56.000.000**						1 dokumen	**70.000.000**	
2.18.2.02.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal				1 dokumen	36.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	1 dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.2.02.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Peluang dan Potensi investasi yang disusun dan di-update				1 Dokumen	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	1 Dokumen	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen		50,00 persen	100,00 persen	**83.567.000**						100,00 persen	**81.770.000**	
2.18.3.02.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	11 Kegiatan		1 Kegiatan	2 Kegiatan	**83.567.000**						2 Kegiatan	**81.770.000**	
2.18.3.02.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran/Event Investasi Penanaman Modal				2 Kali	83.567.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Investor	2 Kali	81.770.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500 dokumen		2500 dokumen	2500 dokumen	**921.652.000**						2500 dokumen	**924.271.000**	
2.18.4.02.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	72 bulan		12 bulan	12 bulan	**921.652.000**						12 bulan	**924.271.000**	
2.18.4.02.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan izin				1 Laporan	555.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	Masyarakat di Kota Pekalongan	1 Laporan	555.682.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penyelesaian Perizinan secara elektronik sesuai Standar Pelayanan				94 persen					berdaya saing.		94 persen		
2.18.4.02.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha	237.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	0 Kegiatan Usaha	237.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Penyelesaian Pemenuhan komitmen sesuai Standar Pelayanan				94 persen							94 persen		
2.18.4.02.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat				4 Dokumen	108.632.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	4 Dokumen	111.389.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan				12 Laporan							12 Laporan		
		Jumlah sosialisasi Pelayanan Perizinan				2 Kali							2 Kali		
2.18.4.02.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan				24 Kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	24 Kali	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Investasi Baru pertahun	40,53 Miliar Rupiah		6,42 Miliar Rupiah	6,68 Miliar Rupiah	**460.606.000**						6,68 Miliar Rupiah	**434.243.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.5.02.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	848 Perusahaan		110 Perusahaan	133 Perusahaan	**460.606.000**						133 Perusahaan	**434.243.000**	
2.18.5.02.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko				3 Kali	392.626.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Perusahaan di Kota Pekalongan	3 Kali	267.231.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Bimbingan Teknis/ Sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko				3 Kali			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3 Kali		
		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya				4 Kali							4 Kali		
2.18.5.02.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				100 Perusahaan	67.980.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Perusahaan di Kota Pekalongan	100 Perusahaan	102.380.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2.18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen	100 persen	**111.469.000**						100 persen	**111.388.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.6.02.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan	34 aplikasi		4 aplikasi	6 aplikasi	**111.469.000**						6 aplikasi	**111.388.000**	
2.18.6.02.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah bulan pengelolaan Website (SIDA)				12 Bulan	111.469.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	12 Bulan	111.388.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Pelaksanaan LKPM Online (SIDA)				12 Bulan							12 Bulan		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**629.644.000**							**528.024.000**	
2.23.2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,58 indeks		15,77 indeks	16,09 indeks	**629.644.000**						16,09 indeks	**528.024.000**	
2.23.2.02.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	3.33 persen		0 persen	1.33 persen	**479.544.000**						1.33 persen	**335.024.000**	
2.23.2.02.01.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah alihmedia konten digital perpustakaan / ePustaka iPekalongankota				900 konten	99.096.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	900 konten	92.335.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				0 Layanan							0 Layanan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.2.02.01.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah kunjungan monitoring perpustakaan yang dilaksanakan				50 kali	99.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	50 kali	26.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah layanan perpustakaan diluar jam kerja yang dilaksanakan				64 Perpustakaan							64 Perpustakaan		
2.23.2.02.01.6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang diberikan pendampingan				130 Perpustakaan	58.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	130 Perpustakaan	45.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang							0 Orang		
2.23.2.02.01.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan keliling yang dilaksanakan				480 kali	126.677.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	480 kali	114.389.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Perpustakaan yang disinkronkan dengan UCS Kota Pekalongan				4 perpustakaan							4 perpustakaan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pojok online yang dilaksanakan				1 lokasi					srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		1 lokasi		
2.23. 2.02. 01.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penambahan koleksi buku cetak/ebook				300 buku	96.391.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	300 buku	56.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23. 2.02. 02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kenaikan Nilai Budaya Baca	34,45 persen		32.78 persen	33.4 persen	**150.100.000**						33.4 persen	**193.000.000**	
2.23. 2.02. 02.1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat (IKK Output)				1 Kali	29.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Kali	28.400.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.2.02.02.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	56.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Perpustakaan	55.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.2.02.02.3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Lomba Perpustakaan Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 kegiatan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 kegiatan	31.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.2.02.02.4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kegiatan literasi yg diselenggarakan				3 kegiatan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	3 kegiatan	77.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**14.768.690.000**							**3.611.305.125**	
2.24.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**14.254.729.000**						100 persen	**3.105.269.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
2.24.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**8.350.000**	
2.24.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	0 Dokumen	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	2 Dokumen	1.350.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.24.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	4 Dokumen	7.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
2.24.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**2.356.917.000**						100 persen	**2.305.962.000**	
2.24.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	2.321.417.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	14 Bulan	2.257.162.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
2.24.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	34.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 Bulan	47.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	0 Laporan	1.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
2.24.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**9.500.000**	
2.24.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 event	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	2 event	9.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
2.24.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**167.496.000**						100 persen	**218.953.000**	
2.24.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	4.755.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	4.686.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.24.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	109.655.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				8 unit							8 unit		
2.24.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	1.894.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	1.686.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.24.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	11 Bulan	53.281.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.24.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	8.347.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 Bulan	5.931.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
2.24.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	2.186.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.24.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 kali	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	50 kali	41.527.400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**11.000.000.000**						100 persen	**-**	
2.24.1.02.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun				1 Unit	11.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	1 Unit	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**508.452.000**						100 persen	**390.109.000**	
2.24.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	1.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
2.24.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	364.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	305.879.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
2.24.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	142.752.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	82.430.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**196.364.000**						100 persen	**172.395.000**	
2.24.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	88.568.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	0 Unit	77.073.800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13 unit							13 unit		
2.24.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	80.196.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	0 Unit	67.855.300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit							2 unit		
2.24.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	27.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	27.465.900	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
2.24.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	66,67 persen		33,33 persen	46,67 persen	**339.338.000**						46,67 persen	**347.462.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	52,50 indeks		40,00 indeks	45,00 indeks							45,00 indeks		
2.24.2.02.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen		32.26 persen	32.26 persen	**72.628.000**						32.26 persen	**48.336.645**	
2.24.2.02.01.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah OPD yang telah dibuatkan daftar arsip aktif (IKK Output)				10 OPD	47.628.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	10 OPD	33.500.478	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		jumlah OPD yang telah dibuatkan daftar arsip in-aktif (IKK output)				3 OPD							3 OPD		
2.24.2.02.01.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilaksanakan Audit Kearsipan / monitoring				30 OPD	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	30 OPD	14.836.167	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.2.02.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	20 persen		10 persen	14 persen	**43.483.000**						14 persen	**45.745.355**	
2.24.2.02.02.2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (IKK Output)				16 Naskah	43.483.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	16 Naskah	45.745.355	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		jumlah OPD yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik arsip untuk statis (IKK output)				3 OPD							3 OPD		
		Jumlah pelaksanaan fumigasi arsip				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pemeliharaan arsip dalam 1 tahun				12 Kali							12 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.2.02.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	90 persen		50 persen	70 persen	**223.227.000**						70 persen	**253.380.000**	
2.24.2.02.03.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inhouse training yang dselenggarakana Arsip tentang Kearsipan				1 Kali	223.227.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	1 Kali	253.380.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah regulasi kearsipan yang diterbitkan				1 Peraturan							1 Peraturan		
		Jumlah sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
2.24.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	**174.623.000**						100 persen	**158.574.125**	
2.24.3.02.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	**102.787.000**						100 persen	**94.916.925**	
2.24.3.02.01.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan untuk dimusnahkan				2500 Berkas	75.655.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	2500 Berkas	75.706.575	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.3.02.01.2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan				2500 berkas	27.132.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	2500 berkas	19.210.350	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.3.02.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	**71.836.000**						100 persen	**63.657.200**	
2.24.3.02.04.2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPK (IKK Output) hasil alih media kabupaten/kota				900 Berkas	71.836.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	900 Berkas	63.657.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah perangkat daerah yang melakukan pemusnahan arsip				18 OPD							18 OPD		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**9.829.654.000**							**9.216.475.000**	
3.25.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.723.237.000**							**5.145.552.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
3.25.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**22.500.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	0 Dokumen	2.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
3.25.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.25.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	18.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
3.25.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**3.526.830.000**						100 Persen	**4.062.954.000**	
3.25.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3.470.310.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DKP	12 bulan	4.001.454.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Orang/bulan		
3.25.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	55.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.25.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	0 Laporan	1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
3.25.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**9.500.000**	
3.25.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Karnaval batik dan hari jadi				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	2 kali	9.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
3.25.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**261.249.000**						100 Persen	**239.250.000**	
3.25.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	7.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	DKP	12 bulan	7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket		Kelurahan		Pelayanan Publik	publik.		0 Paket		
3.25.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	78.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	41.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit							5 unit		
3.25.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	4.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	4.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.25.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	60.763.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	11 bulan	67.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.25.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	7.456.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.25.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	DKP	12 bulan	2.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen		Kelurahan		Pelayanan Publik	publik.		0 Dokumen		
3.25.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 Orang / kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	100 Orang / kali	109.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
3.25.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**452.775.000**						100 Persen	**254.166.000**	
3.25.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	1.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
3.25.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	140.425.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	148.316.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
3.25.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan / bahan kebersihan kantor				12 bulan	310.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	104.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**456.883.000**						100 Persen	**557.182.000**	
3.25.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				25 unit	112.595.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	25 unit	110.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
3.25.1.02.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit	17.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	0 Unit	16.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit							1 Unit		
3.25.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	296.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	0 Unit	397.994.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit							1 unit		
3.25.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	30.188.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	33.188.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen		1,00 persen	1,00 persen	**3.110.029.000**						1,00 persen	**2.675.733.000**	
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen		1,00 persen	1,00 persen							1,00 persen		
3.25.3.02.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen		5 persen	5 persen	**298.048.000**						5 persen	**242.115.000**	
3.25.3.02.01.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	76.334.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	0 Dokumen	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
3.25.3.02.01.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				0 Unit	107.428.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	0 Unit	92.115.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang diadakan				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang diadakan				1 unit							1 unit		
3.25.3.02.01.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah penjaminan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia				1 unit	114.286.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif,	Nelayan	1 unit	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				0 Unit		Semua Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.		0 Unit		
3.25.3.02.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	10 persen		10 persen	10 persen	**186.643.000**						10 persen	**92.350.000**	
3.25.3.02.02.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	71.418.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	0 Orang	34.350.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan yang dibina				33 KUB							33 KUB		
3.25.3.02.02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				0 Kelompok	71.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	0 Kelompok	45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kelompok nelayan yang dibina				4 kelompok							4 kelompok		
3.25.3.02.02.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan				5 nelayan	43.967.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	5 nelayan	13.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		
3.25.3.02.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	6,07 persen		1 persen	1 persen	**2.552.187.000**						1 persen	**2.308.268.000**	
3.25.3.02.03.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan	Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI				12 bulan	2.552.187.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum -	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	Nelayan, pedagang ikan	12 bulan	2.308.268.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0 Layanan		Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.		0 Layanan		
3.25.3.02.04	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	48.33 persen		40 persen	43.33 persen	**51.904.000**						43.33 persen	**23.000.000**	
3.25.3.02.04.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen pencatatan kapal				20 dokumen	40.904.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	20 dokumen	12.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.25.3.02.04.2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendataan kapal				10 kapal	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	10 kapal	11.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				0 Rekomendasi							0 Rekomendasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.3.02.06	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pendaftaran Kapal yang Beroperasi	72.50 persen		57.50 persen	57.5 persen	**21.247.000**						57.5 persen	**10.000.000**	
3.25.3.02.06.2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani				70 kapal	21.247.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan, pedagang ikan, tenaga TPI	70 kapal	10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				0 Rekomendasi							0 Rekomendasi		
		Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI				1 persen							1 persen		
3.25.4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	6.15 persen		1,00 persen	1,00 persen	**1.290.398.000**						1,00 persen	**327.234.000**	
3.25.4.02.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase Pembudidaya yang dibina	79.36 persen		38.66 persen	61.92 persen	**443.000.000**						61.92 persen	**80.000.000**	
3.25.4.02.02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklahsar yang dilaksanakan				4 kategori	443.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pokdakan dan Poklahsar	4 kategori	47.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				0 Kelompok							0 Kelompok		
3.25.4.02.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen		100 persen	100 persen	**847.398.000**						100 persen	**222.234.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.4.02.04.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	115.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	0 Dokumen	15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen data bidang budidaya yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
3.25.4.02.04.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	520.633.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	0 Unit	67.234.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Prasarana Tambak Dinas/BBI yang dibangun				1 unit			DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				1 unit		
		Jumlah UPI yang direhab				1 unit							1 unit		
3.25.4.02.04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	174.505.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	0 Unit	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Sarana Usaha Pembudidayaan yang diadakan				1 unit							1 unit		
		Terkelolanya Balai Benih Ikan (BBI)				1 BBI							1 BBI		
3.25.4.02.04.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah benih ikan yang diadakan				750 ekor	37.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	750 ekor	90.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang							0 Orang		
3.25.6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha		2 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	**705.990.000**						2,00 pelaku usaha	**1.067.956.000**	
		Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen		12,2 persen	12,20 persen							12,20 persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.6.02.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen		0 persen	70 persen	**705.990.000**						70 persen	**1.004.357.000**	
3.25.6.02.03.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung technopark yang terpelihara secara rutin				1 Kawasan	705.990.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	1 Kawasan	1.004.357.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan				1 kali			DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				1 kali		
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha							0 Pelaku Usaha		
		Jumlah rehab gedung dikawasan technopark				2 unit							2 unit		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**9.048.880.000**							**3.404.251.000**	
2.19.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	95,24 persen		91,95 persen	93,69 persen	**2.335.573.000**						93,69 persen	**1.046.470.000**	
2.19.2.02.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0.99 Persen		0.39 Persen	0.64 Persen	**1.111.801.000**						0.64 Persen	**950.700.000**	
2.19.2.02.	Peningkatan Kepemimpinan,	Jumlah generasi muda yang dibina				300 Orang	636.801.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Pemuda	300 Orang	450.700.000	Dinas Pariwisata,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.8	Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi				2 Kegiatan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		2 Kegiatan		Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Kejuaraan Lomba Kepemudaan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				0 Orang							0 Orang		
		Jumlah pemuda yang ikut kemah bakti pemuda				300 Orang							300 Orang		
		Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan				300 Orang							300 Orang		
		Jumlah peserta yang dikirim mengikuti upacara tingkat provinsi				30 Orang							30 Orang		
2.19.2.02.01.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota Paskibra Kota Pekalongan yang dibina				80 orang	475.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemuda	80 orang	500.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				0 Orang							0 Orang		
2.19.2.02.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.621 Persen		0.259 Persen	0.445 Persen	**1.223.772.000**						0.445 Persen	**95.770.000**	
2.19.2.02.02.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina				200 Orang	1.223.772.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Pemuda dan Organisasi Kepemudaa	200 Orang	95.770.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	n	0 Dokumen		Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	42,86 persen		11,43 persen	34,29 persen	**6.713.307.000**						34,29 persen	**2.357.781.000**	
2.19.3.02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	80.95 Persen		47.62 Persen	71.43 Persen	**1.080.510.000**						71.43 Persen	**659.984.000**	
2.19.3.02.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga				4 Lokasi	1.080.510.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Lokasi	659.984.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah sarana prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah sarpras olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Lokasi							3 Lokasi		
2.19.3.02.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota	47.62 Persen		23.81 Persen	33.33 Persen	**1.870.000.000**						33.33 Persen	**935.000.000**	
2.19.3.02.02.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga masyarakat yang dipertandingkan				10 Cabor	1.670.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		10 Cabor	735.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina				21 Cabor							21 Cabor		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan				16 Cabor							16 Cabor		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.19.3.02.02.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				0 Orang	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Orang	200.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Kejuaraan				71 Sekolah							71 Sekolah		
2.19.3.02.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	205 orang		10 orang	37 orang	**3.019.890.000**						37 orang	**519.890.000**	
2.19.3.02.03.1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				0 Orang	215.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Orang	215.800.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tk. provinsi				250 orang							250 orang		
2.19.3.02.03.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlit yang dibina di PPLOPD				72 Orang	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		72 Orang	120.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				0 Pelatda							0 Pelatda		
2.19.3.02.03.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				0 Orang	2.684.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan		0 Orang	184.090.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina				6 Cabor		Kelurahan		Pelayanan Publik	publik.		6 Cabor		
		Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi Pengembangannya				5 Cabor							5 Cabor		
2.19.3.02.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Peningkatan Prestasi Olahraga (IKK Outcome)	24 medali		3 medali	4 medali	**40.000.000**						4 medali	**40.000.000**	
2.19.3.02.04.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Organisasi	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan				2 Cabor							2 Cabor		
2.19.3.02.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	24 Event		4 Event	4 Event	**702.907.000**						4 Event	**202.907.000**	
2.19.3.02.05.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan				5 Cabor	602.907.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		5 Cabor	102.907.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.19.3.02.05.4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				0 Dokumen	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Dokumen	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang akan dikembangkan				2 Jenis							2 Jenis		
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**4.267.140.000**							**3.611.028.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen		100 persen	100 persen	**2.566.877.000**						100 persen	**1.777.130.000**	
2.22.2.02.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	32 Event		2 Event	6 Event	**1.523.720.000**						6 Event	**1.000.000.000**	
2.22.2.02.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan				4 Kegiatan	1.523.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.		4 Kegiatan	1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi				40 Komunitas							40 Komunitas		
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek							0 Objek		
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama budaya yang difasilitasi				5 event							5 event		
2.22.2.02.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	52 Event		2 Event	10 Event	**1.043.157.000**						10 Event	**777.130.000**	
2.22.2.02.02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah cabang seni yang dilombakan				5 Cabang	1.010.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.		5 Cabang	747.130.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan yang diselenggarakan dalam pelindungan, pengembangan , pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya				7 Event							7 Event		
		Jumlah komunitas yang terfasilitasi				20 Komunitas							20 Komunitas		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek							0 Objek		
2.22.2.02.02.3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan				2 Lomba	33.157.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.		2 Lomba	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				0 Sertifikat							0 Sertifikat		
2.22.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**339.188.000**						100,00 persen	**538.138.000**	
2.22.3.02.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	165 komunitas		5 komunitas	26 komunitas	**339.188.000**						26 komunitas	**538.138.000**	
2.22.3.02.01.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah cabang seni yang dibintekkan				2 Cabang Seni	90.248.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Komunitas/Sanggar Kesenian	2 Cabang Seni	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				0 Orang							0 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.3.02.01.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi melalui DKKP				1 event	248.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Komunitas/Sanggar Kesenian	1 event	498.138.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga							0 Lembaga		
2.22.4	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**46.426.000**						100,00 persen	**68.141.000**	
2.22.4.02.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**46.426.000**						100 Persen	**68.141.000**	
2.22.4.02.01.3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang terpublikasi				1 Dokumen	46.426.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	0	1 Dokumen	68.141.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.22.5	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	97,52 persen		88,65 persen	92,20 persen	**27.500.000**						92,20 persen	**19.534.000**	
2.22.5.02.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.19 Persen		1.42 Persen	2.13 Persen	**27.500.000**						2.13 Persen	**19.534.000**	
2.22.5.02.01.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				0 Objek	27.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.		0 Objek	19.534.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah penetapan objek cagar budaya				2 Objek							2 Objek		
		Pemberian tanda bukti kepemilikan dan keaslian cagar budaya				4 Buah							4 Buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase pengunjung museum batik	4,80 persen		4,55 persen	4,66 persen	**1.287.149.000**						4,66 persen	**1.208.085.000**	
2.22.6.02.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah pengunjung museum batik	139000 Orang		25000 Orang	27000 Orang	**1.287.149.000**						27000 Orang	**1.208.085.000**	
2.22.6.02.01.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Bulan Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Batik				12 Bulan	240.688.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunjung Museum Batik	12 Bulan	210.684.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1307 Koleksi							1307 Koleksi		
2.22.6.02.01.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kegiatan yang Diselenggarakan dalam Pengelolaan Batik				8 Kegiatan	925.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunjung Museum Batik	8 Kegiatan	876.190.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				0 Unit			DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				0 Unit		
2.22.6.02.01.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum				12 Bulan	121.211.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunjung Museum Batik	12 Bulan	121.211.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit			DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				0 Unit		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**11.901.280.000**							**12.949.959.000**	
3.26.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.628.630.000**						100 persen	**5.892.402.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
3.26.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**22.850.000**	
3.26.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	2 Dokumen	2.750.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
3.26.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	2 Dokumen	1.650.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.26.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	18.450.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan				2 Laporan							2 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
3.26.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**4.550.208.000**						100 Persen	**4.715.791.000**	
3.26.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	4.467.108.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	14 Bulan	4.633.691.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
3.26.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	81.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	80.450.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	0 Laporan	1.650.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
3.26.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**259.500.000**	
3.26.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas dan Pekan Batik				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinparbudpora	2 Kali	9.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket		Semua Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		0 Paket		dan Olahraga
3.26.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**315.620.000**						100 Persen	**289.827.000**	
3.26.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	7.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	70.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 Unit							6 Unit		
3.26.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	55.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	11 Bulan	58.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan				12 Bulan	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.26.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	2.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.26.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				155 Orang	152.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	155 Orang	151.327.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**567.200.000**						100 Persen	**447.400.000**	
3.26.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	2.400.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	268.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	268.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan	296.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	177.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**170.102.000**						100 Persen	**157.034.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.26.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				19 unit	84.456.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	19 unit	74.840.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	65.646.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	1 Unit	62.194.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12,50 persen		10,00 persen	11,00 persen	**3.946.296.000**						11,00 persen	**5.444.537.000**	
3.26.2.02.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**140.000.000**						100 Persen	**2.914.126.000**	
3.26.2.02.01.2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	1 Dokumen	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2.02.01.4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring				48 Lokasi	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	48 Lokasi	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2.02.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**3.786.296.000**						100 Persen	**2.510.411.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.26.2.02.03.2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Desain Perencanaan Destinasi Pariwisata				1 Lokasi	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	1 Lokasi	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.26.2.02.03.3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	0 Lokasi	400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata				2 Pekerjaan							2 Pekerjaan		
3.26.2.02.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Berdasarkan SK Walikota				2 Orang / Tahun	570.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	2 Orang / Tahun	460.411.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/berkala				2 Lokasi							2 Lokasi		
3.26.2.02.03.7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	2.766.296.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	1 Lokasi	1.600.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Obyek Wisata yang dipelihara				1 Lokasi							1 Lokasi		
3.26.2.02.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi	100 Persen		0 Persen	100 Persen	**20.000.000**						100 Persen	**20.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.26.2.02.04.1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah usaha Pariwisata yang direkomendasi				10 Lokasi	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	10 Lokasi	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.3	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	46,98 persen		21,98 persen	31,98 persen	**1.141.926.000**						31,98 persen	**1.047.887.000**	
3.26.3.02.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	25 Persen		25 Persen	25 Persen	**1.141.926.000**						25 Persen	**1.047.887.000**	
3.26.3.02.01.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan				12 bulan	53.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	12 bulan	53.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah media promosi pariwisata kota Pekalongan				4 media							4 media		
3.26.3.02.01.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan (Kegiatan BISA)				1 Kegiatan	224.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	1 Kegiatan	224.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan pemilihan Duta wsata Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
3.26.3.02.01.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen/database statistik pariwisata				2 Dokumen	429.226.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	2 Dokumen	275.387.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan workshop promosi pariwisata yang diselenggarakan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
3.26.3.02.01.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan	Jumlah Kerjasama kemitraan yang dibentuk				1 MOU	435.200.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	wisatawan nusantara	1 MOU	495.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Luar Negeri	Jumlah pameran nasional dan regional yang dilaksanakan				2 Pameran		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.		2 Pameran		Kepemudaan dan Olahraga
3.26.4	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	59,52 persen		0 persen	30,30 persen	**494.262.000**						30,30 persen	**292.566.000**	
3.26.4.02.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO	6 event		1 event	1 event	**464.262.000**						1 event	**272.566.000**	
3.26.4.02.01.1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	tersedianya sarana prasarana ekraf				1 paket	464.262.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Insan Kreatif, Masyarakat	1 paket	272.566.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.4.02.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	90 persen		0 persen	75 persen	**30.000.000**						75 persen	**20.000.000**	
3.26.4.02.02.7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah UKM Ekraf yang terfasilitasi pendaftaran dan Pengembangan Merk HAKI				35 UMKM	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku Ekraf	35 UMKM	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.26.5	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100 persen		0 persen	40,00 persen	**690.166.000**						40,00 persen	**272.567.000**	
3.26.5.02.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	14.29 Persen		0 Persen	18.18 Persen	**690.166.000**						18.18 Persen	**272.567.000**	
3.26.5.02.01.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif tingkat dasar dikembangkan kompetensinya				60 Pelaku Ekraf	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	60 Pelaku Ekraf	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5.02.01.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah komunitas kemitraan yang terfasilitasi				1 komunitas	218.560.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	1 komunitas	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5.02.01.3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (masyarakat, guru, pelajar) yang terfasilitasi pelatihan				60 Orang	28.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	60 Orang	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5.02.01.4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif yang terfasilitasi pelatihan sertifikasi				30 Orang	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	30 Orang	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah tenga kerja ekonomi kreatif yang tersertifikasi				5 Orang							5 Orang		
3.26.5.02.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,	Jumlah kegiatan expo yang diikuti				1 Expo	314.160.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	9. Peningkatan kualitas SDM	SDM EKRAF	1 Expo	100.000.000	Dinas Pariwisata,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
01.5	Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi proses kreasi, produksi, konsumsi dan konservasi				30 Pelaku		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.		30 Pelaku		Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5.02.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dikembangkan kompetensinya				18 Pelaku	38.556.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	18 Pelaku	32.567.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5.02.01.7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dimonitoring				40 Pelaku	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	40 Pelaku	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**768.650.000**							**787.087.000**	
2.9.3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase cadangan pangan daerah	4,80 persen		3,80 persen	4,40 persen	**708.840.000**						4,40 persen	**726.214.000**	
2.9.3.02.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	**82.980.000**						100 persen	**69.400.000**	
2.9.3.02.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				0 Laporan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini,	Dinperpa	0 Laporan	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang disusun				1 dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		1 dokumen		
2.9.3.02.01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan penyaluran hibah uang				1 kegiatan	47.980.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	32.600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah produk olahan pangan berbahan baku lokal yang diujicoba dalam pelatihan				2 produk		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Hibah				2 produk		
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				0 Laporan							0 Laporan		
2.9.3.02.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan harga pangan pokok strategis				12 dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	12 dokumen	16.800.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.9.3.02.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah cadangan pangan daerah	5625 Kg		4500 Kg	5150 Kg	**101.260.000**						5150 Kg	**126.814.000**	
2.9.3.02.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyaluran cadangan pangan daerah				1 kegiatan	86.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	101.814.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.9.3.02.02.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen penyusunan PPH Konsumsi				1 dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	1 dokumen	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				0 Dokumen							0 Dokumen		
2.9.3.02.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	20 kegiatan		7 kegiatan	2 kegiatan	**524.600.000**						2 kegiatan	**530.000.000**	
2.9.3.02.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat				2 kali	524.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	kelompok pemberdayaan pekarangan	2 kali	530.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0 Laporan			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Laporan		
2.9.4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**17.970.000**						100,00 persen	**18.171.000**	
2.9.4.02.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4 kecamatan		4 kecamatan	4 kecamatan	**17.970.000**						4 kecamatan	**18.171.000**	
2.9.4.02.01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan				1 dokumen	17.970.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini,	Dinperpa	1 dokumen	18.171.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				0 Dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		0 Dokumen		
2.9.5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	88,00 persen		80,00 persen	83,20 persen	**41.840.000**						83,20 persen	**42.702.000**	
2.9.5.02.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	174 sample		24 sample	25 sample	**41.840.000**						25 sample	**42.702.000**	
2.9.5.02.01.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan				1 kegiatan	41.840.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	42.702.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kegiatan sosialiasasi keamanan pangan bagi anak sekolah dan pengelola kantin yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**6.941.311.000**							**8.453.561.000**	
3.27.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.635.939.000**						100 persen	**7.194.188.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
3.27.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**22.850.000**	
3.27.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	0 Dokumen	3.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
3.27.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	2 dokumen	1.650.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.27.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	17.700.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
3.27.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.875.407.000**						100 persen	**6.013.676.000**	
3.27.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	4.792.586.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	14 bulan	5.930.855.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang							43 Orang		
3.27.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	81.171.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	81.171.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.27.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.650.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	0 Laporan	1.650.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
3.27.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**9.500.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	9.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	2 kali	9.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
3.27.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**192.750.000**						100 persen	**149.374.000**	
3.27.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.250.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	1.250.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket					12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Paket		
3.27.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	36.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	36.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				2 unit							2 unit		
3.27.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.27.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinperpa	11 bulan	40.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket			Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		0 Paket		
3.27.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.27.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.27.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				115 kali	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	115 kali	56.624.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
3.27.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**200.000.000**						100 persen	**676.230.000**	
3.27.1.02.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ pekerjaan konstruksi yang terbangun				4 unit	200.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	4 unit	676.230.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**277.268.000**						100 persen	**265.858.000**	
3.27.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
3.27.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	120.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
3.27.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	155.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	143.858.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
3.27.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**65.014.000**						100 persen	**56.700.000**	
3.27.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional				12 bulan	46.514.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinperpa	12 bulan	38.200.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit			Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		0 Unit		
3.27.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	8.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	0 Unit	8.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit							1 unit		
3.27.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
3.27.2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Nilai produksi pertanian pertahun	55.84 Miliar Rupiah		55.56 Miliar Rupiah	55.67 Miliar Rupiah	**309.795.000**						55.67 Miliar Rupiah	**237.083.000**	
		Nilai produksi peternakan pertahun	203.65 Miliar Rupiah		184.46 Miliar Rupiah	191.91 Miliar Rupiah							191.91 Miliar Rupiah		
3.27.2.02.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen		100 persen	100 persen	**109.037.000**						100 persen	**106.565.000**	
3.27.2.02.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bulan pengelolaan lahan tanaman pangan dan hortikultura				12 bulan	109.037.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	Dinperpa	12 bulan	106.565.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen rekap RDKK tk kota				1 kegiatan							1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0 Laporan					berdaya saing.		0 Laporan		
3.27.2.02.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	**76.097.000**						100 persen	**76.670.000**	
3.27.2.02.02.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bulan pengelolaan lab kultur jaringan				12 bulan	51.097.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	lab kultur jaringan Dinperpa	12 bulan	51.670.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				0 VUB							0 VUB		
3.27.2.02.02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan				1 kali	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	lab kultur jaringan Dinperpa	1 kali	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.27.2.02.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29 kali		4 kali	5 kali	**37.661.000**						5 kali	**36.848.000**	
3.27.2.02.03.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah bulan perawatan bibit ternak				12 bulan	17.161.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	12 bulan	16.348.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.2.02.03.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelatihan pengolahan pakan ternak yang dilaksanakan				1 kegiatan	20.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	1 kegiatan	20.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				0 Laporan							0 Laporan		
3.27.2.02.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	34,01 persen		5 persen	5 persen	**87.000.000**						5 persen	**17.000.000**	
3.27.2.02.05.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar				0 Ekor	87.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	petani, peternak	0 Ekor	17.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah ternak yang dilayani kawin suntik				200 ekor							200 ekor		
3.27.3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**611.847.000**						100,00 persen	**637.518.000**	
3.27.3.02.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	**611.847.000**						100 persen	**637.518.000**	
3.27.3.02.02.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				0 Unit	220.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kelompot tani, Dinperpa	0 Unit	249.518.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah jaringan irigasi yang di rehab				1 unit							1 unit		
3.27.3.02.02.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah pagar RPH yang dibangun				0 meter	340.347.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan	Kelompot tani, Dinperpa	0 meter	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah pembangunan rumah potong hewan				1 unit							1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit				dan Berkeadilan	jasa yang mampu berdaya saing.		0 Unit		
		Jumlah rumah potong hewan yang dipelihara				2 unit							2 unit		
3.27.3.02.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pembangunan prasarana pertanian lainnya				1 unit	51.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kelompot tani, Dinperpa	1 unit	53.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit							0 Unit		
3.27.4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen		5,00 persen	5,00 persen	**235.382.000**						5,00 persen	**230.318.000**	
3.27.4.02.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani	800 kasus		800 kasus	800 kasus	**56.000.000**						800 kasus	**56.000.000**	
3.27.4.02.01.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksinasi dan diobati di lapangan (luar kandang)				2500 ekor	56.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	2500 ekor	56.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.4.02.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak	100 persen		100 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**15.000.000**	
3.27.4.02.02.2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran penjualan ternak yang dilaksanakan				6 kali	15.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak, pedagang	6 kali	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan							0 Laporan		
3.27.4.02.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	3.000 ekor		500 ekor	500 ekor	**35.000.000**						500 ekor	**35.000.000**	
3.27.4.02.03.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang diobati di PUSKESWAN				1000 ekor	35.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	1000 ekor	35.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan							0 Laporan		
3.27.4.02.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen		100 persen	100 persen	**129.382.000**						100 persen	**124.318.000**	
3.27.4.02.04.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan operasional RPH				12 bulan	91.882.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pelaku usaha	12 bulan	86.818.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.4.02.04.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan pemantauan keamanan bahan pangan asal hewan segar				12 bulan	37.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pelaku usaha	12 bulan	37.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah panitia qurban yang dilatih tentang tata cara penanganan hewan qurban yang ASUH				50 orang							50 orang		
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan							0 Laporan		
		Jumlah sosialisasi Kesmavet				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah wilayah yang dilakukan pemantauan kesehatan hewan qurban				27 kelurahan							27 kelurahan		
3.27.5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**55.711.000**						100,00 persen	**54.513.000**	
3.27.5.02.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	20 kali		0 kali	4 kali	**55.711.000**						4 kali	**54.513.000**	
3.27.5.02.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / kelp Tani	0 Ha	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah pelatihan pembuatan pestisida hayati				1 kegiatan							1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.5.02.01.5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				0 Laporan	30.711.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / kelp Tani	0 Laporan	29.513.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Jumlah fasilitasi penanggulangan bencana				2 kali							2 kali		
3.27.6	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100,00 persen		0,00 persen	50,00 persen	**32.498.000**						50,00 persen	**31.799.000**	
3.27.6.02.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	26,49 persen		5 persen	5 persen	**32.498.000**						5 persen	**31.799.000**	
3.27.6.02.02.5	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi				0 Laporan	32.498.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak, dinperpa	0 Laporan	31.799.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan				6 kegiatan							6 kegiatan		
3.27.7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen		5,00 persen	5,00 persen	**60.139.000**						5,00 persen	**68.142.000**	
3.27.7.02.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen		100 persen	100 persen	**60.139.000**						100 persen	**68.142.000**	
3.27.7.02.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah bulan pendampingan penyuluhan pertanian				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	Petani / Kelp Tani / KTNA	12 bulan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen program penyuluhan tingkat kota				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit					berdaya saing.		0 Unit		
3.27.7.02.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi Munas KTNA				1 kali	35.139.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / Kelp Tani / KTNA	1 kali	43.142.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikkan kelas				4 poktan/tahun							4 poktan/tahun		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**10.421.481.000**							**10.986.625.000**	
2.17.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**8.486.289.000**						100 persen	**8.834.957.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
2.17.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**22.850.000**	
2.17.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang tersusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 dokumen	2.750.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang tersusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 dokumen	1.650.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	18.450.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen RTP, 4 Pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
2.17.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**7.217.832.000**						100 Persen	**7.608.387.000**	
2.17.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	7.157.982.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	14 bulan	7.533.537.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	58.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	73.200.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	1 dokumen	1.650.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**14.500.000**	
2.17.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	1 kali	14.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				30 buah							30 buah		
2.17.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**307.374.000**						100 Persen	**317.450.000**	
2.17.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	74.924.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 Bulan	47.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				17 unit							17 unit		
2.17.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	64.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	11 bulan	64.950.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	60.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	100 kali	137.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**475.603.000**						100 Persen	**517.330.000**	
2.17.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyeediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.400.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				12 bulan	333.185.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	414.517.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	140.018.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	100.413.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**459.980.000**						100 Persen	**354.440.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional				12 bulan	409.980.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	304.440.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala				2 unit	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 unit	30.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	20.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.3	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	33,23 persen		24,59 persen	30,94 persen	**87.400.000**						30,94 persen	**171.400.000**	
2.17.3.02.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	65.29 persen		0 persen	62.81 persen	**87.400.000**						62.81 persen	**171.400.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.3.02.01.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Koperasi	87.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Koperasi	100 Koperasi	171.400.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.5	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,68 persen		38,36 persen	58,31 persen	**667.792.000**						58,31 persen	**631.070.000**	
2.17.5.02.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1.39 persen		0.36 persen	0.77 persen	**667.792.000**						0.77 persen	**631.070.000**	
2.17.5.02.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampinganpeningkatan kapasitas				116 Koperasi/ UMKM	667.792.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM Koperasi	116 Koperasi/ UMKM	631.070.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah koperasi yang mendapatkan dukungan pengembangan koperasi				2 koperasi			DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				2 koperasi		
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntansi berbasis teknologi informasi				10 koperasi							10 koperasi		
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Manajemen Perkoperasian				40 Koperasi							40 Koperasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Pembukuan Perkoperasian				40 Koperasi							40 Koperasi		
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi				40 koperasi							40 koperasi		
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi				40 Koperasi							40 Koperasi		
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Peratiuran Khusus (Persus)				40 Koperasi							40 Koperasi		
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian				25 koperasi							25 koperasi		
		Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitasi Sertifikasi Halal				30 UMKM							30 UMKM		
		Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewrausahaan bagi Wirausaha Pemula				40 UMKM							40 UMKM		
2.17.8	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,37 persen		11,85 persen	12,06 persen	**1.180.000.000**						12,06 persen	**1.349.198.000**	
2.17.8.02.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	7.26 UMKM		1.25 UMKM	3.65 UMKM	**1.180.000.000**						3.65 UMKM	**1.349.198.000**	
2.17.8.02.01.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,	Jumlah event pekan batik yang terselenggara				1 event	1.180.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	UMKM	1 event	1.349.198.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah UMKM yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran				90 UMKM							90 UMKM		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mendapat Pelatihan Digital Marketing				40 UMKM					berdaya saing.		40 UMKM		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**7.206.585.000**							**11.399.800.000**	
3.30.2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	77,70 persen		73,93 persen	75,42 persen	**2.786.000**						75,42 persen	**2.726.000**	
3.30.2.02.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	**1.786.000**						100 persen	**1.726.000**	
3.30.2.02.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin				3 perizinan	1.786.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan	3 perizinan	1.726.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.2.02.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	**1.000.000**						100 persen	**1.000.000**	
3.30.2.02.02.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)				1 perijinan	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Perusahaan	1 perijinan	1.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.30.3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100,00 persen		75,00 persen	81,25 persen	**5.739.616.000**						81,25 persen	**9.954.203.000**	
3.30.3.02.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18.75 persen		6.25 persen	6.25 persen	**5.589.616.000**						6.25 persen	**9.832.203.000**	
3.30.3.02.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah aplikasi sistem Informasi Database dan Pengelolaan pedagang pasar yang dibangun dan dipelihara				1 sistem aplikasi	5.589.616.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pasar rakyat	1 sistem aplikasi	6.832.203.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota				64 orang							64 orang		
		Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar				84 orang							84 orang		
		Jumlah petugas kebersihan, keamanan dan pengelolaan pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya				157 orang							157 orang		
		Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara				11 pasar							11 pasar		
3.30.3.02.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	68.97 Persen		11.49 Persen	34.48 Persen	**150.000.000**						34.48 Persen	**122.000.000**	
3.30.3.02.	Pembinaan dan Pengendalian	Jumlah lokasi kawasan Foodstreet				1 lokasi	150.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	9. Peningkatan kualitas SDM	Petugas retribusi	1 lokasi	122.000.000	Dinas Perdagangan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
02.1	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan dan penataan kawasan PK5				120 orang		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pasar, pedagang, PK5	120 orang		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya				120 orang							120 orang		
3.30.4	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100,00 persen		80,00 persen	88,00 persen	**493.949.000**						88,00 persen	**481.987.000**	
3.30.4.02.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	100 persen		27.27 persen	54.55 persen	**488.949.000**						54.55 persen	**476.987.000**	
3.30.4.02.02.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga				95 komoditas	131.367.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagang	95 komoditas	130.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.4.02.02.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar Yang Terlaksana				28 lokasi	357.582.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagang	28 lokasi	346.987.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.4.02.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	**5.000.000**						100 persen	**5.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.30.4.02.03.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang terawasi penyalurannya				586 Ton	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.		586 Ton	5.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.5	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase peningkatan volume ekspor	8,19 persen		7,24 persen	7,60 persen	**93.441.000**						7,60 persen	**117.748.000**	
3.30.5.02.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir	27 pelaku usaha		22 pelaku usaha	24 pelaku usaha	**93.441.000**						24 pelaku usaha	**117.748.000**	
3.30.5.02.01.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk Ekspor				30 UMKM	93.441.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Eksportir	30 UMKM	117.748.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.6	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	83,99 persen		73,99 persen	77,99 persen	**366.766.000**						77,99 persen	**372.506.000**	
3.30.6.02.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	83.99 persen		73.99 persen	77.99 persen	**366.766.000**						77.99 persen	**372.506.000**	
3.30.6.02.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4912 UTTP	331.766.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagang	4912 UTTP	332.506.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.30.6.02.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha Tersosialisasi Kemetrologian Legal				81 Orang	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagang	81 Orang	40.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Potensi UTTP Legal Yang Terawasi				4912 UTTP							4912 UTTP		
3.30.7	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	7,50 persen		2,09 persen	4,26 persen	**510.027.000**						4,26 persen	**470.630.000**	
3.30.7.02.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen		7.14 persen	4 persen	**510.027.000**						4 persen	**470.630.000**	
3.30.7.02.01.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jujmlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Showroom Dekranasda				100 UMKM	409.053.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku usaha mikro	100 UMKM	370.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah				6 UMKM							6 UMKM		
		Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produk				100 persen							100 persen		
3.30.7.02.01.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan e-catalog				25 UMKM	45.974.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku usaha mikro	25 UMKM	50.630.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah video pemasaran produk unggulan Kota Pekalongan yg dibuat				3 Video							3 Video		
3.30.7.02.01.3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui Pemasaran Online				30 UMKM	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku usaha mikro	30 UMKM	50.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2.836.788.000**							**3.372.802.140**	
2.7.3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,55 persen		0,33 persen	0,42 persen	**2.074.978.000**						0,42 persen	**1.892.962.140**	
2.7.3.02.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen		100 persen	100 persen	**1.879.948.000**						100 persen	**1.573.561.000**	
2.7.3.02.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih				248 orang	1.794.288.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	248 orang	1.262.459.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dengan BLK melalui kios 3in1				16 perusahaan			DBH CHT				16 perusahaan		
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				208 Orang							208 Orang		
		Lulusan bersertifikat kompetensi				128 orang							128 orang		
2.7.3.02.01.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah bulan pemeliharaan bangunan BLK				12 bulan	85.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan	Pencari Kerja	12 bulan	111.102.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Instruktur yang dinilai				14 instruktur							14 instruktur		
		Jumlah Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat				11 kejuruan							11 kejuruan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				0 Lembaga					dunia usaha.		0 Lembaga		
2.7.3.02.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 persen		0 persen	70 persen	**83.500.000**						70 persen	**134.243.000**	
2.7.3.02.02.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Instruktur yang mengikuti pelatihan kompetensi				20 orang	83.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20 orang	134.243.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				0 Lembaga							0 Lembaga		
		Jumlah orang yang mengikuti workshop tata kelola LPKS				30 orang							30 orang		
		Jumlah volume kunjungan monitoring ke LPKS selama 1 (satu) tahun				24 kali							24 kali		
2.7.3.02.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	36 tenant		6 tenant	6 tenant	**81.530.000**						6 tenant	**98.507.140**	
2.7.3.02.04.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				0 Perusahaan	81.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Perusahaan Kecil	0 Perusahaan	98.507.140	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah tenant yang memperoleh pembinaan				6 tenant							6 tenant		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.7.3.02.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	53.33 persen		0 persen	33.33 persen	**30.000.000**						33.33 persen	**86.651.000**	
2.7.3.02.05.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah alumni siswa pelatihan yang termonitor				600 alumni siswa	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja	600 alumni siswa	86.651.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah peminat magang Jepang yang mengikuti pembekalan				15 orang							15 orang		
2.7.4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	29,93 persen		19,93 persen	23,93 persen	**243.500.000**						23,93 persen	**996.046.000**	
2.7.4.02.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	14.08 persen		8.52 persen	10.75 persen	**85.000.000**						10.75 persen	**436.105.000**	
2.7.4.02.01.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				0 Orang	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Orang	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah sosialisasi ketenagakerjaan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.7.4.02.01.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				0 Orang	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Orang	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja				160 orang							160 orang		
2.7.4.02.01.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan				20 orang	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	20 orang	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				0 Orang							0 Orang		
2.7.4.02.01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lokasi pelaksanaan padat karya				3 lokasi	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	3 lokasi	296.105.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota (Transmigrasi)(IKK Output)				1 buah							1 buah		
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar Dalam Satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)				3 KK							3 KK		
		Jumlah Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB)				10 WUB							10 WUB		
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				0 Orang							0 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.7.4.02.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	72 buku		12 buku	12 buku	**115.500.000**						12 buku	**158.814.000**	
2.7.4.02.03.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				0 Dokumen	30.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Dokumen	31.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online				1 orang							1 orang		
		Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Di Kab/Kota (IKK Output)				12 laporan							12 laporan		
2.7.4.02.03.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Fasilitasi Pelayanan Online Sistem Antar Kerja / AK I				1000 orang	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	1000 orang	16.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah layanan yang dilaksanakan				700 layanan							700 layanan		
		Jumlah leaflet antar kerja yang dicetak				4 rim							4 rim		
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				0 Orang							0 Orang		
2.7.4.02.03.3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				0 Orang	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Orang	111.314.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan job fair				50 perusahaan							50 perusahaan		
2.7.4.02.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	249 orang		29 orang	39 orang	**36.000.000**						39 orang	**392.041.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.7.4.02.04.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output)				60 orang	20.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pekerja Migran Indonesia (PMI)	60 orang	307.041.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata (IKK Output)				40 orang							40 orang		
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				0 Orang							0 Orang		
2.7.4.02.04.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terfasilitasi rekomendasi paspor				75 orang	16.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pekerja Migran Indonesia (PMI)	75 orang	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				0 Orang							0 Orang		
		Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI				120 orang							120 orang		
2.7.4.02.05	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perusahaan terlayani perpanjangan IMTA di Kab/Kota	12 perusahaan		2 perusahaan	2 perusahaan	**7.000.000**						2 perusahaan	**9.086.000**	
2.7.4.02.05.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan	Tenaga Kerja	0	9.086.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Monitoring Tenaga Kerja Asing di Perusahaan				5 perusahaan					kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.		5 perusahaan		
2.7.5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	49,02 persen		45,33 persen	46,80 persen	**518.310.000**						46,80 persen	**483.794.000**	
2.7.5.02.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	42.28 persen		37.00 persen	39.11 persen	**407.155.000**						39.11 persen	**320.450.000**	
2.7.5.02.01.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan (PP)				50 perusahaan	15.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Perusahaan	50 perusahaan	25.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				0 Perusahaan							0 Perusahaan		
2.7.5.02.01.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)				15 perusahaan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan	Perusahaan	15 perusahaan	18.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				0 Perusahaan					jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.		0 Perusahaan		
2.7.5.02.01.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				0 Laporan	379.605.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Perusahaan	0 Laporan	277.450.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Pekerja Informal yang menerima bantuan premi				1000 orang							1000 orang		
		Jumlah perusahaan yang didata ketenagakerjaannya				108 perusahaan							108 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti Pembinaan Pengupahan				40 Perusahaan							40 Perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti Sosialisasi UMK				45 Perusahaan							45 Perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti Workshop Struktur Skala Upah				40 Perusahaan							40 Perusahaan		
		Jumlah sidang/ rapat Dewan Pengupahan				8 kali							8 kali		
		Rekomendasi UMK				1 Rekomendasi UMK							1 Rekomendasi UMK		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.7.5.02.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	80.06 persen		48.57 persen	68.07 persen	**111.155.000**						68.07 persen	**163.344.000**	
2.7.5.02.02.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang mengikuti dialog pencegahan perselisihan Hubungan Industrial/HI				35 perusahaan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	35 perusahaan	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.5.02.02.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				0 Perkara	8.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Perkara	12.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi mediasi				28 kasus							28 kasus		
2.7.5.02.02.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	22.344.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/ Pengusaha/ Manajemen Perusahaan,dan Organisasi Pengusaha yg mengikuti pembinaan				80 pengurus							80 pengurus		
2.7.5.02.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				0 Lembaga	66.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Lembaga	99.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peserta yang mengikuti porseni tripartit				150 orang							150 orang		
		Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit				6 kali							6 kali		
		Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit				8 kali							8 kali		
2.7.5.02.02.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta pembinaan fasiitas kesejahteraan pekerja				55 perusahaan	8.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	55 perusahaan	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				0 Orang							0 Orang		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**7.903.827.000**							**7.030.215.000**	
3.31.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**7.319.827.000**						100 persen	**6.618.947.000**	
3.31.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**22.049.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 dokumen	2.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 dokumen	1.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.31.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	18.049.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
3.31.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**6.274.726.000**						100 persen	**5.753.073.000**	
3.31.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	6.226.626.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Dinperinaker	0 Orang/bulan	5.689.573.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali		Kelurahan		Pelayanan Publik	publik.		14 kali		
3.31.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	46.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	62.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
3.31.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	0 Laporan	1.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
3.31.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**8.631.000**	
3.31.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi Jumlah pakaian dinas yang diadakan				2 kali/buah	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 kali/buah	8.631.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
3.31.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**179.040.000**						100 persen	**232.954.000**	
3.31.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	3.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.31.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	53.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	56.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.31.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	5.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.31.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	31.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	11 bulan	44.954.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.31.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	7.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
3.31.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	3.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				83 orang/kali	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	83 orang/kali	114.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
3.31.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**297.120.000**						100 persen	**29.074.000**	
3.31.1.02.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan bangunan yang diadakan				1 dokumen	297.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	1 dokumen	29.074.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
3.31.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**422.968.000**						100 persen	**474.810.000**	
3.31.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	2.400.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
3.31.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				9 bulan	185.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	9 bulan	228.710.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	235.568.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	243.700.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
3.31.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**120.473.000**						100 persen	**98.356.000**	
3.31.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				6 bulan	51.973.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	6 bulan	35.556.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
3.31.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	0 Unit	42.800.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit							2 unit		
3.31.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	18.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
3.31.2	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	21,04 persen		20,59 persen	20,43 persen	**473.000.000**						20,43 persen	**271.800.000**	
3.31.2.02.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.5 persen		2.0 persen	3 persen	**473.000.000**						3 persen	**271.800.000**	
3.31.2.02.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0 Dokumen	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 Dokumen	20.800.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah sentra yang difasilitasi kelembagaan				1 sentra							1 sentra		
3.31.2.02.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0 Dokumen	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 Dokumen	21.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah ikm yang dilatih produksi bersih/industri hijau				30 ikm							30 ikm		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.2.02.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bangunan yang dirawat/dipelihara				1 kawasan	348.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	1 kawasan	130.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kegiatan industri				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah IKM yang dilatih Peningkatan Manajemen Mutu				30 IKM							30 IKM		
3.31.2.02.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 Dokumen	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah SDM IKM yang dilatih Pelatihan Kemasan				25 IKM							25 IKM		
3.31.2.02.01.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 Dokumen	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah IKM/Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi SIINas				30 IKM							30 IKM		
		Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Peningkatan Teknologi Digitalisasi IKM				30 IKM							30 IKM		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.3	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	26,00 persen		23,00 persen	24,00 persen	**66.000.000**						24,00 persen	**13.628.000**	
3.31.3.02.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	33 persen		23 persen	25 persen	**66.000.000**						25 persen	**13.628.000**	
3.31.3.02.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	66.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 Dokumen	13.628.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah IKM yang difasilitasi PIRT/HALAL				15 IKM							15 IKM		
		Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Desain dan Pengembangan Diversifikasi Produk				30 IKM							30 IKM		
		Jumlah IKM yang mengikuti Pengembangan Kapasitas IKM Baru				30 IKM							30 IKM		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**45.000.000**						100,00 persen	**125.840.000**	
3.31.4.02.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	35 persen		23 persen	28 persen	**45.000.000**						28 persen	**125.840.000**	
3.31.4.02.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				0 Dokumen	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 Dokumen	120.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembangan usaha				2000 IKM							2000 IKM		
3.31.4.02.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				0 Dokumen	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 Dokumen	5.840.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Evaluasi RPIK yang dilakukan				1 kali							1 kali		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**954.076.000**							**921.872.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**954.076.000**						100,00 persen	**921.872.000**	
4.1.2.02.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100 persen		0 persen	100 persen	**872.076.000**						100 persen	**842.872.000**	
4.1.2.02.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan evaluasi capaian SPM yang disusun				1 dokumen	19.119.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	388.782.000	Sekretariat Daerah
4.1.2.02.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah bulan perawatan/pemeliharaan patok tapal batas wilayah				12 bulan	659.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 bulan	254.390.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen Monografi Kelurahan yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah Kegiatan Lomba K 3 yang diselenggarakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan dana kelurahan yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Sarasehan K 3 yang dilaksanakan				22 kegiatan							22 kegiatan		
		Jumlah Pembinaan Administrasi Kelurahan				27 kelurahan							27 kelurahan		
		Jumlah Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan							12 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota Pekalongan				4 unsur							4 unsur		
4.1.2.02.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Buku LPPD Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	193.665.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	199.700.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Dokumen Buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
4.1.2.02.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100 persen		0 persen	100 persen	**82.000.000**						100 persen	**79.000.000**	
4.1.2.02.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak lain skala lokal/regional/nasional/ internasional (SIDA)				70 kerjasama	82.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	70 kerjasama	79.000.000	Sekretariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.020.615.000**							**1.018.523.000**	
4.1.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**1.020.615.000**						100,00 persen	**1.018.523.000**	
4.1.2.02.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Presentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 persen		100 persen	100 persen	**1.020.615.000**						100 persen	**1.018.523.000**	
4.1.2.02.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian peraturan perundang undangan daerah yang disusun				4 raperda/perda	119.215.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum, Masyarakat dan Perangkat Daerah	4 raperda/perda	119.215.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah produk hukum daerah yang disusun (SIDA)				9 produk hukum							9 produk hukum		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.2.02.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan RANHAM/Kota peduli HAM di Kota Pekalongan yang disusun				2 laporan	821.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum, Masyarakat dan Perangkat Daerah	2 laporan	818.308.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah masyarakat yang mengikuti fasilitasi pelayanan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat				500 orang							500 orang		
		Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang dilaksanakan				3 perkara							3 perkara		
		Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani				12 kali							12 kali		
		Jumlah perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan				6 kali							6 kali		
4.1.2.02.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang dilaksanakan				12 bulan	79.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum, Masyarakat dan Perangkat Daerah	12 bulan	81.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				0 Dokumen							0 Dokumen		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**360.829.000**							**406.396.000**	
4.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		100 persen	100 persen	**360.829.000**						100 persen	**406.396.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.02.13	**Penataan Organisasi**	Indeks Kelembagaan Kota	81 indeks		76 indeks	78 indeks	**360.829.000**						78 indeks	**406.396.000**	
4.1.1.02.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja				2 dokumen	93.679.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah	2 dokumen	112.396.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0 Dokumen							0 Dokumen		
4.1.1.02.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0 Laporan	137.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah	0 Laporan	156.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SIDa)				2 OPD							2 OPD		
		Jumlah OPD yang menyusun Peta Proses Bisnis				10 OPD							10 OPD		
		Jumlah OPD yang menyusun SOP				3 OPD							3 OPD		
		Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP				1 OPD							1 OPD		
		Jumlah unit kerja yang disurvey IKM				65 Unit Kerja							65 Unit Kerja		
4.1.1.02.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	129.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah	1 Dokumen	138.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen LKJIP Kota Pekalongan yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen							0 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pembinaan internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah laporan capaian kinerja OPD yang disusun				31 Dokumen							31 Dokumen		
		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pembangunan Zona Integritas				2 OPD							2 OPD		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**314.365.000**							**918.373.000**	
4.1.3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**314.365.000**						100,00 persen	**918.373.000**	
4.1.3.02.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**						**243.865.000**							**262.665.000**	
4.1.3.02.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BLUD yang dimonitoring				16 BLUD	64.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		16 BLUD	76.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah BUMD yang difasilitasi				4 BUMD							4 BUMD		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0 Dokumen							0 Dokumen		
4.1.3.02.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0 Laporan	80.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan		0 Laporan	88.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Penyedia Gas Elpiji yang dimonitoring				6 Penyedia				Pelayanan Publik	publik.		6 Penyedia		
		Jumlah Penyedia Pupuk Bersubsidi yang dimonitoring				4 Penyedia							4 Penyedia		
		Jumlah Rakor Bidang Ekonomi yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Rakor Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
4.1.3.02.01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumah Rakor Pemantauan Pengelolaan KUR yang dilaksanakan				4 kali	99.865.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		4 kali	98.665.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah barang cetak kegiatan aktivasi dan publikasi branding				4475 buah							4475 buah		
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah Rakor Komite Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah Rakor TPAKD yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
4.1.3.02.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT	12 bulan		12 bulan	12 bulan	**70.500.000**						12 bulan	**655.708.000**	
4.1.3.02.04.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				0 Dokumen	70.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	0 Dokumen	655.708.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah OPD pengelola DBHCHT yang dimonitoring				6 OPD							6 OPD		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**674.794.000**							**617.475.000**	
4.1.3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen		7,00 persen	6,00 persen	**674.794.000**						6,00 persen	**617.475.000**	
4.1.3.02.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen		100 persen	100 persen	**112.678.000**						100 persen	**109.935.000**	
4.1.3.02.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	45.351.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 Laporan	42.935.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Monev yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun				12 kali							12 kali		
4.1.3.02.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan				4 kali	67.327.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	4 kali	67.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.3.02.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	**562.116.000**						100 persen	**507.540.000**	
4.1.3.02.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan				1 kali	263.714.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	219.686.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (IKK Outcome)				60 pekerjaan							60 pekerjaan		
4.1.3.02.03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Sewa Bandwitch yang dilaksanakan dalam satu tahun				1 kali	298.402.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	287.854.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (IKK Outcome)				100 persen							100 persen		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**18.525.259.000**							**16.025.435.000**	
4.1.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**18.525.259.000**						100,00 persen	**16.025.435.000**	
4.1.2.02.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen		100 persen	100 persen	**18.525.259.000**						100 persen	**16.025.435.000**	
4.1.2.02.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0 Dokumen	16.500.404.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	0 Dokumen	14.422.865.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah guru TPQ/MADIN Kota Pekalongan yang dapat difasilitasi jasa tenaga pendidik, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan				2594 orang							2594 orang		
		Jumlah kegiatan fasilitasi haji				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) tingkat Kota Pekalongan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Hari Santri Nasional				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan MTQ STQ tingkat Kota Pekalongan, untuk pelajar dan umum				2 kegiatan							2 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pelatihan pemulasaraan jenasah				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PHBI				5 kegiatan							5 kegiatan		
		Jumlah Kyai yang dapat difasilitasi jasa/insentif				100 orang							100 orang		
		Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi bantuan hibah				170 lembaga							170 lembaga		
		Jumlah petugas TKHD dan TPHD kegiatan fasilitasi BPIH Kota Pekalongan				3 orang							3 orang		
		Jumlah takmir masjid, takmir musholla dan lebe jenasah (non-PNS) yang dapat difasilitasi jasa/insentif				3060 orang							3060 orang		
4.1.2.02.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				0 Dokumen	678.075.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	0 Dokumen	660.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pemberian bantuan sosial berupa beras kepada panti asuhan, yayasan dan pondok pesantren				26 lembaga							26 lembaga		
		Jumlah takmir musholla dan lebe non pns yang mendapat santunan kematian				2360 orang							2360 orang		
4.1.2.02.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				0 Dokumen	1.346.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	0 Dokumen	942.570.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah fasilitasi beasiswa pendidikan				500 siswa							500 siswa		
		Jumlah kegiatan fasilitasi BP4				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah kegiatan fasilitasi Houl Habib				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Istigasah Hari Jadi				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Khotmil Quran Hari Jadi				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pengajian Akbar				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pengajian Rutin/Ngaji Bareng				11 kegiatan							11 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan senam aerobik Jumat pagi di lapangan Setda dan Minggu pagi di lapangan Tirto bersama masyarakat				45 kegiatan							45 kegiatan		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.668.749.000**							**29.430.330.000**	
4.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**30.668.749.000**						100 persen	**29.430.330.000**	
4.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**67.000.000**						100 persen	**75.250.000**	
4.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 Dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 Dokumen	3.500.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Hukum yang disusun				2 Dokumen	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 Dokumen	12.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Organisasi yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian PBJ dan Minbang yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Pemerintahan yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Perekonomian dan SDA yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Umum yang disusun				2 Dokumen							2 Dokumen		
4.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 Bulan	59.750.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Hukum yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Organisasi yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian PBJ dan Minbang yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Pemerintahan yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Perekonomian dan SDA yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Umum yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
4.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**14.144.847.000**						100 persen	**14.279.734.000**	
4.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	13.925.697.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	14 kali	14.048.634.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian hukum				12 bulan	199.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	211.600.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian protokol dan komunikasi pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian hukum yang disusun				1 dokumen	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	1 dokumen	19.500.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Kesra yang disusun				1 dokumen		Semua Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Organisasi yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian PBJ dan minbang yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Pemerintahan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Perekonomian dan SDA yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Protokol dan komunikasi pimpinan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Umum yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
4.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**91.750.000**						100 persen	**87.250.000**	
4.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Karnaval Batik dan Hari Jadi				2 kali	91.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 kali	87.250.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				65 stel							65 stel		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**6.676.223.000**						100 persen	**6.294.556.000**	
4.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	80.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
4.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Hukum				12 bulan	1.040.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.040.725.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian PBJ dan minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				29 unit							29 unit		
4.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	170.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	0 Paket	170.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga				12 bulan							12 bulan		
4.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian hukum				11 bulan	1.591.721.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	11 bulan	1.591.721.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Kesejahteraan rakyat				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Organisasi				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian PBJ dan Minbang				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Pemerintahan				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Perekonomian dan SDA				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				11 bulan							11 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum				11 bulan							11 bulan		
4.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Hukum				12 bulan	66.831.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	257.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Hukum				12 bulan	77.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	77.500.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Umum				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	1.085.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.085.258.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	2.564.188.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	0 Laporan	1.991.852.000	Sekretariat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Hukum				120 orang/kali							120 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat				304 orang/kali							304 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian organisasi				50 orang/kali							50 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian PBJ dan Minbang				25 orang/kali							25 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Pemerintahan				60 orang/kali							60 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Perekonomian dan SDA				115 orang/kali							115 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan				87 orang/kali							87 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Umum				900 orang/kali							900 orang/kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**2.396.180.000**						100 persen	**2.396.180.000**	
4.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Hukum				12 bulan	26.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	26.600.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	969.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	969.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	1.400.580.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.400.580.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**5.025.272.000**						100 persen	**4.803.766.000**	
4.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 bulan	1.600.541.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.456.080.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				82 Unit							82 Unit		
4.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	3.024.231.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	7 Unit	2.947.186.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Hukum				12 bulan	400.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	400.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				447 Unit							447 Unit		
4.1.1.02.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**827.477.000**						100 persen	**683.594.000**	
4.1.1.02.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 kali	807.477.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	14 kali	653.594.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan							0 Orang/Bulan		
4.1.1.02.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 kali	30.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang							0 Orang		
4.1.1.02.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.440.000.000**						100 persen	**810.000.000**	
4.1.1.02.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				12 bulan	840.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	480.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.02.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 bulan	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	330.000.000	Sekretariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.334.362.000**							**1.227.756.000**	
4.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen		100 persen	100 persen	**1.334.362.000**						100 persen	**1.227.756.000**	
4.1.1.02.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100 persen		100 persen	100 persen	**1.334.362.000**						100 persen	**1.227.756.000**	
4.1.1.02.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokoleran dalam kegiatan kedinasan				12 bulan	253.022.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	274.540.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.02.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kinerja KDH dan Wa. KDH yang terbit pada media massa regional dan lokal				180 kali terbit	765.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	180 kali terbit	603.216.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun				1 kali							1 kali		
4.1.1.02.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah bulan fasilitasi dokumentasi tugas pimpinan				12 bulan	315.440.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	350.000.000	Sekretariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.2	**SEKRETARIAT DPRD**						**50.774.945.000**							**47.539.100.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**31.488.032.000**						100 persen	**28.115.194.000**	
4.2.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**16.500.000**	
4.2.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	0 Dokumen	7.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
4.2.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	2 dokumen	1.500.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
4.2.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 Bulan	8.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
4.2.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**2.918.853.000**						100 Persen	**3.183.992.000**	
4.2.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2.863.453.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	0 Orang/bulan	3.112.092.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali							14 kali		
4.2.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	53.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	70.400.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
4.2.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	0 Laporan	1.500.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
4.2.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**9.500.000**	
4.2.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	2 kali	9.500.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				20 buah							20 buah		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
4.2.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**2.752.266.000**						100 Persen	**2.709.662.000**	
4.2.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponeninstalasi/penerangan bangunan kantor				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
4.2.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	255.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	255.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				18 Unit							18 Unit		
4.2.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	644.766.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	11 bulan	627.162.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	142.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	142.500.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
4.2.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan				12 bulan	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	35.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
4.2.1.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	300.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan							0 Laporan		
4.2.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				450 orang/kali	1.325.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	450 orang/kali	1.300.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
4.2.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**901.800.000**						100 Persen	**894.965.000**	
4.2.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	1.800.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12 Bulan	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 Bulan	200.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
4.2.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	700.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 Bulan	693.165.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
4.2.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**1.559.613.000**						100 Persen	**1.428.752.000**	
4.2.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 bulan	1.039.613.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	908.752.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
4.2.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	0 Unit	400.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit							2 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 Bulan	120.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
4.2.1.02.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**22.330.000.000**						100 Persen	**18.871.823.000**	
4.2.1.02.15.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD				12 Bulan	21.250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	12 Bulan	17.841.823.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.02.15.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				140 Stel	550.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	140 Stel	500.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.02.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Fasilitasi perawatan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD				35 orang/kali	530.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	35 orang/kali	530.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				0 Orang							0 Orang		
4.2.1.02.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.000.000.000**						100 Persen	**1.000.000.000**	
4.2.1.02.16.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi/pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD				12 Bulan	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	12 Bulan	400.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0 Laporan							0 Laporan		
4.2.1.02.16.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD				12 Bulan	600.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	12 Bulan	600.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
4.2.2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**19.286.913.000**						100,00 persen	**19.423.906.000**	
4.2.2.02.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**8.300.000.000**						100 Persen	**8.300.000.000**	
4.2.2.02.01.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan				12 Perda	3.000.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	12 Perda	3.000.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2.02.01.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Pendampingan/pengkajian Raperda yang dilakskanakan				20 Kali	5.300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	20 Kali	5.300.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2.02.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi	30 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	**417.837.000**						5 dokumen	**408.849.000**	
4.2.2.02.02.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS				2 kali	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	2 kali	150.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2.02.02.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				0 Dokumen	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Pemerintah Kota Pekalongan	0 Dokumen	150.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pembahasan APBD yang dilaksanakan				2 kali		Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		2 kali		
4.2.2.02.02.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				0 Dokumen	117.837.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	0 Dokumen	108.849.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah fasilitas pembahasan pertanggungjawaban APBD				1 kali							1 kali		
4.2.2.02.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**2.550.000.000**						100 Persen	**3.150.000.000**	
4.2.2.02.04.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				0 Dokumen	1.150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	2.000.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Pelaksanaan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD				4 kali							4 kali		
4.2.2.02.04.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				0 Dokumen	1.050.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	800.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Publikasi Produk hukum yang disosialisasikan				60 kali							60 kali		
4.2.2.02.04.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah rapatdengar pendapat/dialog dengan pejabat pemeriontah daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang dilaksanakan				20 kali	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	20 kali	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2.02.04.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan program Kerja /Agenda kerja DPRD				1 kali	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	50.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.2.02.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.700.000.000**						100 Persen	**1.700.000.000**	
4.2.2.02.05.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Fasilitasi koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD				96 kali	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	96 kali	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2.02.05.3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				0 Dokumen	1.400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	1.400.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Fasiltasi kegiatan reses daerah wilayah pemilihan				3 kali							3 kali		
4.2.2.02.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**6.319.076.000**						100 Persen	**5.865.057.000**	
4.2.2.02.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0 Dokumen	6.319.076.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	0 Dokumen	5.865.057.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan kerja Alat Kelengkapan dewan				50 kali							50 kali		
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Adeksi				2 kali							2 kali		
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.1	**PERENCANAAN**						**7.598.308.000**							**8.054.099.000**	
5.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**6.025.190.000**						100 persen	**6.463.227.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**741.000.000**						100 persen	**318.906.000**	
5.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	2 dokumen	2.717.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	2 dokumen	1.630.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun				1 Laporan	725.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	1 Laporan	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	314.559.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.605.337.000**						100 persen	**5.572.053.000**	
5.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	4.567.187.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	14 kali	5.526.989.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	36.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	43.530.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	1 dokumen	1.534.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**8.631.000**	
5.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	2 kali	8.631.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**405.891.000**						100 persen	**331.969.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	1.357.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos				12 bulan	79.428.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	59.203.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 unit							6 unit		
5.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.914.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	2.716.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	55.473.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	11 bulan	48.878.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	13.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	13.577.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	2.580.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				170 orang/kali	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	170 orang/kali	203.658.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**162.870.000**						100 persen	**153.308.000**	
5.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	1.362.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	66.942.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	86.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	85.004.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**100.592.000**						100 persen	**78.360.000**	
5.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 bulan	75.392.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	57.918.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	25.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	20.442.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**665.724.000**						100,00 persen	**727.715.000**	
5.1.2.02.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen		100 persen	100 persen	**551.974.000**						100 persen	**609.354.000**	
5.1.2.02.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun				1 dokumen	551.974.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	609.354.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen Ranwal RPJPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
5.1.2.02.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen		100 persen	100 persen	**24.250.000**						100 persen	**11.811.000**	
5.1.2.02.02.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun				1 dokumen	24.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	11.811.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.2.02.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**89.500.000**						100 persen	**106.550.000**	
5.1.2.02.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun				4 dokumen	89.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	4 dokumen	106.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
5.1.3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**907.394.000**						100,00 persen	**863.157.000**	
5.1.3.02.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	**259.264.000**						100 persen	**198.645.000**	
5.1.3.02.01.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan				2 kali	9.006.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	2 kali	8.688.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.3.02.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun				1 dokumen	72.043.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	69.506.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen LP2KD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokume RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
5.1.3.02.01.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	27.015.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	26.064.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen pelaksanaan penanggulangan masalah gizi yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia				1 kali							1 kali		
5.1.3.02.01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Anggaran Responsif Anak (ARA) Kota Pekalongan				1 dokumen	151.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	94.387.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.3.02.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	**176.200.000**						100 persen	**255.664.000**	
5.1.3.02.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA				1 dokumen	176.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	255.664.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah laporan kegiatan bidang perekonomian dan SDA				1 laporan							1 laporan		
		Jumlah seminar atau workshop perencanaan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif				1 kali							1 kali		
5.1.3.02.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen		100 persen	100 persen	**471.930.000**						100 persen	**408.848.000**	
5.1.3.02.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Kajian Pengelolaan Drainase Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	240.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	199.881.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen Revisi Jakstrada Air Minum yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah laporan koordinasi bidang Infrastruktur yang disusun				1 laporan							1 laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang infrastruktur (1. DPUPR, Dinhub, Dinperkim)				3 perangkat daerah							3 perangkat daerah		
5.1.3.02.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi dan Perilaku masyarakat pasca kegiatan penanganan banjir dan rob kali Loji dan Banger yang disusun				1 dokumen	231.930.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	208.967.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah laporan Evaluasi Implementasi Perda Revisi RTRW No 09 Tahun 2020 yang disusun				1 laporan							1 laporan		
		Jumlah laporan Implementasi dan Evaluasi Smart City yang disusun				1 laporan							1 laporan		
		Jumlah laporan koordinasi bidang Kewilayahan yang disusun				1 laporan							1 laporan		
		Jumlah Perangkat Daerah Yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang infrastruktur (1. DPUPR, Dinhub, Dinperkim, DLH)				4 perangkat daerah							4 perangkat daerah		
5.5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.213.225.000**							**1.248.015.000**	
5.5.2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**1.213.225.000**						100,00 persen	**1.248.015.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.5.2.02.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen		100 persen	100 persen	**267.500.000**						100 persen	**255.433.000**	
5.5.2.02.01.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi				6 riset	175.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	6 riset	178.076.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.5.2.02.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan				1 dokumen	92.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	77.357.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah website kelitbangan yang dikelola				1 website							1 website		
5.5.2.02.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen		100 persen	100 persen	**285.725.000**						100 persen	**298.826.000**	
5.5.2.02.02.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan				3 kali	285.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	3 kali	298.826.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan				1 riset							1 riset		
		Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
5.5.2.02.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen		100 persen	100 persen	**660.000.000**						100 persen	**693.756.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.5.2.02.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional				1 event	650.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 event	693.756.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida				4 kali							4 kali		
		Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi				1 kali							1 kali		
		Jumlah Pemenang Krenova				5 pemenang							5 pemenang		
5.5.2.02.04.5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan				1 kali	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 kali	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.2	**KEUANGAN**						**27.136.267.000**							**23.282.915.000**	
5.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**16.546.686.000**						100 persen	**14.344.890.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
5.2.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**18.150.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	4.700.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	2.250.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	11.200.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
5.2.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**12.846.334.000**						100 Persen	**12.591.960.000**	
5.2.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12.709.084.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	12.454.710.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	135.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	135.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	2.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dokumen	2.250.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**9.500.000**	
5.2.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 kali	9.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**811.868.000**						100 Persen	**754.082.000**	
5.2.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	7.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	273.868.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	241.082.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7 unit							7 unit		
5.2.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	18.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	18.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	11 bulan	110.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	50.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	2.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 orang/ kali	350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	200 orang/ kali	325.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.455.000.000**						100 Persen	**-**	
5.2.1.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan				3 unit	1.200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3 unit	-	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan				15 unit	255.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	15 unit	-	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan				1 unit							1 unit		
5.2.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**718.736.000**						100 Persen	**720.913.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	3.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	506.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	506.400.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	209.336.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	211.513.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**689.248.000**						100 Persen	**250.285.000**	
5.2.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				38 unit	149.248.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	38 unit	135.285.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 unit	75.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	40.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,26 persen		11,91 persen	8,08 persen	**6.921.134.000**						8,08 persen	**6.083.042.000**	
5.2.2.02.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**1.237.850.000**						100 persen	**924.853.600**	
5.2.2.02.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun				1 dok	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dok	35.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun				1 dokumen	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dokumen	35.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.02.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun				2 dokumen	62.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	62.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
5.2.2.02.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun				4 dokumen	890.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 dokumen	628.699.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.2.02.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan				4 dokumen	124.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 dokumen	138.154.600	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
5.2.2.02.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan				12 bulan	91.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	26.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan				16 kali							16 kali		
5.2.2.02.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen		100 persen	100 persen	**267.740.000**						100 persen	**262.900.000**	
5.2.2.02.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan				81 OPD	89.149.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	81 OPD	87.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan				3 dokumen							3 dokumen		
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah				12 kali							12 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.2.02.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun				30 laporan	23.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	30 laporan	23.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.02.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai				2 kali	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 kali	25.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan				3300 data SPT tahunan	73.591.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3300 data SPT tahunan	70.900.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan				14 kali							14 kali		
5.2.2.02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun				1 dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dokumen	25.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.02.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah				3 kali	32.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3 kali	32.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.2.02.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**415.544.000**						100 persen	**395.288.400**	
5.2.2.02.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan				7 laporan	59.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	7 laporan	59.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD				68 laporan							68 laporan		
5.2.2.02.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun				13 laporan	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	13 laporan	8.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.02.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun				7 laporan	95.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	7 laporan	95.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan				5 kali							5 kali		
5.2.2.02.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun				2 dokumen	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	90.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.2.02.03.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun				12 laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 laporan	10.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.02.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun				1 dokumen	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dokumen	20.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun				4 laporan	133.544.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 laporan	113.288.400	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan BLUD				16 laporan							16 laporan		
5.2.2.02.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen		100 persen	100 persen	**5.000.000.000**						100 persen	**4.500.000.000**	
5.2.2.02.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah bulan penyediaan dana BTT				12 bulan	5.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	4.500.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	**1.505.497.000**						100 persen	**1.194.067.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.3.02.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen		100 persen	100 persen	**1.505.497.000**						100 persen	**1.194.067.000**	
5.2.3.02.01.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku standar harga yang disusun				2 buku	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 buku	55.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3.02.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah				2 buku	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 buku	30.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		
5.2.3.02.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pengajuan sertifikat				250 bidang	455.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	250 bidang	155.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3.02.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD				3 jenis	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3 jenis	65.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				3 Laporan							3 Laporan		
5.2.3.02.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat				1 unit	325.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 unit	325.480.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit							2 unit		
		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat				4 unit							4 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok				5 kali							5 kali		
5.2.3.02.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan				80 laporan	575.017.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	80 laporan	563.587.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				80 Laporan							80 Laporan		
		Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan				80 OPD							80 OPD		
		Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan				80 unit kerja							80 unit kerja		
5.2.4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	0.05 persen		0.05 persen	0.05 persen	**2.162.950.000**						0.05 persen	**1.660.916.000**	
5.2.4.02.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	5.0 persen		4.5 persen	4.7 persen	**2.162.950.000**						4.7 persen	**1.660.916.000**	
5.2.4.02.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				0 Dokumen	85.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 Dokumen	85.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.4.02.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Gebyar Pajak Daerah yang dilaksanakan				2 kali	184.992.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 kali	154.344.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disusun				12 laporan							12 laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan pajak dan retribusi				4 kali							4 kali		
5.2.4.02.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata				1500 objek	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1500 objek	30.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring				1140 objek							1140 objek		
5.2.4.02.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan				8 aplikasi	355.941.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	8 aplikasi	57.202.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.4.02.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan				2000 berkas	353.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2000 berkas	176.550.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun				94 buku							94 buku		
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021				4 buku							4 buku		
		Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate				8000 objek							8000 objek		
5.2.4.02.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan				94000 lembar	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	94000 lembar	300.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat				19000 lembar							19000 lembar		
5.2.4.02.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				1 orang/ bulan	386.348.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 orang/ bulan	389.525.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani				14400 WP/ WR							14400 WP/ WR		
5.2.4.02.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas BPHTB yang diteliti dan diverifikasi				2000 berkas	65.388.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2000 berkas	66.114.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.4.02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan				3060 surat	227.681.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3060 surat	227.681.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.4.02.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah				50 kali	159.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	50 kali	159.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah				8 wajib pajak							8 wajib pajak		
5.2.4.02.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0 Laporan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 Laporan	15.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.3	**KEPEGAWAIAN**						**6.643.803.000**							**6.942.810.000**	
5.3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.864.209.000**						100 persen	**5.385.833.000**	
5.3.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**12.850.000**	
5.3.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	BKPSDM	0 Dokumen	2.750.000	Badan Kepegawaian dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen		Barat, Podosugih	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		2 Dokumen		Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	0 Dokumen	1.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penyusunan RKA dan Perubahan RKA				2 Dokumen							2 Dokumen		
5.3.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	8.450.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen SPIP (1 Dokumen Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 Laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
5.3.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.065.448.000**						100 persen	**4.236.888.000**	
5.3.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	4.011.798.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	0 Orang/bulan	4.185.238.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan							14 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.3.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
5.3.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	0 Laporan	1.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
5.3.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**9.500.000**	
5.3.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Keikutsertaan Dalam Karnaval Batik dan Hari Jadi				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	2 Kali	9.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
5.3.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**314.408.000**						100 persen	**661.218.000**	
5.3.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.3.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				12 Bulan	75.445.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	67.690.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket							1 Paket		
5.3.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	1.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.3.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman				11 Bulan	62.045.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	11 Bulan	70.028.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.3.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	20.418.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
5.3.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
5.3.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				140 org/kl	150.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	BKPSDM	140 org/kl	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan				Pelayanan Publik	publik.		0 Laporan		Daya Manusia
5.3.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**325.180.000**						100 persen	**369.500.000**	
5.3.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
5.3.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	198.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
5.3.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/bahan kebersihan Kantor				12 Bulan	124.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	167.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
5.3.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**133.673.000**						100 persen	**95.877.000**	
5.3.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan	41.407.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	BKPSDM	12 Bulan	35.877.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit				Pelayanan Publik	publik.		0 Unit		Daya Manusia
5.3.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	80.266.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	0 Unit	48.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala				2 Gedung							2 Gedung		
5.3.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	12.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
5.3.2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen		80,00 persen	80,00 persen	**1.779.594.000**						80,00 persen	**1.556.977.000**	
5.3.2.02.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase ketersediaan data PNS	100 persen		100 persen	100 persen	**773.275.000**						100 persen	**765.319.000**	
5.3.2.02.01.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				0 Dokumen	600.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	655.969.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN				207 Orang							207 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.3.2.02.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi yang dikelola				16 Aplikasi	173.275.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	16 Aplikasi	109.350.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen							0 Dokumen		
5.3.2.02.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	110 persen		110 persen	110 persen	**176.175.000**						110 persen	**19.694.000**	
5.3.2.02.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang dikelola kenaikan pangkatnya				550 orang	22.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	550 orang	19.600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas				70 Orang							70 Orang		
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Penyesuiaian Ijasah				20 Orang							20 Orang		
5.3.2.02.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				0 Dokumen	153.707.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Dokumen	94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Yang Di Lantik				100 Orang							100 Orang		
		Jumlah Pejabat Tinggi Pratama Yang Lulus Seleksi				3 orang							3 orang		
5.3.2.02.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	42 persen		42 persen	42 persen	**592.100.000**						42 persen	**629.366.000**	
5.3.2.02.03.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				0 Dokumen	441.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Dokumen	400.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang mengikuti Asesmen				142 orang							142 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.3.2.02.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				0 Orang	86.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Orang	165.166.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang diberikan bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas (S1)				15 Orang							15 Orang		
		Jumlah PNS yang diberikan bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas (S2)				2 Orang							2 Orang		
		Jumlah Praja taruna/taruni yang difasilitasi pendidikan kedinasan				2 Orang							2 Orang		
5.3.2.02.03.6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				0 Orang	9.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Orang	9.200.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah kepala sekolah yang difasilitasi peningkatan kompetensi manajerial				2 Orang							2 Orang		
5.3.2.02.03.9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Diklat Penjenjangan Fungsional				10 Kegiatan	36.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	10 Kegiatan	36.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				0 Dokumen							0 Dokumen		
		Jumlah laporan evaluasi diklat yang disusun				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah Pejabat fungsional yang difasilitasi diklat				10 Orang							10 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.3.2.02.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				0 Dokumen	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Dokumen	19.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
5.3.2.02.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Tingkat Disiplin ASN	100 persen		100 persen	100 persen	**238.044.000**						100 persen	**142.598.000**	
5.3.2.02.04.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				0 Orang	48.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Orang	33.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS				150 Orang							150 Orang		
5.3.2.02.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				0 Orang	176.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Orang	102.098.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah CPNS Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan				319 Orang							319 Orang		
		Jumlah PNS Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan				46 Orang							46 Orang		
5.3.2.02.04.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah CPNS yang difasilitasi mengikuti sumpah PNS				481 orang	13.644.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	481 orang	7.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah kasus kepegawaian yang diselesaikan				2 kasus							2 kasus		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				0 Laporan							0 Laporan		
5.4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**3.349.750.000**							**2.958.800.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.4.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**3.349.750.000**						100,00 persen	**2.958.800.000**	
5.4.2.02.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen		100 persen	100 persen	**1.222.750.000**						100 persen	**856.500.000**	
5.4.2.02.01.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				0 Orang	700.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Orang	768.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS Yang Difasilitasi Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional				190 Orang							190 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.4.2.02.01.4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				0 Dokumen	522.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Dokumen	88.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pejabat eselon II dan III dan IV yang difasilitasi pelatihan kepemimpinan, PKN,PKA,PKP				15 Orang							15 Orang		
5.4.2.02.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang		207 orang	200 orang	**2.127.000.000**						200 orang	**2.102.300.000**	
5.4.2.02.02.3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				0 Orang	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Orang	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi				10 Orang							10 Orang		
5.4.2.02.02.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Dasar				186 Orang	2.043.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	ASN	186 Orang	2.043.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				0 Laporan				Pelayanan Publik	publik.		0 Laporan		Daya Manusia
5.4.2.02.02.8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				0 Dokumen	34.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Dokumen	9.300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pasca Diklat Non Struktural				2 Laporan							2 Laporan		
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6.1	**INSPEKTORAT DAERAH**						**5.884.152.000**							**5.719.509.000**	
6.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.426.159.000**						100 persen	**5.270.664.000**	
6.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.000.000**						100 Persen	**12.719.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	2 Dokumen	2.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	2 Dokumen	1.219.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	9.500.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 Dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP) , 4 Laporan pemantauan (RTP)) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
6.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**5.000.070.000**						100 Persen	**4.852.101.000**	
6.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Kali	4.965.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	14 Kali	4.817.601.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
6.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan	33.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	33.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 dokumen	1.500.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**40.500.000**						100 Persen	**8.631.000**	
6.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	2 Kali	1.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan PAK Tenaga Fungsional				3 Laporan	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	3 Laporan	1.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kantor sendiri yang disusun				1 Laporan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 Laporan	6.631.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**181.172.000**						100 Persen	**203.340.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	2.500.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	24.297.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	40.000.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang diadakan				2 Unit							2 Unit		
6.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	7.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	32.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	11 Bulan	40.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	8.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	2.700.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				53 Orang/Kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	53 Orang/Kali	103.140.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**58.425.000**						100 Persen	**60.867.000**	
6.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	5.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	33.925.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	34.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	21.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	21.867.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**129.992.000**						100 Persen	**133.006.000**	
6.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				12 bulan	74.992.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	70.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 unit	33.006.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	30.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen		85,00 persen	85,00 persen	**115.316.000**						85,00 persen	**114.932.000**	
6.1.2.02.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**101.388.000**						100 persen	**100.395.000**	
6.1.2.02.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu				64 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	64 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.2.02.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang terbit tepat waktu				35 laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	35 laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.2.02.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang Terbit Tepat Waktu				99 laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	99 laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.2.02.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang terbit tepat waktu				40 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	40 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.2.02.01.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal				2 laporan	8.888.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	2 laporan	9.500.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.1.2.02.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				7 laporan	52.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	7 laporan	50.895.000	Inspektorat Daerah
6.1.2.02.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**13.928.000**						100 persen	**14.537.000**	
6.1.2.02.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Bulan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				12 bulan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	OPD di Kota Pekalongan	12 bulan	7.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.2.02.02.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Bulan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 bulan	7.928.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	12 bulan	7.537.000	Inspektorat Daerah
6.1.3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai		3,00 nilai	3,00 nilai	**342.677.000**						3,00 nilai	**333.913.000**	
6.1.3.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100 persen		100 persen	100 persen	**31.850.000**						100 persen	**32.435.000**	
6.1.3.02.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun				3 Dokumen	28.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	3 Dokumen	29.435.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/ SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun				1 laporan							1 laporan		
		Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun				1 laporan							1 laporan		
		Jumlah Laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun				2 laporan							2 laporan		
6.1.3.02.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pemgawasan				7 laporan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	7 laporan	3.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.3.02.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	98 persen		93 persen	95 persen	**310.827.000**						95 persen	**301.478.000**	
6.1.3.02.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				31 perangkat daerah	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	31 perangkat daerah	33.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.3.02.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				17 Laporan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	17 Laporan	15.000.000	Inspektorat Daerah
6.1.3.02.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen LHKASN				2500 Dokumen	128.237.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	2500 Dokumen	128.478.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Dokumen LHKPN ASN				500 Dokumen							500 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Laporan							8 Laporan		
6.1.3.02.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun				5 Laporan	127.590.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	5 Laporan	125.000.000	Inspektorat Daerah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**10.071.237.000**							**9.559.053.000**	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**9.646.110.000**						100 persen	**9.002.290.000**	
7.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**122.500.000**						100 persen	**124.000.000**	
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun				2 dokumen	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	2 Dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan				12 Bulan	116.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	12 Bulan	116.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah dokumen Evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen SPIP (1dokumen RTP, 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
7.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**6.982.937.000**						100 persen	**7.472.273.000**	
7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	6.781.937.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	0 Orang/bulan	7.271.273.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Kali							14 Kali		
7.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kecamatan				12 Bulan	198.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	198.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	0 Laporan	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
7.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.500.000**						100 persen	**16.500.000**	
7.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Keikutsertaan dalam Karnaval Batik dan Hari Jadi				2 kali	16.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	2 kali	16.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**438.600.000**						100 persen	**440.890.000**	
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan				12 Bulan	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	8.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kecamatan				12 Bulan	152.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	152.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kecamatan				5 Unit							5 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Bandengan				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Degayu				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Kandang Panjang				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Krapyak				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Padukuhan Kraton				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Panjang Baru				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Panjang Wetan				1 Unit							1 Unit		
7.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan				12 Bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	12.750.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Bandengan				12 Bulan				Pelayanan Publik	publik.		12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan				11 Bulan	195.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Kecamatan Pekalongan Utara	11 Bulan	195.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bandengan				11 Bulan				Pelayanan Publik	publik.		11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Degayu				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Kandang Panjang				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Krapyak				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Padukuhan Kraton				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Panjang Baru				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Panjang Wetan				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan				12 Bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bandengan				12 Bulan				Pelayanan Publik	publik.		12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	20.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				14 Orang/Kali	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	14 Orang/Kali	12.540.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**807.475.000**						100 persen	**709.352.000**	
7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan				12 Bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan				12 Bulan	125.884.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	125.884.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan	671.091.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	572.968.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
7.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.278.098.000**						100 persen	**239.275.000**	
7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kecamatan				12 Bulan	135.798.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	115.775.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kecamatan				2 unit	1.097.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	2 unit	78.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Bandengan				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Degayu				1 unit							1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kandang Panjang				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Krapyak				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Padukuhan Kraton				3 unit							3 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Baru				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Wetan				2 unit							2 unit		
7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan				12 Bulan	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	45.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**12.000.000**						100,00 persen	**69.933.000**	
7.1.2.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		0 persen	100 persen	**12.000.000**						100 persen	**18.600.000**	
7.1.2.02.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	4 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan							0 Laporan		
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen	**119.943.000**						100 persen	**221.824.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**17.563.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen	17.563.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**19.880.000**						100 persen	**110.481.000**	
7.1.3.02.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan TP PKK yang dilaksanakan				12 bulan	19.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	110.481.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Kegiatan Catur Pilar Yang Dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
7.1.3.02.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**82.500.000**						100 persen	**111.343.000**	
7.1.3.02.06.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan				12 bulan	82.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat yang dilaksanakan				3 kegiatan							3 kegiatan		
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**284.984.000**						100,00 persen	**258.755.000**	
7.1.4.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen		100 persen	100 persen	**284.984.000**						100 persen	**258.755.000**	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 Hari	284.984.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Masyarakat	25 Hari	258.755.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Upacara 17 Agustus yang dilaksanakan				1 Kali				Pelayanan Publik	publik.		1 Kali		
		Jumlah Layanan Pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan				52 Kali							52 Kali		
		Jumlah Patroli Trantib yang dilaksanakan				36 Kali							36 Kali		
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**8.200.000**						100,00 persen	**6.251.000**	
7.1.5.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**8.200.000**						100 persen	**6.251.000**	
7.1.5.02.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	8.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	6.251.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**463.501.000**							**410.601.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**463.501.000**						100 persen	**410.601.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**463.501.000**						100 persen	**410.601.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	168.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	127.296.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	282.755.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	270.805.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas							0 Pokmas / Ormas		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				78 RT/RW							78 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**463.228.000**							**428.017.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**463.228.000**						100 persen	**428.017.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**463.228.000**						100 persen	**428.017.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	120.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	330.120.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	345.517.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah lembaga yang difasilitasi hibah				1 Lembaga							1 Lembaga		
		Jumlah pelatihan hantaran yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				92 RT/RW							92 RT/RW		
		Jumlah sosialisasi yang diadakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**490.768.000**							**339.457.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**490.768.000**						100 persen	**339.457.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**490.768.000**						100 persen	**339.457.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	255.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	68.857.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	222.660.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	258.100.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				48 RT/RW							48 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**334.268.000**							**328.868.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**334.268.000**						100 persen	**328.868.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**334.268.000**						100 persen	**328.868.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	120.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	137.718.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	201.160.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	178.650.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pelatihan Public Speaking yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				33 RT/RW							33 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**795.044.000**							**563.744.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**795.044.000**						100 persen	**563.744.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**795.044.000**						100 persen	**563.744.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	345.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	123.858.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan				2 Lokasi							2 Lokasi		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	436.936.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	427.386.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan syawalan yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Pelatihan Digital Marketing yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas							0 Pokmas / Ormas		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				126 RT/RW							126 RT/RW		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**464.588.000**							**447.377.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**464.588.000**						100 persen	**447.377.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**464.588.000**						100 persen	**447.377.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	123.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	68.857.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	328.480.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	366.020.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton					12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				93 RT/RW							93 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**403.693.000**							**393.141.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**403.693.000**						100 persen	**393.141.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**403.693.000**						100 persen	**393.141.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	120.608.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	135.975.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah Taman Baca Yang Di Fasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	270.585.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	244.666.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pelatihan hantaran yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				71 RT/RW							71 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**8.184.556.000**							**8.433.940.000**	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**7.789.125.000**						100 persen	**8.078.258.000**	
7.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**111.500.000**						100 persen	**102.667.000**	
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah kecamatan				12 bulan	105.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	94.667.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**6.147.047.000**						100 persen	**6.725.473.000**	
7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	5.969.447.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	14 kali	6.547.873.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan				12 bulan	174.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	174.600.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.500.000**						100 persen	**18.489.000**	
7.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	16.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 kali	18.489.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**355.416.000**						100 persen	**345.830.000**	
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kecamatan				12 bulan	7.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	7.800.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos kecamatan				12 bulan	136.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	136.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan yang diadakan				4 unit							4 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip yang diadakan				3 unit							3 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo yang diadakan				3 unit							3 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo yang diadakan				3 unit							3 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet yang diadakan				2 unit							2 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga kecamatan				12 bulan	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	9.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kecamatan				11 bulan	137.116.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 bulan	127.530.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan				11 bulan							11 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sokoduwet				11 bulan							11 bulan		
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan				12 bulan	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	35.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan kecamatan				12 bulan	17.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	17.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Buaran kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				5 orang/kali	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	5 orang/kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**150.000.000**						100 persen	**-**	
7.1.1.02.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah lokasi pagar kelurahan yang dibangun				1 Lokasi	150.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 Lokasi	-	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah papan nama kelurahan yang diadakan				1 Unit							1 Unit		
7.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**788.480.000**						100 persen	**698.055.000**	
7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kecamatan				12 bulan	9.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	9.300.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan				12 bulan	98.720.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	86.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor kecamatan				12 bulan	680.460.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	602.755.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**220.182.000**						100 persen	**187.744.000**	
7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan				10 unit	118.182.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	10 unit	85.744.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip				6 unit							6 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan				4 unit							4 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot				5 unit							5 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo				4 unit							4 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo				4 unit							4 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet				5 unit							5 unit		
7.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan				2 unit	62.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	62.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet				1 unit							1 unit		
		umlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo				1 unit							1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**10.800.000**						100,00 persen	**9.812.000**	
7.1.2.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		0 persen	100 persen	**10.800.000**						100 persen	**-**	
7.1.2.02.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	10.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan	4 kali	-	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		100 persen	100 persen	**118.669.000**						100 persen	**110.934.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**17.099.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen	17.099.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
7.1.3.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen		0 persen	100 persen	**19.070.000**						100 persen	**110.934.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan TP PKK yang dilaksanakan				12 bulan	19.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	110.934.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
7.1.3.02.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**82.500.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.02.06.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan				12 bulan	82.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat yang dilaksanakan				3 kegiatan							3 kegiatan		
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**257.962.000**						100,00 persen	**223.670.000**	
7.1.4.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**257.962.000**						100 Persen	**223.670.000**	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 hari	257.962.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	25 hari	223.670.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kegiatan Upacara 17 Agustus yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan				52 kali							52 kali		
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				36 kali							36 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**8.000.000**						100,00 persen	**11.266.000**	
7.1.5.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**8.000.000**						100 Persen	**11.266.000**	
7.1.5.02.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	8.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	11.266.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**414.513.000**							**397.013.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**414.513.000**						100 persen	**397.013.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**414.513.000**						100 persen	**397.013.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah alat pemotong rumput yang diadakan				1 Unit	130.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Unit	147.513.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				4 Lokasi							4 Lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				2 Lokasi							2 Lokasi		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Bulan Fasilitasi BOP BKM				12 bulan	271.405.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	237.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah Bulan Fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Bulan Fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				65 RT/RW							65 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**457.972.000**							**386.011.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**457.972.000**						100 persen	**386.011.000**	
7.1.3. 02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**457.972.000**						100 persen	**386.011.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	175.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	89.107.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah gapuro yang dihibahkan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah sound system yang dihibahkan				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	269.864.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	284.404.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah pelatihan servis HP yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah pelatihan servis motor yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				62 RT/RW							62 RT/RW		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**364.838.000**							**321.027.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**364.838.000**						100 persen	**321.027.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**364.838.000**						100 persen	**321.027.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	140.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	88.857.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				5 lokasi							5 lokasi		
		Jumlah mesin potong rumput yang dihibahkan				3 Unit							3 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah sound system yang dihibahkan				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	211.730.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	219.670.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan FKSS Yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah posyandu lansia yang difasilitasi hibah sarpras				1 kali							1 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				37 RT/RW							37 RT/RW		
		Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras				1 RT							1 RT		
		Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan				5 kali							5 kali		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**452.017.000**							**384.806.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**452.017.000**						100 persen	**384.806.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**452.017.000**						100 persen	**384.806.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan							0 Lembaga Kemasyarakatan		
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	141.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	96.495.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				3 Lokasi							3 Lokasi		
		Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah sound system yang diadakan				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah taman baca yang di fasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	298.271.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat	12 bulan	275.811.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan		Kecamatan, Kuripan Yosorejo	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Kegiatan Penanganan Stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah pelatihan rias pengantin yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				62 RT/RW							62 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**366.855.000**							**371.912.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**366.855.000**						100 persen	**371.912.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**366.855.000**						100 persen	**371.912.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah Kelurahan				12 bulan	128.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	96.495.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				2 lokasi							2 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	226.109.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	262.917.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanankan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanaka				3 kali							3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah pelatihan tata boga yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				50 RT / RW							50 RT / RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**411.179.000**							**572.197.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**411.179.000**						100 persen	**572.197.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**411.179.000**						100 persen	**572.197.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	128.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	148.518.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah papan nama RT/RW yang diadakan				66 Unit							66 Unit		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	270.433.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	411.179.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah Dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pelatihan dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				66 RT/RW							66 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**9.482.613.000**							**338.518.000**	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**9.142.576.000**						100 persen	**3.000.000**	
7.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**122.500.000**						100 Persen	**-**	
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Kec. Pekalongan Barat	0 Dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen		Barat, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		2 dokumen		
7.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	2 dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan				12 bulan	116.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan Perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		
7.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**7.362.371.000**						100 Persen	**3.000.000**	
7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	7.162.721.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	14 kali	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan							0 Orang/bulan		
7.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan				12 bulan	196.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Bendan Kergon				12 bulan				Pelayanan Publik	publik.		12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	0 Laporan	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
7.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**16.500.000**						100 Persen	**-**	
7.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Karnaval Batik				2 kali	16.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	2 kali	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				7 steel							7 steel		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
7.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**432.426.000**						100 Persen	**-**	
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan				12 bulan	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kecamatan				12 bulan	149.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kecamatan				5 unit							5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Bendan Kergon				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Medono				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pasirkratonkramat				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Podosugih				2 unit							2 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pringrejo				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Sapuro Kebulen				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Tirto				2 unit							2 unit		
7.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan,				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kecamatan				11 bulan	191.326.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	11 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Bendan Kergon				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Medono				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Pasirkratonkramat				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Podosugih				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Pringrejo				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Sapuro Kebulen				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Tirto				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumla bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan				12 bulan				Pelayanan Publik	publik.		12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kecamatan				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Bendan Kergon				12 bulan				Pelayanan Publik	publik.		12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan peyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				14 org/kl	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	14 org/kl	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**893.443.000**						100 Persen	**-**	
7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan							0 Laporan		
7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan				12 bulan	105.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kecamatan				12 bulan	777.943.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor kel. podosugih				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
7.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**315.336.000**						100 Persen	**-**	
7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kecamatan				12 bulan	125.836.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
7.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	144.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	0 Unit	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kecamatan				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Bendan Kergon				1 unit							1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Medono				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Pasirkratonkramat				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Podosugih				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Pringrejo				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Sapuro Kebulen				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Tirto				2 unit							2 unit		
7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan				12 bulan	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**12.000.000**						100,00 persen	**18.600.000**	
7.1.2.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		0 persen	100 persen	**12.000.000**						100 persen	**18.600.000**	
7.1.2.02.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen	**119.943.000**						100 persen	**111.343.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**17.563.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumenLembaga Kemasyarakatan	17.563.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	1 dokumenLembaga Kemasyarakatan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
7.1.3.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 persen		0 persen	100 Persen	**19.880.000**						100 Persen	**-**	
7.1.3.02.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan TP PKK yang dilaksanakan				12 Bulan	19.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat	12 Bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				2 kali		Barat, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		2 kali		
7.1.3.02.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**82.500.000**						100 persen	**111.343.000**	
7.1.3.02.06.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan				12 Bulan	82.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	keluarga/masyarakat	12 Bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah kegiatan masyarakat yang dilaksanakan				3 kegiatan							3 kegiatan		
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**199.894.000**						100,00 persen	**205.575.000**	
7.1.4.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan Trantibum	100 persen		100 persen	100 Persen	**199.894.000**						100 Persen	**205.575.000**	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 hari	199.894.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	25 hari	205.575.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan				52 kali							52 kali		
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				36 kali							36 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**8.200.000**						100,00 persen	**-**	
7.1.5.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	**8.200.000**						100 Persen	**-**	
7.1.5.02.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	8.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**478.861.000**							**433.546.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**478.861.000**						100 persen	**433.546.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 Persen	**478.861.000**						100 Persen	**433.546.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	166.096.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Masyarakat	12 bulan	128.496.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali			Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah Papan nama RT/RW yang dilaksanakan				92 unit							92 unit		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	300.265.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	292.550.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan lomba LBS yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Kegiatan Penanganan Stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				92 RT/RW							92 RT/RW		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**375.791.000**							**350.391.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**375.791.000**						100 persen	**350.391.000**	
7.1.3. 02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 Persen	**375.791.000**						100 Persen	**350.391.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	148.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	142.941.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah Sarana dan Prasarana PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	215.045.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	194.950.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Kegiatan Penanganan Stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				50 RT/RW							50 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**738.441.000**							**378.041.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**738.441.000**						100 persen	**378.041.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 Persen	**738.441.000**						100 Persen	**378.041.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah Kelurahan				12 bulan	483.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	148.191.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Fasilitasi Program peningkatan kualitas kawasan permukiiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	242.695.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	217.350.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah Fasilitasi Peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Kegiatan Penanganan Stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				54 RT/RW							54 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**552.388.000**							**-**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**552.388.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 Persen	**552.388.000**						100 Persen	**-**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	215.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah Fasilitas Umum yang di Bangun				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah Fasilitas Umum yang dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah Pos Kampling yang dibangun				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	324.280.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Masyarakat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.3	Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan		Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		12 bulan		Barat
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 bulan							3 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Kader Tanggap Bencana yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Multimedia yang dilaksakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas LKK yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				76 kali							76 kali		
		Jumlah RT yang difasilitasi Hbah Sarpras				2 RT							2 RT		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**623.048.000**							**491.087.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**623.048.000**						100 persen	**491.087.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 Persen	**623.048.000**						100 Persen	**491.087.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	235.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	12 bulan	99.107.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				3 lokasi							3 lokasi		
		Jumlah Pos Kampling yang dibangun				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				3 RT							3 RT		
		Jumlah Sarpras Posbindu yang diadakan				2 paket							2 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah tempat sampah yang diadakan				25 Unit							25 Unit		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	374.940.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	12 Bulan	379.480.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Kegiatan senam PKK yang dilaksakan				10 Bulan							10 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan Penguatan kapasitas kelembagaan LKK yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah Pelatihan pengolahan barang bekas dari limbah rumah tangga yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				118 Kali							118 Kali		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**545.896.000**							**549.886.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**545.896.000**						100 persen	**549.886.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Kelurahan	100 persen		100 persen	100 Persen	**545.896.000**						100 Persen	**549.886.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	131.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	12 Bulan	110.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	402.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	12 Bulan	427.386.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan SDM LKK Kel. Pasirkratonkramat Sesuai dengan Perwal 63 Tahun 2021 Tentang LKK yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting bagi warga kelurahan Pasirkratonkramat yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				112 RT/RW							112 RT/RW		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				1 RT							1 RT		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**576.515.000**							**505.215.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**576.515.000**						100 persen	**505.215.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 Persen	**576.515.000**						100 Persen	**505.215.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	185.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	148.113.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				2 Lokasi							2 Lokasi		
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				1 RT							1 RT		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	378.407.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Masyarakat	12 Bulan	344.602.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.3	Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan		Pekalongan Barat, Pringrejo	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		12 Bulan		Barat
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pelatihan pemasaran online yang dilaksanakan				0 Kali							0 Kali		
		Jumlah pelatihan tataboga yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				119 RT/RW							119 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**9.529.576.000**							**9.909.710.000**	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**9.220.513.000**						100 persen	**9.422.330.000**	
7.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**122.500.000**						100 persen	**112.570.000**	
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 dokumen	10.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 dokumen	7.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah kecamatan				12 bulan	116.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	95.570.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Gamer				12 bulan		Kelurahan	Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
7.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**7.269.779.000**						100 persen	**7.780.984.000**	
7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	7.065.479.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	0 Orang/bulan	7.743.984.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali							14 kali		
7.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan				12 bulan	201.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	34.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.500.000**						100 persen	**18.489.000**	
7.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	16.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 kali	18.489.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**485.670.000**						100 persen	**398.134.000**	
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kecamatan				12 bulan	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kecamatan				12 bulan	208.435.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	131.134.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit							5 unit		
7.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kecamatan				11 bulan	185.635.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	11 bulan	185.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Gamer				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Kalibaros				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Kauman				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Klego				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Noyontaansari				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Poncol				11 bulan							11 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Setono				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	32.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kecamatan				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	16.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				7 orang/kali	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	7 orang/kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.043.308.000**						100 persen	**896.152.000**	
7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan				12 bulan	101.430.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	85.605.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kecamatan				12 bulan	931.378.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	800.047.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**282.756.000**						100 persen	**216.001.000**	
7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan				12 bulan	165.256.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	141.001.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kecamatan				2 unit	72.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 unit	45.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Gamer				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Kalibaros				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Kauman				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Klego				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Noyontaansari				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Poncol				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Setono				1 Unit							1 Unit		
7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan				12 bulan	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	30.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Gamer				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Kalibaros				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Kauman				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Klego				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Noyontaansari				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Poncol				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Setono				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**12.000.000**						100,00 persen	**49.672.000**	
7.1.2.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		0 persen	100 persen	**12.000.000**						100 persen	**18.600.000**	
7.1.2.02.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		100 persen	100 persen	**119.943.000**						100 persen	**228.848.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**17.563.000**						100 persen	**17.563.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen	17.563.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	17.563.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**19.880.000**						100 persen	**99.942.000**	
7.1.3.02.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi TP PKK				1 unit	19.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 unit	99.942.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah kegiatan Catur Pilar yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				0 Lembaga Kemasyarakatan							0 Lembaga Kemasyarakatan		
7.1.3.02.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**82.500.000**						100 persen	**111.343.000**	
		Presentase tercapainya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan dan kelurahan	100 persen		0 persen	100 pers							100 pers		
7.1.3.02.06.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan				12 bulan	82.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				24 kali							24 kali		
		umlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**168.920.000**						100,00 persen	**202.500.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.4.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen		100 persen	100 persen	**168.920.000**						100 persen	**202.500.000**	
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	168.920.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Laporan	202.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah patroli trantib				48 kali							48 kali		
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**8.200.000**						100,00 persen	**6.360.000**	
7.1.5.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	**8.200.000**						100 persen	**6.360.000**	
7.1.5.02.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	8.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	6.360.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah Rapat Forkopimca yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**542.123.000**							**505.512.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**542.123.000**						100 persen	**505.512.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**542.123.000**						100 persen	**505.512.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	90.722.100	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	92.217.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	438.900.900	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	400.795.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pelatihan EKOPRINT yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pelatihan tata rias yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				126 RT/RW							126 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**626.141.000**							**427.135.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**626.141.000**						100 persen	**427.135.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**626.141.000**						100 persen	**427.135.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	168.246.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	138.873.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				2 Lokasi							2 Lokasi		
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi pembangunan gapura dan pengadaan gerobak sampah				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	445.395.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	275.762.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Lembaga yang difasilitasi hibah sarpras				1 Lembaga							1 Lembaga		
		Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah pelatihan marketing online yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				81 RT/RW							81 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**427.975.000**							**373.914.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**427.975.000**						100 persen	**373.914.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**427.975.000**						100 persen	**373.914.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	155.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	82.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				1 RT							1 RT		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	259.867.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	279.414.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego					12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Senam Aerobik yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Tentang Kebersihan Lingkungan dan Penanganan Sampah yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				63 RT/RW							63 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**348.843.000**							**348.843.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**348.843.000**						100 persen	**348.843.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**348.843.000**						100 persen	**348.843.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Yang Disusun				1 Document	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Document	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	117.858.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	117.858.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				4 lokasi							4 lokasi		
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi hibah sarpras alat tensi				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	218.485.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	218.485.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun ((				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi penyuluhan kesehatan bagi warga gamer yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah pelatihan menjahit yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				42 RT/RW							42 RT/RW		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**676.513.000**							**404.302.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**676.513.000**						100 persen	**404.302.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**676.513.000**						100 persen	**404.302.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanan pembangunan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	325.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	97.515.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				3 Lokasi							3 Lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi Hibah Sarpras				4 Lokasi							4 Lokasi		
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi Pembangunan Gapura				2 Lokasi							2 Lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	338.405.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	294.287.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan penyediaan PMT				3 Bulan							3 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan sosialisasi pengolahan sampah yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan sosialisasi TB yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				74 RT/RW							74 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**664.448.000**							**445.387.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**664.448.000**						100 persen	**445.387.000**	
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**664.448.000**						100 persen	**445.387.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	273.291.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	77.638.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah lokasi yang difasilitasi hibah sarpras				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	378.657.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	355.249.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				10 kali							10 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				93 RT/RW							93 RT/RW		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**435.392.000**							**585.946.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**435.392.000**						100 persen	**585.946.000**	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**435.392.000**						100 persen	**585.946.000**	
7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.02.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah APAR terisi				1 paket	178.608.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan	Masyarakat	1 paket	196.865.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali				Bencana Dan Perubahan Iklim	publik.		8 kali		
		Jumlah lokasi jembatan yang diperbaiki				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah lokasi MCK yang diperbaiki				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah RT yang mendapatkan Hibah Sarana dan Prasarana				2 RT							2 RT		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	244.284.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	374.081.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				7 kali							7 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kelompok senam sehat terfasilitasi				2 kelompok							2 kelompok		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				50 paket							50 paket		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				46 RT/RW							46 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				67 paket							67 paket		
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**5.874.400.000**							**3.502.637.000**	
8.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**2.304.517.000**						100 persen	**1.886.872.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.000.000**						100 persen	**10.902.000**	
8.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	0 Dokumen	2.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
8.1.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	2 dokumen	1.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
8.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	12 bulan	6.902.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		jumlah dokumen evaluasi SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP yang disusun (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemanatauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan							0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.795.706.000**						100 persen	**1.672.501.000**	
8.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1.760.306.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	0 Orang/bulan	1.638.001.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali							14 kali		
8.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	33.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	12 bulan	33.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
8.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	1 dokumen	1.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
8.1.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**9.500.000**	
8.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	2 kali	9.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**113.800.000**						100 persen	**93.416.000**	
8.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	3.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				1 unit							1 unit		
8.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	4.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	17.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	11 bulan	18.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	8.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	8.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	2.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen							0 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luara daerah				31 kali	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	31 kali	27.116.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
8.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**310.632.000**						100 persen	**60.419.000**	
8.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	1.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	29.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	29.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	280.032.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	29.819.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**58.879.000**						100 persen	**40.134.000**	
8.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				12 bulan	42.879.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	24.134.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
8.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	0 Unit	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin berkala				1 unit							1 unit		
8.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor				12 bulan	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		
8.1.2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**1.255.849.000**						100,00 persen	**321.633.000**	
8.1.2.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen		100 persen	100 persen	**1.255.849.000**						100 persen	**321.633.000**	
8.1.2.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah kegiatan pembinaan karakter kebangsaan bagi aparatur yang dilaksanakan				3 kali	42.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	3 kali	40.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang							0 Orang		
8.1.2.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan korp musik				14 kali	232.372.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	14 kali	140.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		jumlah upacara tingkat kota yang dilaksanakan				14 kali							14 kali		
8.1.2.02.01.6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat dan Generasi Muda yang dilaksanakan				756 orang	980.627.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	756 orang	100.533.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga		0,00 lembaga	16,00 lembaga	**1.230.743.000**						16,00 lembaga	**856.583.000**	
8.1.3.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen		100 persen	100 persen	**1.230.743.000**						100 persen	**856.583.000**	
8.1.3.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	769.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Parpol, Masyarakat	0 Orang	774.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Parpol				9 parpol							9 parpol		
8.1.3.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	460.843.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Parpol, Masyarakat	0 Orang	81.883.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik				30 Sekolah							30 Sekolah		
8.1.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**665.000.000**						100,00 persen	**136.283.000**	
8.1.4.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat	7 kali		7 kali	7 kali	**665.000.000**						7 kali	**136.283.000**	
8.1.4.02.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	jumlah kelembagaan ormas yang dibina				7 lembaga/ormas	665.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Ormas	7 lembaga/ormas	136.283.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang							0 Orang		
8.1.5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen		100 persen	100,00 persen	**363.193.000**						100,00 persen	**209.693.000**	
8.1.5.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya	6 kali		1 kali	1 kali	**363.193.000**						1 kali	**209.693.000**	
8.1.5.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	363.193.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	ormas, masyarakat	0 Orang	209.693.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		jumlah sosialisasi FORKOMKON dan pembinaan ormas				6 kali							6 kali		
		jumlah sosialisasi kerukunan antar umat beragama				2 kali							2 kali		
		jumlah sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika				15 kali							15 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	**55.098.000**						100,00 persen	**91.573.000**	
8.1.6.02.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun	6 laporan		1 laporan	1 laporan	**55.098.000**						1 laporan	**91.573.000**	
8.1.6.02.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun				4 dokumen	55.098.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, dan Masyarakat	4 dokumen	91.573.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang							0 Orang		
		jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman kewaspadaan dini				100 orang							100 orang		
		jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman kewaspadaan dini				120 orang							120 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman penanganan konflik sosial				100 orang							100 orang		
		jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman penanganan konflik sosial				120 orang							120 orang		
TOTAL							**1.029.014.024.000**							**1.080.092.606.962**	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022

5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah untuk tahun 2023 disajikan dalam Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif
Kota Pekalongan Tahun 2023

URAIAN	RKPD 2023
PENDAPATAN	**990.014.024.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**242.248.392.000**
Pendapatan Pajak Daerah	97.750.000.000
Hasil Retribusi Daerah	24.867.002.000
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.473.378.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	113.158.012.000
PENDAPATAN TRANSFER	**747.765.632.000**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**637.762.334.000**
Bagi Hasil Pajak	26.133.436.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.543.489.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000
Dana Alokasi Khusus	177.989.411.000
Dana Insentif Daerah	4.696.260.000
Transfer Pemerintah Provinsi	**110.003.298.000**
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	74.045.298.000
Bantuan Keuangan Provinsi	35.958.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
Pendapatan Hibah	0
BELANJA	**1.029.014.024.000**
BELANJA OPERASI	**844.598.845.529**
Belanja Pegawai	405.194.236.500
Belanja Bunga	0
Belanja Barang dan Jasa	413.908.124.887
Belanja Hibah	21.574.310.142
Belanja Bantuan Sosial	3.922.174.000
BELANJA MODAL	**179.440.178.471**
Belanja Modal Tanah	3.132.548.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.196.533.471
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.614.107.150
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.794.159.206
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.702.830.644
Belanja Aset Lainnya	0
BELANJA TAK TERDUGA	**4.975.000.000**
Belanja Tak Terduga	4.975.000.000

URAIAN	RKPD 2023
PEMBIAYAAN	**39.000.000.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**48.000.000.000**
Penggunaan SiLPA	48.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**9.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0

Sumber : Bappeda, BPKAD Kota Pekalongan, 2022

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2023

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2023
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.027,00
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35,36
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00
17	Persentase pelayanan sampah	persen	70,12
18	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	3,70 – 4,20
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00
23	Indeks SPBE	indeks	2,95
24	IKM Kota	persen	83,64

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2023
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00
26	Indeks Merit System	indeks	240,00
27	Nilai SAKIP Kota	skor	74,57
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP
29	Maturitas SPIP	nilai	3,4
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2022

6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dalam Tabel 6.2 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kota Pekalongan.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,52	Tujuan Kota	Kota
	- Angka Kemiskinan	persen	6,50 – 6,45	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,60	Tujuan Kota	Kota
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,48 – 6,10	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	74,07	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	22,12	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	89,11	Tujuan Kota	Kota
	- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,56 - 36,92	Tujuan Kota	Kota
	- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30	IKU Kota	Kota
	- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00	IKU Kota	Kota
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54	IKU Kota	Kota
	- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72	IKU Kota	Kota
	- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1027,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase pelayanan sampah	persen	70,12	IKU Kota	Kota
	- Pertumbuhan ekonomi	persen	3,70 – 4,20	IKU Kota	Kota
	- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	IKU Kota	Kota
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PENDIDIKAN				
	- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN				
	- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	90,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*)	persen	98,80	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	77,88	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	88,389	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1,09	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96,211	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	40,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	93,74	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	70,00	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL				
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.43	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN TENAGA KERJA				
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,26	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,51	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	630,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN				
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PERTANAHAN				
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	62,86	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,34	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	71,07	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	34,42	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	88,54	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	8,55	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,50	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN				
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	2,95	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	8,12	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
URUSAN PENANAMAN MODAL				
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	204,28	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN KEBUDAYAAN				
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1,53	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PERPUSTAKAAN				
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK *Outcome*)	indeks	20,12	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN				
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	73,20	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,21	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	14,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK				
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	70,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PERSANDIAN				
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	I	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PILIHAN				
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15141,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	580.000	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN				
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	247,58	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PERINDUSTRIAN				
- Pertumbuhan Industri	persen	0,09	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
URUSAN PERDAGANGAN				
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,71	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	94,00	IKU Renstra	Setda
SEKRETARIAT DPRD				
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100,00	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PERENCANAAN				
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN				
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	1,98	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN				
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	87,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40,00	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
INSPEKTORAT DAERAH				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	67,74	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	13,00	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
	- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C.	**ASPEK DAYA SAING**				
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,87	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72,69	Tujuan Kota	Kota
	- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	IKU Kota	Kota
	- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Air	indeks	35,36	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	IKU Kota	Kota
	- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	IKU Kota	Kota
	- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	IKU Kota	Kota
	- Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11	IKU Kota	Kota
	- Indeks SPBE	indeks	2,95	IKU Kota	Kota
	- IKM Kota	persen	83,64	IKU Kota	Kota
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00	IKU Kota	Kota
	- Indeks Merit System	indeks	240,00	IKU Kota	Kota
	- Nilai SAKIP Kota	skor	74,57	IKU Kota	Kota
	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	IKU Kota	Kota
	- Maturitas SPIP	nilai	3,40	IKU Kota	Kota
	- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5,00	IKU Kota	Kota

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2022

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahun kedua atas RPJMD Tahun 2021-2026, disusun dengan memperhatikan RKP Tahun 2023, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan.

Berdasarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2023 yaitu :

1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas.
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

RKPD Tahun 2023 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara

nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 4 Juli 2022

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2022). Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2022.

www.bps.go.id Tahun 2022.

https://idsdjateng.id

https://indeks-inovasi.brin.go.id

BAPPEDA
Membangun
Bersama
Masyarakat

Pemerintah
Kota Pekalongan

Pekalongan
World's City of Batik

Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor : 55 Tahun 2023
Tanggal : 28 Juli 2023

PERUBAHAN

Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor 25 Tahun 2022 tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023



PERUBAHAN RKPD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaanketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan tahun 2022 Nomor 25), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Juli 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

NURPRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ***ii***

DAFTAR TABEL ***v***

DAFTAR GAMBAR ***ix***

BAB I PENDAHULUAN ***1***

1.1. LATAR BELAKANG **1**

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN **1**

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN **3**

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 4

1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 6

1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2023 7

1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 8

1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 8

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN **8**

1.4.1. Maksud 8

1.4.2. Tujuan 8

1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN **9**

1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 **9**

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 ***11***

2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 **11**

2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah 11

2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2023 23

2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 82

2.1.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2022 91

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH **125**

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 125

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 126

2.3. ISU STRATEGIS **133**

2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan 134

2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup 136

2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman 138
2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan 140
2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran 143
2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 144
2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal 146
2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal 149
2.3.9. Kondusivitas Wilayah 149
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 151
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 151
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 152
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 156
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 160
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 161
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 162
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 169
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 169
4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026 169
4.1.2. Misi 173
4.1.3. Tujuan Dan Sasaran 177
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023 187
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional 188
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 198
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan 201
4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 246
4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD 249
4.2.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan 250
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 257
5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023 257
5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 257
5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 261
5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 268
5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 271
5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 272
5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 273
5.1.7. Unsur Kewilayahan 274
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum 274
5.1.9. Non Urusan 275

5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 _____ 690
BAB VI PENUTUP _____ 693
DAFTAR PUSTAKA _____ 695

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2016-2021 4
Tabel 1.2 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 6
Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional 7
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2023 12
Tabel 2.2 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023 23
Tabel 2.3 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 24
Tabel 2.4 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2023 26
Tabel 2.5 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 27
Tabel 2.6 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2023 28
Tabel 2.7 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2023 29
Tabel 2.8 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023 31
Tabel 2.9 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2023 32
Tabel 2.10 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023 33
Tabel 2.11 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2023 34
Tabel 2.12 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 35
Tabel 2.13 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 37
Tabel 2.14 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2023 38
Tabel 2.15 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023 39
Tabel 2.16 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023 40
Tabel 2.17 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023 41
Tabel 2.18 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2023 42

Tabel 2.19 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2023 43
Tabel 2.20 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2023 44
Tabel 2.21 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2023 45
Tabel 2.22 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2023 45
Tabel 2.23 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2023 47
Tabel 2.24 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2023 48
Tabel 2.25 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2023 48
Tabel 2.26 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023 49
Tabel 2.27 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2023 50
Tabel 2.28 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023 51
Tabel 2.29 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2023 53
Tabel 2.30 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2023 54
Tabel 2.31 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 55
Tabel 2.32 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023 56
Tabel 2.33 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2023 57
Tabel 2.34 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2023 58
Tabel 2.35 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2023 59
Tabel 2.36 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2023 59
Tabel 2.37 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2023 60
Tabel 2.38 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2023 61
Tabel 2.39 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 62
Tabel 2.40 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023 67
Tabel 2.41 Capaian Indikator Non Urusan Kota Pekalongan Tahun 2023 69
Tabel 2.42 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 84
Tabel 2.43 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 86

Tabel 2.44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 86
Tabel 2.45 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 87
Tabel 2.46 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022..... 89
Tabel 2.47 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022..... 91
Tabel 2.48 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2022..... 92
Tabel 2.49 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2022..... 105
Tabel 2.50 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2022..... 112
Tabel 2.51 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2022..... 120
Tabel 2.52 Permasalahan Pembangunan Daerah 125
Tabel 2.53 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 126
Tabel 2.54 Isu Strategis..... 134
Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen)..... 153
Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022 154
Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021..... 155
Tabel 3.4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2022..... 156
Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan..... 158
Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan..... 159
Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan..... 159
Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan..... 159
Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan..... 160
Tabel 3.10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan..... 160
Tabel 3.11 Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2023 164
Tabel 3.12 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2023..... 166
Tabel 3.13 Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023..... 167
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius" 179

Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 183
Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026..... 186
Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023..... 203
Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 206
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023..... 217
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023..... 218
Tabel 4.8 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional 246
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 277
Tabel 5.2 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 690

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen 4
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 152
Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022 153
Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022 155
Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi 176

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023. Seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan pertimbangan diatas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2023, dan kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Iembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

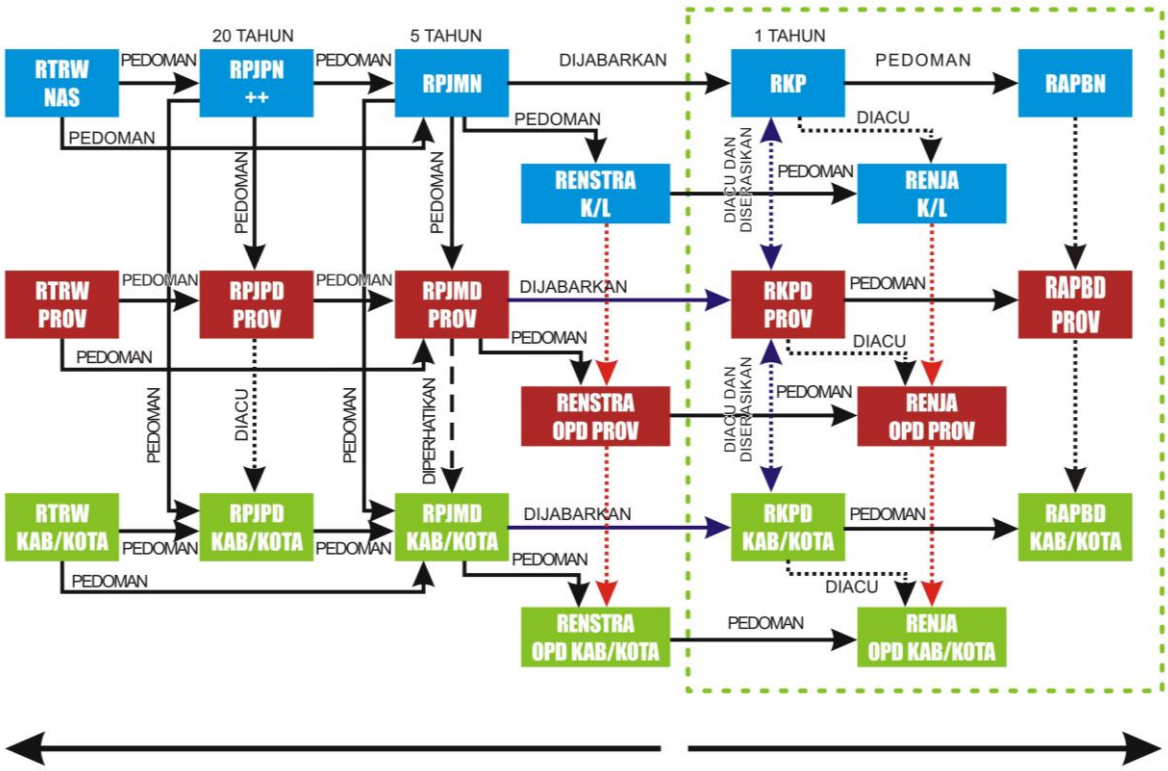
Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13).
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
31. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dituangkan di dalam RKPD Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023
Tema	*Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan*	*Tema*	*Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan*
1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023
2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas	3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha	4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
6	Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Sinergitas RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Kota Pekalongan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
		10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
		3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2023

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah, sinergitas pembangunan dengan Pusat juga dilakukan. RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RKP tahun 2023, dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Nasional disajikan dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
		3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2023. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota, menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan tersebut akan dievaluasi dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah dengan memperhatikan:

a. hasil evaluasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023;
b. kondisi perekonomian daerah;
c. kebijakan yang bersifat mandatory.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah:

a. Mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2023;
b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Wali Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
e. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
f. Sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, meliputi:

a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer Pusat;
b. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
e. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi triwulan II RKPD Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
2. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2023 yang menjadi isu permasalahan daerah.
3. Isu Strategis berisi rumusan isu-isu berdasarkan data capaian pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2023, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 2023, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan daerah tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan pada tahun 2023.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017, bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan II tahun 2023. Evaluasi capaian indikator kinerja ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi terbagi dalam 4 kategori, yaitu tercapai, akan tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 di tahun 2023 dari 101 indikator sebagai berikut:

Evaluasi terhadap Penetapan RKPD Tahun 2023		Evaluasi terhadap Target Akhir RPJMD	
Tercapai	: 17 Indikator (16,83%)	Tercapai	: 13 Indikator (12,87%)
Akan Tercapai	: 2 Indikator (1,98%)	Akan Tercapai	: 4 Indikator (3,96%)
Belum Tercapai	: 27 Indikator (26,73%)	Belum Tercapai	: 30 Indikator (29,70%)
Belum Tersedia Data	: 55 Indikator (54,46%)	Belum Tersedia Data	: 54 Indikator (53,47%)

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,66	74,44	74,51	74,47	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
2	Angka Kemiskinan	Persen	5,89	7,59	7,00	6,71	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,03	75,40	75,90	75,32	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,99	6,89	4,98	6,66	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100,00	55,56	85,19	62,96	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12,17	37,27	21,11	26,50	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91,04	n/a	79,02	88,77	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa/ Tahun	40,65	n/a	40,68	35,97 - 36,21	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0,00	3,00	0,00	0,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,50	n/a	0,28	0,25	0,31	124,00	Tercapai	0,31	62,00	Belum tercapai
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80,01	188,23	124,53	128,28	155,16	82,68	Belum Tercapai	155,16	51,57	Belum tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7,00	8,90	9,96	8,21	13,96	58,81	Belum Tercapai	13,96	50,14	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9,00	10,27	12,28	10,23	17,07	59,93	Belum Tercapai	17,07	52,72	Belum tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11,89	n/a	1,42	1,00	-2,48	-248,00	Belum Tercapai	-2,48	-20,86	Belum tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,00	57,87	n/a	58,78	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,34	75,77	70,35	70,28	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100,00	n/a	93,97	90,96	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565,00	1730,00	980,14	1230,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73,12	73,75	72,36	69,12	71,24	103,07	Tercapai	71,24	97,43	Akan tercapai
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,55	3,59	5,76	2,28 - 2,84	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Aspek Pelayanan Umum												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Pendidikan												
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100,00	59,51	90,94	100,00	86,51	86,51	Belum tercapai	86,51	86,51	Belum tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Kesehatan												
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100,00	n/a	85,98	88,00	40,48	46,00	Belum Tercapai	40,48	40,48	Belum tercapai
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang												
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99,40	n/a	99,69	98,60	100,00	101,42	Tercapai	100,00	100,60	Tercapai
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87,83	n/a	33,93	73,50	33,93	46,16	Belum Tercapai	33,93	38,63	Belum tercapai
6	persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92,115	n/a	86,07	87,092	100,00	114,82	Tercapai	100,00	108,56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1,09	n/a	4,72	1,09	0,46	42,20	Belum Tercapai	0,46	42,20	Belum tercapai
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96,251	n/a	99,95	96,203	99,89	103,83	Tercapai	99,89	103,78	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100,00	n/a	100,00	20,00	0,00	0,00	Belum Tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95,58	97,93	97,47	93,12	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas												
11	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100,00	n/a	111,57	60,00	82,41	137,35	Tercapai	82,41	82,41	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100,00	11,77	95,79	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
13	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Urusan Sosial												
14	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3,82	n/a	18,39	3,32	12,72	383,13	Tercapai	12,72	332,98	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Tenaga Kerja												
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52,36	68,00	61,50	52,22	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,53	n/a	n/a	28,51	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
17	Skor Kota Layak Anak	Skor	636,00	602,00	637,6	628,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Pangan												
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Pertanahan												
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Lingkungan Hidup												
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60,00	n/a	62,86	62.86	54,29	86,37	Belum tercapai	54,29	90,48	Akan tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,34	0,00	0,39	0,35	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69,91	n/a	89,40	71,48	20,78	29,07	Belum tercapai	20,78	29,72	Belum tercapai
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60,10	20,00	25,81	25,30	17,09	67,55	Belum tercapai	17,09	28,44	Belum tercapai
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91,38	82,37	81,84	87,59	82,52	94,21	Akan Tercapai	82,52	90,30	Akan tercapai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10,00	n/a	17,09	8,08	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana												
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,65	n/a	64,27	67,45	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Perhubungan												
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28,00	n/a	21,51	28,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Komunikasi Dan Informatika												
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3,25	n/a	2,1	2,85	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31 – 100)	n/a	90,02	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Koperasi dan UKM												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9,02	n/a	5,90	7,82	11,54	147,57	Tercapai	11,54	127,94	Tercapai
Urusan Penanaman Modal												
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216,78	410,60	570,79	200,28	33,92	16,94	Belum tercapai	33,92	15,65	Belum tercapai
Urusan Kebudayaan												
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1,46	47,20	0,00	1,57	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Urusan Perpustakaan												
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20,73	n/a	33,46	19,92	5,35	26,86	Belum tercapai	5,35	25,81	Belum tercapai
Urusan Kearsipan												
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74,40	87,59	80,67	72,80	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga												
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,37	n/a	1,43	1,15	0,01	0,87	Belum tercapai	0,01	0,73	Belum tercapai
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15,00	4,00	13,00	13,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Urusan Statistik												
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80,00	n/a	90,22	68,00	98,91	145,46	Tercapai	98,91	123,64	Tercapai
Urusan Persandian												
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Indeks	II	n/a	I+	I	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
URUSAN PILIHAN												
Urusan Kelautan dan Perikanan												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15.600,00	n/a	10.535,05	14.991,00	1.643,95	10,97	Belum tercapai	1.643,95	10,54	Belum tercapai
Urusan Pariwisata												
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625.000	316.440	1.038.424	565.000	128.350	22,72	Belum tercapai	128.350	20,54	Belum tercapai
Urusan Pertanian												
41	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259.492,90	n/a	694.861,638	243.762,11	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Perindustrian												
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0,07	2,38	4,26	0,10	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Urusan Perdagangan												
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27,51	n/a	18,15	26,44	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Sekretariat Daerah												
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94,00	n/a	89,48	93,00	21,09	22,68	Belum tercapai	21,09	22,44	Belum tercapai
Sekretariat DPRD												
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Perencanaan												
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100,00	97,33	99,19	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Keuangan												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2,06	n/a	2,31	1,95	1,00	51,28	Belum tercapai	1,00	48,54	Belum tercapai
Kepegawaian												
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90,00	n/a	68,06	86,00	91,69	106,62	Tercapai	91,69	109,67	Tercapai
Pendidikan dan Pelatihan												
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40,00	n/a	113,25	40,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Penelitian dan Pengembangan												
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
Inspektorat Daerah												
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100,00	n/a	56,67	58,06	53,33	91,85	Akan tercapai	53,33	53,33	Belum tercapai
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16,00	n/a	3,00	12,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
URUSAN KEWILAYAHAN												
Kecamatan												
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	99,91	100,00	42,28	42,28	Belum tercapai	42,28	42,28	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	99,74	100,00	41,58	41,58	Belum tercapai	41,58	41,58	Belum tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	100,06	100,00	33,20	33,20	Belum tercapai	33,20	33,20	Belum tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,91	42,91	Belum tercapai	42,91	42,91	Belum tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
Kesatuan Bangsa dan Politik												
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Aspek Daya Saing												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50,90	54,31	54,36	50,86	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,69	69,66	71,04	71,69	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,92	9,18	9,20	9,27	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35,39	13,29	45,33	35,35	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23,61	5,17	23,77	23,60	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7,00	n/a	4,00	6,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100,00	n/a	100,00	97,20	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100,00	n/a	42,22	88,89	91,11	102,50	Tercapai	91,11	91,11	Akan tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3,25	n/a	n/a	2,85	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
14	IKM Kota	Persen	84,09	80,83	90,44	83,49	85,65	102,59	Tercapai	85,65	101,86	Tercapai
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97,50	n/a	90,01	95,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
16	Indeks Merit System	Indeks	260,00	n/a	264,50	225,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76,07	73,16	73,31	74,07	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	n/a	WTP	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
19	Maturitas SPIP	Nilai	4,00	3,00	3,022	3,20	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8,00	n/a	2,00	4,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	2,00	25,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2023

2.2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 2.2 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan												
Program Pengelolaan Pendidikan												
1	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	100,00	64,56	90,94	83,97	100,00	119,09	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengembangan Kurikulum												
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
1	Persentase ketercukupan pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	100,00	54,46	56,04	100,00	56,04	56,04	Belum tercapai	56,04	56,04	Belum tercapai
1. Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SPM terkendala banyaknya pendidik yang telah bersertifikasi pendidik yang memasuki masa pensiun maupun telah meninggal dunia.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 2.3 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
1	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persen	92,00	n/a	66,19	90,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	31,20	33,91	Belum tersedia data
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	90,00	n/a	70,43	80,00	71,76	89,70	Belum tercapai	71,76	79,73	Belum tercapai
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	Persen	72,50	n/a	100,00	65,00	100,00	153,85	Tercapai	100,00	137,93	Tercapai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan												
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95,50	n/a	88,05	94,00	100,00	106,38	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	Persen	60,00	n/a	100,00	45,00	100,00	222,22	Tercapai	100,00	166,67	Tercapai
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman												
1	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	31,43	31,43	Belum tercapai	31,43	31,43	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100,00	n/a	100,00	96,00	40,00	41,67	Belum tercapai	40,00	40,00	Belum tercapai
3	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97,00	95,00	100,00	96,00	44,69	46,55	Belum tercapai	44,69	46,07	Belum tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan												
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95,00	95,75	95,75	92,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

1. Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar Belum tercapai karena prasarana dan ketersediaan alat kesehatan di puskesmas belum memenuhi kebutuhan sesuai standar di ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan).
2. Pemantauan sarana farmasi yang memenuhi standar dan pemantauan TPM dan DAM akan berlanjut pelaksanaannya di triwulan selanjutnya.
3. Capaian Indikator Persentase rumah tangga sehat belum bisa dihitung dikarenakan kegiatan pemantauan Rumah Tangga Sehat belum dilaksanakan di TW I dan rencana akan dilaksanakan di TW IV.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel 2.4 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)												
1	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	Persen	93,10	n/a	94,92	93,10	96,08	103,20	Tercapai	96,08	103,20	Tercapai
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum												
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92,11	n/a	60,53	88,39	60,52	68,47	Belum tercapai	60,52	65,70	Belum tercapai
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional												
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	Persen	100,00	n/a	0,00	40,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	Persen	12,87	n/a	5,11	11,07	0,14	1,26	Belum tercapai	0,14	1,09	Belum tercapai
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase												
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	71,49	n/a	68,39	68,47	68,39	99,88	Akan tercapai	68,39	95,66	Akan tercapai
Program Penataan Bangunan Gedung												
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persen	18,74	n/a	16,95	17,84	17,01	95,35	Akan tercapai	17,01	90,77	Akan tercapai
Program Penyelenggaraan Jalan												
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	Persen	86,57	n/a	84,28	83,30	82,35	98,86	Akan tercapai	82,35	95,12	Akan tercapai
Program Pengembangan Jasa Konstruksi												

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	21,20	n/a	7,15	13,20	7,15	54,17	Belum tercapai	7,15	33,73	Belum tercapai
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang											
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	Persen	100,00	n/a	66,67	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
1. Indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota belum tercapai, dikarenakan saat ini sedang dilaksanakan proses pembangunan TPS3R di Kel. Pringrejo 2. Indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota belum tercapai, dikarenakan saat ini sedang memasuki tahap pengajuan persetujuan substansi di Kementerian ATR BPN												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.5 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman												
Program Pengembangan Perumahan												
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	92,35	n/a	99,13	91,35	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Kawasan Permukiman												
1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Hektar	0,00	366,90	280,10	291,47	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh												

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	Hektar	2.147,88	n/a	1.348,81	1.856,41	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)												
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	Persen	14,55	n/a	46,73	14,48	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Tabel 2.6 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Linmas												
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum												
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70,00	n/a	65,00	64,00	80,00	125,00	Tercapai	80,00	114,29	Tercapai
Program Penanggulangan Bencana												
1	Persentase korban bencana alam yang ditangani	Persen	100,00	11,77	95,79	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran												

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel 2.7 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial												
Program Pemberdayaan Sosial												
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75,00	n/a	100,00	58,00	94,34	162,66	Tercapai	94,34	125,79	Tercapai
Program Rehabilitasi Sosial												
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100,00	n/a	25,16	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial												

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52,49	n/a	10,32	56,69	21,97	38,75	Belum tercapai	21,97	41,86	Belum tercapai
Program Penanganan Bencana												
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan												
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
1. Indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial Belum tercapai dikarenakan jumlah DTKS tiap tahun mengalami kenaikan. Jumlah KPM BPNT tahun 2021 = 18.981; Jumlah DTKS tahun 2021 = 183.841 dan Jumlah DTKS tahun 2022 = 186.870												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.8 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja												
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja												
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	Persen	0,55	n/a	0,37	0,42	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Penempatan Tenaga Kerja												
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	Persen	29,93	n/a	36,07	23,93	18,88	78,90	Belum tercapai	18,88	63,08	Belum tercapai
Program Hubungan Industrial												
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	Persen	49,02	n/a	84,06	46,80	46,23	98,78	Akan tercapai	46,23	94,31	Akan tercapai
1. Capaian indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome) belum tersedia, dikarenakan program masih dalam tahap pelaksanaan												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.9 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan												
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11,09	96,77	5,55	5,55	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Perlindungan Perempuan												
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23,99	n/a	29,88	23,99	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)												
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55,56	n/a	29,63	33,33	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Perlindungan Khusus Anak												
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

1. Indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Belum tersedia data, perhitungan capaian akan dihitung pada triwulan IV.
2. Indikator Rasio Kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) Belum tersedia data, untuk data jumlah perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 8 orang, namun untuk data jumlah penduduk perempuan tahun 2023 belum rilis, sehingga capaian belum dapat dihitung.
3. Capaian Indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) Belum tersedia data dikarenakan pelaksanaan evaluasi Kelurahan Dekela rencana baru akan dilaksanakan pada Triwulan II

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 2.10 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan												
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
1	Persentase cadangan pangan daerah	Persen	4,80	n/a	2,92	4,40	4,45	101,14	Tercapai	4,45	92,71	Akan tercapai
Program Penanganan Kerawanan Pangan												
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengawasan Keamanan Pangan												
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	Persen	88,00	n/a	100,00	83,20	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
1. Kegiatan pengawasan keamanan pangan akan dilaksanakan pada triwulan III.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 2.11 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan												
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum Tercapai
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee												
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	50,00	n/a	n/a	50,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.12 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												
Program Perencanaan Lingkungan Hidup												
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100,00	n/a	80,00	20,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup												
1	Persentase limbah yang diolah	Persen	49,01	n/a	100,00	40,95	25,00	61,05	Belum tercapai	25,00	51,01	Belum tercapai
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)												
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	2,949	n/a	2,900	2,919	2,91	99,69	Akan tercapai	2,91	98,68	Akan tercapai
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)												
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	Persen	100,00	n/a	13,33	13,33	6,67	50,04	Belum tercapai	6,67	6,67	Belum tercapai
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)												
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	Persen	100,00	n/a	20,17	16,67	12,00	71,99	Belum tercapai	12,00	12,00	Belum tercapai
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat												
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Persen	50,00	n/a	100,00	50,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat												
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	Persen	75,00	n/a	100,00	75,00	50,00	66,67	Belum tercapai	50,00	66,67	Belum tercapai
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup												
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengelolaan Persampahan												
1	Persentase pengelolaan sampah	Persen	0,31	n/a	92,72	0,28	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup

   Capaian indikator program Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup belum mencapai target, terdapat 2 dokumen yang belum disusun yaitu Dokumen KLHS RPJMD 2024-2029 dan KLHS RPJPD yang baru akan disusun pada tahun 2023 ini.

2. Persentase Ruang Terbuka Hijau

   Capaian indikator Program Persentase Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2023 sebesar 98,34% atau 2,91% dari target sebesar 2,919%. Luasan RTH Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 108,78 Hektar atau 2,900% jika dibandingkan dengan luas Kota Pekalongan dikurangi dikurangi sawah, tambak dan badan air yaitu seluas 3.742 Hektar. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 2,949% maka luas RTH pada Tahun 2026 sebesar 110, 35 Hektar atau kurang 1,83 Hektar dari luas RTH saat ini. Upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi target RPJMD tersebut diantaranya penyusunan database RTH untuk memvalidasi luasan RTH, penambahan luasan RTH dengan penanaman pohon, pembangunan taman dan pemanfaataan lahan kosong milik pemerintah untuk kegiatan penghijauan.

3. Persentase pengelolaan sampah baru dapat dihitung di triwulan IV.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.13 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
Program Pendaftaran Penduduk												
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	Persen	88,75	n/a	84,29	83,53	85,16	101,95	Tercapai	85,16	95,95	Akan tercapai
Program Pencatatan Sipil												
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	Persen	94,00	n/a	79,38	93,55	79,87	85,38	Belum tercapai	79,87	84,97	Belum tercapai
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14,00	n/a	7,00	9,00	7,00	77,78	Belum tercapai	7,00	50,00	Belum tercapai

1. Indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk, jika dibanding dengan target akhir RPJMD tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah tercapai melebihi target. disebabkan adanya kerjasama terkait penerbitan Kartu Indonesia Anak (KIA) dengan Dinas Pendidikan dan PKK Kota Pekalongan.
2. Tingkat capaian indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD disebabkan oleh kasus perceraian dan kematian di masyarakat berkurang, hal ini mengakibatkan ketercapaian kepemilikan akta kematian dan akta perceraian masih dibawah target yang telah ditentukan, meskipun targetnya Belum tercapai, kondisi demikian menunjukan kondisi yang positif dikarenakan angkat kematian dan angka perceraian rendah.
3. Target OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai akhir RPJMD adalah 14 OPD, namun sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sudah 7 OPD yang memanfaatkan data kependudukan.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel 2.14 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
Program Peningkatan Kerja Sama Desa												
1	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100,00	n/a	33,33	50,00	5,56	11,12	Belum tercapai	38,89	38,89	Belum tercapai
Program Administrasi Pemerintahan Desa												
1	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	Persen	70,37	n/a	74,07	59,26	81,48	137,50	Tercapai	81,48	115,79	Tercapai
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat												
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96,92	n/a	96,79	96,35	96,79	100,46	Tercapai	96,79	99,87	Akan tercapai

1. Target Kelurahan yang difasilitasi kerjasama dengan TNI sampai akhir tahun RPJMD adalah 18 kelurahan (3 kelurahan tiap tahun mulai tahun 2021 s.d 2026).
2. Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat, jika dibanding dengan target akhir RPJMD tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah tercapai melebihi target.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.15 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
Program Pengendalian Penduduk												
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	Persen	100,00	n/a	99,68	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)												
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7,20	n/a	9,02	7,80	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)												
1	Unmeet need KB	Persen	12,00	n/a	13,08	15,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1. Indikator pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru dapat dihitung capaiannya pada Triwulan IV												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.16 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan												
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)												
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	Persen	100,00	n/a	5,54	92,00	0,18	0,20	Belum tercapai	5,73	5,73	Belum tercapai
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0,44	0,49	0,39	0,44	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	Persen	0,74	n/a	-4,90	0,75	-0,54	-71,71	Belum tercapai	-0,54	-72,97	Belum tercapai

1. Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ Belum tercapai dikarenakan pengadaan fasilitas LLAJ bertahap sampai dengan akhir tahun RPJMD (Target Jumlah fasilitas LLAJ Akhir Tahun RPJMD: 7.649 (Rambu MRLL 1.085 unit, lampu PJU 5.369 unit).
2. Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala, indikator ini merupakan indikator persentase peningkatan dan mendapatkan hasil negatif disebabkan angka kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya karena data perhitungan merupakan data sampai dengan bulan Juni tahun 2023, dimana dimungkinkan banyak kendaraan belum melakukan uji berkala karena belum jatuh tempo untuk uji berkala, serta belum pulihnya perekonomian masyarakat terutama masyarakat yg memiliki kendaraan barang sehingga belum melakukan uji berkala kendaraannya

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.17 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
Program Informasi Dan Komunikasi Publik												
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	81,25	81,25	Belum tercapai	81,25	81,25	Belum tercapai
Program Aplikasi Informatika												
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,30	n/a	2,75	3,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1. Capaian indeks Aspek teknologi informasi dan komunikasi memang belum mencapai target (nilai baru akan rilis dibulan November/desember), untuk itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aspek TIK: • melakukan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE pada unit kerja/OPD sebelum melakukan pembangunan aplikasi • memperkuat pelayanan pusat data pemerintah daerah												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2.18 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UrusanPemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi												
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	Persen	33,23	n/a	31,21	30,94	10,28	33,23	Belum tercapai	10,28	30,94	Belum tercapai
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian												
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Persen	59,68	n/a	15,96	58,31	16,84	28,88	Belum tercapai	16,84	28,22	Belum tercapai
Program Pengembangan UMKM												
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	Persen	12,37	n/a	11,71	12,06	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

1. Capaian Indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD memang tidak tercapai. jumlah koperasi tidak aktif bertambah karena adanya ketentuan 1 data menggunakan data ODS. Dimana ketentuan untuk koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan atau tidak melaporkan laporan keuangan minimal PHU dan neraca selama 3 tahun berturut-turut, makan akan langsung dikategorikan koperasi tidak aktif.
2. Capaian Indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dan target RKPD tahun 2023 dikarenakan belum optimalnya akses permodalan yang dapat dimanfaatkan usaha mikro untuk meningkatkan skala usahanya, dikarenakan belum terdapat sinergi antara penyedia permodalan dengan usaha mikro.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.19 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal												
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal												
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	n/a	1,00	1,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Program Promosi Penanaman Modal												
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Program Pelayanan Penanaman Modal												
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	2.500,00	n/a	3.847	2.500,00	2.427	97,08	Akan tercapai	2.427	97,08	Akan tercapai
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal												
1	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40,53	n/a	101,52	6,68	33,92	507,78	Tercapai	33,92	83,69	Belum tercapai
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal												
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum tercapai, dikarenakan penyelesaian proses penyusunan dokumen Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada triwulan IV 2. Pelaksanaan promosi penanaman modal rencana dilaksanakan pada bulan September di Surabaya.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.20 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga												
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan												
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95,24	n/a	83,97	93,69	10,57	11,28	Belum tercapai	10,57	11,10	Belum tercapai
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan												
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	Persen	42,86	60,98	68,89	34,29	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 2.21 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 2.22 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi												
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3,74	n/a	1,87	2,80	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Pengujian kerentanan dilakukan secara mandiri (self asessment); atau - pihak ketiga (kerjasama dengan BSSN atau penyedia). Hasil pengujian dalam bentuk dokumen yang berisi daftar kerentanan sistem elektronik yang diuji dan rekomendasi perbaikan
- Sistem elektronik: serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik
- Bentuk riil sistem elektronik: SIM, website, web application Sistem elektronik s.d. 2020: 107 terdiri dari web application: 71; website: 36 (semua OPD)
- Data dasar: 107 sistem elektronik
  - Tahun 2021: 0,93% (1 sistem elektronik)
  - Tahun 2022: 1,87% (2 sistem elektronik)
  - Tahun 2023: 2,80% (3 sistem elektronik)
  - Tahun 2024: 2,80% (3 sistem elektronik)
  - Tahun 2025: 3,73% (4 sistem elektronik)
  - Tahun 2026: 3,73% (4 sistem elektronik)
  - Kondisi awal: 0 sistem elektronik Kondisi akhir (akumulasi): 17 sistem elektronik
- Tahun 2022 telah dilakukan pengujian kerentanan terhadap 2 (dua) sistem elektronik bekerja sama dengan BSSN dalam bentuk kegiatan Information Technology Security Assessment (ITSA)
- Sampai tahun 2022, capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sudah sesuai dengan target
- Untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai Target Akhir RPJMD atau bahkan percepatan pencapaian, Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah, sedang, dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Tahun 2021)
  - Menerapkan ISO/IEC 27001:2022 (Tahun 2023 menyusun dokumen persyaratan SMKI dan kontrol, operasional SMKI, audit internal SMKI, dan reviu manajemen)
  - Membentuk CSIRT

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 2.23 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												
Program Pengembangan Kebudayaan												
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	24,29	24,29	Belum tercapai	24,29	24,29	Belum tercapai
Program Pengembangan Kesenian Tradisional												
1	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Persen	100,00	30,00	100,00	100,00	20,00	20,00	Belum tercapai	20,00	20,00	Belum tercapai
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya												
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97,52	n/a	87,50	92,20	90,91	98,60	Akan tercapai	90,91	93,22	Akan tercapai
Program Pengelolaan Permuseuman												
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4,80	13,10	3,28	4,66	3,49	74,89	Belum tercapai	3,49	72,71	Belum tercapai
Program Pembinaan Sejarah												
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 2.24 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan												
Program Pembinaan Perpustakaan												
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 – 60 tahun)	Indeks	16,58	18,27	24.97	16,09	5,14	31,95	Belum tercapai	5,14	31,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 2.25 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												
Program Pengelolaan Arsip												
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66,67	n/a	80,00	46,67	100,00	214,27	Tercapai	100,00	149,99	Tercapai
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52,50	n/a	80,23	45,00	75,00	166,67	Tercapai	75,00	142,86	Akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip												
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai
1. pengawasan Kearsipan OPD akan dilaksanakan di triwulan III dan IV												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.26 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan												
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	Persen	6,15	n/a	1,10	1,00	-81,16	-8.116,00	Belum tercapai	-81,16	-1.319,67	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Persen	6,15	4,35	1,88	1,00	-63,83	-6.383,00	Belum tercapai	-63,83	-1.037,89	Belum tercapai
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya												
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	6,15	n/a	-17,99	1,00	-71,10	-7.110,00	Belum tercapai	-71,10	-1.156,10	Belum tercapai
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan												
1	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	Pelaku Usaha	12,00	n/a	2,00	2,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	Persen	12,20	n/a	n/a	12,20	8,68	71,15	Belum tercapai	8,68	71,15	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 2.27 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata												
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata												
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12,50	n/a	12,67	11,00	7,57	68,82	Belum tercapai	7,57	60,56	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pemasaran Pariwisata												
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46,98	n/a	228,16	31,98	-48,24	-150,84	Belum tercapai	-48,24	-102,68	Belum tercapai
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual												
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Persen	59,52	n/a	13,20	30,30	9,10	30,03	Belum tercapai	9,10	15,29	Belum tercapai
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif												
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	100,00	n/a	40,70	40,00	24,30	60,75	Belum tercapai	24,30	24,30	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 2.28 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian												
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian												
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,84	n/a	50,82	55,67	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	188,15	n/a	644,18	191,91	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian												
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner												
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	5,00	n/a	-63,46	5,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian												
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Program Perizinan Usaha Pertanian												
1	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	Persen	20,00	n/a	36,36	50,00	27,16	54,32	Belum tercapai	27,16	135,80	Tercapai
Program Penyuluhan Pertanian												
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	Persen	5,00	-14,29	8,70	5,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

1. Indikator nilai produksi pertanian per tahun dan nilai produksi peternakan per tahun Belum tercapai dikarenakan belum ada rilis data dari BPS.
2. Indikator pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian Belum tercapai, dikarenakan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (rencana pembangunan prasarana pertanian tahun 2023: Pembangunan Kantor RPH, Pembangunan Sarpras Pendukung Pengelolaan Limbah RPH dan Rehab Ricemill).
3. Rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota di triwulan III
4. Penilaian kenaikan kelas kelompok tani akan dilaksanakan di triwulan III

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 2.29 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan												
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	100,00	n/a	73,33	81,25	68,75	84,62	Belum tercapai	68,75	68,75	Belum tercapai
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting												
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100,00	n/a	101,06	88,00	100,00	113,64	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengembangan Ekspor												
1	Persentase peningkatan volume ekspor	Persen	8,19	n/a	-43,07	7,60	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen												
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	83,99	n/a	111,16	77,99	33,90	43,47	Belum tercapai	33,90	40,36	Belum tercapai
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri												
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	Persen	7,50	n/a	1,18	4,26	0,92	21,60	Belum tercapai	0,92	10,95	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 2.30 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian												
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	Persen	21,04	n/a	66,60	20,43	70,43	344,74	Tercapai	70,43	334,74	Tercapai
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota												
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	Persen	26,00	n/a	100,00	24,00	12,41	51,71	Belum tercapai	12,41	47,73	Belum tercapai
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional												
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	Belum tercapai	70,00	70,00	Belum tercapai

1. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) Belum tercapai. Dari 185 ijin yang dikeluarkan, hanya 51 yang dilakukan pemantauan. Dimana 51 usaha/industry ini memiliki resiko menengah tinggi sampai tinggi. Dilakukan pemantauan untuk mengetahui golongan industry yang sesuai KBLI.
2. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) belum tercapai, dikarenakan informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan baru akan disediakan di TW. III dan TW. IV

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel 2.31 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah												
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat												
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	100,00	122,22	111,11	100,00	11,11	11,11	Belum tercapai	11,11	11,11	Belum tercapai
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	31,93	31,93	Belum tercapai	31,93	31,92	Belum tercapai
Program Perekonomian Dan Pembangunan												
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	63,64	63,64	Belum tercapai	63,64	63,64	Belum tercapai
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	6,00	n/a	-10,52	6,00	-64,08	-1.068,00	Belum tercapai	-64,08	-9,36	Belum tercapai
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100,00	100,00	87,50	100,00	38,33	38,33	Belum tercapai	38,33	38,33	Belum tercapai

1. Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif belum tercapai; saat ini sedang proses pembahasan 2 raperda, yaitu: Pajak Daerah dan retribusi daerah, Tanggungjawab sosial dan lingkungan Badan Usaha.
2. Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat Belum tercapai, karena kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat baru akan dilanjutkan pelaksaannya pada triwulan III dan IV.
3. Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan Belum tercapai, dikarenakan beberapa kegiatan

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
dilaksanakan di triwulan selanjutnya. 4. IndikatorDeviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD belum tercapai, dikarenakan beberapa pengadaan belum selesai terlaksana dan beberapa kegiatan yang masih dalam proses pembayaran. 5. Indikator persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa belum tercapai, dikarenakan ada beberapa paket yang metode pemilihannya berubah menjadi e-purchasing.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2. Sekretariat DPRD

Tabel 2.32 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD												
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd												
1	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	76,47	100,00	100,00	16,67	16,67	Belum tercapai	16,67	16,67	Belum tercapai
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	20,00	20,00	Belum tercapai	20,00	20,00	Belum tercapai
1. Indikator Persentase Perda yang ditetapkan Belum tercapai saat ini 2 Perda telah ditetapkan (Perda tentang pengelolaan pasar rakyat dan Perda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha) dan Raperda ttg pajak daerah dan retribusi masih dalam proses evaluasi di provinsi. 2. Indikator Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu Belum tercapai dikarenakan pembahasan dokumen penganggaran baru akan dilaksanakan di TW. III.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel 2.33 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
Perencanaan												
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah												
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
3	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah												
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

1. Indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu Belum tercapai dikarenakan penyusunan dokumen dilaksanakan pada Triwulan III (Dokumen Perubahan RKPD 2023, Dokumen RKPD 2024) dan Triwulan IV (Dokumen Background Study, Dokumen Ranwal RKPD 2025 dan Dokumen Ranwal RPJPD)
2. Indikator Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu Belum tercapai dikarenakan penyusunan dokumen per triwulan
3. Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Belum tercapai, penyusunan dokumen baru selesai di Triwulan IV

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2. Keuangan

Tabel 2.34 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keuangan												
Program Pengelolaan Keuangan Daerah												
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7,26	n/a	5,79	8,08	5,79	71,66	Belum tercapai	5,79	125,39	Tercapai
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah												
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah												
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5,00	n/a	2,99	5,00	-51,84	-1.036,80	Belum tercapai	-51,84	-1.036,8	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

3. Kepegawaian

Tabel 2.35 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kepegawaian												
Program Kepegawaian Daerah												
1	Persentase PNS berkembang karier	Persen	50,00	15,82	49,00	50,00	61,90	123,80	Tercapai	61,90	123,80	Tercapai
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	Persen	100,00	n/a	68,06	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase Keterisian Jabatan	Persen	90,00	n/a	98,96	90,00	97,41	108,23	Tercapai	97,41	108,23	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80,00	n/a	97,33	80,00	45,75	57,19	Belum tercapai	45,75	57,19	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

4. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.36 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2023

z	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
Pendidikan dan Pelatihan												
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia												

z	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	16,27	16,27	Belum tercapai	16,27	16,27	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

5. Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2.37 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
Penelitian dan Pengembangan												
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah												
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	Skor	76,00	n/a	76,60	73,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1. Indikator Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD dan Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan baru dapat dihitung capaiannya pada triwulan IV 2. Belum dilakukan perhitungan Skor capaian Nilai RiDA (SiDA), akan dilaksanakan di triwulan III												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Tabel 2.38 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inspektorat												
Program Penyelenggaraan Pengawasan												
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	85,00	n/a	57,14	85,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi												
1	Level Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1. pemeriksaan reguler baru dilaksanakan pada triwulan II sehingga belum ada tindak lanjut hasil pemeriksaan dari OPD terkait 2. Nilai Level Kapabilitas APIP akan dirilis pada Triwulan IV												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.3.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Tabel 2.39 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kecamatan												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik												
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan												
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kandang Panjang)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	57,80	57,80	Belum tercapai	57,80	57,80	Belum tercapai
3	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Panjang Wetan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	60,24	60,24	Belum tercapai	60,24	60,24	Belum tercapai
4	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Degayu)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	68,89	68,89	Belum tercapai	68,89	68,89	Belum tercapai
5	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Bandengan)	Persen	100,00	n/a	99,50	100,00	67,35	67,35	Belum tercapai	67,35	67,35	Belum tercapai
6	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Krapyak)	Persen	100,00	n/a	99,53	100,00	60,22	60,22	Belum tercapai	60,22	60,22	Belum tercapai
7	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Padukuhan Kraton)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	57,88	57,88	Belum tercapai	57,88	57,88	Belum tercapai
8	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Panjang Baru)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	57,37	57,37	Belum tercapai	57,37	57,37	Belum tercapai
9	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
10	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Jenggot)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	59,09	59,09	Belum tercapai	59,09	59,09	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Buaran Kradenan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	53,56	53,56	Belum tercapai	53,56	53,56	Belum tercapai
12	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kuripan Kertoharjo)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	53,13	53,13	Belum tercapai	53,13	53,13	Belum tercapai
13	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kuripan Yosorejo)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	63,39	63,39	Belum tercapai	63,39	63,39	Belum tercapai
14	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Sokoduwet)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	67,01	67,01	Belum tercapai	67,01	67,01	Belum tercapai
15	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Banyurip)	Persen	100,00	n/a	92,31	100,00	51,31	51,31	Belum tercapai	51,31	51,31	Belum tercapai
16	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	100,30	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
17	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Medono)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	62,21	62,21	Belum tercapai	62,21	62,21	Belum tercapai
18	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Podosugih)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	71,74	71,74	Belum tercapai	71,74	71,74	Belum tercapai
19	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Tirto)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,21	66,21	Belum tercapai	66,21	66,21	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Sapuro Kebulen)	Persen	100,00	n/a	102,27	100,00	62,08	62,08	Belum tercapai	62,08	62,08	Belum tercapai
21	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Bendan Kergon)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	79,04	79,04	Belum tercapai	79,04	79,04	Belum tercapai
22	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Pasirkratonkramat)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	62,96	62,96	Belum tercapai	62,96	62,96	Belum tercapai
23	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Pringrejo)	Persen	100,00	n/a	97,92	100,00	57,75	57,75	Belum tercapai	57,75	57,75	Belum tercapai
24	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
25	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kauman)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,27	66,27	Belum tercapai	66,27	66,27	Belum tercapai
26	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Poncol)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	67,62	67,62	Belum tercapai	67,62	67,62	Belum tercapai
27	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Klego)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	57,57	57,57	Belum tercapai	57,57	57,57	Belum tercapai
28	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Gamer)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,94	66,94	Belum tercapai	66,94	66,94	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Noyontaansari)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	63,15	63,15	Belum tercapai	63,15	63,15	Belum tercapai
30	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Setono)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	60,45	60,45	Belum tercapai	60,45	60,45	Belum tercapai
31	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kalibaros)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	69,95	69,95	Belum tercapai	69,95	69,95	Belum tercapai
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum												
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
3	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum												
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kesatuan Bangsa dan Politik												
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan												
1	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	68,00	68,00	Belum tercapai	68,00	68,00	Belum tercapai
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik												
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16,00	n/a	16,00	16,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Persen	100,00	n/a	95,65	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya												
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial												
1	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

1. Indikator Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik belum tercapai dikarenakan kegiatan sosialisasi pertanggungjawaban hibah parpol rencana baru akan dilaksanakan di bulan Oktober, sedangkan untuk kegiatan Pendidikan politik di 30 sekolah akan dilaksanakan di triwulan III dan IV
2. Indikator persentase penanganan konflik sosial belum tercapai, karena pada kurun waktu januari sampai dengan juni 2023 tidak terjadi konflik sosial.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.3.9. Non Urusan

1. Non Urusan

Tabel 2.41 Capaian Indikator Non Urusan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Non Urusan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi (Bag. Organisasi Setda)	Persen	100,00	n/a	101,61	100,00	84,26	84,26	Belum tercapai	84,26	84,26	Belum tercapai
2	Persentase pelayanan keprotokoleran (Bag. Prokompim Setda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	39,29	39,29	Belum tercapai	39,29	39,29	Belum tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	87,52	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100,00	n/a	99,56	100,00	42,48	42,48	Belum tercapai	42,48	42,48	Belum tercapai
4.1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,11	42,11	Belum tercapai	42,11	42,11	Belum tercapai
4.2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.3	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	24,95	24,95	Belum tercapai	24,95	24,95	Belum tercapai
4.5	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BPBD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	40,78	40,78	Belum tercapai	40,78	40,78	Belum tercapai
4.6	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,45	42,45	Belum tercapai	42,45	42,45	Belum tercapai
4.7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	43,28	43,28	Belum tercapai	43,28	43,28	Belum tercapai
4.8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.9	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	40,78	40,78	Belum tercapai	40,78	40,78	Belum tercapai
4.10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.11	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	44,95	44,95	Belum tercapai	44,95	44,95	Belum tercapai
4.12	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinparbudpora)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	25,00	25,00	Belum tercapai	25,00	25,00	Belum tercapai
4.13	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,82	41,82	Belum tercapai	41,82	41,82	Belum tercapai
4.14	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	94,17	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.15	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	98,67	100,00	41,19	41,19	Belum tercapai	41,19	41,19	Belum tercapai
4.16	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	43,28	43,28	Belum tercapai	43,28	43,28	Belum tercapai
4.17	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DKP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	47,03	47,03	Belum tercapai	47,03	47,03	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.18	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DLH)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,61	41,61	Belum tercapai	41,61	41,61	Belum tercapai
4.19	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.20	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPMPTSP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,19	41,19	Belum tercapai	41,19	41,19	Belum tercapai
4.21	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.22	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	93,34	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.23	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,10	42,10	Belum tercapai	42,10	42,10	Belum tercapai
4.24	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,86	42,86	Belum tercapai	42,86	42,86	Belum tercapai
4.25	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,71	42,71	Belum tercapai	42,71	42,71	Belum tercapai
4.26	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,71	42,71	Belum tercapai	42,71	42,71	Belum tercapai
4.27	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	43,28	43,28	Belum tercapai	43,28	43,28	Belum tercapai
4.28	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindik)	Persen	100,00	n/a	100,60	100,00	39,53	39,53	Belum tercapai	39,53	39,53	Belum tercapai
4.29	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	40,78	40,78	Belum tercapai	40,78	40,78	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.30	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,61	41,61	Belum tercapai	41,61	41,61	Belum tercapai
4.31	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (RSUD Bendan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	82,64	82,64	Belum tercapai	82,64	82,64	Belum tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	n/a	93,17	100,00	40,18	40,18	Belum tercapai	40,18	40,18	Belum tercapai
5.1	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	84,71	100,00	43,50	43,50	Belum tercapai	43,50	43,50	Belum tercapai
5.2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	102,73	100,00	34,80	34,80	Belum tercapai	34,80	34,80	Belum tercapai
5.3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	102,76	100,00	37,90	37,90	Belum tercapai	37,90	37,90	Belum tercapai
5.4	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	105,35	100,00	34,74	34,74	Belum tercapai	34,74	34,74	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	Persen	100,00	n/a	77,78	100,00	35,12	35,12	Belum tercapai	35,12	35,12	Belum tercapai
5.6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	66,08	100,00	33,02	33,02	Belum tercapai	33,02	33,02	Belum tercapai
5.7	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	105,97	100,00	34,56	34,56	Belum tercapai	34,56	34,56	Belum tercapai
5.8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	89,33	100,00	51,81	51,81	Belum tercapai	51,81	51,81	Belum tercapai
5.9	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	100,35	100,00	32,65	32,65	Belum tercapai	32,65	32,65	Belum tercapai
5.10	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	32,95	32,95	Belum tercapai	32,95	32,95	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	91,56	100,00	43,90	43,90	Belum tercapai	43,90	43,90	Belum tercapai
5.12	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinparbudpora)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	48,69	48,69	Belum tercapai	48,69	48,69	Belum tercapai
5.13	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	102,97	100,00	34,75	34,75	Belum tercapai	34,75	34,75	Belum tercapai
5.14	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	70,40	100,00	34,20	34,20	Belum tercapai	34,20	34,20	Belum tercapai
5.15	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	64,67	100,00	34,31	34,31	Belum tercapai	34,31	34,31	Belum tercapai
5.16	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	98,67	100,00	33,55	33,55	Belum tercapai	33,55	33,55	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.17	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DKP)	Persen	100,00	n/a	102,83	100,00	31,95	31,95	Belum tercapai	31,95	31,95	Belum tercapai
5.18	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DLH)	Persen	100,00	n/a	105,88	100,00	55,05	55,05	Belum tercapai	55,05	55,05	Belum tercapai
5.19	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	101,82	100,00	39,14	39,14	Belum tercapai	39,14	39,14	Belum tercapai
5.20	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPMPTSP)	Persen	100,00	n/a	98,96	100,00	36,33	36,33	Belum tercapai	36,33	36,33	Belum tercapai
5.21	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	100,56	100,00	31,91	31,91	Belum tercapai	31,91	31,91	Belum tercapai
5.22	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	99,33	100,00	43,57	43,57	Belum tercapai	43,57	43,57	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.23	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	66,96	100,00	32,78	32,78	Belum tercapai	32,78	32,78	Belum tercapai
5.24	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,63	33,63	Belum tercapai	33,63	33,63	Belum tercapai
5.25	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	91,58	100,00	34,28	34,28	Belum tercapai	34,28	34,28	Belum tercapai
5.26	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	100,20	100,00	31,53	31,53	Belum tercapai	31,53	31,53	Belum tercapai
5.27	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	101,68	100,00	32,83	32,83	Belum tercapai	32,83	32,83	Belum tercapai
5.28	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindik)	Persen	100,00	n/a	100,60	100,00	34,42	34,42	Belum tercapai	34,42	34,42	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.29	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	83,84	100,00	53,38	53,38	Belum tercapai	53,38	53,38	Belum tercapai
5.30	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	77,46	100,00	34,26	34,26	Belum tercapai	34,26	34,26	Belum tercapai
5.31	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (RSUD Bendan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	120,00	120,00	Tercapai	120,00	120,00	Tercapai
6	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100,00	n/a	102,50	100,00	47,31	47,31	Belum tercapai	47,31	47,31	Belum tercapai
6.1	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.2	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.3	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	77,09	77,09	Belum tercapai	77,09	77,09	Belum tercapai
6.4	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	95,84	100,00	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.5	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BPBD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.6	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.7	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	135,19	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.8	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	55,56	55,56	Belum tercapai	55,56	55,56	Belum tercapai
6.9	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	44,45	44,45	Belum tercapai	44,45	44,45	Belum tercapai
6.10	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,67	41,67	Belum tercapai	41,67	41,67	Belum tercapai
6.11	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	77,78	77,78	Belum tercapai	77,78	77,78	Belum tercapai
6.12	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinprabudpora)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai
6.13	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	108,34	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.14	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	100,26	100,00	33,33	33,33	Belum tercapai	33,33	33,33	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.15	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	96,08	100,00	25,01	25,01	Belum tercapai	25,01	25,01	Belum tercapai
6.16	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.17	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DKP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.18	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DLH)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	62,50	62,50	Belum tercapai	62,50	62,50	Belum tercapai
6.19	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.20	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPMPTSP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.21	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	125,00	100,00	35,63	35,63	Belum tercapai	35,63	35,63	Belum tercapai
6.22	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	99,44	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.23	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	102,08	100,00	41,67	41,67	Belum tercapai	41,67	41,67	Belum tercapai
6.24	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.25	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.26	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	97,20	100,00	41,11	41,11	Belum tercapai	41,11	41,11	Belum tercapai
6.27	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai
6.28	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindik)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.29	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.30	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	102,10	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7	Persentase ketersediaan layanan BLUD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.1	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Puks. Bendan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.2	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Buaran)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.3	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Dukuh)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.4	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Jenggot)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.5	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Klego)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.6	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Kramatsari)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.7	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Krapyak Kidul)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.8	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Kusuma Bangsa)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.9	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Medono)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.10	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Noyontaan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.11	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.12	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Sokorejo)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.13	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Tirto)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.14	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Tondano)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.15	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Dinkes)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.16	Persentase ketersediaan layanan BLUD (RSUD Bendan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.17	Persentase ketersediaan layanan BLUD (BPSJ)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pmenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyaakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negera yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
   - miskin atau tidak mampu;
   - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
   - kondisi bencana; dan/atau
   - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
   - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negera secara minimal, dengan memperioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
   - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2022 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2022.

2.2.4.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pada tahun 2022 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 90,94% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 86,04%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 94,96%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 91,82%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.228 berikut.

Tabel 2.42 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	Proses update pada aplikasi Dapodik sekolah dilaksanakan di awal waktu sehingga terhindar dari permasalahan system akibat over kapasitas pengakses aplikasi menjelang *cut off*
	Beberapa indikator data capaian belum dapat terisi dikarenakan terkendala pada rapor pendidikan yang isiannya belum lengkap dan belum mencantumkan nilai capaian pada tahun N (tahun pelaporan)	Selalu mengikuti update infromasi seputar releaserapor Pendidikan dari Kemendikbud.
	Kota Pekalongan tidak termasuk sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga indikator "Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal" tidak dapat terisi	-
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Mneingkatkan koordinasi dengan tim verifikator dari sekolah terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi siswa miskin sehingga dapat berjalan dengan lancer dan selesai tepat waktu.
	Indikator "Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tidak dapat terisi dengan lengkap, dikarenakan alokasi anggaran berada di OPD lain	Koordinasi dengan OPD terkait (BKPSDM, Bappeda, BPKAD)
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Pengurangan target indikator SPM disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia	Alokasi anggaran yang tersedia lebih diprioritaskan untuk pencapaian / pemenuhan SPM
	Pemetaan sub kegiatan penunjang pencapaian SPM di DPA Dinas Pendidikan belum sesuai dengan Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023	Melakukan mapping sub kegiatan tahun 2022 beserta indikatornya disesuaikan dengan Permendagri No.84 Tahun 2022.
4.	**Pelaksanaan**	
	Jumlah calon penerima bantuan yang lebih banyak dibandingkan jumlah anggaran yang tersedia, sehingga tidak semua siswa miskin dapat menerima bantuan	Calon penerima bantuan lebih diprioritaskan bagi siswa miskin yang belum mendapatkan bantuan dari sumber yang lain seperti PIP dan PKH.
5,	**Lain-lain**	
	Masih terdapat beberapa indikator sub kegiatan ataupun target satuan SPM yang kurang dapat dipahami	Melakukan konsultasi kepada Tim pengelola SPM tingkat Pusat sehingga diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

Pada tahun 2022 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 93,14% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,68%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,50%;
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 96,66%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 81,10%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 89,45%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 53,31%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetis melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguam jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.229 berikut.

Tabel 2.43 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1.	Internal	Sarana dan prasarana untuk pemriksaan usia lanjut belum tersedia	Akan dilakukan perencanaan untuk pengadaan sarpras tersebut
2.	Eksternal	Rumus perhitungan sasaran untuk penderita hipertensi menurut permenkes 4 tahun 2019 terlalu tinggi	Untuk sasaran sebaiknya menggunakan data rill yang di temukan di Kota Pekalongan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ajenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2022 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.230 berikut.

Tabel 2.44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke identitas pribadi yang menurut wali data dari kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data pribadi	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengka dan andal
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	
	Penghitungan kebutuhan masih memerlukan koordinasi dengan OPD terkait	Rapat koordinasi denganpihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengka dan andal
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM.	Komunikasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk menjadi CSR
4.	**Pelaksanaan**	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALD-T dan SPALD-S	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
	lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan pemerintah kota	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.231 berikut.

Tabel 2.45 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Data TW 1 Belum ada	Belum ada kegiatan pelaksanaan SPM
	Pengumpulan Data masih tergantung dari Data OPD Lain	Melakukan kerjasama dan memuat satgas bersama tentang kebencanaan
	Kota Pekalongan tidak mempunyai lahan yang potensial untuk relokasi korban bencana/program pemerintah	Menempatkan korban bencana pada hunian sementara di rumah susun dan berkoordinasi dengan BPN atas tanah yang bisa dijadikan lahan perumahan
	Pembuatan site plan berada di DPUPR sedangkan dokumen bencan belum diterbitkan, sehingga bisa terajdi perumahn termasuk dalam daerah rawan bencana. sudah terverifikasi.	Syarat syarat pembangunan perumahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
	Data base /data sumber kegiatan kebencanaan belum terbuat sehingga penentuan lokasi kebencanaan belum bisa di buat	Pembuatan dokumen kebencanaan tahun 2023 serta penganggarannya
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Penghitungan Kebutuhan Masih global	Akan dibuatkan dokumen kebencanaan tahun 2023
	Belum menghitung kebutuhan	Akan dibuatkan dokumen kebencanaan tahun 2023
	Jenis kebencanaan yang ada di Kota Pekalongan berupa Banjir Rob dan tidak termasuk dalam Jenis Kebencanaan	Akan kita konsultaiskan ke Perkim provinsi sebagai bahan diskusi dan aturan yang lebih detail
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	

No.	Permasalahan	Solusi
	Perencanaan Anggaran masih belum maksimal	Perencanaan akan kita sesuaiakan dengan dokumenkebencanaan
	Perencanaan dan Penganggaran belum dapat berjalan dengan maksimal	Perencanaan akan dibuat berdasarkan prioritas kebencanaan
4.	**PELAKSANAAN**	
	Pelaksanaan Belum optimal	Akan dilaksanakan bersama oleh satgas
	Pelaksanaan masih menggunakan data dari Bansos dan BPBD	Akan dibuat dokumen perencaaan tersendiri
	Peraturan kebencanaan secara nasional tidak memfasilitasi kebencanaan lokal seperti banjir ROB	Perlunya aturan khusus mengenai kebencanaan lokal seperti banjir rob
5.	**LAIN – LAIN**	
	Sumber daya manusia masih kurang jumlah untuk pelaksanaannya	Akan merekruit Tenaga fasilitator lapangan
	SDM yang masih kurang	Akan merekruit Tenaga fasilitator lapangan
	Kurangnya Peningkatan kompetensi SDM/personil	Perlunya penambahan tenaga fasilitator pendamping yang berkompetensi

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Urusan Ketertiban Umum dengan capaian 100%
2. Sub Urusan Bencana dengan capaian 100%
3. Sub Urusan Kebakaran dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.232 berikut.

Tabel 2.46 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Belum adanya dokumen KRB sehingga pengumpulan data yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	Melakukan penyusunan dokumen KRB pada tahun 2023 dan menggunakan data historis kebencanaan untuk melakukan pengumpulan data.
	Berdasarkan UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri 57 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data penduduk by name by adrress merupakan merupakan aset informasi yang dijamin kerahasiaan dan keutuhannya, sehingga dalam pemenuhan data tersebut belum dapat dipenuhi.	Memberikan data kependudukan secara agregat dalam pelaporan dan melakukan pendataan langsung di wilayah terdampak bencana apabila memungkinkan.
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Belum memiliki dokumen KRB yang sah dan legal sehingga belum bisa melakukan penghitungan secara rinci	Melakukan penyusunan dokumen KRB di tahun 2023, namun untuk sementara penghitungan kebutuhan dilakukan dengan mengandalkan data historis kebencanaan
	Ketersediaan data yang terbatas,sehingga perhitungan kebutuhan tidak dapat dilakukan secara rinci	Dilakukan pendataan secara lebih terinci
	Pemetaan kebencanaan sudah dilakukan, namun dokumen KRB masih dalam proses penyusunan.	Pemetaan kebencanaan yang sudah dilakukan dimasukkan kedalam dokumen KRB untuk memperkuat analisis dan penghitungan kebutuhan penanganan bencana.
	Terkait penyediaan Alat untuk layanan response time pada tahun 2022 sudah tersedia dan kondisi baik. terkait sarana pusdalops damkar di Kota Pekalongan sudah ada fasilitas berupa command center kegawatdaruratan di nomor 112.	Perlunya dibentuk pusdalops untuk mengatur koordinasi serta respon cepat terhadap laporan yang diterima.
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Perlunya penganggaran tambahan untuk peralatan pendukung bencana, Dokumen KRB, RPB, Rencana Kontijensi (untuk mendukung perencanaan kegiatan, penghitunga kebutuhan, resiko, dan Daya dukung wialyah dan masyarakat), dan JITUPASNA (untuk penghitungan kebutuhan rekonstruksi pasca bencana).	Akan dilakukan penyusunan dokumen KRB, JITUPASNA pada tahun 2023 dan merencanakan penyusunan Dokumen RPB pada tahun 2024.
	Pada tahun 2022 kegiatan untuk penggantian ganti rugi bagi warga yang terdampak akibat penegakan PERDA dibiayai dari alokasi anggaran belanja tidak terduga.	Adanya anggaran belanja khusus bagi warga yang terdampak Penegakan Perda sehingga ganti rugi yang diberikan dapat tersalurkan secara efektif.

No.	Permasalahan	Solusi
	Jumlah anggaran yang dianggarkan tidak sebanding dengan frekuensi kejadian bencana dan luasan dampak bencana namun pembiayaan anggaran tersebut dapat tercukupi dari sumber pendanaan yang lain seperti CSR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Partisipasi Masyarakat, dll	Melakukan optimalisasi fungsi pentahelix pada saat penanganan bencana agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
4.	**PELAKSANAAN**	
	Terbatasnya jumlah perlatan pendukung kebencanaan sehingga penanganan kebencanaan tidak dapat dilakukan dengan optimal	Berkoordinasi dengan instansi terkait agar dapat digunakan untuk melakukan penanganan bencana.
	Kejadian kebencanaan yang meluas sehingga dibutuhkan pemetaan ulang secara detail	Melakukan pembaruan pemetaan kebencanaan sekaligus Menyusun dokumen KRB di tahun 2023
	Perlunya peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda.	Diselenggarakannya Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda
	Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di bidang kebencanaan sehingga pelaksanaan perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	Memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada personil penanganan kebencanaan untuk meningkatkan jumlah SDM yang berkompeten.
	Pada tahun 2022 tidak terjadi kondisi tanggap darurat bencana	-
5.	**LAIN – LAIN**	
	Frekuensi dan luasan area terdampak bencana semakin meluas	Pengkajian dan pemetaan ulang mengenai luasan wilayah yang terdampak bencana dan yang berpoten terdampak bencana di kemudian hari.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.2.4.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.233 berikut.

Tabel 2.47 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dnegan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
2.	**PELAKSANAAN**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

2.1.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2022

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.2.4.1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 30 target dan 106 indikator. Pada tahun 2022 terdapat 34 indikator yang telah tercapai, 13 indikator tidak tercapai dan sebanyak 15 indikator yang datanya tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN								
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	persen	6,71	7,00	Tidak Tercapai
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	DINKES	persen	95,00	86,35	Tidak Tercapai
1.3.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPERINAKER	persen	PM	0,7974	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	0,19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	11354	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100	97,41	Tidak Tercapai
1.4.1. (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB	persen	67,45	95,00768665	Tercapai
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	DINPERKIM	persen	100	100	Tercapai
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	DINPERKIM	persen	100	100	Tercapai
1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	DINPERKIM	persen	NA	11,78	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	DINDIK	persen	PM	99,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	DINDIK	persen	PM	75,97	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	BPS	persen	PM	55,28	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINDUKCAPIL	persen	93,1	98,52	Tercapai
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan	BPS	persen	NA	99,94	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	listrik baik dari PLN dan bukan PLN	dan bukan PLN	utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN					
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	PM	8,55	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD		0	NA	Data tidak tersedia
1.5.1. (b)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	DINSOS P2KB		0	NA	Data tidak tersedia
1.5.1. (c)	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	DINSOS P2KB/DPMPPA		834	834	Tercapai
1.5.1. (d)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	BPBD		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD	%	PM	0,703703704	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	309.891.396.400	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	BPBD	Dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
1.a.1*	Proporsi sumber	Proporsi sumber	Proporsi sumber	BAPPEDA,		78,1	78,2	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BPKAD				
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA, BPKAD		PM	6,101126029	Tidak ada target, tetapi data tersedia
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen)*	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	DINPERPA	skor	78,1	78,2	Tercapai
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES		PM	6,101126029	Tidak ada target, tetapi data tersedia
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DINPERPA	persen	100	100	Tercapai
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINKES	persen	2,1	2,05	Tidak tercapai
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	DINKES	persen	< 12%	6,8	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pada anak di bawah lima tahun/balita					
2.2.1. (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINKES	persen	PM	5,61	Tidak ada target, tetapi data tersedia
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	DINKES	persen	<0,5	0,28	Tercapai
2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	0	10,06	Tidak tercapai
2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	DINKES	persen	0	60	Tercapai
2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	80,05	81,2	Tercapai
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.								
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS		NA	NA	Data tidak tersedia
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA								
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Per 100.000 KH	128,28	124.87	Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kesehatan terlatih					
3.1.2. (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	10,23	12,21	Tidak Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	0,00	1,77	Tidak tercapai
3.2.2. (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	8,21	9,91	Tidak tercapai
3.2.2. (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV-AIDS	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	orang	PM	0,84	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah Insiden TB	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	kasus	PM	109,12	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.3. (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	DINKES	per 1.000 penduduk beresiko	PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.4. (a)	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	DINKES	kasus	PM	70	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang	Angka penemuan kasus baru kusta	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap	DINKES	per 100.000 penduduk	<10	1,36	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)		Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)					
3.3.5. (a)			Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.5. (b)	Jumlah kab/kota dengan eliminasi filarissis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	per 100.000 penduduk	<1	0	Tercapai
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	DINKES	persen	100	47,29	Tidak tercapai
3.4.1. (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	DINKES	persen	NA	NA	Data tidak tersedia
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	POLRES		0	0	Tercapai
3.4.2. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINKES		100	100	Tercapai
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1. (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	KESBANGPOL	orang	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBANGPOL	orang	PM	6	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (c)	Jumlah korban penyalahgunaan	Jumlah korban penyalahgunaan	Jumlah korban penyalahgunaan	KESBANGPOL	orang	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan					
3.5.1. (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	KESBANGPOL	Rumah sakit	PM	2	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN/ Kesbangpol		-	-	Data tidak tersedia
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BPS		0	NA	Data tidak tersedia
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINSOS P2KB		PM	69,17	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.7.1. (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB		67,45	64,27270002	Tidak Tercapai
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DINSOS P2KB		20	12,15	Tidak tercapai
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age	DINSOS P2KB		9,22	8,21	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Fertility Rate/ASFR)	Fertility Rate/ASFR)	Specific Fertility Rate/ASFR)					
3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	2,16	2,18	Tercapai
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1(a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	BPS	persen	NA	NA	Data tidak tersedia
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES		PM	99,45	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES	persen	95	88,32	Tidak tercapai
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3. (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Proporsi kematian akibat keracunan.	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	persen	PM	0,24	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES/BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES	persen	PM	9,18	Tidak ada target, tetapi data tersedia
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT								
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINDIK		NA	NA	Data tidak tersedia
4.1.1.	Persentase SD/MI	Persentase SD/MI	Persentase	DINDIK	persen	PM	97,96	Tidak ada target,

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a)	berakreditasi minimal B	berakreditasi minimal B	SD/MI berakreditasi A (2020) **2021: Persentase SD/MI berakreditasi B**					tetapi data tersedia
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi B	DINDIK	persen	0	95	Tercapai
4.1.1. (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	DINDIK/CABANG DINAS 13 KENDAL		NA	100	Tercapai
4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	DINDIK	persen	0	99,8	Tercapai
4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	DINDIK	persen	0	100,23	Tercapai
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	persen	PM	74,59	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIK		0	9,2	Tercapai
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	PM	62,8	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1. (a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	BPS	persen	PM	74,59	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.3.1. (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen	PM	NA	Data tidak tersedia
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi	DINKOMINFO	persen	0	NA	Data tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan komunikasi (TIK).	(TIK).	informasi dan komunikasi (TIK).					
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	1) APM SD/MI/sederajat 2) APM SMP/MTs/Sederajat (2018-2020) **2021:** Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	DINDIK		PM PM	(1) 0,961 (2) 1,036	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	97,74	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	BPS	persen	PM	100	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	% Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	Persentase Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan	DINDIK	persen	PM	94,79	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/SMK bersertifikat pendidik	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	PM	53,16	Tercapai
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN								
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPPA		PM	5	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	8/110.146*100= 0.007263	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	1/12.134*100 = 0.008241	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPMPPA		0	0	Tercapai
5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	DPMPPA	persen	100	100	Tercapai
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	Kasus	31	33	Tidak Tercapai
5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BPS/DINSOS P2KB		0	NA	Data tidak tersedia
5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINSOS P2KB		9,22	8,21	Tercapai
5.3.1. (c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	11,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	BKPSDM	Persen	PM	56,51	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.								
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DINSOS P2KB		PM	64,27	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang	Unmet need KB	DINSOS P2KB	persen	0	13	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	terpenuhi)	tidak terpenuhi).						
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINSOS P2KB		PM	NA	Tidak ada target, dan data tidak tersedia
5.b.1*			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	orang	NA	NA	Data tidak tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 *goals* 54 target dan 72 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 18 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA								
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	PLN	persen	100	100	Tercapai
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	PLN-ESDM-BPS	Kwh/ Kapita	0	NA	Data Tidak tersedia
7.1.2. (a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
7.1.2. (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.								
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer.	BPS, BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak tersedia
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan	BPS, BAPPEDA	persen	0	5,76	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			PDRB					
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	0	40,68	Tercapai
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen	0	NA	Data Tidak tersedia
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasukmelalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persentase Tenaga kerja formal	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (c)	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	0	NA	Data Tidak tersedia
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	PM	4,98	Tidak ada target, tetapi data tersedia
8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengguran	Tingkat setengah pengguran	Tingkat setengah pengguran	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	DINPERINAKER/BPS	orang	PM	504	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Dinparbudpora		0	16,68	Tercapai
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	600	72	Tidak Tercapai
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	565.000	984.518	Tercapai
8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinparbudpora		0	13,3	Tercapai
8.9.2*			Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinparbudpora		PM	1,161176046	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.10.1. (b)			Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINDAGKOP UKM		0	0	Data Tidak tersedia
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI								
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU PR	%	82,21	84,28	Tercapai
9.1.1. (b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang pembangunan jalan tol.	DPU PR		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.1.1. (c)	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api.	DPU PR		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.1.2. (b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	DINHUB		0,00	NA	Data Tidak tersedia
9.1.2. (c)	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan	DINHUB		0,00	NA	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			strategis					
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industry dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen	PM	4,26	Tidak ada target, tetapi data tersedia
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen	PM	4,46	Tidak ada target, tetapi data tersedia
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS		PM	NA	Data Tidak tersedia
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	DLH		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.4.1. (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	DLH		NA	NA	Data Tidak tersedia
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BAPPEDA, BPS		PM	6,9	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DINKOMINFO	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia
9.C.1.	Proporsi individu	Proporsi individu	Proporsi	BPS	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a)	yang menggunakan telepon genggam	yang menggunakan telepon genggam	individu yang menggunakan telepon genggam					
9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	DINKOMINFO/BPS	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1*	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS, BAPPEDA	-	0	0,337	Tidak tercapai
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS, BAPPEDA	persen	6,71	7,00	Tidak Tercapai
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	DPMPPA		0	NA	Data Tidak tersedia
10.2.1*			Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	DINSOS P2KB		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	DPMPPA/POLRES		PM	61 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	53 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.3.1. (d)			Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	BAGIAN HUKUM		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DINPERINAKER		PM	79,9	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik								
10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	DINPERINAKER	kegiatan	PM	50 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.								
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPKAD, BPS		984.981.114.000	989.013.074.926	Tercapai
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPKAD		94.600.000.000	101.303.223.640	Tercapai
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD		NA	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS/DINKOMINFO		0	NA	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.6.2. (c)	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	DINKOMINFO		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	DINKOMINFO/BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi Negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020								
17.11.1. (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS		NA	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama								
17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	BAPPEDA		NA	NA	Data Tidak tersedia
17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA		NA	NA	Data Tidak tersedia
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional								
17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen	0	NA	Data Tidak tersedia
17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS		0	75	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.18.1. (c)			Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS		0	19	Tercapai
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	BPS	indikator	0	NA	Data Tidak tersedia
17.19.2. (b)			Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DINDUKCAPIL		0	0	Tercapai
17.19.2. (c)			Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS		19.600	36.331	Tercapai
17.19.2. (d)			Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS		0	97,22	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 6 *goals* 29 target dan 64 indikator. Terdapat 25 indaktor yang telah tercapai, 25 data tidak tersedia, 8 indikator provinsi serta 3 indikator nasional sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	Persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	layak							
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DINPERKIM	m3	PM	12.196.014	Tidak ada target, tetapi data tersedia
6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINKES		0	100	Tercapai
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1. (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINKES		0	NA	Data tidak tersedia
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DINPERKIM	Persen	100	100	Tercapai
6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINPERKIM	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia
6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DLH		0	0	Tercapai
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1. (a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		PM	1	Tidak ada target, tetapi data tersedia
6.3.1. (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH		0,3	0,3	Tercapai
6.3.2. (a)	Kualitas air danau.	Kualitas air danau.	Kualitas air danau.	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1. (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH	Perusahaan	40	42	Tercapai
6.4.1. (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DLH/DINPERPA		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (C)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang	Jumlah jaringan informasi sumber daya air	BAPPEDA PSDAIW,		0	NA	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dibentuk	dibentuk	yang dibentuk	DPU-PR				
6.5.1. (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.6.1. (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memilki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	93,122	97,470	Tercapai
11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.1.1. (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DINHUB		PM	425,01	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.2.1. (b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Indikator Nasional
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1. (a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.1. (b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.2. (a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan	Jumlah lembaga pembiayaan	Jumlah lembaga	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	infrastruktur.	infrastruktur.	pembiayaan infrastruktur.					
Taregt 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	PM	26.469	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD		PM	NA	Tidak ada target dan data tidak tersedia
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD		PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD		2	2	Tercapai
11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD		PM	309.891.396.400	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	71,48	92,72	Tercapai
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	24	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	2,909	2,900	Tidak tercapai
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.								
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD		PM	NA	Data Tidak Tersedia
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN								
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1. (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah	PM	1	Tidak ada target, tetapi data tersedia
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton/tahun	PM	304,27	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	17,23	18,93	Tercapai
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Targer 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.								
12.7.1. (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar	BAGIAN ORGANISASI	OPD	15	31	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Masyarakat (SPM) dan teregister.	Masyarakat (SPM) dan teregister.	Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.					
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	PM	26.469	Tidak ada target, tetapi data tersedia
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1. (a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH		3 lokasi	3 lokasi	Tercapai
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN								
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1*	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)								
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DINDAGKOP UKM		0	0	Data Tidak Tersedia
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP		240	240	Tercapai
TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN								
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		108,86 Ha	108,17 Ha	Tidak tercapai
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
15.2.1.	Luas usaha pemanfaatan	Luas usaha pemanfaatan	Luas usaha pemanfaatan	DLH		NA	NA	Data Tidak

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(b)	hasil hutan kayu restorasi ekosistem	hasil hutan kayu restorasi ekosistem	hasil hutan kayu restorasi ekosistem					Tersedia
15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.								
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2.4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 *goals* 8 target dan 32 indikator. Terdapat 13 indikator yang tercapai, 2 indikator yang tidak tercapai serta 17 indikator yang datanya tidak tersedia sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 16: PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun								
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES		0	0	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	POLRES		0	0	Tercapai
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DPMPPA	Anak	0	0	Tercapai
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DPMPPA		0	0	Tercapai
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	6	6	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.3.1. (c)	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD		100% APBD: Rp.1.090.187.786.000,- Realisasi : Rp.1.090.187.786.000,-	94,58% APBD: Rp.1.090.187.786.000,- Realisasi: Rp.1.031.090.188.444,02	Tidak Tercapai
16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	Persen	100	100	Tercapai
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	BB	BB	Tercapai
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	%	100	80	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	71.69 (BB)	(BB)	Tercapai
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	BAGIAN ORGANISASI	Indeks (Zona Merah/ Kuning/ Hijau)	Zona Hijau	94.62 (Zona Hijau)	Tercapai
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	PM	11,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II	BKPSDM	Persen	PM	10,71	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1.*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKCAPIL	persen	PM	99,91	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	DINDUKCAPIL DAN DINSOS		PM	35,50	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Persen	93,10	98,52	Tercapai
Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.10.1. (a)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
16.10.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	53 pengaduan	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.10.2 *	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMINFO	Persen	100	107	Tercapai
16.10.2. (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMINFO	Persen	50	50	Tercapai
16.10.2. (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.239 berikut.

Tabel 2.52 Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
AKABA (Angka Kematian Balita)	Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat
AKB (Angka Kematian Bayi)	
AKI (Angka Kematian Ibu)	
Indeks Keluarga Sehat	
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya angka kemiskinan
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Kategori Kota Layak Anak	
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Luas Genangan Banjir dan Rob	Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Lahan	
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Persentase pelayanan sampah	
Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	
Persentase keterhubungan jalan	
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota	
Nilai KIP Tingkat Kota	
Nilai SAKIP Kota	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	
Indeks Merit System	
Maturitas SPIP	
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.240 berikut.

Tabel 2.53 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Belum optimalnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Belum optimalnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat
	Belum optimalnya Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek
	Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar
	Belum optimalnya Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran
	Belum optimalnya Rumah Tangga Sehat
	Belum optimalnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar
	Belum optimalnya Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum optimalnya tingkat Kemantapan Jalan kota
	Belum optimalnya Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kota
	Belum optimalnya drainase dalam kondisi baik
	Belum optimalnya Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik
	Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK *Outcome*)
	Belum optimalnya Rasio Persetujuan Bangunan Gedung
	Belum optimalnya Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya Penetapan Rencana Tata Ruang kota
	Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Belum optimalnya Ketersediaan Sarana Persampahan Regional
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum optimalnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga
	Belum optimalnya Luas kawasan permukiman kumuh
	Belum optimalnya Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	Belum optimalnya penanganan kumuh
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM
	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Masih tingginya angka kemiskinan
	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
	Belum optimalnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
	Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Belum optimalnya Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota
	Belum optimalnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum optimalnya kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB
	Belum optimalnya Dekela (desa/kelurahan layak anak)
	Belum optimalnya anak korban kekerasan yang ditangani (IKK *Outcome*)
	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Belum optimalnya Skor pola pangan harapan ketersediaan
	Belum optimalnya implementasi kelurahan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya penerapan pangan segar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya pembebasan bidang tanah untuk pembangunan insfrastruktur kota
	Belum optimalnya pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
	Koordinasi dalam proses pensertifikatan tanah masih perlu ditingkatkan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya jumlah limbah yang diolah
	Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau
	Belum optimalnya pengelolaan sampah

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
	Belum optimalnya perolehan penghargaan bidang LH
	Belum optimalnya persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan
	Belum optimalnya pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti
	Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Belum optimalnya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belum optimalnya ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan
	Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang)
	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)
	Belum optimalnya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun
	Belum optimalnya penurunan angka Unmeet need KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya ketersediaan fasilitas LLAJ
	Belum optimalnya Kinerja Lalu lintas kota
	Belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
	Belum optimalnya Rasio konektivitas kota
	Belum optimalnya penyelenggaraan parkir yang berizin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya Pelayanan Informasi Publik
	Belum optimalnya pencapaian Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Belum optimalnya Koperasi yang berkualitas
	Belum optimalnya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat
	Belum optimalnya koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota
	Belum optimalnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota
	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya peningkatan usaha Mikro yang menjadi wira usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Belum optimalnya peningkatan Invetasi baru
	Belum optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan
	Belum optimalnya Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor
	Belum optimalnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya *Event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Belum optimalnya Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pelestarian Cagar Budaya
	Belum optimalnya pengunjung museum batik
	Belum optimalnya pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)
	Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum optimalnya Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Belum optimalnya Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Belum optimalnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan Tangkap bersumber dari TPI
	Belum optimalnya Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan
	Belum optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI
	Belum optimalnya Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Belum optimalnya Produktivitas pertanian per hektar per tahun
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Belum optimalnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Belum optimalnya kenaikan nilai produk peternakan
	Belum optimalnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Belum optimalnya alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
	Belum optimalnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya penyedaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya pelayanan hukum dalam penetapan Perda

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnyakoordinasi kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan
	Belum optimalnya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
	Belum optimalnya Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa
	Belum optimalnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya pembahasan dokumen penganggaran yang tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum optimalnya penyediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
KEUANGAN	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
	Belum optimalnya Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya pengembangan karier PNS
	Belum optimalnya Tingkat Pelaporan Kinerja ASN
	Belum optimalnya Keterisian Jabatan
	Belum optimalnya Keterpenuhan Formasi ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Belum optimalnya PNS berkembang kompetensinya (Latsar)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)
	Belum optimalnya Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya Level Kapabilitas APIP
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
	Belum optimalnya ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Masih adanya konflik sosial
	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Belum optimalnya penanganan konflik ormas
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
	Belum optimalnya pendidikan politik bagi parpol dan lembaga pendidikan
Non Urusan	
Non Urusan	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD
	Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2022

2.3. ISU STRATEGIS

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.241 berikut.

Tabel 2.54 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Selanjutnya, isu strategis dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih *(Good Governance and Clean Government)* adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu: transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 71,4. Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 2,82. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan perkuatan pelayanan

pusat data Pemerintah Daerah; b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022, Kota Pekalongan mendapat nilai 90,44 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat Baik sebesar 62 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 48,88; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 73,31 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun masih perlu ditingkatkan untuk mendaptkan hasil yang optimal; e) Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya *merit system* secara penuh, walaupun dari tahun ketahun terdapat peningkatan nilai dan pada tahun 2022 nilai merit system Kota Pekalongan sebesar 264,5; h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,00; i) Belum optimalnya nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu sebesar 90,01, masih perlu ditingkatkan; dan j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar bertambah.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Beberapa upaya perubahan yang dilakukan yaitu: Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD; Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO; Penataan sistem manajemen SDM aparatur; Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD; Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan peraturan perundang-undangan dan Perubahan Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).

Dalam aspek Pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemnerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bertujuan untuk Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota; Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran

perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2022, luas genangan di Kota Pekalongan seluas 980,13hektar atau 21,11 persen dari luas wilayah kota. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, dimana persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 69,41 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 8-13 cm per tahun; c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 6,89 persen; d)Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa; e) Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga; dan f) Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa

kawasan justeru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun *water storage* guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman.

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi ekploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 54,36, yang walaupun sedikit secara angka mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 54,31. IKLH yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Salah satu komponen dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Kondisi RTH di Kota Pekalongan masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi persyaratan pemenuhan RTH sesuai dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sehingga Pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk pengembangan RTH untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH yang disyaratkan, yaitu 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% untuk RTH public dan 10% untuk RTH privat. Namun upaya ini masih belum dapat dilaksanakan secara kontinyu dan kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air, belum terbangun. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Selain itu penanganan terhadap pengelolaan limbah B3 juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan. Perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, antara lain: Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan

perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Pekalongan tahun 2022 adalah sebesar 66,90 persen, mengalami penurunan dari tahun 2021 (cakupan tahun 2021 sebesar 84,77 persen). Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, dimana pada tahun 2020 sebesar 76,07 persen dan tahun 2021 menurun menjadi 73,75 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2021, jalan kota kondisi mantap sebesar 80,58 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Memasuki era *new normal* dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru, menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2022 VC Ratio menjadi 0,39 menurun disbanding tahun 2021 (VCR tahun 2021 0,49). Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin merata pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio menurun, dimana artinya tidak terdapat kemacetan kendaraan pada ruas jalan-jalan kota. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,39), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Penyediaan titik dan kantong-kantong parkir

juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Isu Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2021, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru , luas kawasan kumuh mencapai 6,89 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Luasan ini mengalami pengurangan dari tahun 2020 sebesar 10,74 persen. Persentase tersebut merupakan luasan yang masih cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 204,11 hektar. Sehingga masih tersisa luasan sebanyak 294,66hektar dari total luasan kumus seluas 498,77 hektar.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Di sisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita

penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan di berbagai tempat, derajat kesehatan memiliki korelasi yang signifikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator makro atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat memiliki korelasi dengan pencapaian kinerja pembangunan lainnya, sehingga derajat kesehatan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan Kota Pekalongan. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat berdampak sistemik terhadap aspek-aspek pembangunan lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan: a) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKI masih bernilai 124,53 per 100.000 kelahiran hidup; b) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKB masih bernilai 9,96 per 1.000 kelahiran hidup; c). Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKABA masih bernilai 12,28 per 1.000 KH; d). Tingginya angka kesakitan dan nilainya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan nilai 8,38 persen di tahun 2021; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,28 persen dan Balita Stunting sebanyak 6,80 persen pada tahun 2022; f) masih rendahnya sistem ketahanan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang cenderung mengecil dan pada tahun 2022 memiliki skor sebesar 81,2 persen; serta g) Tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 mencapai sebesar 35,73 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2020 sebesar 74,38, pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,44 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 74,51. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah maupun UHH Provinsi Jawa Tengah, capaian UHH Kota Pekalongan masih berada pada posisi terbawah. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan UHH secara optimal sehingga tidak tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun kota-kota setara lainnya di Jawa Tengah. Upaya tersebut adalah melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus

ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Selain hal tersebut, perlu dilakukan penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perurnusan rencana intervensi, sinkronisasi program penurunan AKI, AKB dan AKABA antara RSUD dan Puskesmas, pemberdayaan kader dan optimalisasi kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

Selain permasalahan AKI, AKB dan AKABA, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah stunting, dimana masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi beresiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Penyebabnya multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidaktauan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal yang turut berpengaruh yaitu akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah Pusat terus mendorong penurunan stunting melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervesi Percepatan Penurunan Stunting Terintegerasi Tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang perlu mendapat penanganan dengan skema percepatan khusus. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi stunting tahun 2021 berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) sebesar 20,6 persen dan berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 7,82 persen. Target prevalensi stunting Kota Pekalongan ditargetkan turun setiap tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan diantaranya: penguatan cakupan intervensi spesifik kunci, pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi pemerintah daerah, pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi, penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans, koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah, dan pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

Masih rendahnya skor PPH menunjukkan bahwa konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan skor PPH melalui pelatihan olahan pangan dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. Pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan juga harus diarahkan untuk diversifikasi produk-produk bahan makanan maupun kerjasama dengan daerah lain, sehingga tersedia beragam pilihan bahan makanan di wilayah Kota Pekalongan.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Beberapa indikator perkembangan kesejahteraan tersebut adalah dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita maupun semakin menurunnya angka kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Dari data tahun jamak, angka kemiskinan Kota Pekalongan hingga tahun 2019, menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, sebagai dampak pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,17 persen pada tahun 2020 dan semakin meningkat menjadi 7,59 persen pada tahun 2021. Upaya pemulihan kondisi sosia dan ekonomi, sebagai dampak pandemi Covid-19 menunjukkan hasil, yaitu dengan capaian angka kemiskinan tahun 2022 adalah 7,00 persen, sehingga sudah menunjukkan pola kembali menurun.

Dengan perkembangan indikator tersebut, maka masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan belum optimal. Penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah maupun secara nasional bahwa ketika angka kemiskinan semakin rendah maka akan dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pandemi *COVID-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan DTKS tahun 2021 sebanyak 184.247 jiwa dari semula 108.436 jiwa pada tahun 2020, atau kenaikan sebanyak 75.811 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) kembali meningkat yaitu menjadi 188.445 jiwa. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai

ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Tantangan pembangunan Kota Pekalongan lainnya adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran secara optimal. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berfluktuasi. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan analisis korelasi, dengan menggunakan data tahun jamak, antara pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka pengangguran, ketiga indikator tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan antar indikator. Temuan ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan belum berimplikasi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan maupun penurunan angka pengangguran. Angka kemiskinan dan angka pengangguran pun juga tidak memiliki korelasi yang signifikan. Jika angka kemiskinan menurun, juga tidak ditandai dengan penurunan angka pengangguran.

Angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 6,89 persen dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,98 persen. Meskipun angkanya menurun, tetap perlu adanya upaya dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran dan terarah. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, *link and match* dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehinga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus diintegrasikan dengan pembangunan perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong harus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target-target pembangunan tersebut.

2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumberdaya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 75,40 dan tahun 2022 meningkat menjadi 75,90. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah sebesar 12,86 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,86 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 10 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan

bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 adalah 9,20 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 9,20 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP, dan masuk kelas 10 SMA namun tidak sampai lulus. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 sebesar 57,87. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2022 disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan IPM. RAD ini akan menjadi dasar rencana aksi pada tahun berikutnya. Urgensi RAD Peningkatan IPM tersebut adalah sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar IPM Kota Pekalongan dapat meningkat secara optimal. Selama in, IPM Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, bahan dengan beberapa kabupaten pun, IPM Kota Pekalongan capaiannya masih tertinggal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia juga harus didukung dengan peningkatan *soft skill* masyarakat. *Soft skill* adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Dalam hal ini, *soft skill* adalah karakter *bawaan* individu. *Soft skill* bisa saja dipelajari, akan tetapi tidak dengan cara belajar formal layaknya di bangku sekolahan atau perkuliahan. Hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, serta dengan melatih kepekaan sosial. Dengan begitu, individu itu dapat menerapkannya pada perilaku yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan *soft skill.* Seiring berkembangnya zaman, di samping individu memiliki kemampuan *hard skill*, ia juga dituntut untuk harus memiliki *soft*

skill. Hal itu karena dalam suatu organisasi dan lingkungan sosial lainnya, banyak dijumpai kasus kekerasan yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi, pikiran, tindakan, juga tuntutan organisasi atau lingkungan sosial yang semakin pelik. Maka dari itu, kemampuan *soft skill* dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2021 ada tiga belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.

2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen, pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,59 persen dan pada tahun 2022 menjadi 5,76 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2021 sebesar Rp.37,07 juta per tahun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.40,68 juta per tahun, namun belum menunjukkan peningkatan dan pemeraatan kesejahteraan masyarakat yang optimal; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisata pada tahun 2021 sebanyak 316.440 orang, dan meningkat menjadi 1.038.424 orang. Walaupun meningkat tajam, namun masih perlu dioptimalkan; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp.390,348 Milyar dan meningkat menjadi Rp 3.188,411 Milyar pada tahun 2022; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2021

dan 2022 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2021 sebesar 2,38 persen dan tahun 2022 sebesar 4,26 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2021 sebesar 5,46 dan menurun menjadi 3,29 persen pada tahun 2022; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2021 dan tahun 2022 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru sebagai bagian dari TOD (*Transit Oriented Development*). Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahanya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, dari ke-14 sub sektor dalam ekonomi kreatif, hanya 8 (delapan) sub sektor yang masuk dalam *roadmap* Kota Pekalongan, yaitu: 1) Kerajinan; 2) Desain; 3) Fashion; 4) Film, video dan fotografi; 5) Musik; 6) Seni pertunjukan; 7) Radio dan televisi; dan 8) Kuliner. Dari kedelapan sub sektor yang ada maka dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: Kuliner, Seni Kriya

dan Seni Pertunjukan. Kondisi Ekraf saat ini secara umum masih sangat minim, dapat dilihat dengan tidak dimilikinya daftar kebutuhan, pasar yang tidak terpetakan, permodalan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain dapat dikatakan kondisi ekraf di Kota Pekalongan masih belum didukung data yang baik. Dalam ekosistem lama ekraf dilaksanakan dengan model '*single fighter*' atau perorangan, masih terlalu terikat dengan tradisi/tradisional, masih berupa pelayanan dasar dan merupakan sambilan. Sehingga perlu adanya perubahan cara pandang atau 'Re-Branding' dengan mulai menjalankan Ekraf melalui/berbasis komunitas, memberikan nilai tambah pada karyanya, ada pelayanan tambahan dan bersifat profesional.

Selain perubahan dengan me-re-branding ekosistem Ekraf juga perlu adanya pembuatan Database Dinamis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan, pemetaaan dan akses pasar serta penyaluran modal. Dalam kebutuhan pengembangan perlu didasari oleh regulasi/peraturan, adanya kelembagaan dan didukung infrastruktur. Sedangkan pemetaan dan akses pasar dibedakan menjadi even dan segmentasi. Untuk permodalan dapat dibagi menjadi profit, non profit dan stimulan.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Dalam Pariwisata terdapat 5 (lima) hal penting yang saling terkait, yang biasa dikenal dengan 3A dan 2P, yaitu: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Promosi dan Pelaku Usaha. Kelima hal tersebut harus ada dan mendukung satu dengan lainnya untuk menciptakan pariwisata yang unggul. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Tahun 2017-2027, Kota Pekalongan termasuk dalam salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi / DPP yaitu DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya. DPP ini merupakan destinasi pariwisata berskala Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 DPP. DPP dibagi lagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / KSPP dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi/ KPPP. Untuk DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP yaitu: a) KSPP Tegal dan sekitarnya; b) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya; c) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya; d) KPPP Batang dan sekitarnya; e) KPPP Pemalang dan sekitarnya; dan f) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Pekalongan Tahun 2013-2028, telah ditentukan 4 DPD dan 9 KSPP serta 14 KPPP, dengan kriteria: a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata seperti KSPD dan KPPD; b) Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas serta membentuk jejaring produk dan pola kunjungan wisata; c) Memiliki tema yang mendukung penguatan daya saing; d) Memiliki

dukungan aksesibilitas dan infrastruktur mendukung pariwisata; dan e) Keterpaduan rencana sektor terkait.

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas amenitas, perkuatan promosi wisata, dan penyusunan standar prosedur manajemen pariwisata, termasuk dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekolongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting, harus diintegrasikan dengan pembangunan kepariwisataan, sehingga dapat berkembang pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya dapat menjadi potensi tersendiri bagi pariwisata tersebut karena masing-masing daerah pasti memiliki kearifan budaya lokal yang khas dan unik bagi wisatawan. Strategi pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan atraksi budaya yang tetap mempertahankan jati diri kawasan, pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah menjadi bangunan cagar budaya, peningkatan infrastruktur, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.9. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondisivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah akan sangat tergantung kondisi kondusivitas wilayah ini.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus, tahun 2021 bertambah menjadi tiga kasus dan pada tahun 2022 tidak terjadi kasus konflik sosial. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2021 sebesar 3,60 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 1,47 (per 10.000 penduduk) di tahun 2022, namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tahun 2021 sebesar 46 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupatan/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi tanggung jawab bersama, seluruh pemangku kepentingan, bukan menjadi kewenangan pemerintah semata. Dengan kondusivitas wilayah yang baik maka akan menjamin perwujudan penanaman modal yang semakin meningkat sehingga perekonomian akan semakin berkembang, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 didasarkan atas berbagai asumsi dasar, antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Kondisi ekonomi Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan ekonomi regional Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Di tingkat regional, ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif pada triwulan I 2023 sebesar 5,04 persen secara Year on Year (Y-o-Y). Kondisi ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,03 persen YoY dan empat provinsi besar di pulau Jawa. Sejumlah peristiwa yang berpengaruh pada kondisi ini di antaranya, panen raya padi yang mencapai puncak pada Maret 2023. Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung padi mengalami peningkatan produksi beras sebesar 216,60 persen secara q to q (dibanding triwulan sebelumnya), dan meningkat 5,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal lain yang mempengaruhi yaitu jumlah kendaraan baru yang diperdagangkan di level retail, yang meningkat 13,69 persen dibanding triwulan I tahun 2022. Jumlah penumpang moda transportasi yang naik, dan peningkatan hunian kamar yang meningkat 9,76 persen. Momen Ramadan juga ikut mengerek peningkatan konsumsi masyarakat. Yang meliputi makanan, minuman, transportasi, hotel, dan restoran. Selain itu,terjadi peningkatan konsumsi pemerintah yang didukung oleh peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja sosial.

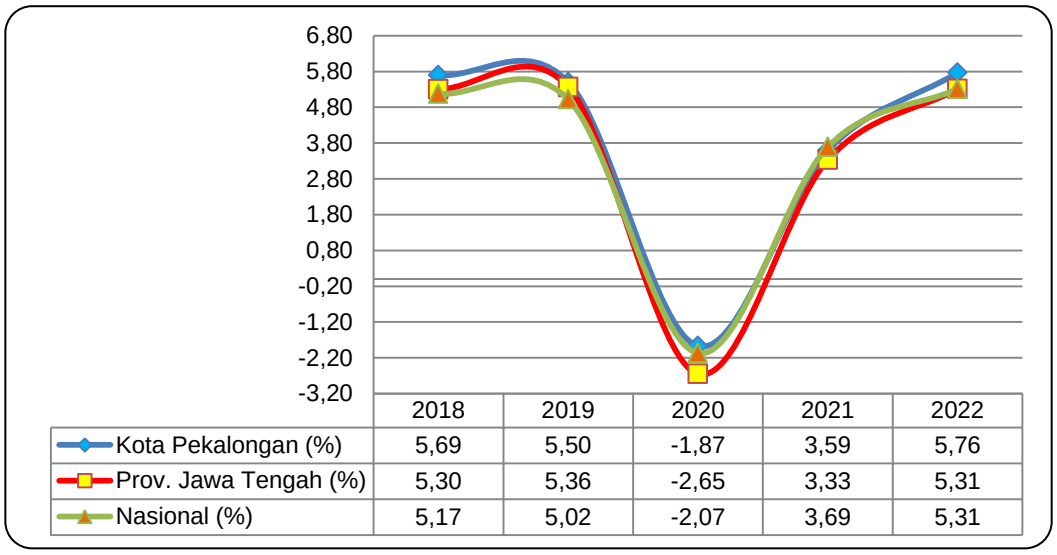
Sebagai salah satu kota yang berada di jalur strategis Pantura, ekonomi Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan 5,76 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan

yaitu 2,28 - 2,84 persen. Melihat kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif dari realisasi tahun 2022.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respons kebijakan yang ditempuh.

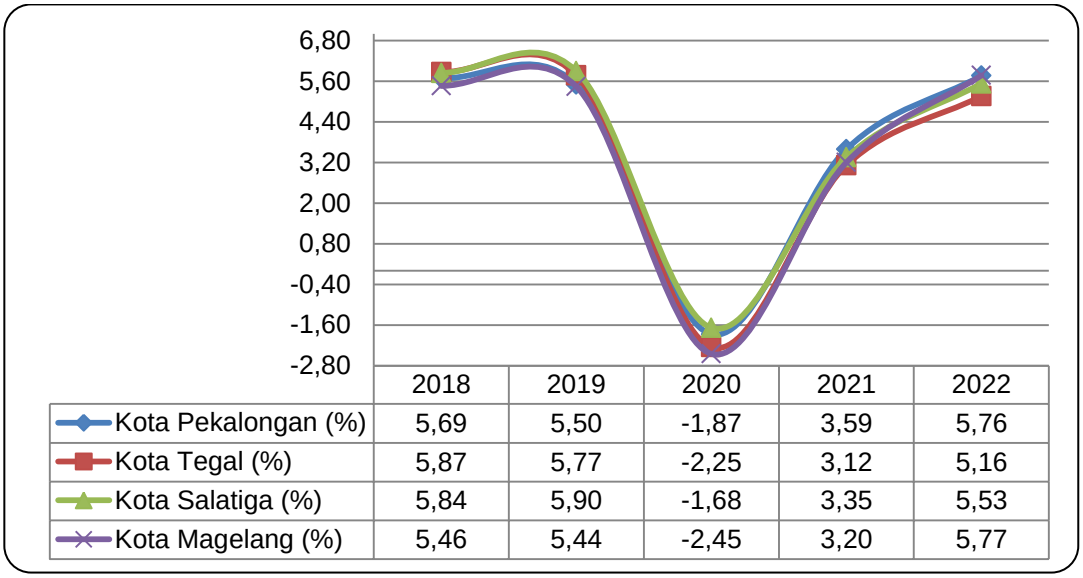


	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	5,69	5,50	-1,87	3,59	5,76
Prov. Jawa Tengah (%)	5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31
Nasional (%)	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 (diolah), 2023

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Sementara pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	5,69	5,50	-1,87	3,59	5,76
Kota Tegal (%)	5,87	5,77	-2,25	3,12	5,16
Kota Salatiga (%)	5,84	5,90	-1,68	3,35	5,53
Kota Magelang (%)	5,46	5,44	-2,45	3,20	5,77

Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2018-2022. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2022, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,08 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,79 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,10 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,67	4,66	5,09	4,79	4,71
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,94	20,85	21,34	21,15	20,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,12	0,12	0,11
F	Konstruksi	14,60	14,64	14,54	15,46	15,10

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,76	21,80	21,38	21,59	21,08
H	Transportasi dan Pergudangan	6,28	6,40	5,02	5,06	7,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,44	5,31	5,36	5,67
J	Informasi dan Komunikasi	4,21	4,36	5,13	5,07	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,27	6,13	6,21	6,22	6,14
L	Real Estat	2,71	2,71	2,73	2,66	2,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,42	0,44	0,43	0,42	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,58	4,47	4,49	4,17	3,93
P	Jasa Pendidikan	4,75	4,65	4,72	4,54	4,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,29	1,44	1,40	1,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,87	1,90	1,90	1,83	1,82
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2018 hingga 2022 cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,14 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 40,68 juta rupiah. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah, dan meningkat sebesar 5,25 persen menjadi sebesar 37,07 juta rupiah pada tahun 2021. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.089,25	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.599,93
- ADHK (Miliar Rp)	7.087,92	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	33,14	35,41	35,32	37,17	40,68
- ADHK (Juta Rp)	23,28	24,35	23,89	24,66	25,96
Pertumbuhan PDRB per Kapita					

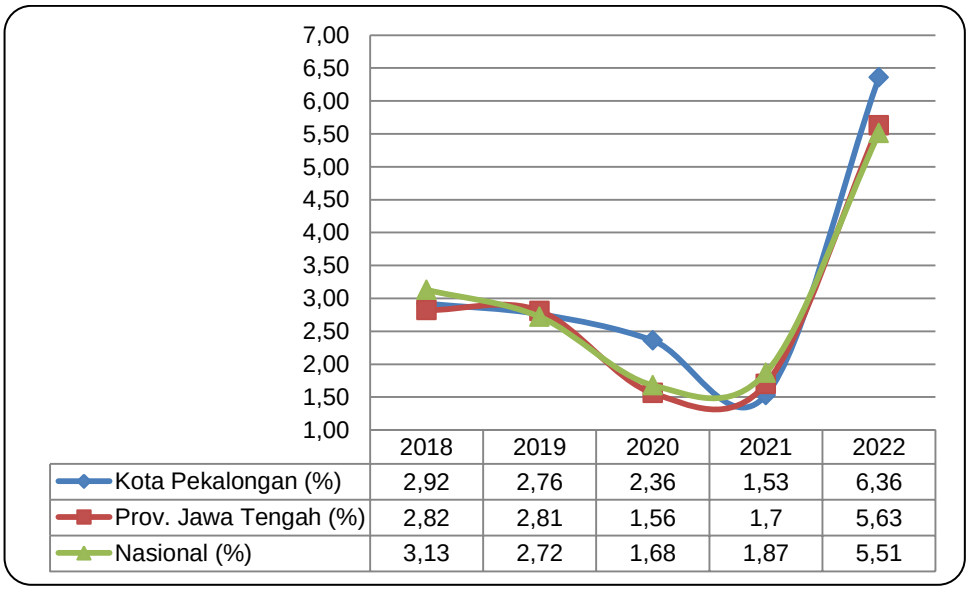
Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB (persen)	7,86	6,86	-0,25	5,24	9,43
- ADHK (persen)	4,79	4,60	-1,88	3,20	5,27

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2023

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2018 – 2022, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pekalongan (%)	2,92	2,76	2,36	1,53	6,36
Prov. Jawa Tengah (%)	2,82	2,81	1,56	1,7	5,63
Nasional (%)	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Sumber: www.bps.go.id, 2023

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2021 adalah kelompok rekreasi, perawatan pribadi, makanan jadi, dan sandang. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Umum	3,61	2,92	2,76	-	-
Bahan Makanan	4,63	3,66	8,00	-	-
Makanan Jadi	2,46	3,05	1,60	-	2,14

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Perumahan	4,02	3,47	0,40	0,33	1,42
Sandang	5,40	2,51	3,31	4,01	2,01
Kesehatan	1,15	0,54	4,75	2,89	0,56
Pendidikan	3,26	1,33	3,74	-2,71	0,06
Transport	3,96	2,43	0,31	1,33	1,01
Perlengkapan	-	-	-	2,70	1,13
Infokom	-	-	-	1,20	-0,64
Rekreasi	-	-	-	6,27	2,62
Restoran	-	-	-	1,76	1,61
Perawatan Pribadi	-	-	-	4,20	2,35

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Pada tahun 2022 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2022

Kelompok Pengeluaran	2022
Makanan, Minuman dan Tembakau	8,96
Pakaian dan Alas Kaki	2,45
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,47
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4,89
Kesehatan	2,50
Transportasi	16,42
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,74
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	4,50
Pendidikan	3,21
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	4,81
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	9,64
Umum	6,31

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka 2023, 2023

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan berat di tahun 2023 mulai terbukti. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka.

Di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap resilien. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2023 tumbuh sebesar 5,03%, melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada pada level 4,5% pada triwulan yang sama.

Kondisi ekonomi global yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

1) *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur global melemah.

   Aktivitas manufaktur global kembali terkontraksi di penghujung triwulan I 2023. Purchasing manager's index (PMI) manufaktur di hampir 60% negara G-20 dan ASEAN-6 masih melemah. Bahkan Vietnam yang selama ini cukup resilien pun telah mengalami hantaman perlemahan dari PMI manufaktur sebagai imbas perlemahan negara-negara tujuan ekspor Vietnam. Sementara 27,3% negara lainnya termasuk Thailand, Rusia, dan Tiongkok berada di zona ekspansi namun melambat. Di tengah perlambatan PMI global tersebut, Indonesia bersama India dan Turki menjadi sebagian kecil (13,6%) negara yang PMI manufakturnya ekspansif dan terus melesat.

2) Harga komoditas global menurun.

   Kondisi perekonomian dunia juga masih dipengaruhi oleh volatilitas dan gejolak harga komoditas. Meskipun secara umum tren penurunan terjadi, dibandingkan tahun 2022 terutama pada pertengahan tahun, yang sempat mengalami boom komoditas. Harga gas alam dan batu bara terkoreksi tajam yaitu menurun sebesar 48,5% dan 52,8%. Sebaliknya, harga minyak mentah menunjukkan kenaikan sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan pemangkasan produksi minyak oleh organisasi pengekspor minyak bumi (OPEC). Sementara, harga komoditas pangan juga menunjukkan penurunan, kecuali *Crude Palm Oil* (CPO) yang sedikit mengalami penguatan. Kedelai masih berada di level yang cukup tinggi. Sedangkan jagung dan gandum sedikit menurun. Volatilitas harga komoditas masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi laju inflasi serta kebijakan moneter dan kinerja ekonomi semua negara.

3) *Higher for longer*.

   Harga komoditas mempengaruhi tingkat inflasi. Berbagai negara kemudian merespons kenaikan inflasi tersebut melalui kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan agregat. Tingkat inflasi di Eropa dan Jepang misalnya mengalami kenaikan dan masih relatif jauh di atas suku bunga acuan. Sementara, inflasi Amerika Serikat walaupun menurun namun secara historis juga masih berada pada level yang lebih tinggi, saat ini di level 5%. Hal ini memukul perekonomian negara-negara tersebut, sehingga mengalami perlemahan yang cukup tajam pada tahun ini. Risiko global lainnya yang masih cukup dominan antara lain tekanan di sektor keuangan, potensi krisis utang di berbagai negara, eskalasi perang di Ukraina, serta adanya fragmentasi geoekonomi. Alhasil, pemulihan ekonomi global tersendat. International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini pada *World Economic Outlook* (WEO) April 2023, yaitu sebesar 2,8% (yoy). Meski tahun ini perekonomian global melambat, namun IMF memprakirakan pertumbuhan global akan membaik di tahun 2024 yaitu sebesar 3,0% (yoy). Sementara itu, IMF memprediksi inflasi global masih tinggi di 2023 yaitu di level 7,0%. Sedangkan negara berkembang diproyeksi mengalami inflasi sebesar 8,6% dan negara maju 4,7%. Inflasi diprediksi baru akan mulai menurun tahun depan. Namun, secara historis masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun, bahkan sebelum terjadinya pandemi. Hal tersebut menggambarkan inflasi masih akan berlangsung pada level yang tinggi dalam jangka yang cukup panjang atau kemudian disertai dengan suku bunga tinggi dan agak panjang, "*higher for longer*". Perlambatan kondisi perekonomian di negara maju tentu akan memberikan dampak bagi negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan ekspor. Kebijakan *reopening* Tiongkok belum mampu mendorong pemulihan ekonomi. Sehingga sumber pertumbuhan ekonomi dunia masih sangat lemah tahun ini. Begitu pula dengan volume perdagangan antarnegara yang akan mengalami penurunan. Di samping itu, dengan

adanya kenaikan inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pengetatan likuiditas, telah menimbulkan dampak kepada sektor keuangan perbankan. Sri Mulyani mengatakan berdasarkan hasil pertemuan Spring Meeting IMF-World Bank 2023 di Washington DC, Amerika Serikat pada 10-16 April 2023, krisis perbankan yang terjadi di Eropa dan Amerika masih harus diwaspadai.

Sementara itu, kondisi ekonomi nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan, diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prospek perekonomian domestik baik dari sisi produksi maupun konsumsi masih cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 19 bulan berturut-turut dengan capaian di Maret 2023 sebesar 51,9. Sejak awal 2023, PMI Manufaktur Indonesia meneruskan penguatan, antara lain didukung ekspektasi permintaan menjelang lebaran.

Di samping itu, penguatan dari sisi produksi juga ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik bisnis yang tinggi dan listrik industri yang relatif stabil meski sedikit terkontraksi. Aktivitas konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren positif. Penjualan mobil dan motor jauh di atas rata-rata tahun 2019. Penjualan mobil secara wholesale tahunan tumbuh sebesar 2,6%. Begitupun penjualan motor yang bahkan mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 40,5%.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sangat kuat di angka 123,3. Hal ini tidak lepas dari dukungan pengendalian inflasi yang mumpuni dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Indeks penjualan ritel juga mencatat kenaikan tajam, yaitu sebesar 4,8% (yoy), dikarenakan momen Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi yang terkendali menjadi hal positif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah optimis tren positif tersebut akan tetap terjaga dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi bagi momentum pemulihan serta menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi.

Di sisi lain, sektor pariwisata perlahan menunjukkan pemulihan. Terlihat dari jumlah kunjungan wisman yang mengalami peningkatan sebesar 567,3% (yoy).

Memperhatikan kondisi global, nasional dan tantangan tersebut, pembangunan di Kota Pekalongan diharapkan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

a. Pertumbuhuan Ekonomi

Di tahun 2022, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,59	5,76	3,70 – 4,20	5,50-5,80	5,4 – 5,8	2,53 - 3,32

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2022 bergerak naik dari 75,40 di tahun 2021, menjadi 75,90 di tahun 2022. Capaian di tahun 2022 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 75,60. Dengan upaya optimalisasi vaksinasi *COVID-19* dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,40	75,90	75,60	76,30	76,70	75,88

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 57,87 di tahun 2021. Angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 58,43. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,87	61,37	59,14	59,14	59,59	60,28

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi *COVID-19* yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan tahun 2021 mencapai 7,59 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,94 persen. Begitu juga di tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai 7,00 persen, masih di atas angka yang diharapkan yaitu 6,71 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Tingkat kemiskinan (persen)	7,59	7,00	6,50 – 6,45	6,50 – 6,45	6,3 - 5,93	6,09

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kota Pekalongan, penyerapan tenaga kerja juga turut membaik. Hal ini terlihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 6,89 persen di tahun 2021 menjadi 4,98 persen di tahun 2022 atau menurun 1,91 persen. Capaian ini juga telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 6,66 persen di tahun 2022. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,89	4,98	6,48 – 6,10	6,48 – 6,10	4,5 – 4,7	6,15

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2022 berada diatas range tersebut yaitu 6,36 persen, turun 4,83 persen dari capaian tahun 2021 yaitu 1,53 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.10 Realisasi, Target dan Proyeksi
Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Inflasi (persen)	1,53	6,36	3±1	3±1	3±1	3±1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, bantuan keuangan Provinsi, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Resposibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dihitung berdasarkan:
   a. perkiraan potensi yang masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada semester I tahun anggaran 2023;
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan:
   a. perkiraan potensi yang masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. memperhatikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada semester I tahun anggaran 2023;
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan perolehan laba dari BUMD tahun 2022 audited.
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan:
   a. dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada semester I tahun anggaran 2023;
   b. perkiraan suku Bungan BI;
   c. potensi aset yang disewakan;
   d. estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
   e. estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
5. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), disesuaikan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.
6. Dana Bagi Hasi Pajak Prvinsi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah (Retribusi Daerah) seperti yang sudah tertuang pada Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 2021-2025.

2) Implementasi *Sak Rego* (Satu Harga), penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.

3) *E-monitoring* pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya.Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
   - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
   - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
   - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
   - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
   - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
   - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

4) Pemberian Reward dan Punishment, antara lain:
   a) *Reward*:
      - Gebyar Pajak Restoran, pemberian reward masyarakat yang berkenan melaporkan *struck* pembelian makanan minimal Rp. 25.000,00 dengan cara mengakses web yang telah disediakan dan mengsisi data diri serta melampirkan struck pembayarannya untuk periode 15 Juli – 30 September 2023.
      - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
      - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
   b) *Punishment*:
      - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
      - Bagi WP yang telah mendapat Tapping Box tetapi tidak menggunkan alat tapping box tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun

2022 Tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (E-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak maka akan dikirmkan Surat Peringatan sampai 3 kali dan apabila tidak mengindahkan maka akan dilakukan pensegelan/ penutupan usaha WP.

- Pemasangan Sticker belum lunas pajak daerah.
- Dengan berkordinasi dengan Satpol PP melakukan pembongkaran konstruksi reklame bagi WP Reklame yang tidak memenuhi kewajibannya.

5) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
6) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
7) Implementasi QRIS Untuk mempermudah akses Wajib Pajak dalam pembayaran pajak maka penggunaan metode pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dirasa perlu. QRIS merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank (OVO, Gopay, Dana, LinkAja, dll) yang digunakan masyarakat, dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.
8) Digitalisasi Layanan Perpajakan; Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kemudahan akses layanan perpajakan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut BPKAD Kota Pekalongan melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi sistem informasi: E-SPTPD, E-BPHTB, SPPT Elektronik PBB, PBB Online, Web SIG PBB, Aplikasi Pendataan Mobile
9) Host to host e-BPHTB dengan Layanan ATR BPN. Integrasi Aplikasi e-BPHTB BPKAD dengan Kantor ATR BPN Kota Pekalongan adalah upaya peningkatan pendapatan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir pemalsuan BPHTB serta mempercepat proses pelayanan pertanahan
10) House to house dengan DPMPTSP terkiat perijinan reklame dan ijin usaha lainnya, house to house dengan BPN terkait BPHTB dengan update data objek PBB.
11) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
12) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
13) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
14) Persiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
15) Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data

simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;

16) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
17) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
18) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
19) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
20) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
21) Perbaikan kinerja yang merupakan indikator dasar perhitungan Dana Insentif Daerah.
22) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak..

Adapun perubahan target pendapatan Kota Pekalongan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.11 Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2023

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PENDAPATAN DAERAH	**990.014.024.000**	**967.818.978.000**	**1.008.849.238.000**	**18.835.214.000**	**41.030.260.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**242.248.392.000**	**240.805.592.000**	**249.829.667.710**	**7.581.275.710**	**9.024.075.710**
Pajak Daerah	97.750.000.000	99.450.000.000	100.200.000.000	2.450.000.000	750.000.000
Retribusi Daerah	24.867.002.000	21.674.202.000	21.983.402.000	-2.883.600.000	309.200.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.473.378.000	6.473.378.000	6.604.200.000	130.822.000	130.822.000
Lain-lain PAD yang Sah	113.158.012.000	113.208.012.000	121.042.065.710	7.884.053.710	7.834.053.710
PENDAPATAN TRANSFER	**747.765.632.000**	**724.763.386.000**	**756.769.570.290**	**9.003.938.290**	**32.006.184.290**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**637.762.334.000**	**652.383.034.000**	**651.645.019.290**	**13.882.685.290**	**-738.014.710**
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.676.925.000	29.844.124.000	31.088.726.000	2.411.801.000	1.244.602.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000	447.688.903.000	447.688.903.000	21.289.165.000	0
Dana Alokasi Khusus	177.989.411.000	164.905.768.000	162.923.151.290	-15.066.259.710	-1.982.616.710
Dana Insentif Daerah	4.696.260.000	9.944.239.000	9.944.239.000	5.247.979.000	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**110.003.298.000**	**72.380.352.000**	**105.124.551.000**	**-4.878.747.000**	**32.744.199.000**

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	74.045.298.000	72.380.352.000	82.064.551.000	8.019.253.000	9.684.199.000
Bantuan Keuangan Provinsi	35.958.000.000	0	23.060.000.000	-12.898.000.000	23.060.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0**	**2.250.000.000**	**2.250.000.000**	**2.250.000.000**	**0**
Pendapatan Hibah	0	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp.41.030.260.000 dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2023 yang terdiri dari kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp.750.000.000, Retribusi Daerah sebesar Rp.309.200.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.130.822.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.7.834.053.710.

Untuk Pendapatan Transfer, secara total bertambah sebesar Rp.32.006.184.290. kenaikan terbesar bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.23.060.000.000, Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi sebesar Rp.9.684.199.000 dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp.1.244.602.000. kenaikan tersebut juga diikuti dengan penurunan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.982.616.710.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada:

1) Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari:
   a. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN berdasarkan realisasi belanja bulan Juni 2023.
   b. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK tahun 2022.
   c. Penyesuaian kebutuhan belanja tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD.
   d. Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai.
   e. Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD sesuai dengan hasil SiLPA audited.
2) Penyesuaian rekening belanja atas hasil SiLPA audited yang bersifat transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD).
3) Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

4) Penyesuaian belanja atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 21 A tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023.
5) Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan.
6) Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgen.
7) Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan/kelompok dan jenis belanja.

Adapun perubahan belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.12 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2023

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
BELANJA	**1.029.014.024.000**	**1.008.395.478.000**	**1.060.070.466.000**	**31.056.442.000**	**51.674.988.000**
BELANJA OPERASI	**844.598.845.529**	**853.904.211.000**	**880.901.275.000**	**36.302.429.471**	**26.997.064.000**
Belanja Pegawai	405.194.236.500	402.374.077.000	401.689.577.000	-3.504.659.500	-684.500.000
Belanja Barang dan Jasa	413.908.124.887	419.190.116.000	438.694.127.000	24.786.002.113	19.504.011.000
Belanja Hibah	21.574.310.142	29.205.077.000	38.069.966.000	16.495.655.858	8.864.889.000
Belanja Bantuan Sosial	3.922.174.000	3.134.941.000	2.447.605.000	-1.474.569.000	-687.336.000
BELANJA MODAL	**179.440.178.471**	**150.661.267.000**	**174.169.191.000**	**-5.270.987.471**	**23.507.924.000**
Belanja Modal Tanah	3.132.548.000	3.205.785.000	3.375.350.000	242.802.000	169.565.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.196.533.471	40.259.231.000	40.313.856.000	10.117.322.529	54.625.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.614.107.150	57.851.865.000	55.854.513.000	-2.759.594.150	-1.997.352.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.794.159.206	46.413.735.000	72.330.088.000	-10.464.071.206	25.916.353.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.702.830.644	2.930.651.000	2.295.384.000	-2.407.446.644	-635.267.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**4.975.000.000**	**3.780.000.000**	**5.000.000.000**	**25.000.000**	**1.220.000.000**
Belanja Tidak Terduga	4.975.000.000	3.780.000.000	5.000.000.000	25.000.000	1.220.000.000
BELANJA TRANSFER	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**-50.000.000**
Belanja Bantuan Keuangan	0	50.000.000	0	0	-50.000.000

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah yang berasal dari pelampauan target pendaptan asli daerah baik bersumber dari pelampauan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun pelampauan target pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perubahan penerimaan pembiayaan dilakukan dengan menyesuaikan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yang telah di audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.51.826.500.000. Berdasarkan hasil audit BPK, perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah sisa dana DAK Fisik dan Non Fisik, sisa dana DBHCHT, sisa kas di BLUD RSUD dan Sisa Kas di BLUD Puskesmas yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 bertambah sebesar Rp. 650.100.575 sehingga menjadi Rp.6.650. 100.575, yaitu penambahan jasa giro pada pembentukan dana cadangan.

Tabel 3.13 Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PEMBIAYAAN	**39.000.000.000**	**40.576.500.000**	**51.221.228.000**	**12.221.228.000**	**10.644.728.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**48.000.000.000**	**51.826.500.000**	**63.121.328.575**	**15.121.328.575**	**11.294.828.575**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.000.000.000	51.826.500.000	63.120.549.575	15.120.549.575	11.294.049.575
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	779.000	779.000	779.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**9.000.000.000**	**11.250.000.000**	**11.900.100.575**	**2.900.100.575**	**650.100.575**
Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	6.650.100.575	650.100.575	650.100.575
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000	2.250.000.000	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2023

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan ***Tahta Untuk Rakyat*** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengekploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat

pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan terkurangi secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Dengan selesainya konstruksi Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan mempunyai wahana wisata baru yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hal ini menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota

Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka

Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJPD yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaqul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang

sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu "***Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius***", uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian ibu, bayi dan balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan active dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya pengarusutamaan hak anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayan Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadahi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus

dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, dengan sasaran meliputi: optimalnya layanan air minum, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi sedekah laut (nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

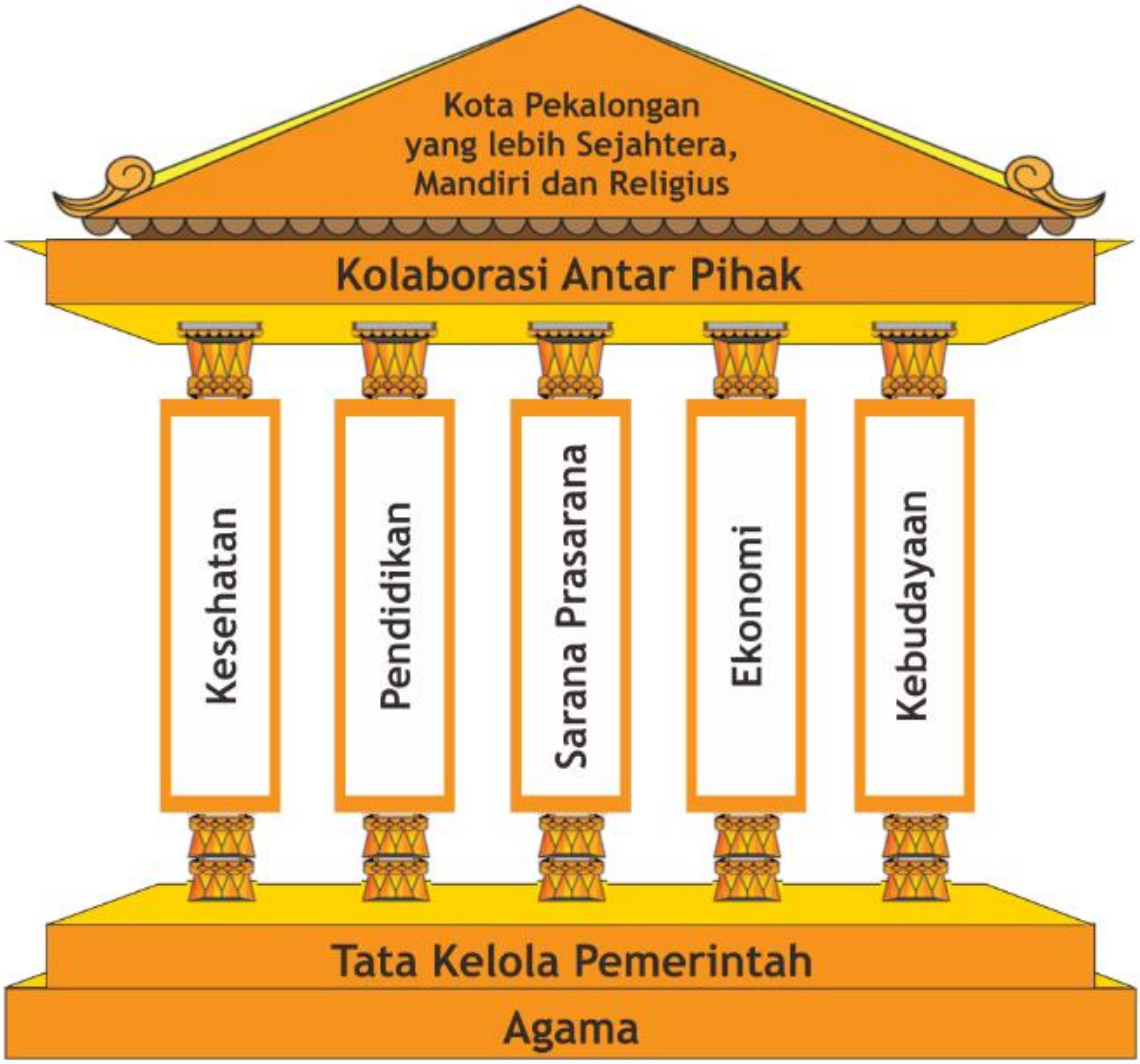
Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujud melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.3. Tujuan Dan Sasaran

4.1.3.1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2. Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

a. Meningkatnya akses pendidikan
b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
c. Optimalnya pengarusutamaan gender
d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3. Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4. Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
b. Menurunnya tingkat pencemaran air
c. Optimalnya kualitas lahan
d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang
e. Optimalnya layanan air minum
f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5. Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6. Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

a. Melestarikan Seni Budaya
b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan
b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7. Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026
Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04
		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69
		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja '*impac*t' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase jumlah rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
	kumuh kurang dari 10 persen	tidak kumuh	tidak kumuh	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK *Outcome*)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2023

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualtas jalan lingkungan
Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelasanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan *event* budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan toko masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
   b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
   c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
   d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
   - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
   - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
   b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
   c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
   d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
   f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
   g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi kesehatan nasional; dan

- MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).

3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
   c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
   d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
   b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
   c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;
   d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
   e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
   - MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
   b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
   c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
   d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
   e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,556,6,08%; dan
   f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
   b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
   c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar
   d. Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
   e. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
   - MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m 3 /detik;
   b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
   c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
   d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
   e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
   - MP transformasi digital;
   - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
   - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
   b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

   a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
      2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
      3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
      4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
      5) Pengembangan industri pendukung EBT.
   b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
      2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
      3) Penyediaan air untuk pertanian;
      4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
      5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air

6) dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan
7) infrastruktur hijau; dan
8) Pengembangan waduk multiguna.

c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) Pengelolaan Impor;
4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri
5) Pengolahan dan Pariwisata; dan
6) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi
7) Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman,
8) Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
   1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
   2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
   3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
   4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Sistem jaminan sosial nasional;
   2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
   3) Kesejahteraan Sosial.
c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
   2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
   3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
   4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
   5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
   2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
   3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
   5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
   2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
   3) Kualitas Pemuda.
f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
   2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
   3) Reforma Agraria; dan
   4) Perhutanan Sosial.
g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
   2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
   3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
   4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
    2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
    3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
    4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
    5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
    6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
    2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
    3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
    4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
    5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
    2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
    3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
    4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan

5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan Budaya Literasi;
   2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

   a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
      2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
      3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
      4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
      5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
      6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
   b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Konektivitas Jalan;
      2) Konektivitas Kereta Api;
      3) Konektivitas Laut;
      4) Konektivitas Udara; dan
      5) Konektivitas Darat.
   c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Transportasi Perkotaan; dan
      2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
   d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
      2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
      3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
   e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Penuntasan Infrastruktur TIK;

2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
   2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
   3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
   4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penanggulangan Bencana; dan
   2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
   2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
   3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
   2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
   3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
   2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
   2) Transformasi pelayanan publik;
   3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
   4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
   2) Penguatan Keamanan Laut; dan
   3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada **"Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari"** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, difokuskan pada:
   a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi pertanian (termasuk subsektor peternakan), peningkatan kualitas kelembagaan petani dan peternak berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan melalui subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan database (termasuk data peternakan dan kesehatan hewan), peningkatan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan kawasan peternakan, program Banter Melaju (Paguyuban Peternak Menuju Keluarga Maju), pengendalian penyakit hewan menular strategis, Sekolah Usaha Peternakan Rakyat/SUPRA, serta penyuluhan peternakan;
   b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, peningkatan kelayakan usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, peningkatan angka konsumsi ikan, pengembangan budidaya perikanan berbasis kawasan, pengembangan pelabuhan perikanan dan loka budidaya ikan, pembinaan dan penyediaan sarana usaha garam rakyat, serta pengelolaan kawasan konservasi;
   c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
   d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan berkelanjutan sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan

pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;

e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pansela;
i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air, pengendalian pemanfaatan air, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, konservasi energi, pemulihan lingkungan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup;
j. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, kajian dan inovasi, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana.

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
   a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah), serta pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, dan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif;
   b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*) serta berbasis pada potensi lokal secara berkelanjutan, utamanya melalui penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pelatihan, fasilitasi kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan perlindungan;
   c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di

tingkat daerah, penguatan peran Puskesos dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor;

d. Pengurangan pengangguran dengan membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas calon tenaga kerja, dan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja.

3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, difokuskan pada:
   a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
   b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
   d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, difokuskan pada:
   a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif; sarana pelayanan publik yang inklusif; *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik; dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
   c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja;
   d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh

lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;

e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD..

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai di tahun 2023 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51-9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63-4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-5,60 persen;
7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 ditujukan untuk "***Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan***", dengan arah kebijakan meliputi:

1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan fokus pada peningkatan layanan dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi terhadap kematian ibu, bayi dan balita, penurunan angka stunting serta pembudayaan GERMAS guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha, dengan fokus pada perluasan jangkauan jaminan sosial bagi penduduk miskin.
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendampingan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah;
   b. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha, dengan fokus pada optimalisasi kurikulum pelatihan dan penentuan sasaran pelatihan kerja di

BLK serta peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perluasan kesempatan kerja.

5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dengan fokus pada:
   a. Peningkatan peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan keluarga;
   b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelurahan layak anak.
6. Pemantapan kerjasama dengan *stakeholder* potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada revitalisasi kawasan kumuh prioritas di wilayah Pekalongan Utara.
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan fokus pada:
   a. Penataan infrastruktur drainase di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, operasional dan pemeliharaan sistem pengendali banjir dan rob, serta penataan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
   b. *Pilot project* penerapan produksi bersih pada sentra industri batik;
   c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:
   a. Pembangunan jaringan distribusi dan perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
   b. Pengoptimalan sarpras dan kelembagaan pengelolaan persampahan di TPS3R dan perluasan TPA secara bertahap yang disertai dengan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
   c. Lanjutan pembangunan skeleton kawasan Pekalongan Baru dan rintisan akses jalan ke pelabuhan *onshore*.
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing, dengan fokus pada optimalisasi kelembagaan destinasi wisata laut dan destinasi wisata berbasis masyarakat.
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan *event* seni dan budaya, dengan fokus pada penguatan dan pengembangan kelompok seni dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan pelibatan stake holder yang diwujudkan dalam penyelenggaraan event budaya sebagai bagian dari peningkatan industri pariwisata.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada edukasi keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada:
    a. Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada aspek-aspek integrasi penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan

barang/jasa, manajemen kepegawaian, serta penguatan kualitas pelayanan di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan;

b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;
c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM;
e. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, implementasi roadmap *merit system*.

Memperhatikan kondisi global, nasional, regional, tantangan dan upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19* serta pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Pertumbuhan ekonomi semula 3,70 – 4,20 persen disesuaikan menjadi 5,50-5,80 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,50 – 6,45 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semula 75,60 disesuaikan menjadi 76,30;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,48 – 6,10 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2023. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan		8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit				
Peningkatan layanan dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi terhadap kematian ibu, bayi dan balita, penurunan angka stunting serta pembudayaan GERMAS guna pencegahan dan pengendalian penyakit	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,92 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,91 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 116,21 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha				
Perluasan jangkauan jaminan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,00%	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas				
a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendampingan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah; b. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,43 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha				
Optimalisasi kurikulum pelatihan dan penentuan sasaran pelatihan kerja di BLK serta peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,54%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)				
a. Peningkatan peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan keluarga; b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelurahan layak anak.	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,14	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh				
Revitalisasi kawasan kumuh prioritas di wilayah Pekalongan Utara	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	93,72%	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup				
a. Penataan infrastruktur drainase di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, operasional dan pemeliharaan sistem pengendali banjir dan rob, serta penataan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat; b. Pilot project penerapan produksi bersih pada sentra	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	1.072,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	2. Indeks Kualitas Air	35,36	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
industri batik; c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	3. Indeks Kualitas Lahan	23,603	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
a. Pembangunan jaringan distribusi dan perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
b. Pengoptimalan sarpras dan kelembagaan pengelolaan persampahan di TPS3R dan perluasan TPA secara bertahap yang disertai dengan penguatan literasi	2. Persentase pelayanan sampah	70,12%	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
pengelolaan persampahan kepada masyarakat; c. Lanjutan pembangunan skeleton kawasan Pekalongan Baru dan rintisan akses jalan ke pelabuhan onshore.	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	97,20%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing				
Optimalisasi kelembagaan destinasi wisata laut dan destinasi wisata berbasis masyarakat.	Pertumbuhan ekonomi	5,50-5,80%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya				
Penguatan dan pengembangan kelompok seni dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan pelibatan stake holder yang diwujudkan dalam penyelenggaraan event budaya sebagai bagian dari peningkatan industri pariwisata.	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	91,11%	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah				
Edukasi keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik				
a. Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada aspek-aspek integrasi penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, manajemen kepegawaian, serta penguatan kualitas pelayanan di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan; b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik; c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM; e. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, implementasi roadmap *merit system*.	1. Indeks SPBE	2,95	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	2. IKM Kota	83,64	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	96,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	74,57	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	240,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
	7. Maturitas SPIP	3,40	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka target indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator program pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30	0,30	Tetap
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21	116,21	Tetap
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91	7,91	Tetap
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92	9,92	Tetap
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00	2,00	Tetap
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43	9,43	Tetap
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14	59,14	Tetap
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Tetap
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54	70,54	Tetap
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72	93,72	Tetap
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.027,00	1.027,00	Tetap
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35,36	35,36	Tetap
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	Tetap
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap
17	Persentase pelayanan sampah	persen	70,12	70,12	Tetap
18	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B	B	Tetap
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	Tetap
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	3,70 – 4,20	5,50-5,80	Berubah
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11	91,11	Tetap
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap
23	Indeks SPBE	indeks	2,95	2,95	Tetap
24	IKM Kota	persen	83,64	83,64	Tetap

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00	96,00	Tetap
26	Indeks Merit System	indeks	240,00	240,00	Tetap
27	Nilai SAKIP Kota	skor	74,57	74,57	Tetap
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	Tetap
29	Maturitas SPIP	nilai	3,4	3,4	Tetap
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5	5	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2023

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,52	74,52	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Angka Kemiskinan	persen	6,50 – 6,45	6,50 – 6,45	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,60	76,30	Berubah	Tujuan Kota	Kota
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,48 – 6,10	6,48 – 6,10	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	74,07	74,07	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	22,12	22,12	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	89,11	89,11	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,56 - 36,92	35,56 - 36,92	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	0,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30	0,30	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21	116,21	Tetap	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91	7,91	Tetap	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92	9,92	Tetap	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00	2,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14	59,14	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54	70,54	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72	93,72	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1027,00	1027,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase pelayanan sampah	persen	70,12	70,12	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Pertumbuhan ekonomi	persen	3,70 – 4,20	5,50-5,80	Berubah	IKU Kota	Kota
	- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PENDIDIKAN						
	- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN						
	- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	90,00	90,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*)	persen	98,80	98,80	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	77,88	77,88	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	88,389	88,389	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1,09	1,09	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96,211	96,211	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	40,00	40,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	93,74	93,74	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS						
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	70,00	70,00	Tetap	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL						
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3,43	3,43	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN TENAGA KERJA						
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,26	52,26	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,51	28,51	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	630,00	630,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN						
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PERTANAHAN						
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	62,86	62,86	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,34	0,34	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	71,07	71,07	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	34,42	34,42	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	88,54	88,54	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	8,55	8,55	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,50	67,50	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN						
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28,00	28,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	2,95	2,95	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM						
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	8,12	8,12	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
URUSAN PENANAMAN MODAL						
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	204,28	204,28	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN KEBUDAYAAN						
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1,53	1,53	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PERPUSTAKAAN						
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK *Outcome*)	indeks	20,12	20,12	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	73,20	73,20	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,21	1,21	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	14,00	14,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK						
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	70,00	70,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PERSANDIAN						
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	I	I	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PILIHAN						
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15.141,00	15.141,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA						
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	580.000	580.000	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN						
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	247,58	247,58	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PERINDUSTRIAN						
- Pertumbuhan Industri	persen	0,09	0,09	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
URUSAN PERDAGANGAN						
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,71	26,71	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
UNSUR PENDUKUNG URUSN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	94,00	94,00	Tetap	IKU Renstra	Setda
SEKRETARIAT DPRD						
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN						
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	1,98	1,98	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN						
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	87,00	87,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40,00	40,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH						
- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	67,74	67,74	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	13,00	13,00	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
	- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C.	**ASPEK DAYA SAING**						
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,87	50,87	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	100,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72,69	72,69	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43	9,43	Tetap	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Air	indeks	35,36	35,36	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11	91,11	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks SPBE	indeks	2,95	2,95	Tetap	IKU Kota	Kota
	- IKM Kota	persen	83,64	83,64	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00	96,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks Merit System	indeks	240,00	240,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Nilai SAKIP Kota	skor	74,57	74,57	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Maturitas SPIP	nilai	3,40	3,40	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5,00	5,00	Tetap	IKU Kota	Kota

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2023

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
Dinas Pendidikan					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	83,97	83,97	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Kesehatan					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	90,00	90,00	Tetap
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	persen	80,00	80,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	persen	94,00	94,00	Tetap
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	persen	96,00	96,00	Tetap
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	persen	96,00	96,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	persen	92,00	92,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	Tetap
RSUD					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	65,00	65,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	45,00	45,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	persen	93,10	93,10	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	persen	88,39	88,39	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	40,00	40,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	11,07	11,07	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	68,47	68,47	Tetap
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	17,84	17,84	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	83,30	83,30	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	13,20	13,20	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	91,35	91,35	Tetap
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	291,47	291,47	Tetap
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	1.856,41	1.856,41	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14,48	14,48	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja,Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	persen	64,00	64,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen	58,00	58,00	Tetap
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	persen	56,69	56,69	Tetap
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	persen	7,80	7,80	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	persen	15,00	15,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Lingkungan Hidup					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0	20	Berubah
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	persen	40,95	40,95	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2,92	2,92	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	13,33	13,33	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	16,67	16,67	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75,00	75,00	Tetap
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	persen	0,28	0,28	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	83,53	83,53	Tetap
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	93,55	93,55	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	9,00	9,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	5,55	5,55	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	persen	23,99	23,99	Tetap
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	persen	33,33	33,33	Tetap
	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	persen	59,26	59,26	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	persen	96,35	96,35	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Perhubungan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	92,00	92,00	Tetap
	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0,44	0,44	Tetap
	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0,75	0,75	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
Dinas Komunikasi dan Informatika					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,00	3,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	2,80	2,80	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	1,00	Tetap
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2.500,00	2.500,00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	6,68	6,68	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16,09	16,09	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	persen	46,67	46,67	Tetap
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	45,00	45,00	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Kelautan dan Perikanan					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	1,00	1,00	Tetap
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	1,00	1,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1,00	1,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12,20	12,20	Tetap
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	2,00	2,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	persen	93,69	93,69	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	34,29	34,29	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	persen	92,20	92,20	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	persen	4,66	4,66	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	persen	11,00	11,00	Tetap
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	persen	31,98	31,98	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	30,30	30,30	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	40,00	40,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Pertanian dan Pangan					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4,40	4,40	Tetap
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100,00	100,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	83,20	83,20	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,67	55,67	Tetap
	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	191,91	191,91	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5,00	5,00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5,00	5,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	30,94	30,94	Tetap
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	58,31	58,31	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12,06	12,06	Tetap
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	75,42	75,42	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	81,25	81,25	Tetap
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	88,00	88,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	7,60	7,60	Tetap
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	77,99	77,99	Tetap
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	4,26	4,26	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persen	0,42	0,42	Tetap
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	23,93	23,93	Tetap
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	46,80	46,80	Tetap
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	20,43	20,43	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	24,00	24,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6,00	6,00	Tetap
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum,dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100,00	100,00	Tetap
Sekretariat DPRD					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
DAN FUNGSI DPRD	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100,00	100,00	Tetap
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100,00	100,00	Tetap
	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	73,00	73,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	82,23	82,23	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	persen	8,08	8,08	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	persen	5,00	5,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS berkembang karier	persen	50,00	50,00	Tetap
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90,00	90,00	Tetap
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	80,00	80,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
Inspektorat Daerah					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85,00	85,00	Tetap
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	nilai	3,00	3,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Utara					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Selatan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Barat					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Timur					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16,00	16,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	**2**	**3**	**4**	5	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2023

4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan arah kebijakan Nasional tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.8 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
				4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
				3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
				5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
				9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
				7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
				12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2022

Keterkaitan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pekalongan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Peraturan Presiden ini ditetapkan didasarkan kondisi bahwa percepatan pembangunan ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program, dan antar wilayah.

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 19 usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp 6.430 M. Adapun dari 19 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 15 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 4.100 M; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 630 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 200 M; dan (4) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp1.500 M. Program/kegiatan di Kawasan Petanglong yang terkait atau berdampak langsung dengan wilayah Kota Pekalongan, meliputi:

a. Pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan
b. Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan

c. Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab.Pekalongan dan Kota Pekalongan
d. Pengendalian banjir dan rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang
e. Penyempurnaan sistem banjir dan rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan
f. Pengembangan SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan
g. Pembangunan TPST Regional, Kab. Pekalongan
h. Pengembangan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan
i. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak, Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir dan rob di wilayah Kota Pekalongan telah, sedang dan akan terus dilaksanakan. Pada beberapa tahun lalu, Pemerintah Pusat telah membangun tanggul laut di wilayah Kota Pekalongan. Upaya penanganan banjir dan rob oleh Pemerintah Pusat saat ini terus dilanjutkan, terutama pembangunan bendung gerak, pembangunan *seawall* dan pembangunan parapet, yang diintegrasikan rencana pembangunan pelabuhan onshore. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pusdataru, Pemerintah Kota Pekalongan dan Program KOTAKU juga terus diarahkan dalam penanganan banjir dan rob yang disinkronkan dengan Pemerintah Pusat.

Pembangunan SPAM Regional Petanglong terus dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air minum Kota Pekalongan karena keterbatasan sumber air baku di wilayah Kota Pekalongan.

Pengembangan TOD Stasiun Pekalongan saat ini telah disusun Desain Pengembangan TOD Center dan menunggu untuk tahapan selanjutnya yang rencananya akan dilaksanakan oleh BUMN. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PT. KAI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian PUPR. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak, Kota Pekalongan saat ini telah disusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), selanjutnya menunggu untuk tahapan berikutnya.

Seluruh rencana implementasi progam dan kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tersebut, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, sekaligus mendorong penanganan banjir dan rob serta penyediaan prasarana sarana perkotaan yang semakin berkualitas di Kota Pekalongan. Penanganan banjir dan rob serta peningkatan infrastruktur dasar perkotaan merupakan isu strategis pembangunan Kota Pekalaongan. Peran Kota Pekalongan, dalam lingkup internal maupun eksternal, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi program dan kegiatan tersebut.

4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan untuk RKPD Tahun 2023 meliputi :

1. Bidang Pendidikan
    a. Peningkatan kualitas
    b. Penyesuaian sietem pendidikan pasca *COVID-19*
    c. Pengembangan pendidikan
    d. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah (rob)
2. Bidang Kesehatan
    a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

b. Peningkatan pelayanan RSUD Bendan
c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat
d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita
e. Kewaspadaan penyakit menular

3. Bidang Ekonomi Sosial
   a. Pelatihan dan *workshop* berbasis IT
   b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
   c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif
   d. Menyediakan kesempatan kerja
   e. Penanggulangan bahaya narkoba
   f. Penegakan peraturan perundang-undangan
   g. Tanggap & paska bencana
4. Bidang Infrastruktur
   a. Peningkatan keamanan akses jalan
   b. Pembangunan pasar Banjarsari
   c. Pembangunan drainase, normalisasi sungai
   d. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman
   e. Pelayanan pengolahan air limbah domestik
5. Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum
   a. Penertiban pengamen dkk
   b. Pelayanan pencegahan banjir
   c. Penataan perparkiran
   d. Penataan pedagang K5
   e. Penertiban praktik judi
6. Bidang Permukiman
   a. Program pembersihan permukiman
   b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
   c. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi relokasi
   d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
   a. Penyusunan APBD dilakukan dengan tepat waktu
   b. Peningkatan kapasitas ASN

4.2.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan Daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Walikota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Walikota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan Road Map SIDa yan melingkupi Kondisi SIDa saat ini, Tantangan dan peluang SIDa, Kondisi SIDa yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDa dan Rencana aksi penguatan SIDa.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDa yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDa, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDa dengan RPJMD,, melakukan sinkroniasi, harmonisasi dan sinergi SIDa, mempersiapkan rumusaan kebijakan penyelenggaraan SIDa, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDa,melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDa.

Dalam hal penyelenggaraan SIDa, Peraturan Walikota memperkuat munculnya Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDa secara rutin. Evaluasi Penyelenggaran SIDa dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDa dan sebagai tolak ukur kemajuan SIDa. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga focus menyelenggarakan fungsi kelitbangan pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompetisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada Tahun Perencanaan N+1. Pada Tahun 2022, telah dikompetisikan tema riset tentang penanganan banjir dan rob,

peningkatan kualitas air hidup, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Diharapkan dengan tema tersebut, kebijakan yang diambil telah berdasarkan riset yang cukup aktual.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Seiring dengan penyusunan perencanaan Tahun 2023 tentang berbagai program infrastuktur, Pemerintah Kota Pekalongan sedang menjajagi riset tentang mitigasi lahan pertanian pasca banjir dan rob, adaptasi dan mitigasi masyarakat kawasan terdampak banjir dan rob, pengolahan limbah batik melalui teknologi inovatif, dan lain-lain. Hal ini diperlukan sehingga ketika program infrastruktur telah dilaksanakan secara maksimal, proses selanjutnya bersama masyarakat telah siap diimplementasikan karena telah didukung dengan riset yang matang. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

Kota Pekalongan juga berusaha mendukung inovasi yang sudah disusun dengan menerapkannya secara berkelanjutan, dimana inovasi yang masih relevan akan terus digunakan dan dikembangkan lebih lanjut di tahun 2023, antara lain:

1. SIMANTAP BISA (Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis E-Presensi dan E-Kinerja) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang dikembangkan BKPSDM di Tahun 2021 masih relevan digunakan pada Tahun 2023 dengan pengembangan fitur-fitur lainnya serta penyesuaian pada aturan kepegawaian yang berlaku.
2. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa (SIM PBJ), yang disusun oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2020, masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan serta disesuaikan dengan update peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini.
3. Omahe Ndewe, Inovasi yang disusun di Tahun 2022 dan telah digunakan dalam pendataan rumah khususnya pada data infrastruktur, rencananya akan dikembangkan lebih lanjut di tahun 2023 untuk pendataan sosio-ekonomi dengan menggunakan basis data rumah yang telah didata di tahun 2022. Selanjutnya, secara bertahap pendataan mikro pada jenis data lainnya dapat dikembangkan melalui penambahan variable.
4. Aplikasi e-UMK (e-Uang Muka Kegiatan) yang pengembangannya dilakukan di tahun 2021, masih akan digunakan dan dikembangkan fitur-fiturnya lebih lanjut sesuai kebutuhan dan peraturan keuangan yang berlaku. Diharapkan juga aplikasi ini dapat digunakan oleh OPD lain untuk memudahkan bendahara dan bendahara pembantu dalam hal pengadministrasian kegiatan, dan memudahkan PPTK dan PA dalam monitoring capaian anggaran kegiatan.
5. Tools Cascading Kinerja, yang pada Tahun 2021 dalam rangka penyusunan struktur kinerja dari Visi-Misi Walikota sampai dengan sub kegiatan pada OPD, masih akan dikembangkan lebih lanjut pada fitur evaluasinya, tidak hanya pada aspek perencanaan. Hal ini akan mempermudah proses evaluasi atas kinerja dalam laporan kinerja kepala daerah ataupun kepala OPD.
6. Aplikasi Peminjaman Ruang Setda, yang disusun Bagian Umum Setda, masih relevan untuk pengelolaan peminjaman ruang di lingkungan Setda dan akan dikembangkan lebih lanjut pada peminjaman kendaraan, dan aset-aset setda lainnya sehingga dapat menunjang pelaksanaan koordinasi antar OPD menjadi lebih baik.
7. Aplikasi SISTRAMAS yakni aplikasi Pelayanan Tramtibumlinmas yang disusun Satpol PP pada tahun 2021 untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi dan sinergi

antar stakeholder tramtibumlinmas (Satpol PP, Kasi TRamtib Kecamatan, Kasi Tramtib Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Kader Siaga Tramtib, Linmas Kelurahan, Polsek, Koramil, dll), akan dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas, misalnya terkait pelaporan ganggunan anak-anak punk, anak jalanan, ODGJ serta diintegrasikan dengan sistem pengaduan tingkat kota (call center 112). .

8. SIMPOKAL (Sistem Manajemen Parkir Online Kota Pekalongan), yang disusun di tahun 2021 oleh Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan bank Jateng masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan di tahun 2023. Hal ini dilakukan karena system ini sudah mempermudah pelayanan dan terintegrasi dengan baik secara teknologi informasi maupun fasilitas perbankannya.
9. SIPEPOKMAS,merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021. Inovasi ini mempermudah penyebarluasan dan pemantauan harga pokok ke masyarakat. Inovasi ini masih relevan untuk dipertahankan dan diperluas jangkauan layanannya di tahun 2023, sesuai dengan kebutuhan dan target pelayanannya.
10. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Pekalongan, merupakan inovasi perluasan fitur JDIH di Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan di Tahun 2021. Inovasi ini cukup membantu pelayanan penyebarluasan informasi hukum pada masyarakat sehingga inovasi ini relevan untuk dipertahankan/dikembangkan serta diintegrasikan dengan system informasi lain di Bagian Hukum Setda.
11. SIEMON-KIR / SIM-PKB, merupakan inovasi dari Dinas Perhubungan pada tahun 2021. Layanan ini mempermudah proses KIR atau Pengujian Kendaraan Bermotor bagi masyarakat Kota Pekalongan. Layanan ini penggunanya cukup luas dan berpengaruh terhadap PAD sehingga inovasi ini relevan untuk dipertahankan di tahun 2023 serta dapat dikembangkan atau diperluas lagi sasaran sesuai dengan kebutuhan pada tahun-tahun mendatang.
12. Klinik SPIP adalah klinik konsultasi di Inspektorat yang disusun di tahun 2022, masih akan dikembangkan dengan memperluas cakupan dan materi layanan inspektorat selain SPIP.
13. Pelayanan Jasa Kependidikan Bagi Guru TPQ dan Madin di Kota Pekalongan merupakan inovasi pelayanan oleh bagian kesejahteraan umum sekretariat daerah Kota Pekalongan. Pelayanan jasa kependidikan bagi guru TPQ dan Madin di Kota Pekalongan dapat dilakukan secara online sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan. Guru TPQ dan Madin dapat mengajukan proposal permohonan intensif jasa secara online, yang kemudian akan diproses oleh petugas.
14. SAPA ORGANISASI adalah inovasi dari bagian organisasi untuk pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait tata laksana organisasi perangkat daerah dan kegiatan teknis lainnya dari bagian organisasi dengan tidak bertatap muka langsung namun melalui aplikasi website.
15. Sistem Informasi Nomor Register (sinoreg) adalah sistem pemberian nomor regulasi produk hukum di kota pekalongan, digunakan oleh internal bagian hukum, sistem ini juga akan bisa melacak proses penyusunan SK, perwal dan perda oleh OPD, sehingga dapat ditelusur status pemrosesan dokumen.
16. E-TPI merupakan aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan bekerjasama dengan Bank Jateng. Dengan aplikasi e-tpi pembayaran retribusi kapal dan peserta lelang di TPI kota Pekalongan menjadi lebih teratur dan

lebih tercatat, sehingga tidak hanya mempermudah pembayaran tapi juga meminimalkan penyalahgunaan.

17. e-Monitoring Pajak Daerah (EMot PakDe) yang merupakan inovasi dari BPKAD di tahun 2020 untuk monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti: tapping box dan sejenisnya. Inovasi ini masih relevan dan masih akan dikembangkan untuk penambahan fitur dan peraturan yang lebih tinggi sehingga keterjangkauan layanan dapat menjadi lebih luas.
18. Layanan Konseling Pendidikan (LAKONDIK) yang merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2020 untuk memberikan layanan untuk membantu pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus, masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut melalui perluasan stakeholder dan tambahan sasaran penggunanya. Dengan pelibatan sumber daya manusia berupa tenaga pegawai sebagai Guru Pendamping Khusus, mitra psikolog, lembaga kesehatan, dan dinas terkait yang lebih luas. juga sumber daya fasilitas berupa ruang konseling, ruang baca masyarakat dan ruang laktasi.
19. Dolan PAUD (Wadol Anak PAUD) merupakan Inovasi dari Dinas Pendidikan, yang artinya berkunjung atau bermain ke PAUD, yakni Kunjungan Bunda PAUD, Tim PAUD tingkat kota dan OPD ke sekolah PAUD di Kota Pekalongan untuk menerima keluh kesah dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran di tingkat PAUD.
20. Wadul Aladin (Wadul Aaf Salahudin) yang merupakan layanan pengaduan langsung ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dikembangkan Diskominfo pada Tahun 2021 masih dinilai sangat relevan untuk digunakan di Tahun 2023. Hal ini disebabkan popularitas penggunanya yang cukup tinggi.
21. Si BEMBI naik BEMO merupakan aplikasi yang disusun RSUD pada tahun 2021, melalui pengembangan terbaru adanya penambahan menu panggilan darurat yang langsung terhubung ke call center BEMBI (*Bendan Emergency Mobile*) yaitu merupakan layanan penjemputan pasien gawat darurat oleh tenaga yang berkompeten dimana pasien dijemput dengan ambulance BEMBI, langsung ditangani kegawatan ditempat untuk selanjutnya dibawa ke IGD RSUD Bendan. Aplikasi ini masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut mengingat respon penerima manfaat cukup baik dan jumlahnya cukup banyak.
22. Tombol Panik Ambulance Rakyat (*Panic Button*) yang dibangun tahun 2021 merupakan aplikasi berbasis android untuk peningkatan layanan kegawatdaruratan medis dengan menggunakan tombol panik yang keberadaannya merupakan Sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta di Kota Pekalongan. Aplikasi ini masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan melalui penambahan fitur sesuai dengan kebutuhan
23. E-Rekam Medis, yang merupakan aplikasi yang dikembangkan RSUD Bendan pada tahun 2021 sebagai upaya pelayanan kepada pasien dan dokter di lingkungan RSUD Bendan. Inovasi ini digunakan pada seluruh pasien sehingga kemanfaaatan penggunanya cukup luas. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
24. Saber AKI-AKB (Sapu Bersih Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi), yang merupakan inovasi kebijakan yang dibangun di Tahun 2020, merupakan inovasi yang cukup membantu pengurangan kasus kematian ibu dan bayi melalui screening atau pemeriksaaan yang terintegrasi antar stakeholder. Inovasi ini masih relevan untuk

dipertahankan dan dikembangkan serta diperluas jejaringnya, sehingga kemanfaatan yang diterima masyarakat lebih luas jangkauannya.

25. Aplikasi Siulan Mas (Sistem Informasi Usulan dan Pengaduan Masyarakat), yang dikembangkan di Tahun 2021 untuk meringkas alur birokrasi penanganan pengaduan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Sosial. Aplikasi ini masih relevan dipertahankan penggunaan dan pengembangan fitur-fitur baru sesuai kebutuhan.
26. Layanan APEL JOS yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil pada tahun 2021 untuk Layanan jemput bola KTP Eleketronik untuk Anak Sekolah/ Pelajar, Jompo dan Orang Sakit/Difabel) ini untuk membantu penduduk yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan KTP Elektronik. Layanan ini masih relevan untuk dipelihara keberlanjutannya untuk mempermudah pelayanan public bagi semua kalangan.
27. Sistem ApliKasi Perizinan Online Ringkas & Ekonomis (SAKPORE) yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan akan dikembangkan menjadi new SAKPORE (mulai tahun 2022) dengan fitur-fitur baru yang bermanfaat seperti: Peta Tata Ruang, Peta Reklame, Survey Online, Notifikasi Whatsapp gateway, terintegrasi dengan SisDMK Kementerian Kesehatan RI, Pengaduan Online danTanda Tangan Elektronik.
28. Si AaP yang merupakan inovasi Siap Antar Pelayanan (Si_aAP) dari Kecamatan Pekalongan Barat di tahun 2021 masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
29. Ra Kesel M'laku (ApaRAt KEcamatan SELatan Memberikan LAyanan Antar DoKUmen) yang dikembangkan di Tahun 2021, merupakan layanan dari kecamatan Pekalongan Selatan dalam mengantar jemput dokumen administrasi bagi masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
30. SeBaR_in merupakan inovasi non digital dari Kecamatan Pekalongan Barat di tahun 2021 untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Pekalongan Barat dan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat selama sepekan. Penyebarluasan informasi ini sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam tugas-tugas kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan publik. Inovasi ini masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
31. Silancar = SI AAP Lacak & Antar adalah inovasi pelayanan oleh Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2022 untuk mempermudah layanan adminduk dan non adminduk bagi warga di Kecamatan Pekalongan Utara dan memantau progress layanan secara online. Inovasi masih relevan dan akan dikembangan lebih lanjut fitur-fiturnya di Tahun 2023.
32. Rekom BBM, yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Tahun 2022 merupakan inovasi non digital yang mempermudah dan mempercepat nelayan untuk mendapat pelayanan mendapatkan surat Rekom Pembelian Jenis BBM Tertentu dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa dipungut biaya (gratis). Inovasi ini relevan untuk dikembangkan lebih lanjut.
33. Oops Mami (Omah Olah Pilah Sampah MAndiri dan berekonoMi), yang dikembangkan di Tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah sekaligus mengembangkan nilai ekonomi atas sampah. Inovasi ini sangat penting untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut mengingat problematika sampah di Kota Pekalongan sudah krusial.

34. Esa Pertama Kuljar merupakan inovasi kebijakan untuk penerapan kultur jaringan di Kota Pekalongan di tahun 2020 yang dikembangkan di Dinas Pertanian dan Pangan. Inovasi ini masih relevan untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
35. Bank Pekalongan sebagai salah satu BUMD Kota Pekalongan terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan sistem android untuk mempercepat pelayanan dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Salah satunya yaitu dengan Virtual Account (VA) Bank Pekalongan untuk mempermudah transaksi nasabah dari Bank Umum dan penggunaan QRIS Bank Pekalongan untuk pembayaran non tunai diberbagai macam tempat.
36. E-ticketing Museum Batik adalah sistem penjualan tiket secara online, menggunakan aplikasi sehingga penjualan tiket museum batik lebih terpantau dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung karena kemudahan membeli tiket.
37. QRIS ticket Museum Batik adalah metode pembayaran non tunai untuk pembelian tiket di museum batik, dapat meminimalkan penyalahgunaan penjualan tiket dan mempermudah pengunjung untuk pembelian tiket.
38. E-catalog Museum Batik merupakan upaya dari museum batik untuk membuat data base koleksi benda – benda yang terdapat didalam museum batik Kota Pekalongan. E-katalog ini dapat mempermudah akses bagi pengunjung untuk melihat koleksi museum batik secara online.
39. SIPOLOMAS (Sistem Informasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membuat database Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (sebagai sarana interkoneksi beberapa SKPD) dan meningkatkan pelayanan proses pembuatan ijin pendirian partai politik dan organisasi masyarakat.

Sebagai sebuah inovasi kebijakan, dukungan atas pelaksanaan ini dilakukan secara terencana dimana setiap tahun OPD terkait mendapatkan dukungan pendanaan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, ataupun koordinasi lainnya. Diharapkan inovasi ini terus ditingkatkan ruang lingkup data yang diintegrasikan, sehingga dapat terwujud data yang berkualitas, single, dapat dipertanggung jawabkan dan bernilai manfaat yang luas.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program Tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2023, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian SPM pendidikan sebesar 83,97 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

5.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan ketersediaan sarpras dan alat kesehatan di RSUD, penyediaan layanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, dan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP

rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 90 persen, persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar sebesar 80 persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 65 persen, persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 94 persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 45 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 persen, persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran sebesar 96 persen, dan persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 96 persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga sehat sebesar 92 persen.

5.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 93,10 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kota, untuk memperluas pelayanan Sambungan Rumah (SR). Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 88,39 persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dalam rangka menaikkan penanganan dan pengurangan sampah, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan sarana persampahan regional sebesar 40 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah dalam rangka menaikkan cakupan layanan layak dan cakupan layanan aman, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola air limbah di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*) sebesar 11,07 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi system drainase perkotaan dan drainase lingkungan, dalam rangka mengurangi luasan genangan, serta pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan pengelola drainase di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 68,47 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah penyelenggaraan perijinan bangunang gedung, guna terpenuhinya keandalan konstruksi bangunan gedung dan kelaikan fungsi bangunan gedung, dengan didukung oleh SDM penyelenggara bangunan gedung yang profesional. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio kepatuhan PBG kab/kota sebesar 17,84 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan kota untuk menaikkan tingkat kemantapannya. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kemantapan jalan kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 83,30 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan tenaga konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 13,20 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) dan legalisasi melalui Peraturan Walikota. Indikator yang akan dicapai yaitu yaitu persentase penetapan rencana tata ruang kab/kota sebesar 100 persen.

5.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), masyarakat terdampak bencana dan terdampak pembangunan infrastruktur kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 91,35 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah pengurangan luasan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu luas kawasan permukiman kumuh sebesar 291,47 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru diluar kawasan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 1.856,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah penyediaan PSU perumahan untuk mendukung aktifitas sehari-hari penghuni perumahan. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 14,48 persen.

5.1.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perda dan perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 64 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 58 Persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial sebesar 56,69 persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pemeliharaan taman makam pahlawan sebesar 100 persen.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 0,42 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 23,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 46,80 persen.

5.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan kabupaten/kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 5,55 persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

Indikator yang akan dicapai yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 23,99 persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 33,33 persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 persen.

5.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,40 persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 83,20 persen.

5.1.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 persen.

2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindaklanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tindak lanjut penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebesar 50 persen.

5.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

   Fokus program adalah penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) atas dokumen perencanaan jangka panjang/menengah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 20 persen.

2. **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

   Fokus program adalah peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 40,95 persen.

3. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

   Fokus program adalah peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,919 persen.

4. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

   Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

   Fokus program adalah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

6. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

   Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan hidup sebesar 50 persen.

7. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

   Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75 persen.

8. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

   Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengelolaan sampah sebesar 0,28 persen.

5.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 83,53 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,55 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 9 OPD.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 50 persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 59,26 persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,35 persen.

5.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 7,80 persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 15 persen.

5.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 92 persen, kinerja lalu lintas kab/kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, persentase peningkatan jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,75 persen.

5.1.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerinatah, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi dengan indeks sebesar 3,00.

5.1.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 30,94 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 58,31 persen.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan UMKM menjadi lebih mandiri dan peningkatan omzet UMKM. Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya usaha mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,06 persen.

5.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu penambahan peraturan fasilitas/insentif di Bidang penanaman modal yang Menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 1 dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2.500 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai invetasi baru pertahun sebesar Rp.6.680.000.000.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 100 persen.

5.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase organisasi kepemudaan yang dibina sebesar 93,69 persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggafraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor sebesar 34,29 persen.

5.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 persen.

5.1.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan sebesar 2,80 persen.

5.1.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya sebesar 100 persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 92,20 persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfataan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengunjung museum batik sebesar 4,66 persen.

5.1.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan

khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio pengunjung perpustakaan per tahun (penduduk usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 16,09.

5.1.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 46,67 Persen dan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 45,00.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah peningkatan produksi perikanan tangkap, dengan menaikkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, pemberdayaan nelayan kecil, serta kesiapan berperan serta dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan *on shore*. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI sebesar 1 persen dan peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar 1 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, dengan penyediaan sarana-prasarana pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudi daya kecil, serta penyiapan diversifikasi produk perikanan. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 1 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan jumlah pengusaha perikanan sebesar 12,20 persen dan pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

5.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah peningkatan pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 11 persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 31,98 persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 30,30 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 40 persen.

5.1.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.671.720.000 dan nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 191.907.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 50 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

5.1.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 75,42 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 81,25 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya sebesar 88 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,60 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 77,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) sebesar 4,26 persen.

5.1.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 20,43 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 24 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui sistem informasi industri nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengeloaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, persentase raperda menjadi peraturan daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, pertanian, perikanan, kelautan, ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 persen, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6 persen, dan persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa sebesar 100 persen.

5.1.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitasi anggota legislatif dan fasilitasi penjaringan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 persen, persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemsosbud sebesar 100 persen, persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur wilayah sebesar 100 persen.

5.1.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 8,08 persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengeloaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu indeks pengelolaan aset baik (persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5 persen.

5.1.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *assesment center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase PNS berkembang karier sebesar 50 persen, tingkat pelaporan kinerja ASN sebesar 100 persen, persentase keterisian jabatan sebesar 90 persen, dan persentase keterpenuhan formasi ASN sebesar 80 persen.

5.1.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

5.1.5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase litbang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, skor capaian nilai RiDA (SiDA) sebesar 73 persen, dan persentase pemberdayaan *stakeholder* kelitbangan sebesar 100 persen.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu level kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3,00.

5.1.7. Unsur Kewilayahan

5.1.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah timur sebesar 100 persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah timur sebesar 100 persen, serta persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja trantibum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja trantibum wilayah timur sebesar 100 persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan di kecamatan). indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah timur sebesar 100 persen.

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.1.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 100 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

5.1.9. Non Urusan

5.1.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen, persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan,

operasional dan kerumahtanggan sekretariat daerah sebesar 100 persen dan persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100 persen.

Tabel 5.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**247.492.279.000**	**232.740.615.000**	**227.268.150.000**							**279.562.877.000**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**159.435.929.000**	**156.836.320.000**	**150.523.492.000**						100 persen	**167.327.264.000**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**90.550.000**	**91.750.000**	**91.750.000**						100 persen	**149.683.000**	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 dokumen	3.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 dokumen	2.683.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	84.550.000	85.750.000	85.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	144.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen perhitungan capaian SPM Pendidikan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**157.665.631.000**	**155.043.922.000**	**148.726.352.000**						100 persen	**165.773.986.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		perangkat daerah																
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	157.132.881.000	154.506.372.000	148.190.802.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	14 kali	165.241.236.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	529.000.000	533.800.000	532.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	529.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.750.000	3.750.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	1 dokumen	3.750.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 persen	**88.767.000**	**101.167.000**	**101.167.000**						100 persen	**86.312.000**	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan				93 laporan	93 laporan	88.767.000	101.167.000	101.167.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	93 laporan	86.312.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**8.632.000**	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	1 kali	8.632.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**647.272.000**	**638.472.000**	**648.777.000**						100 persen	**559.124.000**	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	10.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	151.772.000	171.772.000	171.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	110.124.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				23 unit	18 unit									18 unit		
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	11.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	72.000.000	82.000.000	82.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	11 bulan	72.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	13.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	3.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				145 orang/kali	189 orang/kali	145.000.000	145.000.000	159.155.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	189 orang/kali	150.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi dukungan SPBE yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	240.000.000	201.200.000	197.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	190.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**664.941.000**	**686.741.000**	**666.741.000**						100 persen	**558.078.000**	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	7.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	320.841.000	320.841.000	300.841.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	272.778.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	337.100.000	358.900.000	358.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	278.300.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**269.268.000**	**269.268.000**	**283.705.000**						100 persen	**191.449.000**	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	69.268.000	69.268.000	83.705.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	50.449.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				4 unit	4 unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	4 unit	91.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara				12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Dindik	12 bulan	50.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Lainnya	rutin/berkala									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen		76,37 persen	83,97 persen	83,97 persen	**73.763.780.000**	**61.554.525.000**	**61.977.501.000**						83,97 persen	**96.484.096.000**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	100 persen		93.49 persen	97.5 persen	97.5 persen	**35.767.496.000**	**26.954.898.000**	**27.505.299.000**						97.5 persen	**38.861.916.000**	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun				5 ruang	5 ruang	550.000.000	700.000.000	700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	5 ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah KM/WC SD/MI yang dibangun				4 ruang	3 ruang	573.000.000	342.006.000	342.006.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	3 ruang	1.373.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD/MI yang direhab				7 ruang	8 ruang	6.600.000.000	1.026.552.000	1.026.552.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga	SD	8 ruang	5.749.467.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Dan Berdaya Saing	kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang kepala SD/MI yang direhab				1 ruang	1 ruang	371.330.000	47.522.000	47.522.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	1 ruang	1.660.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SD/MI yang direhab				3 ruang	3 ruang	2.150.000.000	215.000.000	215.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlin daskan nilai2 religiusitas.	SD	3 ruang	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah halaman sekolah yang diperbaiki				2 Pekerjaan	2 Pekerjaan	266.592.000	533.740.000	533.740.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	3. Pemerataan & pnngktn	SD	2 Pekerjaa	555.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Prasarana dan Utilitas Sekolah										Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		n		
		Jumlah KM/WC SD/MI yang direhab				5 ruang	5 ruang					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				5 ruang		
1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga sekolah				71 SD	71 SD	88.750.000	88.750.000	88.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	177.500.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				71 SD	71 SD	143.650.000	223.650.000	223.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	355.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				71 SD	2000 siswa	205.330.000	205.330.000	205.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	2000 siswa	300.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SD yang difasilitasi pemeliharaan rutin bangunan gedung sekolah				71 SD	71 SD	710.000.000	710.000.000	710.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	710.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				71 SD	5 SD	50.675.000	50.675.000	50.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter	SD	5 SD	106.500.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan				3 paket	3 paket	2.156.305.000	375.000.000	375.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	3 paket	2.156.305.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD Inklusi yang difasilitasi				4 SD	4 SD	306.000.000	342.200.000	342.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	4 SD	306.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD/MI yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				146 SD	0 SD									0 SD		
		Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				0 SD	103 SD									103 SD		
		Jumlah siswa yang difasilitasi Assesmen ABK				0 siswa	150 Siswa									150 Siswa		
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan RAPBS				103 SD	103 SD	125.000.000	105.000.000	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan,	SD	103 SD	142.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah sekolah yang difasilitasi pemanfaatan rapot pendidikan				103 SD	103 SD									103 SD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				6 kegiatan	5 kegiatan	430.000.000	430.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	5 kegiatan	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah lomba pesta siaga tingkat kecamatan yang dilaksanakan				10 lomba	10 lomba									10 lomba		
		Jumlah lomba pesta siaga tingkat kota yang dilaksanakan				10 lomba	10 lomba									10 lomba		
		Jumlah siswa berprestasi yang diberi apresiasi				50 siswa	50 siswa									50 siswa		
		Jumlah siswa dan pelatih yang difasilitasi pelatihan khusus minat, bakat dan kreatifitas				30 siswa	30 siswa									30 siswa		
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru pendamping khusus yang difasilitasi jasa pendidik				4 orang	4 orang	2.356.350.000	2.361.150.000	2.783.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	4 orang	2.684.800.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah pendidik BTQ SD/MI yang difasilitasi bantuan transport				1055 orang	1055 orang									1055 orang		
		Jumlah pengawas BTQ SD/MI yang difasiltasi bantuan transport				32 orang	32 orang									32 orang		
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen sekolah yang diselenggarakan				3 kegiatan	3 kegiatan	256.200.000	258.600.000	258.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan	SD	3 kegiatan	303.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Rakor/Raker Pengawas SD yang difasiitasi pelaksanaannya				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah SD Penggerak yang difasilitasi				8 sekolah	8 sekolah									8 sekolah		
		Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan PPDB				103 sekolah	103 sekolah									103 sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah SD yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				103 sekolah	103 sekolah							kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		103 sekolah		
		Jumlah Sekolah yang difasilitasi kegiatan Akreditasi				15 sekolah	103 sekolah									103 sekolah		
		Jumlah Siswa yang difasilitasi Pelatihan Batik				2300 siswa	2300 siswa									2300 siswa		
1.01.02. 2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri yang difasilitasi BOS				103 Sekolah	0 Sekolah	18.370.314.000	18.212.100.000	18.370.501.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Sekolah	12.922.744.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi BOS				0 sekolah	103 Sekolah					DAK Non Fisik - BOS Reguler				103 Sekolah		
1.01.02. 2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah bimtek/sosialisasi BOS SD yang diselenggarakan				1 kali	1 kali	58.000.000	48.000.000	48.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	1 kali	58.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan laporan BOS				103 sekolah	103 sekolah									103 sekolah		
1.01.02. 2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang dibangun				3 Ruang	3 Ruang	-	679.623.000	679.623.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna	SD	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen		82.04 persen	90 persen	90 persen	**25.285.768.000**	**20.390.054.000**	**20.371.429.000**						90 persen	**32.814.991.000**	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun				3 ruang	3 ruang	2.000.000.000	1.600.000.000	1.560.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 ruang	1.565.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab				8 ruang	8 ruang	4.477.700.000	1.330.529.000	1.515.079.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	8 ruang	5.200.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah ruang kelas yang direhab (Bankeu)				0 Ruang	3 ruang									3 ruang		
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhab				1 ruang	1 ruang	500.000.000	199.827.000	199.827.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 ruang	500.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP/MTs yang direhab				1 ruang	1 ruang	300.923.000	299.457.000	299.457.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 ruang	900.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah dokumen DED/perencanaan yang dihasilkan				0 Unit	1 Paket	609.600.000	1.910.000.000	1.680.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan,	SMP	1 Paket	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah halaman yang ditinggikan				1 pekerjaan	0 pekerjaan									0 pekerjaan		
		Jumlah KM/WC SMP/MTs yang direhab				4 paket	4 paket									4 paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah lapangan olahraga yang direhab				1 pekerjaan	1 pekerjaan							pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas		1 pekerjaan		
		Jumlah pagar yang direhab				1 pekerjaan	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
		Jumlah ruang BK yang direhab				1 ruang	1 ruang									1 ruang		
		Jumlah ruang kepala sekolah yang direhab				1 ruang	1 ruang									1 ruang		
		Jumlah ruang TU yang direhab				1 ruang	1 ruang									1 ruang		
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga sekolah				17 sekolah	17 sekolah	34.400.000	34.400.000	34.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	17 sekolah	170.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah laptop yang diadakan				14 unit	14 unit	170.449.000	170.449.000	168.499.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	14 unit	425.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SMP yang difasilitasi pemeliharaan bangunan gedung dan ruangan				3 sekolah	2 sekolah	135.200.000	135.200.000	94.825.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pnngktn komptensi	SMP	2 sekolah	850.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				3 sekolah	3 sekolah	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 sekolah	170.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang difasilitasi perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah				1325 siswa	1325 siswa	210.000.000	210.000.000	210.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1325 siswa	625.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat peraga siswa yang diadakan				0 Paket	1 Paket	-	125.000.000	309.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 Paket	1.332.144.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah alat TIK yang diadakan				1 Paket	1 Paket					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				1 Paket		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan penyusunan instrumen evaluasi yang dilaksanakan				0 kegiatan	3 Kegiatan	134.850.000	174.850.000	132.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 Kegiatan	172.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah mapel SMP yang difasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya				13 mapel	0 mapel									0 mapel		
		Jumlah siswa inklusi yang difasilitasi asesmen ABK					80 siswa									80 siswa		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				28 sekolah	29 sekolah									29 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan survei karakter				28 sekolah	29 sekolah									29 sekolah		
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan EDS				17 sekolah	0 sekolah	50.000.000	50.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn &	SMP	0 sekolah	51.000.000	Dinas Pendidikan
		jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan IRB (identifikasi, refleksi, benahi)					29 sekolah									29 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan RAPBS				28 sekolah	29 sekolah									29 sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				6 kegiatan	6 kegiatan	400.000.000	385.000.000	320.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	6 kegiatan	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PTK yang difasilitasi pelatihan khusus pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa				15 orang	0 orang									0 orang		
		Jumlah siswa berprestasi yang diberi apresisiasi				50 siswa	50 siswa									50 siswa		
		Jumlah siswa yang difasilitasi pelatihan khusus minat,bakat dan kreatifitas				30 siswa	15 siswa									15 siswa		
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru pendamping inklusi yang difasilitasi honor jasa pendidik				1 orang	1 orang	232.625.000	233.825.000	273.025.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn	SMP	1 orang	332.200.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah pendidik BTQ SMP/MTS yang difasilitasi bantuan transport				93 orang	93 orang									93 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jenjang sekolah peserta PPDB Online SMP				28 sekolah	24 sekolah	151.442.000	151.442.000	156.242.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	24 sekolah	496.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah aplikasi penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan (Aplikasi PPDB Online)				1 aplikasi	1 aplikasi									1 aplikasi		
		Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen sekolah yang diselenggarakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan	0 kegiatan									0 kegiatan		
		Jumlah pelaksanaan Rakor / Raker Pengawas SMP yang difasiitasi				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		jumlah sekolah penggerak yang difasilitasi				0 sekolah	4 sekolah									4 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				28 sekolah	0 sekolah									0 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				28 sekolah	0 sekolah									0 sekolah		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri yang difasilitasi dana BOS				17 sekolah	0 sekolah	14.396.686.000	13.271.900.000	13.271.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, &	SMP	0 sekolah	10.127.372.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi dana BOS				0 sekolah	29 Sekolah					DAK Non Fisik - BOS Reguler				29 Sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bimtek/sosialisasi BOS yang diselenggarakan				1 kali	1 kali	23.175.000	23.175.000	20.325.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 kali	23.175.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan SPJ BOS				28 sekolah	29 sekolah									29 sekolah		
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	100 persen		96.23 persen	98.4 persen	98.4 persen	**9.619.516.000**	**9.578.027.000**	**9.513.027.000**						98.4 persen	**17.760.032.000**	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendidikan				1 Lembaga	1 Lembaga	-	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 Lembaga	250.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang bermain anak yang dibangun				3 ruang	3 ruang	794.072.000	574.088.000	574.088.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna	PAUD PNF	3 ruang	555.123.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendidikan				9 Lembaga	9 Lembaga	1.095.035.000	1.194.365.000	1.194.365.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	9 Lembaga	900.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab				6 ruang	6 ruang					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				6 ruang		
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendidikan				2 Lembaga	2 Lembaga	-	95.000.000	95.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	2 Lembaga	340.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah TK Negeri yang menerima bantuan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD				4 TK	4 TK	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	PAUD PNF	4 TK	40.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi bantuan pemeliharaan rutin sarpras dan utilitas PAUD				4 TK	4 TK	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 TK	20.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan mebeler				4 TK	4 TK	80.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 TK	80.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga PAUD				4 TK	4 TK	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk	PAUD PNF	4 TK	10.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Saing	mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah laptop yang diadakan				5 Unit	5 Unit	80.000.000	95.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	5 Unit	80.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sarprasnya				0 lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
		Jumlah printer yang diadakan				7 Unit	7 Unit									7 Unit		
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	jumlah lembaga di fasilitasi kunjungan dolan paud				12 lembaga	0 lembaga	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	0 lembaga	127.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				800 siswa	800 siswa									800 siswa		
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah APE PAUD/TK yang diadakan				3 paket	3 paket	429.435.000	270.000.000	270.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pnngktn komptensi	PAUD PNF	3 paket	80.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
		Jumlah TK yang difasilitasi pengadaan alat TIK				3 TK	3 TK					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				3 TK		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	jumlah lembaga difasilitasi pendampingan IKM				0 sekolah	265 Sekolah	125.000.000	125.000.000	101.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	265 Sekolah	5.912.909.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah lembaga yang difasilitasi workshop guru pendamping khusus				50 Lembaga	50 Lembaga									50 Lembaga		
		Jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan				2 Lomba	4 Lomba									4 Lomba		
		Jumlah PAUD inklusi yang difasilitasi				4 TK	4 TK									4 TK		
		Jumlah PAUD yang di fasilitasi penyelenggaraan survey karakter dan survey tumbuh-kembang anak				250 TK	0 TK									0 TK		
		Jumlah PAUD yang di fasilitasi penyelenggaraan survey karakter dan survey tumbuh-kembang anak				0 Peserta Didik	200 Sekolah									200 Sekolah		
		Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi penerapan pendidikan karakter				100 Lembaga	100 Lembaga									100 Lembaga		
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	jumlah lembaga yang difasilitasi pendampingan EDS				0 Satuan Pendidikan	265 Satuan Pendidikan	68.250.000	68.250.000	68.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, &	PAUD PNF	265 Satuan Pendidikan	125.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan EDS				100 Sekolah	0 Sekolah									0 Sekolah		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan RAPBS				250 Sekolah	265 Sekolah									265 Sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah guru pendamping inklusi yang difasilitasi honor jasa pendidik dan memenuhi kualifikasi				2 Orang	2 Orang	50.424.000	52.824.000	52.824.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	2 Orang	48.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PAUD yang diselenggarakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	487.500.000	514.900.000	553.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 Kegiatan	780.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan									3 Kegiatan		
		Jumlah lembaga / organisasi mitra PAUD yang difasilitasi kegiatannya				4 Lembaga	4 Lembaga									4 Lembaga		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				2 Lembaga	0 Lembaga									0 Lembaga		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				250 Lembaga	265 Lembaga									265 Lembaga		
		Jumlah Rakor/Raker Pengawas/Penilik PAUD yang difasiitasi pelaksanaannya				2 Kegiatan	2 Kegiatan									2 Kegiatan		
		Jumlah sekolah penggerak yang difasilitasi pembinaan kelembagaan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidikan	5 Lembaga									5 Lembaga		
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang menerima dana hibah BOP PAUD				260 lembaga	256 lembaga	6.139.800.000	6.183.600.000	6.183.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn	PAUD PNF	256 lembaga	7.600.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah bimtek/sosialisai BOP PAUD yang diselenggarakan				1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	100.000.000	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 kegiatan	129.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				265 lembaga	256 lembaga									256 lembaga		
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	100 persen		25.49 persen	50 persen	50 persen	**3.091.000.000**	**4.631.546.000**	**4.587.746.000**						50 persen	**7.047.157.000**	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang kelas yang dibangun				1 ruang	1 ruang	-	910.000.000	910.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan,	PNF Kesetaraan	1 ruang	400.000.000	Dinas Pendidikan
		jumlah ruang TIK yang dibangun				0 Unit	1 ruang					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB				1 ruang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah KM/WC yang dibangun				1 pekerjaan	1 pekerjaan	-	97.680.000	148.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	1 pekerjaan	380.000.000	Dinas Pendidikan
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB						
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah ruang kelas yang direhab				3 Ruang	3 Ruang	-	489.066.000	489.066.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan
		Jumlah Ruang TIK yang dibangun				1 Ruang	0 Ruang					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB				0 Ruang		
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah mebeleir yang diadakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis	PNF Kesetaraan	3 Paket	105.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah SKB yang difasilitasi peralatan rumah tangga pendidikan nonformal/kesetaraan				1 SKB	1 SKB	20.000.000	20.000.000	7.805.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	1 SKB	20.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				400 siswa	250 siswa	100.000.000	100.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	250 siswa	300.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah alat keterampilan yang diadakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000	265.000.000	265.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan	PNF Kesetaraan	1 Paket	40.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah alat TIK yang diadakan				1 Paket	1 Paket					DAK Fisik-Bidang Pendidik				1 Paket		
		Jumlah lembaga yang difasilitasi alat praktik dan				0 Paket	1 Lembaga									1 Lembag		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		peraga kesetaraan										an-Reguler-SKB		kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		a		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah fasilitasi penyusunan instrumen evaluasi yang dilaksanakan				0 Peserta Didik	3 Kegiatan	350.000.000	350.000.000	225.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	3 Kegiatan	1.957.757.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Mapel Kesetaraan yang terfasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya				14 mapel	0 mapel									0 mapel		
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan Survai Karakter				14 lembaga	14 lembaga									14 lembaga		
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaran AKM dan UK				0 lembaga	14 Lembaga									14 Lembaga		
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaran AKM dan UPK				14 lembaga	0 lembaga									0 lembaga		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga yang difasilitasi pendampingan EDS				0 Satuan Pendidikan	14 Lembaga	19.500.000	19.500.000	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas	PNF Kesetaraan	14 Lembaga	19.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan EDS				14 lembaga	0 lembaga									0 lembaga		
		Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan RAPBS				14 lembaga	14 lembaga									14 lembaga		
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru pendamping inklusi PNF yang difasilitasi honor jasa pendidik				2 orang	3 orang	175.000.000	203.600.000	203.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna	PNF Kesetaraan	3 orang	248.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SKB yang difasilitasi penyediaan PTK nya				1 SKB	1 SKB									1 SKB		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PNF yang diselenggarakan				4 kegiatan	4 kegiatan	180.000.000	180.000.000	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	4 kegiatan	420.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Jumlah PNF yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				14 lembaga	14 lembaga									14 lembaga		
		Jumlah PNF yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				14 lembaga	14 lembaga									14 lembaga		
		Jumlah Rakor/Raker Penilik PNF yang difasiitasi pelaksanaannya				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan PNF yang menerima dana hibah BOP				14 lembaga	13 lembaga	2.089.000.000	1.879.200.000	2.066.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	13 lembaga	2.600.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bimtek/ sosialisasi BOP kesetaraan yang diselenggarakan				1 kegiatan	1 kegiatan	17.500.000	17.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn	PNF Kesetaraan	1 kegiatan	20.400.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah satuan PNF yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				14 lembaga	13 lembaga							kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		13 lembaga		
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen		100 persen	100,00 persen	100,00 persen	**238.044.000**	**238.044.000**	**198.044.000**						100,00 persen	**299.315.000**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**148.044.000**	**148.044.000**	**108.044.000**						100 persen	**144.861.000**	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun (perwa/sk kadin)				2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD dan SMP	2 dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen silabus muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan,	SD dan SMP	2 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal yang diadakan				1000 buku	500 buku	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD dan SMP	500 buku	60.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang disusun				2 dokumen	1 dokumen	48.044.000	48.044.000	8.044.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD dan SMP	1 dokumen	44.861.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**						100 persen	**154.454.000**	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang Tersusun				1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn	PAUD PNF	1 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang disusun (sk kadin)				1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang diadakan				1000 Buku	500 Buku	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	500 Buku	124.454.000	Dinas Pendidikan
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**14.054.526.000**	**14.111.726.000**	**14.569.113.000**						100,00 persen	**15.452.202.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	100 persen		54.75 persen	76.75 persen	76.75 persen	**14.054.526.000**	**14.111.726.000**	**14.569.113.000**						76.75 persen	**15.452.202.000**	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang disusun					1 Dokumen	997.480.000	1.017.480.000	1.017.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	941.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah dokumen kepegawaian (Sk, gaji berkala, kenaikan pangkat, dll) yang diterbitkan					1200 orang									1200 orang		
		Jumlah guru PAUD yang difasilitasi kegiatan diklat guru berjenjang (dasar/lanjut/mahir)				100 orang	50 orang									50 orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi kegiatan pemilihan/seleksi guru berprestasi				50 orang	25 orang									25 orang		
		jumlah guru yang difasilitasi pendidikan profesi guru					4 Orang									4 Orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi program guru penggerak				250 orang	150 orang									150 orang		
		Jumlah Kompetensi Kepala Sekolah yang ditingkatkan				10 orang	30 orang									30 orang		
		Jumlah Kompetensi Pengawas/Penilik yang ditingkatkan				25 orang	25 orang									25 orang		
		Jumlah penerbitan dokumen kepegawaian (SK gaji berkala, kenaikan pangkat, dll)				1200 orang	0 orang									0 orang		
		Jumlah penyelesaian kasus disiplin PTK				3 orang	3 orang									3 orang		
		Jumlah PTK Penerima bantuan S1/S2				25 orang	25 orang									25 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi dalam apresiasi PTK PAUD dan Dikmas				50 orang	25 orang									25 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi				200 orang	550 orang									550 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah PTK yang difasilitasi KMD dan atau KML				90 orang	75 orang									75 orang		
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru terfasilitasi PAK nya				750 orang	750 orang	13.057.046.000	13.094.246.000	13.551.633.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	750 orang	14.511.202.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah pengawas/penilik yang difasilitasi PAK nya				30 orang	28 orang									28 orang		
		Jumlah PTK difasilitasi harlindung				1501 orang	1426 orang									1426 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi penerbitan dokumen kepegawaian nya (SK kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, dokumen kontrak				1200 orang	0 orang									0 orang		
		Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan jasa kinerja				75 SD/MI	76 SD/MI									76 SD/MI		
		Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja				21 SMP/MTs	23 SMP/MTs									23 SMP/MTs		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**98.531.785.000**	**107.006.231.000**	**112.513.606.000**							**103.624.644.030**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**58.030.839.000**	**57.726.564.000**	**59.256.852.000**						100 persen	**58.537.365.005**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**						100 persen	**24.850.000**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	2 dokumen	2.750.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinkes	2 dokumen	1.650.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
1.02.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	20.450.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.02.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**55.748.383.000**	**55.426.708.000**	**57.345.750.000**						100 persen	**56.635.683.000**	
1.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	55.668.288.000	55.341.813.000	57.260.855.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	14 Bulan	56.553.633.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	78.595.000	83.395.000	83.395.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	80.400.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	1 dokumen	1.650.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**10.000.000**	
1.02.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 Kali	1 Kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	1 Kali	10.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**382.876.000**	**382.876.000**	**383.730.000**						100 persen	**542.091.005**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		daerah																
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	5.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	132.067.000	132.067.000	132.067.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	208.436.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				25 unit	11 unit									11 unit		
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	8.455.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	90.809.000	90.809.000	79.459.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	11 bulan	95.700.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	22.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	2.500.005	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang/kali	100 orang/kali	125.000.000	125.000.000	137.204.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	100 orang/kali	200.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.176.956.000**	**1.098.856.000**	**909.648.000**						100 persen	**780.782.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah																
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	400.000	400000	400000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	400	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	725.383.000	625.383.000	435.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	327.409.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	451.173.000	473.073.000	473.865.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	452.973.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**687.124.000**	**787.124.000**	**586.724.000**						100 persen	**543.959.000**	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	400.094.000	400.094.000	290.094.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	241.749.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	3 unit	222.030.000	322.030.000	231.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	3 unit	222.030.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	80.180.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90,00 persen		70,00 persen	80,00 persen	80,00 persen	**39.623.581.000**	**47.393.348.000**	**51.376.335.000**						80,00 persen	**42.394.147.025**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**12.921.747.000**	**19.341.186.000**	**19.350.351.000**						100 persen	**10.007.751.275**	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	-	4.763.320.000	4.763.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					0 Unit	5.092.299.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Unit	1.439.119.725	Dinas Kesehatan
		Jumlah unit puskesmas yang direhab				1 unit	0 unit					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				0 unit		
		Jumlah unit puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar				1 unit	0 unit									0 unit		
		Jumlah unit Pustu yang dikembangkan					1 Unit									1 Unit		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah lokasi puskesmas/pustu yang direhab				6 lokasi	6 lokasi	500.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	6 lokasi	1.478.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi pengolahan limbah yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit	0 Unit	530.064.000	284.214.000	284.214.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Unit	100.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				1 Unit	2 Unit					DAK Fisik-Bidang				2 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan						
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAK)				1 paket	44 unit/set	2.401.893.000	4.887.602.000	4.887.602.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	44 unit/set	2.256.950.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAU)				6 jenis	0 jenis					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				0 jenis		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					0 Unit					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				0 Unit		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah BMHP yang diadakan (DAU)				1 paket	0 pekerjaan	1.602.000.000	2.252.500.000	2.252.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 pekerjaan	2.152.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah jasa pemusnahan obat kadaluarsa yang diadakan				1 paket	1 pekerjaan					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 pekerjaan		
		Jumlah mobil distribusi berpendingin yang diadakan				1 unit	0 unit									0 unit		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					0 Paket									0 Paket		
		Jumlah obat-obatan yang diadakan (DAK)				1 paket	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
		Jumlah obat-obatan yang diadakan (DAU)				1 paket	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan					0 Paket	2.595.491.000	4.762.254.000	4.771.419.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Paket	2.121.681.550	Dinas Kesehatan
		Jumlah BMHP gula darah yang diadakan(DAK)				1 pekerjaan	1 pekerjaan					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 pekerjaan		
		Jumlah BMHP yang diadakan (DAK)				1 pekerjaan	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
		Jumlah Catride TCM yang diadakan (DAK)				1 pekerjaan	0 pekerjaan									0 pekerjaan		
		Jumlah RO dan BHP Skrinning HIV dengan Reagen Sifilis yang diadakan(DAK)				1 pekerjaan	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					60 Unit	200.000.000	222.496.000	222.496.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	60 Unit	460.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda, Dinkes) yang dikalibrasi				60 Unit	0 Unit									0 Unit		
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda) yang diservice				38 Jenis	0 Jenis									0 Jenis		
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Paket	0 Paket	-	68.800.000	68.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Paket	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Lainnya													pencegahan dan pengendalian penyakit.				
		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					12 Kali					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Kali		
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**26.598.934.000**	**27.949.262.000**	**31.923.084.000**						100 persen	**32.178.255.750**	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah buku KIA yang dibagikan ke ibu hamil				5000 Buku	0 Buku	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Buku	190.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil (IKK Output)					6555 set									6555 set		
		Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				6298 Orang	6555 Orang									6555 Orang		
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang									0 Orang		
		Jumlah kasus AKI				6 Kasus	6 Kasus									6 Kasus		
		Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan				5862 Orang	6262 Orang									6262 Orang		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM/IKK Outcome)				5844 bayi	5952 bayi	26.000.000	26.000.000	26.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	5952 bayi	26.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kese hatan bayi baru lahir (IKK Output) (IKK Output)					5952 set									5952 set		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				21584 Anak	31642 Anak	139.984.000	72.090.000	72.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	31642 Anak	139.984.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah balita usia sampai 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal				72 Anak	69 Anak									69 Anak		
		Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal				75 Anak	56 Anak									56 Anak		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar (IKK Output)				52 Pak Kartu MTBS	31642 set									31642 set		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				56000 Anak	28286 Anak	132.189.000	132.189.000	132.189.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	28286 Anak	129.666.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk anak usia pendidikan dasar (IKK Output)				5000 Set	28286 Set									28286 Set		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif (IKK Output) (IKK Output)					207789 Orang	127.293.000	127.293.000	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pence gahan dan pengen dalian penyakit.	Masyarakat	207789 Orang	44.950.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				207789 orang	207789 orang									207789 orang		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara usia 60 tahun ke atas (IKK Output)				1095 unit	34492 set	36.071.000	36.071.000	36.071.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	34492 set	33.609.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				30994 Orang	34492 Orang									34492 Orang		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi (IKK Output) (IKK Output)					76872 set	8.830.000	8.830.000	8.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	76872 set	8.830.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				76872 orang	76872 orang									76872 orang		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (IKK Output)					6446 set	8.550.000	8.550.000	8.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Masyarakat	6446 set	8.550.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
		Jumlah penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				6446 Orang	6446 Orang									6446 Orang		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (IKK Output) (IKK Output)					785 set	15.380.000	15.380.000	15.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	785 set	15.380.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita ODGJ mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				785 orang	785 orang									785 orang		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (IKK Output) (IKK Output)				0 Orang	5391 set	41.305.000	41.305.000	41.305.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	5391 set	41.305.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				5391 Orang	5391 Orang									5391 Orang		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (IKK Output) (IKK Output)				0 Orang	12563 set	33.105.000	33.105.000	33.105.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12563 set	33.105.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				12563 Orang	12563 Orang									12563 Orang		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah anak stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita yang ditangani				1450 Anak	846 Anak	230.000.000	2.003.025.000	2.003.025.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	846 Anak	544.218.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah balita gizi buruk yang ditangani				38 Anak	59 Anak					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-				59 Anak		
		Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI ekslusif				2440 Anak	2620 Anak									2620 Anak		
		Jumlah bumil KEK yang mendapatkan suplemen gizi				720 Orang	776 Orang									776 Orang		
		Jumlah Dokumen Hasil					0									0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Dokumen					Penguatan Intervensi Stunting				Dokumen		
		Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal				70 Orang	41 Orang									41 Orang		
1.02.02. 2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Calon Jamaah Haji yang diukur Kebugaran Jasmaninya				280 orang	280 orang	65.500.000	65.500.000	65.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	280 orang	78.750.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja di Perkantoran yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah lokasi yang dilakukan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Puskesmas				14 lokasi	14 lokasi									14 lokasi		
		Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan Kesehatan Kerja di Perusahaan (GP2SP)				10 Lokasi	10 Lokasi									10 Lokasi		
		Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan Kesehatan Kerja Informal (Pos UKK)				15 Lokasi	15 Lokasi									15 Lokasi		
		Jumlah orang yang diukur Kebugaran Jasmaninya				60 Orang	60 Orang									60 Orang		
1.02.02. 2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pembinaan Higiene Sanitasi TUPM yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	720.000.000	720.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Kegiatan	228.212.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan Pengelolaan Sampah Medis yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				12 Kali		
		Jumlah kegiatan Pengendalian lalat di TPA yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan Penggerakan Implementasi STBM yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan Survei Kualitas Air Minum RT (SKAMRT) yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah lokasi desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)				27 Lokasi	27 Lokasi									27 Lokasi		
		Jumlah lokasi Fasyankes Ramah Lingkungan				23 Lokasi	23 Lokasi									23 Lokasi		
1.02.02.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil					0	1.321.645.000	1.423.010.000	1.423.010.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Masyarakat	0	1.347.034.750	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.02.18	Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		Dokumen		Kesehatan
		Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen		
		Jumlah kasus Covid 19 yang dikunjungi				100 Kasus	0 Kasus									0 Kasus		
		Jumlah kegiatan BOK kefarmasian yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0 Kegiatan									0 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang dilaksanakan				3 Kegiatan	0 Kegiatan									0 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				29 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
		Jumlah Kelurahan ODF/SBS				27 Kelurahan	0 Kelurahan									0 Kelurahan		
		Jumlah kelurahan yang dilakukan Surveilans Kualitas Air Minum RT (SKAMRT)				27 Kelurahan	27 Kelurahan									27 Kelurahan		
		Jumlah lokasi yang dilakukan Penyehatan Lingkungan Fasyankes				24 Lokasi	24 Lokasi									24 Lokasi		
		Jumlah lokasi yang ditinjau Kualitas Makanan Minuman Masyarakat (Pilar 3 STBM)				280 Lokasi	280 Lokasi									280 Lokasi		
		Jumlah penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan				17 Kali	14 Kegiatan									14 Kegiatan		
1.02.02. 2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan				53 Kasus	34 Kasus	670.735.000	470.735.000	470.735.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	34 Kasus	1.056.020.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kasus Hepatitis B				45 Kasus	45 Kasus									45 Kasus		
		Jumlah kasus HIV/AIDS				100 Kasus	115 Kasus									115 Kasus		
		Jumlah kasus obesitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Fasyankes				59385 Jiwa	2633 Jiwa									2633 Jiwa		
		Jumlah kasus TB Paru BTA (+)				890 Kasus	1000 Kasus									1000 Kasus		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular yang dilaksanakan				14 Lokasi	14 Lokasi									14 Lokasi		
		Jumlah kegiatan penyemprotan Fogging Focus di wilayah Kota Pekalongan				100 Kali	100 Kali									100 Kali		
		Jumlah monev program penyakit tidak menular yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah penduduk umur > atau = 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg				76872 Jiwa	76872 Jiwa									76872 Jiwa		
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias MR				213 Kelas	203 Kelas									203 Kelas		
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias Td				255 Kelas	203 Kelas									203 Kelas		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV				179 Orang	211 Orang									211 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM				161 Orang	211 Orang									211 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi				161 Orang	211 Orang									211 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita ODGJ berat				161 Orang	211 Orang									211 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC				161 Orang	211 Orang									211 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun				291 Orang	0 Orang									0 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-59 tahun					329 Orang									329 Orang		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					0 Dokumen	20.500.000.000	21.069.693.000	25.419.518.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	25.850.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah masyarakat penerima bantuan Premi				55716 Orang	180000 Orang					DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				180000 Orang		
		Jumlah Rapat Koordinasi Program JKN				4 Kali	4 Kali					Dana Insentif Daerah				4 Kali		
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS				12 Bulan	12 Bulan	51.483.000	51.483.000	51.483.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	82.840.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bulan penyediaan belanja operasional Puskesmas, IFK dan Labkesda				12 Bulan	12 Bulan	1.380.039.000	1.477.353.000	1.263.443.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	1.323.713.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				4 Orang	4 Orang									4 Orang		
		Jumlah jasa tenaga PSC 119 dan tenaga Pusdalu				28 Orang	28 Orang									28 Orang		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan & Penilaian Mutu Eksternal (PPME)				14 Puskesmas	14 Puskesmas	806.132.000	0	460.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	14 Puskesmas	802.626.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kegiatan Program Haji				2 Kali	2 Kali	42.650.000	42.650.000	42.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Masyarakat	2 Kali	76.420.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit				52 Kali	52 Kali									52 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**						100 persen	**74.200.000**	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIMKES				12 Bulan	12 Kali	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Kali	74.200.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**72.900.000**	**72.900.000**	**72.900.000**						100 persen	**133.940.000**	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pelaksanaan visitasi perijinan fasyankes				10 Kali	15 Kali	72.900.000	72.900.000	72.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	15 Kali	133.940.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah pelaksana kegiatan P3K dan bencana				800 Orang	800 Orang									800 Orang		
		Jumlah pembinaan fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta				69 Kali	150 Kali									150 Kali		
		Jumlah pertemuan fasilitasi peningkatan mutu fasyankes				11 Kali	11 Kali									11 Kali		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	60,00 persen		35,00 persen	45,00 persen	45,00 persen	**91.932.000**	**1.024.333.000**	**1.024.333.000**						45,00 persen	**228.782.000**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**91.932.000**	**1.024.333.000**	**1.024.333.000**						100 persen	**228.782.000**	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen SDMK yang disusun (Profil SDM Kesehatan dan Renbut)				3 Dokumen	3 Dokumen	91.932.000	1.024.333.000	1.024.333.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	0 Dokumen	228.782.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penerbitan rekomendasi ijin tenaga kesehatan tepat waktu (sesuai SOP)				540 orang	800 orang					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				800 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100,00 persen		92,00 persen	96,00 persen	96,00 persen	**662.653.000**	**689.206.000**	**683.306.000**						96,00 persen	**680.722.000**	
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen									100,00 persen		
		Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	97,00 persen		95,00 persen	96,00 persen	96,00 persen									96,00 persen		
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**106.630.000**	**86.734.000**	**83.234.000**						100 persen	**115.562.000**	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasyanfar yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				109 Lokasi	109 Lokasi	106.630.000	86.734.000	83.234.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	109 Lokasi	115.562.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat daerah berdasarkan SK Walikota				2 Orang	2 Orang									2 Orang		
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**491.023.000**	**537.472.000**	**537.472.000**						100 persen	**491.023.000**	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT				140 Lokasi	160 Lokasi	491.023.000	537.472.000	537.472.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Industri Rumah Tangga	160 Lokasi	491.023.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan post market				100 Lokasi	60 Lokasi					DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				60 Lokasi		
		Jumlah peserta Bimtek Kader Keamanan Pangan				100 orang	60 orang									60 orang		
		Jumlah peserta bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP				0 Dokumen	160 orang									160 orang		
		Jumlah peserta bimtek penilaian mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku usaha					75 orang									75 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah peserta KIE Keamanan Pangan				300 Orang	0 Orang									0 Orang		
		Jumlah sampling dan pengujian PIRT				40 Sampel	40 Sampel									40 Sampel		
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan	97 persen		95 persen	95 persen	95 persen	**65.000.000**	**65.000.000**	**62.600.000**						95 persen	**74.137.000**	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengawasan dan Pemeriksaan Makanan / Jajanan di Sekolah dan Masyarakat				200 Lokasi	200 Lokasi	65.000.000	65.000.000	62.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	TPM & DAM	200 Lokasi	74.137.000	Dinas Kesehatan
		Pengawasan Penerbitan SLHS TPM				40 Lokasi	40 Lokasi									40 Lokasi		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Tangga Sehat	95,00 persen		90,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	**122.780.000**	**172.780.000**	**172.780.000**						92,00 persen	**1.783.628.000**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	35 persen		30 persen	32 persen	32 persen	**60.000.000**	**110.000.000**	**110.000.000**						32 persen	**1.662.912.000**	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah bimtek program promosi dan pemberdayaan kesehatan				14 Lokasi	2 kali	60.000.000	110.000.000	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 kali	1.662.912.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah lokasi monev poskestren				7 Lokasi	7 Lokasi									7 Lokasi		
		Jumlah monev program promosi dan pemberdayaan kesehatan				6 Kegiatan	10 Kali									10 Kali		
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**62.780.000**	**62.780.000**	**62.780.000**						100 persen	**120.716.000**	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Lomba PHBS Tingkat Kota Pekalongan yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	62.780.000	62.780.000	62.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn	Masyarakat	1 Kali	120.716.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah Pembuatan film dalam rangka promosi kesehatan dan peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Penyebarluasan informasi kesehatan dalam rangka peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat melalui berbagai media yang dilaksanakan				22 Kali	22 Kali									22 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**107.116.441.000**	**118.826.868.000**							**110.884.927.200**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**0**	**85.090.100.000**	**96.813.985.000**						100 persen	**88.717.938.000**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen		100 persen	**0**	**11.000.000**	**9.800.000**						100 persen	**11.000.000**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	6.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	12 bulan	8.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP				2	2									2		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang disusun (penetapan dan perubahan)				dokumen	dokumen									dokumen		
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen		100 persen	**0**	**54.100.000**	**54.100.000**						100 persen	**50.055.000**	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	47.800.000	52.600.000	52.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	12 bulan	48.555.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	1 dokumen	1.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen		100 persen	**0**	**25.000.000**	**21.100.000**						100 persen	**810.883.000**	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				20 orang/kali	24 orang/kali	25.000.000	25.000.000	21.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	24 orang/kali	810.883.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen		100 persen	**0**	**85.000.000.000**	**96.728.985.000**						100 persen	**87.846.000.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					0 Unit Kerja	85.000.000.000	85.000.000.000	96.728.985.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	0 Unit Kerja	87.846.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	72,50 persen		60,00 persen	65,00 persen	65,00 persen	**0**	**21.953.650.000**	**21.941.992.000**						65,00 persen	**22.104.553.200**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100 persen		100 persen		100 persen	**0**	**21.799.900.000**	**21.799.910.000**						100 persen	**21.769.903.200**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	9.238.750.000	13.698.000.000	13.698.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarny	1 Unit	13.617.400.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000	410.000.000	410.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarny	1 Unit	410.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan				2 paket	92 unit	9.000.000.000	7.691.900.000	7.691.910.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarny	92 unit	7.742.503.200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan						
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen		100 persen		100 persen	**0**	**43.750.000**	**32.632.000**						100 persen	**224.650.000**	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah audit maternal/neonatal yang dilaksanakan				4 kali	3 kali	43.750.000	43.750.000	32.632.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	3 kali	43.750.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah audit near miss maternal/neonatal yang dilaksanakan				4 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah drill emergency / refresh ilmu maternal/neonatal yang dilaksanakan				4 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan jejaring pembinaan rujukan yang dilaksanakan				2 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Penyuluhan Laktasi dan Senam Nifas yang dilaksanakan				6 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah sosialisasi SPO maternal/neonatal yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100 persen		100 persen		100 persen	**0**	**110.000.000**	**109.450.000**						100 persen	**110.000.000**	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	110.000.000	110.000.000	109.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 dokumen	110.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER**	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang	60,00 persen		35,00 persen	45,00 persen	45,00 persen	**0**	**72.691.000**	**70.891.000**						45,00 persen	**62.436.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAYA MANUSIA KESEHATAN	dipersyaratkan																
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase perawat dan bidan yang terkredensial	100 persen		100 persen	0 persen	100 persen	**0**	**51.191.000**	**50.291.000**						100 persen	**48.663.500**	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan				12 bulan	12 bulan	34.891.000	36.191.000	36.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	34.891.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/rekredensial				100 orang	100 orang	15.000.000	15.000.000	14.046.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	100 orang	13.772.500	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	20 persen		20 persen		40 persen	**0**	**21.500.000**	**20.600.000**						40 persen	**13.772.500**	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi				100 orang	100 orang	21.500.000	21.500.000	20.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	100 orang	13.772.500	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.541.345.000**	**3.527.052.000**	**3.677.688.000**							**3.541.345.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.765.245.000**	**2.635.245.000**	**2.785.881.000**						100 persen	**2.765.245.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.765.245.000**	**2.635.245.000**	**2.785.881.000**						100 persen	**2.765.245.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	2.765.245.000	2.635.245.000	2.785.881.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	2.765.245.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**776.100.000**	**891.807.000**	**891.807.000**						90,00 persen	**776.100.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**776.100.000**	**891.807.000**	**891.807.000**						100 persen	**776.100.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	776.100.000	891.807.000	891.807.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 kegiatan	776.100.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 kegiatan	9 kegiatan									9 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 kegiatan	7 kegiatan									7 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.453.691.000**	**1.581.473.000**	**1.887.836.000**							**1.291.809.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**825.791.000**	**825.791.000**	**1.132.154.000**						100 persen	**846.436.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**825.791.000**	**825.791.000**	**1.132.154.000**						100 persen	**846.436.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	825.791.000	825.791.000	1.132.154.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	846.436.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**627.900.000**	**755.682.000**	**755.682.000**						90,00 persen	**445.373.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**627.900.000**	**755.682.000**	**755.682.000**						100 persen	**445.373.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	627.900.000	755.682.000	755.682.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 kegiatan	445.373.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya				9	9									9		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				Kegiatan	Kegiatan							penyakit.		Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 Kegiatan	8 Kegiatan									8 Kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.878.816.000**	**2.006.634.000**	**2.414.976.000**							**1.633.806.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.035.916.000**	**1.035.916.000**	**1.444.258.000**						100 persen	**1.035.916.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.035.916.000**	**1.035.916.000**	**1.444.258.000**						100 persen	**1.035.916.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	1.035.916.000	1.035.916.000	1.444.258.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	1.035.916.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**842.900.000**	**970.718.000**	**970.718.000**						90,00 persen	**597.890.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**842.900.000**	**970.718.000**	**970.718.000**						100 persen	**597.890.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	842.900.000	970.718.000	970.718.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 kegiatan	597.890.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo					1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 Kegiatan	9 Kegiatan									9 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 Kegiatan	7 Kegiatan									7 Kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.415.848.000**	**1.623.894.000**	**2.039.533.000**							**1.198.626.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**615.666.000**	**700.000.000**	**1.115.639.000**						100 persen	**631.058.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**615.666.000**	**700.000.000**	**1.115.639.000**						100 persen	**631.058.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	615.666.000	700.000.000	1.115.639.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	631.058.000	Dinas Kesehatan
											Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**800.182.000**	**923.894.000**	**923.894.000**						90,00 persen	**567.568.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**800.182.000**	**923.894.000**	**923.894.000**						100 persen	**567.568.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan	800.182.000	923.894.000	923.894.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	3 kegiatan	567.568.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen					1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				19 kegiatan	19 kegiatan									19 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 kegiatan	7 kegiatan									7 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				12 kegiatan	12 kegiatan									12 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.556.554.000**	**1.572.375.000**	**1.777.849.000**							**1.556.554.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**930.854.000**	**930.854.000**	**1.136.328.000**						100 persen	**930.854.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**930.854.000**	**930.854.000**	**1.136.328.000**						100 persen	**930.854.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	930.854.000	930.854.000	1.136.328.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	930.854.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**625.700.000**	**641.521.000**	**641.521.000**						90,00 persen	**625.700.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**625.700.000**	**641.521.000**	**641.521.000**						100 persen	**625.700.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	625.700.000	641.521.000	641.521.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	625.700.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 kegiatan	9 kegiatan									9 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 kegiatan	7 kegiatan									7 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.518.723.000**	**1.588.518.000**	**1.815.950.000**							**1.540.681.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**878.323.000**	**878.323.000**	**1.105.755.000**						100 persen	**900.281.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**878.323.000**	**878.323.000**	**1.105.755.000**						100 persen	**900.281.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	878.323.000	878.323.000	1.105.755.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	900.281.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**640.400.000**	**710.195.000**	**710.195.000**						90,00 persen	**640.400.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**640.400.000**	**710.195.000**	**710.195.000**						100 persen	**640.400.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	640.400.000	710.195.000	710.195.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	640.400.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 kegiatan	9 kegiatan									9 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat				7 kegiatan	7 kegiatan									7 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		tingkat puskesmas yang dilaksanakan																
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.666.823.000**	**1.610.280.000**	**1.918.839.000**							**1.666.823.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**878.323.000**	**878.323.000**	**1.186.882.000**						100 persen	**878.323.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**878.323.000**	**878.323.000**	**1.186.882.000**						100 persen	**878.323.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	878.323.000	878.323.000	1.186.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	878.323.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**788.500.000**	**731.957.000**	**731.957.000**						90,00 persen	**788.500.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**788.500.000**	**731.957.000**	**731.957.000**						100 persen	**788.500.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	788.500.000	731.957.000	731.957.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	788.500.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya				9	9									9		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				kegiatan	kegiatan									kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				8 kegiatan	8 kegiatan									8 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.915.641.000**	**2.033.618.000**	**2.455.488.000**							**1.946.792.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.246.041.000**	**1.246.041.000**	**1.667.911.000**						100 persen	**1.277.192.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.246.041.000**	**1.246.041.000**	**1.667.911.000**						100 persen	**1.277.192.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	1.246.041.000	1.246.041.000	1.667.911.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	1.277.192.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**669.600.000**	**787.577.000**	**787.577.000**						90,00 persen	**669.600.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**669.600.000**	**787.577.000**	**787.577.000**						100 persen	**669.600.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan	669.600.000	787.577.000	787.577.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	3 kegiatan	669.600.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros					1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				16 kegiatan	16 kegiatan									16 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				6 kegiatan	6 kegiatan									6 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				10 kegiatan	10 kegiatan									10 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.680.385.000**	**1.712.997.000**	**1.919.547.000**							**1.502.415.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	983.385.000	983.385.000	1.189.935.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	1.007.970.000	Dinas Kesehatan
											Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan							
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**697.000.000**	**729.612.000**	**729.612.000**						90,00 persen	**494.445.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**697.000.000**	**729.612.000**	**729.612.000**						100 persen	**494.445.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama																
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan	697.000.000	729.612.000	729.612.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	3 kegiatan	494.445.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan					1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				53 kegiatan	53 kegiatan									53 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				21 kegiatan	21 kegiatan									21 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB tingkat dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				19 kegiatan	19 kegiatan									19 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.904.699.000**	**1.877.024.000**	**2.244.452.000**							**1.933.223.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.140.979.000**	**1.140.979.000**	**1.508.407.000**						100 persen	**1.169.503.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.140.979.000**	**1.140.979.000**	**1.508.407.000**						100 persen	**1.169.503.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	1.140.979.000	1.140.979.000	1.508.407.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	1.169.503.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														pencegahan dan pengendalian penyakit.				
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**763.720.000**	**736.045.000**	**736.045.000**						90,00 persen	**763.720.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**763.720.000**	**736.045.000**	**736.045.000**						100 persen	**763.720.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	763.720.000	736.045.000	736.045.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	1 kegiatan	763.720.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu					1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 kegiatan	9 kegiatan									9 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				8 kegiatan	8 kegiatan									8 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.001.221.000**	**2.977.087.000**	**3.116.444.000**							**3.001.053.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.086.541.000**	**2.037.207.000**	**2.176.564.000**						100 persen	**2.086.541.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.086.541.000**	**2.037.207.000**	**2.176.564.000**						100 persen	**2.086.541.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	2.086.541.000	2.037.207.000	2.176.564.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	2.086.541.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**914.680.000**	**939.880.000**	**939.880.000**						90,00 persen	**914.512.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**914.680.000**	**939.880.000**	**939.880.000**						100 persen	**914.512.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	914.680.000	939.880.000	939.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	3 Kegiatan	914.512.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan					1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru					3 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				52 Kegiatan	52 Kegiatan									52 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				16 Kegiatan	16 Kegiatan									16 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang				23 Kegiatan	23 Kegiatan									23 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		dilaksanakan																
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.981.866.000**	**2.029.499.000**	**2.161.068.000**							**1.865.467.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.456.166.000**	**1.416.166.000**	**1.547.735.000**						100 persen	**1.492.570.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.456.166.000**	**1.416.166.000**	**1.547.735.000**						100 persen	**1.492.570.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	1.456.166.000	1.416.166.000	1.547.735.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	1.492.570.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**525.700.000**	**613.333.000**	**613.333.000**						90,00 persen	**372.897.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**525.700.000**	**613.333.000**	**613.333.000**						100 persen	**372.897.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	525.700.000	613.333.000	613.333.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	372.897.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan				9 Kegiatan	9 Kegiatan									9 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		respon penyakit yang dilaksanakan																
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 Kegiatan	7 Kegiatan									7 Kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.763.416.000**	**2.842.152.000**	**3.534.903.000**							**2.552.457.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.876.416.000**	**1.827.082.000**	**2.519.833.000**						100 persen	**1.923.327.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.876.416.000**	**1.827.082.000**	**2.519.833.000**						100 persen	**1.923.327.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	1.876.416.000	1.827.082.000	2.519.833.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	1.923.327.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**887.000.000**	**1.015.070.000**	**1.015.070.000**						90,00 persen	**629.130.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**887.000.000**	**1.015.070.000**	**1.015.070.000**						100 persen	**629.130.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	887.000.000	1.015.070.000	1.015.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	629.130.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo					1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 kegiatan	9 kegiatan									9 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				8 kegiatan	8 kegiatan									8 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.332.766.000**	**1.575.744.000**	**2.078.423.000**							**1.139.648.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**615.666.000**	**800.000.000**	**1.302.679.000**						100 persen	**631.058.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**615.666.000**	**800.000.000**	**1.302.679.000**						100 persen	**631.058.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	615.666.000	800.000.000	1.302.679.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	631.058.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan		Pelayanan Publik	(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.				
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**717.100.000**	**775.744.000**	**775.744.000**						90,00 persen	**508.590.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**717.100.000**	**775.744.000**	**775.744.000**						100 persen	**508.590.000**	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 Aktifitas	717.100.000	775.744.000	775.744.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	3 Aktifitas	508.590.000	Dinas Kesehatan
		jumlah kegiatan Insentif Tenaga UKM Puskesmas yang dilaksanakan					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	21 Alat medis									21 Alat medis		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 Aktifitas									3 Aktifitas		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				23 Kegiatan	23 Aktifitas									23 Aktifitas		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				9 Kegiatan	9 Aktifitas									9 Aktifitas		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				12 Kegiatan	12 Aktifitas									12 Aktifitas		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**466.200.000**	**475.800.000**	**491.890.000**							**1.193.045.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**266.200.000**	**266.200.000**	**282.290.000**						100 persen	**292.820.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**266.200.000**	**266.200.000**	**282.290.000**						100 persen	**292.820.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	266.200.000	266.200.000	282.290.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	292.820.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	**200.000.000**	**209.600.000**	**209.600.000**						90,00 persen	**900.225.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**200.000.000**	**209.600.000**	**209.600.000**						100 persen	**900.225.000**	
		Persentase Layanan BPSJ	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase Layanan BPSJ	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di PSPJ				12 bulan	12 bulan	200.000.000	209.600.000	209.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	12 bulan	900.225.000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**109.531.595.000**	**46.948.698.000**	**71.974.405.000**							**145.166.660.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**11.984.198.000**	**12.117.064.000**	**13.826.351.000**						100 persen	**11.749.789.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 Persen	**17.312.000**	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 Dokumen	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 dokumen	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	14.312.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**6.359.383.000**	**6.364.183.000**	**6.303.990.000**						100 Persen	**7.538.224.000**	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	6.262.883.000	6.262.883.000	6.202.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn	DPUPR	14 kali	7.437.724.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	95.000.000	99.800.000	99.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	95.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	1 dokumen	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**35.578.000**	**35.578.000**	**35.578.000**							**34.862.000**	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas kerja aset yang disusun				2 laporan	2 laporan	35.578.000	35.578.000	35.578.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 laporan	34.862.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**22.254.000**	**17.754.000**	**17.754.000**						100 persen	**22.300.000**	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	1 kali	9.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan yang dilaksanakan				2 Kali	3 Kali	12.754.000	12.754.000	12.754.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	3 Kali	12.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**590.000.000**	**640.000.000**	**659.480.000**						100 persen	**417.544.000**	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DPUPR	12 bulan	3.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	215.000.000	265.000.000	265.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7 unit	23 unit									23 unit		
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	5.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	134.000.000	134.000.000	134.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	11 bulan	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 orang/kali	150 orang/kali	200.000.000	200.000.000	219.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	150 orang/kali	106.044.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.295.864.000**	**1.295.864.000**	**1.295.864.000**						100 persen	**0**	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan				2 Unit	1 Unit	1.295.864.000	1.295.864.000	1.295.864.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	DPUPR	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Penataan Ruang
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.769.691.000**	**2.963.143.000**	**4.713.143.000**						100 persen	**2.950.818.000**	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	2.535.346.000	2.535.346.000	4.285.346.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	2.552.280.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	231.345.000	424.797.000	424.797.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	395.538.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**895.428.000**	**784.542.000**	**784.542.000**						100 persen	**768.729.000**	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	609.428.000	559.292.000	559.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	497.758.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat -alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala				10 Unit	10 Unit	86.000.000	86.000.000	86.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	10 Unit	70.971.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	150.000.000	89.250.000	89.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn	DPUPR	1 Unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	27 unit		18 unit	96,4 Persen	96,4 Persen	**19.085.319.000**	**13.875.756.000**	**13.915.851.000**						96,4 Persen	**26.167.227.000**	
		Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen		82,76 persen	93,10 persen	93,10 persen									93,10 persen		
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	27 unit		18 unit	27 unit	33 unit	**17.564.010.000**	**12.018.847.000**	**12.062.822.000**						33 unit	**23.895.847.000**	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah lahan yang dibebaskan					19 bidang	3.021.763.000	3.095.000.000	3.095.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	19 bidang	3.095.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi Tanggul Sungai yang dibangun				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang Terbangun				2 Lokasi	2 Lokasi	200.000.000	200.000.000	370.163.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	2 Lokasi	3.600.847.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun				3 Lokasi	1 Lokasi	8.400.000.000	2.500.000.000	2.499.975.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Lokasi	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bulan pemeliharaan / rehabilitasi bangunan perkuatan tebing					12 bulan	1.350.000.000	1.550.000.000	2.046.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 bulan	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				3 lokasi	5 lokasi					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				5 lokasi		
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah bulan pemeliharaan / rehabilitasi stasiun pompa pengendali banjir					12 Bulan	1.000.000.000	1.663.197.000	632.172.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 Bulan	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Stasiun Pompa Pengendali Banjir yang terpelihara				5 Lokasi	30 Unit									30 Unit		
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah bulan operasional stasiun pompa banjir					12 Bulan	3.592.247.000	3.010.650.000	3.419.227.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 Bulan	5.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara					30 Unit									30 Unit		
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	85.03 persen		78.74 persen	82.57 persen	82.57 persen	**1.521.309.000**	**1.856.909.000**	**1.853.029.000**						82.57 persen	**2.271.380.000**	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan irigasi					12 Bulan	1.521.309.000	1.856.909.000	1.853.029.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob,	Kota Pekalongan	12 Bulan	2.271.380.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi jaringan irigasi				800	3 Lokasi									3 Lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang direhab				Meter					Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.				
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					200 M									200 M		
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	92,11 persen		85,77 persen	88,39 persen	88,39 persen	**1.375.000.000**	**265.000.000**	**315.000.000**						88,39 persen	**1.379.855.000**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**1.375.000.000**	**265.000.000**	**315.000.000**						100 Persen	**1.379.855.000**	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarpras air bersih yang direvitalisasi				3 Lokasi	3 Lokasi	1.375.000.000	265.000.000	315.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	3 Lokasi	1.379.855.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	100,00 persen		20 persen	40,00 persen	40,00 persen	**610.000.000**	**675.000.000**	**725.000.000**						40,00 persen	**2.811.969.000**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	100 Persen		20 persen	40 Persen	40 Persen	**610.000.000**	**675.000.000**	**725.000.000**						40 Persen	**2.811.969.000**	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Lokasi Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Lokasi	1 Lokasi	610.000.000	675.000.000	725.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Lokasi	2.306.969.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga					DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				200 Rumah Tangga		
1.03.05	**PROGRAM**	Persentase rumah tangga	12,87		9,87 persen	11,07	11,07	**4.130.000.000**	**1.176.798.000**	**1.382.305.000**						11,07	**545.131.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen			persen	persen									persen		
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	60051 unit		59751 unit	59751 unit	59751 unit	**4.130.000.000**	**1.176.798.000**	**1.382.305.000**						59751 unit	**545.131.000**	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk pelayanan dasar menggunakan SPALD-T (IKK Output)				2 Unit	2 Unit	3.575.000.000	1.095.000.000	1.291.507.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kota Pekalongan	2 Unit	545.131.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1 Unit	0 Unit	555.000.000	81.798.000	90.798.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kota Pekalongan	0 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik	71,49 persen		66,45 persen	68,47 persen	68,47 persen	**31.612.433.000**	**5.865.233.000**	**16.753.456.000**						68,47 persen	**9.313.169.000**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	177142.18 meter		169642.18 meter	169642.18 meter	178504.65 meter	**31.612.433.000**	**5.865.233.000**	**16.753.456.000**						178504.65 meter	**9.313.169.000**	
1.03.06.	Pembangunan Sistem	Jumlah Drainase yang				500	3 Lokasi	1.304.933.000	1.404.933.000	11.851.147.000	Kota	Dana	Membangun	7. Pembangunan	Kota	3 Lokasi	1.955.169.000	Dinas Pekerjaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.01.05	Drainase Perkotaan	dibangun/ditingkatkan				Meter					Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pekalongan			Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi drainase yang dibangun (bankeu)				0 lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 meter	500 Meter									500 Meter		
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi					683 M	22.200.000.000	2.200.000.000	2.120.604.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	683 M	4.158.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah bulan operasional dan pemeliharaan sistem drainase					12 Bulan	1.688.500.000	2.260.300.000	2.781.705.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembang unan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 Bulan	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah subsistem drainase yang dipelihara				8 Sistem	8 Sistem									8 Sistem		
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara					260277.98 M									260277.98 M		
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,74 persen		17,24 persen	17,84 persen	17,84 persen	**1.308.310.000**	**1.555.710.000**	**2.006.739.000**						17,84 persen	**1.858.898.000**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	1950 dokumen		300 dokumen	320 dokumen	320 dokumen	**1.308.310.000**	**1.555.710.000**	**2.006.739.000**						320 dokumen	**1.858.898.000**	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan	Jumlah Aplikasi Bangunan Gedung yang dibuat				1 Aplikasi	1 Aplikasi	236.000.000	236.000.000	314.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan	Kota Pekalongan	1 Aplikasi	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Data Bangunan Gedung ber-IMB yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG												Perubahan Iklim	ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.				
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota (IKK Output)				2 Bangunan	2 Bangunan	997.310.000	1.194.710.000	1.568.463.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	2 Bangunan	1.598.898.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat (IKK Output)				1 Bangunan	1 Bangunan	75.000.000	125.000.000	124.276.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Bangunan	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	86,57 persen		81,12 persen	83,30 persen	83,30 persen	**38.720.773.000**	**10.708.975.000**	**22.369.103.000**						83,30 persen	**91.122.570.000**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	132.809 KM		124.448 KM	127.792 KM	127.792 KM	**38.720.773.000**	**10.708.975.000**	**22.369.103.000**						127.792 KM	**91.122.570.000**	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Jalan dan Jembatan Usulan DAK Tahun 2024 yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	64.500.000	64.500.000	64.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	64.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Laporan Survey Jalan dan Jembatan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	126.100.000	126.100.000	126.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	64.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun				0.5 Km	0.288 Km	1.300.000.000	1.300.000.000	705.124.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembanga	8. Perluasan dan pening katan kualitas pembangunan layanan air	Kota Pekalongan	0.288 Km	52.698.870.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	n Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.				
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan (BANKEU)					2 lokasi	11.465.000.000	3.364.000.000	15.069.086.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan pening katan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	2 lokasi	16.316.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur dan fungsi) (IKK Output)				1.5 km	2.378 km					Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				2.378 km		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi				0.5 Km	0.26 Km	1.646.545.000	1.186.975.000	832.518.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan pening katan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	0.26 Km	2.885.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (IKK Output)				152.603 Km	2.5 Km	2.913.000.000	2.920.200.000	3.855.710.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	2.5 Km	6.546.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang saluran dan trotoar yang dipelihara				305.206 Km	0.282 Km									0.282 Km		
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti				11 Meter	11 Meter	1.200.000.000	1.200.000.000	1.172.765.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	11 Meter	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (IKK Output)				1384.6 Meter	200 Meter	544.800.000	547.200.000	543.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi	Kota Pekalongan	200 Meter	546.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Dasar	perkotaan.				
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	21,20 persen		7,87 persen	13,20 persen	13,20 persen	**330.562.000**	**330.562.000**	**218.005.000**						13,20 persen	**158.996.000**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase terselenggaranya pelatihan dan pembinaan lembaga konstruksi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**255.562.000**	**255.562.000**	**165.385.000**						100 Persen	**108.996.000**	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan					14 Orang	133.741.000	133.741.000	29.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	14 Orang	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota				40 Orang	14 Orang									14 Orang		
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah pembinaan untuk tenaga kontruksi wilayah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	121.821.000	121.821.000	136.335.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	50 Orang	48.996.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**75.000.000**	**75.000.000**	**52.620.000**						100 Persen	**50.000.000**	
1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi					0 Dokumen	75.000.000	75.000.000	52.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		jumlah dokumen penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi Analisa Standar Belanja Bangunan, data dan informasi jasa konstruksi, data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				1 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**375.000.000**	**378.600.000**	**462.595.000**						100,00 persen	**59.056.000**	
1.03.12.	**Penetapan Rencana**	Persentase ketercapaian	100		100 Persen	100	100	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**						100	**25.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.01	**Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	Persen			Persen	Persen									Persen		
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Perwal RDTR Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 Kali	1 Kali	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Kali	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfataan ruang daerah kabupaten/kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**350.000.000**	**353.600.000**	**437.595.000**						100 Persen	**34.056.000**	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					0 Dokumen	350.000.000	353.600.000	437.595.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	34.056.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen SPPR				1 Dokumen	1 Dokumen					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Dokumen		
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**19.497.985.000**	**42.514.961.000**	**48.163.797.000**							**28.761.288.000**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.655.359.000**	**4.671.459.000**	**4.469.295.000**						100 persen	**4.839.842.000**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 persen	**17.350.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah	perangkat daerah																
1.04.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	2 Dokumen	2.750.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	2 Dokumen	1.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 bulan	12.950.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.04.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**3.102.461.000**	**3.107.261.000**	**2.566.279.000**						100 persen	**3.352.671.000**	
1.04.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.070.811.000	3.070.811.000	2.509.129.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	14 kali	3.321.021.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	34.800.000	55.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 Dokumen	1.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**9.500.000**	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 kali	9.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**234.000.000**	**234.000.000**	**332.868.000**						100 persen	**209.686.000**	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	52.000.000	100.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	48.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				35 unit	35 unit									35 unit		
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	2.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman				11 Bulan	11 Bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur	12. Penerapan MRI secara	Dinperkim	11 Bulan	49.186.000	Dinas Perumahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	2.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang/ Kali	100 orang/ Kali	100.000.000	100.000.000	150.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	100 orang/Kali	98.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**954.000.000**	**962.600.000**	**1.187.600.000**						100 persen	**964.278.000**	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	1.800.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	757.200.000	757.200.000	982.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dinperkim	12 Bulan	758.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Dan Pelayanan Dasar	pelayanan publik.				
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	195.000.000	203.600.000	203.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	204.278.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**339.398.000**	**346.598.000**	**361.548.000**						100 persen	**286.357.000**	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	113.398.000	114.598.000	114.598.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	126.000.000	132.000.000	141.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 unit	76.357.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				1 unit	12 bulan	100.000.000	100.000.000	105.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 bulan	120.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	92,35 persen		91,35 persen	91,35 persen	91,35 persen	**4.949.196.000**	**2.142.396.000**	**2.367.396.000**						91,35 persen	**1.714.461.000**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**75.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**						1 dokumen	**120.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Persentase ketersediaan dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen		100 persen									100 persen		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	1 dokumen	60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Ketercapaian Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**						100 Persen	**50.000.000**	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	2 Kegiatan	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				2 kegiatan	2 kegiatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial	Rumah Korban Bencana	2 kegiatan	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.				Permukiman
1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah kegiatan rembug warga yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	3 Kegiatan	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**3.584.196.000**	**459.836.000**	**459.836.000**						100 persen	**264.461.000**	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	262.500.000	162.500.000	162.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban bencana	20 Unit	164.461.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah lokasi Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang disediakan				1 lokasi	1 lokasi	700.000.000	140.640.000	140.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan	Rumah Korban bencana	1 lokasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														kumuh dan permukiman kumuh.				
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah bagi korban bencana yang dibangun				5 Unit	5 Unit	2.621.696.000	156.696.000	156.696.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban bencana	5 Unit	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.200.000.000**	**1.542.560.000**	**1.767.560.000**						100 persen	**1.200.000.000**	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusunawa yang dipelihara				3 Unit	3 Unit	1.200.000.000	1.542.560.000	1.767.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Susun	3 Unit	1.200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah unit villa/pesanggrahan (Pondok Boro) yang dipelihara				1 unit	1 unit									1 unit		
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Luas kawasan permukiman kumuh	0 hektar		498,47 hektar	291,47 hektar	291,47 hektar	**2.645.400.000**	**27.608.076.000**	**32.609.076.000**						291,47 hektar	**17.004.276.000**	
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**236.400.000**	**236.400.000**	**136.400.000**						100 persen	**236.400.000**	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DE Konsultan Perencana yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	168.000.000	168.000.000	68.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan	Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	168.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Pelayanan Dasar	pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.				
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali	68.400.000	68.400.000	68.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	12 Kali	68.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**550.000.000**	**550.000.000**	**325.000.000**						100 persen	**320.000.000**	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DE Konsultan Perencana yang disusun				0 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	400.000.000	270.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	2 Dokumen	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah lokasi perumahan dan perumukiman kumuh yang disurvei dan ditetapkan				4 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah program pemerintah pusat atau provinsi yang difasilitasi				2 program	2 program	50.000.000	50.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	2 program	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	508,47 hektar		10 hektar	128 hektar	128 hektar	**1.859.000.000**	**26.821.676.000**	**32.147.676.000**						128 hektar	**16.447.876.000**	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000	74.000.000	74.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	74.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah jalan lingkungan dan saluran lingkungan yang ditingkatkan				0 Ha	253 Lokasi	-	26.747.676.000	32.073.676.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	253 Lokasi	15.373.876.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah rumah di kawasan permukiman kumuh yang dibangun				45 Unit	0 Unit									0 Unit		
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2147,88 hektar		1649,41 hektar	1856,41 hektar	1856,41 hektar	**6.620.000.000**	**7.310.000.000**	**7.490.000.000**						1856,41 hektar	**4.588.188.000**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1.31 persen		0.52 persen	0.52 persen	0.52 persen	**6.620.000.000**	**7.310.000.000**	**7.490.000.000**						0.52 persen	**4.588.188.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh yang diPerbaiki				650 Unit	650 Unit	6.620.000.000	7.310.000.000	7.490.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	RTLH	650 Unit	4.588.188.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	14,55 persen		14,44 persen	14,48 persen	14,48 persen	**628.030.000**	**783.030.000**	**1.228.030.000**						14,48 persen	**614.521.000**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	79.35 persen		25 persen	46.74 persen	46.74 persen	**628.030.000**	**783.030.000**	**1.228.030.000**						46.74 persen	**614.521.000**	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah aplikasi infrastruktur perumahan dan permukiman yang dibangun dan dikelola				1 Aplikasi	1 Aplikasi	240.000.000	240.000.000	505.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan	1 Aplikasi	230.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah fasilitas jalan lingkungan yang ditangani				330 meter	330 meter	280.000.000	380.000.000	560.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	PSU Perumahan	330 meter	280.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah fasilitas RTNH yang ditangani				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				4 Lokasi	4 Lokasi									4 Lokasi		
1.04.05.	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil				1	1	108.030.000	163.030.000	163.030.000	Kota	Dana	Memperkuat	6. Pemantapan	PSU	1	104.521.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.01.03	Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi tentang PSU Perumahan (Unit Rumah yang Terfasilitasi Air Minum, Jalan Lingkungan, Akses Sanitasi, RTNH, dan PJU) yang disusun				Dokumen	Dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Perumahan	Dokumen		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah perumahan yang aset PSUnya telah diserahkan				10 Unit	10 Unit									10 Unit		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**329.285.000**	**329.285.000**	**329.285.000**							**1.099.348.000**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**320.000.000**	**320.000.000**	**320.000.000**						100 persen	**1.090.262.000**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	73.35 persen		73.35 persen	73.35 persen	73.35 persen	**320.000.000**	**320.000.000**	**320.000.000**						73.35 persen	**1.090.262.000**	
		Presentase tercapainya kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang tertangani	73.35 persen		73.35 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota yang disusun				4 Dokumen	0 Dokumen	320.000.000	320.000.000	320.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Dokumen	1.090.262.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Dokumen Proses Legalisasi Pengadaan Tanah				2 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah				5 lokasi	0 lokasi									0 lokasi		
		Jumlah Lokasi Tanah /Bangunan yang diGanti Rugi karena adanya proyek Pemerintah				2 lokasi	6 lokasi									6 lokasi		
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,**	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.285.000**	**9.285.000**	**9.285.000**						100 persen	**9.086.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen		50 persen	50 persen	50 persen									50 persen		
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen		50 persen	50 persen	50 persen	**9.285.000**	**9.285.000**	**9.285.000**						50 persen	**9.086.000**	
		Presentase tercapainya kegiatan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang dilaksanakan				0 Dokumen	4 kali	9.285.000	9.285.000	9.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Masyarakat Kota Pekalongan	4 kali	9.086.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		peresentase ketercapaian penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				25 persen	0 persen									0 persen		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**11.894.848.000**	**12.135.048.000**	**13.107.528.000**							**12.737.740.000**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.117.274.000**	**5.142.574.000**	**5.112.132.000**						100 persen	**5.439.494.000**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**7.647.000**						100 persen	**62.450.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	2 Dokumen	10.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	2 Dokumen	1.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	6 bulan	12.000.000	12.000.000	3.647.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	6 bulan	50.050.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.257.134.000**	**4.261.934.000**	**4.260.934.000**						100 persen	**4.376.416.000**	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.203.484.000	4.203.484.000	4.203.484.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	14 kali	4.322.766.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	52.000.000	56.800.000	55.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	52.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Satpol P3KP	1 Dokumen	1.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawai an perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**30.000.000**	**17.500.000**						100 persen	**93.265.000**	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	30.000.000	17.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	1 kali	9.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah pakaian tahan api yang diadakan				2 set	1 set									1 set		
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**239.439.000**	**239.439.000**	**238.881.000**						100 persen	**220.498.000**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	34.939.000	34.939.000	26.385.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	30.998.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				3 unit	2 unit									2 unit		
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	12 bulan	97.000.000	97.000.000	97.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	97.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Satpol P3KP	12 bulan	2.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan									Pekalongan Barat, Podosugih	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 orang/ kali	85 orang/ kali	80.000.000	80.000.000	87.996.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	85 orang/kali	65.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**130.458.000**	**130.458.000**	**131.620.000**						100 persen	**127.651.000**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	128.458.000	128.458.000	130.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	125.651.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**464.743.000**	**464.743.000**	**455.550.000**						100 persen	**559.214.000**	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	444.743.000	444.743.000	436.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	70,00 persen		60,00 persen	64,00 persen	64,00 persen	**5.850.299.000**	**6.047.099.000**	**7.145.411.000**						64,00 persen	**6.123.324.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	100 persen		80 persen	90 persen	90 persen	**1.647.410.000**	**1.647.410.000**	**2.814.041.000**						90 persen	**1.819.110.000**	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan				48 kali	20 kali	106.000.000	106.000.000	35.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	20 kali	106.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan sarasehan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali	275.000.000	275.000.000	239.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	6 kali	446.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Penindakan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan				200 Kasus	350 Kasus									350 Kasus		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan				365 hari	365 hari	1.020.410.000	1.020.410.000	2.395.610.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	365 hari	1.020.410.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan				120 hari	120 hari									120 hari		
		Jumlah kegiatan Operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, Jambore)				25 kali	25 kali									25 kali		
		Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan				48 kali	48 kali									48 kali		
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Bari yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah seragam, sepatu dan to pi linmas yang diadakan				0 Dokumen	2250 set									2250 set		
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pemberdayaan linmas yang dilaksanakan				3 kali	2 kali	25.000.000	25.000.000	13.131.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	2 kali	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Satlinmas yang dilatih dan dikukuhkan				35 orang	35 orang									35 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan Bintek Peundang-Undangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan				6 kali	1 kali	48.000.000	48.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	1 kali	48.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya				155 Orang	155 Orang									155 Orang		
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan yang disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	148.000.000	148.000.000	118.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	1 Dokumen	148.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan				4 kali	2 kali									2 kali		
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada terlayani yang disusun				2 Laporan	0 Laporan	25.000.000	25.000.000	300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	0 Laporan	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah surat pernyataan pelanggar yang dikeluarkan					30 dokumen									30 dokumen		
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	120 perda		20 perda	20 perda	20 perda	**4.182.926.000**	**4.379.726.000**	**4.329.470.000**						20 perda	**4.284.680.000**	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan				48 kali	36 kali	20.000.000	20.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	36 kali	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan				48 kali	48 kali	3.949.661.000	4.359.726.000	4.314.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	48 kali	4.045.981.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan kantor wilayah Tegal yang dilaksanakan				48 kali	48 kali					DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				48 kali		
		Jumlah operasi penegakan				96 kali	96 kali									96 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		perda yang dilaksanakan																
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	21 persen		8 persen	13 persen	13 persen	**19.963.000**	**19.963.000**	**1.900.000**						13 persen	**19.534.000**	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada yang disusun				3 Laporan	2 Laporan	19.963.000	19.963.000	1.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	PPNS	2 Laporan	19.534.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**927.275.000**	**945.375.000**	**849.985.000**						100,00 persen	**1.174.922.000**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**723.000.000**	**741.100.000**	**696.300.000**						100 persen	**975.040.000**	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi relawan damkar yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	53.000.000	53.000.000	49.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 kali	53.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Sosialiasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat yang dilaksanakan				8 kali	8 kali									8 kali		
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani				185 kali	250 kali	600.000.000	618.100.000	607.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	250 kali	837.040.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawal, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah Perlengkapan Damar yang diadakan				1 Set	4 set									4 set		
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat	3 kali	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Podosugih	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				Penyelamatan
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah HT yang diadakan				4 unit	4 unit	10.000.000	10.000.000	7.145.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 unit	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Pelatihan Gabungan Damkar Kab/Kota Lain yang Dilaksanakan				3 kali	1 kali	40.000.000	40.000.000	12.555.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Rakor dengan Damkar Kab/Kota Lain yang diselenggarakan				3 kali	1 kali									1 kali		
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**46.426.000**	**46.426.000**	**25.000.000**						100 persen	**45.428.000**	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah kegiatan pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi /instansi/badan yang dilaksanakan				48 Dokumen	28 Dokumen	46.426.000	46.426.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Instansi/badan	28 Dokumen	45.428.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Pitot Pressure Gauge (Penguji Tekanan Hidran) yang diadakan				0 Dokumen	1 unit									1 unit		
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**83.567.000**	**83.567.000**	**56.403.000**						100 persen	**81.770.000**	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kampanye pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	50.000.000	50.000.000	34.836.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 kali	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah pelayanan penanggulangan kebakaran yang dibantu relawan damkar yang dilaksanakan				48 kali	35 kali	33.567.000	33.567.000	21.567.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	35 kali	31.770.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan**	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**74.282.000**	**74.282.000**	**72.282.000**						100 persen	**72.684.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia																	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia yang disusun				48 Laporan	48 Laporan	74.282.000	74.282.000	72.282.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	48 Laporan	72.684.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.383.046.000**	**3.408.746.000**	**3.578.731.000**							**3.275.314.000**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.877.189.000**	**1.879.889.000**	**1.989.646.000**						100 persen	**1.880.009.000**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**25.450.000**						100 Persen	**17.707.000**	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	2 dokumen	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	2 dokumen	1.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	21.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	BPBD	12 bulan	13.707.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**1.428.241.000**	**1.433.041.000**	**1.471.361.000**						100 Persen	**1.444.315.000**	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	1.395.191.000	1.395.191.000	1.432.961.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	14 kali	1.411.265.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	31.550.000	36.350.000	36.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	31.550.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	1 dokumen	1.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**20.520.000**	**16.020.000**	**5.000.000**						100 Persen	**46.654.000**	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	1 kali	34.054.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				40 orang	0 orang	11.020.000	11.020.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	BPBD	0 orang	12.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**153.303.000**	**153.303.000**	**203.303.000**						100 Persen	**135.420.000**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	58.400.000	58.400.000	103.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	58.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				8 unit	15 unit									15 unit		
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	1.203.000	1.203.000	1.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	12 bulan	29.700.000	29.700.000	29.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	29.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	9.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				25 orang/ kali	30 orang/ kali	50.000.000	50.000.000	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	BPBD	30 orang/kali	28.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**106.858.000**	**109.258.000**	**111.366.000**						100 Persen	**100.213.000**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	1.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	60.516.000	60.516.000	60.516.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	58.313.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	44.842.000	47.242.000	49.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	40.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**152.267.000**	**152.267.000**	**173.166.000**						100 Persen	**135.700.000**	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	93.443.000	93.443.000	110.311.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	79.859.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	1 unit	9.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	49.324.000	49.324.000	53.355.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	46.341.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang					1 Paket									1 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Dipelihara/Direhabilitasi																
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**1.505.857.000**	**1.528.857.000**	**1.589.085.000**						100,00 persen	**1.395.305.000**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**256.597.000**	**261.597.000**	**205.000.000**						100 Persen	**156.725.000**	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)				3 jenis	3 jenis	156.597.000	161.597.000	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 jenis	56.725.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**381.365.000**	**346.365.000**	**317.137.000**						100 Persen	**162.400.000**	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana				200 orang	200 orang	62.400.000	62.400.000	62.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	200 orang	62.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan				4 unit	4 unit	268.965.000	233.965.000	233.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 unit	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi penanganan pasca bencana				12 bulan	6 bulan	50.000.000	50.000.000	20.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	6 bulan	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**867.895.000**	**920.895.000**	**1.066.948.000**						100 Persen	**985.325.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Evakuasi Korban Bencana	penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)																
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi				12 bulan	12 bulan	717.895.000	770.895.000	916.948.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	835.325.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan				3 kejadian	3 kejadian	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 kejadian	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**9.321.565.000**	**9.753.310.000**	**9.182.758.000**							**9.381.193.667**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**3.514.577.000**	**3.720.877.000**	**3.660.855.000**						100 persen	**4.493.228.667**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**19.425.000**						100 persen	**17.850.000**	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	2 dokumen	2.750.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	2 dokumen	1.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	15.425.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Dinsos P2KB	12 bulan	13.450.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen				Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		4 dokumen		Keluarga Berencana
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.633.324.000**	**2.638.124.000**	**2.456.085.000**						100 persen	**3.663.169.667**	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	2.583.374.000	2.583.374.000	2.404.760.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	14 kali	3.613.219.667	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	48.300.000	53.100.000	49.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	48.300.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	1 dokumen	1.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**9.500.000**	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	1 kali	9.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**250.250.000**	**250.250.000**	**367.480.000**						100 persen	**339.800.000**	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan kantor				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinsos P2KB	12 bulan	10.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				Berencana
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	55.250.000	55.250.000	133.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	90.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 unit	17 unit									17 unit		
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	7.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	75.000.000	75.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	11 bulan	75.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	10.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	2.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 orang/ kali	150 orang/ kali	90.000.000	90.000.000	134.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	150 orang/kali	144.800.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**259.789.000**	**264.589.000**	**239.409.000**						100 persen	**195.885.000**	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dinsos P2KB	12 bulan	2.400.000	Dinas Sosial, Pengendalian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	162.589.000	162.589.000	137.409.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	128.285.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	94.800.000	99.600.000	99.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	65.200.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**345.714.000**	**546.914.000**	**573.456.000**						100 persen	**267.024.000**	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	256.564.000	257.764.000	262.864.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	223.124.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	70.250.000	270.250.000	291.692.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	1 unit	25.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	18.900.000	18.900.000	18.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	18.900.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	75 persen		58 persen	58 persen	58 persen	**478.171.000**	**487.071.000**	**517.051.000**						58 persen	**392.613.000**	
1.06.02.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen		10 persen	10 persen	10 persen	**148.056.000**	**155.756.000**	**169.406.000**						10 persen	**164.235.000**	
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah bulan pendampingan program KUBE				12 bulan	12 bulan	148.056.000	155.756.000	169.406.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	2. Peningkatan ketersediaan dan	Warga Miskin	12 bulan	164.235.000	Dinas Sosial, Pengendalian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.				Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen		75 persen	75 persen	75 persen	**330.115.000**	**331.315.000**	**347.645.000**						75 persen	**228.378.000**	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 bulan	12 bulan	99.115.000	99.115.000	124.115.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	12 bulan	91.788.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah rakor pembinaan psks yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 bulan	12 bulan	150.000.000	157.200.000	148.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	12 bulan	136.590.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah TKSK yang difasilitasi				6 orang	5 orang									5 orang		
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Karang Taruna				1 kali	1 kali	81.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	1 kali	0	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**1.565.354.000**	**1.601.055.000**	**1.602.420.000**						100,00 persen	**2.403.604.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		(SPM/IKK outcome)																
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**1.500.357.000**	**1.130.503.000**	**1.164.010.000**						100 Persen	**1.965.070.000**	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah pemberian permakanan yang diberikan				60 orang	60 orang	249.004.000	365.520.000	365.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	60 orang	618.720.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM				12 bulan	12 bulan	1.096.003.000	764.983.000	798.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	12 bulan	1.191.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah kegiatan dalam peringatan harlun yang difasilitasi				1 kegiatan	0 kegiatan									0 kegiatan		
		Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)				1 kali	0 kali									0 kali		
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 persen		3.55 persen	3.55 Persen	3.55 Persen	**64.997.000**	**470.552.000**	**438.410.000**						3.55 Persen	**438.534.000**	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 oktober yang mendapat bantuan sembako				83 Orang	83 Orang	249.004.000	249.005.000	249.005.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	83 Orang	213.184.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako				225 Orang	225 Orang									225 Orang		
		Jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako				600 Orang	600 Orang									600 Orang		
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah kegiatan pelayanan anak rentan kesejahteraan sosial				1 Kegiatan	1 Kegiatan	95.350.000	95.350.000	71.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar	PPKS	1 Kegiatan	95.350.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		Jumlah PMKS yang				11 Orang	11 Orang									11		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		mendapat alat bantu									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.		Orang		Berencana
		Jumlah wanita rawan sosial yang mendapat pelatihan				10 Orang	10 Orang									10 Orang		
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah massal				10 pasang	10 pasang	64.997.000	64.997.000	58.657.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	10 pasang	70.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				83 Orang	83 Orang	60.000.000	61.200.000	59.028.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	83 Orang	60.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	52.49 persen		56.69 persen	56.69 persen	56.69 persen	**1.332.587.000**	**1.679.031.000**	**1.619.146.000**						56.69 persen	**1.085.100.000**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase graduasi KPM PKH	10 Persen		10 Persen	10 Persen	10 Persen	**1.332.587.000**	**1.679.031.000**	**1.619.146.000**						10 Persen	**1.085.100.000**	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi BPNT				12 bulan	12 bulan	686.650.000	733.094.000	671.709.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PKH	12 bulan	736.600.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah bulan pelayanan SLRT				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan pendampingan PKH				12 bulan	12 bulan	645.937.000	945.937.000	947.437.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui	PKH	12 bulan	348.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
		Jumlah KPM PKH yang mendapatkan sosialisasi				200 orang	200 orang					DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT)		kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.			200 orang		
		Jumlah Penerima DBHCHT				500 orang	500 orang										500 orang		
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**1.887.689.000**	**1.720.089.000**	**1.690.304.000**							100,00 persen	**536.000.000**	
1.06.06. 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.887.689.000**	**1.720.089.000**	**1.690.304.000**							100 persen	**536.000.000**	
1.06.06. 2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah kegiatan bantuan untuk korban bencana alam yang difasilitasi				1 kegiatan	1 kegiatan	470.000.000	472.400.000	445.304.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Masyarakat		1 kegiatan	500.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.06. 2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan				12 bulan	12 bulan	1.417.689.000	1.247.689.000	1.245.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Masyarakat		12 bulan	36.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**543.187.000**	**545.187.000**	**92.982.000**							100 persen	**470.648.000**	
1.06.07. 2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**543.187.000**	**545.187.000**	**92.982.000**							100 persen	**470.648.000**	
1.06.07. 2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					1 Dokumen	488.187.000	488.187.000	26.830.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat,	Taman Makam Pahlawan Nasional	1 Dokume n	385.648.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Sarpras Taman Makam Pahlawan yang				1 lokasi	0 lokasi									0 lokasi			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		direhab												perguruan tinggi dan dunia usaha.				
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan taman makam pahlawan				12 bulan	12 bulan	55.000.000	57.000.000	66.152.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Taman Makam Pahlawan Nasional	12 bulan	85.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**3.547.261.000**	**5.963.601.000**	**5.888.045.000**							**2.828.490.000**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**71.497.000**	**72.697.000**	**66.116.000**						100,00 persen	**78.000.000**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**71.497.000**	**72.697.000**	**66.116.000**						100 persen	**78.000.000**	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun				14 dokumen	14 dokumen	71.497.000	72.697.000	66.116.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	14 dokumen	78.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,20 persen		8,20 persen	7,80 persen	7,80 persen	**3.312.855.000**	**5.725.595.000**	**5.643.605.000**						7,80 persen	**2.575.040.000**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian**	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK	7.74 perseribu		9.22 perseribu	9.22 perseribu	9.22 perseribu	**2.841.938.000**	**3.534.982.000**	**3.517.897.000**						9.22 perseribu	**1.854.994.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Output)																
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan KB melalui penyuluhan langsung				51 kelompok	51 kelompok	110.000.000	111.200.000	98.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Akseptor KB	51 kelompok	110.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB				12 bulan	12 bulan	2.731.938.000	3.423.782.000	3.419.857.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Akseptor KB	12 bulan	1.744.994.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.8 persen		20.2 persen	20.2 persen	20.2 persen	**470.917.000**	**2.190.613.000**	**2.125.708.000**						20.2 persen	**720.046.000**	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan yang diadakan				20 unit	81 unit	184.442.000	1.901.738.000	1.917.233.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Akseptor KB	81 unit	433.571.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB				480 orang	480 orang	286.475.000	288.875.000	208.475.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Akseptor KB	480 orang	286.475.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	**PROGRAM**	Unmeet need KB	12,00		17,00 persen	15,00	15,00	**162.909.000**	**165.309.000**	**178.324.000**						15,00	**175.450.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		persen			persen	persen									persen		
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**162.909.000**	**165.309.000**	**178.324.000**						100 persen	**175.450.000**	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan PPKBD, KKB, kelompok kegiatan, rumah data kependudukan dan PPKS yang difasilitasi				5 kegiatan	5 kegiatan	162.909.000	165.309.000	178.324.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Warga Kota Pekalongan	5 kegiatan	175.450.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**32.878.084.000**	**33.729.875.000**	**33.395.817.000**							**34.897.042.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**13.870.676.000**	**13.875.137.000**	**14.277.769.000**						100 persen	**15.039.400.000**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 Persen	**23.032.000**	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	DLH	2 dokumen	2.750.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	2 dokumen	1.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	18.632.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**10.098.974.000**	**10.108.286.000**	**9.732.039.000**						100 Persen	**11.932.596.000**	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	9.997.324.000	9.997.324.000	9.621.077.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	14 kali	11.824.946.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	100.000.000	109.312.000	109.312.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelaya nan publik.	DLH	12 bulan	106.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	1 dokumen	1.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**52.532.000**	**48.032.000**	**48.032.000**						100 Persen	**21.875.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	52.532.000	48.032.000	48.032.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	1 kali	21.875.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				375 buah	441 buah									441 buah		
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**371.750.000**	**445.750.000**	**462.017.000**						100 Persen	**280.900.000**	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5.700.000	5.700.000	5.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	5.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	122.350.000	180.350.000	181.542.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	57.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				88 unit	72 unit									72 unit		
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	115.700.000	131.700.000	131.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	11 bulan	82.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	24.500.000	24.500.000	33.091.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	24.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	4.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	2.500.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				80 orang/kali	80 orang/kali	100.000.000	100.000.000	104.984.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	80 orang/kali	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**575.894.000**	**556.539.000**	**599.039.000**						100 Persen	**590.266.000**	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	2.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	267.600.000	267.600.000	310.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	263.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	305.794.000	286.439.000	286.439.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	324.866.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**2.755.526.000**	**2.700.530.000**	**3.420.642.000**						100 Persen	**2.190.731.000**	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	225.846.000	225.846.000	176.646.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	162.982.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah bulan pemeliharaan dan Perizinan alat besar				12 bulan	12 bulan	2.392.580.000	2.311.566.000	3.091.616.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	1.897.449.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara				1 unit	1 unit	112.100.000	138.118.000	132.330.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	DLH	1 unit	105.300.000	Dinas Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Lainnya	rutin/berkala									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Hidup
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	20.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	20 persen		20 persen	0 persen	20 persen	**75.000.000**	**221.500.000**	**194.455.000**						20 persen	**0**	
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen	**75.000.000**	**221.500.000**	**194.455.000**						2 dokumen	**0**	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	221.500.000	194.455.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang terverifikasi				1 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase limbah yang diolah	49,01 persen		33,37 persen	40,95 persen	40,95 persen	**1.385.099.000**	**1.511.842.000**	**1.494.831.000**						40,95 persen	**4.442.547.000**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53.57 persen		42.51 persen	52.38 persen	52.38 persen	**969.099.000**	**1.048.194.000**	**1.026.054.000**						52.38 persen	**920.999.000**	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah monitoring terhadap kegiatan / usaha pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan				50 titik	50 titik	635.000.000	711.914.000	683.564.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pelaku Usaha	50 titik	552.299.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan				30 kali	30 kali									30 kali		
		Jumlah sampah yang diambil dari sungai				3000 m3	3000 m3									3000 m3		
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Jumlah kampung iklim yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi	25.000.000	25.000.000	20.410.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Membangun Lingkungan Hidup,	7. Pembangunan sistem penanganan	Pelaku Usaha	1 lokasi	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.				
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter yang diakreditasi				10 parameter	20 parameter	309.099.000	311.280.000	322.080.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pelaku Usaha	20 parameter	343.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah sampel yang diuji				170 sampel	170 sampel									170 sampel		
		Jumlah Uji Profesiensi/uji banding				1 hasil uji	1 hasil uji									1 hasil uji		
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen		70.59 persen	76.47 persen	76.47 persen	**416.000.000**	**463.648.000**	**468.777.000**						76.47 persen	**3.521.548.000**	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah DIKPLHD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	66.000.000	102.000.000	93.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyarakat	1 dokumen	66.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah limbah cair yang dikelola				240000 M3	240000 M3	350.000.000	361.648.000	375.227.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyarakat	240000 M3	3.455.548.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen		2,889 persen	2,919 persen	2,919 persen	**6.631.276.000**	**6.644.390.000**	**6.540.311.000**						2,919 persen	**3.933.751.000**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas RTH Publik	110.355 Ha		108.484 Ha	109.233 Ha	109.233 Ha	**6.631.276.000**	**6.644.390.000**	**6.540.311.000**						109.233 Ha	**3.933.751.000**	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan				4 lokasi	4 lokasi	6.256.276.000	6.247.330.000	6.194.151.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob,	RTH	4 lokasi	3.683.751.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala makam				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala Taman Kota				1 lokasi	1 lokasi				Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.		1 lokasi		
		Jumlah pengadaan konstruksi Taman Kota (SIDa)				4 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah TAHURA yang dipelihara				6 lokasi	6 lokasi	375.000.000	397.060.000	346.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	RTH	6 lokasi	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	100 persen		31,11 persen	13,33 persen	13,33 persen	**2.321.000**	**2.321.000**	**2.321.000**						13,33 persen	**2.271.000**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah usaha / kegiatan yang diverifikasi untuk mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan	45 usaha / kegiatan		6 usaha / kegiatan	6 usaha / kegiatan	6 usaha / kegiatan	**2.321.000**	**2.321.000**	**2.321.000**						6 usaha / kegiatan	**2.271.000**	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan ke usaha / kegiatan yang memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3				14 usaha/kegiatan	14 usaha/kegiatan	2.321.000	2.321.000	2.321.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3	14 usaha/kegiatan	2.271.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	100 persen		16,67 persen	16,67 persen	16,67 persen	**160.774.000**	**49.750.000**	**32.350.000**						16,67 persen	**66.461.000**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh**	Persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditertibkan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**160.774.000**	**49.750.000**	**32.350.000**						100 persen	**66.461.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah inventarisasi data perusahaan di Kota Pekalongan berbasis aplikasi				1 kegiatan	0 kegiatan	117.624.000	16.500.000	11.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	0 kegiatan	23.311.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Izin Lingkungan				30 perusahaan	10 perusahaan									10 perusahaan		
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin				2 kali	0 kali	38.150.000	30.750.000	18.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	0 kali	38.150.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi				65 perusahaan	65 perusahaan									65 perusahaan		
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD					0 Dokumen	5.000.000	2.500.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	0 Dokumen	5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH				5 kali	5 kali									5 kali		
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen		50,00 persen	50,00 persen	50,00 persen	**453.906.000**	**663.906.000**	**507.552.000**						50,00 persen	**404.307.000**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**453.906.000**	**663.906.000**	**507.552.000**						100 persen	**404.307.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan																
2.11.08. 2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan capacity building ASN dan Non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan				3 kegiatan	3 kegiatan	100.000.000	310.000.000	289.691.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 kegiatan	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08. 2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina				80 orang	80 orang	110.000.000	110.000.000	79.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	80 orang	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08. 2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan				10 kegiatan	0 kegiatan	243.906.000	243.906.000	138.861.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 kegiatan	234.307.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan				2 event	1 event									1 event		
		Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup				2 kelompok	4 kelompok									4 kelompok		
		Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 event	0 event									0 event		
		Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan				4 lomba	4 lomba									4 lomba		
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				5 komunitas	5 komunitas									5 komunitas		
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen		75 persen	75 persen	75 persen	**88.209.000**	**88.209.000**	**72.229.000**						75 persen	**113.570.000**	
2.11.09. 2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	18 peng hargaan		3 peng hargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	**88.209.000**	**88.209.000**	**72.229.000**						3 penghargaan	**113.570.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
2.11.09. 2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian Adiwiyata Tingkat Kota yang diselenggarakan				1 event	1 event	88.209.000	88.209.000	72.229.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 event	113.570.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Daerah yang diselenggarakan				1 event	1 event									1 event		
		Jumlah penilaian Sekolah Adiwiyata yang diusulkan ke Tingkat Provinsi dan Nasional				2 event	2 event									2 event		
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**18.570.000**	**12.500.000**	**5.210.000**						100 persen	**18.171.000**	
2.11.10. 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	36 kasus		6 kasus	6 kasus	6 kasus	**18.570.000**	**12.500.000**	**5.210.000**						6 kasus	**18.171.000**	
2.11.10. 2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan				18 kali	18 kali	18.570.000	12.500.000	5.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	18 kali	18.171.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan belum berizin yang dilaksanakan				1 kali	0 kali									0 kali		
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	0,31 persen		2,19 persen	0,28 persen	0,28 persen	**10.192.253.000**	**10.660.320.000**	**10.268.789.000**						0,28 persen	**10.876.564.000**	
2.11.11. 2.01	**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengurangan sampah	18.19 persen		17.01 persen	17.46 persen	17.46 persen	**10.192.253.000**	**10.660.320.000**	**10.268.789.000**						17.46 persen	**10.876.564.000**	
2.11.11. 2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pengelolaan kebersihan dan pelayanan sampah				12 bulan	12 bulan	7.003.303.000	7.493.918.000	7.329.248.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 bulan	6.289.342.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah ruas jalan yang diawasi kebersihannya				55 ruas jalan	55 ruas jalan									55 ruas jalan		
		Jumlah ruas jalan yang dibersihkan/disapu				55 ruas jalan	55 ruas jalan									55 ruas jalan		
		Jumlah TPS3R yang difasilitasi (SIDa)				21 TPS3R	21 TPS3R									21 TPS3R		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bulan fasilitasi operasional bank sampah induk				12 Bulan	12 Bulan	744.562.000	685.912.000	658.402.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Bulan	757.222.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah bulan operasional pengangkutan sampah				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi dan fasilitas pengelolaan sampah yang dipantau				30 Kali	0 lokasi									0 lokasi		
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				0 Kelompok	28 Kelompok									28 Kelompok		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah bahan habis pakai yang dibeli				12 jenis	12 jenis	2.444.388.000	2.480.490.000	2.281.139.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 jenis	3.830.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dumptruk yang dibeli				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gerobak sampah yang diadakan				67 unit	67 unit									67 unit		
		Jumlah jembatan timbang yang di tera				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah kendaraan unit roda 3 yang dibeli				12 unit	13 unit									13 unit		
		Jumlah mesin pilah sampah yang diadakan				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli				4 jenis	4 jenis									4 jenis		
		Jumlah TPS/TPS3R yang dipelihara				3 unit	3 unit									3 unit		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**5.522.221.000**	**5.885.389.000**	**5.637.054.000**							**5.851.121.000**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.708.998.000**	**5.027.246.000**	**4.834.408.000**						100 persen	**5.070.953.000**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran,	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**13.062.000**						100 Persen	**31.194.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
2.12.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	1.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	2 dokumen	2.750.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	2 dokumen	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	10.262.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	26.794.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
2.12.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**3.276.455.000**	**3.281.255.000**	**3.156.128.000**						100 Persen	**3.289.824.000**	
2.12.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.218.455.000	3.218.455.000	3.097.228.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	14 kali	3.225.174.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	56.500.000	61.300.000	57.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	63.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dindukcapil	1 dokumen	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**65.252.000**	**60.752.000**	**53.783.000**						100 Persen	**109.088.000**	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	1 kali	9.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelatihan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan				1 kali	2 kali	11.752.000	11.752.000	7.783.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	2 kali	12.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan publikasi				12 bulan	12 bulan	44.000.000	44.000.000	41.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	87.588.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**908.500.000**	**1.196.000.000**	**1.151.181.000**						100 Persen	**1.247.083.000**	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	1.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	750.000.000	1.027.500.000	954.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	1.062.083.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				100 unit	100 unit									100 unit		
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	4.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	35.000.000	45.000.000	43.400.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dindukcapil	11 bulan	35.000.000	Dinas Kependudukan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	40.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	4.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				45 kali	47 kali	75.000.000	75.000.000	104.981.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	47 kali	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**297.588.000**	**328.036.000**	**325.151.000**						100 Persen	**293.278.000**	
2.12.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	2.646.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	3.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	110.100.000	110.100.000	130.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	110.100.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	184.488.000	214.936.000	192.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	180.178.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.	**Pemeliharaan Barang**	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	**145.203.000**	**145.203.000**	**135.103.000**						100	**100.486.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.09	**Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen			Persen	Persen									Persen		
2.12.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	63.203.000	63.203.000	73.103.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	56.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	3 unit	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	3 unit	23.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	59.000.000	59.000.000	39.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	12 bulan	21.486.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,75 persen		80,00 persen	83,53 persen	83,53 persen	**339.760.000**	**362.320.000**	**333.186.000**						83,53 persen	**330.857.000**	
2.12.02. 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	1453824 dokumen		235446 dokumen	394529 dokumen	394529 dokumen	**339.760.000**	**362.320.000**	**333.186.000**						394529 dokumen	**330.857.000**	
2.12.02. 2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	jumlah penerbitan KK				28000 KK	20000 KK	272.260.000	294.820.000	298.270.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	20000 KK	263.357.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)				95.4 persen	95.4 persen									95.4 persen		
2.12.02. 2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen audit dan surveilance ISO				1 dokumen	1 dokumen	31.500.000	31.500.000	31.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 dokumen	31.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02. 2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)				65 persen	65 persen	36.000.000	36.000.000	3.416.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Masyarakat Kota Pekalongan	65 persen	36.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	94,00 persen		93,25 persen	93,55 persen	93,55 persen	**274.221.000**	**296.581.000**	**306.381.000**						93,55 persen	**275.826.000**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	574182 dokumen		92438 dokumen	6981 dokumen	6981 dokumen	**274.221.000**	**296.581.000**	**306.381.000**						6981 dokumen	**275.826.000**	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome)				93.2 persen	93.2 persen	262.221.000	284.581.000	289.381.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan	93.2 persen	263.826.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerbitan akta kematian (IKK Output)				3225 akta kematian	3225 akta kematian									3225 akta kematian		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	penerbitan Akta Perceraian (IKK Output)				10 akta perceraian	10 akta perceraian	12.000.000	12.000.000	17.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan	10 akta perceraian	12.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		penerbitan Akta Perkawinan (IKK Output)				50 akta perkawinan	50 akta perkawinan									50 akta perkawinan		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	14,00 OPD		5,00 OPD	9,00 OPD	9,00 OPD	**199.242.000**	**199.242.000**	**163.079.000**						9,00 OPD	**173.485.000**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali		2 kali	2 kali	2 kali	**199.242.000**	**199.242.000**	**163.079.000**						2 kali	**173.485.000**	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)				110 buku	110 buku	77.330.000	77.330.000	74.543.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	110 buku	76.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk				1 aplikasi	1 aplikasi									1 aplikasi		
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	91.912.000	91.912.000	58.536.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	1 kali	75.485.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)				273 buku	273 buku	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukcapil	273 buku	22.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah arsip register akta				10 buku	10 buku									10 buku		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		catatan sipil yang diperbaiki penjilidannya (berupa penjilidan)																
		Jumlah Fumigasi Arsip				1 kali	1 kali									1 kali		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1.263.294.000**	**812.694.000**	**725.524.000**							**765.576.000**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	11,09 persen		1,85 persen	5,55 persen	5,55 persen	**172.034.000**	**172.034.000**	**158.634.000**						5,55 persen	**96.534.000**	
2.08.02. 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16,67 persen		16,67 persen	16.67 persen	16.67 persen	**17.034.000**	**17.034.000**	**16.634.000**						16.67 persen	**46.564.000**	
2.08.02. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPRG yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	17.034.000	17.034.000	16.634.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	OPD	1 Dokumen	46.564.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan Desk GAP GBS yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah koordinasi pokja PUG yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah koordinasi tim teknis PPRG yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
2.08.02. 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	40,00 persen		6,67 persen	20 persen	20 persen	**140.000.000**	**140.000.000**	**139.600.000**						20 persen	**36.342.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi PUG yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	140.000.000	140.000.000	139.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan	1 Kali	36.342.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan FGD PUG yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok ekonomi perempuan yang dilaksanakan				27 Kali	27 Kali									27 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan Forkom Puspa yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah Koordinasi Forkom Puspa yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Koordinasi Kelompok Ekonomi Perempuan yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100,00 persen		50,00 persen	100 persen	100 persen	**15.000.000**	**15.000.000**	**2.400.000**						100 persen	**13.628.000**	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan HUT Dharmawanita yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali	15.000.000	15.000.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	0 Kali	13.628.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah koordinasi pengurus dharmawanita kota yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan yang dilaksanakan				20 Kali	20 Kali									20 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														& Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).				
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen		23,99 persen	23,99 persen	23,99 persen	**329.172.000**	**129.102.000**	**128.302.000**						23,99 persen	**120.897.000**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**97.748.000**	**27.500.000**	**27.100.000**						100 persen	**56.476.000**	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kelas Pendidikan Keluarga yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	97.748.000	27.500.000	27.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	korban kekerasan perempuan	1 Kali	56.476.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kegiatan Kelas Persiapan Pranikah yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah koordinasi Puspaga dengan Tim HIMPSI yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	100 persen	**231.424.000**	**101.602.000**	**101.202.000**						100 persen	**64.421.000**	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Case Conference Kasus Perempuan yang dilaksanakan				12 Kali	25 Kali	231.424.000	101.602.000	101.202.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha	Perempuan. Masyarakat	25 Kali	64.421.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang diberikan				30 Kali	20 Kali									20 Kali		
		Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan				35 Kali	35 Kali									35 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
														tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).					
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	55,56 persen		25,93 persen	33,33 persen	33,33 persen	**428.985.000**	**428.985.000**	**360.312.000**							33,33 persen	**242.700.000**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase SRA (Sekolah Ramah Anak)	10,96 persen		9,98 persen	10.37 persen	10.37 persen	**132.201.000**	**132.201.000**	**105.495.000**							10.37 persen	**111.630.000**	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan				27 Kelurahan	27 Kelurahan	132.201.000	132.201.000	105.495.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Sekolah Ramah Anak (SRA), Kelurahan, APSAI	27 Kelurahan	111.630.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak yang dilaksanakan				3 Kali	6 Kali										6 Kali		
		Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali										1 Kali		
		Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA				10 Sekolah	15 Sekolah										15 Sekolah		
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase forum anak yang aktif	40,63 persen		3,13 persen	15.63 persen	15.63 persen	**296.784.000**	**296.784.000**	**254.817.000**							15.63 persen	**131.070.000**	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan KHA yang dilaksanakan				4 Kali	2 Kali	41.850.000	41.850.000	35.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	2 Kali	38.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu				4 Kelompok	3 Kelompok										3 Kelompok		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).				
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	204.934.000	204.934.000	197.546.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	1 Kali	52.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan				2 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan Pelatihan Forum Anak yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan				8 Kali	8 Kali									8 Kali		
		Jumlah Koordinasi dengan Pendamping Forum Anak Kelurahan yang dilaksanakan				27 Kelurahan	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah koordinasi peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Koordinasi Peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Koordinasi Program Kerja Forum Anak Tingkat Kota yg dilaksanakan				8 Kali	15 Kali									15 Kali		
		Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan agen perubahan di Sekolah Ramah Anak				9 Sekolah	9 Sekolah									9 Sekolah		
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan FGD Kader Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali	50.000.000	50.000.000	21.921.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	0 Kali	40.170.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan pelatihan Kader Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB				4 Kelompok	5 Kelompok									5 Kelompok		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target		
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang dilaksanakan				2 Kali	1 Kali							baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).		1 Kali		
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**333.103.000**	**82.573.000**	**78.276.000**					100,00 persen	**305.445.000**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**103.245.000**	**52.783.000**	**31.246.000**					100 persen	**152.393.000**	
		Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen		100 persen		100 persen								100 persen		
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi PPKBM yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali	103.245.000	52.783.000	31.246.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Anak, Masyarakat	0 Kali	103.245.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Program Roots yang dilaksanakan				2 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kelurahan yang mendapatkan penghargaan Evaluasi PATBM yang dilaksanakan				3 Kelurahan	3 Kelurahan									3 Kelurahan		
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**153.052.000**	**22.030.000**	**22.030.000**						100 persen	**153.052.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota																	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan case conference kasus anak yang dilaksanakan				48 Kali	78 Kali	153.052.000	22.030.000	22.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Anak korban kekerasan usia <18 tahun	78 Kali	153.052.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang dilaksanakan				35 Kali	65 Kali									65 Kali		
		Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan				25 Kali	45 Kali									45 Kali		
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**76.806.000**	**7.760.000**	**25.000.000**						100 persen	**0**	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen naskah akademik UPTD PPA yang disusun					1 Dokumen	76.806.000	7.760.000	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan pelatihan manajemen kasus yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali									0 Kali		
2.13	**URUSAN**							**5.601.231.000**	**5.015.331.000**	**5.327.513.000**							**5.501.353.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**3.242.033.000**	**3.249.533.000**	**3.091.059.000**						100 persen	**3.279.021.000**	
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**12.604.000**						100 Persen	**18.625.000**	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	1.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	2 Dokumen	3.625.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	804.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	2 Dokumen	1.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	13.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**2.579.108.000**	**2.583.908.000**	**2.454.240.000**						100 Persen	**2.700.740.000**	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	2.542.658.000	2.542.658.000	2.413.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	DPMPPA	14 kali	2.652.590.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	34.950.000	39.750.000	39.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	46.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	1 Dokumen	1.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 Persen	**8.631.000**	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 Kali	1 Kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	1 Kali	8.631.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**214.810.000**	**214.810.000**	**294.100.000**						100 Persen	**198.052.000**	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	12 Bulan	33.500.000	33.500.000	48.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	25.052.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				2 Unit	5 Unit									5 Unit		
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	11 Bulan	24.060.000	24.060.000	24.060.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	DPMPPA	11 Bulan	22.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	6.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	2.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				159 Orang/ Kali	220 Orang/ Kali	145.000.000	145.000.000	209.290.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	220 Orang/ Kali	140.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**226.727.000**	**233.927.000**	**233.927.000**						100 Persen	**175.079.000**	
2.13.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	2.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	81.600.000	81.600.000	81.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	68.979.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	142.727.000	149.927.000	149.927.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	103.700.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.	**Pemeliharaan Barang**	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	**195.888.000**	**195.888.000**	**91.188.000**						100	**177.894.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.09	**Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen			Persen	Persen									Persen		
2.13.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	65.088.000	65.088.000	65.388.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	65.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	1 Unit	120.000.000	120.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	1 Unit	102.094.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 Bulan	12 Bulan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	10.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	100,00 persen		16,67 persen	50,00 persen	50,00 persen	**1.221.405.000**	**618.405.000**	**1.198.405.000**						50,00 persen	**1.240.453.000**	
2.13.03. 2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	66.67 persen		11,11 persen	11.11 persen	11.11 persen	**1.221.405.000**	**618.405.000**	**1.198.405.000**						11.11 persen	**1.240.453.000**	
2.13.03. 2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang di fasilitasi kegiatan Karya Bhakti TNI				1 Kelurahan	0 Kelurahan	1.221.405.000	618.405.000	1.198.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Kelurahan	1.240.453.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kelurahan yang di fasilitasi kegiatan TMMD				3 Kelurahan	3 Kelurahan					Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				3 Kelurahan		
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	70,37 persen		51,85 persen	59,26 persen	59,26 persen	**55.900.000**	**55.900.000**	**62.820.000**						59,26 persen	**50.878.000**	
2.13.04. 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	100 persen	**55.900.000**	**55.900.000**	**62.820.000**						100 persen	**50.878.000**	
2.13.04.	Fasilitasi Evaluasi	Jumlah dokumen evaluasi				1	1	55.900.000	55.900.000	62.820.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Kelurahan	1	50.878.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.01.18	Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	perkembangan kelurahan yang disusun				Dokumen	Dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		Dokumen		Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan				3 Kelurahan	3 Kelurahan									3 Kelurahan		
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,92 persen		95,97 persen	96,35 persen	96,35 persen	**1.081.893.000**	**1.091.493.000**	**975.229.000**						96,35 persen	**931.001.000**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	100 persen	**1.081.893.000**	**1.091.493.000**	**975.229.000**						100 persen	**931.001.000**	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen evaluasi pemberdayaan LKK yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	210.540.000	214.140.000	149.048.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	2 Dokumen	266.415.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan sosialisasi program LEK RISANI (LKK Mandiri Menuju Masyarakat Madani) yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali									0 Kali		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	88.753.000	89.953.000	68.517.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	1 Kali	248.936.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKK yang dilaksanakan				5 Kali	1 Kali									1 Kali		
2.13.05.	Fasilitasi Pemerintah	Jumlah inovator TTG yang				3	3 Inovator	102.000.000	102.000.000	59.591.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Lembaga	3	102.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.01.06	Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	terfasilitasi				Inovator					Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	Inovator		Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah keikutsertaan dalam event TTG tingkat nasional				1 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand gelar karya TTG				3 Kelurahan	0 Kelurahan									0 Kelurahan		
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat				3 Kelurahan	3 Kelurahan	71.000.000	71.000.000	47.753.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	3 Kelurahan	71.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK Kota Pekalongan				12 Bulan	12 Bulan	609.600.000	614.400.000	650.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	12 Bulan	242.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan Bintek pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Capasity Building TP PKK yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan digital marketing yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah plastik yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan TP3 PKK yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Gagah (Tanggap dan Tangguh) Bencana tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 Kecamatan	4 Kecamatan									4 Kecamatan		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kelompok Bank Sampah yang mendapat penghargaan lomba Bank Sampah				3 Kelompok	3 Kelompok									3 Kelompok		
		Jumlah Kelompok UP2K PKK				3 TP	3 TP PKK									3 TP		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK				PKK Kelurahan	Kelurahan									PKK Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan binaan yang dibina				8 Kelurahan	8 Kelurahan									8 Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK				3 TP PKK Kelurahan	3 TP PKK Kelurahan									3 TP PKK Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Beberan dan Simulasi Pola Asuh				3 TP PKK Kelurahan	3 TP PKK Kelurahan									3 TP PKK Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK				3 TP PKK Kelurahan	3 TP PKK Kelurahan									3 TP PKK Kelurahan		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**27.829.005.000**	**28.254.653.000**	**28.773.337.000**							**27.200.753.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**20.172.325.000**	**20.185.325.000**	**21.071.678.000**						100 persen	**19.442.136.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**15.180.000**						100 persen	**21.500.000**	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	3.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.	Koordinasi dan	Jumlah dokumen RKA dan				2	2	1.500.000	1.500.000	1.200.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Dinas	2	2.500.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.01.02	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	perubahan RKA yang disusun				dokumen	dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perhubungan	dokumen		Perhubungan
2.15.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	11.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	16.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
2.15.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.563.834.000**	**4.568.634.000**	**4.129.923.000**						100 persen	**5.273.434.000**	
2.15.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.478.449.000	4.478.449.000	4.040.023.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	14 kali	5.185.434.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	83.385.000	88.185.000	87.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	86.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	1 dokumen	2.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 persen	**26.200.000**	**26.200.000**	**24.945.000**						100 persen	**40.000.000**	
2.15.01. 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan monev aset dinas perhubungan				12 bulan	12 bulan	26.200.000	26.200.000	24.945.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinas Perhubungan	12 bulan	40.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**150.000.000**	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	1 kali	150.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**655.581.000**	**655.581.000**	**726.110.000**						100 persen	**672.500.000**	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	5.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	74.100.000	74.100.000	96.674.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	75.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				13 unit	13 unit									13 unit		
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	12.881.000	12.881.000	12.881.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	7.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	12 bulan	307.900.000	307.900.000	307.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	325.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	168.200.000	168.200.000	158.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	170.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan																
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	2.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang/ kali	100 orang/ kali	85.000.000	85.000.000	142.955.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	100 orang/kali	87.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**14.125.056.000**	**14.137.756.000**	**15.548.116.000**						100 persen	**12.474.702.000**	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.800.000	1.800.000	1.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	2.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	13.803.056.000	13.803.056.000	15.213.656.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	12.151.702.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	320.200.000	332.900.000	332.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	321.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**776.154.000**	**776.154.000**	**622.404.000**						100 persen	**810.000.000**	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	317.554.000	317.554.000	347.404.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dinas Perhubungan	12 bulan	270.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	3 unit	400.000.000	400.000.000	216.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	3 unit	500.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	58.600.000	58.600.000	58.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	40.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio		0,35 ratio	0,44 ratio	0,44 ratio	**7.656.680.000**	**8.069.328.000**	**7.701.659.000**						0,44 ratio	**7.758.617.000**	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.580.300.000**	**2.780.148.000**	**2.793.898.000**						100 persen	**2.525.956.000**	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen survey lalu lintas yang disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	60.000.000	30.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	1 Dokumen	62.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang dilaksanakan				250 Kali	250 Kali	2.520.300.000	2.720.148.000	2.763.048.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	250 Kali	2.463.956.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah fasilitasi kegiatan mudik lebaran yang dilaksanakan					2 Unit									2 Unit		
		Jumlah kegiatan operasi dan penertiban lalu lintas				40 Kali	40 Kali									40 Kali		
		Jumlah kegiatan Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan									3 Kegiatan		
		Jumlah perlintasan sebidang yang difasilitasi				4 Unit	4 Unit									4 Unit		
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	4 jenis		3 jenis	4 jenis	4 jenis	**3.024.500.000**	**3.274.100.000**	**3.176.300.000**						4 jenis	**3.276.005.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		persentase ketersediaan perlengkapan jalan	100 persen		100 persen		91 persen									91 persen		
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum bermeterisasi yang dipasang				215 unit	196 unit	884.000.000	1.024.000.000	1.224.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	196 unit	611.305.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang dibangun				17 Lokasi	16 Lokasi									16 Lokasi		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jasa Konsultan Perencanaan Marka Jalan yang difasilitasi				1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	632.500.000	632.500.000	434.833.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	1 Pekerjaan	1.150.700.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Cermin Tikungan yang diadakan				15 unit	15 unit									15 unit		
		Jumlah Lampu flashing yang dipasang				5 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah panjang pengecatan marka jalan yang dilakssanakan				7500 meter	0 meter									0 meter		
		Jumlah Vehicle Detector ATCS yang dipasang				2 unit	2 unit									2 unit		
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	1.214.000.000	1.323.600.000	1.324.277.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	12 bulan	1.214.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Lampu penerangan jalan umum yang diganti LED				120 unit	141 unit									141 unit		
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pemeliharaan rambu dan instalasi lalu lintas				12 bulan	12 bulan	294.000.000	294.000.000	193.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	12 bulan	300.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Lampu LED Aspek 30 cm				3 Unit	0 Unit									0 Unit		
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	**104.100.000**	**54.100.000**	**54.100.000**						1 kali	**155.000.000**	
		Persentase ketercapaian Pengelolaan Terminal Penumpang	100 persen		100 persen		100 persen									100 persen		
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah halte yang dipelihara				3 unit	3 unit	29.400.000	54.100.000	54.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembanga	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air	Pengguna Jalan	3 unit	30.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	n Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.				
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah titik parkir baru yang diterbitkan izinnya	10 titik per tahun		2 titik per tahun	2 titik per tahun	2 titik per tahun	**381.000.000**	**381.000.000**	**309.664.000**						2 titik per tahun	**410.000.000**	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian potensi parkir yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	381.000.000	381.000.000	309.664.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan dan Juru Parkir	1 dokumen	410.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan juru parkir yang diadakan				96 kegiatan	96 kegiatan									96 kegiatan		
		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang difasilitasi				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah pelaksanaan operasi gabungan parkir yang diadakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah Pemeliharaan Aplikasi yang diadakan				6 paket	3 paket									3 paket		
		Jumlah sosialisasi juru parkir yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	25.06 persen		70.33 persen	65.26 persen	65.26 persen	**898.461.000**	**899.661.000**	**805.461.000**						65.26 persen	**734.656.000**	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan				4 unit	4 unit	630.941.000	630.941.000	630.941.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	4 unit	444.656.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tanda bukti lulus uji yang diadakan				6771 buah	0 buah	150.695.000	150.695.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	0 buah	170.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bulan Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor yang diadakan				12 Bulan	12 Bulan	103.325.000	104.525.000	174.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan	Kendaraan Wajib Uji	12 Bulan	105.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Pelayanan Dasar	dan transportasi perkotaan.				
		Jumlah Pemeliharaan Aplikasi yang dilaksanakan				4 Paket	4 Paket									4 Paket		
		Jumlah Pemeliharaan dan Kalibrasi yang dilaksanakan				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah pengadaan kursi pelayanan					10 Set									10 Set		
		Jumlah pengadaan running teks					2 Unit									2 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara				9 Unit	9 Unit									9 Unit		
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan kunjungan pembinaan usaha perbengkelan yang diadakan				5 bulan	0 bulan	13.500.000	13.500.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	0 bulan	15.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92 persen		90 persen	92 persen	92 persen	**470.219.000**	**482.219.000**	**460.166.000**						92 persen	**550.000.000**	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional ATCS yang difasilitasi				12 bulan	12 bulan	408.219.000	420.219.000	418.136.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pelajar	12 bulan	480.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah CCTV ATCS yang diadakan				6 Unit	6 Unit									6 Unit		
		Jumlah Monitor Komputer ATCS yang diadakan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah Tenaga Operator ATCS yang difasilitasi				120 orang/bulan	120 orang/bulan									120 orang/bulan		
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelajar Pelopor yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.000.000	32.000.000	21.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pelajar	1 Kegiatan	35.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan									3 Kegiatan		
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Kegiatan Forum LLAJ yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	30.000.000	30.000.000	20.355.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur	8. Perluasan dan peningkatan	Pelajar	3 kali	35.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota										Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.				
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83 persen		75 persen	83 persen	83 persen	**65.500.000**	**65.500.000**	**15.500.000**						83 persen	**20.000.000**	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin Pelabuhan On Shore yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	65.500.000	65.500.000	15.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat	0 Dokumen	20.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Kegiatan Tinjauan Lapangan Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Tinjauan Lapangan yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	12 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**65.200.000**	**65.200.000**	**40.020.000**						2 kegiatan	**47.000.000**	
		persentase pelaksanaan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100 persen		100 persen		100 persen									100 persen		
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah SDM tenaga LLAJ yang dibina				78 orang	0 orang	16.700.000	16.700.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Perusahaan Angkutan Umum	0 Orang	17.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah awak angkutan umum yang dibina dan diseleksi				35 orang	30 orang	39.100.000	39.100.000	30.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Perusahaan Angkutan Umum	30 orang	20.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Monitoring Pada Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan				8 kunjungan	8 kunjungan	9.400.000	9.400.000	9.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi	Perusahaan Angkutan Umum	8 kunjungan	10.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Dasar	perkotaan.				
		Jumlah pengusaha angkutan umum yang dibina				25 orang	25 orang									25 orang		
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah angkutan umum yang difasilitasi tahun N	30.7 Persen		30.7 Persen	30.7 Persen	30.7 Persen	**67.400.000**	**67.400.000**	**46.550.000**						30.7 Persen	**40.000.000**	
		Persentase pembinaan awak angkutan umum	30.73 persen		30.73 persen		30.73 persen									30.73 persen		
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Kota yang difasilitasi				73 armada	0 armada	67.400.000	67.400.000	46.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	0 armada	40.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah armada becak yang difasilitasi dan dibina				100 armada	100 armada									100 armada		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**12.935.567.000**	**13.650.411.000**	**13.489.014.000**							**13.434.107.000**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.704.292.000**	**4.987.592.000**	**5.144.371.000**						100 persen	**4.856.045.000**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**15.800.000**						100 persen	**35.750.000**	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	2 dokumen	10.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinkominfo	2 dokumen	1.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah					12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 Bulan	23.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				1 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**3.278.757.000**	**3.283.557.000**	**3.373.693.000**						100 persen	**3.298.729.000**	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.235.957.000	3.235.957.000	3.326.393.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	14 kali	3.237.229.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	41.300.000	46.100.000	45.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	1 dokumen	1.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**67.000.000**	**71.000.000**						100 persen	**75.380.000**	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	1 kali	10.380.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi cukai hasil tembakau melalui media				3 kali	3 kali	-	62.000.000	66.000.000	Kota Pekalongan,	DBH Cukai	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dinkominfo	3 kali	65.000.000	Dinas Komunikasi dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		cetak/elektronik yang diselenggarakan									Pekalongan Barat, Podosugih	Hasil Tembakau (CHT)	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Informatika
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**387.660.000**	**387.660.000**	**397.230.000**						100 persen	**430.763.000**	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5.300.000	5.300.000	5.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	5.450.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	112.000.000	112.000.000	112.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	114.760.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				29 unit	29 unit									29 unit		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	115.000.000	115.000.000	115.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	11 bulan	126.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	43.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	15.360.000	15.360.000	15.360.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	15.232.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				60 orang/kali	75 orang/kali	100.000.000	100.000.000	109.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	75 orang/kali	125.821.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**586.420.000**	**591.220.000**	**613.751.000**						100 persen	**563.600.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah																
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	2.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	481.320.000	481.320.000	503.851.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	455.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	102.700.000	107.500.000	107.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	106.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**425.955.000**	**642.155.000**	**672.897.000**						100 persen	**451.823.000**	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					27 Unit	171.255.000	172.455.000	203.197.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	27 Unit	210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	3 unit	89.000.000	304.000.000	304.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	3 unit	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah ruang aula yang terbangun				1 ruang	1 ruang									1 ruang		
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	165.700.000	165.700.000	165.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	131.823.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.234.061.000**	**5.376.561.000**	**5.241.561.000**						100 persen	**5.898.917.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	92,50 persen		80 persen	85 persen	85 persen	**5.234.061.000**	**5.376.561.000**	**5.241.561.000**						85 persen	**5.898.917.000**	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perda KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	15.755.000	15.755.000	15.755.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten laman dan media sosial yang diunggah				960 konten	1060 konten	120.800.000	125.700.000	125.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1060 konten	121.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jam siaran RKB per hari				18 jam	18 jam	2.815.804.000	2.837.804.000	2.947.804.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	18 jam	4.023.447.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah jam tayangan Batik TV per hari				13 jam	13 jam									13 jam		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah bulan Layanan PPID Utama				12 Bulan	12 Bulan	480.072.000	483.672.000	238.172.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan	387.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Diseminasi KIP yang diselenggarakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah dokumen pengelolaan KIP yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah kegiatan verifikasi KIP dari Komisi Informasi Jateng yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Lomba Kreativitas Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan				4 jenis	0 jenis									0 jenis		
		Jumlah penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah) yang dilaksanakan				1 kali	0 kali									0 kali		
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah advertorial yang dimuat di media massa dalam setahun				1000 kali	1000 kali	1.341.775.000	1.345.375.000	1.395.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1000 kali	924.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	JUmlah dana hibah yang disalurkan				2 lembaga	3 lembaga	81.405.000	181.405.000	131.905.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	ASN dan Masyarakat	3 lembaga	33.300.000	Dinas Komunikasi dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pendampingan FK Metra yang dilakukan				4 kali	4 kali				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		4 kali		Informatika
		Jumlah keikutsertaan lomba FK mitra dengan Pemangku Kepentingan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah KIM yang dibentuk/didampingi				5 Kelurahan	0 Kelurahan									0 Keluraha n		
2.16.02. 2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Bulan Pengelolaan pelayanan kegawatdaruratan (Call Center 112)				12 Bulan	12 Bulan	354.030.000	362.430.000	362.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan	360.170.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan (LaporGub)				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan publik (SP4N Lapor)				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan (Wadul Aladin)				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Desiminasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diselenggarakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
2.16.02. 2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pelatihan Fotografi yang dilaksanakan					1 kali	24.420.000	24.420.000	24.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 kali	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Pelatihan Jurnalistik yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Press Conference yang diadakan				3 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Sosialisasi Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,30 indeks		2,80 indeks	3,00 indeks	3,00 indeks	**2.997.214.000**	**3.286.258.000**	**3.103.082.000**						3,00 indeks	**2.679.145.000**	
2.16.03. 2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	66.06 persen		56.97 persen	60.61 persen	60.61 persen	**2.076.900.000**	**1.836.240.000**	**2.082.500.000**						60.61 persen	**1.699.920.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dalam layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Domain dan Subdomain Pemerintah Kota Pekalongan				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	6.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD dan masyarakat	12 bulan	20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan jarinagn Batik.Net				12 Bulan	12 Bulan	2.069.900.000	1.829.240.000	2.075.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD dan masyarakat	12 Bulan	1.679.920.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah kapasitas Bandwidth Internet yang disewa				1500 Mbps	1750 Mbps									1750 Mbps		
		Jumlah titik jaringan berbasis Fiber Optic yang dibangun				3 titik	5 titik									5 titik		
		Jumlah titik layanan akses wifi gratis yang disediakan untuk masyarakat				37 titik	37 titik									37 titik		
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	51,40 persen		4.67 persen	9.35 persen	9.35 persen	**920.314.000**	**1.450.018.000**	**1.020.582.000**						9.35 persen	**979.225.000**	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen panduan manajemen spbe yang disusun				4 dokumen	0 dokumen	206.025.000	506.025.000	219.330.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	0 dokumen	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah faasilitasi Kegiatan Saka Milenial				1 Lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
		Jumlah forum koordinasi pejnerapan SPBE yang dialksanakan				3 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Perwal Kebijakan SPBE yang dilaksanakan				2 Perwal	2 Perwal									2 Perwal		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan DC dan DRC				12 bulan	12 bulan	106.600.000	353.260.000	331.619.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	12 bulan	129.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah capacity building tehnik pelayanan jaringan diselenggarakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah unit penambahan DRC				3 Unit	3 Unit									3 Unit		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Aplikasi	4 Aplikasi	377.250.000	360.294.000	347.294.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Perangkat Daerah dan ASN	4 Aplikasi	437.725.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Aplikasi PBE yang dilaksanakan				10 Aplikasi	10 Aplikasi									10 Aplikasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah website yang dikembangkan dan dipelihara				65 website	65 website						Publik	pelayanan publik.		65 website		
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi smartcity yang dikembangkan (SIDa)				1 aplikasi	0 aplikasi	177.904.000	177.904.000	73.404.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	0 aplikasi	185.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Fasilitasi kegiatan yang mendukung Komunitas TIK (SIDa)				3 komunitas	3 komunitas									3 komunitas		
		Jumlah fitur aplikasi smartcity yang dibeli				1 aplikasi	0 aplikasi									0 aplikasi		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan TIK bagi ASN dan Masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)				8 kali	8 kali	32.850.000	32.850.000	29.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	8 kali	42.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen pelaporan monitoring evaluasi penyelenggaraan SPBE				1 dokumen	1 dokumen	19.685.000	19.685.000	19.685.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	1 dokumen	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah monev SPBE yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**107.118.000**	**143.118.000**	**133.925.000**							**109.027.000**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**107.118.000**	**143.118.000**	**133.925.000**						100,00 persen	**109.027.000**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 persen		100 persen		100 persen	**107.118.000**	**143.118.000**	**133.925.000**						100 persen	**109.027.000**	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan				1 aplikasi	1 aplikasi	107.118.000	143.118.000	133.925.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 aplikasi	109.027.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah dokumen database indikatro TIK yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah dokumen data SDTD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah dokumen publikasi statistik yang dicetak				6 Dokumen	6 Dokumen									6 Dokumen		
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**108.127.000**	**108.127.000**	**75.027.000**							**102.819.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen		0,93 persen	2,80 persen	2,80 persen	**108.127.000**	**108.127.000**	**75.027.000**						2,80 persen	**102.819.000**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	56.07 persen		9.35 persen	9.35 persen	9.35 persen	**82.897.000**	**82.897.000**	**69.797.000**						9.35 persen	**74.819.000**	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola dan manajemen kemanan informasi yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	16.075.000	16.075.000	16.075.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah leaflet promosi keamanan informasi yang dicetak				4 rim	0 rim	42.245.000	42.245.000	36.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	0 rim	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah lisensi Endpoint Security (Antivirus) yang dibeli				1 lisensi	1 lisensi									1 lisensi		
		Jumlah lisensi Sertifikat Elektronik TLS *.pekalongankota.go.id yang dibeli				1 lisensi	0 lisensi									0 lisensi		
		Jumlah penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah sosialisasi Keamanan Informasi yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Assessment keamanan informasi yang dialksanakan				2 kali	2 kali	24.577.000	24.577.000	17.477.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	2 kali	29.819.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah pendampingan integrasi Tanda Tangan Elektronik yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**25.230.000**	**25.230.000**	**5.230.000**						100 persen	**28.000.000**	
2.21.02.	Operasionalisasi Jaring	Jumlah dokumen prosedur				2	2	25.230.000	25.230.000	5.230.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	ASN	2	28.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.02.01	Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persandian yang disusun				dokumen	dokumen				Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		dokumen		Komunikasi dan Informatika
		Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah naskah dinas yang dikirim / diterima				76 dokumen	76 dokumen									76 dokumen		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.797.893.000**	**7.269.889.000**	**7.379.871.000**							**6.296.489.000**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.127.747.000**	**5.662.399.000**	**5.741.721.000**						100 persen	**4.626.705.000**	
2.18.01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**23.632.000**						100 Persen	**22.450.000**	
2.18.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	2 dokumen	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	2 dokumen	1.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	19.632.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	18.450.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun																
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**3.195.103.000**	**3.199.903.000**	**2.993.529.000**						100 Persen	**3.680.771.000**	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.145.003.000	3.145.003.000	2.948.117.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	14 kali	3.625.871.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	48.600.000	53.400.000	44.012.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	53.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	1 dokumen	1.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**36.742.000**	**5.794.000**	**5.794.000**						100 Persen	**36.742.000**	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	36.742.000	5.794.000	5.794.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	1 kali	36.742.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**341.231.000**	**341.231.000**	**731.160.000**						100 Persen	**293.006.000**	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.524.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	128.731.000	128.731.000	469.421.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	DPMPTSP	12 bulan	88.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
		Jumlah peralatan dan				14 unit	108 unit									108 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		perlengkapan gedung kantor yang diadakan									Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				Pintu
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.503.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	45.000.000	45.000.000	69.206.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	11 bulan	45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	35.006.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	60.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				60 orang/kali	100 orang/kali	100.000.000	100.000.000	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	100 orang/kali	91.806.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**509.296.000**	**568.896.000**	**558.835.000**						100 Persen	**504.156.000**	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	12.267.000	12.267.000	7.230.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	7.127.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	300.000.000	350.000.000	349.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DPMPTSP	12 bulan	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	197.029.000	206.629.000	202.205.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	197.029.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**1.029.375.000**	**1.530.575.000**	**1.428.771.000**						100 Persen	**89.580.000**	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	140.302.000	141.502.000	113.762.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	825.863.000	1.325.863.000	1.285.601.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	1 Unit	19.580.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	63.210.000	63.210.000	29.408.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**92.852.000**	**92.852.000**	**90.852.000**						1 dokumen	**118.112.000**	
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Peraturan penanaman modal yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**36.852.000**	**36.852.000**	**40.852.000**						1 dokumen	**48.112.000**	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Audit ISO yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	36.852.000	36.852.000	40.852.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang	DPMPTSP	1 dokumen	48.112.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah peraturan penanaman modal disusun				1 peraturan	1 peraturan									1 peraturan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Berkualitas dan Berkeadilan	mampu berdaya saing.				
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun/disosialisasikan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**56.000.000**	**56.000.000**	**50.000.000**						1 dokumen	**70.000.000**	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	36.000.000	36.000.000	34.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	1 dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Peluang dan Potensi investasi yang disusun dan di-update				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	15.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	1 Dokumen	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen		50,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**83.567.000**	**83.567.000**	**42.567.000**						100,00 persen	**81.770.000**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**83.567.000**	**83.567.000**	**42.567.000**						100 persen	**81.770.000**	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran/Event Investasi Penanaman Modal				2 Kali	1 Kali	83.567.000	83.567.000	42.567.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Investor	1 Kali	81.770.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500 dokumen		2500 dokumen	2500 dokumen	2500 dokumen	**921.652.000**	**874.760.000**	**950.420.000**						2500 dokumen	**924.271.000**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi**	Persentase Penyelesaian Perizinan secara elektronik sesuai Standar Pelayanan	94 persen		94 persen	94 persen	94 persen	**921.652.000**	**874.760.000**	**950.420.000**						94 persen	**924.271.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah laporan perizinan dan non perizinan yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	555.820.000	499.328.000	498.328.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	12 Laporan	555.682.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan yang sesuai standar pelayanan				25 dokumen	25 dokumen	237.200.000	246.800.000	246.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	25 dokumen	237.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	108.632.000	108.632.000	85.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	3 Dokumen	111.389.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan yang disusun				12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
		Jumlah sosialisasi Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan				2 Kali	1 Kali									1 Kali		
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan				24 Kali	24 Kali	20.000.000	20.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	24 Kali	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Investasi Baru pertahun	40,53 Miliar Rupiah		6,42 Miliar Rupiah	6,68 Miliar Rupiah	6,68 Miliar Rupiah	**460.606.000**	**455.090.000**	**454.090.000**						6,68 Miliar Rupiah	**434.243.000**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Objek Pengawasan/ Pengendalian Penanaman Modal	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**460.606.000**	**455.090.000**	**454.090.000**						100 persen	**434.243.000**	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimbingan Teknis/ Sosialisasi implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko				3 Kegiatan	3 Kegiatan	392.626.000	388.150.000	366.916.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif,	Perusahaan di Kota Pekalongan	3 Kegiatan	267.231.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang dilaksanakan									Semua Kelurahan	Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Bimbingan Teknis/ Sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko yang dilaksanakan				5 Kegiatan	5 Kegiatan									5 Kegiatan		
		Jumlah FGD/ Workshop Penanaman Modal				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang difasilitasi				3 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi dalam pelaksanaan penanaman modal				100 Perusahaan	150 Perusahaan	67.980.000	66.940.000	87.174.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Perusahaan di Kota Pekalongan	150 Perusahaan	102.380.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**111.469.000**	**101.221.000**	**100.221.000**						100 persen	**111.388.000**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**111.469.000**	**101.221.000**	**100.221.000**						100 persen	**111.388.000**	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring LKPM Online (SiDa)				12 Bulan	12 Bulan	111.469.000	101.221.000	100.221.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	DPMPTSP	12 Bulan	111.388.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah bulan pengelolaan Website (SiDa)				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**629.644.000**	**12.293.487.000**	**12.600.238.000**							**528.024.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,58 indeks		15,77 indeks	16,09 indeks	16,09 indeks	**629.644.000**	**12.293.487.000**	**12.600.238.000**						16,09 indeks	**528.024.000**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	3.33 persen		1.33 persen	1.33 persen	1.33 persen	**479.544.000**	**1.469.312.000**	**1.443.036.000**						1.33 persen	**335.024.000**	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah alihmedia konten digital perpustakaan / ePustaka iPekalongankota				900 Konten	900 Konten	99.096.000	407.616.000	395.678.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlin daskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	900 Konten	92.335.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah				1 Perpustakaan		
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	503.720.000	502.970.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlin daskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	1 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah kunjungan monitoring perpustakaan yang dilaksanakan				50 kali	50 kali	99.380.000	72.008.000	72.008.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	50 kali	26.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah layanan perpustakaan diluar jam kerja yang dilaksanakan				64 Perpustakaan	64 Perpustakaan									64 Perpustakaan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlin daskan nilai2 religiusitas.				
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang diberikan pendampingan				130 Perpustakaan	130 Perpustakaan	58.000.000	58.000.000	54.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	130 Perpustakaan	45.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan keliling yang dilaksanakan				480 kali	480 kali	126.677.000	131.147.000	121.559.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	480 kali	114.389.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Perpustakaan yang disinkronkan dengan UCS Kota Pekalongan				4 perpustakaan	0 perpustakaan									0 perpustakaan		
		Jumlah pojok online yang dilaksanakan				1 lokasi	0 lokasi									0 lokasi		
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penambahan koleksi buku cetak/ebook				396 Eksemplar	0 Eksemplar	96.391.000	296.821.000	296.821.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	0 Eksemplar	56.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Penambahan koleksi buku cetak/ebook				300 buku	100 buku									100 buku		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Penambahan koleksi buku cetak/ebook dana DAK				1625 Eksemplar	1625 Eksemplar					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Publik	kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		1625 Eksemplar		
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kenaikan Nilai Budaya Baca	34,45 persen		32.78 persen	33.4 persen	33.4 persen	**150.100.000**	**10.824.175.000**	**11.157.202.000**						33.4 persen	**193.000.000**	
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat (IKK Output)				1 Kali	1 Kali	29.100.000	29.100.000	23.445.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Kali	28.400.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	56.000.000	10.463.475.000	10.830.157.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Perpustakaan	55.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.23.02. 2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Lomba Perpustakaan Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 kegiatan	0 kegiatan	25.000.000	25.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 kegiatan	31.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02. 2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kegiatan literasi yg diselenggarakan				15 kegiatan	15 kegiatan	40.000.000	306.600.000	303.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	15 kegiatan	77.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**14.768.690.000**	**3.836.822.000**	**3.681.664.000**							**3.611.305.125**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**14.254.729.000**	**3.272.461.000**	**3.150.366.000**						100 persen	**3.105.269.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.24.01.	**Perencanaan,**	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	**16.000.000**	**16.000.000**	**13.000.000**						100	**8.350.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.01	**Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen			persen	persen									persen		
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	2 Dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	2 Dokumen	1.350.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	7.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
2.24.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.356.917.000**	**2.361.717.000**	**2.269.003.000**						100 persen	**2.305.962.000**	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	2.321.417.000	2.321.417.000	2.228.703.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	14 kali	2.257.162.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	34.200.000	39.000.000	39.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 Bulan	47.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Dinarpus	1 Dokumen	1.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD										Utara, Panjang Wetan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
2.24.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**9.500.000**	
2.24.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	1 kali	9.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**167.496.000**	**175.328.000**	**162.302.000**						100 persen	**218.953.000**	
2.24.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	4.755.000	4.755.000	1.755.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	4.686.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	60.000.000	67.832.000	60.306.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	109.655.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				8 unit	7 unit									7 unit		
2.24.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	1.894.000	1.894.000	1.894.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	1.686.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	11 Bulan	40.000.000	40.000.000	34.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	11 Bulan	53.281.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	8.347.000	8.347.000	6.847.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 Bulan	5.931.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.24.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	2.186.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 orang/kali	50 orang/kali	50.000.000	50.000.000	54.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	50 orang/kali	41.527.400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**508.452.000**	**515.652.000**	**515.652.000**						100 persen	**390.109.000**	
2.24.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	1.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	364.500.000	364.500.000	364.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	305.879.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	142.752.000	149.952.000	149.952.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	82.430.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**196.364.000**	**198.764.000**	**185.409.000**						100 persen	**172.395.000**	
2.24.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	88.568.000	87.368.000	86.768.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	77.073.800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.	Pemeliharaan/Rehabilita	Jumlah gedung kantor yang				2 unit	2 unit	80.196.000	83.796.000	76.066.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Dinarpus	2 unit	67.855.300	Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.09.09	si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpelihara secara rutin/berkala									Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				dan Perpustakaan
2.24.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	27.600.000	27.600.000	22.575.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	27.465.900	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	66,67 persen		33,33 persen	46,67 persen	46,67 persen	**339.338.000**	**382.538.000**	**374.567.000**						46,67 persen	**347.462.000**	
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	52,50 indeks		40,00 indeks	45,00 indeks	45,00 indeks									45,00 indeks		
2.24.02. 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen		32.26 persen	32.26 persen	32.26 persen	**72.628.000**	**108.628.000**	**107.074.000**						32.26 persen	**48.336.645**	
2.24.02. 2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah OPD yang telah mendapatkan pembinaan penyusunan arsip aktif (IKK Output)				6 OPD	6 OPD	47.628.000	47.628.000	47.553.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	6 OPD	33.500.478	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		jumlah OPD yang telah mendapatkan pembinaan penyusunan arsip in-aktif (IKK output)				3 OPD	3 OPD									3 OPD		
2.24.02. 2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilaksanakan Audit Kearsipan / monitoring				30 OPD	30 OPD	25.000.000	61.000.000	59.521.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	30 OPD	14.836.167	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02. 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	20 persen		10 persen	14 persen	14 persen	**43.483.000**	**43.483.000**	**45.983.000**						14 persen	**45.745.355**	
2.24.02. 2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (IKK Output)				16 Naskah	0 Naskah	43.483.000	43.483.000	45.983.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	0 Naskah	45.745.355	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah fumigasi arsip yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		jumlah OPD yang telah				1 OPD	1 OPD									1 OPD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		dibuatkan sarana bantu temu balik arsip untuk statis (IKK output)																
		Jumlah pemeliharaan arsip dalam 1 tahun				12 Kali	4 Kali									4 Kali		
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	90 persen		50 persen	70 persen	70 persen	**223.227.000**	**230.427.000**	**221.510.000**						70 persen	**253.380.000**	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inhouse training yang dselenggarakana Arsip tentang Kearsipan				1 Kali	0 Kali	223.227.000	230.427.000	221.510.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	0 Kali	253.380.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**174.623.000**	**181.823.000**	**156.731.000**						100 persen	**158.574.125**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**102.787.000**	**106.387.000**	**81.061.000**						100 persen	**94.916.925**	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan untuk dimusnahkan				1000 Berkas	500 Berkas	75.655.000	78.055.000	53.151.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	500 Berkas	75.706.575	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan				1000 berkas	500 berkas	27.132.000	28.332.000	27.910.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	500 berkas	19.210.350	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**71.836.000**	**75.436.000**	**75.670.000**						100 persen	**63.657.200**	
2.24.03.	Penilaian dan Penetapan	Autentifikasi arsip statis dan				600	600	71.836.000	75.436.000	75.670.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Pengelola	600	63.657.200	Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.04.02	Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPK (IKK Output) hasil alih media kabupaten/kota				Berkas	Berkas				Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	arsip kota pekalongan	Berkas		dan Perpustakaan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.829.654.000**	**9.953.154.000**	**9.395.729.000**							**9.216.475.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.723.237.000**	**4.784.855.000**	**4.443.024.000**						100 persen	**5.145.552.000**	
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**12.327.000**						100 Persen	**22.500.000**	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.016.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	2 dokumen	2.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	997.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	9.314.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	18.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				1 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
3.25.01.	**Administrasi Keuangan**	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	**3.526.830.000**	**3.531.630.000**	**3.352.146.000**						100	**4.062.954.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.02	**Perangkat Daerah**	administrasi keuangan perangkat daerah	persen			Persen	Persen									Persen		
3.25.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.470.310.000	3.470.310.000	3.300.671.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	14 kali	4.001.454.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	55.020.000	59.820.000	50.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	955.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	1 dokumen	1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 Persen	**9.500.000**	
3.25.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Karnaval batik dan hari jadi				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	1 kali	9.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daera	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**261.249.000**	**415.621.000**	**385.227.000**						100 persen	**239.250.000**	
		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
3.25.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	7.800.000	7.800.000	6.488.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	78.230.000	232.602.000	196.437.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	DKP	12 bulan	41.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit	8 unit									8 unit		
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	4.500.000	4.500.000	3.982.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	4.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	60.763.000	60.763.000	58.743.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	11 bulan	67.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	7.456.000	7.456.000	7.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	2.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang/kali	100 orang/kali	100.000.000	100.000.000	109.847.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	100 orang/kali	109.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**452.775.000**	**459.721.000**	**477.951.000**						100 Persen	**254.166.000**	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	1.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.	Penyediaan Jasa	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan	140.425.000	130.571.000	160.571.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	DKP	12 bulan	148.316.000	Dinas Kelautan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.08.02	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				dan Perikanan
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	310.650.000	327.450.000	315.680.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	104.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**456.883.000**	**356.883.000**	**210.373.000**						100 Persen	**557.182.000**	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	112.595.000	112.595.000	110.095.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	110.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	1 Unit	17.400.000	17.400.000	12.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	1 Unit	16.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	296.700.000	196.700.000	67.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	1 unit	397.994.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	30.188.000	30.188.000	20.188.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	33.188.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen		1,00 persen	1,00 persen	1,00 persen	**3.110.029.000**	**2.802.342.000**	**2.586.748.000**						1,00 persen	**2.675.733.000**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan**	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	5 persen		5 persen	5 persen	5 persen	**298.048.000**	**181.200.000**	**98.950.000**						5 persen	**242.115.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota																
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	76.334.000	41.200.000	29.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	1 dokumen	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia					3 Unit	107.428.000	140.000.000	69.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	3 Unit	92.115.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	10 persen		10 persen	10 persen	10 persen	**186.643.000**	**223.600.000**	**180.890.000**						10 persen	**92.350.000**	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan yang dibina				33 KUB	9 KUB	71.418.000	143.700.000	134.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	9 KUB	34.350.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang dibina				4 kelompok	4 kelompok	71.258.000	50.000.000	32.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	4 kelompok	45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan				5 nelayan	3 KUB	43.967.000	29.900.000	14.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	3 KUB	13.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.	**Pengelolaan dan**	Peningkatan Nilai Produksi	6,07		1 persen	1 persen	1 persen	**2.552.187.000**	**2.371.638.000**	**2.306.004.000**						1 persen	**2.308.268.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.03	**Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	persen															
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI				12 bulan	12 bulan	2.552.187.000	2.371.638.000	2.306.004.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan, pedagang ikan	12 bulan	2.308.268.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.2.04	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	48.33 persen		40 persen	43.33 persen	43.33 persen	**51.904.000**	**25.904.000**	**904.000**						43.33 persen	**23.000.000**	
3.25.03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendampingan kepada nelayan pemilik kapal 0 - 5 GT				20 dokumen	45 nelayan	40.904.000	25.904.000	904.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	45 nelayan	12.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	6.15 persen		1,00 persen	1,00 persen	1,00 persen	**1.290.398.000**	**1.391.177.000**	**1.584.723.000**						1,00 persen	**327.234.000**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase Pembudidaya yang dibina	79.36 persen		38.66 persen	61.92 persen	61.92 persen	**443.000.000**	**14.500.000**	**3.850.000**						61.92 persen	**80.000.000**	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan				4 kategori	1 kali	443.000.000	14.500.000	3.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pokdakan dan Poklahsar	1 kali	47.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**847.398.000**	**1.376.677.000**	**1.580.873.000**						100 persen	**222.234.000**	
3.25.04.	Penyediaan Data dan	Jumlah dokumen data bidang				1	1	115.000.000	9.000.000	5.945.000	Kota	Dana	Memperkuat	9. Peningkatan	Pembudida,	1	15.000.000	Dinas Kelautan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.04.01	Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	budidaya yang disusun				dokumen	dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pengolah, pemasar ikan	dokumen		dan Perikanan
3.25.04. 2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Budidaya Ikan 2 Gabungan Kelompok (GAPOKDAKAN)				1 unit	2 unit	520.633.000	718.317.000	938.317.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	2 unit	67.234.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Udang 2 Kelompok				1 unit	2 unit					DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				2 unit		
3.25.04. 2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan Balai Benih Ikan (BBI)				1 BBI	12 bulan	174.505.000	620.100.000	614.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	12 bulan	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Kelompok yang difasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya				1 unit	27 kelompok									27 kelompok		
3.25.04. 2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah benih ikan yang diadakan				750 ekor	4000 ekor	37.260.000	29.260.000	22.261.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	4000 ekor	90.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen		12,2 persen	12,20 persen	12,20 persen	**705.990.000**	**974.780.000**	**781.234.000**						12,20 persen	**1.067.956.000**	
3.25.06. 2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah**	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen		70 persen	70 persen	70 persen	**705.990.000**	**974.780.000**	**781.234.000**						70 persen	**1.004.357.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/ Kota																	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi pelaku usaha perikanan di kawasan technopark (SIDa)				12 bulan	12 bulan	705.990.000	974.780.000	781.234.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	12 bulan	1.004.357.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah gedung technopark yang terpelihara secara rutin				1 Kawasan	1 Kawasan					DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				1 Kawasan		
		Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan (SIDa)				1 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah rehab gedung dikawasan technopark				2 unit	1 unit									1 unit		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**9.048.880.000**	**9.519.179.000**	**9.629.722.000**							**3.404.251.000**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	95,24 persen		91,95 persen	93,69 persen	93,69 persen	**2.335.573.000**	**1.566.272.000**	**1.641.272.000**						93,69 persen	**1.046.470.000**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0.99 Persen		0.39 Persen	0.64 Persen	0.64 Persen	**1.111.801.000**	**150.000.000**	**373.500.000**						0.64 Persen	**950.700.000**	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					30 Orang	-	0	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemuda	30 Orang	500.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah generasi muda yang dibina				300 Orang	300 Orang	636.801.000	150.000.000	358.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Pemuda	300 Orang	450.700.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi				2 Kegiatan	0 Kegiatan				Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		0 Kegiatan		
		Jumlah Kejuaraan Lomba Kepemudaan				2 Kegiatan	0 Kegiatan									0 Kegiatan		
		Jumlah pemuda yang ikut kemah bakti pemuda				300 Orang	0 Orang									0 Orang		
		Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan				300 Orang	0 Orang									0 Orang		
		Jumlah peserta yang dikirim mengikuti upacara tingkat provinsi				30 Orang	0 Orang									0 Orang		
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.621 Persen		0.259 Persen	0.445 Persen	0.445 Persen	**1.223.772.000**	**1.416.272.000**	**1.267.772.000**						0.445 Persen	**95.770.000**	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina				200 Orang	200 Orang	1.223.772.000	1.416.272.000	1.267.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	200 Orang	95.770.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	42,86 persen		11,43 persen	34,29 persen	34,29 persen	**6.713.307.000**	**7.952.907.000**	**7.988.450.000**						34,29 persen	**2.357.781.000**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	80.95 Persen		47.62 Persen	71.43 Persen	71.43 Persen	**1.080.510.000**	**1.190.110.000**	**1.350.110.000**						71.43 Persen	**659.984.000**	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga				4 Lokasi	4 Lokasi	1.080.510.000	1.190.110.000	1.350.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Lokasi	659.984.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah sarana prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah sarpras olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Lokasi	3 Lokasi									3 Lokasi		
2.19.03.	**Penyelenggaraan**	Peningkatan prestasi	47.62		23.81 Persen	33.33	33.33	**1.870.000.000**	**1.670.000.000**	**1.415.543.000**						33.33	**935.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.02	**Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	olahraga tingkat kota	Persen			Persen	Persen									Persen		
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga masyarakat yang dipertandingkan				10 Cabor	10 Cabor	1.670.000.000	1.470.000.000	1.235.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	10 Cabor	735.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina				21 Cabor	21 Cabor									21 Cabor		
		Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan				16 Cabor	16 Cabor									16 Cabor		
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Kejuaraan				71 Sekolah	71 Sekolah	200.000.000	200.000.000	180.543.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	71 Sekolah	200.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	205 orang		10 orang	37 orang	14.28 %	**3.019.890.000**	**4.469.890.000**	**4.619.890.000**						14.28 %	**519.890.000**	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tk. provinsi				250 orang	250 orang	215.800.000	215.800.000	215.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	250 orang	215.800.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlit yang dibina di PPLOPD				72 Orang	72 Orang	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	72 Orang	120.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina				6 Cabor	0 Cabor	2.684.090.000	4.134.090.000	4.284.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	0 Cabor	184.090.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi Pengembangannya				5 Cabor	3 Cabor									3 Cabor		
		Jumlah Induk Cabang Olahraga Prestasi yang dibina				0 Orang	2 induk cabor									2 induk cabor		
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Prestasi Olahraga (IKK Outcome)	24 medali		4 medali		4 medali	**40.000.000**	**20.000.000**	**0**						4 medali	**40.000.000**	
2.19.03.	Pengembangan	Jumlah Organisasi				2 Cabor	0 Cabor	40.000.000	20.000.000	0	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Atlet	0 Cabor	40.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.04.02	Organisasi Keolahragaan	Keolahragaan yang dikembangkan									Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	24 Event		4 Event	4 Event	57.14 %	**702.907.000**	**602.907.000**	**602.907.000**						57.14 %	**202.907.000**	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan				5 Cabor	5 Cabor	602.907.000	602.907.000	602.907.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Atlet	5 Cabor	102.907.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4.267.140.000**	**4.206.740.000**	**4.109.583.000**							**3.611.028.000**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.566.877.000**	**1.831.877.000**	**1.694.720.000**						100 persen	**1.777.130.000**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	32 Event		2 Event	6 Event	6 Event	**1.523.720.000**	**1.313.720.000**	**1.279.720.000**						6 Event	**1.000.000.000**	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan				4 Kegiatan	5 Kegiatan	1.523.720.000	1.313.720.000	1.279.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Masyarakat	5 Kegiatan	1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi				40 Komunitas	40 Komunitas									40 Komunitas		
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama budaya yang difasilitasi				5 event	6 event									6 event		
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	52 Event		2 Event	10 Event	10 Event	**1.043.157.000**	**518.157.000**	**415.000.000**						10 Event	**777.130.000**	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah cabang seni yang dilombakan				4 Cabang	4 Cabang	1.010.000.000	485.000.000	415.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Masyarakat	4 Cabang	747.130.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan yang diselenggarakan dalam pelindungan, pengembangan				8 Event	8 Event									8 Event		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya																
		Jumlah komunitas yang terfasilitasi				20 Komunitas	20 Komunitas									20 Komunitas		
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek									3 Objek		
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan				1 Lomba	0 Lomba	33.157.000	33.157.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Masyarakat	0 Lomba	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**339.188.000**	**342.788.000**	**402.788.000**						100,00 persen	**538.138.000**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	165 komunitas		5 komunitas	26 komunitas	26 komunitas	**339.188.000**	**342.788.000**	**402.788.000**						26 komunitas	**538.138.000**	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah cabang seni yang dibintekkan				3 Cabang Seni	3 Cabang Seni	90.248.000	90.248.000	100.248.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Komunitas/Sanggar Kesenian	3 Cabang Seni	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)				90 Orang	90 Orang									90 Orang		
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi melalui DKKP				26 Komunitas/sanggar kesenian	40 Komunitas/sanggar kesenian	248.940.000	252.540.000	302.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Komunitas/Sanggar Kesenian	40 Komunitas/sanggar kesenian	498.138.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah lembaga kesenian tradisonal yang dibina				1 Lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
		Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya yang difasilitasi melalui DKKP					3 Kegiatan									3 Kegiatan		
2.22.04	**PROGRAM**	Persentase pembinaan	100,00		100,00	100,00	100,00	**46.426.000**	**46.426.000**	**26.426.000**						100,00	**68.141.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PEMBINAAN SEJARAH	Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen		persen	persen	persen									persen		
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**46.426.000**	**46.426.000**	**26.426.000**						100 Persen	**68.141.000**	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang terpublikasi				2 Dokumen	1 Dokumen	46.426.000	46.426.000	26.426.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Masyarakat	1 Dokumen	68.141.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	97,52 persen		88,65 persen	92,20 persen	92,20 persen	**27.500.000**	**27.500.000**	**27.500.000**						92,20 persen	**19.534.000**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.19 Persen		1.42 Persen	2.13 Persen	2.13 Persen	**27.500.000**	**27.500.000**	**27.500.000**						2.13 Persen	**19.534.000**	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan dengan SK Walikota				3 Objek	3 Objek	27.500.000	27.500.000	27.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Objek	19.534.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Pemberian tanda bukti kepemilikan dan keaslian cagar budaya				3 Buah	3 Buah									3 Buah		
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase pengunjung museum batik	4,80 persen		4,55 persen	4,66 persen	4,66 persen	**1.287.149.000**	**1.958.149.000**	**1.958.149.000**						4,66 persen	**1.208.085.000**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah pengunjung museum batik	139000 Orang		25000 Orang	27000 Orang	27000 Orang	**1.287.149.000**	**1.958.149.000**	**1.958.149.000**						27000 Orang	**1.208.085.000**	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Bulan Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Batik				12 Bulan	12 Bulan	240.688.000	240.047.000	240.047.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunjung Museum Batik	12 Bulan	210.684.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1307 Koleksi	1307 Koleksi					DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				1307 Koleksi		
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kegiatan yang Diselenggarakan dalam Pengelolaan Batik (SIDa)				8 Kegiatan	8 Kegiatan	925.250.000	1.003.059.000	1.003.059.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Revolusi Mental dan Pembangunan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama	Pengunjung Museum Batik	8 Kegiatan	876.190.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Kebudayaan	komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.				Kepemudaan dan Olahraga
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum				12 Bulan	12 Bulan	121.211.000	715.043.000	715.043.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunjung Museum Batik	12 Bulan	121.211.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.901.280.000**	**13.020.780.000**	**12.090.051.000**							**12.699.959.000**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.628.630.000**	**6.417.130.000**	**6.186.384.000**						100 persen	**5.642.402.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 Persen	**22.850.000**	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinparbudpora	2 Dokumen	2.750.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				dan Olahraga
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	2 dokumen	1.650.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	18.450.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Laporan	2 Laporan									2 Laporan		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**4.550.208.000**	**4.405.008.000**	**4.077.459.000**						100 Persen	**4.715.791.000**	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.467.108.000	4.317.108.000	3.997.659.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	14 kali	4.633.691.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	81.600.000	86.400.000	78.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	80.450.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	1 dokumen	1.650.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**9.500.000**	**405.000.000**	**479.523.000**						100 Persen	**9.500.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 Kali	1 Kali	9.500.000	105.000.000	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	1 Kali	9.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	400 Orang	-	300.000.000	374.523.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	400 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**315.620.000**	**365.620.000**	**383.140.000**						100 Persen	**289.827.000**	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	5.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	7.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	12 Bulan	70.500.000	120.500.000	129.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 Unit	6 Unit									6 Unit		
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	11 Bulan	55.300.000	55.300.000	61.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	11 Bulan	58.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggadaan				12 bulan	12 bulan	19.500.000	19.500.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 bulan	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	2.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				155 orang/ kali	155 orang/ kali	152.820.000	152.820.000	168.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	155 orang/kali	151.327.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**567.200.000**	**528.000.000**	**567.260.000**						100 Persen	**447.400.000**	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	2.400.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	268.000.000	268.000.000	332.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	268.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	296.800.000	257.600.000	232.860.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 bulan	177.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**170.102.000**	**697.502.000**	**663.002.000**						100 Persen	**157.034.000**	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	84.456.000	85.656.000	101.156.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 bulan	74.840.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.	Pemeliharaan/Rehabilita	Jumlah gedung kantor yang				1 Unit	1 Unit	65.646.000	591.846.000	541.846.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Dinparbudpor	1 Unit	62.194.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.09.09	si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpelihara secara rutin/berkala									Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	a			Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12,50 persen		10,00 persen	11,00 persen	11,00 persen	**3.946.296.000**	**4.584.696.000**	**4.474.296.000**						11,00 persen	**5.444.537.000**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**140.000.000**	**205.000.000**	**142.000.000**						100 Persen	**2.914.126.000**	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	190.000.000	132.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring				48 Lokasi	32 Lokasi	15.000.000	15.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	32 Lokasi	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**3.786.296.000**	**4.359.696.000**	**4.330.296.000**						100 Persen	**2.510.411.000**	
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerjaan untuk Pengembangan Obyek Wisata yang dilaksanakan				2 Pekerjaan	2 Pekerjaan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	Destinasi Wisata	2 Pekerjaan	400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/berkala				2 Lokasi	2 Lokasi	570.000.000	589.400.000	590.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	2 Lokasi	460.411.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang diterapkan				1 Lokasi	1 Lokasi	2.766.296.000	3.320.296.000	3.290.296.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	1 Lokasi	1.600.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Obyek Wisata yang dipelihara				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**20.000.000**	**20.000.000**	**2.000.000**						100 Persen	**20.000.000**	
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah usaha Pariwisata yang direkomendasi				10 Lokasi	1 Lokasi	20.000.000	20.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	1 Lokasi	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	46,98 persen		21,98 persen	31,98 persen	31,98 persen	**1.141.926.000**	**1.045.526.000**	**952.776.000**						31,98 persen	**1.047.887.000**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	25 Persen		25 Persen	25 Persen	25 Persen	**1.141.926.000**	**1.045.526.000**	**952.776.000**						25 Persen	**1.047.887.000**	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan				12 bulan	12 bulan	53.500.000	253.500.000	226.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan,	wisatawan nusantara	12 bulan	53.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Calender of Event yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen				Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	dan jasa yang mampu berdaya saing.		1 Dokumen		
		Jumlah media promosi pariwisata kota Pekalongan (SIDa)				4 media	4 media									4 media		
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pameran nasional dan regional yang diikuti				2 Pameran	2 Pameran	224.000.000	224.000.000	214.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	2 Pameran	224.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemilihan Duta Wisata Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan				2 Kegiatan	1 Kegiatan	429.226.000	232.826.000	232.826.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	1 Kegiatan	275.387.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah event Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang diselenggarakan				1 event	1 event	435.200.000	335.200.000	279.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	1 event	495.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Kegiatan Besih, Indah, Sehat,Aman (BISA) yang diselenggarakan				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Kegiatan Roadshow Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah Stakeholder Mitra Pariwisata yang difasilitasi				1 Mitra	1 Mitra									1 Mitra		
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	59,52 persen		30,30 persen	30,30 persen	30,30 persen	**494.262.000**	**283.262.000**	**23.775.000**						30,30 persen	**292.566.000**	
3.26.04.2.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan**	Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO	6 event		1 event	100 persen	100 persen	**464.262.000**	**253.262.000**	**23.775.000**						100 persen	**272.566.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota																	
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	464.262.000	253.262.000	23.775.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Insan Kreatif, Masyarakat	1 Unit	272.566.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	90 persen		75 persen	75 persen	75 persen	**30.000.000**	**30.000.000**	**0**						75 persen	**20.000.000**	
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah UKM Ekraf yang terfasilitasi pendaftaran dan Pengembangan Merk HAKI (SIDa)				30 UMKM	30 UMKM	30.000.000	30.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku Ekraf	30 UMKM	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100 persen		40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen	**690.166.000**	**690.166.000**	**452.820.000**						40,00 persen	**272.567.000**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	14.29 Persen		18.18 Persen	18.18 Persen	18.18 Persen	**690.166.000**	**690.166.000**	**452.820.000**						18.18 Persen	**272.567.000**	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif tingkat dasar dikembangkan kompetensinya (SIDa)				60 Pelaku Ekraf	90 Pelaku Ekraf	30.000.000	30.000.000	26.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	90 Pelaku Ekraf	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Festival Kreatif yang diselenggarakan				1 event	1 event	218.560.000	218.560.000	208.770.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	1 event	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah komunitas kemitraan yang terfasilitasi				0 komunitas	1 komunitas									1 komunitas		
		Jumlah updating data EKRAF				1 Kegiatan	0 Kegiatan									0 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (masyarakat, guru, pelajar) yang terfasilitasi pelatihan (SIDa)				60 Orang	80 Orang	28.890.000	28.890.000	23.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	80 Orang	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif yang terfasilitasi pelatihan sertifikasi				30 Orang	30 Orang	50.000.000	50.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	30 Orang	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah tenga kerja ekonomi kreatif yang tersertifikasi (SIDa)				5 Orang	5 Orang									5 Orang		
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah FGD komunitas yang diselenggarakan				0 kali	0 kali	314.160.000	314.160.000	164.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	0 kali	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan expo yang dilaksanakan				1 Expo	1 Expo									1 Expo		
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi proses kreasi, produksi, konsumsi dan konservasi				0 Pelaku	25 Pelaku									25 Pelaku		
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dikembangkan kompetensinya				20 Pelaku	20 Pelaku	38.556.000	38.556.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	20 Pelaku	32.567.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dimonitoring				40 Pelaku	7 event	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	7 event	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**768.650.000**	**396.850.000**	**438.706.000**							**787.087.000**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase cadangan pangan daerah	4,80 persen		3,80 persen	4,40 persen	4,40 persen	**708.840.000**	**265.040.000**	**318.676.000**						4,40 persen	**726.214.000**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**82.980.000**	**82.980.000**	**142.376.000**						100 persen	**69.400.000**	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	1 dokumen	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan penyaluran hibah uang yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	47.980.000	47.980.000	112.101.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	32.600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah produk olahan pangan berbahan baku lokal yang diujicoba dalam pelatihan				2 produk	2 produk				Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton					2 produk		
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan harga pangan pokok strategis yang disusun				12 dokumen	12 dokumen	15.000.000	15.000.000	10.275.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	12 dokumen	16.800.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah cadangan pangan daerah	5625 Kg		4500 Kg	5150 Kg	5150 Kg	**101.260.000**	**102.460.000**	**99.500.000**						5150 Kg	**126.814.000**	
		Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100									100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	persen			persen	persen									persen		
2.09.03. 2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyaluran cadangan pangan daerah yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	86.260.000	87.460.000	87.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	101.814.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03. 2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen penyusunan PPH Konsumsi yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	12.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	1 dokumen	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03. 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	20 kegiatan		7 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**524.600.000**	**79.600.000**	**76.800.000**						2 kegiatan	**530.000.000**	
		Persentase kegiatan pendampingan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentasi capaian konsumsi energi dan protein perkapita/tahun	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.09.03. 2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	524.600.000	79.600.000	76.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	kelompok pemberdayaa n pekarangan	2 kali	530.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**17.970.000**	**53.970.000**	**45.840.000**						100,00 persen	**18.171.000**	
2.09.04. 2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4 kecamat an		4 kecamatan	4 kecamata n	4 kecamata n	**17.970.000**	**53.970.000**	**45.840.000**						4 kecamat an	**18.171.000**	
2.09.04. 2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	17.970.000	53.970.000	45.840.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	1. Penguatan pencegahan faktor risiko,	Dinperpa	1 dokumen	18.171.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan Kerentanan Pangan										Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.				
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	88,00 persen		80,00 persen	83,20 persen	83,20 persen	**41.840.000**	**77.840.000**	**74.190.000**						83,20 persen	**42.702.000**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	174 sample		24 sample	25 sample	25 sample	**41.840.000**	**77.840.000**	**74.190.000**						25 sample	**42.702.000**	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	41.840.000	77.840.000	74.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	42.702.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kegiatan sosialiasasi keamanan pangan bagi anak sekolah dan pengelola kantin yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**6.941.311.000**	**7.250.746.000**	**6.593.160.000**							**8.453.561.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.635.939.000**	**5.645.939.000**	**5.277.603.000**						100 persen	**7.194.188.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 persen	**22.850.000**	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinperpa	2 dokumen	3.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	2 dokumen	1.650.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	17.700.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.875.407.000**	**4.881.507.000**	**4.689.507.000**						100 persen	**6.013.676.000**	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.792.586.000	4.792.586.000	4.600.586.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	14 kali	5.930.855.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	81.171.000	87.271.000	87.271.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	81.171.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	1 dokumen	1.650.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**9.500.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	1 kali	9.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**192.750.000**	**192.750.000**	**213.794.000**						100 persen	**149.374.000**	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	1.250.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	36.500.000	36.500.000	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	36.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				2 unit	2 unit									2 unit		
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	11 bulan	40.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dinperpa	12 bulan	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan									Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				115 orang/kali	160 orang/hari	100.000.000	100.000.000	121.044.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	160 orang/hari	56.624.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**						100 persen	**676.230.000**	
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ pekerjaan konstruksi yang terbangun				4 unit	0 unit	200.000.000	200.000.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	0 unit	676.230.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**277.268.000**	**285.668.000**	**286.668.000**						100 persen	**265.858.000**	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	120.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	155.268.000	163.668.000	164.668.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	143.858.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**65.014.000**	**65.014.000**	**66.634.000**						100 persen	**56.700.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	46.514.000	46.514.000	46.514.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	38.200.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	1 unit	8.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	11.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Nilai produksi pertanian pertahun	55.84 Miliar Rupiah		55.56 Miliar Rupiah	55.67 Miliar Rupiah	55.67 Miliar Rupiah	**309.795.000**	**408.695.000**	**401.690.000**						55.67 Miliar Rupiah	**237.083.000**	
		Nilai produksi peternakan pertahun	203.65 Miliar Rupiah		184.46 Miliar Rupiah	191.91 Miliar Rupiah	191.91 Miliar Rupiah									191.91 Miliar Rupiah		
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**109.037.000**	**105.537.000**	**108.732.000**						100 persen	**106.565.000**	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bulan pengelolaan lahan tanaman pangan dan hortikultura				12 bulan	12 bulan	109.037.000	105.537.000	108.732.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	12 bulan	106.565.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen perekapan RDKK tingkat Kota yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**76.097.000**	**77.297.000**	**64.597.000**						100 persen	**76.670.000**	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bulan pengelolaan lab kultur jaringan yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	51.097.000	52.297.000	52.297.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan,	lab kultur jaringan Dinperpa	12 bulan	51.670.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kertoharjo	Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	dan jasa yang mampu berdaya saing.				
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	25.000.000	25.000.000	12.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	lab kultur jaringan Dinperpa	1 kali	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29 kali		4 kali	5 kali	5 kali	**37.661.000**	**88.861.000**	**91.361.000**						5 kali	**36.848.000**	
		Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah bulan perawatan bibit ternak yang diadakan				12 bulan	12 bulan	17.161.000	18.361.000	20.861.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	12 bulan	16.348.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelatihan pengolahan pakan ternak yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	20.500.000	70.500.000	70.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	1 kegiatan	20.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	34,01 persen		5 persen	5 persen	5 persen	**87.000.000**	**137.000.000**	**137.000.000**						5 persen	**17.000.000**	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak yang dilayani kawin suntik				200 ekor	200 ekor	87.000.000	137.000.000	137.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	petani, peternak	200 ekor	17.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**611.847.000**	**636.847.000**	**400.347.000**						100,00 persen	**637.518.000**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**611.847.000**	**636.847.000**	**400.347.000**						100 persen	**637.518.000**	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang direhab				1 unit	1 unit	220.000.000	245.000.000	245.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kelompot tani, Dinperpa	1 unit	249.518.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun				1 unit	0 unit	340.347.000	340.347.000	155.347.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kelompot tani, Dinperpa	0 unit	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah rumah potong hewan yang dipelihara				2 unit	2 unit				Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo					2 unit		
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun				1 unit	0 unit	51.500.000	51.500.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kelompot tani, Dinperpa	0 unit	53.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen		5,00 persen	5,00 persen	5,00 persen	**235.382.000**	**399.417.000**	**397.417.000**						5,00 persen	**230.318.000**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah**	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani	800 kasus		800 kasus	800 kasus	800 kasus	**56.000.000**	**56.200.000**	**56.200.000**						800 kasus	**56.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota																	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksinasi dan diobati di lapangan (luar kandang)				2500 ekor	2500 ekor	56.000.000	56.200.000	56.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	2500 ekor	56.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**15.000.000**	**15.000.000**	**11.000.000**						100 persen	**15.000.000**	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran penjualan ternak yang dilaksanakan				6 kali	6 kali	15.000.000	15.000.000	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak, pedagang	6 kali	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	3.000 ekor		500 ekor	500 ekor	1500 ekor	**35.000.000**	**185.575.000**	**185.575.000**						1500 ekor	**35.000.000**	
		Persentase hewan yang tertangani di PUSKESWAN	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang diobati di PUSKESWAN				1000 ekor	1500 ekor	35.000.000	185.575.000	185.575.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	1500 ekor	35.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**129.382.000**	**142.642.000**	**144.642.000**						100 persen	**124.318.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan operasional RPH yang diadakan				12 bulan	12 bulan	91.882.000	105.142.000	107.142.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pelaku usaha	12 bulan	86.818.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan pemantauan keamanan bahan pangan asal hewan segar yang diadakan				12 bulan	12 bulan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pelaku usaha	12 bulan	37.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah panitia qurban yang dilatih tentang tata cara penanganan hewan qurban yang ASUH				50 orang	56 orang									56 orang		
		Jumlah sosialisasi Kesmavet yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah wilayah yang dilakukan pemantauan kesehatan hewan qurban				27 kelurahan	27 kelurahan									27 kelurahan		
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**55.711.000**	**55.711.000**	**43.961.000**						100,00 persen	**54.513.000**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**55.711.000**	**55.711.000**	**43.961.000**						100 persen	**54.513.000**	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelatihan pembuatan pestisida hayati yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000	25.000.000	15.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / kelp Tani	1 kegiatan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana yang difasilitasi				2 kali	2 kali	30.711.000	30.711.000	28.711.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / kelp Tani	2 kali	29.513.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	persentase usaha pertanian/peternakan yang	100,00 persen		50,00 persen	50,00 persen	50,00 persen	**32.498.000**	**32.498.000**	**23.498.000**						50,00 persen	**31.799.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		memiliki ijin																
3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	26,49 persen		5 persen	5 persen	5 persen	**32.498.000**	**32.498.000**	**23.498.000**						5 persen	**31.799.000**	
3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan				6 kegiatan	6 kegiatan	32.498.000	32.498.000	23.498.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak, dinperpa	6 kegiatan	31.799.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen		5,00 persen	5,00 persen	5,00 persen	**60.139.000**	**71.639.000**	**48.644.000**						5,00 persen	**68.142.000**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**60.139.000**	**71.639.000**	**48.644.000**						100 persen	**68.142.000**	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah bulan pendampingan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	25.000.000	36.500.000	26.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / Kelp Tani / KTNA	12 bulan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen program penyuluhan tingkat kota yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikkan kelas				4 poktan/tahun	4 poktan/tahun	35.139.000	35.139.000	22.444.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Petani / Kelp Tani / KTNA	4 poktan/tahun	43.142.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Munas KTNA yang difasilitasi				1 kali	1 kali									1 kali		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**10.421.481.000**	**10.371.559.000**	**9.816.509.000**							**10.986.625.000**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**8.486.289.000**	**8.642.789.000**	**8.079.489.000**						100 persen	**8.834.957.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 Persen	**22.850.000**	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 dokumen	2.750.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 dokumen	1.650.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	18.450.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**7.217.832.000**	**7.222.632.000**	**6.659.532.000**						100 Persen	**7.608.387.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	7.157.982.000	7.157.982.000	6.594.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	14 kali	7.533.537.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	58.200.000	63.000.000	63.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	73.200.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	1 dokumen	1.650.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 Persen	**14.500.000**	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	1 kali	14.500.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**307.374.000**	**407.374.000**	**440.374.000**						100 Persen	**317.450.000**	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	4.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	12 Bulan	74.924.000	174.924.000	173.124.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 Bulan	47.500.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				17 unit	17 unit									17 unit		
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	7.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Barat, Podosugih	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Kecil dan Menengah
2.17.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	64.950.000	64.950.000	83.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	11 bulan	64.950.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	60.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 kali	100 kali	100.000.000	100.000.000	109.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	100 kali	137.500.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**475.603.000**	**531.803.000**	**516.203.000**						100 Persen	**517.330.000**	
2.17.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.400.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	333.185.000	383.185.000	367.585.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	414.517.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan				12 bulan	12 bulan	140.018.000	146.218.000	146.218.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dindagkop UKM	12 bulan	100.413.000	Dinas Perdagangan,Ko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		peralatan/bahan kebersihan kantor									Pekalongan Barat, Podosugih	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**459.980.000**	**459.980.000**	**442.380.000**						100 Persen	**354.440.000**	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	409.980.000	409.980.000	377.180.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	304.440.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit	30.000.000	30.000.000	34.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 unit	30.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	31.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	20.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	33,23 persen		24,59 persen	30,94 persen	30,94 persen	**87.400.000**	**91.000.000**	**99.250.000**						30,94 persen	**171.400.000**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	65.29 persen		62.81 persen	62.81 persen	62.81 persen	**87.400.000**	**91.000.000**	**99.250.000**						62.81 persen	**171.400.000**	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,				100 Koperasi	100 Koperasi	87.400.000	91.000.000	99.250.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	Koperasi	100 Koperasi	171.400.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				Kecil dan Menengah
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,68 persen		38,36 persen	58,31 persen	58,31 persen	**667.792.000**	**497.770.000**	**497.770.000**						58,31 persen	**631.070.000**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1.39 persen		0.36 persen	0.77 persen	0.77 persen	**667.792.000**	**497.770.000**	**497.770.000**						0.77 persen	**631.070.000**	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Manajemen Perkoperasian				35 Koperasi	35 Koperasi	667.792.000	497.770.000	497.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM Koperasi	35 Koperasi	631.070.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Packaging/Kemasan				35 koperasi	35 koperasi					DAK Non Fisik-PK2UKM				35 koperasi		
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi				35 Koperasi	35 Koperasi									35 Koperasi		
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian				50 koperasi	50 koperasi									50 koperasi		
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan SAK ETAP Berbasis Digital				35 Koperasi	35 Koperasi									35 Koperasi		
		Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Halal				30 UMKM	25 UMKM									25 UMKM		
		Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula				35 UMKM	35 UMKM									35 UMKM		
		Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Proses Produksi Bersih					25 UMKM									25 UMKM		
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,37 persen		11,85 persen	12,06 persen	12,06 persen	**1.180.000.000**	**1.140.000.000**	**1.140.000.000**						12,06 persen	**1.349.198.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	7.26 UMKM		1.25 UMKM	3.65 UMKM	3.65 UMKM	**1.180.000.000**	**1.140.000.000**	**1.140.000.000**						3.65 UMKM	**1.349.198.000**	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah event pekan batik yang terselenggara				1 event	1 event	1.180.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	UMKM	1 event	1.349.198.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah UMKM terfasilitasi bantuan sarana pemaasaran				47 UMKM	47 UMKM									47 UMKM		
		Jumlah UMKM yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran (SIDa)				90 UMKM	90 UMKM									90 UMKM		
		Jumlah UMKM yang mendapat Pelatihan Digital Marketing				40 UMKM	40 UMKM									40 UMKM		
		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				100 UMKM	65 UMKM									65 UMKM		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**7.206.585.000**	**7.395.406.000**	**8.478.215.000**							**11.399.800.000**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	77,70 persen		73,93 persen	75,42 persen	75,42 persen	**2.786.000**	**2.786.000**	**5.316.000**						75,42 persen	**2.726.000**	
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.786.000**	**1.786.000**	**4.316.000**						100 persen	**1.726.000**	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin				3 perizinan	3 perizinan	1.786.000	1.786.000	4.316.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan	3 perizinan	1.726.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												Berkualitas dan Berkeadilan	mampu berdaya saing.				
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**						100 persen	**1.000.000**	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)				1 perijinan	2 perijinan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Perusahaan	2 perijinan	1.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100,00 persen		75,00 persen	81,25 persen	81,25 persen	**5.739.616.000**	**6.186.437.000**	**7.342.337.000**						81,25 persen	**9.954.203.000**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18.75 persen		6.25 persen	6.25 persen	6.25 persen	**5.589.616.000**	**5.961.437.000**	**7.117.337.000**						6.25 persen	**9.832.203.000**	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah aplikasi sistem Informasi Database dan Pengelolaan pedagang pasar yang dibangun dan dipelihara				1 sistem aplikasi	1 sistem aplikasi	5.589.616.000	5.961.437.000	7.117.337.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pasar rakyat	1 sistem aplikasi	6.832.203.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota				63 orang	63 orang									63 orang		
		Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar				84 orang	84 orang									84 orang		
		Jumlah petugas kebersihan, keamanan dan pengelolaan pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya				157 orang	157 orang									157 orang		
		Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara				11 pasar	11 pasar									11 pasar		
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	68.97 Persen		11.49 Persen	34.48 Persen	34.48 Persen	**150.000.000**	**225.000.000**	**225.000.000**						34.48 Persen	**122.000.000**	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah lokasi kawasan Foodstreet (SIDa)				1 lokasi	1 lokasi	150.000.000	225.000.000	225.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan,	Petugas retribusi pasar, pedagang, PK5	1 lokasi	122.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan dan penataan kawasan PK5				120 orang	120 orang				Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	dan jasa yang mampu berdaya saing.		120 orang		
		Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya				120 orang	120 orang									120 orang		
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100,00 persen		80,00 persen	88,00 persen	88,00 persen	**493.949.000**	**138.767.000**	**138.767.000**						88,00 persen	**481.987.000**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	100 persen		27.27 persen	54.55 persen	54.55 persen	**488.949.000**	**133.767.000**	**133.767.000**						54.55 persen	**476.987.000**	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga				95 komoditas	95 komoditas	131.367.000	133.767.000	133.767.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagang	95 komoditas	130.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**5.000.000**	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang terawasi penyalurannya				586 Ton	586 Ton	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat	586 Ton	5.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase peningkatan volume ekspor	8,19 persen		7,24 persen	7,60 persen	7,60 persen	**93.441.000**	**93.441.000**	**75.591.000**						7,60 persen	**117.748.000**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah**	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir	27 pelaku usaha		22 pelaku usaha	24 pelaku usaha	24 pelaku usaha	**93.441.000**	**93.441.000**	**75.591.000**						24 pelaku usaha	**117.748.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk Ekspor (SIDa)				30 UMKM	30 UMKM	93.441.000	93.441.000	75.591.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Eksportir	30 UMKM	117.748.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	83,99 persen		73,99 persen	77,99 persen	77,99 persen	**366.766.000**	**376.566.000**	**363.775.000**						77,99 persen	**372.506.000**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	83.99 persen		73.99 persen	77.99 persen	77.99 persen	**366.766.000**	**376.566.000**	**363.775.000**						77.99 persen	**372.506.000**	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera /Tera Ulang				4912 UTTP	4912 UTTP	331.766.000	341.566.000	341.316.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagang	4912 UTTP	332.506.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha Tersosialisasi Kemetrologian Legal				81 Orang	50 Orang	35.000.000	35.000.000	22.459.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagang	50 Orang	40.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Potensi UTTP Legal Yang Terawasi				4912 UTTP	4912 UTTP									4912 UTTP		
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	7,50 persen		2,09 persen	4,26 persen	4,26 persen	**510.027.000**	**597.409.000**	**552.429.000**						4,26 persen	**470.630.000**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen		7.14 persen	4 persen	4 persen	**510.027.000**	**597.409.000**	**552.429.000**						4 persen	**470.630.000**	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Showroom				180 UMKM	130 UMKM	409.053.000	411.453.000	404.923.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	Pelaku usaha mikro	130 UMKM	370.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Dekranasda									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				Kecil dan Menengah
		Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah				12 UMKM	20 UMKM									20 UMKM		
		Jumlah UMKM yang Mengikuti Sosialisasi Promosi Produk melalui E-Market Place				30 UMKM	30 UMKM									30 UMKM		
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan e-catalog				25 UMKM	25 UMKM	45.974.000	45.974.000	7.524.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Pelaku usaha mikro	25 UMKM	50.630.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah video pemasaran produk unggulan Kota Pekalongan yg dibuat				3 Video	3 Video									3 Video		
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui Pemasaran Online (SIDa)				60 UMKM	60 UMKM	55.000.000	139.982.000	139.982.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku usaha mikro	60 UMKM	50.000.000	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.836.788.000**	**4.012.046.000**	**4.251.627.000**							**3.915.431.140**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,55 persen		0,33 persen	0,42 persen	0,42 persen	**2.074.978.000**	**2.989.036.000**	**3.243.467.000**						0,42 persen	**2.435.591.140**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.879.948.000**	**2.741.606.000**	**3.098.227.000**						100 persen	**2.116.190.000**	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi				80 orang	80 orang	1.794.288.000	2.655.946.000	3.059.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan	Pencari Kerja	80 orang	1.805.088.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pengangguran yang difasilitasi pelatihan				1972 orang	2140 orang									2140 orang		
		Jumlah perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dengan BLK melalui kios 3in1 (SIDa)				16 perusahaan	16 perusahaan									16 perusahaan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				128 Orang	128 Orang							jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.		128 Orang		
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah bulan pemeliharaan bangunan BLK				12 bulan	12 bulan	85.660.000	85.660.000	38.935.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	12 bulan	111.102.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Instruktur yang dinilai				14 instruktur	14 instruktur									14 instruktur		
		Jumlah Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat				11 kejuruan	5 kejuruan									5 kejuruan		
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 persen		70 persen	70 persen	70 persen	**83.500.000**	**133.500.000**	**51.000.000**						70 persen	**134.243.000**	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Instruktur yang mengikuti pelatihan kompetensi (SIDa)				20 orang	0 orang	83.500.000	133.500.000	51.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0 orang	134.243.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Ketrampilan Kerja di Kelurahan				80 orang	80 orang									80 orang		
		Jumlah orang yang mengikuti workshop tata kelola LPKS (SIDa)				30 orang	0 orang									0 orang		
		Jumlah volume kunjungan monitoring ke LPKS selama 1 (satu) tahun				24 kali	0 kali									0 kali		
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	36 tenant		6 tenant	6 tenant	6 tenant	**81.530.000**	**83.930.000**	**83.930.000**						6 tenant	**98.507.140**	
		Persentase produktivitas pada perusahaan kecil	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah tenant yang memperoleh pembinaan (SIDa)				6 tenant	6 tenant	81.530.000	83.930.000	83.930.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia	Perusahaan Kecil	6 tenant	98.507.140	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														usaha.				
2.07.03. 2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	53.33 persen		53.33 persen	33.33 persen	33.33 persen	**30.000.000**	**30.000.000**	**10.310.000**						33.33 persen	**86.651.000**	
2.07.03. 2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah alumni siswa pelatihan yang termonitor				600 alumni siswa	160 alumni siswa	30.000.000	30.000.000	10.310.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja	160 alumni siswa	86.651.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peminat magang Jepang yang mengikuti pembekalan				15 orang	0 orang									0 orang		
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	29,93 persen		19,93 persen	23,93 persen	23,93 persen	**243.500.000**	**419.700.000**	**252.700.000**						23,93 persen	**996.046.000**	
2.07.04. 2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	14.08 persen		8.52 persen	10.75 persen	10.75 persen	**85.000.000**	**85.000.000**	**0**						10.75 persen	**436.105.000**	
2.07.04. 2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi					0 Orang	25.000.000	25.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha	Pencari Kerja	0 Orang	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah sosialisasi ketenagakerjaan yang dilaksanakan				3 kali	0 kali									0 kali		
2.07.04. 2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					0 Orang	25.000.000	25.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah	Pencari Kerja	0 Orang	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja				160 siswa	0 siswa									0 siswa		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dengan dunia usaha.				
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan				20 orang	0 orang	10.000.000	10.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 orang	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah dokumen RTKD yang disusun					0 Dokumen	25.000.000	25.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Dokumen	296.105.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah lokasi pelaksanaan padat karya				3 lokasi	0 lokasi									0 lokasi		
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota (Transmigrasi)(IKK Output)				1 perjanjian	0 perjanjian									0 perjanjian		
		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)				3 orang	0 orang									0 orang		
		Jumlah tenaga kerja non formal terdaftar dalam satu Kab/Kota (WUB)				10 orang	0 orang									0 orang		
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	72 buku		12 buku	12 buku	12 buku	**115.500.000**	**266.700.000**	**191.700.000**						12 buku	**158.814.000**	
		Persentase Ketercapaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					0 Dokumen	30.500.000	31.700.000	31.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Dokumen	31.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota (IKK Output)				12 orang	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah layanan informasi pasar kerja yang dilaksanakan				700 layanan	700 layanan	10.000.000	160.000.000	160.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	700 layanan	16.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah leaflet antar kerja yang dicetak				4 rim	4 rim									4 rim		
		Jumlah orang yang difasilitasi pelayanan online sistem antar Kerja / AK I				1000 orang	1000 orang									1000 orang		
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja					0 Orang	75.000.000	75.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Orang	111.314.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan job fair				50 perusahaan	0 perusahaan									0 perusahaan		
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	249 orang		29 orang	39 orang	39 orang	**36.000.000**	**61.000.000**	**61.000.000**						39 orang	**392.041.000**	
		Persentase CPMI yang terlayani secara legal	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output)				60 orang	60 orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pekerja Migran Indonesia (PMI)	60 orang	307.041.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata (IKK Output)				40 orang	40 orang									40 orang		
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terfasilitasi rekomendasi paspor				75 orang	75 orang	16.000.000	41.000.000	41.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	4. Penempatan dan pemberdayaan	Pekerja Migran Indonesia	75 orang	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	(PMI)			Kerja
		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan PMI				105 Orang	105 Orang									105 Orang		
		Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI				120 orang	120 orang									120 orang		
2.07.04.2.05	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perusahaan terlayani perpanjangan IMTA di Kab/Kota	12 perusahaan		2 perusahaan	2 perusahaan	2 perusahaan	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**						2 perusahaan	**9.086.000**	
		Persentase perusahaan yang terlayani perpanjangan IMTA	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring tenaga kerja asing di perusahaan				5 kegiatan	0 kegiatan	7.000.000	7.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pember dayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningka tan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja	0 kegiatan	9.086.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	49,02 persen		45,33 persen	46,80 persen	46,80 persen	**518.310.000**	**603.310.000**	**755.460.000**						46,80 persen	**483.794.000**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	42.28 persen		37.00 persen	39.11 persen	39.11 persen	**407.155.000**	**332.155.000**	**301.455.000**						39.11 persen	**320.450.000**	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) (SIDa)				35 perusahaan	35 perusahaan	15.550.000	15.550.000	14.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberda yaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningka tan jejaring dan	Perusahaan	35 perusahaan	25.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.				
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (SIDa)				30 perusahaan	30 perusahaan	12.000.000	12.000.000	11.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Perusahaan	30 perusahaan	18.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				0 Laporan	0 Laporan	379.605.000	304.605.000	275.505.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Perusahaan	0 Laporan	277.450.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pekerja informal yang menerima bantuan premi				1000 orang	1000 orang									1000 orang		
		Jumlah perusahaan yang didata ketenagakerjaannya				72 perusahaan	72 perusahaan									72 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan pengupahan				40 Perusahaan	40 Perusahaan									40 Perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi UMK				45 Perusahaan	45 Perusahaan									45 Perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti workshop struktur skala upah				40 Perusahaan	40 Perusahaan									40 Perusahaan		
		Jumlah rekomendasi UMK yang disusun				1 Rekomendasi UMK	1 Rekomendasi UMK									1 Rekomendasi UMK		
		Jumlah sidang/ rapat Dewan Pengupahan				8 kali	8 kali									8 kali		
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	80.06 persen		48.57 persen	68.07 persen	68.07 persen	**111.155.000**	**271.155.000**	**454.005.000**						68.07 persen	**163.344.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mengikuti dialog pencegahan perselisihan Hubungan Industrial/HI				35 perusahaan	35 perusahaan	7.500.000	107.500.000	107.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	35 perusahaan	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi mediasi				28 kasus	28 kasus	8.500.000	8.500.000	7.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	28 kasus	12.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000	20.000.000	12.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	22.344.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/ Pengusaha/ Manajemen Perusahaan,dan Organisasi Pengusaha yg mengikuti pembinaan				80 pengurus	40 pengurus									40 pengurus		
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				0 Lembaga	0 Lembaga	66.405.000	86.405.000	286.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Lembaga	99.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peserta yang mengikuti porseni tripartit				150 orang	150 orang									150 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit				8 kali	8 kali							jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.		8 kali		
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta pembinaan fasiitas kesejahteraan pekerja				55 perusahaan	55 perusahaan	8.750.000	48.750.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	55 perusahaan	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**7.903.827.000**	**8.359.458.000**	**7.824.070.000**							**7.030.215.000**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**7.319.827.000**	**7.466.858.000**	**7.143.804.000**						100 persen	**6.618.947.000**	
3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 persen	**22.049.000**	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 dokumen	2.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 dokumen	1.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinperinaker	12 bulan	18.049.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**6.274.726.000**	**6.279.526.000**	**5.852.562.000**						100 persen	**5.753.073.000**	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	6.226.626.000	6.226.626.000	5.799.662.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	14 kali	5.689.573.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	46.600.000	51.400.000	51.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	62.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	1 dokumen	1.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**8.631.000**	
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	1 kali	8.631.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**179.040.000**	**179.040.000**	**198.761.000**						100 persen	**232.954.000**	
3.31.01.	Penyediaan Komponen	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Dinperinaker	12 bulan	3.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.06.01	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	53.690.000	53.690.000	67.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	56.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit	8 unit									8 unit		
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	5.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	31.000.000	31.000.000	31.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	11 bulan	44.954.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	7.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				83 orang/kali	85 orang/kali	75.000.000	75.000.000	82.061.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	85 orang/kali	114.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**297.120.000**	**297.120.000**	**294.520.000**						100 persen	**29.074.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.31.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan bangunan yang diadakan				1 dokumen	0 dokumen	297.120.000	297.120.000	294.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	0 dokumen	29.074.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan					1 Pekerjaan									1 Pekerjaan		
3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**422.968.000**	**432.668.000**	**495.258.000**						100 persen	**474.810.000**	
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	2.400.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				10 bulan	12 bulan	185.000.000	185.000.000	247.590.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	228.710.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	235.568.000	245.268.000	245.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	243.700.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**120.473.000**	**257.504.000**	**281.703.000**						100 persen	**98.356.000**	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	51.973.000	89.004.000	99.504.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	35.556.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit	50.000.000	150.000.000	162.899.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 unit	42.800.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan				12 bulan	12 bulan	18.500.000	18.500.000	19.300.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dinperinaker	12 bulan	20.000.000	Dinas Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor secara rutin/berkala									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				dan Tenaga Kerja
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	21,04 persen		20,59 persen	20,43 persen	20,43 persen	**473.000.000**	**681.600.000**	**476.066.000**						20,43 persen	**271.800.000**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.5 persen		2.0 persen	3 persen	3 persen	**473.000.000**	**681.600.000**	**476.066.000**						3 persen	**271.800.000**	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen evaluasi RIPIK yang disusun (SIDa)				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Industri	1 Dokumen	20.800.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah sentra yang difasilitasi kelembagaan				1 Sentra	1 Sentra									1 Sentra		
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Batik/Kuliner/Kraft/Jamu/ Bordir/Canting/ Kemasan yang mengikuti pelatihan pengembangan produk (SIDa)				30 IKM	30 IKM	20.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Industri	30 IKM	21.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah IKM yang dilatih produksi bersih/industri hijau (SIDa)				30 IKM	30 IKM									30 IKM		
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bangunan yang dirawat/dipelihara				1 unit	0 unit	348.000.000	351.600.000	137.816.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 unit	130.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah IKM yang dilatih Peningkatan Manajemen Mutu				30 IKM	0 IKM									0 IKM		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah SDM IKM yang dilatih Pelatihan Kemasan				25 IKM	25 IKM	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	25 IKM	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM/Perusahaan yang mengikuti sosialisasi SIINas				30 IKM/Perusahaan	30 IKM/Perusahaan	15.000.000	115.000.000	123.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Industri	30 IKM/Perusahaan	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Peningkatan Teknologi Digitalisasi IKM (SIDa)				30 IKM	30 IKM									30 IKM		
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	26,00 persen		23,00 persen	24,00 persen	24,00 persen	**66.000.000**	**66.000.000**	**64.200.000**						24,00 persen	**13.628.000**	
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	33 persen		23 persen	25 persen	25 persen	**66.000.000**	**66.000.000**	**64.200.000**						25 persen	**13.628.000**	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Dokumen	66.000.000	66.000.000	64.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	2 Dokumen	13.628.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**45.000.000**	**145.000.000**	**140.000.000**						100,00 persen	**125.840.000**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk**	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi	35 persen		23 persen	28 persen	28 persen	**45.000.000**	**145.000.000**	**140.000.000**						28 persen	**125.840.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan																
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembangan usaha (SIDa)				2000 IKM	2000 IKM	40.000.000	140.000.000	140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	2000 IKM	120.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Evaluasi RPIK yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	5.000.000	5.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	1 kali	5.840.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**13.925.697.000**	**13.925.697.000**	**13.394.771.000**							**14.048.634.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**13.925.697.000**	**13.925.697.000**	**13.394.771.000**						100 persen	**14.048.634.000**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**13.925.697.000**	**13.925.697.000**	**13.394.771.000**						100 persen	**14.048.634.000**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	14 kali	13.925.697.000	13.925.697.000	13.394.771.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	14 kali	14.048.634.000	Sekretariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**954.076.000**	**1.004.076.000**	**875.268.000**							**921.872.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN**	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**954.076.000**	**1.004.076.000**	**875.268.000**						100,00 persen	**921.872.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	RAKYAT																	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**872.076.000**	**890.076.000**	**773.321.000**						100 persen	**842.872.000**	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan evaluasi capaian SPM yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	19.119.000	58.119.000	54.219.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	388.782.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah bulan perawatan/pemeliharaan patok tapal batas wilayah				12 bulan	12 bulan	659.292.000	649.292.000	531.217.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 bulan	254.390.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen Monografi Kelurahan yang disusun				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah Kegiatan Lomba K 3 yang diselenggarakan				3 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan dana kelurahan yang dilaksanakan				2 kegiatan	0 kegiatan									0 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Sarasehan K 3 yang dilaksanakan				22 kegiatan	15 kegiatan									15 kegiatan		
		Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pembinaan Administrasi				27 kelurahan	27 kelurahan									27 kelurahan		
		Jumlah Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan	12 kegiatan									12 kegiatan		
		Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota Pekalongan				4 unsur	4 unsur									4 unsur		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Buku LPPD Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	193.665.000	182.665.000	187.885.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	199.700.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Dokumen Buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**82.000.000**	**114.000.000**	**101.947.000**						100 persen	**79.000.000**	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak lain skala lokal/regional/nasional/ internasional (SIDA)				70 kerja sama	20 kerja sama	82.000.000	114.000.000	101.947.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	ASN dan Masyarakat	20 kerja sama	79.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Dan Pelayanan Dasar	pelayanan publik.				
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.020.615.000**	**1.070.015.000**	**802.015.000**							**779.942.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**1.020.615.000**	**1.070.015.000**	**802.015.000**						100,00 persen	**779.942.000**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.020.615.000**	**1.070.015.000**	**802.015.000**						100 persen	**779.942.000**	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian peraturan perundang undangan daerah yang disusun				4 raperda/perda	4 raperda/perda	119.215.000	191.215.000	161.215.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum, Masyarakat dan Perangkat Daerah	4 raperda/perda	119.215.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah produk hukum daerah yang disusun (SIDA)				9 produk hukum	9 produk hukum									9 produk hukum		
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan RANHAM/Kota peduli HAM di Kota Pekalongan yang disusun				2 laporan	2 laporan	821.900.000	796.900.000	558.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum, Masyarakat dan Perangkat Daerah	2 laporan	579.727.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah masyarakat yang mengikuti fasilitasi pelayanan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat				500 orang	500 orang									500 orang		
		Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang dilaksanakan				3 perkara	1 perkara									1 perkara		
		Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan				6 kali	6 kali									6 kali		
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pengadaan buku perundang-undangan yang diadakan				11 buku	11 buku	79.500.000	81.900.000	81.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Bagian Hukum, Masyarakat dan	11 buku	81.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah			
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**360.829.000**	**385.829.000**	**297.369.000**							**406.396.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**360.829.000**	**385.829.000**	**297.369.000**						100 persen	**406.396.000**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	Indeks Kelembagaan Kota	81 indeks		76 indeks	78 indeks	78 indeks	**360.829.000**	**385.829.000**	**297.369.000**						78 indeks	**406.396.000**	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	93.679.000	105.659.000	84.532.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah	2 dokumen	112.396.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SIDa)				2 OPD	8 OPD	137.700.000	150.720.000	110.556.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah	8 OPD	156.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang menyusun Peta Proses Bisnis (SIDa)				10 OPD	10 OPD									10 OPD		
		Jumlah OPD yang menyusun SOP (SIDa)				3 OPD	3 OPD									3 OPD		
		Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP (SIDa)				1 OPD	2 OPD									2 OPD		
		Jumlah unit kerja yang disurvey IKM (SIDa)				65 Unit Kerja	76 Unit Kerja									76 Unit Kerja		
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	129.450.000	129.450.000	102.281.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah	1 Dokumen	138.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen LKJIP Kota Pekalongan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah kegiatan pembinaan internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah laporan capaian kinerja OPD yang disusun				31 Dokumen	31 Dokumen									31 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah OPD yang menerapkan pembangunan Zona Integritas				2 OPD	0 OPD									0 OPD		
		Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan penerapan ZI menuju WBK/WBBM					11 Satuan Kerja									11 Satuan Kerja		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**314.365.000**	**351.565.000**	**305.565.000**							**918.373.000**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**314.365.000**	**351.565.000**	**305.565.000**						100,00 persen	**918.373.000**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**243.865.000**	**281.065.000**	**225.065.000**						100 persen	**262.665.000**	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BLUD yang dimonitoring				16 BLUD	16 BLUD	64.000.000	64.000.000	49.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	16 BLUD	76.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah BUMD yang difasilitasi				4 BUMD	4 BUMD									4 BUMD		
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah bulan pelaksanaan Rakor Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan				2 kali	12 bulan	80.000.000	116.000.000	101.155.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 bulan	88.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Penyedia Gas Elpiji yang dimonitoring				6 Penyedia	6 Penyedia									6 Penyedia		
		Jumlah Penyedia Pupuk Bersubsidi yang dimonitoring				4 Penyedia	4 Penyedia									4 Penyedia		
		Jumlah Rakor Bidang Ekonomi yang dilaksanakan				12 bulan	2 kali									2 kali		
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumah Rakor Monev Pemantauan Pengelolaan KUR yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	99.865.000	101.065.000	74.625.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Kota Pekalongan	4 kali	98.665.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah barang cetak kegiatan aktivasi dan publikasi branding yang				4475 buah	4485 buah									4485 buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		diadakan											Publik	pelayanan publik.				
		Jumlah Rakor Monev Komite Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah Rakor TPAKD yang dilaksanakan				6 kali	3 kali									3 kali		
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Persentase Ketercapaian kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**70.500.000**	**70.500.000**	**80.500.000**						100 persen	**655.708.000**	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah OPD pengelola DBHCHT yang dimonitoring				6 OPD	6 OPD	70.500.000	70.500.000	80.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	6 OPD	655.708.000	Sekretariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**674.794.000**	**713.194.000**	**603.438.000**							**617.475.000**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen		7,00 persen	6,00 persen	6,00 persen	**674.794.000**	**713.194.000**	**603.438.000**						6,00 persen	**617.475.000**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**112.678.000**	**152.770.000**	**83.426.000**						100 persen	**109.935.000**	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah FGD yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	45.351.000	85.443.000	41.016.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	42.935.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Monev yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun				12 kali	2 kali									2 kali		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan				3 kali	1 kali	67.327.000	67.327.000	42.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	67.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**562.116.000**	**560.424.000**	**520.012.000**						100 persen	**507.540.000**	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (IKK Outcome)				60 pekerjaan	40 pekerjaan	263.714.000	302.114.000	266.912.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	OPD di lingkungan Pemerintah	40 pekerjaan	219.686.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Sosialisasi Terkait Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan				1 kali	1 kali				Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 kali		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Sewa Bandwitch yang dilaksanakan dalam satu tahun				1 kali	1 kali	298.402.000	258.310.000	253.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	287.854.000	Sekretariat Daerah
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (IKK Outcome)				100 persen	100 persen									100 persen		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**18.525.259.000**	**20.251.459.000**	**19.823.842.000**							**16.025.435.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**18.525.259.000**	**20.251.459.000**	**19.823.842.000**						100,00 persen	**16.025.435.000**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**18.525.259.000**	**20.251.459.000**	**19.823.842.000**						100 persen	**16.025.435.000**	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Guru TPQ/MADIN Kota Pekalongan yang difasilitasi jasa tenaga pendidik, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan				7830 orang /kali	7870 orang /kali	16.500.404.000	18.725.404.000	18.430.942.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	7870 orang/kali	14.422.865.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah kegiatan Fasilitasi Haji				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) tingkat Kota Pekalongan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Hari Santri Nasional				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan MTQ STQ tingkat Kota Pekalongan, untuk pelajar dan umum				2 kegiatan	0 kegiatan									0 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenasah				2 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PHBI				5 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Jumlah Kyai yang difasilitasi jasa/insentif				300 orang /kali	300 orang /kali									300 orang/kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan hibah				119 lembaga	127 lembaga									127 lembaga		
		Jumlah petugas TKHD dan TPHD kegiatan fasilitasi BPIH Kota Pekalongan				3 orang	3 orang									3 orang		
		Jumlah Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe jenasah (non-PNS) yang difasilitasi jasa/insentif				9063 orang/kali	9082 orang/kali									9082 orang/kali		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga yang difasilitasi pemberian bantuan sosial berupa beras kepada panti asuhan, yayasan dan pondok pesantren				170 lembaga/kali	320 lembaga/kali	678.075.000	678.075.000	599.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	320 lembaga/kali	660.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Takmir musholla dan Lebe jenasah non PNS yang mendapat santunan kematian				2351 orang	2174 orang									2174 orang		
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah bulan kegiatan fasilitasi BP4				12 bulan	12 bulan	1.346.780.000	847.980.000	793.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 bulan	942.570.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah kegiatan fasilitasi Houl Habib				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Istigasah Hari Jadi				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Khotmil Quran Hari Jadi				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pengajian Akbar				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pengajian Rutin/Ngaji Bareng				11 kegiatan	11 kegiatan									11 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Senam Aerobik Jumat Pagi di Lapangan Setda dan Minggu Pagi (bersama masyarakat) di Lapangan Mataram				45 kegiatan	45 kegiatan									45 kegiatan		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**30.668.749.000**	**17.844.552.000**	**21.542.880.000**							**29.430.330.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**30.668.749.000**	**17.844.552.000**	**21.542.880.000**						100 persen	**29.430.330.000**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**67.000.000**	**67.000.000**	**67.000.000**						100 persen	**75.250.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 dokumen	3.500.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Hukum				2 dokumen	2 dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 dokumen	12.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Organisasi				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian PBJ dan Minbang				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Pemerintahan				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Perekonomian dan SDA				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Umum				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	52.000.000	52.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 Bulan	59.750.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Hukum				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Organisasi				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian PBJ dan Minbang				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Perekonomian dan SDA				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Umum				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**219.150.000**	**257.550.000**	**254.100.000**						100 persen	**14.279.734.000**	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian hukum				12 bulan	12 bulan	199.650.000	238.050.000	234.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	211.600.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Kesejahteraan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Rakyat																
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Organisasi				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian protokol dan komunikasi pimpinan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
4.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian hukum				1 dokumen	1 dokumen	19.500.000	19.500.000	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	1 dokumen	19.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Organisasi				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian PBJ dan minbang				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Pemerintahan				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Perekonomian dan SDA				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Protokol dan komunikasi pimpinan				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Umum				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**91.750.000**	**87.250.000**	**87.250.000**						100 persen	**87.250.000**	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	91.750.000	87.250.000	87.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	1 kali	87.250.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				65 buah	65 buah									65 buah		
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**6.676.223.000**	**7.704.323.000**	**10.715.892.000**						100 persen	**6.294.556.000**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	80.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	1.040.725.000	1.415.725.000	1.819.265.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.040.725.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian organisasi				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian PBJ dan minbang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Umum				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				4 unit	4 unit									4 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang diadakan pada Bagian Hukum																
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				3 unit	3 unit									3 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Organisasi				4 unit	4 unit									4 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian PBJ dan Minbang				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Pemerintahan				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Perekonomian dan SDA				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Umum				10 unit	10 unit									10 unit		
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	170.000.000	170.000.000	170.000.000	m	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	170.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian hukum				11 bulan	11 bulan	1.591.721.000	1.586.321.000	1.492.413.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	11 bulan	1.591.721.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Kesejahteraan rakyat				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Organisasi				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian PBJ dan Minbang				11 bulan	11 bulan									11 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Pemerintahan				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Perekonomian dan SDA				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Umum				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	66.831.000	66.831.000	62.681.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	257.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Organisasi				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
4.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	77.500.000	77.500.000	77.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	77.500.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Organisasi				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	12 bulan	1.085.258.000	1.085.258.000	1.685.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.085.258.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Hukum				120 orang/kali	120 orang/kali	2.564.188.000	3.222.688.000	5.328.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	120 orang/kali	1.991.852.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah fasilitasi rapat				304	304									304		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				orang/kali	orang/kali									orang/kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Organisasi				50 orang/kali	50 orang/kali									50 orang/kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian PBJ dan Minbang				25 orang/kali	25 orang/kali									25 orang/kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Pemerintahan				60 orang/kali	60 orang/kali									60 orang/kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA				115 orang/kali	115 orang/kali									115 orang/kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				87 orang/kali	87 orang/kali									87 orang/kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Umum				900 orang/kali	900 orang/kali									900 orang/kali		
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.396.180.000**	**2.476.780.000**	**2.709.585.000**						100 persen	**2.396.180.000**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	26.600.000	26.600.000	26.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	26.600.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Organisasi				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian pemerintahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	969.000.000	969.000.000	1.210.157.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	969.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	1.400.580.000	1.481.180.000	1.472.828.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.400.580.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.025.272.000**	**4.964.172.000**	**5.421.576.000**						100 persen	**4.803.766.000**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	1.600.541.000	1.588.291.000	1.525.373.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.456.080.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				7 unit	7 unit	3.024.231.000	2.992.881.000	3.618.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	7 unit	2.947.186.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	400.500.000	383.000.000	278.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	400.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Organisasi																
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**827.477.000**	**847.477.000**	**847.477.000**						100 persen	**683.594.000**	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah				14 kali	14 kali	807.477.000	807.477.000	807.477.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	14 kali	653.594.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	20.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 kali	30.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 persen		100 persen		100 persen	**1.440.000.000**	**1.440.000.000**	**1.440.000.000**						100 persen	**810.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah				12 bulan	12 bulan	840.000.000	840.000.000	840.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	480.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah				12 bulan	12 bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	330.000.000	Sekretariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.334.362.0000**	**1.327.750.000**	**1.383.705.000**							**1.227.756.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen		100 persen		100 persen	**1.334.362.000**	**1.327.750.000**	**1.383.705.000**						100 persen	**1.227.756.000**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100 persen		100 persen		100 persen	**1.334.362.000**	**1.327.750.000**	**1.383.705.000**						100 persen	**1.227.756.000**	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokoleran dalam kegiatan kedinasan				12 bulan	12 bulan	253.022.000	236.810.000	233.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	274.540.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kinerja KDH dan Wa. KDH yang terbit pada media massa regional dan lokal				180 kali terbit	180 kali terbit	765.900.000	765.900.000	833.790.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	180 kali terbit	603.216.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun				1 kali	1 kali									1 kali		
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah bulan fasilitasi dokumentasi tugas pimpinan				12 bulan	12 bulan	315.440.000	325.040.000	316.705.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	350.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**50.774.945.000**	**54.914.445.000**	**61.331.063.000**								**47.539.100.000**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**31.488.032.000**	**34.835.132.000**	**35.276.750.000**							100 persen	**28.115.194.000**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**							100 Persen	**16.500.000**	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD		2 dokumen	7.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD		2 dokumen	1.500.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD		12 bulan	8.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen										2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen										5 dokumen		
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**2.918.853.000**	**2.923.653.000**	**2.867.971.000**							100 Persen	**3.183.992.000**	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD				12 bulan	12 bulan	53.900.000	58.700.000	58.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	SetDPRD		12 bulan	70.400.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	1 dokumen	1.500.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 Persen	**9.500.000**	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	1 kali	9.500.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**2.752.266.000**	**4.364.966.000**	**5.039.966.000**						100 Persen	**2.709.662.000**	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	255.000.000	1.716.000.000	1.716.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	255.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				18 Unit	18 Unit									18 Unit		
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (s				11 bulan	11 bulan	644.766.000	646.466.000	646.466.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	11 bulan	627.162.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	142.500.000	142.500.000	142.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	SetDPRD	12 bulan	142.500.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	35.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	12 bulan	300.000.000	450.000.000	450.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				450 orang/kali	450 orang/kali	1.325.000.000	1.325.000.000	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	450 orang/kali	1.300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**901.800.000**	**953.200.000**	**985.200.000**						100 Persen	**894.965.000**	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	1.800.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	200.000.000	200.000.000	232.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	200.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	700.000.000	751.400.000	751.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	693.165.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**1.559.613.000**	**2.681.313.000**	**1.553.813.000**						100 Persen	**1.428.752.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah	Pemerintahan Daerah																
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	1.039.613.000	1.061.313.000	1.128.813.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	908.752.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit	400.000.000	1.500.000.000	305.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	2 Unit	400.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	120.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**22.330.000.000**	**22.891.000.000**	**23.808.800.000**						100 Persen	**18.871.823.000**	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD				12 Bulan	12 Bulan	21.250.000.000	21.811.000.000	23.148.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	12 Bulan	17.841.823.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				140 Stel	140 Stel	550.000.000	550.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	140 Stel	500.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Fasilitasi perawatan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD				35 orang/kali	35 orang/kali	530.000.000	530.000.000	460.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	35 orang/kali	530.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**						100 Persen	**1.000.000.000**	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi/pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD				12 Bulan	12 Bulan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DPRD	12 Bulan	400.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD				12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	12 Bulan	600.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**19.286.913.000**	**20.079.313.000**	**26.054.313.000**						100,00 persen	**19.423.906.000**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**8.300.000.000**	**8.560.000.000**	**11.035.000.000**						100 Persen	**8.300.000.000**	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan				12 Perda	12 Perda	3.000.000.000	3.270.000.000	3.270.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	12 Perda	3.000.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Pendampingan/pengkajian Raperda yang dilakskanakan				20 Kali	20 Kali	5.300.000.000	5.290.000.000	7.765.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	20 Kali	5.300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi	30 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	**417.837.000**	**417.837.000**	**417.837.000**						5 dokumen	**408.849.000**	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS				2 kali	2 kali	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas plynan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	2 kali	150.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas plynan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	2 kali	150.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi				1 kali	1 kali	117.837.000	117.837.000	117.837.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	108.849.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
4.02.02. 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**2.550.000.000**	**3.082.400.000**	**3.082.400.000**						100 Persen	**3.150.000.000**	
4.02.02. 2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	1.150.000.000	1.680.000.000	1.680.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kali	2.000.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02. 2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi Produk hukum yang disosialisasikan				60 kali	60 kali	1.050.000.000	1.052.400.000	1.052.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	60 kali	800.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02. 2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemeriontah daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang dilaksanakan				20 kali	20 kali	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	20 kali	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02. 2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan program Kerja/Agenda kerja DPRD yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	50.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02. 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**1.700.000.000**	**1.700.000.000**	**1.600.000.000**						100 Persen	**1.700.000.000**	
4.02.02. 2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi				96 kali	96 kali	300.000.000	300.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	96 kali	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02. 2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses daerah wilayah pemilihan yang difasiltasi				3 kali	3 kali	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 kali	1.400.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**6.319.076.000**	**6.319.076.000**	**9.919.076.000**						100 Persen	**5.865.057.000**	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi Adeksi yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	6.319.076.000	6.319.076.000	9.919.076.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	2 kali	5.865.057.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kunjungan kerja Alat Kelengkapan dewan yang difasilitasi				50 kali	50 kali									50 kali		
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.01	**PERENCANAAN**							**7.598.308.000**	**6.720.508.000**	**6.717.579.000**							**8.054.099.000**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**6.025.190.000**	**5.305.390.000**	**5.285.940.000**						100 persen	**6.463.227.000**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**741.000.000**	**16.000.000**	**15.000.000**						100 persen	**318.906.000**	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	2 dokumen	2.717.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	2 dokumen	1.630.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	314.559.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.605.337.000**	**4.610.137.000**	**4.279.165.000**						100 persen	**5.572.053.000**	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.567.187.000	4.567.187.000	4.236.515.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	14 kali	5.526.989.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	36.450.000	41.250.000	40.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	43.530.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	1 dokumen	1.534.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**8.631.000**	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	1 kali	8.631.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**405.891.000**	**405.891.000**	**726.105.000**						100 persen	**331.969.000**	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	1.700.000	1.700.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	1.357.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos				12 bulan	12 bulan	79.428.000	79.428.000	224.658.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	59.203.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				6 unit	6 unit					Bantuan Keuanga				6 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang diadakan										n Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
		Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)					20 unit									20 unit		
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.914.000	2.914.000	2.914.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	2.716.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	55.473.000	55.473.000	55.473.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	11 bulan	48.878.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	13.876.000	13.876.000	13.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	13.577.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	2.580.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				170 orang/kali	170 orang/kali	250.000.000	250.000.000	424.284.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	170 orang/kali	203.658.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**162.870.000**	**166.570.000**	**159.270.000**						100 persen	**153.308.000**	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.550.000	1.550.000	850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	1.362.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	75.000.000	75.000.000	68.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	66.942.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	86.320.000	90.020.000	90.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	85.004.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**100.592.000**	**101.792.000**	**101.400.000**						100 persen	**78.360.000**	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	75.392.000	76.592.000	81.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	57.918.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	25.200.000	25.200.000	20.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	20.442.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**665.724.000**	**705.324.000**	**926.309.000**						100,00 persen	**727.715.000**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**551.974.000**	**508.924.000**	**761.574.000**						100 persen	**609.354.000**	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	551.974.000	508.924.000	761.574.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	609.354.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun				1 dokumen	1 dokumen					Bantuan Keuangan Khusus dari				1 dokumen		
		Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen Ranwal RPJPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen					Pemerintah Daerah Provinsi				1 dokumen		
		Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)					1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)					1 kegiatan									1 kegiatan		
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**24.250.000**	**24.250.000**	**23.250.000**						100 persen	**11.811.000**	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)				1 dokumen	1 dokumen	24.250.000	24.250.000	23.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	11.811.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**89.500.000**	**172.150.000**	**141.485.000**						100 persen	**106.550.000**	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	89.500.000	172.150.000	141.485.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	4 dokumen	106.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005 - 2025 yang disusun					1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**907.394.000**	**709.794.000**	**505.330.000**						100,00 persen	**863.157.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**259.264.000**	**210.464.000**	**156.000.000**						100 persen	**198.645.000**	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	9.006.000	9.006.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 Laporan	8.688.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	72.043.000	72.043.000	57.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	69.506.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen laporan bidang pemerintahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	27.015.000	27.015.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	26.064.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	151.200.000	102.400.000	77.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	94.387.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**176.200.000**	**177.400.000**	**87.400.000**						100 persen	**255.664.000**	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang disusun				1 dokumen	0 dokumen	176.200.000	177.400.000	87.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	0 dokumen	255.664.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah laporan kegiatan bidang perekonomian dan SDA yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah seminar, workshop atau FGD bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan				1 kali	0 kali									0 kali		
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**471.930.000**	**321.930.000**	**261.930.000**						100 persen	**408.848.000**	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	240.000.000	129.500.000	129.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	199.881.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Kajian Pasca Kegiatan Penanganan Banjir dan Rob Kali Loji dan Kali Banger yang disusun				1 dokumen	0 dokumen	231.930.000	192.430.000	132.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	0 dokumen	208.967.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Dokumen Kajian Sistem Drainase Kota Pekalongan yang Disusun					1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Kewilayahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.213.225.000**	**1.066.825.000**	**924.380.000**							**1.248.015.000**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**1.213.225.000**	**1.066.825.000**	**924.380.000**						100,00 persen	**1.248.015.000**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang**	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**267.500.000**	**268.700.000**	**263.220.000**						100 persen	**255.433.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan																
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi (SIDa)				5 riset	5 riset	175.000.000	175.000.000	179.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	5 riset	178.076.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah bulan pengelolaan website kelitbangan (SIDa)					12 bulan	92.500.000	93.700.000	83.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 bulan	77.357.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah website kelitbangan yang dikelola (SIDa)				1 website	0 website									0 website		
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**285.725.000**	**383.125.000**	**244.410.000**						100 persen	**298.826.000**	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					0 Dokumen	285.725.000	383.125.000	244.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	298.826.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa)				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa)				3 riset	2 riset									2 riset		
		Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)				4 kali	0 kali									0 kali		
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**660.000.000**	**415.000.000**	**416.750.000**						100 persen	**693.756.000**	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional (SIDa)				1 event	1 event	650.000.000	405.000.000	411.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 event	693.756.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida (SIDa)				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi (SIDa)				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Pemenang Krenova (SIDa)				5 pemenang	2 pemenang									2 pemenang		
		Jumlah seleksi apresiasi inovasi OPD yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)				1 kali	1 kali	10.000.000	10.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 kali	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.02	**KEUANGAN**							**27.136.267.000**	**31.296.267.000**	**31.981.258.000**							**23.282.915.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.546.686.000**	**21.481.838.000**	**21.513.289.000**						100 persen	**14.344.890.000**	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 Persen	**18.150.000**	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	4.700.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	2.250.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	11.200.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**12.846.334.000**	**12.831.934.000**	**12.981.261.000**						100 Persen	**12.591.960.000**	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	12.709.084.000	12.709.084.000	12.858.411.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	14 kali	12.454.710.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	135.000.000	120.600.000	120.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	135.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dokumen	2.250.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 Persen	**9.500.000**	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 kali	9.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**811.868.000**	**1.288.920.000**	**1.461.230.000**						100 Persen	**754.082.000**	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	7.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	273.868.000	740.920.000	676.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	BPKAD	12 bulan	241.082.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Aset Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				10 unit	38 unit									38 unit		
5.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	18.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	110.000.000	120.000.000	123.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	11 bulan	110.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	50.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	2.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 orang/kali	300 orang/kali	350.000.000	350.000.000	583.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	300 orang/kali	325.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**1.455.000.000**	**5.715.000.000**	**5.258.700.000**						100 Persen	**0**	
5.02.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan				4 unit	7 unit	1.200.000.000	2.910.000.000	2.709.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	BPKAD	7 unit	0	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan				9 unit	8 unit	255.000.000	2.805.000.000	2.549.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	8 unit	0	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 3 yang diadakan				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
		Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan				6 unit	6 unit									6 unit		
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**718.736.000**	**757.536.000**	**795.350.000**						100 Persen	**720.913.000**	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	4.594.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	3.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	506.400.000	506.400.000	542.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	506.400.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	209.336.000	248.136.000	248.136.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	211.513.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**689.248.000**	**867.448.000**	**995.748.000**						100 Persen	**250.285.000**	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	149.248.000	150.448.000	153.748.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	135.285.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	500.000.000	675.000.000	800.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	BPKAD	1 unit	75.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	40.000.000	42.000.000	42.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	40.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,26 persen		11,91 persen	8,08 persen	8,08 persen	**6.921.134.000**	**5.924.434.000**	**6.902.308.000**						8,08 persen	**6.083.042.000**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.237.850.000**	**1.167.650.000**	**1.092.650.000**						100 persen	**924.853.600**	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	35.000.000	28.820.000	19.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	35.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	35.000.000	28.985.000	20.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	35.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	62.000.000	62.000.000	30.368.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	62.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	890.000.000	855.968.000	832.346.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 dokumen	628.699.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah Peraturan Daerah					0									0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Dokumen									Dokumen		
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	124.600.000	109.237.000	97.506.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 dokumen	138.154.600	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan				12 bulan	12 bulan	91.250.000	82.640.000	92.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	26.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan				16 kali	16 kali									16 kali		
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**267.740.000**	**467.840.000**	**424.549.000**						100 persen	**262.900.000**	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan				67 OPD	0 OPD	89.149.000	286.549.000	261.549.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 OPD	87.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan					8500 Dokumen									8500 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan				3 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan				12 kali	12 kali									12 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		keuangan daerah yang dilaksanakan																
		Jumlah terlaksananya pendampingan jasa konsultasi pajak					12 Kali									12 Kali		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun				30 laporan	26 laporan	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	26 laporan	23.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah pelaksanaan pelatihan transaksi non tunai					0 kali	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 kali	25.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pelaksanaan pelatihan transaksi non tunai					2 kali									2 kali		
		Jumlah pelatihan/monitoring transaksi non tunai yang dilaksanakan				2 kali	0 kali									0 kali		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji ASN Kota Pekalongan yang disusun					3455 data	73.591.000	58.291.000	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3455 data	70.900.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan yang dilaksanakan				14 kali	14 kali									14 kali		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen/Perwal KKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dokumen	25.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan					3 kali	32.000.000	50.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3 kali	32.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan				3 kali	0 kali									0 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**415.544.000**	**433.944.000**	**360.109.000**						100 persen	**395.288.400**	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan yang disusun				7 laporan	7 laporan	59.000.000	49.000.000	39.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	7 laporan	59.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD yang disusun				68 laporan	68 laporan									68 laporan		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun				13 laporan	13 laporan	8.000.000	8.000.000	6.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	13 laporan	8.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun				7 laporan	7 laporan	95.000.000	105.000.000	81.980.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	7 laporan	95.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan				5 kali	5 kali									5 kali		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun				2 dokumen	0 dokumen	90.000.000	90.000.000	73.585.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 dokumen	90.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen Raperda dan Raperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun					2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun				12 laporan	12 laporan	10.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 laporan	10.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	BPKAD	1 dokumen	20.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Aset Daerah
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	133.544.000	153.944.000	140.944.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 kali	113.288.400	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir				4 unit kerja	4 unit kerja									4 unit kerja		
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.000.000.000**	**3.855.000.000**	**5.025.000.000**						100 persen	**4.500.000.000**	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah bulan penyediaan dana BTT				12 bulan	12 bulan	5.000.000.000	3.855.000.000	5.025.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	4.500.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.505.497.000**	**1.365.497.000**	**1.496.880.000**						100 persen	**1.194.067.000**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.505.497.000**	**1.365.497.000**	**1.496.880.000**						100 persen	**1.194.067.000**	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku standar harga yang disusun				2 buku	2 buku	55.000.000	55.000.000	147.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 buku	55.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan BMD dan Pemeliharaan BMD yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	30.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	30.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Pemeliharaan BMD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat yang diajukan				250 bidang	250 bidang	455.000.000	303.000.000	271.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	250 bidang	155.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD				3 jenis	3 jenis	65.000.000	140.550.000	154.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3 jenis	65.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					0 Dokumen	325.480.000	253.530.000	353.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 Dokumen	325.480.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang/berat				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah lelang garapan tanah eks bengkok yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat				4 unit	4 unit									4 unit		
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan				80 laporan	81 laporan	575.017.000	583.417.000	553.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	81 laporan	563.587.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	0.05 persen		0.05 persen	0.05 persen	0.05 persen	**2.162.950.000**	**2.524.498.000**	**2.068.781.000**						0.05 persen	**1.660.916.000**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	5.0 persen		4.5 persen	4.7 persen	4.7 persen	**2.162.950.000**	**2.524.498.000**	**2.068.781.000**						4.7 persen	**1.660.916.000**	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	75.000.000	77.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	BPKAD	1 Dokumen	85.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Gebyar Pajak Daerah yang dilaksanakan				2 kali	1 kali	184.992.000	180.000.000	180.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 kali	154.344.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disusun				12 laporan	12 laporan									12 laporan		
		Jumlah rakor bidang pendapatan pajak dan retribusi yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata				1500 objek	1500 objek	30.000.000	55.300.000	55.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1500 objek	30.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring				1140 objek	1140 objek									1140 objek		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumkah sistem informasi baru yang diadakan				1 aplikasi	1 aplikasi	355.941.000	351.750.000	299.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 aplikasi	57.202.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan					5 aplikasi									5 aplikasi		
		Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan				8 aplikasi	8 aplikasi									8 aplikasi		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan				2000 berkas	2000 berkas	353.100.000	653.100.000	347.232.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2000 berkas	176.550.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Buku DHKP PBB yang disusun				94 buku	94 buku									94 buku		
		Jumlah Buku SK Walikota Klasifikasi NJOP PBB yang disusun					4 buku									4 buku		
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB				4 buku	0 buku									0 buku		
		Jumlah Data Objek Pajak PBB yang diupdate					11250 objek									11250 objek		
		Jumlah hibah yang difasilitasi				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Objek Pajak PBB yang diupdate				11250 objek	0 objek									0 objek		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan				94000 lembar	94000 lembar	300.000.000	300.000.000	295.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	94000 lembar	300.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat				19000 lembar	19000 lembar									19000 lembar		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				1 orang/ bulan	0 orang/ bulan	386.348.000	371.948.000	337.384.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 orang/ bulan	389.525.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani				14400 WP/ WR	0 WP/ WR									0 WP/ WR		
		Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi yang dilayani					14400 WP/ WR									14400 WP/ WR		
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas BPHTB yang diteliti dan diverifikasi				2000 berkas	2000 berkas	65.388.000	55.000.000	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2000 berkas	66.114.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan				3060 surat	3060 surat	227.681.000	310.200.000	264.365.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3060 surat	227.681.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi pajak daerah yang dilaksanakan					180 kali	159.500.000	121.200.000	114.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	180 kali	159.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah				50 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah wajib pajak dan retribusi daerah yang diperiksa				8 wajib pajak	140 wajib pajak									140 wajib pajak		
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	51.000.000	42.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 Laporan	15.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.643.803.000**	**6.441.489.000**	**5.763.608.000**							**6.942.810.000**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.864.209.000**	**5.218.045.000**	**4.703.330.000**						100 persen	**5.385.833.000**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 persen	**12.850.000**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	2 Dokumen	2.750.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	2 dokumen	1.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	8.450.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**4.065.448.000**	**4.070.248.000**	**3.550.482.000**						100 persen	**4.236.888.000**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	4.011.798.000	4.011.798.000	3.499.232.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	14 bulan	4.185.238.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	56.800.000	49.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	1 dokumen	1.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**9.500.000**	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 Kali	1 Kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	1 Kali	9.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**314.408.000**	**411.844.000**	**428.029.000**						100 persen	**661.218.000**	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	75.445.000	172.881.000	172.881.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	67.690.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				62 unit	62 unit									62 unit		
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	1.000.000	1.000.000	2.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	1.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	62.045.000	62.045.000	62.045.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	BKPSDM	11 bulan	70.028.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Podosugih	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	20.418.000	20.418.000	20.418.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				115 orang/kali	115 orang/kali	150.000.000	150.000.000	164.985.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	115 orang/kali	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**325.180.000**	**331.280.000**	**320.946.000**						100 persen	**369.500.000**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	198.780.000	198.780.000	187.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	124.000.000	130.100.000	130.766.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	167.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**133.673.000**	**383.673.000**	**382.873.000**						100 persen	**95.877.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah	Pemerintahan Daerah																
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	41.407.000	41.407.000	45.607.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	35.877.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit	80.266.000	330.266.000	324.869.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	2 unit	48.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.397.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	12.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen		80,00 persen	80,00 persen	80,00 persen	**1.779.594.000**	**1.223.444.000**	**1.060.278.000**						80,00 persen	**1.556.977.000**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase ketersediaan data PNS	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**773.275.000**	**228.075.000**	**267.160.000**						100 persen	**765.319.000**	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah formasi pengadaan PPPK				4 Orang	4 Orang	600.000.000	50.000.000	97.085.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 Orang	655.969.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola				16 Aplikasi	16 Aplikasi	173.275.000	178.075.000	170.075.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	16 Aplikasi	109.350.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	110 persen		110 persen	110 persen	110 persen	**176.175.000**	**251.175.000**	**383.744.000**						110 persen	**19.694.000**	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang dikelola kenaikan pangkatnya				550 orang	550 orang	22.468.000	22.468.000	22.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	ASN	550 orang	19.600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas				90 Orang	52 Orang						Publik	pelayanan publik.		52 Orang		
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Penyesuiaian Ijasah				10 Orang	18 Orang									18 Orang		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					0 Dokumen	153.707.000	228.707.000	361.276.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Dokumen	94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang di lantik				50 Orang	75 Orang									75 Orang		
		Jumlah pejabat tinggi pratama yang lulus seleksi				3 orang	5 orang									5 orang		
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	42 persen		42 persen	42 persen	42 persen	**592.100.000**	**448.100.000**	**127.480.000**						42 persen	**629.366.000**	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti Assesment				310 orang	24 orang	441.220.000	273.220.000	49.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	24 orang	400.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas (S1)				12 Orang	12 Orang	86.680.000	110.680.000	59.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 Orang	165.166.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang diberikan bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas (S2)				4 Orang	2 Orang									2 Orang		
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah kepala sekolah yang difasilitasi peningkatan kompetensi manajerial				2 Orang	2 Orang	9.200.000	9.200.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	2 Orang	9.200.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah laporan evaluasi diklat yang disusun				1 laporan	1 laporan	36.000.000	36.000.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	1 laporan	36.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pejabat fungsional yang difasilitasi diklat				10 Orang	10 Orang									10 Orang		
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	1 kali	19.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Tingkat Disiplin ASN	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**238.044.000**	**296.094.000**	**281.894.000**						100 persen	**142.598.000**	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapat Penghargaan ASN Award					10 Orang	48.000.000	48.000.000	33.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	10 Orang	33.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS				150 Orang	86 Orang									86 Orang		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah CPNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan				319 Orang	319 Orang	176.400.000	234.450.000	234.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	319 Orang	102.098.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan				46 Orang	46 Orang									46 Orang		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah CPNS yang difasilitasi mengikuti sumpah PNS				322 orang	322 orang	13.644.000	13.644.000	13.644.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	322 orang	7.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah kasus kepegawaian yang diselesaikan				4 kasus	4 kasus									4 kasus		
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**3.349.750.000**	**2.023.264.000**	**1.539.204.000**							**2.958.800.000**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**3.349.750.000**	**2.023.264.000**	**1.539.204.000**						100,00 persen	**2.958.800.000**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.222.750.000**	**1.881.204.000**	**1.490.324.000**						100 persen	**856.500.000**	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					0 Orang	700.000.000	1.358.454.000	1.154.784.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Orang	768.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pejabat eselon IV yang difasilitasi pelatihan kepemimpinan, PKP				30 Orang	30 Orang									30 Orang		
		Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti diklat teknis dan fungsional (SIDa)				160 Orang	100 Orang									100 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang difasilitasi pelatihan kepemimpinan, PKN,PKA,PKP				15 Orang	15 Orang	522.750.000	522.750.000	335.540.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	15 Orang	88.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang		207 orang		80 persen	**2.127.000.000**	**142.060.000**	**48.880.000**						80 persen	**2.102.300.000**	
		Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang		207 orang	200 orang	200 orang									200 orang		
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi				10 Orang	10 Orang	50.000.000	50.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	10 Orang	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah calon pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan pelatihan dasar				2 Orang	2 Orang	2.043.000.000	58.060.000	33.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	2 Orang	2.043.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PPPK yang difasilitasi mengikuti orientasi				146 orang	146 orang									146 orang		
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan	Jumlah monitoring analisis kebutuhan diklat				300 org/kl	300 org/kl	34.000.000	34.000.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	300 org/kl	9.300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah monitoring pasca diklat				288 org/kl	288 org/kl									288 org/kl		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Prajabatan																	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**5.884.152.000**	**6.252.552.000**	**6.025.233.000**							**5.719.509.000**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**5.426.159.000**	**5.682.559.000**	**5.657.894.000**						100 persen	**5.270.664.000**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**11.000.000**						100 Persen	**12.719.000**	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	2 Dokumen	2.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	2 Dokumen	1.219.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	9.500.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 Dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP) , 4 Laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**5.000.070.000**	**5.004.870.000**	**5.004.870.000**						100 Persen	**4.852.101.000**	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Kali	14 Kali	4.965.570.000	4.965.570.000	4.965.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Inspektorat	14 Kali	4.817.601.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	33.000.000	37.800.000	37.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	33.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 dokumen	1.500.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**40.500.000**	**143.000.000**	**102.100.000**						100 Persen	**8.631.000**	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 Kali	1 Kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 Kali	1.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	0 Dokumen	1.000.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Laporan PAK Tenaga Fungsional				2 Laporan	2 Laporan									2 Laporan		
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	30.000.000	130.000.000	89.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	0 Orang	6.631.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah pelatihan/diklat APIP yang dilaksanakan				6 kali	5 kali									5 kali		
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**181.172.000**	**259.041.000**	**304.166.000**						100 Persen	**203.340.000**	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	2.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Inspektorat	12 bulan	2.500.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	24.297.000	73.166.000	75.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	40.000.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				8 Unit	8 Unit									8 Unit		
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	7.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	11 bulan	40.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	12.875.000	12.875.000	12.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	8.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	2.700.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				53 orang/kali	75 orang/kali	100.000.000	126.500.000	168.971.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	75 orang/kali	103.140.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**58.425.000**	**91.256.000**	**78.656.000**						100 Persen	**60.867.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	5.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	33.925.000	47.400.000	34.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	34.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	21.000.000	40.356.000	40.356.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	21.867.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**129.992.000**	**168.392.000**	**157.102.000**						100 Persen	**133.006.000**	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	74.992.000	113.392.000	119.842.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	70.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	30.000.000	30.000.000	12.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 unit	33.006.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	30.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen		85,00 persen	85,00 persen	85,00 persen	**115.316.000**	**127.816.000**	**94.201.000**						85,00 persen	**114.932.000**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**101.388.000**	**113.888.000**	**87.203.000**						100 persen	**100.395.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu				64 Laporan	64 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	64 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	0 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang disusun				35 laporan	35 laporan									35 laporan		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang disusun				80 laporan	80 laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	80 laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang disusun				40 Laporan	40 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	40 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang disusun				2 laporan	2 laporan	8.888.000	21.388.000	21.388.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	2 laporan	9.500.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					0 Dokumen	52.500.000	52.500.000	25.815.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	0 Dokumen	50.895.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang disusun				7 laporan	5 laporan									5 laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**13.928.000**	**13.928.000**	**6.998.000**						100 persen	**14.537.000**	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Bulan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	3.064.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	OPD di Kota Pekalongan	12 bulan	7.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Bulan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 bulan	12 bulan	7.928.000	7.928.000	3.934.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	12 bulan	7.537.000	Inspektorat Daerah
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai		3,00 nilai	3,00 nilai	3,00 nilai	**342.677.000**	**442.177.000**	**273.138.000**						3,00 nilai	**333.913.000**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**31.850.000**	**121.850.000**	**69.350.000**						100 persen	**32.435.000**	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	28.850.000	28.850.000	18.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	3 Dokumen	29.435.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun				2 laporan	0 laporan									0 laporan		
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan				1 Aplikasi	1 Aplikasi	3.000.000	93.000.000	50.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	1 Aplikasi	3.000.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun				3 laporan	3 laporan									3 laporan		
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	98 persen		93 persen	95 persen	95 persen	**310.827.000**	**320.327.000**	**203.788.000**						95 persen	**301.478.000**	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	30.000.000	30.000.000	9.466.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	31 perangkat daerah	33.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang disusun				10 Laporan	10 Laporan	25.000.000	25.000.000	13.026.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	10 Laporan	15.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					0 Kegiatan	128.237.000	164.237.000	84.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	0 Kegiatan	128.478.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun				8 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
		Jumlah Laporan Monitoring LHKASN yang disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah Laporan Monitoring LHKPN yang disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun				4 Laporan	4 Laporan	127.590.000	101.090.000	96.916.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	4 Laporan	125.000.000	Inspektorat Daerah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**10.071.237.000**	**10.687.993.000**	**9.867.076.000**							**9.559.053.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.646.110.000**	**10.242.066.000**	**9.428.920.000**						100 persen	**9.002.290.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**122.500.000**	**122.500.000**	**121.840.000**						100 persen	**124.000.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	2 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan	116.000.000	116.000.000	115.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	12 bulan	116.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**6.982.937.000**	**7.021.337.000**	**7.021.337.000**						100 persen	**7.472.273.000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	6.781.937.000	6.781.937.000	6.781.937.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	14 kali	7.271.273.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	198.000.000	236.400.000	236.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	198.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.500.000**	**12.000.000**	**12.000.000**						100 persen	**16.500.000**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	1 kali	16.500.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	1 kali	16.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**438.600.000**	**634.700.000**	**639.150.000**						100 persen	**440.890.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	8.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Panjang Baru																
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	152.000.000	332.300.000	337.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	152.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan Pekalongan Utara				11 unit	11 unit									11 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Bandengan				5 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				20 unit	20 unit									20 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang diadakan pada Kelurahan Degayu																
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kandang Panjang				8 unit	8 unit									8 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Krapyak				5 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Padukuhan Kraton				6 unit	6 unit									6 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Panjang Baru				9 unit	9 unit									9 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Panjang Wetan				5 unit	5 unit									5 unit		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	12.750.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan Pekalongan Utara				11 bulan	11 bulan	195.000.000	205.800.000	203.180.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	11 bulan	195.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Bandengan				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Degayu				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kandang Panjang				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Krapyak				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Padukuhan Kraton				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Panjang Baru				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Panjang Wetan				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	20.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Bandengan				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Degayu				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Krapyak				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				20 Orang/Kali	20 Orang/Kali	12.500.000	17.500.000	19.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Kecamatan Pekalongan Utara	20 Orang/Kali	12.540.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**807.475.000**	**822.531.000**	**822.640.000**						100 persen	**709.352.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	125.884.000	125.884.000	125.884.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	125.884.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	671.091.000	686.147.000	686.256.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	572.968.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Bandenga					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Degayu					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Kandang Panjang					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Krapyak					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Padukuhan Kraton					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Panjang Baru					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Panjang Wetan					12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.278.098.000**	**1.628.998.000**	**811.953.000**						100 persen	**239.275.000**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	135.798.000	135.798.000	139.848.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	115.775.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun				1 Unit	1 Unit	1.097.300.000	1.448.200.000	627.105.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Unit	78.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Gedung Kantor yang direhab				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Utara				2 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Bandengan				1 unit	1 unit									1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Degayu				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kandang Panjang				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Krapyak				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Padukuhan Kraton				3 unit	3 unit									3 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Panjang Baru				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Panjang Wetan				2 unit	2 unit									2 unit		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	45.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**12.000.000**	**12.000.000**	**13.834.000**						100,00 persen	**69.933.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**0**	**0**	**4.000.000**						100 persen	**51.333.000**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kecamatan yang dilaksanakan				7 Kelurahan	1 Kali	-	0	4.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Kali	51.333.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**12.000.000**	**12.000.000**	**9.834.000**						100 persen	**18.600.000**	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	12.000.000	12.000.000	9.834.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	4 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**119.943.000**	**129.943.000**	**116.838.000**						100 persen	**221.824.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**17.563.000**	**17.563.000**	**17.563.000**						100 persen	**0**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	17.563.000	17.563.000	17.563.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Masyarakat	1 dokumen	0	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 kali	1 kali				Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		1 kali		
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**19.880.000**	**29.880.000**	**29.880.000**						100 persen	**110.481.000**	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK				12 bulan	12 bulan	19.880.000	29.880.000	29.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	110.481.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**82.500.000**	**82.500.000**	**69.395.000**						100 persen	**111.343.000**	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	82.500.000	82.500.000	69.395.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**284.984.000**	**295.784.000**	**299.284.000**						100,00 persen	**258.755.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**284.984.000**	**295.784.000**	**299.284.000**						100 persen	**258.755.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 Hari	25 Hari	284.984.000	295.784.000	299.284.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	25 Hari	258.755.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan				52 Kali	52 Kali									52 Kali		
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				36 Kali	36 Kali									36 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**8.200.000**	**8.200.000**	**8.200.000**						100,00 persen	**6.251.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**8.200.000**	**8.200.000**	**8.200.000**						100 persen	**6.251.000**	
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	8.200.000	8.200.000	8.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	6.251.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**463.501.000**	**483.680.000**	**475.340.000**							**410.601.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**463.501.000**	**483.680.000**	**475.340.000**						100 persen	**410.601.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**463.501.000**	**483.680.000**	**475.340.000**						100 persen	**410.601.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	168.246.000	169.446.000	159.106.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	127.296.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang di cor				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah papan nama kelurahan dan LKK yang diadakan				8 buah	8 buah									8 buah		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				2 RT/RW	2 RT/RW									2 RT/RW		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	282.755.000	301.734.000	303.734.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	270.805.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bakti lingkungan yang dilaksanakan				39 kali	39 kali									39 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting				1 laporan	1 laporan									1 laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kelurahan yang disusun																
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				66 buah	66 buah									66 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				79 RT/RW	79 RT/RW									79 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**463.228.000**	**738.006.000**	**729.666.000**							**428.017.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**463.228.000**	**738.006.000**	**729.666.000**						100 persen	**428.017.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**463.228.000**	**738.006.000**	**729.666.000**						100 persen	**428.017.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	120.608.000	301.808.000	291.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah Gapura yang dibangun				3 unit	3 unit									3 unit		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah RW yang difasilitasi pengadaan sound system, layos, dan kursi				2 RW	2 RW									2 RW		
		Jumlah Sarana dan				0 Unit	1 Unit									1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Prasarana Kelurahan yang Terbangun																
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	330.120.000	423.698.000	425.698.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	345.517.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				39 kali	39 kali									39 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah lembaga yang difasilitasi hibah				1 Lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rembug Stunting					1 kali									1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tingkat Kelurahan																
		Jumlah pelatihan hantaran yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				102 box	102 box									102 box		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang diasuransikan				92 RT/RW	92 RT/RW									92 RT/RW		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				92 RT/RW	92 RT/RW									92 RT/RW		
		Jumlah sosialisasi yang diadakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah strip kolesterol, jarum dan swab alkohol yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**490.768.000**	**496.094.000**	**488.404.000**							**339.457.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**490.768.000**	**496.094.000**	**488.404.000**						100 persen	**339.457.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**490.768.000**	**496.094.000**	**488.404.000**						100 persen	**339.457.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	11.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	255.608.000	237.708.000	229.368.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	68.857.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	222.660.000	245.886.000	247.886.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	258.100.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				27 kali	27 kali									27 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan Rembug Stunting Tigkat Kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan Rembug Stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				441 buah	441 buah									441 buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				48 RT/RW	48 RT/RW									48 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, jarum dan swab alkohol yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**334.268.000**	**336.506.000**	**328.166.000**							**328.868.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**334.268.000**	**336.506.000**	**328.166.000**						100 persen	**328.868.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**334.268.000**	**336.506.000**	**328.166.000**						100 persen	**328.868.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	120.608.000	121.808.000	111.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	137.718.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	201.160.000	202.198.000	204.198.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	178.650.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				18 Kali	18 Kali									18 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan update data ATS yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah pelatihan Public Speaking yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				12 buah	12 buah									12 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				33 RT/RW	33 RT/RW									33 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**795.044.000**	**826.782.000**	**818.442.000**							**563.744.000**	
7.01.03	**PROGRAM**	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	**795.044.000**	**826.782.000**	**818.442.000**						100	**563.744.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen			persen	persen									persen		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**795.044.000**	**826.782.000**	**818.442.000**						100 persen	**563.744.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	345.608.000	347.708.000	337.368.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	123.858.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan				2 Lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	436.936.000	466.574.000	468.574.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	427.386.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				60 kali	60 kali									60 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan syawalan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Pelatihan Digital Marketing yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				156 buah	156 buah									156 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				126 RT/RW	126 RT/RW									126 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**464.588.000**	**466.418.000**	**458.078.000**							**447.377.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**464.588.000**	**466.418.000**	**458.078.000**						100 persen	**447.377.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**464.588.000**	**466.418.000**	**458.078.000**						100 persen	**447.377.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pembangunan di Kelurahan										Padukuhan Kraton	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	123.608.000	124.808.000	114.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	68.857.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	328.480.000	329.110.000	331.110.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	366.020.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				45 kali	45 kali									45 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah Kegiatan karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan				2 kali	2 kali									2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan																
		Jumlah Kegiatan rembug stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				0 Pokmas / Ormas	1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				93 RT/RW	93 RT/RW									93 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				120 box	120 box									120 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**403.693.000**	**467.980.000**	**459.640.000**							**393.141.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**403.693.000**	**467.980.000**	**459.640.000**						100 persen	**393.141.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**403.693.000**	**467.980.000**	**459.640.000**						100 persen	**393.141.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	120.608.000	121.808.000	111.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	135.975.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	8 Kali									8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		ditingkatkan																
		Jumlah Taman Baca Yang Di Fasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	270.585.000	333.672.000	335.672.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	244.666.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				30 Kali	30 Kali									30 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman/ (KOTAKU) yang dilaksanakan					0 Kegiatan									0 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah pelatihan hantaran yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				54 buah	54 buah									54 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				71 RT/RW	71 RT/RW									71 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**8.184.556.000**	**8.402.412.000**	**8.168.812.000**							**8.433.940.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**7.789.125.000**	**7.989.581.000**	**7.824.147.000**						100 persen	**8.078.258.000**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**111.500.000**	**111.500.000**	**98.260.000**						100 persen	**102.667.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	105.000.000	105.000.000	91.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	94.667.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**6.147.047.000**	**6.180.647.000**	**6.178.547.000**						100 persen	**6.725.473.000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	5.969.447.000	5.969.447.000	5.969.447.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	14 kali	6.547.873.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	174.600.000	208.200.000	206.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	174.600.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		pada Kelurahan Buaran Kradenan																
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.500.000**	**12.000.000**	**12.000.000**						100 persen	**18.489.000**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 kali	1 kali	16.500.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	18.489.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**355.416.000**	**443.216.000**	**444.785.000**						100 persen	**345.830.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	7.800.000	7.800.000	7.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	7.800.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	136.000.000	209.200.000	219.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	136.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan Pekalongan				4 unit	5 unit									5 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Selatan																
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Banyurip				5 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Buaran Kradenan				6 unit	6 unit									6 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Jenggot				4 unit	4 unit									4 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				6 unit	6 unit									6 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				4 unit	4 unit									4 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Sokoduwet				4 unit	7 unit									7 unit		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	9.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan Pekalongan Selatan				11 bulan	11 bulan	137.116.000	147.916.000	141.316.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 bulan	127.530.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Banyurip				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Buaran Kradenan				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Jenggot				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Sokoduwet				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	35.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Sokoduwet																
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	17.500.000	16.300.000	15.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	17.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Buaran kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				14 orang/kali	14 orang/kali	12.500.000	17.500.000	16.099.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	14 orang/kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**788.480.000**	**836.036.000**	**829.916.000**						100 persen	**698.055.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	9.300.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	98.720.000	98.720.000	91.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	86.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Sokoduwet																
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	680.460.000	728.016.000	729.616.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	602.755.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan//bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**220.182.000**	**406.182.000**	**260.639.000**						100 persen	**187.744.000**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	118.182.000	124.182.000	122.582.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	85.744.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Selatan				2 Unit	2 Unit	62.000.000	242.000.000	98.057.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Unit	62.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Banyurip				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Buaran Kradenan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Jenggot				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Sokoduwet				1 Unit	1 Unit									1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah papan nama kelurahan yang diadakan				1 Unit	0 Unit									0 Unit		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				0 Unit	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	0 bulan									0 bulan		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**10.800.000**	**10.800.000**	**6.500.000**						100,00 persen	**9.812.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**10.800.000**	**10.800.000**	**6.500.000**						100 persen	**0**	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	3 kali	10.800.000	10.800.000	6.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan	3 kali	0	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**118.669.000**	**128.669.000**	**92.823.000**						100 persen	**110.934.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**17.099.000**	**17.099.000**	**16.199.000**						100 persen	**0**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	17.099.000	17.099.000	16.199.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	0	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**19.070.000**	**29.070.000**	**24.540.000**						100 persen	**110.934.000**	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK				12 bulan	12 bulan	19.070.000	29.070.000	24.540.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	110.934.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				2 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**82.500.000**	**82.500.000**	**52.084.000**						100 persen	**0**	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	82.500.000	82.500.000	52.084.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**257.962.000**	**265.362.000**	**237.842.000**						100,00 persen	**223.670.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	**257.962.000**	**265.362.000**	**237.842.000**						100 Persen	**223.670.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 hari	0 hari	257.962.000	265.362.000	237.842.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 hari	223.670.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah layanan pengantaran RA KESEL MLAKU yang dilaksanakan				48 kali	48 kali									48 kali		
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				36 kali	36 kali									36 kali		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**8.000.000**	**8.000.000**	**7.500.000**						100,00 persen	**11.266.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**8.000.000**	**8.000.000**	**7.500.000**						100 Persen	**11.266.000**	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	8.000.000	8.000.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	11.266.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**414.513.000**	**432.341.000**	**430.001.000**							**397.013.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	**414.513.000**	**432.341.000**	**430.001.000**						100 persen	**397.013.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	**414.513.000**	**432.341.000**	**430.001.000**						100 persen	**397.013.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	175.608.000	131.808.000	127.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	147.513.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan lingkungan yang dibangun				2 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah lokasi jalan lingkungan yang ditingkatkan				2 lokasi	0 lokasi									0 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase lingkungan yang direhab/terpelihara				2 lokasi	3 lokasi									3 lokasi		
		Jumlah Sarpras Pengelolaan Persampahan yang dihibahkan					1 Unit									1 Unit		
		Jumlah sarpras yang dihibahkan				3 unit	4 unit									4 unit		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Bulan Fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	269.864.000	288.033.000	290.033.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	237.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah Bulan Fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah Bulan Fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				33 kali	33 kali									33 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan				23 kali	18 kali									18 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Pelatihan Kader BKB yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Pelatihan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Pelatihan Tata Boga yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah peningkatan kapasitas hansip/linmas yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				210 buah	210 buah									210 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				65 RT/RW	65 RT/RW									65 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**457.972.000**	**466.959.000**	**460.517.000**							**386.011.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	**457.972.000**	**466.959.000**	**460.517.000**						100 persen	**386.011.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	**457.972.000**	**466.959.000**	**460.517.000**						100 persen	**386.011.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahanJumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	175.608.000	176.808.000	166.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	89.107.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah gapuro yang dibangun				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah sound system yang dihibahkan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	269.864.000	277.651.000	281.549.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	284.404.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				36 kali	36 kali									36 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah pelatihan servis HP yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah pelatihan servis motor yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				96 buah	68 buah									68 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				62 RT/RW	63 RT/RW									63 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				73 box	73 box									73 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**364.838.000**	**374.430.000**	**366.090.000**							**321.027.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	**364.838.000**	**374.430.000**	**366.090.000**						100 persen	**321.027.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	**364.838.000**	**374.430.000**	**366.090.000**						100 persen	**321.027.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	140.608.000	146.808.000	136.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	88.857.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				5 lokasi	5 lokasi									5 lokasi		
		Jumlah mesin potong rumput yang dihibahkan				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
		Jumlah sound system yang dihibahkan				3 Unit	3 Unit									3 Unit		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	211.730.000	215.122.000	217.122.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	219.670.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				30 kali	30 kali									30 kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan FKSS Yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan				0 Pokmas / Ormas	1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				102 buah	102 buah									102 buah		
		Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				37 RT/RW	37 RT/RW									37 RT/RW		
		Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras				1 RT	1 RT									1 RT		
		Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**452.017.000**	**455.004.000**	**446.664.000**							**384.806.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	**452.017.000**	**455.004.000**	**446.664.000**						100 persen	**384.806.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	**452.017.000**	**455.004.000**	**446.664.000**						100 persen	**384.806.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	141.246.000	142.446.000	132.106.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	96.495.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali									8 kali		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				3 Lokasi	3 Lokasi									3 Lokasi		
		Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah sound system yang diadakan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah taman baca yang di fasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	298.271.000	300.058.000	302.058.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	275.811.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah laporan aksi konvergensi stunting kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah pelatihan rias pengantin yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				685 buah	685 buah									685 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				62 RT/RW	62 RT/RW									62 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01	**KECAMATAN**							**366.855.000**	**378.830.000**	**376.490.000**							**371.912.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	**366.855.000**	**378.830.000**	**376.490.000**						100 persen	**371.912.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	**366.855.000**	**378.830.000**	**376.490.000**						100 persen	**371.912.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah Kelurahan				12 bulan	12 bulan	128.246.000	129.446.000	122.406.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	96.495.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah kegiatan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan					1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah yang tersedia					2 buah									2 buah		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	226.109.000	236.884.000	241.584.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	262.917.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti				33 kali	39 kali									39 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		lingkungan yang dilaksanakan																
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah pelatihan tata boga yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				120 buah	120 buah									120 buah		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				50 RT / RW	50 RT / RW									50 RT / RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**411.179.000**	**419.655.000**	**417.315.000**							**572.197.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	**411.179.000**	**419.655.000**	**417.315.000**						100 persen	**572.197.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	**411.179.000**	**419.655.000**	**417.315.000**						100 persen	**572.197.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun					1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	128.246.000	129.446.000	125.106.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	148.518.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialiasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan					1 Kali									1 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dilakukan perbaikan jalan aspal					1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan					1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah papan nama RT/RW yang diadakan				66 Buah	66 Buah									66 Buah		
		Jumlah Plastik PE yang diadakan					20 Pak									20 Pak		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				0 Unit	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan					1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Sarung Tangan Latex yang diadakan					12 Pasang									12 Pasang		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Tempat Sampah yang diadakan					10 Buah									10 Buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 Bulan	270.433.000	277.709.000	279.709.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	411.179.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM					12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM					12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun					1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun					1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan					30 Kali									30 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan					30 Kali									30 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan					3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 Kali									12 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 Kali									12 Kali		
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan					3 Kali									3 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan					3 Kali									3 Kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan					2 Kali									2 Kali		
		Jumlah Kegiatan Rembug					1 Kali									1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan																
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan					1 Kali									1 Kali		
		Jumlah laporan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kelurahan yang disusun					1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun					1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				78 Buah	78 Buah									78 Buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					4 Kali									4 Kali		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					66 RT/RW									66 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, jarum dan swab alkohol yang diadakan					35 Box									35 Box		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan					35 Box									35 Box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**9.482.613.000**	**9.887.203.000**	**9.537.294.000**							**531.604.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.142.576.000**	**9.533.366.000**	**9.241.199.000**						100 persen	**192.086.000**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**122.500.000**	**122.500.000**	**122.500.000**						100 Persen	**0**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Kec. Pekalongan Barat	2 dokumen	0	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Barat, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	2 dokumen	0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	116.000.000	116.000.000	116.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Barat pada Kelurahan Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan PKK				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokoumen	2 dokoumen									2 dokoumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**7.362.371.000**	**7.400.771.000**	**7.238.050.000**						100 Persen	**3.000.000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	7.162.721.000	7.162.721.000	7.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	14 kali	0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	196.650.000	235.050.000	235.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan PKK				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Podosogih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**16.500.000**	**12.000.000**	**12.000.000**						100 Persen	**0**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	16.500.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	1 kali	0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**432.426.000**	**659.716.000**	**643.243.000**						100 Persen	**189.086.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Pasir Kraton Kramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		kantor pada Kelurahan Tirto																
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	149.500.000	360.990.000	355.807.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan Pekalongan Barat				5 unit	55 unit									55 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Bendan Kergon				6 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Medono				6 unit	6 unit									6 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pasirkratonkramat				6 unit	6 unit									6 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Podosugih				5 unit	11 unit									11 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pringrejo				6 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Sapuro Kebulen				7 unit	7 unit									7 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Tirto				8 unit	7 unit									7 unit		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan Pekalongan Barat				11 bulan	11 bulan	191.326.000	202.126.000	189.086.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	11 bulan	189.086.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Bendan Kergon				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Medono				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada				11 bulan	11 bulan									11 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kel. Pasirkratonkramat																
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Pringrejo				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Sapuro Kebulen				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Tirto				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pad Kel. Podosugih				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan					Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				10 org/kl	11 org/kl	12.500.000	17.500.000	19.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	11 org/kl	0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**893.443.000**	**933.043.000**	**929.543.000**						100 Persen	**0**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	105.000.000	116.000.000	112.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel.				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tirto																
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	777.943.000	806.543.000	806.543.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada kel. podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**315.336.000**	**405.336.000**	**295.863.000**						100 Persen	**0**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	125.836.000	125.836.000	132.923.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Barat				2 unit	2 unit	144.500.000	234.500.000	117.940.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	2 unit	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Bendan Kergon				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Medono				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Pasirkratonkramat				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Podosugih				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Pringrejo				2 unit	2 unit									2 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Sapuro Kebulen				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Tirto				2 unit	2 unit									2 unit		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**12.000.000**	**12.000.000**	**9.871.000**						100,00 persen	**22.600.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**0**	**0**	**4.000.000**						100 persen	**4.000.000**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Rembug stunting Tingkat Kecamatan yang diaksanakan					1 kali	-	0	4.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	4.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**12.000.000**	**12.000.000**	**5.871.000**						100 persen	**18.600.000**	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	2 kali	12.000.000	12.000.000	5.871.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**119.943.000**	**129.943.000**	**101.860.000**						100 persen	**111.343.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**17.563.000**	**17.563.000**	**14.935.000**						100 persen	**0**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen Lembaga Kemasyarakatan	17.563.000	17.563.000	14.935.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 kali	0 kali									0 kali		
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	**19.880.000**	**29.880.000**	**25.570.000**						100 Persen	**0**	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK				12 bulan	12 bulan	19.880.000	29.880.000	25.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				2 kali	1 kali									1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**82.500.000**	**82.500.000**	**61.355.000**						100 persen	**111.343.000**	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	82.500.000	82.500.000	61.355.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluarga/Masyarakat	12 Bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**199.894.000**	**203.694.000**	**176.164.000**						100,00 persen	**205.575.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**199.894.000**	**203.694.000**	**176.164.000**						100 persen	**205.575.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 hari	25 hari	199.894.000	203.694.000	176.164.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	25 hari	205.575.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan				52 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				36 kali	31 kali									31 kali		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**8.200.000**	**8.200.000**	**8.200.000**						100,00 persen	**0**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**8.200.000**	**8.200.000**	**8.200.000**						100 persen	**0**	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	8.200.000	8.200.000	8.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Masyarakat	1 kali	0	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**478.861.000**	**560.599.000**	**527.259.000**							**433.546.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**478.861.000**	**560.599.000**	**527.259.000**						100 persen	**433.546.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 Persen	**478.861.000**	**560.599.000**	**527.259.000**						100 Persen	**433.546.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun					1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	166.096.000	237.296.000	201.956.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	128.496.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah papan nama RT/RW yang diadakan				92 unit	92 unit									92 unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 RT/RW	4 RT/RW									4 RT/RW		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan					1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 Bulan	300.265.000	310.803.000	312.803.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	292.550.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM					12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Fasilitasi kegiatan BBGRM dan Kerja Bakti Lingkungan yang dilaksanakan					36 Kali									36 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan					36 kali									36 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan					3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan					32 Kali									32 Kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 kali									12 kali		
		Jumlah fasilitasi Sekretariat BKM					12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan lomba LBS yang difasilitasi				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelatihan kerajinan tangan dan lomba krenova				2 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas Linmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan					2 Kali									2 Kali		
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan					2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 Kali									1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan Update data ATS yang dilaksanakan					1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah laporan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kelurahan yang disusun					1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun					1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				36 buah	36 buah									36 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					6 kali									6 kali		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					92 RT/RW									92 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				34 box	34 box									34 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**375.791.000**	**435.956.000**	**437.956.000**							**350.391.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	**375.791.000**	**435.956.000**	**437.956.000**						100 persen	**350.391.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen		100 Persen	**375.791.000**	**435.956.000**	**437.956.000**						100 Persen	**350.391.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun					1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	148.246.000	159.446.000	159.446.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	142.941.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan					8 kali									8 kali		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit									2 Unit		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	215.045.000	264.010.000	266.010.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	194.950.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan					27 kali									27 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan					3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan					2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan Rembug Stunting dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan update data ATS yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun					1 laporan									1 laporan		
		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				5 kali	5 kali									5 kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				723 buah	72 buah									72 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					50 RT/RW									50 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				74 box	74 box									74 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**738.441.000**	**390.270.000**	**392.270.000**							**378.041.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**738.441.000**	**390.270.000**	**392.270.000**						100 persen	**378.041.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**738.441.000**	**390.270.000**	**392.270.000**						100 persen	**378.041.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	483.246.000	130.346.000	130.346.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	148.191.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali									8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	242.695.000	247.424.000	249.424.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	217.350.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				27 kali	27 kali									27 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah Fasilitasi Peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakanJumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan rembug Stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				36 buah	36 buah									36 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				54 RT/RW	54 RT/RW									54 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				23 box	23 box									23 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**552.388.000**	**562.161.000**	**558.999.000**							**12.500.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**552.388.000**	**562.161.000**	**558.999.000**						100 persen	**12.500.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**552.388.000**	**562.161.000**	**558.999.000**						100 persen	**12.500.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	215.608.000	250.808.000	243.748.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	5 kali									5 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah lokasi makam yang diurug				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah lokasi tembok makam yang dibangun				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi				3 lokasi	3 lokasi									3 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	324.280.000	298.853.000	302.751.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Masyarakat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan				Barat, Sapuro Kebulen	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				48 kali	48 kali									48 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Kader Tanggap Bencana yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Multimedia yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas LKK yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT dan Vitamin				24 buah	24 buah									24 buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang diadakan																
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				76 kali	77 kali									77 kali		
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				2 RT	3 RT									3 RT		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				56 box	56 box									56 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**623.048.000**	**667.858.000**	**659.518.000**							**491.087.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**623.048.000**	**667.858.000**	**659.518.000**						100 persen	**491.087.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 Persen	**623.048.000**	**667.858.000**	**659.518.000**						100 Persen	**491.087.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun					1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	235.608.000	271.808.000	261.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	masyarakat	12 bulan	99.107.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				3 lokasi	3 lokasi									3 lokasi		
		Jumlah Pos Kampling yang dibangun				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Posyandu yang difasilitasi Hibah sarpras				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				5 RT	5 RT									5 RT		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarpras Posbindu yang diadakan				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi					1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah tempat sampah yang diadakan				25 Unit	25 Unit									25 Unit		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	374.940.000	383.550.000	385.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	12 bulan	379.480.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				54 kali	54 kali									54 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan					2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan Penguatan kapasitas kelembagaan LKK yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		jumlah kegiatan senam PKK yang dilaksanakan				30 kali	30 kali									30 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun					1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Pelatihan pengolahan barang bekas dari limbah rumah tangga yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				102 buah	102 buah									102 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					118 kali									118 kali		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				23 box	23 box									23 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**545.896.000**	**548.013.000**	**539.681.000**							**549.886.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**545.896.000**	**548.013.000**	**539.681.000**						100 persen	**549.886.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**545.896.000**	**548.013.000**	**539.681.000**						100 persen	**549.886.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	131.246.000	132.446.000	122.114.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	110.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	402.150.000	403.067.000	405.067.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	427.386.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				54 Kali	54 Kali									54 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelatihan SDM LKK kelurahan Pasirkratonkramat sesuai dengan Perwal 63 tahun 2021 tentang LKK yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan stunting bagi warga kelurahan Pasirkratonkramat yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT yang diadakan				294 buah	294 buah									294 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				112 RT/RW	112 RT/RW									112 RT/RW		
		Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras				1 RT	1 RT									1 RT		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**576.515.000**	**576.047.000**	**629.207.000**							**505.215.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**576.515.000**	**576.047.000**	**629.207.000**						100 persen	**505.215.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**576.515.000**	**576.047.000**	**629.207.000**						100 persen	**505.215.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	185.608.000	176.808.000	226.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	148.113.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				2 Lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				2 RT	2 RT									2 RT		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah RW yang difasilitasi hibah sarpras				1 RW	1 RW									1 RW		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	378.407.000	386.739.000	390.239.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	344.602.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				60 Kali	60 Kali									60 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelatihan pemasaran online yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan				1 laporan	1 laporan									1 laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun																
		Jumlah pelatihan taboga yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				90 buah	90 buah									90 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					120 RT/RW									120 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**9.529.576.000**	**10.714.920.000**	**10.760.363.000**							**9.909.710.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.220.513.000**	**10.412.813.000**	**10.480.916.000**						100 persen	**9.422.330.000**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**122.500.000**	**122.500.000**	**122.500.000**						100 persen	**112.570.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 dokumen	10.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 dokumen	7.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	116.000.000	116.000.000	116.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	95.570.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Perangkat Daerah pada Kelurahan Gamer																
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**7.269.779.000**	**7.308.179.000**	**7.443.445.000**						100 persen	**7.780.984.000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	14 kali	7.065.479.000	7.065.479.000	7.200.745.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	14 kali	7.743.984.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	201.300.000	239.700.000	239.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	34.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.500.000**	**12.000.000**	**12.000.000**						100 persen	**18.489.000**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	1 kali	16.500.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	1 kali	18.489.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**485.670.000**	**617.970.000**	**532.192.000**						100 persen	**398.134.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	208.435.000	324.935.000	241.157.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	131.134.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan Pekalongan Timur				5 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Gamer				3 unit	3 unit									3 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kalibaros				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kauman				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Klego				5 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Noyontaansari				5 unit	5 unit									5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Poncol				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Setono				12 unit	12 unit									12 unit		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Pncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan Pekalongan Timur				11 bulan	11 bulan	185.635.000	196.435.000	194.435.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	11 bulan	185.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Gamer				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kalibaros				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kauman				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Klego				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Noyontaansari				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Poncol				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Setono				11 bulan	11 bulan									11 bulan		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	32.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kecamatan Pekalongan Timur									Timur, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kalibaros					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	16.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kauman																
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				7 orang/kali	7 orang/kali	12.500.000	17.500.000	17.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	7 orang/kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.043.308.000**	**1.089.408.000**	**1.106.808.000**						100 persen	**896.152.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kelurahan Noyontaansari																
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	101.430.000	101.430.000	118.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	85.605.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan daJumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan	931.378.000	977.478.000	977.478.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	800.047.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		kantor pada Kecamatan Pekalongan Timur																
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**282.756.000**	**1.262.756.000**	**1.263.971.000**						100 persen	**216.001.000**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JJumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan	165.256.000	165.256.000	165.256.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	141.001.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kelurahan Kalibaros																
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Timur				2 unit	2 unit	72.500.000	1.052.500.000	1.052.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 Unit	45.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Gamer				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kalibaros				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kauman				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Klego				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Noyontaansari				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Poncol				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Setono				1 Unit	1 Unit									1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	46.215.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	30.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**12.000.000**	**12.000.000**	**14.800.000**						100,00 persen	**49.672.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**0**	**0**	**4.000.000**						100 persen	**31.072.000**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	jumlah kelurahan yang dibina tertib administrasinya				7 keluraha	7 kelurahan	-	0	4.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Kelurahan	7 keluraha	31.072.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					n					Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		n		Timur
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**12.000.000**	**12.000.000**	**10.800.000**						100 persen	**18.600.000**	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	12.000.000	12.000.000	10.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**119.943.000**	**129.943.000**	**110.283.000**						100 persen	**228.848.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**17.563.000**	**17.563.000**	**14.943.000**						100 persen	**17.563.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	17.563.000	17.563.000	14.943.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	17.563.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**19.880.000**	**29.880.000**	**25.540.000**						100 persen	**99.942.000**	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK				12 bulan	12 bulan	19.880.000	29.880.000	25.540.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	99.942.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				2 kali	1 kali									1 kali		
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**82.500.000**	**82.500.000**	**69.800.000**						100 persen	**111.343.000**	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	82.500.000	82.500.000	69.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Masyarakat	12 bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat				4 kali	4 kali									4 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	kecamatan yang dilaksanakan									Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanaka				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**168.920.000**	**151.964.000**	**146.164.000**						100,00 persen	**202.500.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**168.920.000**	**151.964.000**	**146.164.000**						100 persen	**202.500.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 hari	25 hari	168.920.000	151.964.000	146.164.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	25 hari	202.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan				52 kali	52 kali									52 kali		
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				36 kali	36 kali									36 kali		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**8.200.000**	**8.200.000**	**8.200.000**						100,00 persen	**6.360.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**8.200.000**	**8.200.000**	**8.200.000**						100 persen	**6.360.000**	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	8.200.000	8.200.000	8.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	6.360.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**542.123.000**	**560.137.000**	**562.137.000**							**505.512.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**542.123.000**	**560.137.000**	**562.137.000**						100 persen	**505.512.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**542.123.000**	**560.137.000**	**562.137.000**						100 persen	**505.512.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kelurahan																	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	90.722.100	91.623.000	91.623.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	92.217.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	8 Kali									8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang direhab				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	438.900.900	456.014.000	458.014.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	400.795.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				54 Kali	54 Kali									54 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah Kegiatan Rembuk Stunting					1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah pelatihan EKOPRINT yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah pelatihan tata rias yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				66 buah	66 buah									66 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				126 RT/RW	126 RT/RW									126 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				180 box	180 box									180 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**626.141.000**	**569.522.000**	**561.182.000**							**427.135.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**626.141.000**	**569.522.000**	**561.182.000**						100 persen	**427.135.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**626.141.000**	**569.522.000**	**561.182.000**						100 persen	**427.135.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahanJumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	168.246.000	169.446.000	159.106.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	138.873.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali									8 kali		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi pembangunan gapura dan pengadaan gerobak sampah				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	445.395.000	387.576.000	389.576.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	275.762.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				29 kali	29 kali									29 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Lembaga yang difasilitasi hibah sarpras				1 Lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
		Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah pelatihan marketing online yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				377 buah	377 buah									377 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				82 RT/RW	82 RT/RW									82 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				45 box	45 box									45 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**427.975.000**	**446.014.000**	**437.674.000**							**373.914.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**427.975.000**	**446.014.000**	**437.674.000**						100 persen	**373.914.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**427.975.000**	**446.014.000**	**437.674.000**						100 persen	**373.914.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	155.608.000	156.808.000	146.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat	12 Bulan	82.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	8 Kali					Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				1 RT	1 RT									1 RT		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	259.867.000	276.706.000	278.706.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	279.414.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan				Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego					12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				24 Kali	24 Kali									24 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Senam Sehat yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Tentang Kebersihan Lingkungan dan Penanganan Sampah yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				651 Bulan	651 Bulan									651 Bulan		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah Rembuk Stunting					1 kali									1 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				63 RT/RW	63 RT/RW									63 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**348.843.000**	**342.386.000**	**344.386.000**							**348.843.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**348.843.000**	**342.386.000**	**344.386.000**						100 persen	**348.843.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**348.843.000**	**342.386.000**	**344.386.000**						100 persen	**348.843.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah				12 bulan	12 bulan	117.858.000	119.058.000	119.058.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Masyarakat	12 bulan	117.858.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		kelurahan									Timur, Gamer	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali									8 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				4 lokasi	4 lokasi									4 lokasi		
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi hibah sarpras alat tensi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	218.485.000	210.828.000	212.828.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	218.485.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				27 kali	27 kali									27 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan				2 kali	2 kali									2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan																
		Jumlah Kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan bagi warga gamer yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah pelatihan menjahit yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				12 buah	12 buah									12 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah Rembuk Stunting					1 kali									1 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				42 RT/RW	42 RT/RW									42 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box									35 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**676.513.000**	**670.946.000**	**662.606.000**							**404.302.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	**676.513.000**	**670.946.000**	**662.606.000**						100 persen	**404.302.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	**676.513.000**	**670.946.000**	**662.606.000**						100 persen	**404.302.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi				12 Bulan	12 Bulan	325.608.000	326.778.000	316.438.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Masyarakat	12 Bulan	97.515.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kelurahan	pembangunan wilayah kelurahan									Pekalongan Timur, Noyontaansari	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				3 Lokasi	3 Lokasi									3 Lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi Hibah Sarpras				5 Lokasi	5 Lokasi									5 Lokasi		
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi Pembangunan Gapura				2 Lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	338.405.000	331.668.000	333.668.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	294.287.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				42 Kali	42 Kali									42 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah kegiatan rakor					1 kali									1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		rembug stunting																
		Jumlah kegiatan sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan sosialisasi pengolahan sampah yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan sosialisasi TB yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				1890 buah	1890 buah									1890 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				74 RT/RW	74 RT/RW									74 RT/RW		
		Jumlah strip kolestrol,, jarum dan swab alkohol yang diadakan				269 Box	269 Box									269 Box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**664.448.000**	**739.313.000**	**730.973.000**							**445.387.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**664.448.000**	**739.313.000**	**730.973.000**						100 persen	**445.387.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**664.448.000**	**739.313.000**	**730.973.000**						100 persen	**445.387.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	273.291.000	335.391.000	325.051.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	77.638.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman				8 kali	8 kali									8 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		(KOTAKU) yang dilaksanakan																
		Jumlah gapura yang dibangun				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi yang difasilitasi hibah sarpras				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	378.657.000	391.422.000	393.422.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	355.249.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				45 kali	45 kali									45 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun																
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				126 DOS	126 DOS									126 DOS		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah Rembuk Stunting					1 kali									1 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				93 RT/RW	93 RT/RW									93 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				63 box	63 box									63 box		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**							**435.392.000**	**476.284.000**	**478.284.000**							**695.946.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**435.392.000**	**476.284.000**	**478.284.000**						100 persen	**695.946.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**435.392.000**	**476.284.000**	**478.284.000**						100 persen	**695.946.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat, RT/RW, Kelompok Senam, LPM, BKM, PKK, Karang Taruna, FKSS, Kelompok Tani, Baduta Stunting	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah APAR terisi				1 paket	1 paket	178.608.000	204.808.000	204.808.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat, RT/RW, Kelompok Senam, LPM, BKM, PKK, Karang Taruna, FKSS, Kelompok Tani, Baduta Stunting	1 paket	306.865.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali									8 kali		
		Jumlah lokasi jembatan yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah lokasi MCK yang				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		diperbaiki																
		Jumlah RT / RW yang difasilitasi hibah sarpras				4 RT/RW	4 RT/RW									4 RT/RW		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	244.284.000	258.976.000	260.976.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat, RT/RW, Kelompok Senam, LPM, BKM, PKK, Karang Taruna, FKSS, Kelompok Tani, Baduta Stunting	12 bulan	374.081.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bakti lingkungan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan rembug stunting yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah kelompok yang difasilitasi senam sehat				2 kelompok	2 kelompok									2 kelompok		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				186 buah	186 buah									186 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				4 kali	6 kali									6 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				46 RT/RW	46 RT/RW									46 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				73 box	73 box									73 box		
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.874.400.000**	**6.788.475.000**	**6.434.383.000**							**3.502.637.000**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**2.304.517.000**	**2.282.692.000**	**2.108.302.000**						100 persen	**1.886.872.000**	
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100.00 Persen	100.00 Persen									100.00 Persen		
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**						100 persen	**10.902.000**	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	2 dokumen	2.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	2 dokumen	1.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Badan Kesbangpol	12 bulan	6.902.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Publik	pelayanan publik.				
		jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP yang disusun (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemanatauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.795.706.000**	**1.800.506.000**	**1.643.130.000**						100 persen	**1.672.501.000**	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	1.760.306.000	1.760.306.000	1.601.130.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	14 kali	1.638.001.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	33.900.000	38.700.000	40.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	12 bulan	33.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	1 dokumen	1.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**9.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100 persen	**9.500.000**	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	1 kali	9.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**113.800.000**	**150.799.000**	**135.185.000**						100 persen	**93.416.000**	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan				12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Kesbangpol	12 bulan	3.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	kantor									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	30.000.000	46.033.000	24.058.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				1 unit	1 unit									1 unit		
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	4.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	11 bulan	18.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	8.300.000	8.300.000	8.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	8.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	2.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				58 orang/kali	58 orang/kali	50.000.000	70.966.000	77.327.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	58 orang/kali	27.116.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**310.632.000**	**251.508.000**	**251.508.000**						100 persen	**60.419.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	1.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	29.600.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	29.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	280.032.000	200.508.000	200.508.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	29.819.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**58.879.000**	**58.879.000**	**57.479.000**						100 persen	**40.134.000**	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	42.879.000	42.879.000	41.679.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	24.134.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	8.000.000	8.000.000	7.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	1 unit	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**1.255.849.000**	**1.892.149.000**	**1.819.249.000**						100,00 persen	**321.633.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.255.849.000**	**1.892.149.000**	**1.819.249.000**						100 persen	**321.633.000**	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan karakter kebangsaan bagi aparatur yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	42.850.000	517.850.000	517.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	3 kali	40.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah kegiatan pembinaan Paskibraka Kota Pekalongan untuk 70 orang				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					0 Orang	232.372.000	292.272.000	281.372.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	0 Orang	140.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pembinaan korp musik yang dilaksanakan				25 kali	20 kali									20 kali		
		jumlah upacara tingkat kota yang dilaksanakan				15 kali	15 kali									15 kali		
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					0 Keluarga	980.627.000	1.082.027.000	1.020.027.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	0 Keluarga	100.533.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat dan Generasi Muda yang dilaksanakan				2674 orang	2548 orang									2548 orang		
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga		16,00 lembaga	16,00 lembaga	16,00 lembaga	**1.230.743.000**	**1.221.943.000**	**1.166.372.000**						16,00 lembaga	**856.583.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1.230.743.000**	**1.221.943.000**	**1.166.372.000**						100 persen	**856.583.000**	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Parpol				9 parpol	9 parpol	769.900.000	769.900.000	764.697.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Parpol, Masyarakat	9 parpol	774.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					0 Orang	460.843.000	452.043.000	401.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Parpol, Masyarakat	0 Orang	81.883.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah sekolah yang difasilitasi sosialisasi pendidikan politik				30 Sekolah	30 Sekolah									30 Sekolah		
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**665.000.000**	**680.000.000**	**695.000.000**						100,00 persen	**136.283.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan**	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**665.000.000**	**680.000.000**	**695.000.000**						100 persen	**136.283.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	pengawasan organisasi kemasyarakatan																
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kelembagaan ormas yang dibina				7 lembaga/ ormas	21 lembaga/ ormas	665.000.000	680.000.000	695.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Ormas	21 lembaga/ ormas	136.283.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					180 Orang									180 Orang		
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen		100 persen	100,00 persen	100,00 persen	**363.193.000**	**620.593.000**	**562.403.000**						100,00 persen	**209.693.000**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**363.193.000**	**620.593.000**	**562.403.000**						100 persen	**209.693.000**	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	363.193.000	620.593.000	562.403.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	ormas, masyarakat	0 Orang	209.693.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		jumlah sosialisasi FORKOMKON dan pembinaan ormas yang dilaksanakan				6 kali	6 kali									6 kali		
		jumlah sosialisasi kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan				17 kali	17 kali									17 kali		
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN**	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	**55.098.000**	**91.098.000**	**83.057.000**						100,00 persen	**91.573.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**55.098.000**	**91.098.000**	**83.057.000**						100 persen	**91.573.000**	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	55.098.000	91.098.000	83.057.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, dan Masyarakat	4 dokumen	91.573.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					45 Orang									45 Orang		
		jumlah sosialisasi pemahaman kewaspadaan dini yang dilaksanakan				2 kali	1 kali									1 kali		
		jumlah sosialisasi pemahaman penanganan konflik sosial yang dilaksanakan				2 kali	1 kali									1 kali		
TOTAL								**1.029.014.024.000**	**1.008.395.478.000**	**1.060.070.466.000**							**1.058.177.281.162**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pekalongan bertambah sebesar Rp.51.674.988.000 dari semula Rp.1.008.395.478.000 (APBD Penetapan) menjadi Rp.1.060.070.466.000 (Perubahan RKPD). Kerangka pendanaan untuk tahun 2023 secara lengkap disajikan dalam Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PENDAPATAN DAERAH	**990.014.024.000**	**967.818.978.000**	**1.008.849.238.000**	**18.835.214.000**	**41.030.260.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**242.248.392.000**	**240.805.592.000**	**249.829.667.710**	**7.581.275.710**	**9.024.075.710**
Pajak Daerah	97.750.000.000	99.450.000.000	100.200.000.000	2.450.000.000	750.000.000
Retribusi Daerah	24.867.002.000	21.674.202.000	21.983.402.000	-2.883.600.000	309.200.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.473.378.000	6.473.378.000	6.604.200.000	130.822.000	130.822.000
Lain-lain PAD yang Sah	113.158.012.000	113.208.012.000	121.042.065.710	7.884.053.710	7.834.053.710
PENDAPATAN TRANSFER	**747.765.632.000**	**724.763.386.000**	**756.769.570.290**	**9.003.938.290**	**32.006.184.290**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**637.762.334.000**	**652.383.034.000**	**651.645.019.290**	**13.882.685.290**	**-738.014.710**
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.676.925.000	29.844.124.000	31.088.726.000	2.411.801.000	1.244.602.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000	447.688.903.000	447.688.903.000	21.289.165.000	0
Dana Alokasi Khusus	177.989.411.000	164.905.768.000	162.923.151.290	-15.066.259.710	-1.982.616.710
Dana Insentif Daerah	4.696.260.000	9.944.239.000	9.944.239.000	5.247.979.000	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**110.003.298.000**	**72.380.352.000**	**105.124.551.000**	**-4.878.747.000**	**32.744.199.000**
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	74.045.298.000	72.380.352.000	82.064.551.000	8.019.253.000	9.684.199.000
Bantuan Keuangan Provinsi	35.958.000.000	0	23.060.000.000	-12.898.000.000	23.060.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0**	**2.250.000.000**	**2.250.000.000**	**2.250.000.000**	**0**

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
Pendapatan Hibah	0	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	0
BELANJA	**1.029.014.024.000**	**1.008.395.478.000**	**1.060.070.466.000**	**31.056.442.000**	**51.674.988.000**
BELANJA OPERASI	**844.598.845.529**	**853.904.211.000**	**880.901.275.000**	**36.302.429.471**	**26.997.064.000**
Belanja Pegawai	405.194.236.500	402.374.077.000	401.689.577.000	-3.504.659.500	-684.500.000
Belanja Barang dan Jasa	413.908.124.887	419.190.116.000	438.694.127.000	24.786.002.113	19.504.011.000
Belanja Hibah	21.574.310.142	29.205.077.000	38.069.966.000	16.495.655.858	8.864.889.000
Belanja Bantuan Sosial	3.922.174.000	3.134.941.000	2.447.605.000	-1.474.569.000	-687.336.000
BELANJA MODAL	**179.440.178.471**	**150.661.267.000**	**174.169.191.000**	**-5.270.987.471**	**23.507.924.000**
Belanja Modal Tanah	3.132.548.000	3.205.785.000	3.375.350.000	242.802.000	169.565.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.196.533.471	40.259.231.000	40.313.856.000	10.117.322.529	54.625.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.614.107.150	57.851.865.000	55.854.513.000	-2.759.594.150	-1.997.352.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.794.159.206	46.413.735.000	72.330.088.000	-10.464.071.206	25.916.353.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.702.830.644	2.930.651.000	2.295.384.000	-2.407.446.644	-635.267.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**4.975.000.000**	**3.780.000.000**	**5.000.000.000**	**25.000.000**	**1.220.000.000**
Belanja Tidak Terduga	4.975.000.000	3.780.000.000	5.000.000.000	25.000.000	1.220.000.000
BELANJA TRANSFER	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**-50.000.000**
Belanja Bantuan Keuangan	0	50.000.000	0	0	-50.000.000
PEMBIAYAAN	**39.000.000.000**	**40.576.500.000**	**51.221.228.000**	**12.221.228.000**	**10.644.728.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**48.000.000.000**	**51.826.500.000**	**63.121.328.575**	**15.121.328.575**	**11.294.828.575**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.000.000.000	51.826.500.000	63.120.549.575	15.120.549.575	11.294.049.575
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	779.000	779.000	779.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**9.000.000.000**	**11.250.000.000**	**11.900.100.575**	**2.900.100.575**	**650.100.575**
Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	6.650.100.575	650.100.575	650.100.575
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000	2.250.000.000	0

Sumber: Bappeda, BPKAD Kota Pekalongan, 2023

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun guna mengakomodir dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan kebijakan Pusat maupun Provinsi, perkembangan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Penyesuaian dilakukan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Selanjutnya, Perubahan RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Tahun 2023.

Akhirnya, Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 28 Juli 2023

WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023.

www.pekalongankota.bps.go.id, 2023.

www.bps.go.id, 2023.

BAPPEDA
Membangun
Bersama
Masyarakat

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

City Of Crafts and Folk Art

Kota Pekalongan
Designed UNESCO
Creative City In 2014

Pekalongan
World's City of Batik